



P U T U S A N
No. 926 K/PID.SUS/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **JORNAL EFFENDI SIAHAAN** ;
tempat lahir : Balige ;
umur / tanggal lahir: 56 tahun/01 Desember 1953 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Rawa Bambu I No.21 A, RT.007, RW 006, Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan;
agama : Kristen ;
pekerjaan : Mantan Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta ;

Terdakwa berada di dalam tahanan ;

1. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 19 Maret 2010 sampai dengan tanggal 7 April 2010 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi sejak tanggal 8 April 2010 sampai dengan tanggal 17 Mei 2010 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (I) sejak tanggal 18 Mei 2010 sampai dengan tanggal 16 Juni 2010 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (II) sejak tanggal 17 Juni 2010 sampai dengan tanggal 16 Juli 2010 ;
5. Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi sejak tanggal 12 Juli 2010 sampai dengan tanggal 31 Juli 2010 ;
6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sejak tanggal 22 Juli 2010 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2010 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sejak tanggal 21 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2010 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi (I) sejak tanggal 20 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 18 November 2010 ;

Hal. 1 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi (II) sejak tanggal 19 November 2010 sampai dengan tanggal 18 Desember 2010 ;
10. Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi sejak tanggal 25 November 2010 sampai dengan tanggal 24 Desember 2010 ;
11. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi sejak tanggal 25 Desember 2010 sampai dengan tanggal 22 Februari 2011 ;
12. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No. 449/2011/S.217.TAH.SUS/PP/2011/MA tanggal 09 Maret 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 Februari 2011 sampai dengan tanggal 11 April 2011;
13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No. 450/2011/S.217.TAH.SUS/PP/2011/MA tanggal 09 Maret 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, sejak tanggal 12 April 2011;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa :

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa JORNAL EFFENDI SIAHAAN baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan AGUSDIN SUSANTO, R. NORMAN, HERMAN FELANI, RAJ INDRA SINGH, RINA MELANIA PRIYATNA, YUSYAPRIA UTAMA, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara bulan Juni 2006 sampai dengan Desember 2007 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2006 sampai dengan tahun 2007, bertempat di kantor Biro Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Propinsi DKI Jakarta Jalan Medan Merdeka Selatan No. 8-9 Jakarta Pusat atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang berdasarkan Pasal 5 jo Pasal 34 huruf a Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang *Pengadilan Tindak Pidana Korupsi* jo Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, secara melawan hukum yaitu secara bertentangan dengan Undang-Undang

Hal. 2 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 17 Tahun 2003 tentang *Keuangan Negara* Jo Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang *Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 dalam Pengadaan Jasa Filler Hukum dan Gema Hukum Tahun Anggaran 2006 dan 2007 pada Biro Hukum Setda Propinsi DKI Jakarta dan bertentangan dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah* Jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang *Pedoman, Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah* dalam menggunakan anggaran kegiatan honorarium, transport dan makan ahli untuk tujuan atau kegiatan selain yang telah ditetapkan di dalam APBD 2006 dan 2007 pada Biro Hukum Setda Propinsi DKI Jakarta, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu telah memperkaya Terdakwa atau orang lain yaitu BAHIR ROMSAH, MADE SUARJAYA, BUDI HARTONO, Dr. RITOLA TASMAYA, MPH, AGUSDIN SUSANTO, SRI ASTUTI. R, SH, MANSYUR MAHMUD, SH, H. MOERDIMAN, RM, SH, MSi, RAHMAT, SH, MANGATUR.P, SH, ENDANG SRI RAHAYU, ISMIYATUN, SH, OR. ZAKARIAS, SH, ENDANG SUMARDI, SH, RADIAH, SH, KAROLIS SIMATUPANG, SH, MH, MUKHLIS, SH, ROMY PURNAMA, SAUT PURBA, SH, RINA MELANIA PRIYATNA atau PT. Anugrah Cipta Pratama, RAJ INDRA SINGH dan HERMAN FELANI atau PT. Raditya Putra Bahtera, YUSYAPRIA UTAMA atau PT. Adila Jaya Sukses, YUSYAPRIA UTAMA atau PT. Trendeka Lestari, HERMAN FELANI atau CV. Sandi Perkasa serta beberapa pegawai pada Biro Hukum Setda Propinsi DKI Jakarta lainnya, yang dapat merugikan keuangan negara yaitu merugikan keuangan Daerah Propinsi DKI Jakarta sebesar Rp.11.218.722.379,- (*sebelas milyar dua ratus delapan belas juta tujuh ratus dua puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah*) atau setidaknya tidaknya sejumlah itu, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- I. Pengadaan Filler Hukum yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2006.
 - Terdakwa sebagai Kepala Biro Hukum Setda Propinsi DKI Jakarta dan atau sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Biro Hukum Setda Propinsi DKI Jakarta yang mengetahui bahwa Biro Hukum Setda Propinsi DKI Jakarta mendapat alokasi anggaran pengadaan Filler Hukum (iklan tentang penegakan hukum) sebesar Rp 1.228.500.000,-

Hal. 3 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu milyar dua ratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang bersumber dari APBD Propinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2006, pada bulan Juli 2006 mengadakan rapat di ruang kerja Biro Hukum dengan para Kepala Bagian (Kabag) pada Biro Hukum Setda Propinsi DKI Jakarta yaitu R. NORMAN, NOERWENDA, AGUSDIN SUSANTO dan SRI RAHAYU yang dihadiri pula oleh BAHIR ROMSAH selaku Pemegang Kas Cabang (PKC)/ Bendahara Biro Hukum, dimana dalam pertemuan tersebut Terdakwa memberikan perintah agar setiap kegiatan pada Biro Hukum di masing-masing bagian melakukan pemotongan anggaran sebesar 10% setelah dipotong pajak dan hasil pemotongan tersebut dikumpulkan di PKC atau Bendahara Biro Hukum;

- Dalam pertemuan tersebut Terdakwa mendapat laporan dari R. NORMAN selaku Kepala Bagian (Kabag) Dokumentasi dan Publikasi Hukum bahwa dalam pengadaan Filler Hukum, DEDED SUKANDAR selaku pejabat Kepala Biro Hukum yang lama telah memilih PT. Fortune Indonesia sebagai pelaksana atau pemenang. Untuk itu Terdakwa memerintahkan R. NORMAN agar menghadapkan pimpinan PT. Fortune Indonesia kepada Terdakwa, dimana setelah rapat di ruang kerja Biro Hukum pihak PT. Fortune Indonesia yaitu ARIS BOEDIARJO selaku Chief Operating Officer dan RINA MELANIA PRIYATNA selaku Senior Account Executive menghadap kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada ARIS BOEDIARJO dan RINA MELANIA PRIYATNA menyetujui ARIS BOEDIARJO mengerjakan proyek Filler Hukum ;
- Menindaklanjuti perintah Terdakwa, R. NORMAN memanggil MADE SUARJAYA selaku Ketua Panitia Lelang Pengadaan Tahun 2006 pada Biro Hukum dan memerintahkan agar Panitia Lelang dalam pengadaan Filler Hukum membantu memenangkan penyedia barang yang telah ditentukan dan disetujui oleh Terdakwa yaitu PT. Fortune Indonesia, untuk itu Panitia Lelang dalam membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pada Pengadaan Filler Hukum dan proses lelang diarahkan untuk memenangkan PT. Fortune Indonesia dengan cara menyamakan HPS dengan acuan harga yang dibuat oleh pihak PT. Fortune Indonesia ;
- Pada tanggal 12 Oktober 2006, Panitia Lelang mengadakan pengumuman lelang di Harian Terbit Jakarta, karena klasifikasi yang diinginkan merupakan perusahaan K (Kecil)/non besar sedangkan PT.

Hal. 4 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fortune Indonesia termasuk dalam perusahaan klasifikasi B (Besar), maka PT. Fortune tidak jadi didaftarkan sebagai peserta lelang dan digantikan dengan PT. Anugrah Cipta Pratama Prima yang didaftarkan oleh RINA MELANIA PRIYATNA pada tanggal 14 Oktober 2006. Beberapa hari kemudian RINA MELANIA PRIYATNA mendaftarkan 6 (enam) perusahaan disertai dengan kuasa dari perusahaan tersebut sebagai formalitas untuk mendampingi PT. Anugrah Cipta Pratama Prima sebagai peserta lelang Filler Hukum yaitu CV. Sinar Azka, CV. Hongga Jaya, CV. Poly Lestari, CV. Salsabila, CV. Buana Permai dan CV. Mandiri Jaya Abadi ;

- Pada tanggal 19 Oktober 2006 dilakukan *aanwijzing* (penjelasan lelang) kepada peserta lelang dan pemasukan dokumen tanggal 20 Oktober 2006, namun hanya dihadiri oleh RINA MELANIA PRIYATNA dan SYAFRUDDIN masing-masing selaku wakil dari PT. Anugrah Cipta Pratama Prima dan CV. Salsabila, kemudian MADE SUARJAYA meminta RINA MELANIA PRIYATNA untuk menjilid seluruh dokumen *aanwijzing* serta meminta tanda tangan peserta lainnya yang tidak hadir dan melengkapi berkas pemasukan dokumen bagi peserta yang tidak hadir, sehingga secara formal nampak peserta yang lainnya seolah-olah hadir dalam acara *aanwijzing* maupun pemasukan dokumen ;
- Terdakwa pada tanggal 30 Oktober 2006 menetapkan HPS dengan nilai Rp.990.412.500,- (*sembilan ratus sembilan puluh juta empat ratus dua belas ribu lima ratus rupiah*), yang disusun oleh MADE SUARJAYA selaku Ketua Panitia Lelang hanya berdasarkan patokan harga yang dibuat oleh ARIS BOEDIARJO namun isinya telah diformalkan menjadi lampiran surat Nomor 3359/073/532 tanggal 16 Agustus 2006 dari Biro Perlengkapan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta yang telah menyebutkan acuan nilai sama dengan HPS yang disusun oleh MADE SUARJAYA ;
- Pada tanggal 31 Oktober 2006 dilakukan pembukaan dokumen sampul I dan tanggal 1 Nopember 2006 pembukaan Surat Penawaran Harga sampul II, namun kedua proses tersebut juga hanya dihadiri oleh RINA MELANIA PRIYATNA dan SYAFRUDDIN, sedangkan kelengkapan formalitas dokumen bagi peserta yang tidak hadir atas permintaan MADE SUARJAYA dilengkapi oleh RINA MELANIA PRIYATNA sehingga peserta yang tidak hadir seolah-olah nampak hadir. Setelah dilakukan evaluasi oleh Panitia Lelang, PT. Anugrah Cipta Pratama

Hal. 5 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prima yang sejak awal diatur sebagai pemenang, mengajukan Surat Penawaran Harga sama dengan nilai HPS yang dibuat oleh Panitia Lelang sedangkan peserta lain, penawarannya dibuat lebih tinggi dari HPS panitia sehingga PT. Anugrah Cipta Pratama diusulkan sebagai pemenang lelang oleh Panitia Lelang kepada Terdakwa selaku Kepala Biro Hukum ;

- Terdakwa pada tanggal 9 Nopember 2006 menandatangani Surat Keputusan (SK) Nomor 719/A/077.92 tanggal 9 Nopember 2006 yang berisi penetapan PT.Anugrah Cipta Pratama Prima sebagai pemenang lelang dalam pengadaan jasa filler Biro Hukum Setda Propinsi DKI Jakarta 2006 ;
- Setelah penetapan PT.Anugrah Cipta Pratama sebagai pemenang lelang, R. NORMAN mengingatkan RINA MELANIA PRIYATNA yang sebelumnya telah diberitahu oleh INDRAWATI S. DANI tentang komitmen untuk memenuhi permintaan Terdakwa adanya kewajiban pemenang lelang menyetorkan uang sebesar 10% dari nilai kontrak setelah dipotong pajak kepada Bendahara Biro Hukum ;
- Terdakwa pada tanggal 17 Nopember 2006 dan ASEP YUDI PRIADI selaku Direktur Utama PT.Anugrah Cipta Pratama Prima menandatangani Surat Perjanjian Pelelangan Umum Pengadaan Jasa Filler Hukum Setda Propinsi DKI Jakarta dengan jenis pekerjaan berupa pembuatan iklan layanan masyarakat untuk busway dan kawasan dilarang merokok serta penayangan pada 2 (dua) media TV meliputi stasiun TV swasta sebanyak 268 (dua ratus enam puluh delapan) kali tayang (spot) @ 30 (tiga puluh) detik senilai Rp 990.412.500,- (*sembilan ratus sembilan puluh juta empat ratus dua belas ribu lima ratus rupiah*) yang dituangkan ke dalam Surat Perjanjian Nomor 746/077.5 tanggal 17 Nopember 2006 ;
- Pada tanggal 14 Desember 2006 atas permintaan INDRAWATI S. DANI, Panitia Pemeriksaan Barang/Jasa BUDI HARTONO menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang (BAPB) Nomor 37/BAPB/BH/XII/2006 tanggal 14 Desember 2006 tanpa terlebih dahulu melakukan pengecekan atas penayangan filler hukum yang pengadaannya dilakukan oleh PT.Anugrah Cipta Pratama Prima, namun hanya melihat pemutaran CD yang diberikan oleh INDRAWATI S. DANI berjudul *BUSWAY DAN KAWASAN DILARANG MEROKOK* serta *KETERTIBAN BERLALU LINTAS DAN KEBERSIHAN*

Hal. 6 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LINGKUNGAN Post Transmission dari PT. Indosiar Visual Mandiri, kemudian pada tanggal yang sama dibuat Berita Acara serah Terima Barang dari ASEP YUDI PRIADI selaku Direktur Utama PT. Anugrah Cipta Pratama Prima kepada Pengurus Barang Unit Biro Hukum IRUSWANDI ;

- Terdakwa pada tanggal 20 Desember 2006 menandatangani dokumen Daftar Rincian Rencana Penggunaan Beban Tetap Nomor 187/SPP/2006 tanggal 19 Desember 2006 yang akan digunakan oleh Asisten Keuangan selaku Pemegang Kas Setda Propinsi DKI Jakarta sebagai dasar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah (KPKD) untuk rekanan PT. Anugrah Cipta Pratama Prima ;
- Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan oleh Asisten Keuangan Setda Propinsi DKI Jakarta Nomor 2600/SPP/SWD/BB/XII/2006 tanggal 19 Desember 2006, PT. Anugrah Cipta Pratama Prima menerima pencairan uang dalam pengadaan Filler Hukum tahun 2006 setelah dipotong Pajak (PPH, PPN), sebesar Rp 846.352.500,- (*delapan ratus empat puluh enam juta tiga ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah*) yang dicairkan langsung ke rekening PT. Anugrah Cipta Pratama Prima pada Bank Ekonomi Raharja Cabang Cibubur nomor rekening 2191866561 ;
- Setelah PT. Anugrah Cipta Pratama Prima menerima pembayaran dalam pengadaan filler hukum sebesar Rp.846.352.500,- (*delapan ratus empat puluh enam juta tiga ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah*) tersebut Terdakwa menerima hadiah atau imbalan berupa uang sebagaimana yang diminta oleh Terdakwa sebesar Rp.191.557.000,- (*seratus sembilan puluh satu juta lima ratus lima puluh tujuh rupiah*) melalui R. NORMAN yang terbagi menjadi 4 (empat) amplop, yang masing-masing amplop telah bertuliskan tujuan penerima amplop yaitu:
 1. Untuk Kas Biro sebesar Rp.84.630.000,-. (*delapan puluh empat juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah*) ;
 2. Untuk Panitia Pemeriksa Barang sebesar Rp.16.927.000,-. (*enam belas juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah*)
 3. Untuk bagian Dokumentasi dan Publikasi Hukum sebesar Rp.75.000.000,- (*tujuh puluh lima juta rupiah*).
 4. Untuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa sebesar Rp.15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*)

Hal. 7 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keempat amplop yang berisi uang tersebut oleh R. NORMAN diserahkan kepada PANITYONO, selanjutnya oleh PANITYONO amplop yang bertuliskan untuk bagian Dokumentasi & Publikasi Hukum sebesar Rp.75.000.000,- (*tujuh puluh lima juta rupiah*) disimpan di dalam brankas PANITYONO, amplop yang bertuliskan untuk Kas Biro Hukum sebesar Rp 84.630.000,- (*delapan puluh empat juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah*) diserahkan kepada PKC yaitu BAHIR ROMSAH sesuai dengan perintah Terdakwa, untuk Pengurus Barang dan yang bertuliskan untuk Panitia Pemeriksa Barang sebesar Rp.16.927.000,- (*enam belas juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah*) diserahkan kepada Panitia Pemeriksaan Barang/Jasa BUDI HARTONO, sedangkan untuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa diserahkan kepada MADE SUARJAYA, yang mana dari jumlah uang yang terkumpul pada BAHIR ROMSAH dan PANITYONO sebesar Rp.159.630.000,- (*seratus lima puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah*) tersebut kemudian dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;
- Perbuatan Terdakwa memerintahkan untuk memenangkan pihak tertentu yaitu PT.Anugrah Cipta Pratama Prima dalam pengadaan jasa Filler Hukum Tahun 2006 dan menerima imbalan berupa uang dari RINA MELANIA PRIYATNA, yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa yaitu pengadaan Filler Hukum APBD Tahun 2006 tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yaitu Pasal 3 ayat (1) bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan dan KEPPRES Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 khususnya yang menyangkut prinsip dan etika dalam pengadaan barang/jasa yaitu Pasal 3 huruf c dan e bahwa pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip berupa: harus dilakukan terbuka dan bersaing, harus dilakukan secara adil/tidak diskriminatif, Pasal 5 huruf g dan h yaitu pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan barang/jasa harus mematuhi etika berupa: menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung

Hal. 8 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak langsung merugikan negara; serta tidak menerima atau menawarkan atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa ;

- Akibat perbuatan Terdakwa dalam Pengadaan Jasa Filler Hukum Tahun 2006 dengan nilai kontrak Rp.990.412.500,- (*sembilan ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah*) telah memperkaya Terdakwa sebesar Rp.159.630.000,- (*seratus lima puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah*), BUDI HARTONO sebesar Rp.16.927.000,- (*enam belas juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah*), MADE SUARJAYA sebesar Rp.15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*) serta RINA MELANIA PRIYATNA atau PT. Anugrah Cipta Pratama Prima sebesar Rp.373.408.629,- (*tiga ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus delapan ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah*) dan mengakibatkan kerugian keuangan negara cq. keuangan pemerintah Propinsi DKI Jakarta sebesar Rp.564.965.629,- (*lima ratus enam puluh empat juta sembilan ratus enam puluh lima ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah*) atau sekitar jumlah tersebut ;

II. Pengadaan Filler Hukum yang bersumber dari APBD Anggaran Biaya Tambahan (ABT) Tahun Anggaran 2006.

- Terdakwa sebagai Kepala Biro Hukum Setda Propinsi DKI Jakarta dan atau sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Biro Hukum Setda Propinsi DKI Jakarta yang mengetahui bahwa Biro Hukum Setda Propinsi DKI Jakarta mendapat alokasi anggaran pengadaan Filler Hukum (iklan tentang penegakan hukum) sebesar Rp.2.310.000.000,- (*dua milyar tiga ratus sepuluh juta rupiah*) yang bersumber dari APBD ABT Propinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2006, pada bulan Oktober 2006 Terdakwa mendapat laporan dari R. NORMAN bahwa RAJ INDRA SINGH dan HERMAN FELANI dari PT. Mega Vision telah datang menemui R. NORMAN dan meminta agar mereka yang mengerjakan proyek Filler Hukum yang bersumber dari ABT 2006 karena mereka yang mengurus anggaran di DPRD, namun yang akan diikuti dalam pengadaan Filler Hukum tersebut adalah PT. Raditya Putra Bahtera. Atas laporan R. NORMAN tersebut Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa juga telah dihubungi oleh orang dari DPRD yang meminta untuk memenangkan RAJ INDRA SINGH dan

Hal. 9 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMAN FELANI dalam pengadaan Filler Hukum dan Terdakwa mengatakan tidak jadi masalah yang penting jatah uang bagi anggota DPRD tersebut jangan dibebankan kepada Biro Hukum, disamping itu calon rekanan tersebut harus sanggup memberikan dana 10% kepada Biro Hukum, untuk itu Terdakwa memerintahkan kepada R. NORMAN untuk melaksanakan rencana dimaksud ;

- Terdakwa selanjutnya memanggil MADE SUARJAYA selaku Ketua Panitia Pengadaan tahun 2006, dimana Terdakwa meminta kepada MADE SUARJAYA untuk membantu memenangkan RAJ INDRA SINGH dan HERMAN FELANI dalam pengadaan Filler Hukum yang bersumber dari APBD ABT Tahun Anggaran 2006 ;
- Terdakwa selanjutnya memerintahkan MADE SUARJAYA untuk membicarakan dengan RAJ INDRA SINGH dan HERMAN FELANI tentang kesanggupan untuk memberikan dana 10% dari nilai kontrak setelah dipotong pajak. MADE SUARJAYA kemudian menyampaikan kepada Terdakwa bahwa R. NORMAN dan MADE SUARJAYA sudah bertemu dengan RAJ INDRA SINGH maupun HERMAN FELANI dimana yang bersangkutan sanggup untuk memenuhi permintaan Terdakwa berupa dana 10% setelah dipotong pajak ;
- Menindaklanjuti perintah Terdakwa maka MADE SUARJAYA membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) berdasarkan HPS dari Biro Perlengkapan untuk Pengadaan Filler Hukum yang bersumber dari APBD Murni 2006 yang ditetapkan oleh Terdakwa selaku Kepala Biro Hukum tanggal 1 Nopember 2006 sebagai lampiran surat perintah pelelangan Nomor 689/-077.921, dengan cara menurunkan komposisi biaya pembuatan dibanding penayangan per paket sesuai permintaan RAJ INDRA SINGH sehingga RAJ INDRA SINGH bisa mendapatkan untung dari proyek tersebut, dimana nilai HPS akhirnya dibuat sebesar Rp.2.235.200.000,- (*dua milyar dua ratus tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah*) di bawah nilai anggaran sebagaimana yang ditetapkan dalam Dana Alokasi Satuan Kegiatan (DASK), dengan spesifikasi spot sebanyak 320 spot, waktu 30 menit dan ditayangkan oleh 2 (dua) stasiun TV ;
- Pada tanggal 20 Nopember 2006 Panitia Lelang mengadakan pengumuman di Harian Media Indonesia dan beberapa hari kemudian terdapat 20 (dua puluh) peserta termasuk perusahaan RAJ INDRA SINGH dan HERMAN FELANI yaitu PT.Mega Vision Utama dan

Hal. 10 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



PT.Raditya Putra Bahtera, yang didaftarkan TRIYITNO UNARTO, GUNTUR INDRAYANA dan AGUS mewakili RAJ INDRA SINGH dan HERMAN FELANI. Pada saat mendaftarkan PT.Raditya Putra Bahtera dan PT.Mega Vision Utama tersebut, TRIYITNO UNARTO dan GUNTUR INDRAYANA menyampaikan kepada MADE SUARJAYA bahwa sesuai pesan RAJ INDRA SINGH dan HERMAN FELANI agar yang dimenangkan PT. Raditya Putra Bahtera, sedangkan PT.Mega Vision Utama hanya diajukan sebagai pendamping bersama perusahaan-perusahaan yang tertera dalam company profile yang telah diserahkan oleh TRIYITNO UNARTO kepada MADE SUARJAYA sebelumnya yaitu PT.Pilot Project Production, dengan tujuan supaya tidak menimbulkan kecurigaan publik karena pada waktu yang bersamaan PT.Mega Vision Utama sedang mengerjakan proyek di DPRD Propinsi DKI Jakarta berupa proyek sosialisasi melalui media TV senilai Rp.40.000.000.000,- (*empat puluh milyar rupiah*). Untuk itu MADE SUARJAYA memberitahukan nilai HPS kepada TRIYITNO UNARTO dan GUNTUR INDRAYANA dengan tujuan supaya PT.Raditya Putra Bahtera dapat mengajukan penawaran terendah di bawah nilai HPS ;

- Dari 20 (dua puluh) perusahaan yang mendaftar, setelah dilakukan *aanwijzing* hanya terdapat 5 (lima) perusahaan yang melakukan penawaran harga yaitu PT.Tiga Vision, PT.Pilot Project Production, PT.Trias Mulya Abadi Perkasa termasuk PT.Raditya Putra Bahtera dan PT.Mega Vision Utama milik RAJ INDRA SINGH dan HERMAN FELANI, dimana setelah dilakukan pembukaan sampul 1 (satu) tanggal 29 Nopember 2006 berupa pengecekan administrasi hanya 2 (dua) perusahaan yang dinyatakan oleh Panitia Lelang lolos atau lengkap administrasinya yaitu PT.Raditya Putra Bahtera dan PT.Trias Mulya Abadi Perkasa ;
- Pada tanggal 1 Desember 2006 dilakukan pembukaan sampul 2 (dua) mengenai Surat Penawaran Harga (SPH), dimana PT.Raditya Putra Bahtera akhirnya mengajukan penawaran terendah pertama sesuai dengan yang direncanakan yaitu dengan nilai sebesar Rp.2.184.600.000,- (*dua milyar seratus delapan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah*), sedangkan terendah kedua yaitu PT.Trias Mulya Abadi Perkasa sebesar Rp.2.240.150.000,- (*dua milyar dua ratus empat puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah*). Atas dasar hasil penawaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terendah tersebut maka PT.Raditya Putra Bahtera akhirnya ditetapkan sebagai pemenang lelang sesuai permintaan Terdakwa, berdasarkan surat Nomor 782 / 077.92 tanggal 6 Desember 2006 tentang Penunjukan PT.Raditya Putra Bahtera sebagai perusahaan Penyedia Barang Jasa pengadaan jasa Filler Hukum Kebutuhan Biro Hukum Setda Propinsi DKI Jakarta TA 2006 ;

- Terdakwa dan GUNTUR INDRAYANA selaku Direktur Utama PT.Raditya Putra Bahtera pada tanggal 6 Desember 2006 menandatangani Surat Perjanjian Pelelangan Umum Pengadaan Jasa Filler Hukum Sekretariat Propinsi DKI Jakarta TA 2006 dengan jenis pekerjaan berupa Iklan Layanan Masyarakat sebanyak 2 (dua) paket sebesar Rp.195.000.000,- (*seratus sembilan puluh lima juta rupiah*) dan penayangan di 5 (lima) stasiun TV sebesar Rp.1.837.000.000,- (*satu milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta rupiah*) senilai Rp 2.184.600.000,- (*dua milyar seratus delapan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah*) yang dituangkan ke dalam Surat Perjanjian Nomor 783/077.92 tanggal 6 Desember 2006 ;
- Pada tanggal 14 Desember 2006 atas permintaan INDRAWATI S. DANI, Panitia Pemeriksaan Barang/Jasa BUDI HARTONO menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang (BAPB) Nomor 41/BAPB/BH/XII/2006 tanggal 14 Desember 2006, tanpa terlebih dahulu melakukan pengecekan atas penayangan filler hukum yang pengadaannya dilakukan oleh PT.Raditya Putra Bahtera. Kemudian pada hari itu juga dibuat Berita Acara Serah Terima Barang dari GUNTUR INDRAYANA selaku Direktur Utama PT.Raditya Putra Bahtera kepada Pengurus Barang Unit Biro Hukum IRUSWANDI ;
- Terdakwa pada tanggal 20 Desember 2006 menandatangani dokumen Daftar Rincian Rencana Penggunaan Beban Tetap Nomor 196/SPP/2006 tanggal 20 Desember 2006 yang akan digunakan oleh Asisten Keuangan selaku Pemegang Kas Setda Propinsi DKI Jakarta sebagai dasar pembuatan Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran kepada Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah (KPKD) untuk rekanan PT. Raditya Putra Bahtera ;
- Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan oleh Asisten Keuangan Setda Propinsi DKI Jakarta Nomor 2677/SPP/SWD/BB/XII/2006 tanggal 20 Desember 2006, PT.Raditya Putra Bahtera

Hal. 12 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima pencairan uang dalam pengadaan Filler Hukum ABT tahun 2006 setelah dipotong Pajak (PPH, PPN), sebesar Rp.1.866.840.000,- (*satu milyar delapan ratus enam puluh enam juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah*) yang dicairkan langsung ke rekening PT.Raditya Putra Bahtera pada Bank Mandiri Cabang A. Yani nomor rekening 120.0001232698 ;

- Setelah menerima pembayaran sebesar Rp.1.866.840.000,- (*satu milyar delapan ratus enam puluh enam juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah*), selanjutnya RAJ INDRA SINGH dan HERMAN FELANI menemui R. NORMAN untuk menyerahkan uang yang jumlahnya kurang lebih sebesar 10% dari nilai kontrak sebagaimana yang diminta oleh Terdakwa, yaitu sebesar Rp.397.704.000,- (*tiga ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus empat ribu rupiah*) diterima oleh R. NORMAN seluruhnya terbagi ke dalam 5 (lima) amplop yang masing-masing amplop telah bertuliskan tujuan penerima amplop yaitu :

1. Untuk Kas Biro Hukum sebesar Rp.186.700.000,- (*seratus delapan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah*) ;
2. Untuk Pengurus Barang sebesar Rp.18.668.000,- (*delapan belas juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah*) ;
3. Untuk PKC/ Bendahara Biro Hukum sebesar Rp.37.336.000,- (*tiga puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah*) ;
4. Untuk bagian Dokumentasi & Publikasi Hukum sebesar Rp.125.000.000,- (*seratus dua puluh lima juta rupiah*) ;
5. Untuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa sebesar Rp.30.000.000,- (*tiga puluh juta rupiah*) ;

Amplop yang berisi uang tersebut oleh R. NORMAN diserahkan kepada PANITYONO, selanjutnya oleh PANITYONO amplop yang bertuliskan untuk bagian Dokumentasi & Publikasi Hukum sebesar Rp.125.000.000,- (*seratus dua puluh lima juta rupiah*) disimpan di dalam brankas PANITYONO, amplop yang bertuliskan untuk Kas Biro Hukum sebesar Rp.186.700.000,- (*seratus delapan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah*), untuk PKC/ Bendahara Biro Hukum sebesar Rp.37.336.000,- (*tiga puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah*) diserahkan kepada kepada PKC yaitu BAHIR ROMSAH sesuai dengan perintah Terdakwa, sedangkan untuk Pengurus Barang sebesar Rp.18.668.000,- (*delapan belas juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah*) diserahkan kepada Pengurus Barang Unit Biro

Hal. 13 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Hukum IRUSWANDI, serta untuk Panitia Pengadaan sebesar Rp.30.000.000,- (*tiga puluh juta rupiah*) diterima oleh MADE SUARJAYA selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa, yang mana dari jumlah uang yang terkumpul pada BAHIR ROMSAH dan PANITYONO sebesar Rp.311.700.000,- (*tiga ratus sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah*) tersebut kemudian dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;

- Perbuatan Terdakwa memerintahkan untuk memenangkan pihak tertentu yaitu perusahaan yang diajukan oleh RAJ INDRA SINGH dan HERMAN FELANI yaitu PT. Raditya Putra Bahtera dalam pengadaan Filler Hukum yang bersumber dari ABT Propinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2006, dan menerima imbalan berupa uang dari HERMAN FELANI dan atau RAJ INDRA SINGH, yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa yaitu pengadaan Filler Hukum ABT Tahun 2006 tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yaitu Pasal 3 ayat (1) bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan dan KEPPRES Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 khususnya yang menyangkut prinsip dan etika dalam pengadaan barang/jasa yaitu Pasal 3 huruf c dan e bahwa pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip berupa: harus dilakukan terbuka dan bersaing, harus dilakukan secara adil/tidak diskriminatif, Pasal 5 huruf g dan h yaitu pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan barang/jasa harus mematuhi etika berupa; menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; serta tidak menerima atau menawarkan atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan barang/ jasa ;
- Akibat perbuatan terdakwa dalam pengadaan jasa Filler Hukum Tahun Anggaran 2006 (ABT) dengan nilai kontrak Rp.2.184.600.000,- (*dua milyar seratus delapan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah*) telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperkaya terdakwa sebesar sebesar Rp.311.700.000,- (*tiga ratus sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah*), BAHIR ROMSAH sebesar Rp.37.336.000,- (*tiga puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah*), MADE SUARJAYA sebesar Rp.30.000.000,- (*tiga puluh juta rupiah*), IRUSWANDI sebesar Rp.18.668.000,- (*delapan belas juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah*) serta RAJ INDRA SINGH dan HERMAN FELANI PT.Raditya Putra Bahtera sebesar Rp.999.209.000,- (*sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus sembilan ribu rupiah*) dan mengakibatkan kerugian keuangan negara cq. keuangan pemerintah Propinsi DKI Jakarta sebesar Rp.1.396.913.000,- (*satu milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus tiga belas ribu rupiah*) atau sekitar jumlah tersebut ;

III. Pengadaan Filler Hukum yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2007.

- Terdakwa sebagai Kepala Biro Hukum Setda Propinsi DKI Jakarta dan atau selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Biro Hukum Setda Propinsi DKI Jakarta, yang mengetahui bahwa Biro Hukum Setda Propinsi DKI Jakarta mendapat anggaran pengadaan Filler Hukum (iklan tentang penegakan hukum) sebesar Rp.2.505.000.000,- (*dua milyar lima ratus lima juta rupiah*), yang bersumber dari APBD Propinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2007 pada bulan April 2007 bertemu dengan HERMAN FELANI bersama TRIYITNO UNARTO, yang mana dalam pertemuan tersebut HERMAN FELANI meminta kepada Terdakwa agar ditunjuk sebagai pelaksana atau pemenang dalam proyek pengadaan Filler Hukum tahun 2007 dan sanggup memberikan kompensasi kepada Terdakwa sebesar 10% sebagaimana proyek pengadaan Filler Hukum tahun 2006. Atas permintaan HERMAN FELANI dan TRIYITNO UNARTO tersebut akhirnya Terdakwa menyetujuinya meskipun proses pelelangan belum dimulai ;
- Terdakwa kemudian memerintahkan R. NORMAN dan MADE SUARJAYA selaku Ketua Panitia Lelang agar membantu memenangkan perusahaan yang diikuti oleh HERMAN FELANI dan TRIYITNO UNARTO dalam proyek pengadaan Filler Hukum 2007 sekaligus memberitahu R. NORMAN dan MADE SUARJAYA bahwa HERMAN FELANI maupun TRIYITNO UNARTO telah sanggup untuk menyerahkan dana kepada Biro Hukum sebesar 10% dari nilai kontrak setelah dipotong pajak ;

Hal. 15 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya MADE SUARJAYA membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) berdasarkan nilai HPS dalam proyek Filler Hukum tahun 2006, yang ditetapkan oleh Terdakwa selaku Kepala Biro Hukum tanggal 3 Agustus 2007 sebagai lampiran surat perintah pelelangan Nomor 378/-077.921, dimana nilai HPS akhirnya dibuat sebesar Rp.2.500.000.000,- (*dua milyar lima ratus juta rupiah*) ;
- Menindaklanjuti permintaan Terdakwa untuk memenangkan perusahaan yang diajukan oleh HERMAN FELANI dan TRIYITNO UNARTO, pada bulan Agustus 2007 tepatnya sebelum diadakan pengumuman lelang, TRIYITNO UNARTO datang menemui MADE SUARJAYA menyerahkan *company profile* CV.Sandi Perkasa, PT.Pilot Project Production dan PT.Global Vision Universal yang akanikutsertakan di dalam lelang, dimana pada saat itu TRIYITNO UNARTO menyampaikan pesan dari HERMAN FELANI agar yang dimenangkan nantinya adalah CV.Sandi Perkasa dengan alasan karena CV.Sandi Perkasa merupakan perusahaan milik HERMAN FELANI ;
- Berdasarkan pengumuman lelang di Harian Media Indonesia dan Warta Kota, tertanggal 29 Agustus 2007 terdapat 20 (dua puluh) perusahaan mendaftarkan diri termasuk perusahaan yang diikuti oleh HERMAN FELANI yaitu CV.Sandi Perkasa, PT.Pilot Project Production dan PT.Global Vision Universal, yang didaftarkan oleh IRFAN selaku orang kepercayaan HERMAN FELANI untuk mewakili CV.Sandi Perkasa, AGUS SUMARYONO mewakili PT.Global Vision Universal dan HANAFI, S.Sos mewakili PT.Pilot Project Production ;
- Dari 20 (dua puluh) perusahaan yang mendaftar, setelah dilakukan *aanwijzing* hanya terdapat 9 (sembilan) perusahaan yang melakukan penawaran harga termasuk diantaranya adalah 3 (tiga) perusahaan yang diikuti oleh HERMAN FELANI yaitu CV.Sandi Perkasa, PT.Global Vision Universal dan PT.Pilot Project Production, dimana setelah dilakukan pembukaan sampul 1 (satu) berupa pengecekan administrasi ternyata oleh Panitia Lelang hanya diluluskan 2 (dua) perusahaan yaitu PT.Crown Entertama dan perusahaan yang diminta oleh HERMAN FELANI untuk dijadikan pemenang yaitu CV.Sandi Perkasa ;
- Pada tanggal 22 Desember 2007 dilakukan pembukaan sampul 2 (dua) mengenai Surat Penawaran Harga (SPH), dimana PT.Crown Entertama

Hal. 16 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan penawaran sebesar Rp.2.215.119.500,- (*dua milyar dua ratus lima belas juta seratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah*) dan CV. Sandi Perkasa sebesar Rp.2.231.625.000,- (*dua milyar dua ratus tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah*). Dengan alasan di dalam evaluasi dokumen kualifikasi PT. Crown Entertama tidak mampu mengajukan persyaratan kemampuan dasar (KD) maka CV.Sandi Perkasa akhirnya ditetapkan sebagai pemenang lelang sesuai perintah Terdakwa, kemudian ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan yang ditanda tangani oleh Terdakwa selaku Kepala Biro Hukum Nomor 508/077.72 tanggal 25 September 2007 perihal penetapan CV.Sandi Perkasa sebagai pelaksana pengadaan jasa Filler Hukum TA 2007 pada Biro Hukum Setda Propinsi DKI Jakarta ;

- Terdakwa pada tanggal 25 September 2007 dan Ir. RATNANINGSIH, MSi selaku Direktur Utama CV.Sandi Perkasa menandatangani Surat Perjanjian Pelelangan Umum Pengadaan Jasa Filler Hukum Sekretariat Propinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2007 senilai Rp.2.231.625.000,- (*dua milyar dua ratus tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah*) yang dituangkan ke dalam Surat Perjanjian Nomor 508/077.72 tanggal 25 September 2007 ;
- Pada tanggal 3 Oktober 2007 atas permintaan INDRAWATI S. DANI Panitia Pemeriksaan Barang/Jasa BUDI HARTONO menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang (BAPB) Nomor 03 /BAPB/BH/X/2007 tanggal 3 Oktober 2007 tanpa terlebih dahulu melakukan pengecekan atas penayangan filler hukum yang pengadaannya dilakukan oleh CV.Sandi Perkasa, kemudian pada tanggal itu juga yaitu 3 Oktober 2007 dibuat Berita Acara serah Terima Barang dari Ir. RATNANINGSIH, MSi selaku Direktur Utama CV.Sandi Perkasa kepada Pengurus Barang Unit Biro Hukum IRUSWANDI ;
- Terdakwa pada tanggal 26 Oktober 2007 mengajukan permintaan pencairan dana kepada Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah (KPKD) dengan menandatangani dokumen Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap Nomor 68/SPP/BT/BHK 2007 tanggal 26 Oktober 2007 ;
- Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap yang diajukan Terdakwa, CV.Sandi Perkasa menerima pembayaran dalam pengadaan Filler Hukum tahun 2007 setelah dikurangi Pajak (PPh, PPN), sebesar Rp.1.998.318.750,- (*satu milyar sembilan ratus sembilan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan juta tiga ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang dicairkan langsung ke rekening CV. Sandi Perkasa pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Jatinegara nomor rekening 10122.01.000.842.30.3 ;

- Setelah menerima pembayaran dalam pengadaan Filler Hukum sebesar Rp.1.998.318.750,- (*satu milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*), HERMAN FELANI menemui R. NOERMAN untuk menyerahkan uang imbalan atau hadiah berupa uang yang totalnya sebesar Rp 569.747.812,- (*lima ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus dua belas rupiah*) sebagaimana yang disepakati dengan dengan Terdakwa, yang diterima oleh R. NOERMAN dan terbagi ke dalam 5 (lima) amplop yang masing-masing amplop telah bertuliskan tujuan penerima amplop yaitu :
 1. Untuk Kas Biro Hukum sebesar Rp.199.831.875,-(*seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah*) ;
 2. Untuk Pemeriksa Barang sebesar Rp.39.966.375,- (*tiga puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah*) ;
 3. Untuk Pengurus Barang sebesar Rp.19.983.187,- (*sembilan belas juta sembilan ratus delapan puluh tiga seratus delapan puluh tujuh rupiah*) ;
 4. Untuk PKC sebesar Rp.39.966.375,- (*tiga puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah*) ;
 5. Untuk Bagian Dokumentasi & Publikasi Hukum sebesar Rp.270.000.000,- (*dua ratus tujuh puluh juta rupiah*) ;
- Kemudian R. NORMAN menyerahkan kelima amplop yang berisi uang tersebut kepada PANITYONO, selanjutnya amplop yang bertuliskan untuk bagian dokumentasi dan publikasi hukum yang berisi uang sebesar Rp.270.000.000,-(*dua ratus tujuh puluh juta rupiah*) disimpan di dalam brankas PANITYONO, sedangkan untuk amplop Kas Biro Hukum yang berisi uang sebesar Rp.199.831.875,-(*seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah*) dan amplop untuk PKC/ Bendahara Biro Hukum yang berisi uang Rp.39.966.375,- (*tiga puluh sembilan juta sembilan*

Hal. 18 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus enam puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) diserahkan kepada PKC yaitu BAHIR ROMSAH sebagaimana perintah Terdakwa, sedangkan amplop untuk Pemeriksa Barang yang berisi uang sebesar Rp.39.966.375,- (*tiga puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah*) diserahkan kepada Panitia Pemeriksaan Barang/Jasa BUDI HARTONO dan untuk Pengurus Barang sebesar Rp.19.983.187,- (*sembilan belas juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah*) diserahkan kepada IRUSWANDI, yang mana dari jumlah uang yang terkumpul pada BAHIR ROMSAH dan PANITYONO sebesar Rp.469.831.875,- (*empat ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah*) tersebut kemudian dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;

- Perbuatan Terdakwa menjanjikan untuk menunjuk sebagai pelaksana pengadaan filler hukum tahun 2007 yang proses lelangnya belum dilaksanakan kepada HERMAN FELANI dan TRIYITNO UNARTO dan memerintahkan R. NORMAN Ketua Panitia Lelang untuk memenangkan pihak tertentu yaitu perusahaan yang diajukan oleh HERMAN FELANI yaitu CV. Sandi Perkasa dalam pengadaan filler hukum yang bersumber dari APBD Propinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2007, dan menerima imbalan berupa uang dari HERMAN FELANI yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa yaitu pengadaan Filler Hukum tahun 2007 tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yaitu Pasal 3 ayat (1) bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan dan KEPPRES Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 khususnya yang menyangkut prinsip dan etika dalam pengadaan barang/jasa yaitu Pasal 3 huruf c dan e bahwa Pengadaan Barang/Jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip berupa harus dilakukan terbuka dan bersaing, harus dilakukan secara adil/ tidak diskriminatif, Pasal 5 huruf g dan h yaitu pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan barang/jasa harus mematuhi etika berupa: menghindari dan mencegah

Hal. 19 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara, serta tidak menerima atau menawarkan atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa ;

- Akibat perbuatan terdakwa dalam pengadaan jasa Filler Hukum Tahun Anggaran 2007 dengan nilai kontrak Rp.2.231.625.000,- (dua milyar dua ratus tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) telah memperkaya Terdakwa sebesar Rp.469.831.875,- (*empat ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah*), BAHIR ROMSAH sebesar Rp.39.966.375,- (*tiga puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah*), BUDI HARTONO sebesar Rp.39.966.375,- (*tiga puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah*), IRUSWANDI sebesar Rp.19.983.187,- (*sembilan belas juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah*) serta HERMAN FELANI atau CV.Sandi Perkasa sebesar Rp.1.131.570.938,- (*satu milyar seratus tiga puluh satu juta lima ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah*), yang mengakibatkan kerugian keuangan negara cq keuangan pemerintah Propinsi DKI Jakarta sebesar Rp.1.701.318.750,- (*satu milyar tujuh ratus satu juta tiga ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*) atau sekitar jumlah tersebut ;

IV. Dalam Pengadaan Gema Hukum yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2006.

- Terdakwa sebagai Kepala Biro Hukum Setda Propinsi DKI Jakarta dan atau selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Biro Hukum Setda Propinsi DKI Jakarta yang mengetahui bahwa Biro Hukum Setda Propinsi DKI Jakarta Pada tahun 2006 mendapat alokasi anggaran pengadaan Gema Hukum berupa sosialisasi Perda DKI Jakarta melalui Media TV Swasta sebesar Rp.5.016.263.000,- (*lima milyar seratus enam belas juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah*), yang bersumber dari APBD Propinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2006, pada bulan Agustus 2006 di ruang kerja Terdakwa didatangi oleh Kepala Bagian (Kabag) Perundang-Undangan Biro Hukum Setda Propinsi DKI Jakarta AGUSDIN SUSANTO bersama dengan

Hal. 20 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSYAPRIA UTAMA dari PT. Trendeka Lestari, dengan tujuan meminta Terdakwa agar dapat memenangkan PT. Trendeka Lestari dalam pelaksanaan pengadaan Gema Hukum tahun 2006 pada Biro Hukum Setda Propinsi DKI Jakarta ;

- Terdakwa menyetujui permintaan AGUSDIN SUSANTO dan YUSYAPRIA UTAMA tersebut meskipun proses pelelangan belum dilaksanakan, dengan kesepakatan YUSYAPRIA UTAMA dari PT. Trendeka Lestari sanggup memberikan dana 10% dari nilai kontrak setelah dipotong pajak. Atas permintaan Terdakwa tersebut YUSYAPRIA UTAMA menyetujuinya sehingga beberapa hari kemudian YUSYAPRIA UTAMA dipertemukan oleh AGUSDIN SUSANTO dengan MADE SUARJAYA selaku Ketua Panitia Lelang yang menyampaikan persetujuan Terdakwa untuk memenangkan PT. Trendeka Lestari dalam pengadaan Gema Hukum tahun 2006, dimana dalam kesempatan tersebut AGUSDIN SUSANTO meminta agar MADE SUARJAYA dapat membantu memenangkan PT. Trendeka Lestari, sedangkan untuk patokan dalam pembuatan HPS akan diurus oleh YUSYAPRIA UTAMA ke Biro Perlengkapan Propinsi DKI Jakarta setelah ada surat permohonan dari Biro Hukum ;
- Bahwa sebelum diadakan pengumuman lelang, MADE SUARJAYA meminta YUSYAPRIA UTAMA untuk memberikan data-data harga dari beberapa stasiun TV swasta sebagai bahan patokan untuk membuat HPS tanpa melakukan survey ke lapangan sendiri dan oleh YUSYAPRIA UTAMA diberi data-data harga yang tercatat berasal dari Trans TV, Indosiar Visual Mandiri dan Televisi Pendidikan Indonesia (TPI), disamping menggunakan patokan harga yang dikeluarkan oleh Biro Hukum Propinsi DKI Jakarta dalam Surat Keputusan Kepala Biro Perlengkapan Nomor 2747/073.532 tanggal 17 Juli 2006 ;
- Pada tanggal 14 Agustus 2006 Panitia lelang mengadakan pengumuman pengadaan Gema Hukum tahun 2006 di koran harian Media Indonesia, beberapa hari kemudian YUSYAPRIA UTAMA datang menemui MADE SUARJAYA menyerahkan copy *company profile* yang akan diikutsertakan dalam lelang Gema Hukum yaitu PT. Trendeka Lestari dan PT. Adila Jaya Sukses, untuk dilakukan pengecekan kekurangan andimistrasinya oleh MADE SUARJAYA sebelum didaftarkan sehingga nantinya dapat lolos administrasi, setelah dilakukan pengecekan oleh MADE SUARJAYA barulah YUSYAPRIA

Hal. 21 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UTAMA mendaftarkan kedua perusahaan tersebut di atas disamping terdapat 15 (lima belas) perusahaan lainnya yang mendaftar. Dari seluruh perusahaan yang mendaftar tersebut, yang memasukkan dokumen penawaran sampul (I dan II) hanya 8 (delapan) perusahaan termasuk PT. Trendeka Lestari dan PT. Adila Jaya Sukses ;

- Pada tanggal 31 Agustus 2006 dilakukan evaluasi administrasi oleh Panitia Lelang dan yang dinyatakan lolos administrasi hanya dua perusahaan yaitu perusahaan yang diikuti oleh YUSYAPRIA UTAMA masing-masing PT.Trendeka Lestari dan PT.Adila Jaya Sukses dan setelah dilakukan pembukaan dokumen penawaran (sampul II) dan evaluasi penawaran, akhirnya sesuai yang direncanakan PT.Trendeka Lestari dengan penawaran Rp.4.554.000.000,- (*empat milyar lima ratus lima puluh empat juta rupiah*) ditetapkan oleh Terdakwa sebagai pemenang berdasarkan Surat Keputusan yang ditanda tangani oleh Terdakwa selaku Kepala Biro Hukum Nomor 587/077.922 tanggal 8 September 2006 perihal penetapan PT.Trendeka Lestari sebagai pelaksana pengadaan jasa Gema Hukum Tahun Anggaran 2006 pada Biro Hukum Setda Propinsi DKI Jakarta ;
- Terdakwa pada tanggal 15 September 2006 dan ANNA DALILA selaku Direktur PT. Treandeka Lestari menandatangani Surat Perjanjian Pelelangan Umum Pengadaan Jasa Filler Hukum Sekretariat Propinsi DKI Jakarta TA 2006 senilai Rp 4.554.000.000,- (*empat milyar lima ratus lima puluh empat juta rupiah*) yang dituangkan ke dalam Surat Perjanjian Nomor 588/077.92 tanggal 15 September 2006 ;
- Pada tanggal 17 Oktober 2006 atas permintaan INDRAWATI S. DANI, Panitia Pemeriksaan Barang/Jasa BUDI HARTONO menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang (BAPB) Nomor 24 /BAPB/ BH/XII/2006 tanggal 17 Oktober 2006,tanpa terlebih dahulu melakukan pengecekan atas penayangan filler hukum yang pengadaannya dilakukan oleh PT. Treandeka Lestari dan pada tanggal 18 Oktober 2006 dibuat Berita Acara serah Terima Barang dari ANNA DALILA selaku Direktur PT. Trendeka Lestari kepada Pengurus Barang Unit Biro Hukum IRUSWANDI ;
- Terdakwa pada tanggal 8 Nopember 2006 menandatangani dokumen Daftar Rincian Rencana Penggunaan Beban Tetap Nomor 126/SPP/2006 tanggal 8 Nopember 2006 yang akan digunakan oleh Asisten Keuangan selaku Pemegang Kas Setda Propinsi DKI Jakarta

Hal. 22 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai dasar pembuatan Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran kepada Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah (KPKD) untuk rekanan PT. Trendeka Lestari ;

- Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPM) yang diajukan oleh Asisten Keuangan Setda Propinsi DKI Jakarta Nomor 1607/SPP/SWD/BB/XI/2006 tanggal 8 Nopember 2006, PT. Trendeka Lestari menerima pencairan uang dalam pengadaan Gema Hukum tahun 2006, setelah dipotong Pajak (Pph, PPN), sebesar Rp 3.891.600.000,- (*tiga milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah*) yang dicairkan langsung ke rekening PT. Trendeka Lestari pada Bank DKI Cabang Pembantu Tebet nomor rekening 203.04.00669 ;
- Setelah menerima pembayaran dari pengadaan Gema Hukum Tahun 2006, selanjutnya YUSYAPRIA UTAMA menyerahkan imbalan berupa uang kepada Terdakwa sebesar Rp 382.950.000,- (*tiga ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*) sebagaimana yang diminta oleh Terdakwa, kepada MADE SUARJAYA sebesar Rp 75.000.000,- (*tujuh puluh lima juta rupiah*), yang mana uang yang diterima oleh Terdakwa tersebut kemudian dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;
- Perbuatan Terdakwa menjanjikan kepada YUSYAPRIA UTAMA sebagai pelaksana pengadaan Gema Hukum sebelum proses pelelangan yaitu memenangkan PT. Trendeka Lestari dalam pengadaan Gema Hukum Tahun Anggaran 2006 dan menerima imbalan berupa uang yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa berupa Gema Hukum tahun 2006 Propinsi DKI Jakarta tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yaitu Pasal 3 ayat (1) bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, dan KEPPRES Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 khususnya yang menyangkut prinsip dan etika dalam pengadaan barang/jasa yaitu Pasal 3 huruf c dan e bahwa pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip berupa: harus dilakukan terbuka dan bersaing, harus dilakukan secara adil/ tidak diskriminatif, Pasal 5 huruf g dan h yaitu pengguna

Hal. 23 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



barang/jasa, penyedia barang/jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan barang/jasa harus mematuhi etika berupa; menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; serta tidak menerima atau menawarkan atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa ;

- Akibat perbuatan terdakwa dalam pengadaan jasa Gema Hukum Tahun Anggaran 2006 pada Biro Hukum Setda Propinsi DKI Jakarta dengan nilai kontrak Rp 4.554.000.000,- (*empat milyar lima ratus lima puluh empat juta rupiah*) telah memperkaya Terdakwa sebesar Rp 382.950.000,- (*tiga ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*), MADE SUARJAYA sebesar Rp 75.000.000,- (*tujuh puluh lima juta rupiah*) serta YUSYAPRIA UTAMA atau PT. Trendeka Lestari sebesar Rp.1.783.650.000,- (*satu milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah*), yang mengakibatkan kerugian keuangan negara cq. keuangan pemerintah Propinsi DKI Jakarta sebesar Rp 2.241.600.000,- (*dua milyar dua ratus empat puluh satu juta enam ratus ribu rupiah*) atau sekitar jumlah tersebut ;

V. Pengadaan Gema Hukum yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2007.

- Terdakwa sebagai Kepala Biro Hukum Setda Propinsi DKI Jakarta dan atau selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Biro Hukum Setda Propinsi DKI Jakarta yang mengetahui bahwa Biro Hukum Setda Propinsi DKI Jakarta mendapat alokasi anggaran pengadaan Gema Hukum berupa sosialisasi Perda DKI Jakarta melalui Media TV Swasta, sebesar Rp 3.400.000.000,- (*tiga milyar empat ratus juta rupiah*) yang bersumber dari APBD Propinsi DKI Jakarta TA 2006 pada bulan September 2007 AGUSDIN SUSANTO selaku Kepala Bagian (Kabag) Perundang-Undangan Biro Hukum Setda Propinsi DKI Jakarta didatangi YUSYAPRIA UTAMA dengan tujuan meminta AGUSDIN SUSANTO agar dalam pelaksanaan pengadaan Gema Hukum tahun 2007 pada Biro Hukum Setda Propinsi DKI Jakarta dapat dimenangkan PT. Adila Jaya Sukses, dimana YUSYAPRIA UTAMA juga menyampaikan akan menyerahkan dana seperti dalam proyek Gema



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum tahun 2006. Untuk menindaklanjuti kebijakan Terdakwa tentang pemotongan dana 10% setelah dipotong pajak dalam setiap proyek pengadaan pada Biro Hukum Sekretaris Daerah Pemerintah Propinsi DKI Jakarta, maka AGUSDIN SUSANTO memanggil MADE SUARJAYA dan memerintahkan agar dalam proyek Gema Hukum 2007 dimenangkan oleh perusahaan yang diajukan oleh YUSYAPRIA UTAMA yaitu PT. Adila Jaya Sukses bukan PT. Trendeka Lestari lagi seperti tahun 2006 dengan tujuan agar tidak menjadi sorotan publik (mencolok) ;

- Bahwa sebelum diadakan pengumuman lelang, MADE SUARJAYA membuat HPS tanpa melakukan survey, namun menggunakan patokan harga yang dikeluarkan oleh Biro Hukum Propinsi DKI Jakarta dalam Surat Keputusan Kepala Biro Perlengkapan Nomor 4164/073.532 tanggal 5 September 2007 yang isinya sama dengan Surat Keputusan Kepala Biro Hukum Nomor 2747/073.532 tanggal 17 Juli 2006 yang digunakan sebagai acuan pembuatan HPS dalam pengadaan Gema Hukum tahun 2006 yang dimenangkan oleh perusahaan pesanan YUSYAPRIA UTAMA yaitu PT. Trendeka Lestari sebagaimana diuraikan di dalam angka romawi IV di atas ;
- Pada tanggal 2 Oktober 2007 Panitia lelang mulai mengadakan pengumuman pengadaan Gema Hukum tahun 2007 di koran harian Media Indonesia, setelah itu YUSYAPRIA UTAMA mendaftarkan 2 (dua) perusahaan yaitu PT. Trendeka Lestari dan PT. Adila Jaya Sukses, yang sebelum didaftarkan copy file kedua perusahaan telah diteliti administrasinya oleh MADE SUARJAYA sehingga dengan sendirinya dapat lolos administrasi. Di samping perusahaan yang didaftarkan oleh YUSYAPRIA UTAMA terdapat 4 (empat) perusahaan lainnya yang mendaftar, namun dari seluruh perusahaan yang mendaftar tersebut yang memasukkan dokumen penawaran sampul I hanya 4 (empat) perusahaan yaitu CV. Karya Chrisna Jaya, PT. Dwi Putra Kreasi dan perusahaan yang diajukan oleh YUSYAPRIA UTAMA yaitu PT. Trendeka Lestari dan PT. Adila Jaya Sukses, dimana keempat perusahaan tersebut akhirnya dalam pembukaan sampul I dinyatakan lolos administrasi ;
- Pada tanggal 23 Oktober 2007 dilakukan pembukaan dokumen penawaran (sampul II) dan evaluasi penawaran, yang mana PT. Adila Jaya Sukses dengan penawaran Rp 2.788.500.000,- (*dua milyar tujuh*

Hal. 25 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) atas usulan Panitia Lelang ditetapkan oleh Terdakwa sebagai pemenang berdasarkan Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Biro Hukum Nomor 652/077.922 tanggal 5 Nopember 2007 perihal penetapan PT. Adila Jaya Sukses sebagai pelaksana pengadaan jasa Gema Hukum TA 2007 pada Setda Propinsi DKI Jakarta ;

- Terdakwa pada tanggal 5 Nopember 2007 dan IRADAH HASBOELAH selaku Direktur PT.Adila Jaya Sukses menandatangani Surat Perjanjian Pelelangan Umum Pengadaan Jasa Gema Hukum pada Biro Hukum Setda Propinsi DKI Jakarta TA 2007 senilai Rp.2.788.500.000,- (*dua milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah*) yang dituangkan ke dalam Surat Perjanjian Nomor 654/077.92 tanggal 5 Nopember 2007 ;
- Pada tanggal 20 Nopember 2007 atas permintaan INDRAWATI S. DANI, Panitia Pemeriksaan Barang/Jasa BUDI HARTONO menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang (BAPB) Nomor 17/BAPB/BH/XI/2007 tanggal 20 Nopember 2007, tanpa terlebih dahulu melakukan pengecekan atas Pengadaan Jasa Gema Hukum yang dilakukan oleh PT. Adila Jaya Sukses dan pada tanggal yang sama yaitu 20 Nopember 2007 dibuat Berita Acara serah Terima Barang dari IRADAH HASBOELAH selaku Direktur PT. Adila Jaya Sukses Lestari kepada Pengurus Barang Unit Biro Hukum IRUSWANDI;
- Terdakwa pada tanggal 27 Nopember 2007 mengajukan permintaan pencairan dana kepada Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah (KPKD) dengan menandatangani dokumen Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap Nomor 77/ SPP/BT/BHK/ 2007 tanggal 27 Nopember 2007 ;
- Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap yang diajukan Terdakwa tersebut pada tanggal 27 Nopember 2007 PT. Adila Jaya Sukses menerima pembayaran dalam pengadaan Gema Hukum tahun 2007, setelah dipotong Pajak (Pph,PPN), sebesar Rp 2.420.925.000,- (*dua milyar empat ratus dua puluh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah*), yang dicairkan langsung ke rekening PT. Adila Jaya Sukses pada Bank DKI Cabang Pembantu Tebet nomor rekening 402-08-00668-9 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah PT.Adila Jaya Sukses menerima pembayaran, selanjutnya YUSYAPRIA UTAMA menyerahkan imbalan berupa uang kepada Terdakwa sebesar Rp 242.092.500,- (*dua ratus empat puluh dua juta sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah*) sebagaimana yang diminta oleh Terdakwa dan kepada MADE SUARJAYA sebesar Rp.25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*), di mana dari jumlah uang yang diterima Terdakwa tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;
- Perbuatan Terdakwa menerima imbalan berupa uang dari YUSYAPRIA UTAMA yang diketahui berkaitan dengan pengadaan barang/jasa yaitu pengadaan Gema Hukum Tahun 2007 yaitu pengadaan Gema Hukum yang bersumber dari APBD Propinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2007, tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yaitu Pasal 3 ayat (1) bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, dan KEPPRES Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang perubahan keempat Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah khususnya yang menyangkut prinsip dan etika dalam pengadaan barang/jasa yaitu Pasal 3 huruf c dan e bahwa pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip berupa: harus dilakukan terbuka dan bersaing, harus dilakukan secara adil/ tidak diskriminatif, Pasal 5 huruf g dan h yaitu pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan barang/jasa harus mematuhi etika berupa; menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; serta tidak menerima atau menawarkan atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa ;
- Akibat perbuatan terdakwa dalam pengadaan jasa Gema Hukum Tahun Anggaran 2007 dengan nilai kontrak Rp.2.788.500.000,- (*dua milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah*)

Hal. 27 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



telah memperkaya Terdakwa sebesar Rp.242.092.500,- (*dua ratus empat puluh dua juta sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah*), MADE SUARJAYA sebesar Rp.25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*) serta memperkaya YUSYAPRIA UTAMA atau PT. Adilla Jaya Sukses Rp.920.832.500,- (*sembilan ratus dua puluh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah*) dan mengakibatkan kerugian keuangan negara cq. keuangan pemerintah Propinsi DKI Jakarta sebesar Rp.1.187.925.000,- (*satu milyar seratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah*) atau sekitar jumlah tersebut .

VI. Dalam pengelolaan anggaran kegiatan pengurusan perkara Perdata, Pidana dan Tata Usaha Negara (TUN) yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran (TA) 2006.

- Pada tahun 2006 Biro Hukum Setda Propinsi DKI Jakarta mendapat alokasi anggaran untuk *honorarium, transport dan makan Tenaga Ahli dalam pengurusan perkara Perdata, Pidana dan Tata Usaha Negara (TUN)*, yang bersumber dari APBD Propinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran (TA) 2006 kode rekening 2.2.01.01.002 sebesar Rp.3.600.000.000,- (*tiga milyar enam ratus juta rupiah*) sebagaimana tercantum dalam Daftar Alokasi Satuan Kerja (DASK) Biro Hukum Setda Propinsi DKI Jakarta Tahun 2006 ;
- Terdakwa sebagai sebagai Kepala Biro Hukum Setda Propinsi DKI Jakarta yang dijabat sejak tanggal 5 Juli 2006, mengetahui bahwa terdapat sisa anggaran APBD Propinsi DKI Jakarta TA 2006 sebesar Rp.1.776.000.000,- (*satu milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta rupiah*) untuk belanja honorarium, transport dan makan tenaga Ahli berupa praktisi hukum atau advokat profesional dalam pengurusan perkara Perdata, Pidana dan Tata Usaha Negara (TUN), dengan kode rekening 2.2.01.01.002 yang belum dilaksanakan oleh pejabat sebelumnya yaitu HR. DEDED SUKANDAR ;
- Pada bulan Agustus 2006 Terdakwa memerintahkan BAHIR ROMSAH untuk membuat dokumen pencairan anggaran tersebut dengan menggunakan Putusan perkara baik perdata maupun Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap dengan maksud akan dipergunakan untuk insentif pribadi Terdakwa maupun orang lain termasuk beberapa atasan Terdakwa, bukan untuk pembayaran honorarium, transport dan makan Tenaga Ahli ;

Hal. 28 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BAHIR ROMSAH menindaklanjuti perintah Terdakwa tersebut dengan membuat SPM yang ditanda-tangani oleh Terdakwa menggunakan dasar putusan tingkat kasasi Nomor 2086/K/Pdt/2004 jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 63/Pdt.G/2002/PN.Jkt.Sel sehingga terbit SPM Giro Nomor 00132932006 tanggal 25 Agustus 2006 senilai Rp 976.000.000,- (*sembilan ratus tujuh puluh enam juta rupiah*), yang mana uang yang dicairkan berdasarkan SPM dimaksud dimasukkan langsung ke rekening pribadi BAHIR ROMSAH kemudian dicairkan secara tunai dan diserahkan seluruhnya kepada Terdakwa dengan bukti kuitansi tanda terima tertanggal 25 Agustus 2006 ;
- Terdakwa kemudian menggunakan uang sebesar Rp.976.000.000,- (*sembilan ratus tujuh puluh enam juta rupiah*) tidak untuk pembayaran honorarium, transport dan makan Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud di dalam DASK, akan tetapi dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri sebesar Rp.70.040.000,- (*tujuh puluh juta empat puluh ribu rupiah*), diberikan kepada Dr. RITOLA TASMAYA, MPH sebesar Rp.25.032.500,- (*dua puluh lima juta tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah*), AGUSDIN SUSANTO sebesar Rp 50.022.500,- (*lima puluh juta dua puluh dua ribu lima ratus rupiah*), SRI ASTUTI. R,SH sebesar Rp 30.005.000,- (*tiga puluh juta lima ribu rupiah*), MADE SUARJAYA sebesar Rp 30.005.000,- (*tiga puluh juta lima ribu rupiah*), MANSYUR MAHMUD,SH sebesar Rp 30.005.000,- (*tiga puluh juta lima ribu rupiah*), H. MOERDIMAN, RM, SH, MSi, RAHMAT, SH, MANGATUR.P,SH, ENDANG SRI RAHAYU, ISMIYATUN,SH, OR. ZAKARIAS, SH, ENDANG SUMARDI, SH, BUDI HARTONO, SH, RADIAH, SH, KAROLIS SIMATUPANG, SH, MH, MUKHLIS,SH, ROMY PURNAMA,SH masing-masing sebesar Rp 20.017.000,- (*dua puluh juta tujuh belas ribu rupiah*), BAHIR ROMSAH sebesar Rp.25.032.500,- (*dua puluh lima juta tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah*) dan sisanya oleh Terdakwa dibagikan kepada beberapa pegawai lainnya di Biro Hukum Setda Propinsi DKI Jakarta, yang mana pembagian uang tersebut telah dipotong pajak penghasilan sehingga seolah-olah merupakan pendapatan sah ;
- Dari sisa anggaran honorarium, transport dan makan Tenaga Ahli tahun 2006 sebesar Rp 800.000.000,- (*delapan ratus juta rupiah*), secara berturut-turut pada bulan September s/d Desember 2006 dicairkan dan dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi perjanjian yang dibuat

Hal. 29 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditandatangani oleh Terdakwa dengan 5 (lima) kantor advokat yaitu kantor advokat Novian and Partner, Adji Nuryasin and Partner, Buyung Nasution and Partner, Otto Hasibuan and Associates dan Yan Saputra and Partner, sebagai biaya dalam menghadapi perkara gugatan pembatalan Perda Perpajakan, laporan tindak pidana oleh Kaukus Lingkungan Hidup atas penebangan pohon beringin di Jl. Hayam Wuruk untuk jalur Busway, laporan tindak pidana atas penebangan pohon di Jl. Jenderal Sudirman untuk pelebaran jalan serta permintaan pendapat hukum mengenai lapangan sepak bola Menteng seluruhnya senilai Rp 798.500.000,- (*tujuh ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah*) ;

- Perbuatan Terdakwa mencairkan dan menggunakan anggaran honorarium, transport dan makan tenaga Ahli sebesar Rp.976.000.000,- (*sembilan ratus tujuh puluh enam juta rupiah*) untuk tujuan serta kegiatan-kegiatan lain dari yang telah ditetapkan pada APBD Tahun 2006 yaitu dibagi-bagikan dengan alasan insentif kepada perorangan termasuk Terdakwa, telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 192 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur bahwa Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pimpinan DPRD dan pejabat daerah lainnya dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD Jo Pasal 55 ayat (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman, Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasam Keuangan Daerah serta tata cara penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bahwa Pengguna Anggaran dilarang melakukan pengeluaran-pengeluaran atas beban belanja daerah untuk tujuan lain dari pada yang ditetapkan ;
- Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut merugikan keuangan Negara cq. Pemerintah Daerah Propinsi DKI Jakarta sebesar Rp 976.000.000,- (*sembilan ratus tujuh puluh enam juta rupiah*) atau setidaknya tidaknya sejumlah tersebut ;

VII. Dalam pengelolaan anggaran kegiatan pengurusan perkara Perdata, Pidana dan Tata Usaha Negara (TUN) yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2007 dan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) Tahun Anggaran 2007.

Hal. 30 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tahun 2007 Biro Hukum Setda Propinsi DKI Jakarta mendapat alokasi anggaran untuk honorarium, transport dan makan tenaga Ahli berupa praktisi hukum atau advokat profesional dalam pengurusan perkara Perdata, Pidana dan Tata Usaha Negara (TUN), yang bersumber dari APBD Propinsi DKI Jakarta TA 2007 kode rekening 2.2.01.01.002 sebesar Rp 2.850.000.000,- (*dua milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah*) sebagaimana tercantum dalam Daftar Alokasi Satuan Kerja (DASK) Biro Hukum tahun 2007 ;
- Terdakwa pada bulan Juni 2007 memerintahkan kepada BAHIR ROMSAH selaku Bendahara Biro Hukum pada Pemerintah Propinsi DKI Jakarta untuk mempersiapkan lagi dokumen pencairan sisa anggaran honorarium, transport dan makan tenaga Ahli berupa praktisi hukum atau advokat profesional dalam pengurusan perkara Perdata, Pidana dan Tata Usaha Negara (TUN), dengan menggunakan dasar honor atau insentif atas kemenangan suatu perkara yang telah ditangani, untuk dibagikan sebagai insentif pegawai pada Biro Hukum termasuk Terdakwa dan beberapa atasan Terdakwa bukan untuk digunakan sebagai honorarium kepada Ahli sebagaimana ditentukan di dalam DASK ;
- Memenuhi permintaan Terdakwa, akhirnya BAHIR ROMSAH menyusun dokumen pencairan berupa SPM Nomor 00030242007 tanggal 6 Juni 2007 yang ditandatangani oleh Terdakwa senilai Rp.1.029.345.571,- (*satu milyar dua puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah*), dengan menggunakan dasar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 182/Pdt.G/2005/PN.Jkt.Pst, dan mencairkan SPM tersebut langsung ke rekening pribadi BAHIR ROMSAH, dan mencairkan seluruhnya secara tunai untuk diserahkan kepada Terdakwa sesuai bukti kuitansi tanda terima tertanggal 8 Juni 2007 ;
- Terdakwa kemudian menggunakan uang sebesar Rp.1.029.345.571,- (*satu milyar dua puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah*) tidak untuk pembayaran honorarium, transport dan makan Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud di dalam DASK, akan tetapi dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri sebesar Rp.70.040.000,- (*tujuh puluh juta empat puluh ribu rupiah*), dibagikan kepada Dr. RITOLA TASMAYA, MPH sebesar Rp.20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*), AGUSDIN SUSANTO sebesar

Hal. 31 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*), SRI ASTUTI. R, SH, MADE SUARJAYA, MANSYUR MAHMUD, SH, SAUT PURBA, SH masing-masing sebesar Rp.35.000.000,- (*tiga puluh lima juta rupiah*), RAHMAT, SH, MANGATUR. P, SH, ENDANG SRI RAHAYU, ISMIYATUN, SH, OR. ZAKARIAS, SH, ENDANG SUMARDI, SH, BUDI HARTONO, SH, RADIAH, SH, KAROLIS SIMATUPANG, MUKHLIS, SH masing-masing sebesar Rp.22.500.000,- (*dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*), BAHIR ROMSAH sebesar Rp 30.000.000,- (*tiga puluh juta rupiah*), H. MOERDIMAN, RM, SH, MSi sebesar Rp.20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*) dan sisanya oleh Terdakwa dibagikan kepada beberapa pegawai lainnya di Biro Hukum Setda Propinsi DKI Jakarta, yang mana pembagian uang tersebut telah dipotong pajak penghasilan sehingga seolah-olah merupakan pendapatan sah ;

- Terdakwa pada tanggal 28 Juni 2007 dan tanggal 3 Juli 2007 mencairkan anggaran honorarium, transport dan makan tenaga Ahli untuk membayar honorarium advokat Novian and Partner sebagaimana dimaksud dalam perjanjian dalam penanganan 2 (dua) perkara perdata dan TUN tertanggal 9 Januari 2007 dan 9 Pebruari 2007, yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa dengan advokat Novian and Partner sebesar Rp.697.000.000,- (*enam ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah*) dipotong pajak 10% ;
- Terdakwa yang mengetahui bahwa masih terdapat anggaran honorarium, transport dan makan tenaga Ahli tahun 2007 yang belum dipergunakan, maka pada bulan September 2007 memerintahkan lagi kepada BAHIR ROMSAH selaku Bendahara Biro Hukum pada Pemerintah Propinsi DKI Jakarta untuk mempersiapkan dokumen pencairan sisa anggaran honorarium, transport dan makan tenaga Ahli berupa praktisi hukum atau advokat profesional dalam pengurusan perkara Perdata, Pidana dan Tata Usaha Negara (TUN) yang belum terpakai, dengan menggunakan dasar honor atau insentif atas kemenangan perkara yang telah ditangani, untuk dibagikan sebagai insentif pegawai pada Biro Hukum termasuk Terdakwa dan beberapa atasan Terdakwa bukan untuk digunakan sebagai honorarium kepada Ahli sebagaimana ditentukan di dalam DASK ;
- BAHIR ROMSAH akhirnya menyusun dokumen pencairan berupa SPM Nomor 00104712007 tanggal 21 September 2007 yang ditandatangani oleh Terdakwa senilai Rp.1.120.654.429,- (*satu milyar seratus dua*

Hal. 32 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta enam ratus lima puluh empat ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah), dengan menggunakan dasar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 476/Pdt.G/2005/PN.Jkt.Pst, kemudian BAHIR ROMSAH mencairkan SPM Nomor 00104712007 tanggal 21 September 2007 senilai Rp 1.120.654.429,- (*satu milyar seratus dua puluh juta enam ratus lima puluh empat ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah*) sesuai dengan perintah terdakwa, yang mana pencairan tersebut dimasukkan langsung ke rekening pribadi BAHIR ROMSAH, dan setelah itu BAHIR ROMSAH mencairkan secara tunai dan diserahkan seluruhnya kepada Terdakwa dengan bukti kuitansi tanda terima tertanggal 21 September 2007 ;

- Terdakwa kemudian menggunakan uang sebesar Rp.1.120.654.429,- (*satu milyar seratus dua puluh juta enam ratus lima puluh empat ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah*) tidak untuk pembayaran honorarium, transport dan makan Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud di dalam DASK, akan tetapi dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri sebesar Rp.50.040.000,- (*lima puluh juta empat puluh ribu rupiah*), diberikan kepada AGUSDIN SUSANTO sebesar Rp.40.000.000,- (*empat puluh juta rupiah*), SRI ASTUTI. R, SH, MADE SUARJAYA, MANSYUR MAHMUD, SH dan SAUT PURBA, SH masing-masing sebesar Rp 30.000.000,- (*tiga puluh juta rupiah*), H. MOERDIMAN, RM, SH, Msi, RITOLA TASMAHA, MPH, RAHMAT, SH, MANGATUR. P, SH, ENDANG SRI RAHAYU, ISMIYATUN, SH, OR. ZAKARIAS, SH, ENDANG SUMARDI, SH, BUDI HARTONO, SH, RADIAH, SH, KAROLIS SIMATUPANG, SH, MH, MUKHLIS, SH, ROMY PURNAMA, SH masing-masing sebesar Rp 20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*), BAHIR ROMSAH sebesar Rp 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*) dan sisanya oleh Terdakwa dibagikan kepada beberapa pegawai lainnya di Biro Hukum Setda Propinsi DKI Jakarta, yang mana pembagian uang tersebut telah dipotong pajak penghasilan sehingga seolah-olah merupakan pendapatan sah ;
- Pada tanggal 20 Nopember 2007, Biro Hukum Setda Propinsi DKI Jakarta memperoleh Anggaran Biaya Tambahan (ABT) untuk honorarium, transport dan makan tenaga Ahli berupa praktisi hukum atau advokat profesional dalam pengurusan perkara Perdata, Pidana dan Tata Usaha Negara (TUN) berdasarkan Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD)

Hal. 33 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 006/DPPA/2007 sebesar Rp 2.500.000.000,- (*dua milyar lima ratus juta rupiah*) ;

- Anggaran tersebut di atas pada tanggal 21 Desember 2007 digunakan oleh Terdakwa untuk membayar honorarium kepada kantor advokat Luhut Pangaribuan and Partner sebesar Rp.1.500.000.000,- (*satu milyar lima ratus juta rupiah*) setelah dipotong pajak 10%, berdasarkan perjanjian tertanggal 24 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan advokat Luhut Pangaribuan and Partner dalam rangka menghadapi gugatan dari PT. Portanigra ;
- Terdakwa yang mengetahui bahwa masih terdapat anggaran honorarium, transport dan makan tenaga Ahli ABT Tahun 2007 yang belum dipergunakan, maka pada bulan Desember 2007 memerintahkan lagi kepada BAHIR ROMSAH selaku Bendahara Biro Hukum pada Pemerintah Propinsi DKI Jakarta untuk mempersiapkan dokumen pencairan sisa anggaran ABT Tahun 2007 untuk honorarium, transport dan makan tenaga Ahli berupa praktisi hukum atau advokat profesional dalam pengurusan perkara Perdata, Pidana dan Tata Usaha Negara (TUN) yang belum dipergunakan, dengan menggunakan dasar honor atau insentif atas kemenangan suatu perkara yang telah ditangani, dengan maksud untuk dimiliki secara pribadi oleh Terdakwa bukan digunakan sebagai honorarium kepada Ahli sebagaimana ditentukan di dalam DASK ;
- BAHIR ROMSAH kemudian menyusun dokumen pencairan berupa SPM Nomor 00193532007 tanggal 12 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Terdakwa senilai Rp.1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*), dengan menggunakan dasar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 101/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Pst, selanjutnya BAHIR ROMSAH mencairkan SPM Nomor 00193532007 tanggal 12 Desember 2007 senilai Rp.1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*), yang mana uang tersebut dimasukkan langsung ke rekening pribadi BAHIR ROMSAH, dan setelah itu BAHIR ROMSAH mencairkan secara tunai dan diserahkan seluruhnya kepada Terdakwa dengan bukti kuitansi tanda terima tertanggal 12 Desemberr 2007. Uang tersebut kemudian dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kepentingan pribadi Terdakwa ;
- Perbuatan Terdakwa mencairkan dan menggunakan anggaran honorarium, transport dan makan tenaga Ahli berupa praktisi hukum

Hal. 34 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



atau advokat profesional dalam pengurusan perkara Perdata, Pidana dan Tata Usaha Negara (TUN) untuk untuk tujuan serta kegiatan-kegiatan lain dari yang telah ditetapkan pada APBD Tahun 2007 yaitu dibagi-bagikan dengan alasan insentif kepada perorangan termasuk Terdakwa, telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 192 ayat (4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur bahwa Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, pimpinan DPRD dan pejabat daerah lainnya dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD Jo Pasal 55 ayat (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman, Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasam Keuangan Daerah serta tata cara penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bahwa Pengguna Anggaran dilarang melakukan pengeluaran-pengeluaran atas beban belanja daerah untuk tujuan lain dari pada yang ditetapkan ;

- Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut merugikan keuangan Pemerintah Daerah Propinsi DKI Jakarta sebesar Rp.3.150.000.000,- (*tiga milyar seratus lima puluh juta rupiah*) atau setidaknya tidaknya sejumlah tersebut ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan pada angka I, II, III, IV, V, VI dan VII tersebut diatas dalam pengadaan Filler Hukum dan Gema Hukum serta Pencairan dana honorarium, transpor dan makan ahli pada Biro Hukum Setda Propinsi DKI Jakarta dari APBD Tahun 2006 , ABT Tahun 2006, APBD Tahun 2007 dan ABT Tahun 2007, telah memperkaya Terdakwa sebesar Rp.2.756.324.375,-(*dua milyar tujuh ratus lima puluh enam juta tiga ratus dua puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah*), BAHIR ROMSAH sebesar Rp.157.334.875,- (*seratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah*), MADE SUARJAYA sebesar Rp 240.005.000,- (*dua ratus empat puluh juta lima ribu rupiah*), BUDI HARTONO sebesar Rp.119.410.375,- (*seratus sembilan belas juta empat ratus sepuluh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah*), Dr. RITOLA TASMAYA, MPH sebesar Rp.65.032.500,- (*enam puluh lima juta tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah*), AGUSDIN SUSANTO sebesar Rp 140.022.500,- (*seratus empat puluh juta dua puluh dua ribu*

Hal. 35 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



lima ratus rupiah), SRI ASTUTI. R, SH sebesar Rp.95.005.000,- (sembilan puluh lima juta lima ribu rupiah), MANSYUR MAHMUD,SH sebesar Rp 95.005.000,- (sembilan puluh lima juta lima ribu rupiah), H. MOERDIMAN, RM, SH,MSi sebesar Rp 60.017.000,- (enam puluh juta tujuh belas ribu rupiah), RAHMAT,SH, MANGATUR.P,SH, ENDANG SRI RAHAYU, ISMIYATUN,SH, OR.ZAKARIAS,SH, ENDANG SUMARDI,SH, RADIAH,SH, KAROLIS SIMATUPANG, SH, MH, MUKHLIS,SH, ROMY PURNAMA masing-masing sebesar Rp.62.517.000,- (enam puluh dua juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah), SAUT PURBA,SH sebesar Rp65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), RINA MELANIA PRIYATNA atau PT.Anugrah Cipta Pratama sebesar Rp.373.408.629 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus delapan ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah), RAJ INDRA SINGH dan HERMAN FELANI atau PT. Raditya Putra Bahtera sebesar Rp.999.209.000,- (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus sembilan ribu rupiah), YUSYAPRIA UTAMA atau PT.Adila Jaya Sukses sebesar Rp.920.859.500 (sembilan ratus dua puluh juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), YUSYAPRIA UTAMA atau PT.Trendeka Lestari sebesar Rp.1.783.650.000,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), HERMAN FELANI atau CV. Sandi Perkasa sebesar Rp.1.131.535.938,- (satu milyar seratus tiga puluh satu juta lima ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah) dan memperkaya beberapa pegawai lainnya di Biro Hukum Setda Pemerintah DKI Jakarta, yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara Cq. Keuangan daerah propinsi DKI Jakarta sebesar Rp.11.218.722.379,- (sebelas milyar dua ratus delapan belas jutatujuh ratus dua puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah) sesuai dengan Laporan BPK Nomor 03/LAP/XXV/07/2010 tanggal 8 Juli 2010.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa JORNAL EFFENDI SIAHAAN selaku Kepala Biro Hukum berdasarkan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor : 1035/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Juli 2006 dan atau selaku Kuasa Penggunaan Anggaran (KPA) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor 288 Tahun 2006 tanggal 3 Maret 2006 pada Sekretariat Daerah Propinsi DKI Jakarta pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Propinsi DKI Jakarta jo Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor : 486 Tahun 2007 tanggal 9 April 2007, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan AGUSDIN SUSANTO, R. NORMAN, HERMAN FELANI, RAJ INDRA SINGH, ARIS BOEDIARJO bersama RINA MELANIA PRIYATNA, Ir. RATNANINGSIH, TRIYITNO UNARTO dan YUSYAPRIA UTAMA pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu Primair di atas, *melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi* yaitu telah menguntungkan diri Terdakwa, atau menguntungkan orang lain yaitu BAHIR ROMSAH, MADE SUARJAYA, BUDI HARTONO, Dr. RITOLA TASMAYA, MPH, AGUSDIN SUSANTO, SRI ASTUTI, R, SH, MANSYUR MAHMUD, SH, H. MOERDIMAN, RM, SH, MSi, RAHMAT, SH, MANGATUR, P, SH, ENDANG SRI RAHAYU, ISMIYATUN, SH, OR. ZAKARIAS, SH, ENDANG SUMARDI, SH, RADIAH, SH, KAROLIS SIMATUPANG, SH, MH, MUKHLIS, SH, ROMY PURNAMA, SAUT PURBA, SH, RINA MELANIA PRIYATNA atau PT. Anugrah Cipta Pratama, RAJ INDRA SINGH dan HERMAN FELANI atau PT. Raditya Putra Bahtera, YUSYAPRIA UTAMA atau PT. Adila Jaya Sukses, YUSYAPRIA UTAMA atau PT. Trendeka Lestari, HERMAN FELANI atau CV. Sandi Perkasa serta beberapa pegawai pada Biro Hukum Setda Propinsi DKI Jakarta lainnya, *menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan* selaku Kepala Biro Hukum atau sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Biro Hukum Setda Propinsi DKI Jakarta, dalam pengadaan Jasa Filler Hukum dan Gema Hukum pada Biro Hukum Setda Propinsi DKI Jakarta Tahun anggaran 2006 dan 2007, secara diskriminatif telah menjanjikan calon rekanan sebagai pemenang sebelum pelelangan, mengarahkan dan memerintahkan AGUSDIN SUSANTO sebagai Kabag Pelayanan Hukum, R. NORMAN sebagai Kabag Dokumentasi & Publikasi serta MADE SUARJAYA sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa tahun 2006 dan 2007 untuk memenangkan rekanan tertentu yaitu PT. Anugrah Cipta Pratama Prima, PT. Raditya Putra Bahtera, CV. Sandi Perkasa, dan PT. Trendeka Lestari, PT. Adila Jaya Sukses, dengan tidak mengindahkan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang *Keuangan Negara* dan Keppres Nomor 80

Hal. 37 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Tahun 2003 tentang *Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah* sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 8 Tahun 2006 serta telah mencairkan dan menggunakan anggaran kegiatan honorarium, transport dan makan ahli untuk tujuan atau kegiatan selain yang telah ditetapkan di dalam APBD 2006 dan 2007 pada Biro Hukum Setda Propinsi DKI Jakarta, dengan tidak mengindahkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah* jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 tentang *Pedoman, Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta tata cara penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu merugikan keuangan Pemerintah Daerah Propinsi DKI sebesar Rp.11.218.722.379,- (*sebelas milyar dua ratus delapan belas juta tujuh ratus dua puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah*) perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- I. Pengadaan Filler Hukum yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2006.
 - Terdakwa sebagai Kepala Biro Hukum Setda Propinsi DKI Jakarta dan atau sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Biro Hukum Setda Propinsi DKI Jakarta yang mengetahui bahwa Biro Hukum Setda Propinsi DKI Jakarta mendapat alokasi anggaran pengadaan Filler Hukum (iklan tentang penegakan hukum) sebesar Rp 1.228.500.000,- (*satu milyar dua ratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah*) yang bersumber dari APBD Propinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2006 pada bulan Juli 2006 mengadakan rapat di ruang kerja Biro Hukum dengan para Kepala Bagian (Kabag) pada Biro Hukum Setda Propinsi DKI Jakarta yaitu R. NORMAN, NOERWENDA, AGUSDIN SUSANTO dan SRI RAHAYU yang dihadiri pula oleh BAHIR ROMSAH selaku Pemegang Kas Cabang (PKC)/ Bendahara Biro Hukum, dimana dalam pertemuan tersebut Terdakwa memberikan perintah agar setiap kegiatan pada Biro Hukum di masing-masing bagian melakukan pemotongan anggaran sebesar 10% setelah dipotong pajak dan hasil pemotongan tersebut dikumpulkan di PKC atau Bendahara Biro Hukum;
 - Dalam pertemuan tersebut Terdakwa mendapat laporan dari R. NORMAN selaku Kepala Bagian (Kabag) Dokumentasi dan Publikasi Hukum bahwa dalam pengadaan Filler Hukum, DEDED SUKANDAR



selaku pejabat Kepala Biro Hukum yang lama telah memilih PT.Fortune Indonesia sebagai pelaksana atau pemenang dengan menyalahgunakan kewenangannya. Untuk itu Terdakwa memerintahkan R. NORMAN agar menghadapkan pimpinan PT.Fortune Indonesia kepada Terdakwa, dimana setelah rapat di ruang kerja Biro Hukum pihak PT.Fortune Indonesia yaitu ARIS BOEDIARDJO selaku *Chief Operating Officer* dan RINA MELANIA PRIYATNA selaku Senior Account Executive menghadap kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada ARIS BOEDIARDJO dan RINA MELANIA PRIYATNA menyetujui ARIS BOEDIARDJO mengerjakan proyek Filler Hukum ;

- Menindaklanjuti perintah Terdakwa, R. NORMAN memanggil MADE SUARJAYA selaku Ketua Panitia Lelang Pengadaan Tahun 2006 pada Biro Hukum dan memerintahkan agar Panitia Lelang dalam pengadaan Filler Hukum membantu memenangkan penyedia barang yang telah ditentukan dan disetujui oleh Terdakwa yaitu PT. Fortune Indonesia, untuk itu Panitia Lelang dalam membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pada pengadaan Filler Hukum dan proses lelang diarahkan untuk memenangkan PT. Fortune Indonesia dengan cara menyamakan HPS dengan acuan harga yang dibuat oleh pihak PT. Fortune Indonesia ;
- Pada tanggal 12 Oktober 2006, Panitia Lelang mengadakan pengumuman lelang di Harian Terbit Jakarta, karena klasifikasi yang diinginkan merupakan perusahaan K (Kecil)/non besar sedangkan PT. Fortune Indonesia termasuk dalam perusahaan klasifikasi B (Besar), maka PT. Fortune tidak jadi didaftarkan sebagai peserta lelang dan digantikan dengan PT. Anugrah Cipta Pratama Prima yang didaftarkan oleh RINA MELANIA PRIYATNA pada tanggal 14 Oktober 2006. Beberapa hari kemudian RINA MELANIA PRIYATNA mendaftarkan 6 (enam) perusahaan disertai dengan kuasa dari perusahaan tersebut sebagai formalitas untuk mendampingi PT. Anugrah Cipta Pratama Prima sebagai peserta lelang Filler Hukum yaitu CV. Sinar Azka, CV Hongga Jaya, CV. Poly Lestari, CV. Salsabila, CV. Buana Permai dan CV. Mandiri Jaya Abadi ;
- Pada tanggal 19 Oktober 2006 dilakukan *aanwijzing* (penjelasan lelang) kepada peserta lelang dan pemasukan dokumen tanggal 20 Oktober 2006, namun hanya dihadiri oleh RINA MELANIA PRIYATNA dan SYAFRUDDIN masing-masing selaku wakil dari PT. Anugrah Cipta

Hal. 39 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama Prima dan CV. Salsabila, kemudian MADE SUARJAYA meminta RINA MELANIA PRIYATNA untuk menjilid seluruh dokumen aanwijzing serta meminta tanda tangan peserta lainnya yang tidak hadir dan melengkapi berkas pemasukan dokumen bagi peserta yang tidak hadir, sehingga secara formal nampak peserta yang lainnya seolah-olah hadir dalam acara aanwijzing maupun pemasukan dokumen ;

- Terdakwa pada tanggal 30 Oktober 2006 menetapkan HPS dengan nilai Rp.990.412.500,- (*sembilan ratus sembilan puluh juta empat ratus dua belas ribu lima ratus rupiah*), yang disusun oleh MADE SUARJAYA selaku Ketua Panitia Lelang hanya berdasarkan patokan harga yang dibuat oleh ARIS BOEDIARDJO namun isinya telah diformalkan menjadi lampiran surat Nomor 3359/073/532 tanggal 16 Agustus 2006 dari Biro Perlengkapan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta yang telah menyebutkan acuan nilai sama dengan HPS yang disusun oleh MADE SUARJAYA ;
- Pada tanggal 31 Oktober 2006 dilakukan pembukaan dokumen sampul I dan tanggal 1 Nopember 2006 pembukaan Surat Penawaran Harga (SPH) sampul II, namun kedua proses tersebut juga hanya dihadiri oleh RINA MELANIA PRIYATNA dan SYAFRUDDIN, sedangkan kelengkapan formalitas dokumen bagi peserta yang tidak hadir atas permintaan MADE SUARJAYA dilengkapi oleh RINA MELANIA PRIYATNA sehingga peserta yang tidak hadir seolah-olah nampak hadir. Setelah dilakukan evaluasi oleh Panitia Lelang, PT. Anugrah Cipta Pratama Prima yang sejak awal diatur sebagai pemenang, mengajukan Surat Penawaran Harga (SPH) sama dengan nilai HPS yang dibuat oleh Panitia Lelang sedangkan peserta lain, penawarannya dibuat lebih tinggi dari HPS panitia sehingga PT Anugrah Cipta Pratama diusulkan sebagai pemenang lelang oleh Panitia Lelang kepada Terdakwa selaku Kepala Biro Hukum ;
- Terdakwa pada tanggal 9 Nopember 2006 menandatangani Surat Keputusan (SK) Nomor : 719/A/077.92 tanggal 9 Nopember 2006 yang berisi penetapan PT. Anugrah Cipta Pratama Prima sebagai pemenang lelang dalam pengadaan jasa filler Biro Hukum Setda Propinsi DKI Jakarta 2006 ;
- Setelah penetapan PT. Anugrah Cipta Pratama sebagai pemenang lelang, R. NORMAN mengingatkan RINA MELANIA PRIYATNA yang sebelumnya telah diberitahu oleh INDRAWATI S. DANI tentang

Hal. 40 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komitmen untuk memenuhi permintaan Terdakwa adanya kewajiban pemenang lelang menyetorkan uang sebesar 10% dari nilai kontrak setelah dipotong pajak kepada Bendahara Biro Hukum ;

- Terdakwa pada tanggal 17 Nopember 2006 dan ASEP YUDI PRIADI selaku Direktur Utama PT.Anugrah Cipta Pratama Prima menandatangani Surat Perjanjian Pelelangan Umum Pengadaan Jasa Filler Hukum Setda Propinsi DKI Jakarta dengan jenis pekerjaan berupa pembuatan iklan layanan masyarakat untuk busway dan kawasan dilarang merokok serta penayangan pada 2 (dua) media TV meliputi stasiun TV swasta sebanyak 268 (dua ratus enam puluh delapan) kali tayang (spot) @ 30 (tiga puluh) detik senilai Rp.990.412.500,- (sembilan ratus sembilan puluh juta empat ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) yang dituangkan ke dalam Surat Perjanjian Nomor 746/077.5 tanggal 17 Nopember 2006 ;
- Pada tanggal 14 Desember 2006 atas permintaan INDRAWATI S. DANI, Panitia Pemeriksaan Barang/Jasa BUDI HARTONO menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang (BAPB) Nomor 37/BAPB/BH/XII/2006 tanggal 14 Desember 2006 tanpa terlebih dahulu melakukan pengecekan atas penayangan filler hukum yang pengadaannya dilakukan oleh PT. Anugrah Cipta Pratama Prima, namun hanya melihat pemutaran CD yang diberikan oleh INDRAWATI S. DANI berjudul *BUSWAY DAN KAWASAN DILARANG MEROKOK* serta *KETERTIBAN BERLALU LINTAS DAN KEBERSIHAN LINGKUNGAN Post Transmission* dari PT. Indosiar Visual Mandiri, kemudian pada tanggal yang sama dibuat Berita Acara serah Terima Barang dari ASEP YUDI PRIADI selaku Direktur Utama PT. Anugrah Cipta Pratama Prima kepada Pengurus Barang Unit Biro Hukum IRUSWANDI ;
- Terdakwa pada tanggal 20 Desember 2006 menandatangani dokumen Daftar Rincian Rencana Penggunaan Beban Tetap Nomor 187/ SPP/ 2006 tanggal 19 Desember 2006 yang akan digunakan oleh Asisten Keuangan selaku Pemegang Kas Setda Propinsi DKI Jakarta sebagai dasar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah (KPKD) untuk rekanan PT. Anugrah Cipta Pratama Prima ;
- Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan oleh Asisten Keuangan Setda Propinsi DKI Jakarta Nomor 260/SPP/SWD/

Hal. 41 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BB/XII/2006 tanggal 19 Desember 2006, PT. Anugrah Cipta Pratama Prima menerima Pembayaran dalam pengadaan Filler Hukum tahun 2006 setelah dipotong Pajak (PPh, PPN), sebesar Rp.846.352.500,- (*delapan ratus empat puluh enam juta tiga ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah*) yang dicairkan langsung ke rekening PT. Anugrah Cipta Pratama Prima pada Bank Ekonomi Raharja Cabang Cibubur nomor rekening 2191866561 ;

- Setelah PT.Anugrah Cipta Pratama Prima menerima pembayaran dalam pengadaan filler hukum sebesar Rp.846.352.500,- (*delapan ratus empat puluh enam juta tiga ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah*) Terdakwa menerima hadiah atau imbalan berupa uang sebagaimana yang diminta oleh Terdakwa sebesar Rp.191.557.000,- (*seratus sembilan puluh satu juta lima ratus lima puluh tujuh rupiah*) melalui R.NORMAN yang terbagi menjadi 3 (tiga) amplop, yang masing-masing amplop telah bertuliskan tujuan penerima amplop yaitu:

- Untuk Kas Biro sebesar Rp 84.630.000,- (*delapan puluh empat juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah*) ;
- Untuk Panitia Pemeriksa Barang sebesar Rp.16.927.000,- (*enam belas juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah*) ;
- Untuk bagian Dokumentasi dan Publikasi Hukum sebesar Rp.75.000.000,- (*tujuh puluh lima juta rupiah*) ;
- Untuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa sebesar Rp.15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*) ;

- Keempat amplop yang berisi uang tersebut oleh R. NORMAN diserahkan kepada PANITYONO, selanjutnya oleh PANITYONO amplop yang bertuliskan untuk bagian Dokumentasi & Publikasi Hukum sebesar Rp.75.000.000,- (*tujuh puluh lima juta rupiah*) disimpan di dalam brankas PANITYONO, amplop yang bertuliskan untuk Kas Biro Hukum sebesar Rp.84.630.000,- (*delapan puluh empat juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah*) diserahkan kepada PKC yaitu BAHIR ROMSAH sesuai dengan perintah Terdakwa, untuk Pengurus Barang dan yang bertuliskan untuk Panitia Pemeriksa Barang sebesar Rp.16.927.000,- (*enam belas juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah*) diserahkan kepada Panitia Pemeriksaan Barang/Jasa BUDI HARTONO, sedangkan untuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa diserahkan kepada MADE SUARJAYA yang mana dari jumlah uang yang terkumpul pada BAHIR ROMSAH dan PANITYONO sebesar Rp.159.630.000,-

Hal. 42 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(seratus lima puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah)
tersebut kemudian dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;

- Perbuatan Terdakwa memerintahkan untuk memenangkan pihak tertentu yaitu PT.Anugrah Cipta Pratama Prima dalam pengadaan jasa Filler Hukum Tahun 2006 dan menerima imbalan berupa uang dari RINA MELANIA PRIYATNA yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa yaitu pengadaan Filler Hukum APBD Tahun 2006 tersebut menyimpang dari kewenangan Terdakwa selaku Kepala Biro Hukum maupun selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) serta bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yaitu Pasal 3 ayat (1) bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan dan KEPPRES Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang perubahan keempat Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah khususnya yang menyangkut prinsip dan etika dalam pengadaan barang/jasa yaitu Pasal 3 huruf c dan e bahwa pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip berupa: harus dilakukan terbuka dan bersaing, harus dilakukan secara adil/ tidak diskriminatif, Pasal 5 huruf g dan h yaitu pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan barang/jasa harus mematuhi etika berupa; menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; serta tidak menerima atau menawarkan atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa ;
- Akibat perbuatan terdakwa dalam pengadaan jasa Filler Hukum Tahun 2006 dengan nilai kontrak Rp.990.412.500,- *(sembilan ratus sembilan puluh juta empat ratus dua belas ribu lima ratus rupiah)* telah menguntungkan Terdakwa sebesar Rp.159.630.000,- *(seratus lima puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah)*, BUDI HARTONO sebesar Rp.16.927.000,- *(enam belas juta sembilan ratus*

Hal. 43 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh tujuh ribu rupiah), MADE SUARJAYA sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) serta RINA MELANIA PRIYATNA atau PT. Anugrah Cipta Pratama Prima sebesar Rp.373.408.629 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus delapan ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah) dan mengakibatkan kerugian keuangan negara cq. keuangan pemerintah Propinsi DKI Jakarta sebesar Rp.564.965.629,- (lima ratus enam puluh empat juta sembilan ratus enam puluh lima ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah) atau sekitar jumlah tersebut ;

II. Pengadaan Filler Hukum yang bersumber dari APBD Anggaran Biaya Tambahan (ABT) Tahun Anggaran 2006.

- Terdakwa sebagai Kepala Biro Hukum Setda Propinsi DKI Jakarta dan atau sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Biro Hukum Setda Propinsi DKI Jakarta yang mengetahui bahwa Biro Hukum Setda Propinsi DKI Jakarta mendapat alokasi anggaran pengadaan Filler Hukum (iklan tentang penegakan hukum) sebesar Rp.2.310.000.000,- (*dua milyar tiga ratus sepuluh juta rupiah*) yang bersumber dari APBD ABT Propinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2006, pada bulan Oktober 2006 Terdakwa mendapat laporan dari R. NORMAN bahwa RAJ INDRA SINGH dan HERMAN FELANI dari PT.Mega Vision telah datang menemui R. NORMAN dan meminta agar mereka yang mengerjakan proyek Filler Hukum yang bersumber dari ABT 2006 karena mereka yang mengurus anggaran di DPRD, namun yang akan diikutkan dalam pengadaan Filler Hukum tersebut adalah PT. Raditya Putra Bahtera. Atas laporan R. NORMAN tersebut Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa juga telah dihubungi oleh orang dari DPRD yang meminta untuk memenangkan RAJ INDRA SINGH dan HERMAN FELANI dalam pengadaan Filler Hukum dan Terdakwa mengatakan tidak jadi masalah yang penting jatah uang bagi anggota DPRD tersebut jangan dibebankan kepada Biro Hukum, disamping itu calon rekanan tersebut harus sanggup memberikan dana efisiensi 10% kepada Biro Hukum, untuk itu Terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangannya memerintahkan R. NORMAN untuk melaksanakan rencana dimaksud ;
- Terdakwa selanjutnya memanggil MADE SUARJAYA selaku Ketua Panitia Pengadaan tahun 2006, dan dengan menyalahgunakan

Hal. 44 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangannya Terdakwa meminta kepada MADE SUARJAYA untuk membantu memenangkan RAJ INDRA SINGH dan HERMAN FELANI dalam pengadaan Filler Hukum yang bersumber dari APBD ABT Tahun Anggaran 2006 ;

- Terdakwa selanjutnya memerintahkan MADE SUARJAYA untuk membicarakan dengan RAJ INDRA SINGH dan HERMAN FELANI tentang kesanggupan untuk memberikan efisiensi 10% dari nilai kontrak setelah dipotong pajak. MADE SUARJAYA kemudian menyampaikan kepada Terdakwa bahwa R. NORMAN dan MADE SUARJAYA sudah bertemu dengan RAJ INDRA SINGH maupun HERMAN FELANI dimana yang bersangkutan sanggup untuk memenuhi permintaan Terdakwa berupa efisiensi 10% setelah dipotong pajak ;
- Menindaklanjuti perintah Terdakwa maka MADE SUARJAYA membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) berdasarkan HPS dari Biro Perlengkapan untuk Pengadaan Filler Hukum yang bersumber dari APBD Murni 2006 yang ditetapkan oleh Terdakwa selaku Kepala Biro Hukum tanggal 1 Nopember 2006 sebagai lampiran surat perintah pelelangan Nomor 689/-077.921, dengan cara menurunkan komposisi biaya pembuatan dibanding penayangan per paket sesuai permintaan RAJ INDRA SINGH sehingga RAJ INDRA SINGH bisa mendapatkan untung dari proyek tersebut, dimana nilai HPS akhirnya dibuat sebesar Rp 2.235.200.000,- (*dua milyar dua ratus tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah*) di bawah nilai anggaran sebagaimana yang ditetapkan dalam Dana Alokasi Satuan Kegiatan (DASK), dengan spesifikasi spot sebanyak 320 spot, waktu 30 menit dan ditayangkan oleh 2 (dua) stasiun TV ;
- Pada tanggal 20 Nopember 2006 Panitia Lelang mengadakan pengumuman di Harian Media Indonesia dan beberapa hari kemudian terdapat 20 (dua puluh) peserta termasuk perusahaan RAJ INDRA SINGH dan HERMAN FELANI yaitu PT. Mega Vision Utama dan PT. Raditya Putra Bahtera, yang didaftarkan TRIYITNO UNARTO, GUNTUR INDRAYANA dan AGUS mewakili RAJ INDRA SINGH dan HERMAN FELANI. Pada saat mendaftarkan PT. Raditya Putra Bahtera dan PT.Mega Vision Utama tersebut, TRIYITNO UNARTO dan GUNTUR INDRAYANA menyampaikan kepada MADE SUARJAYA bahwa sesuai pesan RAJ INDRA SINGH dan HERMAN FELANI agar yang dimenangkan PT.Raditya Putra Bahtera, sedangkan PT.Mega

Hal. 45 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vision Utama hanya diajukan sebagai pendamping bersama perusahaan-perusahaan yang tertera dalam *company profile* yang telah diserahkan oleh TRIYITNO UNARTO kepada MADE SUARJAYA sebelumnya yaitu PT.Pilot Project Production, dengan tujuan supaya tidak menimbulkan kecurigaan publik karena pada waktu yang bersamaan PT.Mega Vision Utama sedang mengerjakan proyek di DPRD Propinsi DKI Jakarta berupa proyek sosialisasi melalui media TV senilai Rp.40.000.000.000,- (*empat puluh milyar rupiah*). Untuk itu MADE SUARJAYA memberitahukan nilai HPS kepada TRIYITNO UNARTO dan GUNTUR INDRAYANA dengan tujuan supaya PT.Raditya Putra Bahtera dapat mengajukan penawaran terendah di bawah nilai HPS ;

- Dari 20 (dua puluh) perusahaan yang mendaftar, setelah dilakukan *aanwijzing* hanya terdapat 5 (lima) perusahaan yang melakukan penawaran harga yaitu PT.Tiga Vision, PT.Pilot Project Production, PT.Trias Mulya Abadi Perkasa termasuk PT.Raditya Putra Bahtera dan PT.Mega Vision Utama milik RAJ INDRA SINGH dan HERMAN FELANI, dimana setelah dilakukan pembukaan sampul 1 (satu) tanggal 29 Nopember 2006 berupa pengecekan administrasi hanya 2 (dua) perusahaan yang dinyatakan oleh Panitia Lelang lolos atau lengkap administrasinya yaitu PT. Raditya Putra Bahtera dan PT. Trias Mulya Abadi Perkasa ;
- Pada tanggal 1 Desember 2006 dilakukan pembukaan sampul 2 (dua) mengenai Surat Penawaran Harga (SPH), dimana PT. Raditya Putra Bahtera akhirnya mengajukan penawaran terendah pertama sesuai dengan yang direncanakan yaitu dengan nilai sebesar Rp 2.184.600.000,- (*dua milyar seratus delapan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah*), sedangkan terendah kedua yaitu PT.Trias Mulya Abadi Perkasa sebesar Rp 2.240.150.000,- (*dua milyar dua ratus empat puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah*). Atas dasar hasil penawaran terendah tersebut maka PT.Raditya Putra Bahtera akhirnya ditetapkan sebagai pemenang lelang sesuai permintaan Terdakwa, berdasarkan surat Nomor 782/077.92 tanggal 6 Desember 2006 tentang Penunjukan PT.Raditya Putra Bahtera sebagai perusahaan Penyedia Barang/Jasa pengadaan jasa Filler Hukum Kebutuhan Biro Hukum Setda Propinsi DKI Jakarta TA 2006 ;
- Terdakwa pada tanggal 6 Desember 2006 dan GUNTUR INDRAYANA

Hal. 46 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Direktur Utama PT.Raditya Putra Bahtera menandatangani Surat Perjanjian Pelelangan Umum Pengadaan Jasa Filler Hukum Sekretariat Propinsi DKI Jakarta TA 2006 dengan jenis pekerjaan berupa Iklan Layanan Masyarakat sebanyak 2 (dua) paket sebesar Rp.195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan penayangan di 5 (lima) stasiun TV sebesar Rp 1.837.000.000,- (*satu milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta rupiah*) senilai Rp.2.184.600.000,- (*dua milyar seratus delapan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah*) yang dituangkan ke dalam Surat Perjanjian Nomor 783/077.92 tanggal 6 Desember 2006 ;

- Pada tanggal 14 Desember 2006 atas permintaan INDRAWATI S. DANI, Panitia Pemeriksaan Barang/Jasa BUDI HARTONO menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang (BAPB) Nomor 41/BAPB/BH/XII/2006 tanggal 14 Desember 2006, tanpa terlebih dahulu melakukan pengecekan atas penayangan filler hukum yang pengadaannya dilakukan oleh PT.Raditya Putra Bahtera. Kemudian pada hari itu juga dibuat Berita Acara serah Terima Barang dari GUNTUR INDRAYANA selaku Direktur Utama PT. Raditya Putra Bahtera kepada Pengurus Barang Unit Biro Hukum IRUSWANDI ;
- Terdakwa pada tanggal 20 Desember 2006 menandatangani dokumen Daftar Rincian Rencana Penggunaan Beban Tetap Nomor 196/SPP/2006 tanggal 20 Desember 2006 yang akan digunakan oleh Asisten Keuangan selaku Pemegang Kas Setda Propinsi DKI Jakarta sebagai dasar pembuatan Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran kepada Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah (KPKD) untuk rekanan PT. Raditya Putra Bahtera ;
- Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan oleh Asisten Keuangan Setda Propinsi DKI Jakarta Nomor 2677/SPP/SWD/BB/XII/2006 tanggal 20 Desember 2006, PT.Raditya Putra Bahtera menerima pembayaran dalam pengadaan Filler Hukum ABT tahun 2006 setelah dipotong Pajak (PPh, PPN), sebesar Rp.1.866.840.000,- (*satu milyar delapan ratus enam puluh enam juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah*) yang dicairkan langsung ke rekening PT.Raditya Putra Bahtera pada Bank Mandiri Cabang A. Yani nomor rekening 120.0001232698 ;
- Setelah menerima pembayaran sebesar Rp1.866.840.000,- (*satu milyar delapan ratus enam puluh enam juta delapan ratus empat puluh ribu*

Hal. 47 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah), selanjutnya RAJ INDRA SINGH dan HERMAN FELANI menemui R. NORMAN untuk menyerahkan uang komitmen yang jumlahnya kurang lebih sebesar 10% dari nilai kontrak sebagaimana yang diminta oleh Terdakwa, yaitu sebesar Rp367.704.000 (*tiga ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus empat ribu rupiah*) diterima oleh R. NORMAN seluruhnya terbagi ke dalam 5 (lima) amplop yang masing-masing amplop telah bertuliskan tujuan penerima amplop yaitu :

1. Untuk Kas Biro Hukum sebesar Rp.186.700.000,- (*seratus delapan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah*) ;
2. Untuk Pengurus Barang sebesar Rp.18.668.000,- (*delapan belas juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah*) ;
3. Untuk PKC/ Bendahara Biro Hukum sebesar Rp.37.336.000,- (*tiga puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah*) ;
4. Untuk bagian Dokumentasi & Publikasi Hukum sebesar Rp.125.000.000,- (*seratus dua puluh lima juta rupiah*) ;
5. Untuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa sebesar Rp.30.000.000,- (*tiga puluh juta rupiah*) ;

Amplop yang berisi uang tersebut oleh R. NORMAN diserahkan kepada PANITYONO, selanjutnya oleh PANITYONO amplop yang bertuliskan untuk bagian Dokumentasi & Publikasi Hukum sebesar Rp.125.000.000,- (*seratus dua puluh lima juta rupiah*) disimpan di dalam brankas PANITYONO, amplop yang bertuliskan untuk Kas Biro Hukum sebesar Rp 186.700.000,-(*seratus delapan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah*) dan untuk PKC/ Bendahara Biro Hukum sebesar Rp 37.336.000,- (*tiga puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah*) diserahkan kepada PKC yaitu BAHIR ROMSAH sesuai dengan perintah Terdakwa, sedangkan untuk Pengurus Barang sebesar Rp 18.668.000,-(*delapan belas juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah*) diserahkan kepada Pengurus Barang Unit Biro Hukum IRUSWANDI, serta untuk Panitia Pengadaan sebesar Rp.30.000.000,- (*tiga puluh juta rupiah*) diterima oleh MADE SUARJAYA selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa, yang mana dari jumlah uang yang terkumpul pada BAHIR ROMSAH dan PANITYONO sebesar Rp.311.700.000,- (*tiga ratus sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah*) tersebut kemudian dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;

- Perbuatan Terdakwa memerintahkan untuk memenangkan pihak



tertentu yaitu perusahaan yang diajukan oleh RAJ INDRA SINGH dan HERMAN FELANI yaitu PT.Raditya Putra Bahtera dalam pengadaan Filler Hukum yang bersumber dari ABT Propinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2006, dan menerima imbalan berupa uang dari HERMAN FELANI dan atau RAJ INDRA SINGH yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa yaitu pengadaan Filler Hukum ABT Tahun 2006 tersebut menyimpang dari kewenangannya selaku Kepala Biro Hukum dan atau sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) serta bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yaitu Pasal 3 ayat (1) bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan dan KEPPRES Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor : 8 Tahun 2006 tentang perubahan keempat Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah khususnya yang menyangkut prinsip dan etika dalam pengadaan barang/jasa yaitu Pasal 3 huruf c dan e bahwa Pengadaan Barang/Jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip berupa: harus dilakukan terbuka dan bersaing, harus dilakukan secara adil/tidak diskriminatif, Pasal 5 huruf g dan h yaitu pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan barang/jasa harus mematuhi etika berupa; menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; serta tidak menerima atau menawarkan atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa ;

- Akibat perbuatan Terdakwa dalam pengadaan jasa Filler Hukum Tahun Anggaran 2006 (ABT) dengan nilai kontrak Rp.2.184.600.000,- (*dua milyar seratus delapan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah*) telah menguntungkan terdakwa sebesar Rp.311.700.000,- (*tiga ratus sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah*), BAHIR ROMSAH sebesar Rp.37.336.000,- (*tiga puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah*), IRUSWANDI sebesar Rp 18.668.000,- (*delapan belas juta enam ratus*

Hal. 49 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh delapan ribu rupiah) serta PT. Raditya Putra Bahtera sebesar Rp.999.209.000,- (*sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus sembilan ribu rupiah*) dan mengakibatkan kerugian keuangan negara cq. keuangan pemerintah Propinsi DKI Jakarta sebesar Rp.1.396.913.000,- (*satu milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus tiga belas ribu rupiah*) atau sekitar jumlah tersebut ;

III. Pengadaan Filler Hukum yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2007.

- Terdakwa sebagai Kepala Biro Hukum Setda Propinsi DKI Jakarta dan atau selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Biro Hukum Setda Propinsi DKI Jakarta, yang mengetahui bahwa Biro Hukum Setda Propinsi DKI Jakarta mendapat anggaran pengadaan Filler Hukum (iklan tentang penegakan hukum) sebesar Rp 2.505.000.000,- (*dua milyar lima ratus lima juta rupiah*), yang bersumber dari APBD Propinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2007 pada bulan April 2007 bertemu dengan HERMAN FELANI bersama TRIYITNO UNARTO, yang mana dalam pertemuan tersebut HERMAN FELANI meminta kepada Terdakwa agar ditunjuk sebagai pelaksana atau pemenang dalam proyek pengadaan Filler Hukum tahun 2007 dan sanggup memberikan kompensasi kepada Terdakwa sebesar 10% sebagaimana proyek pengadaan Filler Hukum tahun 2006. Atas permintaan HERMAN FELANI dan TRIYITNO UNARTO tersebut akhirnya Terdakwa menyetujuinya meskipun proses pelelangan belum dimulai ;
- Terdakwa kemudian dengan menyalahgunakan kewenangannya yaitu memerintahkan R. NORMAN dan MADE SUARJAYA selaku Ketua Panitia Lelang agar membantu memenangkan perusahaan yang diikuti oleh HERMAN FELANI dan TRIYITNO UNARTO dalam proyek pengadaan Filler Hukum 2007 sekaligus memberitahu R. NORMAN dan MADE SUARJAYA bahwa HERMAN FELANI maupun TRIYITNO UNARTO telah sanggup untuk menyerahkan dana kepada Biro Hukum sebesar 10% dari nilai kontrak setelah dipotong pajak ;
- Selanjutnya MADE SUARJAYA membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) berdasarkan nilai HPS dalam proyek Filler Hukum tahun 2006, yang ditetapkan oleh Terdakwa selaku Kepala Biro Hukum tanggal 3 Agustus 2007 sebagai lampiran surat perintah pelelangan Nomor 378/-077.921, dimana nilai HPS akhirnya dibuat sebesar Rp 2.500.000.000

Hal. 50 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua milyar lima ratus juta rupiah) ;

- Menindaklanjuti permintaan Terdakwa untuk memenangkan perusahaan yang diajukan oleh HERMAN FELANI dan TRIYITNO UNARTO, pada bulan Agustus 2007 tepatnya sebelum diadakan pengumuman lelang, TRIYITNO UNARTO datang menemui MADE SUARJAYA menyerahkan *company profile* CV. Sandi Perkasa, PT. Pilot Project Production dan PT.Global Vision Universal yang akanikutsertakan di dalam lelang, dimana pada saat itu TRIYITNO UNARTO menyampaikan pesan dari HERMAN FELANI agar yang dimenangkan nantinya adalah CV.Sandi Perkasa dengan alasan karena CV.Sandi Perkasa merupakan perusahaan milik HERMAN FELANI ;
- Berdasarkan pengumuman lelang di Harian Media Indonesia dan Warta Kota, tertanggal 29 Agustus 2007 terdapat 20 (dua puluh) perusahaan mendaftarkan diri termasuk perusahaan yang diikuti oleh HERMAN FELANI yaitu CV.Sandi Perkasa, PT.Pilot Project Production dan PT.Global Vision Universal, yang didaftarkan oleh IRFAN selaku orang kepercayaan HERMAN FELANI untuk mewakili CV.Sandi Perkasa, AGUS SUMARYONO mewakili PT.Global Vision Universal dan HANAFI, S.Sos mewakili PT.Pilot Project Production ;
- Dari 20 (dua puluh) perusahaan yang mendaftar, setelah dilakukan *aanwijzing* hanya terdapat 9 (sembilan) perusahaan yang melakukan penawaran harga termasuk diantaranya adalah 3 (tiga) perusahaan yang diikuti oleh HERMAN FELANI yaitu CV. Sandi Perkasa, PT.Global Vision Universal dan PT.Pilot Project Production, dimana setelah dilakukan pembukaan sampul 1 (satu) berupa pengecekan administrasi ternyata oleh Panitia Lelang hanya diluluskan 2 (dua) perusahaan yaitu PT.Crown Entertama dan perusahaan yang diminta oleh HERMAN FELANI untuk dijadikan pemenang yaitu CV.Sandi Perkasa ;
- Pada tanggal 22 Desember 2007 dilakukan pembukaan sampul 2 (dua) mengenai Surat Penawaran Harga (SPH), dimana PT.Crown Entertama mengajukan penawaran sebesar Rp.2.215.119.500,- (dua milyar dua ratus lima belas juta seratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah) dan CV.Sandi Perkasa sebesar Rp.2.231.625.000,- (dua milyar dua ratus tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah). Dengan alasan di dalam evaluasi dokumen kualifikasi PT.Crown Entertama

Hal. 51 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mampu mengajukan persyaratan kemampuan dasar (KD) maka CV. Sandi Perkasa akhirnya ditetapkan sebagai pemenang lelang sesuai perintah Terdakwa, kemudian ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan yang ditanda tangani oleh Terdakwa selaku Kepala Biro Hukum Nomor 508/077.72 tanggal 25 September 2007 perihal penetapan CV. Sandi Perkasa sebagai pelaksana pengadaan jasa Filler Hukum TA 2007 pada Biro Hukum Setda Propinsi DKI Jakarta ;

- Terdakwa pada tanggal 25 September 2007 dan Ir. RATNANINGSIH, MSi selaku Direktur Utama CV. Sandi Perkasa menandatangani Surat Perjanjian Pelelangan Umum Pengadaan Jasa Filler Hukum Sekretariat Propinsi DKI Jakarta TA 2007 senilai Rp 2.231.625.000,- (*dua milyar dua ratus tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah*) yang dituangkan ke dalam Surat Perjanjian Nomor 508/077.72 tanggal 25 September 2007 ;
- Pada tanggal 3 Oktober 2007 atas permintaan INDRAWATI S. DANI, Panitia Pemeriksa Barang/Jasa BUDI HARTONO menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang (BAPB) Nomor 03/BAPB/BH/X/2007 tanggal 3 Oktober 2007 tanpa terlebih dahulu melakukan pengecekan atas penayangan filler hukum yang pengadaannya dilakukan oleh CV. Sandi Perkasa, kemudian pada tanggal itu juga yaitu 3 Oktober 2007 dibuat Berita Acara serah Terima Barang dari Ir. RATNANINGSIH, MSi selaku Direktur Utama CV. Sandi Perkasa kepada Pengurus Barang Unit Biro Hukum IRUSWANDI ;
- Terdakwa pada tanggal 26 Oktober 2007 mengajukan permintaan pencairan dana kepada Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah (KPKD) dengan menandatangani dokumen Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap Nomor : 68/SPP/BT/BHK 2007 tanggal 26 Oktober 2007 ;
- Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap yang diajukan Terdakwa, CV. Sandi Perkasa menerima pembayaran dalam pengadaan Filler Hukum tahun 2007 setelah dikurangi Pajak (PPh, PPN), sebesar Rp.1.998.318.750,- (*satu milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*) yang dicairkan langsung ke rekening CV. Sandi Perkasa pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Jatinegara nomor rekening 10122.01.000.842.30.3 ;
- Setelah menerima pembayaran dalam pengadaan Filler Hukum

Hal. 52 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.1.998.318.750,- (*satu milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*), HERMAN FELANI menemui R. NORMAN untuk menyerahkan uang imbalan atau hadiah berupa uang yang totalnya sebesar Rp.569.747.812,- (*lima ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus dua belas rupiah*) sebagaimana yang disepakati dengan Terdakwa, yang diterima oleh R. NORMAN dan terbagi ke dalam 5 (lima) amplop yang masing-masing amplop telah bertuliskan tujuan penerima amplop yaitu :

1. Untuk Kas Biro Hukum sebesar Rp.199.831.875,-(*seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah*) ;
2. Untuk Pemeriksa Barang sebesar Rp.39.966.375,- (*tiga puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah*) ;
3. Untuk Pengurus Barang sebesar Rp.19.983.187,- (*sembilan belas juta sembilan ratus delapan puluh tiga seratus delapan puluh tujuh rupiah*) ;
4. Untuk PKC sebesar Rp.39.966.375,- (*tiga puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah*) ;
5. Untuk Bagian Dokumentasi & Publikasi Hukum sebesar Rp.270.000.000,- (*dua ratus tujuh puluh juta rupiah*) ;

- Kemudian R. NORMAN menyerahkan kelima amplop yang berisi uang tersebut kepada PANITYONO, selanjutnya amplop yang bertuliskan untuk bagian dokumentasi dan publikasi hukum yang berisi uang sebesar Rp.270.000.000,-(*dua ratus tujuh puluh juta rupiah*) disimpan di dalam brankas PANITYONO, sedangkan untuk amplop Kas Biro Hukum yang berisi uang sebesar Rp199.831.875,-(*seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah*) dan amplop untuk PKC/ Bendahara Biro Hukum yang berisi uang Rp 39.966.375,- (*tiga puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah*) diserahkan kepada PKC yaitu BAHIR ROMSAH sebagaimana perintah Terdakwa, sedangkan amplop untuk Pemeriksa Barang yang berisi uang sebesar Rp 39.966.375,- (*tiga puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah*) diserahkan

Hal. 53 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Panitia Pemeriksaan Barang/Jasa BUDI HARTONO dan untuk Pengurus Barang sebesar Rp19.983.187,- (*sembilan belas juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah*) diserahkan kepada IRUSWANDI, yang mana dari jumlah uang yang terkumpul pada BAHIR ROMSAH dan PANITYONO sebesar Rp 469.831.875,- (*empat ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah*) tersebut kemudian dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;

- Perbuatan Terdakwa menjanjikan untuk menunjuk sebagai pelaksana pengadaan filler hukum tahun 2007 yang proses lelangnya belum dilaksanakan kepada HERMAN FELANI dan TRIYITNO UNARTO dan memerintahkan R. NORMAN Ketua Panitia Lelang untuk memenangkan pihak tertentu yaitu perusahaan yang diajukan oleh HERMAN FELANI yaitu CV. Sandi Perkasa dalam pengadaan filler hukum yang bersumber dari APBD Propinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2007, dan menerima imbalan berupa uang dari HERMAN FELANI yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa yaitu pengadaan Filler Hukum tahun 2007 tersebut adalah tidak sesuai dengan kewenangan Terdakwa selaku Kepala Biro Hukum atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) serta bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 yaitu Keuangan Negara yaitu Pasal 3 ayat (1) bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan dan KEPPRES Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor : 8 Tahun 2006, tentang perubahan keempat Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah khususnya yang menyangkut prinsip dan etika dalam pengadaan barang/jasa yaitu Pasal 3 huruf c dan e bahwa pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip berupa: harus dilakukan terbuka dan bersaing, harus dilakukan secara adil/ tidak diskriminatif, Pasal 5 huruf g dan h yaitu pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan barang/jasa harus mematuhi etika berupa; menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak

Hal. 54 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; serta tidak menerima atau menawarkan atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa ;

- Akibat perbuatan Terdakwa dalam pengadaan jasa Filler Hukum Tahun Anggaran 2007 dengan nilai kontrak Rp.2.231.625.000,- (dua milyar dua ratus tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) telah menguntungkan Terdakwa sebesar Rp.469.831.875,- (*empat ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah*), BAHIR ROMSAH sebesar Rp.39.966.375,- (*tiga puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah*), BUDI HARTONO sebesar Rp.39.966.375,- (*tiga puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah*), IRUSWANDI sebesar Rp.19.983.187,- (*sembilan belas juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah*) serta HERMAN FELANI atau CV.Sandi Perkasa sebesar Rp.1.131.570.938,- (*satu milyar seratus tiga puluh satu juta lima ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah*), yang mengakibatkan kerugian keuangan negara cq. keuangan pemerintah Propinsi DKI Jakarta sebesar Rp.1.701.318.750,- (*satu milyar tujuh ratus satu juta tiga ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*) atau sekitar jumlah tersebut ;

IV. Dalam Pengadaan Gema Hukum yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2006.

- Terdakwa sebagai Kepala Biro Hukum Setda Propinsi DKI Jakarta dan atau selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Biro Hukum Setda Propinsi DKI Jakarta yang mengetahui bahwa Biro Hukum Setda Propinsi DKI Jakarta Pada tahun 2006 mendapat alokasi anggaran pengadaan Gema Hukum berupa sosialisasi Perda DKI Jakarta melalui Media TV Swasta sebesar Rp5.016.263.000,- (*lima milyar seratus enam belas juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah*), yang bersumber dari APBD Propinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2006 pada bulan Agustus 2006 di ruang kerja Terdakwa didatangi oleh Kepala Bagian (Kabag) Perundang-Undangan Biro Hukum Setda Propinsi DKI Jakarta AGUSDIN SUSANTO bersama dengan YUSYAPRIA UTAMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari PT. Trendeka Lestari, dengan tujuan meminta Terdakwa agar dapat memenangkan PT. Trendeka Lestari dalam pelaksanaan pengadaan Gema Hukum tahun 2006 pada Biro Hukum Setda Propinsi DKI Jakarta ;

- Terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangannya menyetujui permintaan AGUSDIN SUSANTO dan YUSYAPRIA UTAMA tersebut meskipun proses pelelangan belum dilaksanakan, dengan kesepakatan YUSYAPRIA UTAMA dari PT. Trendeka Lestari sanggup memberikan dana efisiensi 10% dari nilai kontrak setelah dipotong pajak. Atas permintaan Terdakwa tersebut YUSYAPRIA UTAMA menyetujuinya sehingga beberapa hari kemudian YUSYAPRIA UTAMA dipertemukan oleh AGUSDIN SUSANTO dengan MADE SUARJAYA selaku Ketua Panitia Lelang guna menyampaikan persetujuan Terdakwa untuk memenangkan PT. Trendeka Lestari dalam pengadaan Gema Hukum tahun 2006, dimana dalam kesempatan tersebut AGUSDIN SUSANTO meminta agar MADE SUARJAYA dapat membantu memenangkan PT. Trendeka Lestari, sedangkan untuk patokan dalam pembuatan HPS akan diurus oleh YUSYAPRIA UTAMA ke Biro Perlengkapan Propinsi DKI Jakarta setelah ada surat permohonan dari Biro Hukum ;
- Bahwa sebelum diadakan pengumuman lelang, MADE SUARJAYA meminta YUSYAPRIA UTAMA untuk memberikan data-data harga dari beberapa stasiun TV swasta sebagai bahan patokan untuk membuat HPS tanpa melakukan survey ke lapangan sendiri dan oleh YUSYAPRIA UTAMA diberi data-data harga yang tercatat berasal dari Trans TV, Indosiar Visual Mandiri dan Televisi Pendidikan Indonesia (TPI), disamping menggunakan harga patokan yang dikeluarkan oleh Biro Hukum Propinsi DKI Jakarta dalam Surat Keputusan Kepala Biro Perlengkapan Nomor : 2747/073.532 tanggal 17 Juli 2006 ;
- Pada tanggal 14 Agustus 2006 Panitia lelang mengadakan pengumuman pengadaan Gema Hukum tahun 2006 di koran harian Media Indonesia, beberapa hari kemudian YUSYAPRIA UTAMA datang menemui MADE SUARJAYA menyerahkan copy *company profile* yang akan diikutsertakan dalam lelang Gema Hukum yaitu PT. Trendeka Lestari dan PT. Adila Jaya Sukses, untuk dilakukan pengecekan kekurangan andimistrasinya oleh MADE SUARJAYA sebelum didaftarkan sehingga nantinya dapat lolos administrasi, setelah dilakukan pengecekan oleh MADE SUARJAYA barulah YUSYAPRIA

Hal. 56 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UTAMA mendaftarkan kedua perusahaan tersebut di atas disamping terdapat 15 (lima belas) perusahaan lainnya yang mendaftar. Dari seluruh perusahaan yang mendaftar tersebut, yang memasukkan dokumen penawaran sampul (I dan II) hanya 8 (delapan) perusahaan termasuk PT. Trendeka Lestari dan PT. Adila Jaya Sukses ;

- Pada tanggal 31 Agustus 2006 dilakukan evaluasi administrasi oleh Panitia Lelang dan yang dinyatakan lolos administrasi hanya dua perusahaan yaitu perusahaan yang diikuti oleh YUSYAPRIA UTAMA masing-masing PT. Trendeka Lestari dan PT. Adila Jaya Sukses dan setelah dilakukan pembukaan dokumen penawaran (sampul II) dan evaluasi penawaran, akhirnya sesuai yang direncanakan PT.Trendeka Lestari dengan penawaran Rp4.554.000.000,- (*empat milyar lima ratus lima puluh empat juta rupiah*) ditetapkan oleh Terdakwa sebagai pemenang berdasarkan Surat Keputusan yang ditanda tangani oleh Terdakwa selaku Kepala Biro Hukum Nomor 587/077.922 tanggal 8 September 2006 perihal penetapan PT. Trendeka Lestari sebagai pelaksana pengadaan jasa Gema Hukum Tahun Anggaran 2006 pada Biro Hukum Setda Propinsi DKI Jakarta ;
- Terdakwa pada tanggal 15 September 2006 dan ANNA DALILA selaku Direktur PT.Trendeka Lestari menandatangani Surat Perjanjian Pelelangan Umum Pengadaan Jasa Filler Hukum Sekretariat Propinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2006 senilai Rp 4.554.000.000,- (*empat milyar lima ratus lima puluh empat juta rupiah*) yang dituangkan ke dalam Surat Perjanjian Nomor 588/077.92 tanggal 15 September 2006;
- Pada tanggal 17 Oktober 2006 atas permintaan INDRAWATI S. DANI, Panitia Pemeriksa Barang/Jasa BUDI HARTONO menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang (BAPB) Nomor 24/BAPB/BH/XII/2006 tanggal 17 Oktober 2006, tanpa terlebih dahulu melakukan pengecekan atas penayangan filler hukum yang pengadaannya dilakukan oleh PT. Trendeka Lestari dan pada tanggal 18 Oktober 2006 dibuat Berita Acara serah Terima Barang dari ANNA DALILA selaku Direktur PT. Trendeka Lestari kepada Pengurus Barang Unit Biro Hukum IRUSWANDI ;
- Terdakwa pada tanggal 8 Nopember 2006 menandatangani dokumen Daftar Rincian Rencana Penggunaan Beban Tetap Nomor 126/SPP/2006 tanggal 8 Nopember 2006 yang akan digunakan oleh

Hal. 57 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asisten Keuangan selaku Pemegang Kas Setda Propinsi DKI Jakarta sebagai dasar pembuatan Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran kepada Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah (KPKD) untuk rekanan PT. Trendeka Lestari ;

- Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPM) yang diajukan oleh Asisten Keuangan Setda Propinsi DKI Jakarta Nomor 1607/SPP/SWD/BB/ XI/2006 tanggal 8 Nopember 2006, PT. Trendeka Lestari menerima pembayaran dalam pengadaan Gema Hukum tahun 2006 setelah dipotong Pajak (Pph, PPN) sebesar Rp 3.891.600.000,- (*tiga milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah*) yang dicairkan langsung ke rekening PT. Trendeka Lestari pada Bank DKI Cabang Pembantu Tebet nomor rekening 203.04.00669 ;
- Setelah menerima pembayaran dari pengadaan Gema Hukum Tahun 2006, selanjutnya YUSYAPRIA UTAMA menyerahkan imbalan berupa uang kepada Terdakwa sebesar Rp 382.950.000,- (*tiga ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*) sebagaimana yang diminta oleh Terdakwa, kepada MADE SUARJAYA sebesar Rp 75.000.000,- (*tujuh puluh lima juta rupiah*), yang mana uang yang diterima oleh Terdakwa tersebut kemudian dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;
- Perbuatan Terdakwa menjanjikan kepada YUSYAPRIA UTAMA sebagai pelaksana pengadaan Gema Hukum sebelum proses pelelangan yaitu memenangkan PT. Trendeka Lestari dalam pengadaan Gema Hukum Tahun Anggaran 2006 dan menerima imbalan berupa uang yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa berupa Gema Hukum tahun 2006 Propinsi DKI Jakarta tersebut tidak sesuai dengan kewenangan Terdakwa selaku Kepala Biro Hukum atau selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Biro Hukum Setda Propinsi DKI Jakarta serta bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yaitu Pasal 3 ayat (1) bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan dan KEPPRES Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang perubahan keempat Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003

Hal. 58 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah khususnya yang menyangkut prinsip dan etika dalam pengadaan barang/jasa yaitu Pasal 3 huruf c dan e bahwa pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip berupa: harus dilakukan terbuka dan bersaing, harus dilakukan secara adil/ tidak diskriminatif, Pasal 5 huruf g dan h yaitu pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan barang/jasa harus mematuhi etika berupa menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; serta tidak menerima atau menawarkan atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa ;

- Akibat perbuatan terdakwa dalam pengadaan jasa Gema Hukum Tahun Anggaran 2006 pada Biro Hukum Setda Propinsi DKI Jakarta dengan nilai kontrak Rp 4.554.000.000,- (*empat milyar lima ratus lima puluh empat juta rupiah*) telah menguntungkan sebesar Rp 382.950.000,- (*tiga ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*), MADE SUARJAYA sebesar Rp 75.000.000,- (*tujuh puluh lima juta rupiah*) serta YUSYAPRIA UTAMA atau PT.Trendeka Lestari sebesar sebesar Rp 1.783.650.000,- (*satu milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah*), yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara Cq. Keuangan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta sebesar Rp 2.241.600.000,- (*dua milyar dua ratus empat puluh satu juta enam ratus ribu rupiah*) atau sekitar jumlah tersebut ;

V. Pengadaan Gema Hukum yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2007.

- Terdakwa sebagai Kepala Biro Hukum Setda Propinsi DKI Jakarta dan atau selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Biro Hukum Setda Propinsi DKI Jakarta yang mengetahui bahwa Biro Hukum Setda Propinsi DKI Jakarta mendapat alokasi anggaran pengadaan Gema Hukum berupa sosialisasi Perda DKI Jakarta melalui Media TV Swasta, sebesar Rp 3.400.000.000,- (*tiga milyar empat ratus juta rupiah*) yang bersumber dari APBD Propinsi DKI Jakarta TA 2006 pada bulan

Hal. 59 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



September 2007 AGUSDIN SUSANTO selaku Kepala Bagian (Kabag) Perundang-Undangan Biro Hukum Setda Propinsi DKI Jakarta didatangi YUSYAPRIA UTAMA dengan tujuan meminta AGUSDIN SUSANTO agar dalam pelaksanaan pengadaan Gema Hukum tahun 2007 pada Biro Hukum Setda Propinsi DKI Jakarta dapat dimenangkan PT. Adila Jaya Sukses, dimana YUSYAPRIA UTAMA juga menyampaikan akan menyerahkan dana efisiensi seperti dalam proyek Gema Hukum tahun 2006. Untuk menindaklanjuti kebijakan Terdakwa tentang pemotongan dana 10% setelah dipotong pajak dalam setiap proyek pengadaan pada Biro Hukum Sekretaris Daerah Pemerintah Propinsi DKI Jakarta, maka AGUSDIN SUSANTO memanggil MADE SUARJAYA dan memerintahkan agar dalam proyek Gema Hukum 2007 dimenangkan oleh perusahaan yang diajukan oleh YUSYAPRIA UTAMA yaitu PT. Adila Jaya Sukses bukan PT. Trendeka Lestari lagi seperti tahun 2006 dengan tujuan agar tidak menjadi sorotan publik (mencolok) ;

- Bahwa sebelum diadakan pengumuman lelang, MADE SUARJAYA membuat HPS tanpa melakukan survey, namun menggunakan patokan harga yang dikeluarkan oleh Biro Hukum Propinsi DKI Jakarta dalam Surat Keputusan Kepala Biro Perlengkapan Nomor 4164/073.532 tanggal 5 September 2007 yang isinya sama dengan Surat Keputusan Kepala Biro Hukum Nomor 2747/073.532 tanggal 17 Juli 2006 yang digunakan sebagai acuan pembuatan HPS dalam pengadaan Gema Hukum tahun 2006 yang dimenangkan oleh perusahaan pesanan YUSYAPRIA UTAMA yaitu PT. Trendeka Lestari sebagaimana diuraikan di dalam angka romawi IV di atas ;
- Pada tanggal 2 Oktober 2007 Panitia lelang mulai mengadakan pengumuman pengadaan Gema Hukum tahun 2007 di koran harian Media Indonesia, setelah itu YUSYAPRIA UTAMA mendaftarkan 2 (dua) perusahaan yaitu PT. Trendeka Lestari dan PT. Adila Jaya Sukses yang sebelum didaftarkan copy file kedua perusahaan telah diteliti administrasinya oleh MADE SUARJAYA sehingga dengan sendirinya dapat lolos administrasi. Di samping perusahaan yang didaftarkan oleh YUSYAPRIA UTAMA terdapat 4 (empat) perusahaan lainnya yang mendaftar, namun dari seluruh perusahaan yang mendaftar tersebut yang memasukkan dokumen penawaran sampul (I dan II) hanya 4 (empat) perusahaan yaitu CV. Karya Chrisna Jaya, PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dwi Putra Kreasi dan perusahaan yang diajukan oleh YUSYAPRIA UTAMA yaitu PT. Trendeka Lestari dan PT. Adila Jaya Sukses, dimana keempat perusahaan tersebut akhirnya dalam pembukaan sampul I dinyatakan lolos administrasi ;

- Pada tanggal 23 Oktober 2007 dilakukan pembukaan dokumen penawaran (sampul II) dan evaluasi penawaran, yang mana PT. Adila Jaya Sukses dengan penawaran Rp 2.788.500.000,- (*dua milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah*) atas usulan Panitia Lelang ditetapkan oleh Terdakwa sebagai pemenang berdasarkan Surat Keputusan yang ditanda tangani oleh Terdakwa selaku Kepala Biro Hukum Nomor 652/077.922 tanggal 5 Nopember 2007 perihal penetapan PT. Adila Jaya Sukses sebagai pelaksana pengadaan jasa Gema Hukum TA 2007 pada Setda Propinsi DKI Jakarta ;
- Terdakwa pada tanggal 5 Nopember 2007 dan IRADAH HASBOELAH selaku Direktur PT. Adila Jaya Sukses menandatangani Surat Perjanjian Pelelangan Umum Pengadaan Jasa Gema Hukum pada Biro Hukum Setda Propinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2007 senilai Rp 2.788.500.000,- (*dua milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah*) yang dituangkan ke dalam Surat Perjanjian Nomor 654/077.92 tanggal 5 Nopember 2007 ;
- Pada tanggal 20 Nopember 2007 atas permintaan INDRAWATI S. DANI, Panitia Pemeriksa Barang/Jasa BUDI HARTONO menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang (BAPB) Nomor 17 /BAPB/BH/ XI/2007 tanggal 20 Nopember 2007, tanpa terlebih dahulu melakukan pengecekan atas Pengadaan Jasa Gema Hukum yang pengadaannya dilakukan oleh PT. Adila Jaya Sukses dan pada tanggal yang sama yaitu 20 Nopember 2007 dibuat Berita Acara serah Terima Barang dari IRADAH HASBOELAH selaku Direktur PT. Adila Jaya Sukses Lestari kepada Pengurus Barang Unit Biro Hukum IRUSWANDI;
- Terdakwa pada tanggal 27 Nopember 2007 mengajukan permintaan pencairan dana kepada Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah (KPKD) dengan menandatangani dokumen Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap Nomor 77/ SPP/BT/BHK/ 2007 tanggal 27 Nopember 2007 ;
- Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap yang

Hal. 61 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan Terdakwa tersebut pada tanggal 27 Nopember 2007 PT. Adila Jaya Sukses menerima pembayarn dalam pengadaan Gema Hukum tahun 2007 setelah dipotong Pajak (Pph,PPN) sebesar Rp 2.420.925.000,- (*dua milyar empat ratus dua puluh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah*), yang dicairkan langsung ke rekening PT. Adila Jaya Sukses pada Bank DKI Cabang Pembantu Tebet nomor rekening 402-08-00668-9 ;

- Setelah menerima pembayaran, selanjutnya YUSYAPRIA UTAMA menyerahkan imbalan berupa uang kepada Terdakwa sebesar Rp 242.092.500,- (*dua ratus empat puluh dua juta sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah*) sebagaimana yang diminta oleh Terdakwa dan kepada MADE SUARJAYA sebesar Rp 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*), yang mana Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannya telah menerima jumlah uang yang diterima Terdakwa tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;
- Perbuatan Terdakwa menerima imbalan berupa uang dari YUSYAPRIA UTAMA yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa yaitu pengadaan Gema Hukum Tahun 2007 yaitu pengadaan Gema Hukum yang bersumber dari APBD Propinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2007, tersebut tidak sesuai dengan kewenangan Terdakwa selaku Kepala Biro Hukum dan atau selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) serta bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yaitu Pasal 3 ayat (1) bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan dan KEPPRES Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor : 8 Tahun 2006 tentang perubahan keempat Keputusan Presiden Nomor 80 : Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah khususnya yang menyangkut prinsip dan etika dalam pengadaan barang/jasa yaitu Pasal 3 huruf c dan e bahwa pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip berupa: harus dilakukan terbuka dan bersaing, harus dilakukan secara adil/tidak diskriminatif, Pasal 5 huruf g dan h yaitu pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan barang/jasa harus mematuhi etika berupa;

Hal. 62 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; serta tidak menerima atau menawarkan atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa ;

- Akibat perbuatan Terdakwa dalam pengadaan jasa Gema Hukum Tahun Anggaran 2007 dengan nilai kontrak Rp 2.788.500.000,- (*dua milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah*) telah menguntungkan Terdakwa sebesar Rp 242.092.500,- (*dua ratus empat puluh dua juta sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah*) dan orang lain yaitu MADE SUARJAYA sebesar 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*) serta memperkaya YUSYAPRIA UTAMA atau PT. Adilla Jaya Sukses sebesar Rp 920.832.500,- (*sembilan ratus dua puluh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah*), dan mengakibatkan kerugian keuangan negara cq keuangan pemerintah Propinsi DKI Jakarta sebesar Rp 1.187.925.000,- (*satu milyar seratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah*) atau sekitar jumlah tersebut ;

VI. Dalam Pengelolaan Anggaran Kegiatan Pengurusan Perkara Perdata, Pidana dan Tata Usaha Negara (TUN) yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran (TA) 2006.

- Pada tahun 2006 Biro Hukum Setda Propinsi DKI Jakarta mendapat alokasi anggaran untuk honorarium, transport dan makan Tenaga Ahli dalam pengurusan perkara Perdata, Pidana dan Tata Usaha Negara (TUN), yang bersumber dari APBD Propinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran (TA) 2006 kode rekening 2.2.01.01.002 sebesar Rp 3.600.000.000,- (*tiga milyar enam seratus juta rupiah*) sebagaimana tercantum dalam Daftar Alokasi Satuan Kerja (DASK) Biro Hukum Setda Propinsi DKI Jakarta Tahun 2006 ;
- Terdakwa sebagai sebagai Kepala Biro Hukum Setda Propinsi DKI Jakarta yang dijabat sejak tanggal 5 Juli 2006, mengetahui bahwa terdapat sisa anggaran APBD Propinsi DKI Jakarta TA 2006 sebesar Rp 1.776.000.000,- (*satu milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta rupiah*) untuk belanja honorarium, transport dan makan tenaga Ahli



berupa praktisi hukum atau advokat profesional dalam pengurusan perkara Perdata, Pidana dan Tata Usaha Negara (TUN), dengan kode rekening 2.2.01.01.002 yang belum dilaksanakan oleh pejabat sebelumnya yaitu HR. DEDED SUKANDAR ;

- Pada bulan Agustus 2006 Terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangannya selaku Kepala Biro Hukum dan atau selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) memerintahkan BAHIR ROMSAH untuk membuat dokumen pencairan anggaran tersebut dengan menggunakan Putusan perkara baik perdata maupun Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap dengan maksud akan dipergunakan untuk insentif pribadi Terdakwa maupun orang lain termasuk beberapa atasan Terdakwa, bukan untuk pembayaran honorarium, transport dan makan Tenaga Ahli ;

BAHIR ROMSAH menindaklanjuti perintah Terdakwa tersebut dengan membuat SPM yang ditanda-tangani oleh Terdakwa menggunakan dasar putusan tingkat kasasi Nomor 2086/K/Pdt/2004 jo Putusan Nomor 63/Pdt.G/2002/PN Jakarta Selatan sehingga terbit SPM Giro Nomor 00132932006 tanggal 25 Agustus 2006 senilai Rp.976.000.000,- (*sembilan ratus tujuh puluh enam juta rupiah*), yang mana uang yang dicairkan berdasarkan SPM dimaksud dimasukkan langsung ke rekening pribadi BAHIR ROMSAH kemudian dicairkan secara tunai dan diserahkan seluruhnya kepada Terdakwa dengan bukti kuitansi tanda terima tertanggal 25 Agustus 2006 ;

- Terdakwa kemudian menyalahgunakan kewenangannya menggunakan uang sebesar Rp 976.000.000,- (*sembilan ratus tujuh puluh enam juta rupiah*) tidak untuk pembayaran honorarium, transport dan makan Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud di dalam DASK, akan tetapi dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri sebesar Rp 70.040.000,- (*tujuh puluh juta empat puluh ribu rupiah*), diberikan kepada Dr. RITOLA TASMAYA, MPH sebesar Rp 25.032.500,- (*dua puluh lima juta tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah*), AGUSDIN SUSANTO sebesar Rp 50.022.500,- (*lima puluh juta dua puluh dua ribu lima ratus rupiah*), SRI ASTUTI.R,SH sebesar Rp 30.005.000,- (*tiga puluh juta lima ribu rupiah*), MADE SUARJAYA sebesar Rp.30.005.000,- (*tiga puluh juta lima ribu rupiah*), MANSYUR MAHMUD,SH sebesar Rp 30.005.000,- (*tiga puluh juta lima ribu rupiah*), H. MOERDIMAN, RM, SH, MSi, RAHMAT,SH,



MANGATUR.P,SH, ENDANG SRI RAHAYU, ISMIYATUN,SH, OR. ZAKARIAS, SH, ENDANG SUMARDI, SH, BUDI HARTONO,SH, RADIAH,SH, KAROLIS SIMATUPANG, SH, MH, MUKHLIS,SH, ROMY PURNAMA,SH masing-masing sebesar Rp 20.017.000,- (*dua puluh juta tujuh belas ribu rupiah*), BAHIR ROMSAH sebesar Rp 25.032.500,- (*dua puluh lima juta tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah*) dan sisanya oleh Terdakwa dibagikan kepada beberapa pegawai lainnya di Biro Hukum Setda Propinsi DKI Jakarta, yang mana pembagian uang tersebut telah dipotong pajak penghasilan sehingga seolah-olah merupakan pendapatan sah ;

- Dari sisa anggaran honorarium, transport dan makan Tenaga Ahli tahun 2006 sebesar Rp 800.000.000,- (*delapan ratus juta rupiah*), secara berturut-turut pada bulan September s/d Desember 2006 dicairkan dan dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa dengan 5 (lima) kantor advokat yaitu kantor advokat Novian and Partner, Adji Nuryasin and Partner, Buyung Nasution and Partner, Otto Hasibuan and Associates dan Yan Saputra and Partner, sebagai biaya dalam menghadapi perkara gugatan pembatalan Perda Perpajakan, laporan tindak pidana oleh Kaukus Lingkungan Hidup atas penebangan pohon beringin di Jalan Hayam Wuruk untuk jalur Busway, laporan tindak pidana atas penebangan pohon di Jl. Jenderal Sudirman untuk pelebaran jalan serta permintaan pendapat hukum mengenai lapangan sepak bola Menteng seluruhnya senilai Rp.798.500.000,- (*tujuh ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah*) ;
- Perbuatan Terdakwa menggunakan kewenangannya selaku Kuasa Pengguna Anggaran mencairkan anggaran honorarium, transport dan makan tenaga Ahli sebesar Rp.976.000.000,- (*sembilan ratus tujuh puluh enam juta rupiah*) untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan pada APBD Tahun 2006 yaitu untuk kepentingan pribadi dan orang lain berupa insentif yang tidak dianggarkan serta bertentangan dengan ketentuan Pasal 192 ayat (4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur bahwa Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, pimpinan DPRD dan pejabat daerah lainnya dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD jo Pasal 55 ayat (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002

Hal. 65 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



tentang Pedoman, Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta tata cara penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bahwa Pengguna Anggaran dilarang melakukan pengeluaran-pengeluaran atas beban belanja daerah untuk tujuan lain dari pada yang ditetapkan.

- Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut merugikan keuangan Negara cq. Pemerintah Daerah Propinsi DKI Jakarta sebesar Rp 976.000.000,- (*sembilan ratus tujuh puluh enam juta rupiah*) atau setidaknya tidaknya sejumlah tersebut ;

VII. Dalam Pengelolaan Anggaran Kegiatan Pengurusan Perkara Perdata, Pidana dan Tata Usaha Negara (TUN) yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2007 dan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) Tahun Anggaran 2007.

- Pada tahun 2007 Biro Hukum Setda Propinsi DKI Jakarta mendapat alokasi anggaran untuk honorarium, transport dan makan tenaga Ahli berupa praktisi hukum atau advokat profesional dalam pengurusan perkara Perdata, Pidana dan Tata Usaha Negara (TUN), yang bersumber dari APBD Propinsi DKI Jakarta TA 2007 kode rekening 2.2.01.01.002 sebesar Rp 2.850.000.000,- (*dua milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah*) sebagaimana tercantum dalam Daftar Alokasi Satuan Kerja (DASK) Biro Hukum tahun 2007 ;
- Terdakwa pada bulan Juni 2007 dengan menyalahgunakan kewenangannya selaku Kepala Biro Hukum Setda Propinsi DKI Jakarta dan atau selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan cara memerintahkan kepada BAHIR ROMSAH selaku Bendahara Biro Hukum pada Pemerintah Propinsi DKI Jakarta untuk mempersiapkan lagi dokumen pencairan sisa anggaran honorarium, transport dan makan tenaga Ahli berupa praktisi hukum atau advokat profesional dalam pengurusan perkara Perdata, Pidana dan Tata Usaha Negara (TUN), dengan menggunakan dasar honor atau insentif atas kemenangan suatu perkara yang telah ditangani, untuk dibagikan sebagai insentif pegawai pada Biro Hukum termasuk Terdakwa dan beberapa atasan Terdakwa bukan untuk digunakan sebagai honorarium kepada Ahli sebagaimana ditentukan di dalam DASK ;
- Memenuhi permintaan Terdakwa, akhirnya BAHIR ROMSAH menyusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen pencairan berupa SPM Nomor 00030242007 tanggal 6 Juni 2007 yang ditandatangani oleh Terdakwa senilai Rp 1.029.345.571,- (*satu milyar dua puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah*), dengan menggunakan dasar putusan Pengadilan Jakarta Pusat Nomor :182/ Pdt.G/2005/ PN Jakarta Pusat ;

- BAHIR ROMSAH mencairkan SPM Nomor 00030242007 tanggal 6 Juni 2007 senilai Rp.1.029.345.571,- (*satu milyar dua puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah*) yang dimasukkan langsung ke rekening pribadi BAHIR ROMSAH, setelah itu BAHIR ROMSAH mencairkan secara tunai dan diserahkan seluruhnya kepada Terdakwa dengan bukti kuitansi tanda terima tertanggal 8 Juni 2007 ;
- Terdakwa kemudian dengan menyalahgunakan kewenangannya menggunakan uang sebesar Rp 1.029.345.571,- (*satu milyar dua puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah*) tidak untuk pembayaran honorarium, transport dan makan Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud di dalam DASK, akan tetapi dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri sebesar Rp 70.040.000,- (*tujuh puluh juta empat puluh ribu rupiah*), dibagikan kepada Dr. RITOLA TASMAYA, MPH (Mantan Sekda Pemprov DKI Jakarta) sebesar Rp 20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*), AGUSDIN SUSANTO sebesar Rp 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*), SRI ASTUTI. R, SH, MADE SUARJAYA, MANSYUR MAHMUD, SH, SAUT PURBA, SH masing-masing sebesar Rp 35.000.000,- (*tiga puluh lima juta rupiah*), RAHMAT, SH, MANGATUR. P, SH, ENDANG SRI RAHAYU, ISMIYATUN, SH, OR. ZAKARIAS, SH, ENDANG SUMARDI, SH, BUDI HARTONO, SH, RADIAH, SH, KAROLIS SIMATUPANG, MUKHLIS, SH masing-masing sebesar Rp 22.500.000,- (*dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*), BAHIR ROMSAH sebesar Rp 30.000.000,- (*tiga puluh juta rupiah*), H. MOERDIMAN, RM, SH, MSi sebesar Rp 20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*) dan sisanya oleh Terdakwa dibagikan kepada beberapa pegawai lainnya di Biro Hukum Setda Propinsi DKI Jakarta, yang mana pembagian uang tersebut telah dipotong pajak penghasilan sehingga seolah-olah merupakan pendapatan sah.
- Terdakwa pada tanggal 28 Juni 2007 dan tanggal 3 Juli 2007

Hal. 67 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



mencairkan anggaran honorarium, transport dan makan tenaga Ahli untuk membayar honorarium advokat Novian and Partner sebagaimana dimaksud dalam perjanjian dalam penanganan 2 (dua) perkara perdata dan TUN tertanggal 9 Januari 2007 dan 9 Pebruari 2007, yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa dengan advokat Novian and Partner sebesar Rp 697.000.000,- (*enam ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah*) dipotong pajak 10%.

Terdakwa yang mengetahui bahwa masih terdapat anggaran honorarium, transport dan makan tenaga Ahli tahun 2007 yang belum dipergunakan, maka pada bulan September 2007 memerintahkan lagi kepada BAHIR ROMSAH selaku Bendahara Biro Hukum pada Pemerintah Propinsi DKI Jakarta untuk mempersiapkan dokumen pencairan sisa anggaran honorarium, transport dan makan tenaga Ahli berupa praktisi hukum atau Advokat profesional dalam pengurusan perkara Perdata, Pidana dan Tata Usaha Negara (TUN) yang belum terpakai, dengan menggunakan dasar honor atau insentif atas kemenangan suatu perkara yang telah ditangani, untuk dibagikan sebagai insentif pegawai pada Biro Hukum termasuk Terdakwa dan beberapa atasan Terdakwa bukan untuk digunakan sebagai honorarium kepada Ahli sebagaimana ditentukan di dalam DASK ;

- BAHIR ROMSAH akhirnya menyusun dokumen pencairan berupa SPM Nomor 00104712007 tanggal 21 September 2007 yang ditandatangani oleh Terdakwa senilai Rp 1.120.654.429,- (*satu milyar seratus dua puluh juta enam ratus lima puluh empat ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah*), dengan menggunakan dasar putusan Pengadilan Jakarta Pusat Nomor 476/Pdt.G/2005/PN Jakarta Barat, kemudian BAHIR ROMSAH mencairkan SPM Nomor 00104712007 tanggal 21 September 2007 senilai Rp 1.120.654.429,- (*satu milyar seratus dua puluh juta enam ratus lima puluh empat ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah*) sesuai dengan perintah terdakwa, yang mana pencairan tersebut dimasukkan langsung ke rekening pribadi BAHIR ROMSAH, dan setelah itu BAHIR ROMSAH mencairkan secara tunai dan diserahkan seluruhnya kepada Terdakwa dengan bukti kuitansi tanda terima tertanggal 21 September 2007 ;
- Terdakwa kemudian dengan menyalahgunakan kewenangannya karena jabatan atau kedudukannya selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau selaku Kepala Biro Hukum Setda Propinsi DKI Jakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan uang sebesar Rp.1.120.654.429,- (*satu milyar seratus dua puluh juta enam ratus lima puluh empat ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah*) tidak untuk pembayaran honorarium, transport dan makan Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud di dalam DASK, akan tetapi dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri sebesar Rp.50.040.000,- (*lima puluh juta empat puluh ribu rupiah*), diberikan kepada AGUSDIN SUSANTO sebesar Rp 40.000.000,- (*empat puluh juta rupiah*), SRI ASTUTI. R, SH, MADE SUARJAYA, MANSYUR MAHMUD,SH dan SAUT PURBA,SH masing-masing sebesar Rp.30.000.000,- (*tiga puluh juta rupiah*), H. MOERDIMAN, RM, SH, Msi, RITOLA TASMAYA, MPH, RAHMAT, SH, MANGATUR. P, SH, ENDANG SRI RAHAYU, ISMIYATUN, SH, OR.ZAKARIAS, SH, ENDANG SUMARDI, SH, BUDI HARTONO, SH, RADIAH, SH, KAROLIS SIMATUPANG, SH, MH, MUKHLIS, SH, ROMY PURNAMA, SH masing-masing sebesar Rp 20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*), BAHIR ROMSAH sebesar Rp 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*) dan sisanya oleh Terdakwa dibagikan kepada beberapa pegawai lainnya di Biro Hukum Setda Propinsi DKI Jakarta, yang mana pembagian uang tersebut telah dipotong pajak penghasilan sehingga seolah-olah merupakan pendapatan sah ;

- Pada tanggal 20 Nopember 2007, Biro Hukum Setda Propinsi DKI Jakarta memperoleh Anggaran Biaya Tambahan (ABT) untuk honorarium, transport dan makan tenaga Ahli berupa praktisi hukum atau advokat profesional dalam pengurusan perkara Perdata, Pidana dan Tata Usaha Negara (TUN) berdasarkan Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Nomor 006/DPPA/2007 sebesar Rp 2.500.000.000,- (*dua milyar lima ratus juta rupiah*) ;
- Anggaran tersebut di atas, pada tanggal 21 Desember 2007 digunakan oleh Terdakwa untuk membayar honorarium kepada kantor advokat Luhut Pangaribuan and Partner sebesar Rp 1.500.000.000,- (*satu milyar lima ratus juta rupiah*) setelah dipotong pajak 10%, berdasarkan perjanjian tertanggal 24 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan advokat Luhut Pangaribuan and Partner dalam rangka menghadapi gugatan dari PT. Portanigra ;
- Terdakwa yang mengetahui bahwa masih terdapat anggaran honorarium, transport dan makan tenaga Ahli ABT Tahun 2007 yang

Hal. 69 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum dipergunakan, maka pada bulan Desember 2007, dengan menyalahgunakan kewenangannya selaku KPA dengan memerintahkan lagi BAHIR ROMSAH selaku Bendahara Biro Hukum pada Pemerintah Propinsi DKI Jakarta untuk mempersiapkan dokumen pencairan sisa anggaran ABT Tahun 2007 untuk honorarium, transport dan makan tenaga Ahli dengan maksud untuk digunakan secara pribadi oleh Terdakwa bukan digunakan sebagai honorarium kepada Ahli sebagaimana ditentukan di dalam DASK ;

- BAHIR ROMSAH kemudian menyusun dokumen pencairan berupa SPM Nomor 00193532007 tanggal 12 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Terdakwa senilai Rp 1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*), dengan menggunakan dasar putusan Pengadilan Jakarta Pusat Nomor 101/Pdt.G/2007/PN Jakarta Pusat, selanjutnya BAHIR ROMSAH mencairkan SPM Nomor 00193532007 tanggal 12 Desember 2007 senilai Rp 1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*), yang mana uang tersebut dimasukkan langsung ke rekening pribadi BAHIR ROMSAH, dan setelah itu BAHIR ROMSAH mencairkan secara tunai dan diserahkan seluruhnya kepada Terdakwa dengan bukti kuitansi tanda terima tertanggal 12 Desemberr 2007. Uang tersebut kemudian dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kepentingan pribadi Terdakwa ;
- Perbuatan Terdakwa menggunakan kewenangannya selaku KPA mencairkan anggaran honorarium, transport dan makan tenaga Ahli untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan pada APBD Tahun 2006 yaitu untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan Pegawai lain berupa insentif yang tidak dianggarkan telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 192 ayat (4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur bahwa Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, pimpinan DPRD dan pejabat daerah lainnya dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD Jo Pasal 55 ayat (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman, Pengurusan, Pertanggung-jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta tata cara penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bahwa Pengguna Anggaran dilarang melakukan pengeluaran-pengeluaran atas beban belanja daerah untuk

Hal. 70 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan lain dari pada yang ditetapkan ;

- Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut merugikan keuangan Pemerintah Daerah Propinsi DKI Jakarta sebesar Rp 3.150.000.000,- (*tiga milyar seratus lima puluh juta rupiah*) atau setidaknya tidaknya sejumlah tersebut ;
- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan pada angka I, II, III, IV, V, VI dan VII tersebut diatas dalam pengadaan Filler Hukum dan Gema Hukum serta Pencairan dana honorarium, transpor dan makan ahli pada Biro Hukum Setda Propinsi DKI Jakarta dari APBD Tahun 2006, ABT Tahun 2006, APBD Tahun 2007 dan ABT Tahun 2007, telah menguntungkan Terdakwa sebesar Rp 2.756.324.375,- (*dua milyar tujuh ratus lima puluh enam juta tiga ratus dua puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah*), BAHIR ROMSAH sebesar Rp.157.334.875,- (*seratus lima puluh tujuh juta tiga tiga puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah*), MADE SUARJAYA sebesar Rp.240.005.000,- (*dua ratus empat puluh juta lima ribu rupiah*), BUDI HARTONO sebesar Rp.119.410.375,- (*seratus sembilan belas juta empat ratus sepuluh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah*), Dr. RITOLA TASMAYA, MPH sebesar Rp.65.032.500,- (*enam puluh lima juta tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah*), AGUSDIN SUSANTO sebesar Rp.140.022.500,- (*seratus empat puluh juta dua puluh dua ribu lima ratus rupiah*), SRI ASTUTI. R, SH sebesar Rp.95.005.000,- (*sembilan puluh lima juta lima ribu rupiah*), MANSYUR MAHMUD,SH sebesar Rp.95.005.000,- (*sembilan puluh lima juta lima ribu rupiah*), H. MOERDIMAN, RM, SH, MSi sebesar Rp.60.017.000,- (*enam puluh juta tujuh belas ribu rupiah*), RAHMAT,SH, MANGATUR.P,SH, ENDANG SRI RAHAYU, ISMIYATUN,SH, OR.ZAKARIAS,SH, ENDANG SUMARDI,SH, RADIAH,SH, KAROLIS SIMATUPANG, SH, MH, MUKHLIS,SH, ROMY PURNAMA masing-masing sebesar Rp.62.517.000,- (*enam puluh dua juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah*), SAUT PURBA,SH sebesar Rp.65.000.000,- (*enam puluh lima juta rupiah*), RINA MELANIA PRIYATNA atau PT.Anugrah Cipta Pratama sebesar Rp.373.408.629 (*tiga ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus delapan ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah*), RAJ INDRA SINGH dan HERMAN FELANI atau PT.Raditya Putra Bahtera sebesar Rp.999.209.000,- (*sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus sembilan ribu rupiah*), YUSYAPRIA UTAMA atau PT.Adila Jaya

Hal. 71 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukses sebesar Rp.920.859.500 (*sembilan ratus dua puluh juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah*), YUSYAPRIA UTAMA atau PT.Trendeka Lestari sebesar Rp.1.783.650.000,- (*satu milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah*), HERMAN FELANI atau CV.Sandi Perkasa sebesar Rp.1.131.535.938,- (*satu milyar seratus tiga puluh satu juta lima ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah*) dan menguntungkan beberapa pegawai lainnya di Biro Hukum Setda Pemerintah DKI Jakarta, yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara cq. Keuangan daerah propinsi DKI Jakarta sebesar Rp.11.218.722.379,- (*sebelas milyar dua ratus delapan belas juta tujuh ratus dua puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah*) sesuai dengan Laporan BPK Nomor 03/LAP/XXV/07/2010 tanggal 8 Juli 2010.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 : Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

DAN :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa JORNAL EFFENDI SIAHAAN selaku Kepala Biro Hukum atau sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah Propinsi DKI Jakarta pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara bulan Juni 2006 sampai dengan Desember 2007 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2006 sampai dengan tahun 2007 bertempat di kantor Biro Hukum Setda Propinsi DKI Jakarta Jalan Medan Merdeka Selatan No.8-9 Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang berdasarkan Pasal 5 jo Pasal 34 huruf a Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, *sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara* yaitu sebagai Kepala Biro Hukum Setda Propinsi DKI Jakarta atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Biro Hukum Setda Propinsi DKI Jakarta, pada waktu menjalankan tugas yaitu sebagai Kepala Biro Hukum dan KPA, melakukan beberapa perbuatan yang harus

Hal. 72 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, *meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara atau kepada kas umum seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui hal tersebut bukan merupakan utang yaitu memotong pembayaran honor pegawai negeri sebagai pelaksana kegiatan pengadaan pada Biro Hukum Setda Propinsi DKI Jakarta kurang lebih sebesar 10% setelah dipotong pajak, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Terdakwa sebagai Kepala Biro Hukum Setda Propinsi DKI Jakarta pada bulan Juli 2006 mengadakan rapat di ruang kerja Biro Hukum dengan para Kepala Bagian (Kabag) pada Biro Hukum Setda Propinsi DKI Jakarta yaitu Kabag Dokumentasi R. NORMAN, Kabag Pengkajian NOERWENDA, Kabag Pelayanan Hukum AGUSDIN SUSANTO dan Kabag Perundang-Undangan SRI RAHAYU yang dihadiri pula oleh BAHIR ROMSAH selaku Pemegang Kas Cabang (PKC)/Bendahara Biro Hukum, dimana dalam pertemuan tersebut Terdakwa memerintahkan para Kabag untuk melakukan pengumpulan dana kurang lebih sebesar 10% setelah dipotong pajak dari dana realisasi anggaran di Biro Hukum Setda Propinsi DKI Jakarta yaitu di Bagian Dokumentasi, Pengkajian, Pelayanan Hukum dan Bagian Perundang Undangan, dengan cara memotong pembayaran honor yang seharusnya diterima oleh pegawai pada biro hukum sebagai pelaksana kegiatan pengadaan. Kemudian para Kabag menindaklanjuti permintaan Terdakwa dimaksud kepada para Kasir di bagian masing-masing untuk melaksanakan perintah pemotongan kurang lebih sebesar 10% dari honor yang seharusnya dibayarkan kepada pegawai pelaksana kegiatan ;
- Setelah kegiatan pengadaan dilaksanakan dan dilakukan pencairan anggaran untuk kegiatan pengadaan pada tiap-tiap Bagian, maka BAHIR ROMSAH selaku PKC melakukan pemotongan kurang lebih sebesar 10% setelah dipotong pajak terhadap pembayaran honor para pegawai negeri yaitu pegawai pada Biro Hukum Setda Propinsi DKI Jakarta sebagai pelaksana kegiatan pada tiap bagian yaitu Bagian Pelayanan Hukum, Pengkajian Peraturan Perundang-undang, serta Dokumentasi dan Publikasi hukum pada tahun 2006 dan 2007, dengan perincian sebagai berikut :

Kegiatan dalam Tahun 2006.

- a. Kegiatan Bagian Pelayanan Hukum.

Hal. 73 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesuai dengan perintah dari Terdakwa maka AGUSDIN SUSANTO selaku Kabag Pelayanan Hukum melalui bendahara PKC telah memotong pembayaran berupa honor kepada pegawai yang melaksanakan kegiatan pada bagian pelayanan hukum seluruhnya Rp 1.421.621.775,- (*satu milyar empat ratus dua puluh satu juta enam ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah*) dari 12 (dua belas) kegiatan dengan realisasi anggaran sebesar Rp 14.216.217.750,- (*empat belas milyar dua ratus enam belas juta dua ratus tujuh belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*) selama tahun 2006 ;
- b. Kegiatan Bagian Pengkajian peraturan perundang-undangan.
 - Sesuai dengan perintah dari Terdakwa maka NORWENDA selaku Kabag Pengkajian Peraturan Perundang-undangan melalui Bendahara PKC telah memotong pembayaran berupa honor kepada pegawai yang melaksanakan kegiatan pada bagian pengkajian peraturan perundang-undangan seluruhnya Rp 355.296.970,- (*tiga ratus lima puluh lima juta dua ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah*) dari 27 (dua puluh tujuh) kegiatan dengan realisasi anggaran sebesar Rp 4.022.005.850,- (*empat milyar dua puluh dua juta lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah*) selama tahun 2006 ;
- c. Kegiatan Bagian Peraturan Perundang-undangan.
 - Sesuai dengan perintah dari Terdakwa maka SRI RAHAYU selaku Kabag Peraturan-undangan melalui bendahara PKC telah memotong pembayaran berupa honor kepada pegawai yang melaksanakan kegiatan pada bagian Peraturan Perundang-undangan seluruhnya Rp 574.551.000,- (*lima ratus tujuh puluh empat juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah*) dari 25 (dua puluh lima) kegiatan dengan realisasi anggaran sebesar Rp 5.180.480.000,- (*lima milyar seratus delapan puluh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah*) selama tahun 2006 ;
- d. Kegiatan Bagian Dokumentasi dan Publikasi Hukum.
 - Sesuai dengan perintah dari Terdakwa maka R.NORMAN selaku Kabag Dokumentasi dan Publikasi Hukum melalui bendahara PKC telah memotong pembayaran berupa honor kepada pegawai yang melaksanakan kegiatan pada bagian Dokumentasi dan Publikasi Hukum seluruhnya Rp. 379.006.111,- (*tiga ratus tujuh puluh sembilan juta enam ribu seratus sebelas rupiah*) dari 13 (tiga belas) kegiatan dengan realisasi anggaran sebesar Rp 7.081.691.080,- (*tujuh milyar delapan puluh satu*

Hal. 74 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta enam ratus sembilan puluh satu ribu delapan puluh rupiah) selama tahun 2006 ;

- Dari 77 (tujuh puluh tujuh) kegiatan Biro Hukum Setda Propinsi DKI Jakarta pada tahun anggaran 2006 tersebut terkumpul uang hasil pemotongan pembayaran honor pegawai pelaksana kegiatan pada Biro Hukum Setda Propinsi DKI Jakarta Tahun 2006 seluruhnya sebesar Rp 2.730.475.856 (*dua milyar tujuh ratus tiga puluh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah*) yang dipotong, diterima dan disimpan oleh BAHIR ROMSAH yang peruntukannya ditentukan oleh Terdakwa yaitu untuk kepentingan pribadi Terdakwa maupun untuk diberikan kepada orang lain, padahal pegawai pada biro hukum tidak pernah berutang kepada Terdakwa atau memberikan persetujuan untuk dilakukan pemotongan pembayaran honor mereka ;

Kegiatan dalam Tahun 2007

a. Kegiatan Bagian Pelayanan Hukum.

- Sesuai dengan perintah dari Terdakwa maka AGUSDIN SUSANTO selaku Kabag Pelayanan Hukum melalui bendahara PKC telah memotong pembayaran berupa honor kepada pegawai yang melaksanakan kegiatan pada bagian pelayanan hukum seluruhnya Rp 695.574.438,- (*enam ratus sembilan puluh lima juta lima ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah*) dari 12 (dua belas) kegiatan dengan realisasi anggaran sebesar Rp 11.764.135.530,- (*sebelas milyar tujuh ratus enam puluh empat juta seratus tiga puluh lima ribu lima ratus tiga puluh rupiah*) selama tahun 2007 ;

b. Kegiatan Bagian Pengkajian Peraturan Perundang-undangan.

- Sesuai dengan perintah dari Terdakwa maka NOERWENDA selaku Kabag Pengkajian Peraturan Perundang-undangan melalui bendahara PKC telah memotong pembayaran berupa honor kepada pegawai yang melaksanakan kegiatan pada bagian pelayanan hukum seluruhnya Rp.124.104.900,- (*seratus dua puluh empat juta seratus empat ribu sembilan ratus rupiah*) dari 23 (dua puluh tiga) kegiatan dengan realisasi anggaran sebesar Rp 2.883.525.550,- (*dua milyar delapan ratus delapan puluh tiga juta lima ratus dua puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah*) selama tahun 2007 ;

c. Kegiatan Bagian Peraturan Perundang-undangan.

Hal. 75 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesuai dengan perintah dari Terdakwa maka SRI RAHAYU selaku Kabag Peraturan Perundang-undangan melalui bendahara PKC telah memotong pembayaran berupa honor kepada pegawai yang melaksanakan kegiatan pada bagian pelayanan hukum seluruhnya Rp 246.036.850,- (*dua ratus empat puluh enam juta tiga puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah*) dari 18 (delapan belas) kegiatan dengan realisasi anggaran sebesar Rp 4.641.100.000,- (*empat milyar enam ratus empat puluh satu juta seratus ribu rupiah*) selama tahun 2007 ;
- d. Kegiatan Bagian Dokumentasi Hukum dan Publikasi Hukum.
 - Sesuai dengan perintah dari Terdakwa maka R.NORMAN selaku Kabag Dokumentasi Hukum dan Publikasi Hukum melalui bendahara PKC telah memotong pembayaran berupa honor kepada pegawai yang melaksanakan kegiatan pada bagian pelayanan hukum seluruhnya Rp.368.662.020,- (*tiga ratus enam puluh delapan juta enam ratus enam puluh dua ribu dua puluh rupiah*) dari 12 (dua belas) kegiatan dengan realisasi anggaran sebesar Rp.5.404.543.983 (*lima milyar tempat ratus empat juta lima ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah*) selama tahun 2007 ;
 - Dari 65 (enam puluh lima) kegiatan Biro Hukum Setda Propinsi DKI Jakarta pada tahun anggaran 2007 terkumpul uang pemotongan honor seluruhnya sebesar Rp.1.435.378.208,- (*satu milyar empat ratus tiga puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh rupiah*) yang dipotong, diterima dan disimpan oleh BAHIR ROMSAH yang peruntukannya ditentukan oleh Terdakwa yaitu untuk kepentingan pribadi Terdakwa maupun untuk diberikan kepada orang lain, padahal pegawai pada biro hukum tidak pernah berutang kepada Terdakwa atau memberikan persetujuan untuk dilakukan pemotongan pembayaran honor mereka ;
 - Hasil Pemotongan pembayaran honor pegawai pada biro hukum Setda Propinsi DKI Jakarta pada tahun 2006 dan 2007 sebesar Rp.4.165.854.064,- (*empat milyar seratus enam puluh lima juta delapan ratus lima puluh empat ribu enam puluh empat rupiah*) dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi sesuai dengan keinginan Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf f Undang Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan

Hal. 76 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 20 : Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUHP ;

DAN :

KETIGA :

Bahwa Terdakwa JORNAL EFFENDI SIAHAAN pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara bulan Juni 2006 sampai dengan Desember 2007 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2006 dan 2007 bertempat di kantor Biro Hukum Setda Propinsi DKI Jakarta Jalan Medan Merdeka Selatan No.8-9 Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang berdasarkan Pasal 5 jo Pasal 34 huruf a Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2002 termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yaitu sebagai Kepala Biro Hukum Setda Propinsi DKI Jakarta atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Biro Hukum Setda Propinsi DKI Jakarta, melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, *menerima hadiah berupa uang sejumlah Rp 3.147.808.087,- (tiga milyar seratus empat puluh tujuh juta delapan ratus delapan ribu delapan puluh tujuh rupiah)* padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya *atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah tersebut ada hubungan dengan jabatannya* yaitu pemberian uang tersebut diketahui Terdakwa diberikan karena kedudukan Terdakwa selaku Kepala Biro Hukum atau Kuasa Pengguna Anggaran pada Biro Hukum Setda Prop DKI Jakarta, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Terdakwa sebagai Kepala Biro Hukum Setda Propinsi DKI Jakarta atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Biro Hukum Setda Propinsi DKI Jakarta pada bulan Juli 2006 mengadakan rapat di ruang kerja Biro Hukum dengan para Kepala Bagian (Kabag) pada Biro Hukum Setda Propinsi DKI Jakarta yaitu Kabag Dokumentasi R. NORMAN, Kabag Pengkajian NOERWENDA, Kabag Pelayanan Hukum AGUSDIN SUSANTO dan Kabag Perundang Undangan SRI RAHAYU yang dihadiri pula oleh BAHIR ROMSAH selaku Pemegang Kas Cabang (PKC)/ Bendahara Biro Hukum, di

Hal. 77 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mana dalam pertemuan tersebut Terdakwa meminta kepada para Kabag untuk melakukan pengumpulan dana kurang lebih sebesar 10% setelah dipotong pajak dari dana realisasi anggaran di Biro hukum Setda Propinsi DKI Jakarta yaitu di Bagian Dokumentasi, Pengkajian, Pelayanan Hukum dan Bagian Perundang Undangan, dengan cara meminta dana kurang lebih sebesar 10% setelah dipotong pajak, dari nilai kontrak oleh para rekanan yang melaksanakan kegiatan pengadaan di Biro Hukum ;

- Selanjutnya para Kepala Bagian (Kabag) tersebut menyampaikan permintaan Terdakwa dimaksud kepada para Kasir di bagian masing-masing agar menyampaikan kepada rekanan yang mengerjakan kegiatan pengadaan barang dan jasa di tiap-tiap Bagian pada Biro Hukum bahwa setiap rekanan diminta untuk menyerahkan dana kurang lebih sebesar 10% dari nilai kontrak setelah dipotong pajak ;
- Setelah kegiatan pengadaan dilaksanakan dan dilakukan pembayaran kepada rekanan-rekanan pengadaan pada tiap-tiap Bagian, maka Terdakwa menerima pemberian hadiah berupa uang dari para rekanan yang melaksanakan kegiatan pengadaan di Biro Hukum dari bulan Juli 2006 s/d Desember 2006 dan Januari 2007 s/d September 2007, yang diterima dan disimpan oleh BAHIR ROMSYAH dengan perincian penerimaan sebagai berikut :

Kegiatan dalam Tahun 2006 :

a. Kegiatan pada Bagian Pelayanan Hukum.

- Sesuai dengan perintah Terdakwa maka AGUSDIN SUSANTO selaku Kabag Pelayanan Hukum melalui BAHIR ROMSAH selaku bendahara PKC telah menerima hadiah berupa uang seluruhnya sebesar Rp 1.133.920.374 (*satu miliar seratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah*) dari para penyedia barang dan jasa yang melaksanakan kegiatan pengadaan pada 12 (dua belas) Kegiatan pelayanan hukum ;

b. Kegiatan pada Bagian Pengkajian Peraturan Perundang-undangan.

- Sesuai dengan perintah Terdakwa maka NORWENDA selaku Kabag Pengkajian Peraturan Perundang-undangan melalui BAHIR ROMSAH selaku bendahara PKC telah menerima hadiah berupa uang seluruhnya sebesar Rp.361.989.603,- (*tiga ratus enam puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus tiga rupiah*) dari para penyedia barang dan jasa yang melaksanakan kegiatan pengadaan pada 27 (dua

Hal. 78 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



puluh tujuh) Kegiatan berkaitan dengan Pengkajian Peraturan Perundang-undangan ;

c. Kegiatan pada Bagian Peraturan Perundang-undangan.

- Sesuai dengan perintah Terdakwa maka SRI RAHAYU selaku Kabag Peraturan Perundang-undangan melalui BAHIR ROMSAH selaku PKC telah menerima hadiah berupa uang seluruhnya sebesar Rp.517.095.900,- (*lima ratus tujuh belas juta sembilan puluh lima ribu sembilan ratus rupiah*) dari para penyedia barang dan jasa yang melaksanakan kegiatan pengadaan pada 25 (dua puluh lima) Kegiatan berkaitan dengan Peraturan Perundang-undangan ;

d. Kegiatan pada bagian Dokumentasi Hukum dan Publikasi Hukum.

- Sesuai dengan perintah Terdakwa maka R. NORMAN selaku Kabag Dokumentasi Hukum dan Publikasi Hukum melalui BAHIR ROMSAH selaku bendahara PKC telah menerima hadiah berupa uang seluruhnya sebesar Rp 438.474.770,- (*empat ratus tiga puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah*) dari para penyedia barang dan jasa yang melaksanakan kegiatan pengadaan pada 13 (tiga belas) Kegiatan berkaitan dengan Dokumentasi Hukum dan Publikasi Hukum ;
- Dari 77 (tujuh puluh tujuh) kegiatan Biro Hukum Setda Propinsi DKI Jakarta pada tahun anggaran 2006 terkumpul uang pemberian para rekanan penyedia barang dan jasa seluruhnya sebesar Rp.2.451.480.647,- (*dua milyar empat ratus lima puluh satu juta empat ratus delapan puluh ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah*) yang diberikan karena kekuasaan atau kewenangan Terdakwa yang berhubungan dengan jabatannya yaitu selaku Kepala Biro Hukum atau selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Anggaran Biro Hukum Setda Prop DKI Jakarta, atau menurut pikiran orang yang memberi yaitu para rekanan pelaksana kegiatan pemberian tersebut ada hubungan dengan jabatan Terdakwa ;

Kegiatan pada Tahun 2007.

a. Kegiatan pada Bagian Pelayanan Hukum.

- Sesuai dengan perintah Terdakwa maka AGUSDIN SUSANTO selaku Kabag Pelayanan Hukum melalui BAHIR ROMSAH selaku bendahara PKC telah menerima hadiah berupa uang seluruhnya sebesar Rp.281.016.193,- (*dua ratus delapan puluh satu juta enam belas ribu*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus sembilan puluh tiga rupiah) dari para penyedia barang dan jasa yang melaksanakan kegiatan pengadaan pada 12 (dua belas) Kegiatan pelayanan hukum ;

- b. Kegiatan pada Bagian Pengkajian Peraturan Perundang-undangan.
 - Sesuai dengan perintah Terdakwa maka NOERWENDA selaku Kabag Pengkajian Peraturan Perundang-undangan melalui BAHIR ROMSAH selaku bendahara PKC telah menerima hadiah berupa uang seluruhnya sebesar Rp.57.646.084,- (*lima puluh tujuh juta enam ratus empat puluh enam ribu delapan puluh empat rupiah*) dari para Penyedia Barang dan Jasa yang melaksanakan kegiatan pengadaan pada 23 (dua puluh tiga) Kegiatan berkaitan dengan Pengkajian Peraturan Perundang-undangan ;
- c. Kegiatan pada bagian Peraturan Perundang-undangan.
 - Sesuai dengan perintah Terdakwa maka SRI RAHAYU selaku Kabag Peraturan Perundang-undangan melalui BAHIR ROMSAH selaku bendahara PKC telah menerima hadiah berupa uang seluruhnya sebesar Rp 95.507.212,- (*sembilan puluh lima juta lima ratus tujuh ribu dua ratus dua belas rupiah*) dari para penyedia barang dan jasa yang melaksanakan kegiatan pengadaan pada 18 (delapan belas) Kegiatan berkaitan dengan Peraturan Perundang-undangan ;
- d. Kegiatan pada bagian Dokumentasi Hukum dan Publikasi Hukum.
 - Sesuai dengan perintah Terdakwa maka R. NORMAN selaku Kabag Dokumentasi Hukum dan Publikasi Hukum melalui BAHIR ROMSAH selaku bendahara PKC telah menerima hadiah berupa uang seluruhnya sebesar Rp 259.157.951,- (*dua ratus lima puluh sembilan juta seratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah*) dari para penyedia barang dan jasa yang melaksanakan kegiatan pengadaan pada 12 (dua belas) Kegiatan berkaitan dengan Dokumentasi Hukum dan Publikasi Hukum ;
 - Dari 65 (enam puluh lima) kegiatan Biro Hukum Setda Propinsi DKI Jakarta pada Tahun Anggaran 2007 terkumpul uang pemberian para rekanan yang diterima oleh BAHIR ROMSAH seluruhnya sebesar Rp.696.327.440,- (*enam ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh rupiah*) yang diberikan oleh para penyedia barang dan jasa karena kekuasaan atau kewenangan Terdakwa yang berhubungan dengan jabatannya yaitu selaku Kepala Biro Hukum atau selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Anggaran Biro Hukum Setda Prop DKI Jakarta, atau menurut pikiran orang yang

Hal. 80 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberi yaitu para rekanan pelaksana kegiatan pemberian tersebut ada hubungan dengan jabatan Terdakwa ;

- Uang pemberian rekanan yang menjadi Penyedia Barang dan Jasa tahun 2006 dan tahun 2007 pada Biro Hukum Setda Propinsi DKI Jakarta sebesar Rp.3.147.808.087,- (*tiga milyar seratus empat puluh tujuh juta delapan ratus delapan ribu delapan puluh tujuh rupiah*) disimpan oleh Bendahara Biro Hukum/PKC yaitu BAHIR ROMSAH dan selanjutnya penggunaannya sesuai dengan kehendak Terdakwa digunakan untuk kepentingan Terdakwa sesuai keinginan Terdakwa ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 1 Nopember 2010 sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa JORNAL EFFENDI SIAHAAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah *melakukan beberapa tindak pidana korupsi yang masing-masing dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri secara bersama-sama* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair, melanggar Pasal 12 huruf f Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kedua dan melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Ketiga ;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JORNAL EFFENDI SIAHAAN berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan ditambah dengan pidana Denda sebesar Rp.250.000.000,- (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) subsidiair selama 5 (*lima*) bulan kurungan ;



- 3) Menghukum Terdakwa JORNAL EFFENDI SIAHAAN membayar uang pengganti sebesar Rp.7.777.817.462,- (*tujuh milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus tujuh belas ribu empat ratus enam puluh dua rupiah*) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam kurun waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun ;
- 4) Menyatakan barang bukti berupa :
- Barang Bukti No 1 s/d 289 terlampir dalam Berkas Perkara ;
 - Barang Bukti No. 290 s/d 301 berupa uang sebesar Rp.427.569.000,- (*empat ratus dua puluh tujuh juta lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah*) dinyatakan dirampas untuk Negara ;
- 5) Menetapkan agar Terdakwa JORNAL EFFENDI SIAHAAN membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 19 / Pid.B / TPK / 2010 / PN.JKT.PST. tanggal 22 Nopember 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JORNAL EFFENDI SIAHAAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JORNAL EFFENDI SIAHAAN dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) tahun dan menjatuhkan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menghukum Terdakwa JORNAL EFFENDI SIAHAAN untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 4.630.009.375,- (empat milyar enam ratus tiga puluh juta sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa JORNAL EFFENDI SUAHAAN tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan dapat dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel dokumen terkait pengangkatan Jurnal E Siahaan sebagai Kepala Biro Hukum Setdaprov. DKI Jakarta, antara lain :
 - a. 2 (dua) lembar foto copy legalisir dokumen Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor : 1035/2006 tanggal 5 Juli 2006 tentang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan pegawai negeri sipil dilingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas nama Drs. ISMET SADELI HASAN,MSi, berikut 1 (satu) lembar lampirannya ;
 - b. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 925/-082.72 tertanggal 6 Juli 2006 yang ditanda tangani oleh H. RITOLA TASMAYA ;
 - c. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Berita Acara Sumpah Jabatan ;
 - d. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Naskah Serah Terima Jabatan ;
 2. Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor : 553/2008 tanggal 22 April 2008 ;
 3. 1 (satu) buah asli Buku Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 71 Tahun 2001 – Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 70 Tahun 2002, tanggal 22 Mei 2002 perihal Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
 4. 1 (satu) buah asli Buku Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 108 Tahun 2003 perihal Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
 5. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Buku I Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta TA.2006 ;
 6. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Buku VII Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta TA.2006 ;
 7. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Buku I Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta TA.2006 ;

Hal. 83 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Buku VII Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta TA.2006 ;
9. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Buku VII Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta TA.2006 ;
10. 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor : 0027567/2006 tanggal 27-11-2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006, ditandatangani oleh HARI SANDJOJO, MJ selaku PLH. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, terdapat Cap Salinan/Photo Copy Sesuai aslinya diperiksa dan ditandatangani oleh Drs. WAHYUDIN, MM selaku Kasubbag Umum BPKD Propinsi DKI Jakarta ;
11. 7 (tujuh) lembar salinan asli dokumen Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2006 tanggal 13 Maret 2006 perihal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2006 ;
12. 4 (empat) lembar salinan asli dokumen Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 24 Tahun 2006 tanggal 13 Maret 2006 perihal Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2006 ;
13. 7 (tujuh) lembar salinan asli dokumen Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 2006 tanggal 15 November 2006 perihal Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2006 ;
14. 4 (empat) lembar salinan asli dokumen Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 113 Tahun 2006 tanggal 15 November 2006 perihal Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2006 ;
15. 2 (dua) lembar asli dokumen Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 288/2006, tanggal 3 Maret 2006 perihal Pendelegasian sebagian Kewenangan Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dalam Rangka

Hal. 84 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan dan Pengelolaan Anggaran Biro Hukum Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2006, berikut 3 (tiga) lembar asli lampirannya ;

16. 3 (tiga) lembar salinan asli Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 21 / 2006 perihal Penetapan Pemegang Kas Cabang dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Atasan Langsungnya Tahun Anggaran 2006, berikut 4 (empat) lembar lampirannya ;
17. 3 (tiga) lembar asli / FC legalisir Keputusan Kepala Biro Hukum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 01/2006 perihal Penunjukan Pembantu Pemegang Kas Cabang Biro Hukum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2006, berikut 1 lembar lampirannya ;
18. 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Keputusan Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 03 Tahun 2006 perihal Pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2006 ;
19. 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Keputusan Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 05 Tahun 2006 perihal Pembentukan Panitia Pemeriksaan Barang / Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2006 ;
20. 1 (satu) bundel dokumen terkait penerbitan Patokan Harga Satuan Filler, antara lain :
 - a. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 333/-077.2 tertanggal 1 Juni 2006, perihal Permohonan Harga Satuan yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta Up. Kepala Biro Perlengkapan Provinsi DKI Jakarta dari Kepala Biro Hukum Provinsi DKI Jakarta an. H. R. DEDED SUKANDAR, SH, MH ;
 - b. 1 (satu) lembar usulan PHS Barang Non Standar (Insidentil) yang Belum Tercantum dalam Buku Patokan Harga Satuan, tertanggal 1 Juni 2006, yang ditanda tangani Kepala Biro Hukum Provinsi DKI Jakarta an. H. R. DEDED SUKANDAR, SH, MH ;
 - c. 9 (sembilan) lembar dokumen Penawaran Harga dari Fortune Indonesia ;

Hal. 85 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 4 (empat) lembar dokumen Penawaran Harga dari Pelita Alembana ;
- e. 4 (empat) lembar dokumen Penawaran Harga dari Dwi Cipta Design ;
- f. 2 (dua) lembar dokumen Keputusan Kepala Biro Perlengkapan Provinsi DKI Jakarta Nomor : 3359/073.532 tertanggal 16 Agustus 2006 tentang Penetapan Patokan Harga Satuan Barang Insidental Kebutuhan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang ditandatangani oleh Kepala Biro Perlengkapan Prov. DKI Jakarta an. Ir. EKO BHARUNO, MT ;
- g. 4 (empat) lembar dokumen lampiran Keputusan Kepala Biro Perlengkapan Prov. DKI Jakarta Nomor : 3359/073.532 tertanggal 16 Agustus 2006 tentang Penetapan Patokan Harga Satuan Barang Insidental Kebutuhan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang ditandatangani oleh Kepala Biro Perlengkapan Prov. DKI Jakarta an. Ir. EKO BHARUNO, MT ;
- h. 2 (dua) lembar Berita Acara Penelitian dan Evaluasi Usulan Patokan Harga Satuan Insidental No. 154/BAHS/BP/VII /2006 tertanggal 5 Juli 2006 ;
- i. 5 (lima) lembar dokumen lampiran Berita Acara Hasil Survey dan Pembahasan Nomor 154 ;
21. 1 (satu) bundel asli dokumen Perjanjian Pelelangan Umum Pengadaan Jasa Filler Kebutuhan Biro Hukum Sekda Prov. DKI Jakarta antara Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan PT. ANUGRAH CIPTA PRATAMA PRIMA Nomor 746/077.5, yang berisi antara lain :
 - a. 5 (lima) lembar asli dokumen Perjanjian Pelelangan Umum Pengadaan Jasa Filler Kebutuhan Biro Hukum Sekda Prov. DKI Jakarta antara Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan PT. Anugrah Cipta Pratama Prima Nomor 746/077.5, tanggal 17 November 2006, yang ditandatangani oleh Pihak Pertama an. JORNAL E. SIAHAAN, SH. M.Si selaku Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Pihak Kedua an. ASEP YUDI PRIBADI selaku Direktur Utama PT. Anugrah Cipta Pratama Prima ;
 - b. 5 (lima) lembar asli dokumen Perjanjian Pelelangan Umum Pengadaan Jasa Filler Kebutuhan Biro Hukum Sekda Prov. DKI

Hal. 86 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta antara Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan PT. Anugrah Cipta Pratama Prima Nomor 746/077.5, tanggal 17 November 2006, yang ditandatangani oleh Pihak Pertama an. JORNAL E. SIAHAAN, SH. M.Si selaku Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Pihak Kedua an. ASEP YUDI PRIBADI selaku Direktur Utama PT. Anugrah Cipta Pratama Prima ;

- c. 1 (satu) lembar asli dokumen Lampiran Spesifikasi Penayangan Materi Filler Hukum Nomor : 746/077.5, tanggal 17 November 2006, Volume 268 kali Tayang @ 30 detik, yang ditandatangani oleh an. JORNAL E. SIAHAAN, SH. M.Si selaku Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan an. ASEP YUDI PRIBADI selaku Direktur Utama PT. Anugrah Cipta Pratama Prima ;
- d. 3 (tiga) lembar asli dokumen Keputusan Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 744/077.92, tanggal 17 November 2006 tentang Penunjukan PT. Anugrah Cipta Pratama Prima sebagai Perusahaan Penyedia Barang/Jasa Filler Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov. DKI Jakarta, yang ditandatangani oleh an. JORNAL E. SIAHAAN, SH. M.Si selaku Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
- e. 1 (satu) lembar asli dokumen Jaminan Pelaksanaan ASIA INSURANCE Reg P 041032 Nomor Bond : 72.01.06.000419, Nilai Bond : Rp. 49.520.625,- (empat puluh sembilan juta lima ratus dua puluh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) tertanggal 17 November 2006 ;
- f. 3 (tiga) lembar asli dokumen Keputusan Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 719/A/077.92, tanggal 9 November 2006 tentang Penetapan Penyedia Barang/Jasa Pelaksana Pelelangan Umum Pengadaan Jasa Filler Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov. DKI Jakarta, yang ditandatangani oleh an. JORNAL E. SIAHAAN, SH. M.Si selaku Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;

Hal. 87 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) lembar asli dokumen Pengumuman Pemenang Pelelangan Umum Pengadaan Jasa Filler Hukum Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov. DKI Jakarta Nomor : 31/PPBJ/Peng/L/Filler/XI/2006, tanggal 9 November 2006 yang ditandatangani oleh an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;
- h. 1 (satu) lembar asli dokumen Nomor : 711/A/077.92, tanggal 9 November 2006 perihal Penetapan Pemenang Lelang Umum Pengadaan Jasa Filler Hukum Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov. DKI Jakarta, yang ditujukan kepada Panitia Pengadaan Barang / Jasa Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta, yang ditandatangani oleh an. JORNAL E. SIAHAAN, SH. M.Si selaku Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- i. 4 (empat) lembar asli dokumen Nomor : 26/PPBJ/Lap/Filler/XI/2006, tanggal 6 November 2006 perihal Laporan Lelang Umum Pengadaan Jasa Filler Hukum Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov. DKI Jakarta, yang ditujukan kepada Kepala Biro Hukum Setdaprov. DKI Jakarta, yang ditandatangani oleh an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;
- j. 3 (tiga) lembar asli dokumen Berita Acara Penetapan Calon Pemenang Lelang dan Cadangan Calon Pemenang Pengadaan Jasa Filler Hukum Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov. DKI Jakarta Nomor : 25/PPBJ/BA/Filler/XI/2006 tanggal 6 November 2006, yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua, ISMIYATUN, SH selaku Sekretaris, IWAN SATYOPRODJO, SH, MM, Endang SUMARDI, SH dan OR. ZAKARIAS, SH selaku anggota ;
- k. 4 (empat) lembar asli dokumen Berita Acara Hasil Pelelangan Umum Pengadaan Jasa Filler Hukum Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov. DKI Jakarta Nomor : 24/PPBJ/BA/FILLER/XI/2006 tanggal 6 November 2006, yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua,

Hal. 88 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISMIYATUN, SH selaku Sekretaris, IWAN SATYOPRODJO, SH, MM, Endang SUMARDI, SH dan OR. ZAKARIAS, SH selaku anggota ;

- I. 3 (tiga) lembar asli dokumen Berita Acara Penilaian dan Pembuktian Kualifikasi Dokumen Penawaran Pelelangan Umum Dalam Rangka Pengadaan Jasa Filler Hukum Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov. DKI Jakarta Nomor : 23/PPBJ/BA/FILLER/XI/2006 tanggal 3 November 2006, yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua, ISMIYATUN, SH selaku Sekretaris, IWAN SATYOPRODJO, SH, MM, Endang SUMARDI, SH dan OR. ZAKARIAS, SH selaku Anggota ;
- m. 1 (satu) lembar asli dokumen Daftar Hadir pada hari/tanggal : Jum'at, 3 November 2006, pukul 10.00 WIB, Tempat : Ruang Rapat Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Blok G lantai 9 Jl. Merdeka Selatan 8-9 Jakarta Pusat, Acara Penilaian dan Pembuktian Kualifikasi Dokumen Penawaran Pelelangan Umum Dalam Rangka Pengadaan Jasa Filler Hukum Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov. DKI Jakarta, yang terdapat tanda tangan nomor urut 1 (satu) an. MADE SUARJAYA, SH sampai dengan nomor urut 8 (delapan) an. INDRA APRIAL (CV. Honga Jaya), yang ditandatangani oleh an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;
- n. 1 (satu) lembar asli dokumen Nomor : 22/PPBJ/UND/Filler/XI/2006, tanggal 2 November 2006 perihal Undangan, yang ditujukan kepada Direktur/pimpinan PT. ANUGRAH CIPTA PRATAMA PRIMA Jln. Adam Ujung No. 7A, RT.08/10 Kel. Sukabumi Utara, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat, yang ditandatangani oleh an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;
- o. 1 (satu) lembar asli dokumen Nomor : 22/PPBJ/UND/Filler/XI/2006, tanggal 2 November 2006 perihal Undangan, yang ditujukan kepada Direktur/Pimpinan CV. SALSABILA Jln. Kp. Baru No. 101, RT. 03/10 Kel. Kembangan Utara Jakarta Barat, yang ditandatangani oleh an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua

Hal. 89 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia Pengadaan Barang / Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;

- p. 1 (satu) lembar asli dokumen Nomor : 22/PPBJ/UND/Filler/XI/2006, tanggal 2 November 2006 perihal Undangan, yang ditujukan kepada Direktur/Pimpinan CV. BUANA PERMAI Jln. Warung Silah No. 20 Ciganjur Jakarta Selatan, yang ditandatangani oleh an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;
- q. 1 (satu) lembar asli dokumen Nomor : 21/PPBJ/UND/Filler/XI/2006, tanggal 2 November 2006 perihal Undangan, yang ditujukan kepada Ismiyatun, SH, Iwan Satyoprodjo, SH, MH, Endang Sumardi, SH dan OR. Zakarias, SH, yang ditandatangani oleh an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;
- r. 3 (tiga) lembar asli dokumen Berita Acara Evaluasi Dokumen Kualifikasi Surat Penawaran Harga (SPH) Pelelangan Umum Dalam Rangka Pengadaan Jasa Filler Hukum Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov. DKI Jakarta Nomor : 20/PPBJ/BA/Filler/XI/2006, tanggal 2 November 2006, yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua, ISMIYATUN, SH selaku Sekretaris, IWAN SATYOPRODJO, SH, MM, Endang SUMARDI, SH dan OR. ZAKARIAS, SH selaku Anggota ;
- s. 1 (satu) lembar asli dokumen Daftar Hadir pada Hari/Tanggal : Kamis, 2 November 2006, pukul : 09.00 WIB, Tempat : Ruang Rapat Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Blok G lantai 9 Jln. Merdeka Selatan 8 – 9 Jakarta Pusat, Acara : Pemberitahuan Hasil Evaluasi Administrasi, Teknis dan Harga Dokumen Penawaran Harga (SPH) Pelelangan Umum Pengadaan jasa Filler Hukum dan Pengambilan Asli Jaminan Penawaran (agar membawa identitas resmi dari Direktur/Pimpinan Perusahaan atau sesuai Surat Kuasa Pendaftaran), terdapat tanda tangan nomor urut 1 (satu) an. MADE SUARJAYA, SH sampai dengan nomor urut 9 (sembilan) an. CV. POLY LESTARI, yang ditandatangani oleh an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua

Hal. 90 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia Pengadaan Barang / Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah
Provinsi DKI Jakarta ;

- t. 1 (satu) lembar asli dokumen Nomor : 19/PPBJ/UND/Filler/XI/2006, tanggal 1 November 2006 perihal Undangan, yang ditujukan kepada Direktur/Pimpinan CV. MANDIRI JAYA ABADI, yang ditandatangani oleh an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;
- u. 1 (satu) lembar asli dokumen Nomor : 19/PPBJ/UND/Filler/XI/2006, tanggal 1 November 2006 perihal Undangan, yang ditujukan kepada Direktur/Pimpinan CV. SINAR AZKA, yang ditandatangani oleh an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;
- v. 1 (satu) lembar asli dokumen Nomor : 19/PPBJ/UND/Filler/XI/2006, tanggal 1 November 2006 perihal Undangan, yang ditujukan kepada Direktur/Pimpinan CV. HONGGA JAYA, yang ditandatangani oleh an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;
- w. 1 (satu) lembar asli dokumen Nomor : 19/PPBJ/UND/Filler/XI/2006, tanggal 1 November 2006 perihal Undangan, yang ditujukan kepada Direktur/Pimpinan CV. POLY LESTARI, yang ditandatangani oleh an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;
- x. 1 (satu) lembar asli dokumen Nomor : 18/PPBJ/UND/Filler/XI/2006, tanggal 1 November 2006 perihal Undangan, yang ditujukan kepada Ismiyatun, SH, Iwan Satyoprodjo, SH, MH, Endang Sumardi, SH dan OR. Zakarias, SH, yang ditandatangani oleh an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;
- y. 3 (tiga) lembar asli dokumen Berita Acara Evaluasi Teknis dan Harga Dokumen Penawaran Pelelangan Umum Dalam Rangka Pengadaan Jasa Filler Hukum Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov. DKI Jakarta Nomor : 17/PPBJ/BA/Filler/XI/2006, tanggal 1

Hal. 91 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- November 2006, yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua, ISMIYATUN, SH selaku Sekretaris, IWAN SATYOPRODJO, SH, MM, Endang SUMARDI, SH dan OR. ZAKARIAS, SH selaku Anggota ;
- z. 2 (dua) lembar asli dokumen Lampiran : Berita Acara Evaluasi Teknis dan Harga, Nomor : 17/PPBJ/BA/Filler/X/2006, Tanggal 1 November 2006 terhadap PT. ANUGRAH CIPTA PRATAMA PRIMA, yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua, ISMIYATUN, SH selaku Sekretaris, IWAN SATYOPRODJO, SH, MM, Endang SUMARDI, SH dan OR. ZAKARIAS, SH selaku Anggota ;
- aa. 2 (dua) lembar asli dokumen Lampiran : Berita Acara Evaluasi Teknis dan Harga, Nomor : 17/PPBJ/BA/Filler/X/2006, Tanggal 1 November 2006 terhadap CV. BUANA PERMAI, yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua, ISMIYATUN, SH selaku Sekretaris, IWAN SATYOPRODJO, SH, MM, Endang SUMARDI, SH dan OR. ZAKARIAS, SH selaku Anggota ;
- ab. 2 (dua) lembar asli dokumen Lampiran : Berita Acara Evaluasi Teknis dan Harga, Nomor : 17/PPBJ/BA/Filler/X/2006, Tanggal 1 November 2006 terhadap CV. SALSABILA, yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua, ISMIYATUN, SH selaku Sekretaris, IWAN SATYOPRODJO, SH, MM, Endang SUMARDI, SH dan OR. ZAKARIAS, SH selaku Anggota ;
- ac. 2 (dua) lembar asli dokumen Lampiran : Berita Acara Evaluasi Teknis dan Harga, Nomor : 17/PPBJ/BA/Filler/X/2006, Tanggal 1 November 2006 terhadap CV. POLY LESTARI, yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua, ISMIYATUN, SH selaku Sekretaris, IWAN SATYOPRODJO, SH, MM, Endang SUMARDI, SH dan OR. ZAKARIAS, SH selaku Anggota ;

Hal. 92 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ad. 2 (dua) lembar asli dokumen Lampiran : Berita Acara Evaluasi Teknis dan Harga, Nomor : 17/PPBJ/BA/Filler/X/2006, Tanggal 1 November 2006 terhadap CV. HONGGA JAYA, yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua, ISMIYATUN, SH selaku Sekretaris, IWAN SATYOPRODJO, SH, MM, Endang SUMARDI, SH dan OR. ZAKARIAS, SH selaku Anggota ;
- ae. 2 (dua) lembar asli dokumen Lampiran : Berita Acara Evaluasi Teknis dan Harga, Nomor : 17/PPBJ/BA/Filler/X/2006, Tanggal 1 November 2006 terhadap CV. SINAR AZKA, yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua, ISMIYATUN, SH selaku Sekretaris, IWAN SATYOPRODJO, SH, MM, Endang SUMARDI, SH dan OR. ZAKARIAS, SH selaku Anggota ;
- af. 2 (dua) lembar asli dokumen Lampiran : Berita Acara Evaluasi Teknis dan Harga, Nomor : 17/PPBJ/BA/Filler/X/2006, Tanggal 1 November 2006 terhadap CV. MANDIRA JAYA ABADI, yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua, ISMIYATUN, SH selaku Sekretaris, IWAN SATYOPRODJO, SH, MM, Endang SUMARDI, SH dan OR. ZAKARIAS, SH selaku Anggota ;
- ag. 2 (dua) lembar asli dokumen Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran (SPH) Sampul II Pelelangan Umum Dalam Rangka Pengadaan Jasa Filler Hukum Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov. DKI Jakarta Nomor : 16/PPBJ/BA/Filler/XI/2006, tanggal 1 November 2006, yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua, ISMIYATUN, SH selaku Sekretaris, IWAN SATYOPRODJO, SH, MM, Endang SUMARDI, SH dan OR. ZAKARIAS, SH selaku Anggota ;
- ah. 1 (satu) lembar asli dokumen Daftar Hadir pada Hari/Tanggal : Rabu, 1 November 2006, pukul : 14.00 WIB, Tempat : Ruang Rapat Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Blok G lantai 9 Jln. Merdeka Selatan 8 – 9 Jakarta Pusat, Acara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembukaan Surat Penawaran Harga (SPH) Sampul II Pelelangan Umum Pengadaan jasa Filler Hukum Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov. DKI Jakarta, terdapat tanda tangan nomor urut 1 (satu) an. MADE SUARJAYA, SH sampai dengan nomor urut 11 (sebelas) an. SUMARDI CV. POLY LESTARI, yang ditandatangani oleh an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;

- ai. 1 (satu) lembar asli dokumen Nomor : 15/PPBJ/UND/Filler/X/2006, tanggal 31 Oktober 2006 perihal Undangan, yang ditujukan kepada Direktur/Pimpinan PT. ANUGRAH CIPTA PRATAMA PRIMA Jl. Adam Ujung No. 7A RT. 08/10, Sukabumi Utara Kebon Jeruk Jakarta Barat, yang ditandatangani oleh an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;
- aj. 1 (satu) lembar asli dokumen Nomor : 15/PPBJ/UND/Filler/X/2006, tanggal 31 Oktober 2006 perihal Undangan, yang ditujukan kepada Direktur/Pimpinan CV. SINAR AZKA Jl. Rahayu No. 1 Jelambar Grogol Petamburan Jakarta Barat, yang ditandatangani oleh an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;
- ak. 1 (satu) lembar asli dokumen Nomor : 15/PPBJ/UND/Filler/X/2006, tanggal 31 Oktober 2006 perihal Undangan, yang ditujukan kepada Direktur/Pimpinan CV. MANDIRA JAYA ABADI Jl. Kp. Gaga Semanan Blok H Merdeka No. 85 Jakarta Barat, yang ditandatangani oleh an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;
- al. 1 (satu) lembar asli dokumen Nomor : 15/PPBJ/UND/Filler/X/2006, tanggal 31 Oktober 2006 perihal Undangan, yang ditujukan kepada Direktur/Pimpinan CV. POLY LESTARI Jl. Kp. Baru No. 1 RT. 09/10 Kembangan Utara Jakarta Barat, yang ditandatangani oleh an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;

Hal. 94 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- am. 1 (satu) lembar asli dokumen Nomor : 15/PPBJ/UND/Filler/X/2006, tanggal 31 Oktober 2006 perihal Undangan, yang ditujukan kepada Direktur/Pimpinan CV. BUANA PERMAI Jl. Warung Silah No. 20 Ciganjur Jakarta Selatan, yang ditandatangani oleh an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;
- an. 1 (satu) lembar asli dokumen Nomor : 15/PPBJ/UND/Filler/X/2006, tanggal 31 Oktober 2006 perihal Undangan, yang ditujukan kepada Direktur/Pimpinan CV. SALSABILA Jln. Kp. Baru No. 101 Jakarta Barat, yang ditandatangani oleh an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;
- ao. 1 (satu) lembar asli dokumen Nomor : 15/PPBJ/UND/Filler/X/2006, tanggal 31 Oktober 2006 perihal Undangan, yang ditujukan kepada Direktur/Pimpinan CV. HONGGA JAYA Jl. Gaga No. 42 Semanan Kalideres Jakarta Barat, yang ditandatangani oleh an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;
- ap. 1 (satu) lembar asli dokumen Nomor : 14/PPBJ/UND/Filler/X/2006, tanggal 31 Oktober 2006 perihal Undangan, yang ditujukan kepada ISMIYATUH, SH, IWAN SATYOPRODJO, SH, MH, ENDANG SUMARDI, SH dan OR. ZAKARIAS, SH, yang ditandatangani oleh an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;
- aq. 3 (tiga) lembar asli dokumen Berita Acara Evaluasi Administrasi Dokumen Penawaran Pelelangan Umum Dalam Rangka Pengadaan Jasa Filler Hukum Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov. DKI Jakarta Nomor : 12/PPBJ/BA/Filler/X/2006, tanggal 31 Oktober 2006, yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua, ISMIYATUN, SH selaku Sekretaris, IWAN SATYOPRODJO, SH, MM, Endang SUMARDI, SH dan OR. ZAKARIAS, SH selaku anggota ;
- ar. 1 (satu) lembar asli dokumen Daftar Hadir pada Hari/Tanggal : Selasa, 31 Oktober 2006, pukul : 09.00 WIB, Tempat : Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Blok G lantai 9 Jln.

Hal. 95 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merdeka Selatan 8 – 9 Jakarta Pusat, Acara : Evaluasi Dokumen Penawaran Pelelangan Umum Pengadaan jasa Filler Hukum Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov. DKI Jakarta, terdapat tanda tangan nomor urut 1 (satu) an. MADE SUARJAYA, SH sampai dengan nomor urut 5 (lima) an. OR. ZAKARIAS, SH, yang ditandatangani oleh an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;

as. 1 (satu) lembar asli dokumen Nomor : 11/PPBJ/UND/Filler/X/2006, tanggal 30 Oktober 2006 perihal Undangan, yang ditujukan kepada ISMIYATUN, SH, IWAN SATYOPRODJO, SH, MH, ENDANG SUMARDI, SH dan OR. ZAKARIAS, SH, yang ditandatangani oleh an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;

at. 1 (satu) lembar asli dokumen Surat Penawaran Harga Nomor : 30/ACP/DKI/X/2006 tanggal 30 Oktober 2006, yang ditujukan kepada Ketua Pengadaan Barang/Jasa Biro Hukum Setdaprov. DKI Jakarta, perihal Penawaran Pelelangan Pengadaan Filler Hukum, yang ditandatangani oleh Penawar an. ASEP YUDI PRIADI selaku Direktur Utama PT. ANUGRAH CIPTA PRATAMA PRIMA, berikut 2 (dua) lembar penawaran harga yang ditandatangani an. ASEP YUDI PRIADI selaku Direktur Utama PT. ANUGRAH CIPTA PRATAMA PRIMA ;

au. 2 (dua) lembar asli dokumen penawaran harga Anugrah Cipta production, yang ditandatangani oleh ASEP YUDI PRIADI selaku Direktur Utama ;

av. 1 (satu) lembar asli dokumen Nomor : 047/PH-S/X/2006, tertanggal 30 Oktober 2006 perihal Penawaran Harga, yang ditujukan kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa Biro Hukum DKI Jakarta, yang ditandatangani oleh an. IZUDDINUR, S.AG selaku Direktur CV. SALSABILA, berikut 1 (satu) lembar asli dokumen Rincian Penawaran Harga, yang ditandatangani oleh an. IZUDDINUR, S.AG selaku Direktur CV. SALSABILA ;

aw. 1 (satu) lembar asli dokumen Jaminan Penawaran Bank BNI A-042352 Nomor : 2006/DKB/GB/048/2459/JUM'AT tanggal 27 Oktober 2006, yang ditandatangani oleh HENNI WIDAYATI, Dra,

Hal. 96 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MM selaku Pemimpin PT. Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Dukuh Bawah ;

- ax. 1 (satu) lembar asli dokumen Nomor : 022/PH/BP/X/06, tertanggal 30 Oktober 2006 perihal Penawaran Harga, yang ditujukan kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa Biro Hukum DKI Jakarta, yang ditandatangani oleh an. JAINUDDIN HARAHAH selaku Direktur CV. BUANA PERMAI, berikut 1 (satu) lembar asli dokumen Rincian Penawaran Harga, yang ditandatangani oleh an. JAINUDDIN HARAHAH selaku Direktur CV. BUANA PERMAI ;
- ay. 1 (satu) lembar asli dokumen Jaminan Penawaran Bank BNI A-0194364 Nomor : 2006/MTG/GB/024/2387/Jum'at tanggal 27 Oktober 2006, yang ditandatangani oleh Drs. TONNY SYARIF GANTANA, MM selaku Pemimpin PT. Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Menteng ;
- az. 2 (dua) lembar asli dokumen Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran (SPH) Sampul I Pelelangan Umum Dalam Rangka Pengadaan Jasa Filler Hukum Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov. DKI Jakarta Nomor : 10/PPBJ/BA/Filler/X/2006, tanggal 30 Oktober 2006, yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua, ISMIYATUN, SH selaku Sekretaris, IWAN SATYOPRODJO, SH, MM, Endang SUMARDI, SH dan OR. ZAKARIAS, SH selaku anggota dan terdapat tanda tangan ANUGRAH CIPTA PRATAMA PRIMA, BUANA PERMAI, HONGGA JAYA, SINAR AZKA, SALSABILA, POLY LESTARI dan MANDIRI JAYA ABADI ;
- ba. 1 (satu) lembar asli dokumen Dua Sampul (Administrasi & SPH) CV. MANDIRI JAYA ABADI Nomor : 10/PPBJ/BA/Filler/X/2006, tertanggal 30 Oktober 2006 ;
- bb. 1 (satu) lembar asli dokumen Dua Sampul (Administrasi & SPH) CV. POLY LESTARI Nomor : 10/PPBJ/BA/Filler/X/2006, tertanggal 30 Oktober 2006 ;
- bc. 1 (satu) lembar asli dokumen Dua Sampul (Administrasi & SPH) CV. BUANA PERMAI Nomor : 10/PPBJ/BA/Filler/X/2006, tertanggal 30 Oktober 2006 ;

Hal. 97 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bd. 1 (satu) lembar asli dokumen Dua Sampul (Administrasi & SPH)
CV. SALSABILA Nomor : 10/PPBJ/BA/Filler/X/2006, tertanggal 30
Oktober 2006 ;
- be. 1 (satu) lembar asli dokumen Dua Sampul (Administrasi & SPH)
CV. HONGGA JAYA Nomor : 10/PPBJ/BA/Filler/X/2006,
tertanggal 30 Oktober 2006 ;
- bf. 1 (satu) lembar asli dokumen Dua Sampul (Administrasi & SPH)
CV. SINAR AZKA Nomor : 10/PPBJ/BA/Filler/X/2006, tertanggal
30 Oktober 2006 ;
- bg. 1 (satu) lembar asli dokumen Dua Sampul (Administrasi & SPH)
PT. ANUGRAH CIPTA PRATAMA PRIMA Nomor : 10/PPBJ/BA/
Filler/X/2006, tertanggal 30 Oktober 2006 ;
- bh. 1 (satu) lembar asli dokumen Nomor : 09/PPBJ/UND/Filler/X/2006
tanggal 20 Oktober 2006 perihal Undangan yang ditujukan kepada
ISMIYATUN, SH, IWAN SATYOPRODJO, SH, MH, ENDANG
SUMARDI, SH dan OR. ZAKARIAS, SH, yang ditandatangani oleh
an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan
Barang/Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
- bi. 1 (satu) lembar asli dokumen Daftar Hadir pada Hari/Tanggal :
Senin, 30 Oktober 2006, pukul : 15.15 WIB, Tempat : Biro Hukum
Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Blok G lantai 9 Jln.
Merdeka Selatan 8 – 9 Jakarta Pusat, Acara : Pembukaan
Dokumen Penawaran Sampul I Pelelangan Umum Pengadaan
jasa Filler Hukum Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov. DKI Jakarta,
terdapat tanda tangan nomor urut 1 (satu) an. MADE SUARJAYA,
SH sampai dengan nomor urut 12 (dua belas) an. DENY M – CV.
BUANA PERMAI, yang ditandatangani oleh an. MADE
SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa
Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;
- bj. 2 (dua) lembar asli dokumen Nomor : 08/PPBJ/UND/Filler/X/2006
tanggal 20 Oktober 2006 perihal Undangan yang ditujukan kepada
Direktur/Pimpinan PT., yang ditandatangani oleh an. MADE
SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa
Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;
- bk. 1 (satu) lembar asli dokumen Daftar Hadir pada Hari/Tanggal :
Jum'at dan Senin, 20 dan 30 Oktober 2006, pukul : 08.00 s/d
15.00 WIB, Tempat : Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI

Hal. 98 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Blok G lantai 9 Jln. Merdeka Selatan 8 – 9 Jakarta Pusat,
Acara : Pemasukan Dokumen Penawaran Pelelangan Umum
Pengadaan Filler Hukum Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov. DKI
Jakarta, terdapat tanda tangan nomor urut 1 (satu) an. MADE
SUARJAYA, SH sampai dengan nomor urut 12 (dua belas) an.
DENY M, yang ditandatangani oleh an. MADE SUARJAYA, SH
selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Biro Hukum
Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;

- bl. 1 (satu) lembar asli dokumen Nomor : 07/PPBJ/UND/Filler/X/2006
tanggal 19 Oktober 2006 perihal Undangan yang ditujukan kepada
Direktur/Pimpinan PT. Sebagaimana Terlampir, yang
ditandatangani oleh an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua
Panitia Pengadaan Barang/Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah
Provinsi DKI Jakarta ;
- bm. 2 (dua) lembar Berita Acara Penjelasan Rencana Kerja dan
Syarat-syarat Pelelangan Umum dalam rangka pengadaan Filler
Hukum kebutuhan Biro hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI
Jakarta, Nomor 06/PPBJ/BA/Filler/X/2006, tanggal 19 Oktober
2006;
- bn. 1 (satu) lembar asli dokumen Nomor : 05/PPBJ/UND/Filler/X/2006
tanggal 12 Oktober 2006 perihal Undangan yang ditujukan kepada
Direktur/Pimpinan PT., yang ditandatangani oleh an. MADE
SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa
Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;
- bo. 1 (satu) lembar asli dokumen Daftar Hadir pada Hari/Tanggal :
Kamis, 19 Oktober 2006, pukul : 10.00 WIB, Tempat : Biro Hukum
Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Blok G lantai 9 Jln.
Merdeka Selatan 8 – 9 Jakarta Pusat, Acara : Penjelasan
(Aanwijzing) rencana kerja dan syarat-syarat Pelelangan Umum
Pengadaan Filler Hukum Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov. DKI
Jakarta, terdapat tanda tangan nomor urut 1 (satu) an. MADE
SUARJAYA, SH sampai dengan nomor urut 12 (dua belas) an. M.
ALI, yang ditandatangani oleh an. MADE SUARJAYA, SH selaku
Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Biro Hukum Sekretariat
Daerah Provinsi DKI Jakarta ;
- bp. 1 (satu) lembar asli dokumen Nomor : 04/PPBJ/UND/Filler/X/2006
tanggal 12 Oktober 2006 perihal Undangan yang ditujukan kepada

Hal. 99 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ISMIYATUN, SH, IWAN SATYOPRODJO, SH, MH, ENDANG SUMARDI, SH dan OR. ZAKARIAS, SH, yang ditandatangani oleh an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
- bq. 1 (satu) lembar asli dokumen Harga Perkiraan Sendiri / OE, tertanggal 30 Oktober 2006 yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Barang / Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta dan mengetahui JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta ;
- br. 2 (dua) lembar dokumen Television Schedule – Client Pemda DKI – Product Kampanye Dilarang Merokok & Busway – period Nov 2006 ;
- bs. 79 (tujuh puluh sembilan) lembar Data Administrasi dan Teknis Filler Hukum Sosialisasi Busway dan Kawasan Dilarang Merokok ;
- bt. 41 (empat puluh satu) lembar dokumen penawaran CV Salsabila – Alat tulis kantor, Meubelair, Mekanikal, Komputer, Percetakan – Jl. Kp. Baru No. 101 Jakarta Barat Telp. (021) 5817018 HP. 081511425020 ;
- bu. 46 (empat puluh enam) lembar dokumen penawaran CV. Buana Permai ;
- bv. 12 (dua belas) lembar asli dokumen Rencana Kerja dan Syarat-syarat Pelelangan Umum Dengan Pascakualifikasi Nomor : 02/PPBJ/RKS/Filler/IX/2006 tanggal 18 September 2006, yang ditandatangani oleh MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Menyetujui JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum DKI Jakarta, berikut 2 (dua) lembar Lampirannya ;
- bw. 1 (satu) lembar asli dokumen Notulen Rapat Hari/Tanggal Kamis, 7 September 2006, Waktu 10.00 WIB, Tempat Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Blok G lantai 9 Jl. Merdeka Selatan 8 – 9 Jakarta Pusat, Acara Persiapan pelelangan Umum Pengadaan Filler Hukum kebutuhan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta, yang ditandatangani oleh MADE SUARJAYA, Sh selaku Ketua Panitia ;
- bx. 1 (satu) lembar asli dokumen Daftar Hadir Hari/Tanggal Kamis, 7 September 2006, Waktu 10.00 WIB, Tempat Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Blok G lantai 9 Jl.

Hal. 100 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Merdeka Selatan 8 – 9 Jakarta Pusat, Acara Persiapan pelelangan Umum Pengadaan Filler Hukum kebutuhan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta, terdapat tanda tangan pesertra nomor urut 1 (satu) an. MADE SUARJAYA, SH sampai dengan nomor urut 5 (lima) OR. ZAKARIAS, ,SH, yang ditandatangani oleh MADE SUARJAYA, Sh selaku Ketua Panitia ;
- by. 1 (satu) lembar asli dokumen Nomor : 01/PPBJ/UND/Filler/IX/2006 tanggal 6 September 2006 perihal Undangan yang ditujukan kepada ISMIYATUN, SH, IWAN SATYOPRODJO, SH, MH, ENDANG SUMARDI, SH dan OR. ZAKARIAS, SH, yang ditandatangani oleh an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;
- bz. 1 (satu) lembar asli dokumen Nomor 386 / 072, tertanggal 26 juni 2006 perihal Permintaan Pelelangan Penayangan Materi Filler Hukum, ditujukan kepada Ketua Panitia Pengadaan Barang dan jasa Biro hukum Provinsi DKI Jakarta yang ditandatangani oleh H. R. DEDED SUKANDAR, SH, MH selaku Kepala Biro Hukum Provinsi DKI Jakarta, berikut 1 (satu) lembar lampirannya ;
22. 1 (satu) bundel dokumen pembayaran Pengadaan Jasa Filler Kebutuhan Biro Hukum Sekda Prov. DKI Jakarta antara Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan PT. ANUGRAH CIPTA PRATAMA PRIMA Nomor 746/077.5, yang berisi antara lain :
- a. 1 (satu) lembar asli tindisan dokumen SPM Giro No. 00325772006 TA. 2006 tertanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp. 804.352.500,- (delapan ratus empat juta tiga ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran biaya pengadaan jasa filler hukum kebutuhan Biro Hukum Sekdaprov DKI Jakarta, Kontrak No. 746/077.5, tertanggal 17 November 2006 ;
- b. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Nomor : 039/ACP/INV/XII/2006 tertanggal 16 Desember 2006, sebesar Rp. 990.412.500,- (sembilan ratus sembilan puluh juta empat ratus dua belas ribu lima ratus rupiah), yang ditandatangani an. MA'MUN selaku Direktur PT. ANUGRAH CIPTA PRATAMA PRIMA, an. BAHIR ROMSAH selaku Pemegang Kas Cabang dan terdapat stempel

Hal. 101 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanda tangan an. JORNAL E. SIAHAAN selaku Kepala Biro Hukum DKI Jakarta ;

- c. 1 (satu) lembar asli dokumen Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 2600/SPP/SWD/BB/XII/2006 tertanggal 19 Desember 2006, yang ditanda tangani an. H. BUDIYONO selaku Pemegang Kas Setdaprov DKI Jakarta dan an. HARI SANDJOJO, MJ selaku Asisten Keuangan ;
- d. 1 (satu) lembar asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran No. 2600/SPP/SWD/BB/XII/2006 tertanggal 19 Desember 2009, yang ditanda tangani an. H. BUDIYONO selaku Pemegang Kas Setdaprov DKI Jakarta dan an. HARI SANDJOJO, MJ selaku Asisten Keuangan ;
- e. 1 (satu) lembar asli dokumen Daftar Rincian Rencana Penggunaan Beban Tetap No. 187/SPP/2006 tanggal 19 Desember 2006, ditandatangani an. BAHIR ROMSAH selaku Pemegang Kas Cabang dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum ;
- f. 1 (satu) lembar asli dokumen Invoice PT. ANUGRAH CIPTA PRATAMA PRIMA No. 039/ACP/INV?XII/2006 tertanggal Desember 2006, ditujukan kepada Pemerintah Prov. DKI Jakarta, ditandatangani diatas materei 6.000 (enam ribu rupiah) an. MA'MUN selaku PT. ANUGRAH CIPTA PRATAMA PRIMA ;
- g. 1 (satu) lembar asli dokumen Berita Acara Pemeriksaan Barang (BAPB) Nomor : 40/BAPB/BH/XII/2006 tertanggal 14 Desember 2006, ditanda tangani oleh Panitia Pemeriksa Barang nomor urut 1 (satu) Ketua sampai dengan 5 (lima) anggota, an.ASEP YUDI PRIADI selaku Direktur Utama PT. ANUGRAH CIPTA PRATAMA PRIMA dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang ;
- h. 1 (satu) lembar asli dokumen Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 37/BAST/BH/XII/2006 tanggal 14 Desember 2006, yang ditanda tangani an. IRUSWANDI, SH selaku Pengurus Barang unit Biro Hukum, an. ASEP YUDI PRIADI selaku Direktur Utama PT. ANUGRAH CIPTA PRATAMA PRIMA dan mengetahui an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum,

Hal. 102 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Serah Terima Barang ;

23. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :
- a. 2 (dua) lembar asli dokumen Kesepakatan Bersama (Memorandum of Understanding) antara PT. Anugerah Cipta Pratama dengan PT. Fortune Indonesia, Tbk, tertanggal 25 Agustus 2006, ditandatangani oleh ASEP YUDI PRIADI selaku Direktur Utama PT. Anugerah Cipta Pratama dan ARIS BOEDIHARJO selaku Vice President Director PT. Fortune Indonesia serta terdapat Materai 6000 ;
 - b. 1 (satu) lembar asli dokumen Kesepakatan antara PT. Fortune Indonesia, Tbk dengan PT. Anugerah Cipta Pratama, tertanggal 28 Februari 2007, ditandatangani oleh YULIANA LEONARDA selaku Pihak Pertama dan ASEP YUDI PRIADI selaku Pihak Kedua serta terdapat Materai 6000 ;
 - c. 1 (satu) lembar asli tindisan Formulir Setoran Bank Mandiri cabang Warung Buncit tertanggal 22 Februari 2007, nama pemilik rekening PT. Fortune Indonesia dengan Nomor rekening 127-0091009884 sejumlah Rp 250.000.000,00 ;
 - d. 1 (satu) lembar asli tindisan Formulir Setoran Bank Mandiri cabang Fatmawati tertanggal 11 Januari 2007, nama pemilik rekening PT. Fortune Indonesia dengan Nomor rekening 127-0091009884 sejumlah Rp 120.545.454,00 ;
 - e. 1 (satu) lembar asli dokumen RTGS Terminal PT. Bank Ekonomi Raharja tanggal 02 Januari 2007, nomor IFT607CP-000415, Total Amount (IDR) : 846.317.500,00 dari Bank DKI Cabang Balaikota ;
 - f. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran PT. Bank Ekonomi Raharja Cabang Pembantu Cibubur, pemilik rekening PT. Anugrah Cipta Pratama Prima, Jenis Rekening Giro Perusahaan, Nomor Rekening 2191866561, periode 01 Nopember 2006 – 30 Nopember 2006 ;
 - g. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran PT. Bank Ekonomi Raharja Cabang Pembantu Cibubur, pemilik rekening PT. Anugrah Cipta Pratama Prima, Jenis Rekening Giro Perusahaan, Nomor Rekening 2191866561, periode 29 Desember 2006 – 31 Januari 2007 ;

Hal. 103 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran PT. Bank Ekonomi Raharja Cabang Pembantu Cibubur, pemilik rekening PT. Anugrah Cipta Pratama Prima, Jenis Rekening Giro Perusahaan, Nomor Rekening 2191866561, periode 01 Pebruari 2007 – 28 Pebruari 2007 ;
24. 3 (tiga) lembar asli dokumen Rincian Biaya Produksi Pengadaan Jasa Filler Hukum Tahun 2006 ;
25. 1 (satu) bundel dokumen yang terkait penayangan Filler Hukum di Global TV, antara lain :
- a. 1 (satu) lembar foto copy legalisir SURAT PESANAN No : (tanpa nomor) NPWP : 02.361.294.8-027.000 tertanggal 6 Desember 2006, yang ditanda tangani dan berstempel PT. MEGAVISON UTAMA ;
 - b. 3 (tiga) lembar asli tindisan FINAL TIME LOG PROOF GLOBAL TV atas Order No : 01/PEMDA DKI BIRO HUKUM/1206 tertanggal 7 Desember 2006 ;
 - c. 4 (empat) lembar asli INVOICE Nomor : 0612000208 tertanggal 1 January 2007 atas Order No : 01/PEMDA DKI BIRO HUKUM/12 ;
 - d. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Rekening Koran PT. GLOBAL INFORMASI BERMUTU Nomor : 123-00-0209837-6, periode 1 s/d 31 January 2007 ;
 - e. 1 (satu) keping DVD-R kapasitas 120 min VIDEO / 4,7 GB DATA merk MAXELL serial number QGH804305854H09, terdapat tulisan "Hello Jakarta – 06 Desember '06" ;
 - f. 1 (satu) keping DVD-R kapasitas 120 min VIDEO / 4,7 GB DATA merk MAXELL serial number QGH804301412H10, terdapat tulisan "Pesta Film Remaja – 08 Desember '06" ;
26. 1 (satu) bundel Dokumen yang terkait penayangan Filler Hukum di Indosiar, antara lain :
- a. 1 (satu) lembar asli tindisan dokumen POST TRANSMISSION LOG PT. Indosiar Visual Mandiri atas Order Nomor : 13370.001/FORU/BDM/1106 tertanggal 29 November 2006 oleh PT. FORTUNE INDONESIA, Tbk ;
 - b. 1 (satu) lembar asli tindisan INVOICE PT. Indosiar Visual Mandiri Nomor 024906 tertanggal 30 November 2006, kepada PT. FORTUNE INDONESIA, Tbk ;

Hal. 104 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar asli tindisan dokumen FAKTUR PAJAK STANDAR kode dan Nomor seri : DKRPV-091-0023461 tertanggal 1 Desember 2006, atas Invoice Nomor 024906 ;
- d. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Rekening Koran PT. Indosiar Visual Mandiri Nomor : 0353061663 periode 28 Februari 2007 s/d 31 Maret 2007 ;
- e. 1 (satu) lembar asli tindisan dokumen POST TRANSMISSION LOG PT. Indosiar Visual Mandiri atas Order Nomor : 13370.002/FORU/BDM/1206 tertanggal 29 November 2006 oleh PT. FORTUNE INDONESIA, Tbk ;
- f. 1 (satu) lembar asli tindisan INVOICE PT. Indosiar Visual Mandiri Nomor 024984 tertanggal 11 Desember 2006, kepada PT. FORTUNE INDONESIA, Tbk ;
- g. 1 (satu) lembar asli tindisan dokumen FAKTUR PAJAK STANDAR kode dan Nomor seri : DKRPV-091-0023539 tertanggal 11 Desember 2006, atas Invoice Nomor 024984 ;
- h. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Rekening Koran PT. Indosiar Visual Mandiri Nomor : 0353061663 periode 28 Februari 2007 s/d 31 Maret 2007 ;
- i. 1 (satu) lembar asli tindisan dokumen POST TRANSMISSION LOG PT. Indosiar Visual Mandiri atas Order Nomor : 13370.002/FORU/BDM/1206 tertanggal 29 November 2006 oleh PT. FORTUNE INDONESIA, Tbk ;
- j. 1 (satu) lembar asli tindisan INVOICE PT. Indosiar Visual Mandiri Nomor 024984 tertanggal 11 Desember 2006, kepada PT. FORTUNE INDONESIA, Tbk ;
- k. 1 (satu) lembar asli tindisan dokumen FAKTUR PAJAK STANDAR kode dan Nomor seri : DKRPV-091-0023539 tertanggal 11 Desember 2006, atas Invoice Nomor 024984 ;
- l. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Rekening Koran PT. Indosiar Visual Mandiri Nomor : 0353061663 periode 28 Februari 2007 s/d 31 Maret 2007 ;
27. 1 (satu) bundel Dokumen yang terkait penayangan Filler Hukum di TPI, antara lain :
 - a. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen MEDIA ORDER Nomor : 031/TBP-PO/1206 dari Agency JUANG BANGUN PERSADA, Product PSA Biro Hukum, Periode 15 \$& 16

Hal. 105 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2006, Budget Netto Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), Prepared By RINA LILIANOVA, Approval By NURLELA SARI ;

- b. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen SPECIAL PACKAGE Nomor : 4530/SPC.PKT – JUANG BANGUN PERSADA/MKS CTPI/XII/06, Special for “PSA BIRO HUKUM” periode : 15 Dec – 16 Dec 2006 ;
 - c. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen CLEARANCE REPORT register nomor : 2006120000678, tertanggal 15 Desember 2006 ;
 - d. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Dokumen LOG PROVE register nomor : 2006120000678, Agency PT. JUANG BANGUN PERSADA, Brand PSA Biro Hukum, Order Number 031/JBP-PO/1206, Approved by ANGLING HARI PRIYADI ;
 - e. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Formulir Setoran Bank Mandiri kepada PT.CIPTA TPI Nomor rekening 129.0001071519 tertanggal 15 Desember 2006 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
 - f. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Formulir Setoran Bank Mandiri kepada PT.CIPTA TPI Nomor rekening 129.0001071519 tertanggal 15 Desember 2006 sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus rupiah) ;
28. 1 (satu) bundel Dokumen yang terkait penayangan Filler Hukum di Lativi (saat ini menjadi TVOne), antara lain :
- a. 1 (satu) lembar foto copy legalisir dokumen FULL BLOCKING TIME LATIVI Nomor : (tanpa nomor)/MKT-GROUP2/X/2006 tertanggal 28 November 2006, atas klien PT.TRIAS MULYA ABADI PERKASA ;
 - b. 1 (satu) lembar foto copy legalisir dokumen MEDIA PLAN SINETRON KEHUTANAN “MEWUJUDKAN IMPIAN” bulan Desember 2006, agen : TRIAS MULYA ABADI PERKASA, yang ditanda tangani an. RUDI SANJAYA ;
 - c. 1 (satu) lembar foto copy legalisir dokumen INVOICE Nomor : 012.00400184 – 06 tertanggal 3 January 2007 ;
 - d. 5 (lima) lembar foto copy dokumen LOG PROVE – Based on Data 02/01/2007 16:13:37 atas PO : PO/214/SLS-PLAN/1206 tertanggal 2 January 2007 ;

Hal. 106 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Bukti Penerimaan Kas / BANK PT.LATIVI MEDIA KARYA tertanggal 8 Desember 2006 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- f. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Rekening Koran PT.LATIVI MEDIA KARYA Nomor : 125-00-0212843-7 periode 1 s/d 31 Desember 2006 ;
- g. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Bukti Penerimaan Kas / BANK PT.LATIVI MEDIA KARYA tertanggal 3 Januari 2007 sebesar Rp.113.000.000,- (seratus tiga belas juta rupiah) ;
- h. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Bukti Penerimaan Kas / BANK PT.LATIVI MEDIA KARYA tertanggal 3 Januari 2007 sebesar Rp.113.000.000,- (seratus tiga belas juta rupiah) ;
- i. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen Full Blocking Time Lativi Nomor : (tanpa nomor) / GROUP II/XI/2006 tertanggal 30 November 2006, atas klien PT.TRIAS MULYA ABADI PERKASA. ;
- j. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen MEDIA PLAN "HALO JAKARTA" tanggal 2,3,9,10 Desember 2006, agen : TRIAS MULYA ABADI PERKASA, yang ditanda tangani an. RUDI SANJAYA ;
- k. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen FULL BLOCKING TIME LATIVI Nomor : 001/18 - WA/XI/2006 tertanggal 1 November 2006, atas klien PT.TRIAS MULYA ABADI PERKASA ;
- l. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen INVOICE Nomor : 012.00400185 – 06 tertanggal 3 January 2007 ;
- m. 3 (tiga) lembar foto copy Dokumen LOG PROVE – Based on Data 02/01/2007 16:13:37 atas PO : PO/23910/SLS-PLAN/1206 tertanggal 2 January 2007 ;
- n. 1 (satu) lembar foto copy legalisir BUKTI PENERIMAAN KAS / BANK PT.LATIVI MEDIA KARYA tertanggal 1 Desember 2006 sebesar Rp.187.500.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- o. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Cheque Bank IndoMonex Nomor : MCKP 321600 tertanggal 30 November 2006 ;
- p. 1 (satu) lembar foto copy legalisir PERMOHONAN PENGIRIMAN UANG Bank IndoMonex Nomor : 228377 tertanggal 1 Desember

Hal. 107 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 sebesar Rp. 187.500.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;

- q. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen PT.MEGAVISION UTAMA tertanggal 11 Desember 2006, yang ditujukan kepada Bapak INDRA MADEWA selaku Sales Manager LATIVI, yang ditanda tangani an. Drs. RAJ INDRA SINGH selaku Direktur Utama PT.MEGAVISION UTAMA ;
- r. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen MEDIA PLAN PENAYANGAN PSA DIPENDA & BIRO HUKUM DKI JAKARTA judul BPHTP, Kebersihan dan Ketertiban, tertanggal 12 Desember 2006, yang ditanda tangani an. Drs. RAJ INDRA SINGH selaku Direktur Utama PT. MEGAVISION UTAMA ;
- s. 1 (satu) lembar foto copy legalisir TRAFFIC ORDER Nomor : 15097 atas PO Nomor : PO/12136/SLS-PLAN/1206 ;
- t. 1 (satu) lembar foto copy legalisir LOG PROVE – Based on data of 01/01/2007 16:13:37 atas PO Nomor : PO/12136/SLS-PLAN/1206, periode : 12/12/2006 – 31/12/2006 ;
- u. 1 (satu) lembar foto copy legalisir PURCHASE ORDER PENAYANGAN PSA BIRO HUKUM DKI JAKARTA, judul Kebersihan dan Ketertiban tertanggal 15 Desember 2006, yang ditanda tangani an. Drs. RAJ INDRA SINGH selaku Direktur Utama PT.MEGAVISION UTAMA ;
- v. 1 (satu) lembar foto copy legalisir TRAFFIC ORDER Nomor : 15143 atas PO Nomor : REF : PO/12136/SLS-PLAN/1206 & PO/23910/SLS-PLAN/1206 ;
- w. 1 (satu) lembar foto copy legalisir LOG PROVE – Based on data of 02/01/2007 16:13:37 atas PO Nomor : PO/12136/SLS-PLAN/1206 dan PO/23910/SLS-PLAN/12, periode : 15/12/2006 – 19/12/2006 ;
- x. 1 (satu) lembar foto copy legalisir MEDIA PLAN tertanggal 9, 10 Desember 2006, klien : TRIAS MULYA ABADI PERKASA, produk : DISPENDA JAKARTA ;
- y. 1 (satu) lembar foto copy legalisir TRAFFIC ORDER Nomor : 15096 atas PO Nomor : PO/12126/SLS-PLAN/1206 ;
- z. 1 (satu) lembar foto copy legalisir MEDIA ORDER – LATIVI atas PO Nomor : (tanpa nomor)/SLS-Plan/XI-06 ;

Hal. 108 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- aa. 1 (satu) lembar foto copy legalisir INVOICE Nomor : 012.00400076-06 tertanggal 3 Januari 2007 ;
 - ab. 2 (dua) lembar foto copy legalisir LOG PROVE – Based on data of 02/01/2007 16:13:37 atas PO Nomor : PO/12126/SLS-PLAN/1206, periode : 12/12/2006 – 31/12/2006 tertanggal 2 Januari 2007 ;
 - ac. 1 (satu) lembar foto copy legalisir BUKTI PENERIMAAN KAS / BANK PT.LATIVI MEDIA KARYA tertanggal 14 Desember 2006 sebesar Rp.61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah) ;
 - ad. 1 (satu) lembar foto copy legalisir SLIP SETORAN BANK MANDIRI tertanggal 14 Desember 2006 kepada PT.LATIVI MEDIA KARYA dari penyeter MEGAVISION sebesar Rp.61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah) ;
29. 1 (satu) bundel asli Dokumen Perjanjian Pelelangan Umum Pengadaan Jasa Filler Kebutuhan Biro Hukum Sekda Prov. DKI Jakarta antara Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan PT.RADITYA PUTRA BAHTERA Nomor. 783/077.92, yang berisi antara lain :
- a. 9 (sembilan) lembar asli Dokumen Perjanjian Pelelangan Umum Pengadaan Jasa Filler Hukum Kebutuhan Biro Hukum Sekda Prov. DKI Jakarta antara Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan PT. Raditya Putra Bahtera Nomor. 783/077.92, tanggal 06 Desember 2006, yang ditandatangani oleh Pihak Pertama an. JORNAL E. SIAHAAN, SH. M.Si selaku Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Pihak Kedua an. GUNTUR INDRAYANA selaku Direktur Utama PT. Raditya Putra Bahtera, beserta lampirannya ;
 - b. 3 (tiga) lembar asli Dokumen Keputusan Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 782/077.92, tanggal 06 Desember 2006 tentang Penunjukan PT. Raditya Putra Bahtera sebagai Perusahaan Penyedia Barang/Jasa Pengadaan Jasa Filler Hukum Kebutuhan Biro Hukum Sekdaprov. DKI Jakarta, yang ditandatangani oleh an. JORNAL E. SIAHAAN, SH. M.Si selaku Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;

Hal. 109 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 3 (tiga) lembar asli Dokumen Keputusan Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 781/077.92, tanggal 05 Desember 2006 tentang Penetapan Penyedia Barang/Jasa Pelelangan Umum Pengadaan Jasa Filler Hukum Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov. DKI Jakarta, yang ditandatangani oleh an. JORNAL E. SIAHAAN, SH. M.Si selaku Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
- d. 1 (satu) lembar asli Dokumen Pengumuman Pemenang Pelelangan Umum Pengadaan Jasa Filler Hukum Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov. DKI Jakarta Nomor : 24/PPBJ/Peng/L/Filler-ABT/XII/2006, tanggal 05 Desember 2006 yang ditandatangani oleh an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;
- e. 1 (satu) lembar asli Dokumen Nomor : 78/077.92, tanggal 05 Desember 2006 perihal Penetapan Pemenang Lelang Umum Pengadaan Jasa Filler Hukum Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov. DKI Jakarta, yang ditujukan kepada Panitia Pengadaan Barang / Jasa Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta, yang ditandatangani oleh an. JORNAL E. SIAHAAN, SH. M.Si selaku Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
- f. 5 (lima) lembar asli Dokumen Berita Acara Hasil Pelelangan Umum Pengadaan Jasa Filler Hukum Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov. DKI Jakarta Nomor : 21/PPBJ/BA/FILLER-ABT/XII/2006 tanggal 04 Desember 2006, yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua, ISMIYATUN, SH selaku Sekretaris, IWAN SATYOPRODJO, SH, MM, Endang SUMARDI, SH dan OR. ZAKARIAS, SH selaku Anggota ;
- g. 2 (dua) lembar asli Dokumen Berita Acara Penetapan Calon Pemenang Lelang dan Cadangan Calon Pemenang Pengadaan Jasa Filler Hukum Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov. DKI Jakarta Nomor : 22/PPBJ/BA/Filler-ABT/XII/2006 tanggal 04 Desember 2006, yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan

Hal. 110 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang/Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua, ISMIYATUN, SH selaku Sekretaris, IWAN SATYOPRODJO, SH, MM, Endang SUMARDI, SH dan OR. ZAKARIAS, SH selaku anggota ;

- h. 5 (lima) lembar asli Dokumen Nomor : 23/PPBJ/Lap./Filler/XII/2006, tanggal 04 Desember 2006 perihal Laporan Lelang Umum Pengadaan Jasa Filler Hukum Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov. DKI Jakarta, yang ditujukan kepada Kepala Biro Hukum Setdaprov. DKI Jakarta, yang ditandatangani oleh an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;
- i. 3 (tiga) lembar asli Dokumen Berita Acara Penilaian dan Pembuktian Kualifikasi Dokumen Penawaran Pelelangan Umum Dalam Rangka Pengadaan Jasa Filler Hukum Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov. DKI Jakarta Nomor : 20/PPBJ/BA/FILLER-ABT/XII/2006 tanggal 04 Desember 2006, yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua, ISMIYATUN, SH selaku Sekretaris, IWAN SATYOPRODJO, SH, MM, Endang SUMARDI, SH dan OR. ZAKARIAS, SH selaku anggota ;
- j. 1 (satu) lembar asli Dokumen Nomor : 19/PPBJ/UND/Filler-ABT/XII/2006, tanggal 01 Desember 2006 perihal Undangan, yang ditujukan kepada Direktur/pimpinan PT. TRIASMULYA ABADI PERKASA Jln. H. Abdul Jalil No. 21, Jakarta Pusat, yang ditandatangani oleh an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;
- k. 1 (satu) lembar asli Dokumen Nomor : 19/PPBJ/UND/Filler-ABT/XII/2006, tanggal 01 Desember 2006 perihal Undangan, yang ditujukan kepada Direktur/pimpinan PT. RADITYA NPUTRA BAHTERA Jln. Tanah Tinggi Barat No. 5, Kel. Bungur, Jakarta Pusat, yang ditandatangani oleh an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;
- l. 1 (satu) lembar asli Dokumen Nomor : 18/PPBJ/UND/Filler-ABT/XII/2006, tanggal 01 Desember 2006 perihal Undangan,

Hal. 111 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



yang ditujukan kepada Ismiyatun, SH, Iwan Satyoprodjo, SH, MH, Endang Sumardi, SH dan OR. Zakarias, SH, yang ditandatangani oleh an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;

- m. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Hadir pada hari/tanggal : Senin, 04 Desember 2006, pukul 09.00 WIB, Tempat : Ruang Rapat Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Blok G lantai 9 Jl. Merdeka Selatan 8-9 Jakarta Pusat, Acara Penilaian dan Pembuktian Kualifikasi Dokumen Surat Penawaran Harga (SPH) Pelelangan Umum Pengadaan Jasa Filler Hukum Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov. DKI Jakarta, yang terdapat tanda tangan nomor urut 1 (satu) an. MADE SUARJAYA, SH sampai dengan nomor urut 7 (tujuh) an. HERMAN FELANI (PT. Trias Mulya Abadi Perkasa), yang ditandatangani oleh an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;
- n. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Hadir Tenaga Ahli dalam rangka Pengadaan Jasa Filler Hukum Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta, pada hari/tanggal : Senin, 04 Desember 2006, pukul 09.00 WIB, Tempat : Ruang Rapat Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Blok G lantai 9 Jl. Merdeka Selatan 8-9 Jakarta Pusat, Acara : Penilaian dan Pembuktian Kualifikasi Dokumen Surat Penawaran Harga (SPH) Pelelangan Umum Pengadaan Jasa Filler Hukum Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov. DKI Jakarta, yang terdapat tanda tangan nomor urut 1 (satu) an. MADE SUARJAYA, SH (Jabatan Ketua) sampai dengan nomor urut 18 (delapan belas) an. HENDY (Jabatan Freeland/Ass. Lighting), yang ditandatangani oleh an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;
- o. 3 (tiga) lembar asli Dokumen Berita Acara Evaluasi Dokumen Kualifikasi Surat Penawaran Harga (SPH) Pelelangan Umum Dalam Rangka Pengadaan Jasa Filler Hukum Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov. DKI Jakarta Nomor : 17/PPBJ/BA/Filler-ABT/XII/2006, tanggal 01 Desember 2006, yang ditandatangani



oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua, ISMIYATUN, SH selaku Sekretaris, IWAN SATYOPRODJO, SH, MM, Endang SUMARDI, SH dan OR. ZAKARIAS, SH selaku Anggota ;

- p. 3 (tiga) lembar asli Dokumen Berita Acara Evaluasi Teknis dan Harga Dokumen Penawaran Pelelangan Umum Dalam Rangka Pengadaan Jasa Filler Hukum Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov. DKI Jakarta Nomor : 16/PPBJ/BA/Filler-ABT/XII/2006, tanggal 1 Desember 2006, yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua, ISMIYATUN, SH selaku Sekretaris, IWAN SATYOPRODJO, SH, MM, Endang SUMARDI, SH dan OR. ZAKARIAS, SH selaku Anggota ;
- q. 2 (dua) lembar asli lampiran Berita Acara Evaluasi Teknis dan Harga Nomor : 16/PPBJ/BA/Filler-ABT/XII/2006, tanggal 1 Desember 2006, Kriteria Evaluasi Proposal Pengadaan Jasa Filler Hukum Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta, Nama: PT. Triasmulya Abadi Perkasa, yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua, ISMIYATUN, SH selaku Sekretaris, IWAN SATYOPRODJO, SH, MM, Endang SUMARDI, SH dan OR. ZAKARIAS, SH selaku Anggota ;
- r. 2 (dua) lembar asli lampiran Berita Acara Evaluasi Teknis dan Harga Nomor : 16/PPBJ/BA/Filler-ABT/XII/2006, tanggal 1 Desember 2006, Kriteria Evaluasi Proposal Pengadaan Jasa Filler Hukum Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta, Nama: PT. Raditya Putra Bahtera, yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua, ISMIYATUN, SH selaku Sekretaris, IWAN SATYOPRODJO, SH, MM, Endang SUMARDI, SH dan OR. ZAKARIAS, SH selaku Anggota ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- s. 8 (delapan) lembar asli Data Penawaran Harga pekerjaan Sosialisasi Peningkatan kesadaran hukum masyarakat, PT. Raditya Putra Bahtera ;
- t. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran (SPH) Sampul II Pelelangan Umum Dalam Rangka Pengadaan Jasa Filler Hukum Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta, Nomor : 15/PPBJ/BA/FILLER-ABT/XII/2006, tanggal 01 Desember 2006, yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua, ISMIYATUN, SH selaku Sekretaris, IWAN SATYOPRODJO, SH, MM, Endang SUMARDI, SH dan OR. ZAKARIAS, SH selaku anggota, dan Penyedia Barang/Jasa an. GUNTUR INDRAYANA yang mewakili perusahaan PT. Raditya Putra Bahtera, (tanpa nama) yang mewakili PT. Triasmulya Abadi Perkasa ;
- u. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Hadir pada hari/tanggal : Jum'at, 01 Desember 2006, pukul 10.00 WIB, Tempat : Ruang Rapat Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Blok G lantai 9 Jl. Merdeka Selatan 8-9 Jakarta Pusat, Acara Pembukaan surat penawaran harga (SPH) sampul II Pelelangan Umum Pengadaan Jasa Filler Hukum Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov. DKI Jakarta, yang terdapat tanda tangan nomor urut 1 (satu) an. MADE SUARJAYA, SH sampai dengan nomor urut 7 (tujuh) an. PT.Raditya Putra Bahtera, yang ditandatangani oleh an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;
- v. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Hadir pada hari/tanggal : Jum'at, 01 Desember 2006, pukul 11.00 WIB, Tempat : Ruang Rapat Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Blok G lantai 9 Jl. Merdeka Selatan 8-9 Jakarta Pusat, Acara Pemberitahuan hasil evaluasi administrasi, teknis dan harga dokumen penawaran harga (SPH) Pelelangan Umum Pengadaan Jasa Filler Hukum dan pengambilan asli jaminan penawaran, yang terdapat tanda tangan nomor urut 1 (satu) an. MADE SUARJAYA, SH sampai dengan nomor urut 7 (tujuh) an. EDED JUNAEDI (PT. Pilot P. Production), yang ditandatangani

Hal. 114 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;

- w. 1 (satu) lembar asli Dokumen Nomor : 14/PPBJ/UND/Filler-ABT/XI/2006, tanggal 30 November 2006 perihal Undangan, yang ditujukan kepada Direktur/pimpinan PT. PILOT PROJECT PRODUCTION, Plaza III Pondok Indah Blok A-3, Jln. TB. Simatupang, Jakarta Selatan, yang ditandatangani oleh an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;
- x. 1 (satu) lembar asli Dokumen Nomor : 14/PPBJ/UND/Filler-ABT/XI/2006, tanggal 30 November 2006 perihal Undangan, yang ditujukan kepada Direktur/pimpinan PT. TOGA VISION, Jln. Delima Raya No. 5/10, Klender, Jakarta Timur, yang ditandatangani oleh an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;
- y. 1 (satu) lembar asli Dokumen Nomor : 14/PPBJ/UND/Filler-ABT/XI/2006, tanggal 30 November 2006 perihal Undangan, yang ditujukan kepada Direktur/pimpinan PT. MEGA VISION, Komp. Ruko Cempaka Mas Blok M 1 No. 12, Jln. Letjen Suprpto, Jakarta Pusat, yang ditandatangani oleh an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;
- z. 1 (satu) lembar asli Dokumen Nomor : 14/PPBJ/UND/Filler-ABT/XI/2006, tanggal 30 November 2006 perihal Undangan, yang ditujukan kepada Direktur/pimpinan PT. TRIAS MULYA ABADI PERKASA, Jln. H. Abdul Jalil No. 21, Jakarta Pusat, yang ditandatangani oleh an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;
- aa. 1 (satu) lembar asli Dokumen Nomor : 14/PPBJ/UND/Filler-ABT/XI/2006, tanggal 30 November 2006 perihal Undangan, yang ditujukan kepada Direktur/pimpinan PT. RADITYA PUTRA BAHTERA, Jln. Tanah Tinggi Barat No. 5, Kel. Bungur, Jakarta Pusat, yang ditandatangani oleh an. MADE SUARJAYA, SH

Hal. 115 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;

- ab. 1 (satu) lembar asli Dokumen Nomor : 14/PPBJ/UND/Filler-ABT/XI/2006, tanggal 30 November 2006 perihal Undangan, yang ditujukan kepada Ismiyatun, SH, Iwan Satyoprodjo, SH, MH, Endang Sumardi, SH dan OR. Zakarias, SH,, yang ditandatangani oleh an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;
- ac. 3 (tiga) lembar asli Dokumen Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Pelelangan Umum Dalam Rangka Pengadaan Jasa Filler Hukum Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov. DKI Jakarta Nomor : 12/PPBJ/BA/Filler-ABT/XI/2006, tanggal 30 November 2006, yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua, ISMIYATUN, SH selaku Sekretaris, IWAN SATYOPRODJO, SH, MM, Endang SUMARDI, SH dan OR. ZAKARIAS, SH selaku anggota ;
- ad. 1 (satu) lembar asli Dokumen Nomor : 11/PPBJ/UND/Filler-ABT/XI/2006, tanggal 29 November 2006 perihal Undangan, yang ditujukan kepada Ismiyatun, SH, Iwan Satyoprodjo, SH, MH, Endang Sumardi, SH dan OR. Zakarias, SH,, yang ditandatangani oleh an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;
- ae. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Hadir pada hari/tanggal : Kamis, 30 November 2006, pukul 09.00 WIB, Tempat : Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Blok G lantai 9 Jl. Merdeka Selatan 8-9 Jakarta Pusat, Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Pelelangan Umum Pengadaan Jasa Filler Hukum Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov. DKI, yang terdapat tanda tangan nomor urut 1 (satu) an. MADE SUARJAYA, SH sampai dengan nomor urut 5 (lima) an.OR. ZAKARIAS, yang ditandatangani oleh an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- af. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran (SPH) Sampul I Pelelangan Umum Dalam Rangka Pengadaan Jasa Filler Hukum Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta, Nomor : 10/PPBJ/BA/FILLER-ABT/XI/2006, tanggal 29 November 2006, yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua, ISMIYATUN, SH selaku Sekretaris, IWAN SATYOPRODJO, SH, MM, Endang SUMARDI, SH dan OR. ZAKARIAS, SH selaku anggota, dan Penyedia Barang/Jasa an. PT. PILOT PROJECT. P, PT. TRIAS MULYA ABADI PERKASA, PT. MEGA. V, dan PT. RADITYA ;
- ag. 69 (enam puluh sembilan) lembar foto copy Dokumen Data Administrasi pekerjaan sosialisasi peningkatan kesadaran hukum masyarakat, PT. RADITYA PUTRA BAHTERA ;
- ah. 16 (enam belas) lembar foto copy dokumen Data Kualifikasi pekerjaan sosialisasi peningkatan kesadaran hukum masyarakat, PT. RADITYA PUTRA BAHTERA ;
- ai. 1 (satu) lembar foto copy Dokumen Jaminan Penawaran ASURANSI PURI ASIH No. 245604 Nomor Bond : 80.0.14.9373.11.06.S, Nilai Bond : Rp. 46.160.000,- (empat puluh enam juta seratus enampuluh ribu rupiah), tertanggal 28 November 2006 yang ditandatangani oleh an. MANUSUN SITOMPUL, SE, AAAIK selaku Kepala Divisi Pemasaran PT. ASURANSI PURI ASIH (Surety), dan an. GUNTUR INDRAYANA selaku Direktur PT. RADITYA PUTRA BAHTERA;
- aj. 16 (enam belas) lembar asli Data Teknis Pekerjaan Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat, PT. RADITYA PUTRA BAHTERA, yang pada lembaran akhirnya terdapat tanda tangan an. GUNTUR INDRAYANA selaku Direktur Utama PT. RADITYA PUTRA BAHTERA ;
- ak. 6 (enam) lembar asli STORY BOARD Pesan Layanan Masyarakat Versi – I “Sampah Membawa Bencana” oleh Biro Hukum Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ;
- al. 5 (lima) lembar asli STORY BOARD Pesan Layanan Masyarakat Versi – II “Jangan Menyeberang Seenaknya” oleh Biro Hukum Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ;

Hal. 117 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- am. 1 (satu) lembar Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan Sosialisasi Produk Hukum – Iklan Layanan Masyarakat (PSAF/FILLER HUKUM) Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta TA. 2006 ;
- an. 6 (enam) lembar Dokumen Data Peralatan PT. RADITYA PUTRA BAHTERA ;
- ao. 28 (dua puluh sembilan) lembar foto copy Dokumen Daftar Nama Tenaga Ahli dan Crew Pendukung lainnya PT. RADITYA PUTRA BAHTERA ;
- ap. 13 (tiga belas) lembar foto copy Kontrak Pengalaman ;
- aq. 18 (delapan belas) lembar Dokumen Jadwal Penayangan Iklan Layanan Masyarakat Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta ;
- ar. 1 (satu) lembar asli Dokumen Surat tertanggal 27 November 2006, ditujukan kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta, yang ditandatangani an. SANTI PRATIWI selaku Account Executive PT. CIPTA TPI ;
- as. 1 (satu) lembar asli Dokumen Surat tertanggal 28 November 2006, ditujukan kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta, yang ditandatangani an. ALVONSUS SUSAN selaku Sales Supervisor PT. INDOSIAR VISUAL MANDIRI ;
- at. 1 (satu) lembar asli Dokumen Surat tertanggal 28 November 2006, ditujukan kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta, yang ditandatangani an. MARIA G. LIMI selaku Perwakilan PT. LATIVI MEDIA KARYA ;
- au. 1 (satu) lembar asli Dokumen Surat keterangan tertanggal 27 November 2006, yang ditandatangani an. EMIL ISKANDAR selaku Sr. Account Executive PT. GLOBAL INFORMASI BERMUTU ;
- av. 1 (satu) lembar asli Dokumen Surat tertanggal 29 November 2006, ditujukan kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta, yang ditandatangani an. PRITA WIDYA OKTAVIANTI selaku Account Executive PT. DUTA VISUAL NUSANTARA TIVITUJUH ;

Hal. 118 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- aw. 6 (enam) lembar asli Dokumen Penawaran Pekerjaan Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat, berupa Data Administrasi PT. TRIASMULYA ABADI PERKASA ;
- ax. 23 (lima belas) lembar asli Dokumen Penawaran Pekerjaan sosialisasi peningkatan kesadaran hukum masyarakat, berupa Data Kualifikasi PT. TRIASMULYA ABADI PERKASA ;
- ay. 70 (tujuh puluh) lembar foto copy Dokumen Akte Perusahaan PT. TRIASMULYA ABADI PERKASA ;
- az. 11 (sebelas) lembar foto copy Dokumen Pajak Perusahaan PT. TRIASMULYA ABADI PERKASA ;
- ba. 18 (delapan belas) lembar foto copy Dokumen Laporan Keuangan PT. TRIASMULYA ABADI PERKASA tahun 2005 ;
- bb.1 (satu) lembar foto copy Dokumen Jaminan Penawaran (BID/TENDER BOND) RAYA INSURANCE Nomor Bond : 81.646.0106.25074, Nilai Bond : Rp. 46.160.000,- (empat puluh enam juta seratus enampuluh ribu rupiah), tertanggal 28 November 2006 yang ditandatangani oleh an. IR. YUDA BAKTI SETIA BUDI, AAAIK selaku Manager Operasional PT. ASURANSI RAYA(Surety), dan an. HERMAN FELANI selaku Direktur PT. TRIASMULYA ABADI PERKASA ;
- bc 1 (satu) lembar foto copy Dokumen Jaminan Penawaran (BID/TENDER BOND) RAYA INSURANCE Nomor Bond : 81.646.0106.25074, Nilai Bond : Rp. 46.160.000,- (empat puluh enam juta seratus enampuluh ribu rupiah), tertanggal 28 November 2006 yang ditandatangani oleh an. IR. YUDA BAKTI SETIA BUDI, AAAIK selaku Manager Operasional PT. ASURANSI RAYA(Surety), dan an. HERMAN FELANI selaku Direktur PT. TRIASMULYA ABADI PERKASA ;
- bd. 10 (sepuluh) lembar Dokumen Penawaran Pekerjaan Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat, berupa Data Teknis PT. TRIASMULYA ABADI PERKASA ;
- be. 7 (tujuh) lembar Dokumen STORY BOARD ;
- bf. 6 (enam) lembar Dokumen STORY BOARD FILLER HUKUM Biro Hukum DKI Jakarta ;
- bg. 1 (dua) lembar Dokumen Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan Sosialisasi Produk Hukum – Iklan Layanan Masyarakat

Hal. 119 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PSA/FILLER HUKUM) Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta TA. 2006 ;

- bh. 4 (empat) lembar Dokumen Data Peralatan PT. TRIASMULYA ABADI PERKASA ;
- bi. 19 (sembilan belas) lembar foto copy Dokumen Daftar Nama Tenaga Ahli dan Crew Pendukung lainnya PT. TRIASMULYA ABADI PERKASA ;
- bj. 12 (dua belas) lembar foto copy Dokumen Surat Perjanjian Kerja Produksi dan Penayangan Iklan Layanan Masyarakat di Stasiun Televisi Nomor: SPK-04/PISPK/VI/2004 tanggal 4 Juni 2004 antara proyek induk sarana penunjang ketenagalistrikan dengan PT. TRIASMULYA ABADI PERKASA. Tahun 2004 ;
- bk. 6 (enam) lembar foto copy Dokumen Surat Perjanjian Kerja Sama / Kontrak Nomor : 119/kont/Pry-PLPP/X/2003 tanggal 13 Oktober 2003 antara Proyek pengembangan kebijakan peningkatan peran lintas pelaku pengembang KUKM Kementrian Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah dengan PT. TRIASMULYA ABADI PERKASA tentang produksi iklan layanan masyarakat tentang publikasi koperasi dan UKM melalui televisi sebanyak 5 paket ;
- bl. 2 (dua) lembar Dokumen Surat Perintah Kerja No. SPK. NO.29/VII/2003/PASPHS, tertanggal 5 Agustus 2003, ditandatangani an. Dr. KUSMAN SURJAKUSUMAH, Sp. KJ. MPH selaku Pihak Pertama Pemimpin proyek promosi advokasi dan sosialisasi perilaku hidup sehat, dan an. NONY selaku pihak kedua Direktur PT. TRIASMULYA ABADI PERKASA, serta mengetahui an. Dr. NANANG A. PARWOTOM, SPKJ, MARS Kepala Pusat Laboratorium Terapi dan Rehabilitasi selaku Lakhar BNN ;
- bm. 7 (tujuh) lembar foto copy Dokumen Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor: 26/PPP-AKA/PAS/VIII/2003 tanggal 7-8 Agustus 2003 tentang pekerjaan pembuatan Trilogi Audio Visual tentang terapi dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba oleh pihak ke III BNN, antara Pemimpin proyek promosi advokasi dan sosialisasi perilaku hidup sehat tahun dinas 2003 dengan PT. TRIASMULYA ABADI PERKASA ;

Hal. 120 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bn. 10 (sepuluh) lembar foto copy Dokumen Surat Perjanjian Kerja Nomor : 04/DPK-P3K/LBL/IV/02 dan Nomor : 02/TAP/SPK/IV/2002, tentang pekerjaan pengadaan produksi dan penayangan iklan label sosialisasi undang-undang perlindungan konsumen melalui media televisi, antara Proyek pemberdayaan perlindungan konsumen dengan PT. TRIASMULYA ABADI PERKASA, tertanggal 10 April 2002 ;
- bo. 2 (dua) lembar foto copy Dokumen Surat Perintah Kerja Nomor: 71/SPK/P3K/XI/2001 tertanggal 02 November 2001, yang ditandatangani an. Ir. ADANG SOPANDI, Msc selaku pihak pertama dan NONY selaku Direktur PT. TRIASMULYA ABADI PERKASA ;
- bp. 10 (sepuluh) lembar Surat Perjanjian/Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan Pembuatan Program Talk Show TV masyarakat (Bloking Time), Nomor : 14/S.P3/SETWAN/VIII/2006 tanggal 07 Agustus 2006, yang ditandatangani an. Drs. H. SARWO EDHI, Msi selaku pihak pertama Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat DPRD PROV. DKI Jakarta, dan an. HERMAN FELANI selaku pihak kedua Direktur PT. TRIASMULYA ABADI PERKASA, serta mengetahui an. H.R. DEDED SUKANDAR, SH, MM selaku Sekretaris DPRD PROPINSI DKI JAKARTA ;
- bq. 1 (satu) lembar asli Dokumen Jadwal Penayangan Iklan Layanan Masyarakat Biro hukum Pemprov DKI Jakarta ;
- br. 1 (satu) lembar asli Dokumen surat keterangan tertanggal 27 November 2006, yang ditandatangani an. EMIL ISKANDAR selaku Sr. Account Executive PT. GLOBAL INFORMASI BERMUTU ;
- bs. 1 (satu) lembar asli Dokumen surat tertanggal 27 November 2006, ditujukan kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta, yang ditandatangani an. MARIA G. LIMBI selaku Perwakilan PT. LATIVI MEDIA KARYA ;
- bt. 1 (satu) lembar asli Dokumen surat tertanggal 26 November 2006, ditujukan kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta, yang ditandatangani an. SANTI PRATIWI selaku Account Executive PT. CIPTA TPI ;

Hal. 121 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bu. 5 (lima) lembar asli Dokumen Data kelengkapan surat penawaran harga (SPH) Jasa Filler hukum kebutuhan Biro Hukum SetdaProv DKI Jakarta ;
- by. 1 (satu) lembar asli Dokumen Nomor : 09/PPBJ/UND/Filler-ABT/XI/2006, tanggal 28 November 2006 perihal Undangan, yang ditujukan kepada Ismiyatun, SH, Iwan Satyoprodjo, SH, MH, Endang Sumardi, SH dan OR. Zakarias, SH,, yang ditandatangani oleh an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;
- bw. 2 (dua) lembar asli Dokumen Nomor : 08/PPBJ/UND/Filler-ABT/XI/2006, tanggal 28 November 2006 perihal Undangan, yang ditujukan kepada Direktur/pimpinan PT. (tidak tercantum), yang ditandatangani oleh an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;
- bx. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Hadir pada hari/tanggal : Rabu, 29 November 2006, pukul 15.15 WIB, Tempat : Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Blok G lantai 9 Jl. Merdeka Selatan 8-9 Jakarta Pusat, Acara Pembukaan dokumen penawaran sampul I Pelelangan Umum Pengadaan Jasa Filler Hukum Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov. DKI, yang terdapat tanda tangan nomor urut 1 (satu) an. MADE SUARJAYA, SH sampai dengan nomor urut 10 (sepuluh) an.GUNTUR INDRAYANA (PT. RADITYA PUTRA BAHTERA), yang ditandatangani oleh an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;
- by. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Hadir pada hari/tanggal : Selasa dan Rabu, 28 dan 29 November 2006, pukul 10.00 WIB s.d 15.00 WIB, Tempat : Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Blok G lantai 9 Jl. Merdeka Selatan 8-9 Jakarta Pusat, Acara Pemasukan dokumen penawaran Pelelangan Umum Pengadaan Jasa Filler Hukum Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov. DKI, yang terdapat tanda tangan nomor urut 1 (satu) an. MADE SUARJAYA, SH sampai dengan nomor urut 10 (sepuluh) an.EDED JUNAEDI (PT. PILOT P. PRODUCTION),

Hal. 122 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;

- bz. 1 (satu) lembar foto copy Dokumen Nomor : 07/PPBJ/UND/Filler-ABT/XI/2006, tanggal 27 November 2006 perihal Undangan, yang ditujukan kepada Direktur/pimpinan PT. Sebagaimana terlampir, yang ditandatangani oleh an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;
- ca. 1 (satu) lembar asli Dokumen Nomor : 07/PPBJ/UND/Filler-ABT/XI/2006, tanggal 27 November 2006 perihal Undangan, yang ditujukan kepada Direktur/pimpinan PT. (tidak tercantum), yang ditandatangani oleh an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta, yang pada bagian belakang lembarannya terdapat catatan nama orang, perusahaan dan tanda tangan ;
- cb. 2 (dua) lembar asli Dokumen Berita Acara penjelasan rencana kerja dan syarat-syarat pelelangan umum dalam rangka pengadaan Filler Hukum kebutuhan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor: 06/PPBJ/BA/Filler-ABT/XI/2006, yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua, ISMIYATUN, SH selaku Sekretaris, IWAN SATYOPRODJO, SH, MM, Endang SUMARDI, SH dan OR. ZAKARIAS, SH selaku anggota, dan 11 (sebelas) perusahaan sebagai peserta ;
- cc. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Hadir pada hari/tanggal : Senin, 27 November 2006, pukul 10.00 WIB, Tempat : Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Blok G lantai 9 Jl. Merdeka Selatan 8-9 Jakarta Pusat, Acara Penjelasan (Aanwijzing) rencana kerja dan syarat-syarat pelelangan Umum Pengadaan Jasa Filler Hukum Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov. DKI, yang terdapat tanda tangan nomor urut 1 (satu) an. MADE SUARJAYA, SH sampai dengan nomor urut 15 (lima belas) an. MANOLOP SAMOSIR (PT. TOGA VISION), yang ditandatangani oleh an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua

Hal. 123 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia Pengadaan Barang / Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;

- cd. 1 (satu) lembar asli Dokumen Harga Perkiraan Sendiri, dengan jenis pekerjaan pengadaan filler hukum kebutuhan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta, tahun anggaran 2006, volume 320 spot @ 30 detik, yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua, ISMIYATUN, SH selaku Sekretaris, IWAN SATYOPRODJO, SH, MM, Endang SUMARDI, SH dan OR. ZAKARIAS, SH, dan mengetahui an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta ;
- ce. 1 (satu) lembar foto copy Dokumen Nomor : 05/PPBJ/UND/Filler-ABT/XI/2006, tanggal 20 November 2006 perihal Undangan, yang ditujukan kepada Direktur/pimpinan PT. Sebagaimana terlampir, yang ditandatangani oleh an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;
- cf. 1 (satu) lembar foto copy Dokumen Nomor : 05/PPBJ/UND/Filler-ABT/XI/2006, tanggal 20 November 2006 perihal Undangan, yang ditujukan kepada Direktur/pimpinan PT. Sebagaimana terlampir, yang ditandatangani oleh an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta, yang pada bagian bawah halaman depan terdapat catatan nama orang, perusahaan dan tanda tangan ;
- cg. 1 (satu) lembar foto copy Dokumen Nomor : 05/PPBJ/UND/Filler-ABT/XI/2006, tanggal 20 November 2006 perihal Undangan, yang ditujukan kepada Direktur/pimpinan PT. Sebagaimana terlampir, yang ditandatangani oleh an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta, terdapat tanda tangan kecil di bagian bawah an. TRIYADI ;
- ch. 1 (satu) lembar foto copy Dokumen Nomor : 05/PPBJ/UND/Filler-ABT/XI/2006, tanggal 20 November 2006 perihal Undangan, yang ditujukan kepada Direktur/pimpinan PT. Sebagaimana terlampir, yang ditandatangani oleh an. MADE SUARJAYA, SH

Hal. 124 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta, terdapat tulisan "Arsip Ratih" ;

30. 1 (satu) bundel Dokumen pembayaran Pengadaan Jasa Filler Kebutuhan Biro Hukum Sekda Prov. DKI Jakarta antara Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan PT. RADITYA PUTRA BAHTERA Nomor 783/077.92, yang berisi antara lain :
- a. 1 (satu) lembar asli tindisan Dokumen SPM Giro No. 00303452006 TA. 2006 sebesar Rp. 1.866.840.000,- (satu milyar delapan ratus empat puluh juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) untuk pembayaran biaya pengadaan jasa filler hukum kebutuhan Biro Hukum Sekdaprov DKI Jakarta, SPK No. 783/077.92, tertanggal 12 Desember 2006 ;
 - b. 1 (satu) lembar asli Dokumen Telahaan Staf SPP tertanggal 21 Desember 2006 No Kontrak : 783/077.92 kepada PT. RADITYA PUTRA BAHTERA sebesar Rp. 2.184.600.000,- (dua milyar seratus delapan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) ;
 - c. 1 (satu) lembar asli tindisan Dokumen Tanda Terima SPP No. SPMG20060031967 No Kontrak : 783/077.92, terdapat tanda tangan petugas penerima an. Lina ;
 - d. 1 (satu) lembar asli Dokumen Kwitansi PT. RADITYA PUTRA BAHTERA No. 001/RB-KWY/12.06 tertanggal 20 Desember 2006, sebesar Rp. 2.184.600.000,- (dua milyar seratus delapan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah), terdapat tanda tangan diatas materei 6.000 (enam ribu rupiah) an. GUNTUR INDRAYANA selaku Direktur PT. Radityaputra Bahtera dan an. H. BUDIYONO selaku Pemegang Kas Setdaprov DKI Jakarta ;
 - e. 1 (satu) lembar foto copy Dokumen Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 2677/SPP/SWD/BB/XII/2006 tertanggal 20 Desember 2006, yang ditanda tangani an. H. BUDIYONO selaku Pemegang Kas Setdaprov DKI Jakarta dan an. HARI SANDJOJO, MJ selaku Asisten Keuangan ;
 - f. 1 (satu) lembar foto copy Dokumen Surat Permintaan Pembayaran No. 2677/SPP/SWD/BB/XII/2006 tertanggal 20 Desember 2006, yang ditanda tangani an. H. BUDIYONO selaku

Hal. 125 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang Kas Setdaprov DKI Jakarta dan an. HARI SANDJOJO, MJ selaku Asisten Keuangan ;

- g. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Rincian Rencana Penggunaan Beban Tetap No. 196/SPP/2006 tanggal 20 Desember 2006, ditandatangani an. BAHIR ROMSAH selaku Pemegang Kas Cabang dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum ;
- h. 1 (satu) lembar asli Dokumen Invoice PT. Radityaputra Bahtera No. 001/RB-INV/12.06 tertanggal Desember 2006, ditujukan kepada Biro Hukum Sekretariat Daerah Prov. DKI Jakarta, ditandatangani diatas materai 6.000 (enam ribu rupiah) an. GUNTUR INDRAYANA selaku Direktur PT. Radityaputra Bahtera;
- i. 1 (satu) lembar asli Dokumen Surat Pernyataan PT. Raditya Putra Bahtera, tertanggal 18 Desember 2006, yang ditandatangani diatas materai 6.000 (enam ribu rupiah) an. GUNTUR INDRAYANA selaku Direktur PT. Radityaputra Bahtera;
- j. 1 (satu) lembar asli Dokumen Surat Jalan PT. Raditya Putra Bahtera No. 01/SJ/RB/XII/2006, yang ditujukan kepada Biro Hukum Sekretariat Daerah Prov. DKI Jakarta tertanggal Desember 2006, yang ditandatangani an. GUNTUR INDRAYANA selaku Direktur PT. Radityaputra Bahtera ;
- k. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 78/BAST/BH/XII/2006 tanggal 14 Desember 2006, yang ditanda tangani an. IRUSWANDI, SH selaku Pengurus Barang unit Biro Hukum, an. GUNTUR INDRAYANA selaku Direktur Utama PT. RADITYA INDRAYANA dan mengetahui an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Serah Terima Barang ;
- l. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Barang (BAPB) Nomor : 41/BAPB/BH/XII/2006 tertanggal 14 Desember 2006, ditanda tangani oleh Panitia Pemeriksa Barang nomor urut 1 (satu) Ketua sampai dengan 5 (lima) anggota, an. GUNTUR INDRAYANA selaku Direktur Utama PT. RADITYA INDRAYANA dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro

Hal. 126 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang ;

31. 1 (satu) bundel Dokumen yang terkait penayangan Filler Hukum (ABT) di JakTV, antara lain :
- a. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Bilyet Giro Mandiri Nomor : TG 858762 tertanggal 19 April 2007 sebesar Rp. 49.500.000,- (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - b. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak Standar Nomor : ECETC-012-0000745 tertanggal 12 Desember 2006 ;
 - c. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kwitansi Nomor : J07040068 tertanggal 17 April 2007, tertulis sudah terima dari PT. FORTUNE INDONESIA sebesar Rp. Rp. 49.500.000,- (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran INVOICE Nomor : J0601200843 ;
 - d. 1 (satu) lembar asli Dokumen Transaksi Pembayaran Invoice J061200843 ;
 - e. 2 (dua) lembar Dokumen LOG PROVE atas PO register Nomor : 13379.001/FORU/BDM/1106 ;
 - f. 5 (lima) lembar Dokumen LOG PROVE atas PO register Nomor : 13379.002/FORU/BDM/1206 ;
 - g. 5 (lima) lembar Dokumen INVOICE Nomor : J061200843 tertanggal 12 Desember 2006 atas PO register Nomor : 13379.002/FORU/BDM/1206 sebesar Rp. 49.500.000,- (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - h. 1 (satu) keping DVD-R merk VERBATIM dengan Serial Number DVD : ZD9906-DVR-J47F4 ;
 - i. 1 (satu) keping DVD-R merk VERBATIM dengan Serial Number DVD : ZD9955-DVR-J47F4 ;
32. 1 (satu) bundel Dokumen yang terkait penayangan Filler Hukum (ABT) di Indosiar, antara lain :
- a. 1 (satu) lembar asli tindisan Dokumen POST TRANSMISSION LOG atas ORDER Nomor : MT.06000473 dari ARTEK n PARTNERS tanggal 7 Desember 2006 ;
 - b. 1 (satu) lembar asli tindisan INVOICE PT. Indosiar Visual Mandiri Nomor 025114 tertanggal 21 Desember 2006, kepada ARTEK'N PARTNER COMMUNICATIONS ;

Hal. 127 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar asli tindisan Dokumen FAKTUR PAJAK STANDAR kode dan Nomor Seri : DKRPV-091-0023665 tertanggal 21 Desember 2006, atas Invoice Nomor 025114 ;
- d. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Rekening Koran PT. Indosiar Visual Mandiri Nomor : 1623123450 periode 31 Maret 2007 s/d 30 April 2007 ;
33. 1 (satu) bundel Dokumen terkait dengan penerbitan Patokan Harga Satuan Gema Hukum 2006, berisi antara lain :
 - a. 1 (satu) lembar Disposisi kepada Mohammad Effendi, S.Kom tertanggal 9 Juni 2006 ;
 - b. 1 (satu) lembar Disposisi/Catatan No. 439 tanggal masuk 8 Juni 2006, Kode : 182, perihal Permintaan Harga Satuan, ditujukan kepada Bagian Analisa Kebutuhan ;
 - c. 1 (satu) lembar Surat Nomor : 347/-077.2 tanggal 6 Juni 2006 perihal Permintaan Harga Satuan Program Gema Hukum Ibukota Jakarta di Stasiun Televisi Swasta Nasional yang ditujukan kepada Kepala Biro Perlengkapan Setda Prov. DKI Jakarta dari Kepala Biro Hukum Prov. DKI Jakarta an. H. R. DEDED SUKANDAR, SH, MH ;
 - d. 2 (dua) lembar lampiran Surat Nomor : 347/-077.2 tanggal 6 Juni 2006, yang ditandatangani Kepala Biro Hukum Prov. DKI Jakarta an. H. R. DEDED SUKANDAR, SH, MH ;
 - e. 3 (tiga) lembar asli Dokumen Penawaran Harga dari PT. Trendeka Lestari ;
 - f. 2 (dua) lembar Dokumen Penawaran Harga dari PT. Veranita Indah Jaya Langgeng ;
 - g. 2 (dua) lembar Dokumen Penawaran Harga dari PT. Adila Jaya Sukses ;
 - h. 2 (dua) lembar Dokumen Penawaran Harga dari PT. Tinta Rengga Dunia ;
 - i. 2 (dua) lembar Dokumen Keputusan Kepala Biro Perlengkapan Prov. DKI Jakarta Nomor : 2747/073.532 tertanggal 17 Juli 2006 perihal Penetapan Patokan Harga Satuan Barang Insidental Kebutuhan Pemerintah Prov. DKI Jakarta untuk kebutuhan Biro Hukum Prov. DKI Jakarta yang ditanda tangani kepala Biro Perlengkapan Prov. DKI Jakarta an. Ir. EKO BHARUNA, MT ;

Hal. 128 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. 2 (dua) lembar lampiran Keputusan Kepala Biro Perlengkapan Prov. DKI Jakarta Nomor : 2747/073.532 tertanggal 17 Juli 2006 yang ditanda tangani kepala Biro Perlengkapan Prov. DKI Jakarta an. Ir. EKO BHARUNA, MT ;
 - k. 2 (dua) lembar Berita Acara Penelitian dan Evaluasi Usulan Patokan Harga Satuan Insidental No. 135/BAHS/BP/VI/ 2006 tertanggal 28 Juni 2006 ;
 - l. 3 (tiga) lembar Dokumen lampiran Berita Acara Hasil Survey dan Pembahasan ;
 - m. 1 (satu) lembar Analisa Perhitungan Blocking Time, terdapat tulisan tangan dengan menggunakan tinta pulpen warna biru ;
 - n. 1 (satu) lembar Pengantar Nota Dinas Penetapan Harga Satuan Barang dan Jasa ;
 - o. 1 (satu) lembar Mekanisme Proses Penetapan Harga Satuan barang/Jasa ;
 - p. 1 (satu) lembar Verbal Naskah Dinas, tertanggal 17 juli 2006, yang ditanda tangani oleh Ir. EKO BHARUNA, MT selaku Kepala Biro Perlengkapan Prov. DKI Jakarta ;
34. 1 (satu) bundel asli Dokumen Perjanjian Pelelangan Umum Pengadaan Jasa Gema Hukum Ibukota Jakarta Dalam Rangka Sosialisasi Produk Hukum melalui media Televisi Swasta Nasional Kebutuhan Biro Hukum Sekda Prov. DKI Jakarta antara Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan PT. TRENDEKA LESTARI Nomor 588/077.92, yang berisi antara lain :
- a. 5 (lima) lembar asli Dokumen Perjanjian Pelelangan Umum Pengadaan Jasa Gema Hukum Ibukota Jakarta Dalam Rangka Sosialisasi Produk Hukum melalui media Televisi Swasta Nasional Kebutuhan Biro Hukum Sekda Prov. DKI Jakarta antara Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan PT. Trendeka Lestari Nomor 588/077.92, tanggal 15 November 2006, yang ditandatangani oleh Pihak Pertama an. JORNAL E. SIAHAAN, SH. M.Si selaku Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Pihak Kedua an. ANNA DAHLIA selaku Direktur PT. Trendeka Lestari, berikut 2 (dua) lembar lampiran Nomor : 588/077.92 dan 1 (satu) lembar lampiran Nomor : 587/077.92 ;

Hal. 129 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



- b. 5 (lima) lembar copy Dokumen Perjanjian Pelelangan Umum Pengadaan Jasa Gema Hukum Ibukota Jakarta Dalam Rangka Sosialisasi Produk Hukum melalui media Televisi Swasta Nasional Kebutuhan Biro Hukum Sekda Prov. DKI Jakarta antara Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan PT. Trendeka Lestari Nomor 588/077.92, tanggal 15 November 2006, yang ditandatangani oleh Pihak Pertama an. JORNAL E. SIAHAAN, SH. M.Si selaku Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Pihak Kedua an. ANNA DAHLIA selaku Direktur PT. Trendeka Lestari, berikut 2 (dua) lembar lampiran Nomor : 588/077.92 dan 1 (satu) lembar lampiran Nomor : 587/077.92 ;
- c. 1 (satu) lembar asli Dokumen Jaminan Pelaksanaan PT. Asuransi Mega Pratama 00011560, Nomor Bond : PL11630206H.0014/0114 Nilai Rp. 227.700.000,- (dua ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah), tertanggal 15 September 2006, yang ditanda tangani oleh SUKARMAN, AAAIK selaku Asst. Technical Manager PT. ASURANSI MEGA PRATAMA dan ANNA DAHLIA selaku Direktur PT. Trendeka Lestari ;
- d. 2 (dua) lembar asli Dokumen Harga Perkiraan Sendiri / OE pada jenis pekerjaan Gema Hukum Ibukota Jakarta TA 2006 volume 5 (lima) kali penayangan tertanggal 22 Agustus 2006, yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan (MADE SUARJAYA, SH, ISMIYATUN, SH, IWAN SETYOPRODJO, SH, MH, ENDANG SUMARDI, SH dan OR ZAKARIAS, SH, serta Mengetahui JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum ;
- e. 3 (tiga) lembar asli Dokumen Keputusan Kepala Biro Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 587/077.92 tertanggal 15 September 2006 tentang Penunjukan PT. Trendeka Lestari sebagai perusahaan penyedia barang/jasa pelaksana pengadaan jasa gema hukum ibukota jakarta kebutuhan biro hukum sekdaprov DKI Jakarta Tahun Anggaran 2006, yang ditandatangani oleh JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;
- f. 1 (satu) lembar asli Dokumen Nomor : 28/PPBJ/L/GH/IX/2006 tertanggal 15 September 2006 perihal Penyerahan jaminan



pelaksanaan pelelangan umum Jasa Gema Hukum Ibukota Jakarta Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta, yang ditujukan kepada PT. TRENDEKA LESTARI Jl. Tebet Barat Dalam VIII G No. 11 Jakarta Selatan 12810, yang ditandatangani oleh MADE SUARJAYA, SH selaku Panitia Pengadaan Barang/Jasa, berikut 1 (satu) lembar lampiran dokumen Jaminan Pelaksanaan PT. Asuransi Mega Pratama 00011560, Nomor Bond : PL11630206H.0014/0114 Nilai Rp. 227.700.000,- (dua ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah), tertanggal 15 September 2006 ;

- g. 1 (satu) lembar asli Dokumen Pengumuman Pemenang Lelang Nomor : 27/PPBJ/Peng/L/Peng/IX/2006, tanggal 8 September 2006 yang ditandatangani oleh an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;
- h. 1 (satu) lembar asli Dokumen Nomor : 567/077.92, tanggal 8 September 2006 perihal Penetapan Pemenang Lelang Umum Pengadaan Jasa Gema Hukum Ibukota Jakarta, yang ditujukan kepada Panitia Pengadaan Barang / Jasa Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta, yang ditandatangani oleh an. JORNAL E. SIAHAAN, SH. M.Si selaku Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
- i. 6 (enam) lembar asli Dokumen Nomor : 26/PPBJ/Lap./Gema/IX/2006, tanggal 5 September 2006 perihal Laporan Lelang Umum Pengadaan Jasa Gema Hukum Ibukota Jakarta Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov. DKI Jakarta, yang ditujukan kepada Kepala Biro Hukum Setdaprov. DKI Jakarta, yang ditandatangani oleh an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;
- j. 2 (dua) lembar asli Dokumen Berita Acara Penetapan Calon Pemenang Lelang dan Cadangan Calon Pemenang Pengadaan Jasa Gema Hukum Ibukota Jakarta Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov. DKI Jakarta Nomor : 25/PPBJ/BA/GH/IX/2006 tanggal 5 September 2006, yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua,

Hal. 131 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISMIYATUN, SH selaku Sekretaris, IWAN SATYOPRODJO, SH, MM, Endang SUMARDI, SH dan OR. ZAKARIAS, SH selaku anggota ;

- k. 5 (lima) lembar asli Dokumen Berita Acara Hasil Pelelangan Umum Pengadaan Jasa Gema Hukum Ibukota Jakarta Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov. DKI Jakarta Nomor : 24/PPBJ/BA/GH/IX/2006 tanggal 5 September 2006, yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua, ISMIYATUN, SH selaku Sekretaris, IWAN SATYOPRODJO, SH, MM, Endang SUMARDI, SH dan OR. ZAKARIAS, SH selaku anggota ;
- l. 2 (dua) lembar asli Dokumen Berita Acara Peninjauan ke Stasiun Televisi Swasta PT. Indosiar Visual Mandiri dalam rangka Klarifikasi Penayangan Pengadaan Jasa Gema Hukum Ibukota Jakarta kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua, ISMIYATUN, SH selaku Sekretaris, IWAN SATYOPRODJO, SH, MM, Endang SUMARDI, SH dan OR. ZAKARIAS, SH selaku anggota dan ALVONSUS SUSANTO selaku SALES SUPERVISOR PT. Indosiar Mandiri ;
- m. 3 (tiga) lembar asli Dokumen Berita Acara Penilaian dan Pembuktian Kualifikasi Dokumen Penawaran Pelelangan Umum Dalam Rangka Pengadaan Jasa Gema Hukum Ibukota Jakarta Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov. DKI Jakarta Nomor : 22/PPBJ/BA/FILLER/IX/2006 tanggal 5 September 2006, yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua, ISMIYATUN, SH selaku Sekretaris, IWAN SATYOPRODJO, SH, MM, Endang SUMARDI, SH dan OR. ZAKARIAS, SH selaku anggota serta IRADAH HS dari PT. ADILA JAYA SUKSES dan ETIKA S dari PT. TRENDEKA LESTARI ;
- n. 1 (satu) lembar asli Dokumen Nomor : 21/PPBJ/UND/GH/IX/2006 tanggal 4 September 2006 perihal undangan yang ditujukan kepada ISMIYATUN, SH, IWAN SATYOPRODJO, SH,

Hal. 132 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



MH, ENDANG SUMARDI, SH dan OR. ZAKARIAS, SH, yang ditandatangani oleh MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;

- o. 1 (satu) lembar asli Dokumen Nomor : 20/PPBJ/UND/GH/IX/2006 tanggal 4 September 2006 perihal undangan yang ditujukan kepada PT. TRENDEKA LESTARI Jl. Tebet Barat Dalam 8 G No. 11 Jakarta Selatan, yang ditandatangani oleh MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;
- p. 1 (satu) lembar asli Dokumen Nomor : 20/PPBJ/UND/GH/IX/2006 tanggal 4 September 2006 perihal undangan yang ditujukan kepada PT. ADILA JAYA SUKSES Jl. Gatot Subroto Komp. Timah No. 20 Kel. Menteng Dalam Kec. Tebet Jakarta Selatan, yang ditandatangani oleh MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;
- q. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Hadir pada Hari/Tanggal Selasa, 5 September 2006 waktu 09.00 WIB tempat Ruang Rapat Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Blok G lantai 9 Jl. Merdeka Selatan 8 – 9 Jakarta Pusat, Acara Penilaian dan pembuktian kualifikasi dokumen Surat Penawaran Harga (SPH) Pelelangan Umum pengadaan jasa Penyelenggaraan Gema hukum Ibukota Jakarta, terdapat tanda tangan peserta nomor urut 1 (satu) an. MADE SUARJAYA, SH sampai dengan nomor urut 7 (tujuh) an ETIKA S – PT. TRENDEKA LESTARI, yang ditanda tangani oleh MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;
- r. 3 (tiga) lembar asli Dokumen Berita Acara evaluasi dokumen kualifikasi surat penawaran harga (SPH) Pelelangan Umum Dalam rangka pengadaan jasa Gema Hukum Ibukota Jakarta kebutuhan biro hukum Ibukota Jakarta nomor : 19/PPBJ/BA/GH/IX/2006 tertanggal 4 September, yang ditanda tangani oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta an. MADE SUARJAYA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH selaku Ketua, ISMIYATUN, SH selaku Sekretaris, IWAN SATYOPRODJO, SH, MM, Endang SUMARDI, SH dan OR. ZAKARIAS, SH selaku Anggota ;

- s. 3 (tiga) lembar asli Dokumen Berita Acara Evaluasi teknis dan harga dokumen penawaran pelelangan umum dalam rangka pengadaan jasa gema hukum Ibukota Jakarta kebutuhan biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta Nomor : 18/PPBJ/BA/GH/IX/2006 tertanggal 04 September 2006, yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua, ISMIYATUN, SH selaku Sekretaris, IWAN SATYOPRODJO, SH, MM, Endang SUMARDI, SH dan OR. ZAKARIAS, SH selaku Anggota ;
- t. 2 (dua) lembar asli Dokumen Lampiran I - Kriteria proposal teknis dan harga kegiatan pengadaan jasa Gema Hukum ibukota Jakarta Biro hukum Setdaprov DKI Jakarta terhadap PT. TRENDEKA LESTARI, yang ditandatangani oleh oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua, ISMIYATUN, SH selaku Sekretaris, IWAN SATYOPRODJO, SH, MM, Endang SUMARDI, SH dan OR. ZAKARIAS, SH selaku anggota ;
- u. 2 (dua) lembar asli Dokumen Lampiran I - Kriteria proposal teknis dan harga kegiatan pengadaan jasa Gema Hukum ibukota Jakarta Biro hukum Setdaprov DKI Jakarta terhadap PT. ADILA JAYA SUKSES, yang ditandatangani oleh oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua, ISMIYATUN, SH selaku Sekretaris, IWAN SATYOPRODJO, SH, MM, Endang SUMARDI, SH dan OR. ZAKARIAS, SH selaku anggota ;
- v. 2 (dua) lembar asli Dokumen Lampiran II – Perbandingan masing-masing komponen penilaian kegiatan pengadaan jasa Gema Hukum ibukota Jakarta Biro hukum Setdaprov DKI Jakarta, yang ditandatangani oleh oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua, ISMIYATUN,

Hal. 134 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SH selaku Sekretaris, IWAN SATYOPRODJO, SH, MM, Endang SUMARDI, SH dan OR. ZAKARIAS, SH selaku anggota ;
- w. 2 (dua) lembar asli Dokumen Lampiran III – Pertimbangan Teknis Panitia pengadaan barang/jasa dalam penilaian terhadap komponen yang mempengaruhi dalam kegiatan pengadaan jasa Gema Hukum ibukota Jakarta Biro hukum Setdaprov DKI Jakarta, yang ditandatangani oleh oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua, ISMIYATUN, SH selaku Sekretaris, IWAN SATYOPRODJO, SH, MM, Endang SUMARDI, SH dan OR. ZAKARIAS, SH selaku anggota ;
- x. 2 (dua) lembar asli Dokumen Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran (SPH) Sampul II Pelelangan Umum dalam rangka pengadaan jasa Gema Hukum ibukota Jakarta Biro hukum Setdaprov DKI Jakarta Nomor : 17/PPBJ/BA/GH/IX/2006, yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua, ISMIYATUN, SH selaku Sekretaris, IWAN SATYOPRODJO, SH, MM, Endang SUMARDI, SH dan OR. ZAKARIAS, SH selaku anggota serta ETIKA S – PT. TRENDEKA LESTARI dan IRADAH HS – PT. ADILA JAYA SUKSES selaku Penyedia Barang/Jasa ;
- y. 1 (satu) lembar asli Dokumen Nomor : 16/PPBJ/UND/GH/IX/2006 tanggal 1 September 2006 perihal undangan yang ditujukan kepada ISMIYATUN, SH, IWAN SATYOPRODJO, SH, MH, ENDANG SUMARDI, SH dan OR. ZAKARIAS, SH, yang ditandatangani oleh MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;
- z. 1 (satu) lembar asli Dokumen Nomor : 15/PPBJ/UND/GH/IX/2006 tanggal 1 September 2006 perihal undangan yang ditujukan kepada PT. TRENDEKA LESTARI Jln. Tebet Barat Dalam 8 G No. 11 Jakarta Selatan, yang ditandatangani oleh MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;

Hal. 135 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- aa. 1 (satu) lembar asli Dokumen Nomor : 15/PPBJ/UND/GH/IX/2006 tanggal 1 September 2006 perihal undangan yang ditujukan kepada PT. ADILA JAYA SUKSES Jl. Gatot Subroto Komp. Timah No. 20 Kel. Menteng Dalam Kec. Tebet Jakarta Selatan, yang ditandatangani oleh MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;
- ab. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Hadir, hari/tanggal Senin, 4 September 2006, waktu 14.00 WIB, tempat ruang rapat Biro hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Blok G lantai 9 Jl. Merdeka Selatan 8 – 9 Jakarta Pusat, acara pembukaan Surat Penawaran Harga (SPH) Sampul II Pelelangan Umum pengadaan jasa penyelenggaraan Gema Hukum Ibukota Jakarta, terdapat tanda tangan peserta nomor urut 1 (satu) an. MADE SUARJAYA, SH sampai dengan nomor urut 7 (tujuh) an. IRADAH HS – PT ADILA JAYA SUKSES, yang ditandatangani oleh MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia ;
- ac. 1 (satu) lembar asli Dokumen Nomor : 14/PPBJ/UND/GH/IX/2006 tanggal 1 September 2006 perihal undangan yang ditujukan kepada ISMIYATUN, SH, IWAN SATYOPRODJO, SH, MH, ENDANG SUMARDI, SH dan OR. ZAKARIAS, SH, yang ditandatangani oleh MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;
- ad. 1 (satu) lembar asli Dokumen Nomor : 13/PPBJ/UND/GH/IX/2006 tanggal 1 September 2006 perihal undangan yang ditujukan kepada PT. PRIMA MEDIA ANTARA, yang ditandatangani oleh MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;
- ae. 1 (satu) lembar asli Dokumen Nomor : 13/PPBJ/UND/GH/IX/2006 tanggal 1 September 2006 perihal undangan yang ditujukan kepada PT. RADITYA PUTRA BAHTERA, yang ditandatangani oleh MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;

Hal. 136 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- af. 1 (satu) lembar asli Dokumen Nomor : 13/PPBJ/UND/GH/IX/2006 tanggal 1 September 2006 perihal undangan yang ditujukan kepada PT. MEGA VISION, yang ditandatangani oleh MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;
- ag. 1 (satu) lembar asli Dokumen Nomor : 13/PPBJ/UND/GH/IX/2006 tanggal 1 September 2006 perihal undangan yang ditujukan kepada PT. SATUVISI PERKASA, yang ditandatangani oleh MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;
- ah. 1 (satu) lembar asli Dokumen Nomor : 13/PPBJ/UND/GH/IX/2006 tanggal 1 September 2006 perihal undangan yang ditujukan kepada PT. DEMI GISELA CITRA CINEMA, yang ditandatangani oleh MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;
- ai. 1 (satu) lembar asli Dokumen Nomor : 13/PPBJ/UND/GH/IX/2006 tanggal 1 September 2006 perihal undangan yang ditujukan kepada PT. TRIAS MULYA ABADI PERKASA, yang ditandatangani oleh MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;
- aj. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Hadir, hari/tanggal Senin, 4 September 2006, waktu 11.00 WIB, tempat ruang rapat Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Blok G lantai 9 Jl. Merdeka Selatan 8 – 9 Jakarta Pusat, Acara Pemberitahuan hasil Evaluasi Adminitrasi Surat Penawaran Harga (SPH) Sampul I Pelelangan Umum Pengadaan jasa penyelenggaraan Gema Hukum Ibukota Jakarta dan Pengambilan Asli Jaminan Penawaran dan Asli Surat Dukungan Keuangan dari Bank, yang ditandatangani oleh MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/ Jasa ;
- ak. 3 (tiga) lembar asli Dokumen Berita Acara Evaluasi Administrasi Dokumen Penawaran pelelangan umum dalam rangka pengadaan jasa Gema Hukum Ibukota Jakarta kebutuhan Biro

Hal. 137 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Setdaprov. DKI Jakarta Nomor : 12/PPBJ/BA/GH/VIII/2006 tanggal 31 Agustus 2006, yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua, ISMIYATUN, SH selaku Sekretaris, IWAN SATYOPRODJO, SH, MM, Endang SUMARDI, SH dan OR. ZAKARIAS, SH selaku anggota ;

- al. 8 (delapan) lembar asli Dokumen Daftar Check List / Daftar pemeriksaan berkas evaluasi administrasi kegiatan gema hukum Ibukota Jakarta kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta ;
- am. 1 (satu) lembar asli Dokumen Nomor : 11/PPBJ/UND/GH/VIII/2006 tanggal 29 Agustus 2006 perihal undangan yang ditujukan kepada ISMIYATUN, SH, IWAN SATYOPRODJO, SH, MH, ENDANG SUMARDI, SH dan OR. ZAKARIAS, SH, yang ditandatangani oleh MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;
- an. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar hadir, hari Rabu tanggal 30 Agustus 2006 pukul 09.00 WIB, tempat Biro hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Blok G lantai 9 Jln. Merdeka Selatan 8 – 9 Jakarta Pusat, Acara evaluasi dokumen penawaran pelelangan umum pengadaan jasa penyelenggaraan Gema Hukum Ibukota Jakarta, terdapat tanda tangan peserta nomor urut 1 (satu) an. MADE SUARJAYA, SH sampai dengan nomor urut 5 (lima) an. OR. ZAKARIAS, SH, yang ditandatangani oleh MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa ;
- ao. 2 (dua) lembar asli Dokumen Berita Acara Pembukaan dokumen penawaran (SPH) Sampul I pelelangan umum dalam rangka pengadaan jasa Gema Hukum Ibukota Jakarta kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta Nomor : 10/PPBJ/BA/GH/VIII/2006 tanggal 29 Agustus 2006, yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua, ISMIYATUN, SH selaku Sekretaris, IWAN SATYOPRODJO, SH, MM, Endang SUMARDI, SH dan OR. ZAKARIAS, SH selaku anggota, berikut 8 (delapan) lembar lampirannya ;

Hal. 138 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ap. 6 (enam) lembar Dokumen Surat Penawaran Harga PT. TRENDEKA LESTARI ;
- aq. 68 (enam puluh delapan) lembar Dokumen Proposal Teknis PT. TRENDEKA LESTARI ;
- ar. 234 (dua ratus tiga puluh empat) Data Administrasi PT. TRENDEKA LESTARI ;
- as. 195 (seratus sembilan puluh lima) Data Penawaran PT. ADILA JAYA SUKSES ;
- at. 1 (satu) lembar asli dokumen Nomor : 09/PPBJ/UND/GH/VIII/2006 tanggal 28 Agustus 2006 perihal Undangan yang ditujukan kepada ISMIYATUN, SH, IWAN SATYOPRODJO, SH, MH, ENDANG SUMARDI, SH dan OR. ZAKARIAS, SH, yang ditandatangani oleh MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;
- au. 1 (satu) lembar asli Dokumen Nomor : 08/PPBJ/UND/GH/VIII/2006 tanggal 28 Agustus 2006 perihal Undangan yang ditujukan kepada Direktur / Pimpinan PT., yang ditandatangani oleh MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta, berikut 1 (satu) lembar lampirannya ;
- av. 1 (satu) lembar asli dokumen Nomor : 07/PPBJ/UND/GH/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 perihal Undangan yang ditujukan kepada Direktur / Pimpinan PT., yang ditandatangani oleh MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;
- aw. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Hadir Hari Jumat s.d Senin, tanggal 25 s.d 28 Agustus 2006 pukul 08.00 s.d 16.00 WIB, tempat Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Blok G lantai 9 Jl. Merdeka Selatan 8 – 9 Jakarta Pusat, Acara Pemasukan SPH pelelangan umum pengadaan jasa penyelenggaraan Gema Hukum Ibukota Jakarta, terdapat tanda tangan peserta nomor urut 1 (satu) an. MADE SUARJAYA, SH sampai dengan nomor urut 14 (empat belas) an. TRIYITNO – PT. MEGAVISION, yang ditandatangani oleh MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa ;

Hal. 139 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ax. 1 (satu) lembar asli Dokumen ADDENDUM Rencana Kerja dan Syarat-syarat pelelangan umum dengan Pasca Kualifikasi Nomor : 02/PPBJ/RKS/GH/VIII/2006 tanggal 11 Agustus 2006, tertanggal 24 Agustus 2006 yang ditandatangani oleh MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Menyetujui JORNAL E. SIAHAAN selaku Kepala Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta ;
- ay. 2 (dua) lembar asli Dokumen Berita Acara Penjelasan Rencana Kerja dan Syarat-syarat pelelangan umum dalam rangka pengadaan jasa Gema Hukum Ibukota Jakarta Nomor : 06/PPBJ/BA/GH/VII/2006, yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua, ISMIYATUN, SH selaku Sekretaris, IWAN SATYOPRODJO, SH, MM, Endang SUMARDI, SH dan OR. ZAKARIAS, SH selaku anggota ;
- az. 1 (satu) lembar asli Dokumen Nomor : 05/PPBJ/UND/GH/VIII/2006 tanggal 14 Agustus 2006 perihal undangan yang ditujukan kepada Direktur / Pimpinan PT., yang ditandatangani oleh MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta, berikut 1 (satu) lembar lampirannya ;
- ba. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Hadir Hari Kamis, tanggal 14 Agustus 2006 pukul 14.00 WIB, tempat Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Blok G lantai 9 Jl. Merdeka Selatan 8 – 9 Jakarta Pusat, Acara Pelaksanaan Penjelasan (Aanwijzing) rencana kerja dan syarat-syarat pelelangan umum pengadaan jasa penyelenggaraan Gema Hukum Ibukota Jakarta, terdapat tanda tangan peserta nomor urut 1 (satu) an. MADE SUARJAYA, SH sampai dengan nomor urut 17 (tujuh belas) an. SLAMET R – PT. DAYA MEKAR, yang ditandatangani oleh MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa ;
- bb. 1 (satu) lembar asli Dokumen Nomor : 04/PPBJ/UND/GH/VIII/2006 tanggal 14 Agustus 2006 perihal Undangan yang ditujukan kepada ISMIYATUN, SH, IWAN SATYOPRODJO, SH, MH, ENDANG SUMARDI, SH dan OR. ZAKARIAS, SH, yang

Hal. 140 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;

- bc. 2 (dua) lembar asli Dokumen Daftar Hadir Pendaftaran Pelelangan Umum Pengadaan Gema Hukum Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta Tahun Anggaran 2006, dengan nomor urut 1 (satu) dari PT. PANCA KARYA GUMILANG an. JOKO SUSILO sampai dengan nomor urut 17 (tujuh belas) dari RADITYA PUTRA BAHTERA an. GUNTUR INDRAYANA, tertanggal 15 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh MADE SUARJAYA selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa ;
- bd. 2 (dua) lembar asli Dokumen Peserta Hadir Pendaftaran Pelelangan Umum Pengadaan Gema Hukum Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta Tahun Anggaran 2006, dengan nomor urut 1 (satu) dari PT. PANCA KARYA GUMILANG an. JOKO SUSILO sampai dengan nomor urut 17 (tujuh belas) dari RADITYA PUTRA BAHTERA an. GUNTUR INDRAYANA, tertanggal 25 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh MADE SUARJAYA selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa ;
- be. 2 (dua) lembar asli Dokumen Pengumuman Lelang Nomor 03/PPBJ/L/Peng/VIII/2006, tanggal 14 Agustus 2006, yang ditandatangani oleh MADE SUARJAYA selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa ;
- bf. 1 (satu) lembar klipng koran MEDIA INDONESIA Senin, 14 Agustus 2006/NO. 9365/Tahun XXXVII perihal Pengumuman Lelang No. 03/PPBJ/L/Peng/VIII/2006 ;
- bg. 1 (satu) lembar asli Dokumen Kwitansi IKL – 046143 tertanggal 14 Agustus 2006, berikut 1 (satu) lembar asli dokumen Faktur Pajak Standar dengan Kode dan Nomor Seri CXTKC-035-0068411, tertanggal 14 Agustus 2006 yang ditandatangani oleh PRIANTO A. SURYONO selaku Finance Controller PT. CITRA MEDIA NUSA PRIMA dan 12 (dua belas) lembar asli dokumen Rencana Kerja dan Syarat-syarat pelelangan umum dengan Pascakualifikasi Nomor : 02/PPBJ/RKS/GH/VIII/2006 tanggal 11 Agustus 2006 yang ditandatangani oleh MADE SUARJAYA selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan mengetahui

Hal. 141 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JORNAL E. SIAHAAN selaku Kepala Biro Hukum Setdapriv DKI Jakarta berikut Lampiran I, II dan III ;

- bh. 1 (satu) lembar asli Dokumen Nomor : 01/PPBJ/UND/GH/VIII/2006 tanggal 10 Agustus 2006 perihal undangan yang ditujukan kepada ISMIYATUN, SH, IWAN SATYOPRODJO, SH, MH, ENDANG SUMARDI, SH dan OR. ZAKARIAS, SH, yang ditandatangani oleh MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;
- bi. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Hadir pada Hari/Tanggal Jum'at, 11 September 2006 waktu 14.00 WIB, tempat Ruang Rapat Biro hukum Setdaprov DKI Jakarta Blok G lantai 9 Jl. Merdeka Selatan 8 – 9 Jakarta Pusat, Acara Persiapan pelelangan umum pengadaan jasa penyelenggaraan Gema Hukum Ibukota Jakarta, yang dihadiri oleh ISMIYATUN, SH, IWAN SATYOPRODJO, SH, MH, ENDANG SUMARDI, SH dan OR. ZAKARIAS, SH, yang ditandatangani oleh MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta, berikut 1 (satu) lembar asli Notulen Rapat ;
- bj. 2 (dua) lembar foto copy Dokumen Keputusan Kepala Biro Perlengkapan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 2747/073.532 tentang Penetapan Patoka Harga Satuan Barang Insidental Kebutuhan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk Kebutuhan Biro Hukum Provinsi DKI Jakarta, tertanggal 17 Juli 2006 yang ditandatangani oleh Ir. EKO BHARUNA, MT, berikut 2 (dua) lembar lampirannya ;
- bk. 1 (satu) lembar asli Dokumen Nomor : 475/-077.521 tertanggal 2 Agustus 2006 perihal Permintaan pelelangan umum Gema Hukum Ibukota Jakarta di Stasiun Televisi Swasta Nasional, yang ditujukan kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta, yang ditandatangani oleh JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum DKI Jakarta, berikut 1 (satu) lembar lampirannya ;
35. 1 (satu) bundel asli Dokumen pembayaran atas Pengadaan Jasa Gema Hukum Ibukota Jakarta Dalam Rangka Sosialisasi Produk Hukum melalui media Televisi Swasta Nasional Kebutuhan Biro

Hal. 142 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Sekda Prov. DKI Jakarta antara Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan PT. TRENDEKA LESTARI Nomor 588/077.92, yang berisi antara lain :

- a. 1 (satu) lembar asli tindisan Dokumen SPM Giro No. 00208572006 TA. 2006 sebesar Rp. 3.891.600.000,- (tiga milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran biaya pengadaan jasa gema hukum kebutuhan Biro Hukum Sekdaprov DKI Jakarta, Kontrak No. 588/077.92 ;
- b. 1 (satu) lembar asli Dokumen Kwitansi PT. TRENDEKA LESTARI No. 030/TL/X/2006 tertanggal 8 November 2006, sebesar Rp. 4.554.000.000,- (empat milyar lima ratus lima puluh empat juta rupiah), terdapat tanda tangan diatas materai 6.000 (enam ribu rupiah) an. ANNA DALILA selaku Direktur PT. TRENDEKA LESTARI dan an. H. BUDIYONO selaku Pemegang Kas Setdaprov DKI Jakarta ;
- c. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 1607/SPP/SWD/BB/XI/2006 tertanggal 8 November 2006, yang ditanda tangani an. H. BUDIYONO selaku Pemegang Kas Setdaprov DKI Jakarta dan an. HARI SANDJOJO, MJ selaku Asisten Keuangan ;
- d. 1 (satu) lembar asli Dokumen Surat Permintaan Pembayaran No. 1607/SPP/SWD/BB/XI/2006 tertanggal 8 November 2006, yang ditanda tangani an. H. BUDIYONO selaku Pemegang Kas Setdaprov DKI Jakarta dan an. HARI SANDJOJO, MJ selaku Asisten Keuangan ;
- e. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Rincian Rencana Penggunaan Beban Tetap No. 126/SPP/2006 tanggal 8 November 2006, ditandatangani an. BAHIR ROMSAH selaku Pemegang Kas Cabang dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum ;
- f. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Barang (BAPB) Nomor : 24/BAPB/BH/X/2006 tertanggal 17 Oktober 2006, ditanda tangani oleh Panitia Pemeriksa Barang nomor urut 1 (satu) Ketua sampai dengan 5 (lima) anggota, an. ANNA DALILA selaku Pimpinan PT. TRENDEKA LESTARI dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum,

Hal. 143 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut 3 (tiga) lembar asli lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang ;

- g. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 18/BAST/BH/X/2006 tanggal 18 Oktober 2006, yang ditanda tangani an. IRUSWANDI, SH selaku Pengurus Barang unit Biro Hukum, an. ANNA DALILA selaku Pimpinan PT. TRENDEKA LESTARI dan mengetahui an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 3 (tiga) lembar asli lampiran Berita Acara Serah Terima Barang ;
 - h. 2 (dua) lembar asli Dokumen Berita Acara Bobot Volume Pekerjaan Penayangan Jasa Gema Hukum Ibukota Jakarta dalam rangka Sosialisasi produk hukum melalui media televisi swasta nasional kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta TA. 2006 tanggal 17 Oktober 2006, yang ditanda tangani an. ANNA DALILA selaku Pimpinan PT. TRENDEKA LESTARI dan mengetahui an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar Daftar Hadir ;
 - i. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Penyerahan Pekerjaan tertanggal 17 Oktober 2006, yang ditandatangani an. ANNA DALILA selaku Pimpinan PT. TRENDEKA LESTARI dan mengetahui an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 6 (enam) lembar asli dokumen POST TRANSMISSION LOG ;
36. 1 (satu) bundel Dokumen terkait pengadaan Gema Hukum 2006 oleh PT. Trendeka Lestari, berisi antara lain :
- a. 1 (satu) lembar asli Dokumen Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran PT. Trendeka Lestari tahun 2006 dengan tema "CINTA JAKARTA PEMDA DKI", terdapat tandatangan an. ANNA D. Tertanggal 21/4/09 ;
 - b. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen Tanda Terima "United Trend", diterima oleh PT. Aktifindo, tercantum Nama Barang : BG 302533 Bank DKI 18/10 Rp 100 Juta, untuk pembayaran DP. Produksi Cinta Jakarta, ditandatangani oleh VERA selaku yang menerima pada tanggal 18 Oktober 2006 ;
 - c. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen Tanda Terima "United Trend", diterima oleh PT. Aktifindo, tercantum Nama Barang : 1 lembar Bilyet Giro Bank DKI No. BI 302536 tanggal

Hal. 144 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15-11-06 sebesar Rp 370.000.000,00 ditandatangani oleh HARMONO selaku yang menerima pada tanggal 14 November 2006 ;

37. 1 (satu) bundel Dokumen yang terkait penayangan Gema Hukum di Indosiar, antara lain :

a. 1 (satu) bundel yang terdiri dari :

- 1) 1 (satu) lembar asli tindisan INVOICE Nomor 023521 tertanggal 30 September 2006 sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) ;
- 2) 1 (satu) lembar asli tindisan FAKTUR PAJAK STANDAR Nomor seri : DKRPV-091-0022446 tertanggal 1 Oktober 2006 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- 3) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Rekening Koran PT. Indosiar Visual Mandiri pada Bank Central Asia Nomor : 1623123450 periode 31 Agustus s/d 30 September 2006 ;
- 4) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Rekening Koran PT. Indosiar Visual Mandiri pada Bank Central Asia Nomor : 1623123450 periode 30 November s/d 31 Desember 2006 ;

b. 1 (satu) bundel yang terdiri dari :

- 1) 1 (satu) lembar asli tindisan INVOICE Nomor 023522 tertanggal 30 September 2006 sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) ;
- 2) 1 (satu) lembar asli tindisan FAKTUR PAJAK STANDAR Nomor seri : DKRPV-091-0022093 tertanggal 1 Oktober 2006 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- 3) 1 (satu) lembar asli tindisan POST TRANSMISSION LOG pada tanggal 19 September 2006 ;
- 4) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Rekening Koran PT. Indosiar Visual Mandiri pada Bank Central Asia Nomor : 1623123450 periode 30 November s/d 31 Desember 2006

c. 1 (satu) bundel yang terdiri dari :

- 1) 1 (satu) lembar asli tindisan INVOICE Nomor 023523 tertanggal 30 September 2006 sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) ;
- 2) 1 (satu) lembar asli tindisan FAKTUR PAJAK STANDAR Nomor seri : DKRPV-091-0022472 tertanggal 1 Oktober 2006 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

Hal. 145 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Rekening Koran PT. Indosiar Visual Mandiri pada Bank Central Asia Nomor : 1623123450 periode 30 November s/d 31 Desember 2006 ;
- 4) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Rekening Koran PT. Indosiar Visual Mandiri pada Bank Central Asia Nomor : 1623123450 periode 30 September s/d 31 Oktober 2006 ;
- d. 1 (satu) bundel yang terdiri dari :
 - 1) 1 (satu) lembar asli tindisan INVOICE Nomor 023863 tertanggal 30 September 2006 sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) ;
 - 2) 1 (satu) lembar asli tindisan FAKTUR PAJAK STANDAR Nomor seri : DKRPV-091-0022408 tertanggal 1 Oktober 2006 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
 - 3) 2 (dua) lembar asli tindisan POST TRANSMISSION LOG pada tanggal 24 s/d 26 September 2006 ;
 - 4) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Rekening Koran PT. Indosiar Visual Mandiri pada Bank Central Asia Nomor : 1623123450 periode 30 November s/d 31 Desember 2006 ;
- e. 1 (satu) bundel yang terdiri dari :
 - 1) 1 (satu) lembar asli tindisan INVOICE Nomor 024039 tertanggal 31 Oktober 2006 sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) ;
 - 2) 1 (satu) lembar asli tindisan FAKTUR PAJAK STANDAR Nomor seri : DKRPV-091-0023006 tertanggal 1 November 2006 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
 - 3) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Rekening Koran PT. Indosiar Visual Mandiri pada Bank Central Asia Nomor : 1623123450 periode 30 September s/d 31 Oktober 2006 ;
 - 4) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Rekening Koran PT. Indosiar Visual Mandiri pada Bank Central Asia Nomor : 1623123450 periode 30 November s/d 31 Desember 2006 ;
- f. 1 (satu) bundel yang terdiri dari :
 - 1) 1 (satu) lembar asli tindisan INVOICE Nomor 024040 tertanggal 31 Oktober 2006 sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) ;

Hal. 146 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) lembar asli tindisan FAKTUR PAJAK STANDAR Nomor Seri : DKRPV-091-0022606 tertanggal 1 November 2006 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- 3) 1 (satu) lembar asli tindisan POST TRANSMISSION LOG pada tanggal 9 s/d 10 Oktober 2006 ;
- 4) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Rekening Koran PT. Indosiar Visual Mandiri pada Bank Central Asia Nomor : 1623123450 periode 30 November s/d 31 Desember 2006 ;
- g. 1 (satu) bundel yang terdiri dari :
 - 1) 1 (satu) lembar asli tindisan INVOICE Nomor 024041 tertanggal 31 Oktober 2006 sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) ;
 - 2) 1 (satu) lembar asli tindisan FAKTUR PAJAK STANDAR Nomor seri : DKRPV-091-0023007 tertanggal 1 November 2006 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
 - 3) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Rekening Koran PT. Indosiar Visual Mandiri pada Bank Central Asia Nomor : 1623123450 periode 30 November s/d 31 Desember 2006 ;
 - 4) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Rekening Koran PT. Indosiar Visual Mandiri pada Bank Central Asia Nomor : 1623123450 periode 31 Agustus s/d 30 September 2006 ;
- h. 1 (satu) bundel yang terdiri dari :
 - 1) 1 (satu) lembar asli tindisan INVOICE Nomor 024042 tertanggal 31 Oktober 2006 sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) ;
 - 2) 1 (satu) lembar asli tindisan FAKTUR PAJAK STANDAR Nomor seri : DKRPV-091-0022607 tertanggal 1 November 2006 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
 - 3) 1 (satu) lembar asli tindisan POST TRANSMISSION LOG pada tanggal 1 s/d 3 Oktober 2006 ;
 - 4) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Rekening Koran PT. Indosiar Visual Mandiri pada Bank Central Asia Nomor : 1623123450 periode 30 November s/d 31 Desember 2006 ;
- i. 1 (satu) bundel yang terdiri dari :
 - 1) 1 (satu) lembar asli tindisan INVOICE Nomor 024043 tertanggal 31 Oktober 2006 sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) ;

Hal. 147 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



- 2) 1 (satu) lembar asli tindisan FAKTUR PAJAK STANDAR Nomor seri : DKRPV-091-0023008 tertanggal 1 November 2006 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- 3) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Rekening Koran PT. Indosiar Visual Mandiri pada Bank Central Asia Nomor : 1623123450 periode 30 November s/d 31 Desember 2006 ;
- 4) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Rekening Koran PT. Indosiar Visual Mandiri pada Bank Central Asia Nomor : 1623123450 periode 30 September s/d 31 Oktober 2006 ;
- j. 1 (satu) bundel yang terdiri dari :
 - 1) 1 (satu) lembar asli tindisan INVOICE Nomor 024287 tertanggal 31 Oktober 2006 sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) ;
 - 2) 1 (satu) lembar asli tindisan FAKTUR PAJAK STANDAR Nomor seri : DKRPV-091-0022844 tertanggal 1 November 2006 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
 - 3) 1 (satu) lembar asli tindisan POST TRANSMISSION LOG pada tanggal 15 s/d 17 Oktober 2006 ;
 - 4) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Rekening Koran PT. Indosiar Visual Mandiri pada Bank Central Asia Nomor : 1623123450 periode 30 November s/d 31 Desember 2006 ;
38. 1 (satu) bundel Dokumen Bilyet Giro pembayaran terkait pengadaan Gema Hukum 2006, antara lain :
 - a. 1 (satu) lembar BILYET GIRO Bank DKI Capem Tebet Barat No.BI 243115 tanggal 22-09-06, memindahkan dana sejumlah Rp 208.000.000,00 untuk untung rekening nomor 162.3123.450 atas nama PT. Indosiar ;
 - b. 1 (satu) lembar BILYET GIRO Bank DKI Capem Tebet Barat No.BI 243116 tanggal 29-09-06, memindahkan dana sejumlah Rp 208.000.000,00 untuk untung rekening nomor 162.3123.450 atas nama PT. Indosiar ;
 - c. 1 (satu) lembar BILYET GIRO Bank DKI Capem Tebet Barat No.BI 243117 tanggal 06-10-06, memindahkan dana sejumlah Rp 208.000.000,00 untuk untung rekening nomor 162.3123.450 atas nama PT. Indosiar sejumlah Rp 208.000.000,- ;
 - d. 1 (satu) lembar BILYET GIRO Bank DKI Capem Tebet Barat No.BI 243118 tanggal 13-10-06, memindahkan dana sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp 208.000.000,00 untuk untung rekening nomor 162.3123.450 atas nama PT. Indosiar ;
- e. 1 (satu) lembar BILYET GIRO Bank DKI Capem Tebet Barat No.BI 302533 tanggal 18-10-06, memindahkan dana sejumlah Rp 100.000.000,00 untuk untung rekening nomor (tanpa nomor rekening) atas nama PT. Aktifindo Cipta Media ;
 - f. 1 (satu) lembar BILYET GIRO Bank DKI Capem Tebet Barat No.BI 302536 tanggal 15-11-06, memindahkan dana sejumlah Rp 370.000.000,00 untuk untung rekening nomor (tanpa nomor rekening) atas nama PT. Aktifindo Cipta Media ;
 - g. 1 (satu) lembar BILYET GIRO Bank DKI Capem Tebet Barat No.BI 337152 tanggal 05-12-06, memindahkan dana sejumlah Rp 220.000.000,00 untuk untung rekening nomor 162.3123.450 atas nama PT. Indosiar Visual Mandiri ;
 - h. 1 (satu) lembar BILYET GIRO Bank DKI Capem Tebet Barat No.BI 337157 tanggal 19-12-06, memindahkan dana sejumlah Rp 330.000.000,00 untuk untung rekening nomor 162.3123.450 atas nama PT. Indosiar Visual Mandiri ;
 - i. 1 (satu) lembar foto copy KTP Nomor : 09.5301.471259.0301 atas nama ANNA DALILA ;
 - j. 1 (satu) lembar CEK Bank DKI Capem Tebet Barat No.CI 852609 tanggal 15 November 2006 sejumlah Rp 30.000.000,00 ;
 - k. 1 (satu) lembar CEK Bank DKI Capem Tebet Barat No.BI 243119 tanggal 15 September 2006 sejumlah Rp 208.000.000,00 ;
 - l. 1 (satu) lembar CEK Bank DKI Capem Tebet Barat No.BI 337161 tanggal 18 Desember 2006 sejumlah Rp 60.000.000,00 ;
39. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Nomor : 403/A/077.922 tentang Pengadaan Jasa Kurir Untuk Penyampaian 1 (satu) Booklet Peraturan Perundang-undangan kepada 3.600 Tokoh Masyarakat Di Wilayah Provinsi DKI Jakarta Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta tanggal 19 Juni 2006 untuk CV. POS INDONESIA ;
40. 1 (satu) bundel Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Buku Himpunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta antara Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta dengan CV.

Hal. 149 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARYA BERSAMA ABADI nomor : 580/A/077.91 tanggal 3 Agustus 2006 ;

41. 1 (satu) bundel Dokumen pembayaran atas Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Buku Himpunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta antara Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta dengan CV. KARYA BERSAMA ABADI nomor : 580/A/077.91 tanggal 3 Agustus 2006, yang berisi antara lain :
- a. 1 (satu) lembar asli Dokumen SPM Giro No : 00329572006 Tahun 2006 tertanggal 28 Desember 2006, sebesar Rp. 51.072.250,- (lima puluh satu juta tujuh puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) kepada CV. KARYA BERSAMA ABADI ;
 - b. 1 (satu) lembar asli Kwitansi CV. KARYA BERSAMA ABADI tertanggal 18 Desember 2006 sebesar Rp. 57.035.000,- (lima puluh tujuh juta tiga puluh lima ribu rupiah), yang ditandatangani diatas materai 6.000 an. POLLY SIAHAYA selaku Pimpinan CV. KARYA BERSAMA ABADI dan an. BAHIR ROMSAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum DKI Jakarta, terdapat stempel dan tandatangan an. JORNAL E. SIAHAAN, Sh, Msi selaku Kepala Biro Hukum Prov. DKI Jakarta ;
 - c. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 2556/SPP/SWD/BB/XII/2006 tertanggal 18 Desember 2006, yang ditanda tangani an. H. BUDIYONO selaku Pemegang Kas Setdaprov DKI Jakarta dan an. Drs. SYAUKI YAHYA selaku Kepala Biro Keuangan ;
 - d. 1 (satu) lembar asli Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap No. 2556/SPP/SWD/BB/XII/2006 tertanggal 18 Desember 2006, yang ditanda tangani an. H. BUDIYONO selaku Pemegang Kas Setdaprov DKI Jakarta dan an. Drs. SYAUKI YAHYA selaku Kepala Biro Keuangan, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Daftar Rincian rencana penggunaan beban tetap ;
 - e. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Rincian Penggunaan Beban Tetap No. 186/SPP/2006 tertanggal (tanpa tanggal) yang ditandatangani oleh an. BAHIR ROMSAH selaku Pemegang Kas Cabang dan an. JORNAL E. SIAHAAN selaku Kepala Biro Hukum ;

Hal. 150 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 36/BAST/BH/XI/2006 tanggal 19 Oktober 2006, yang ditanda tangani an. IRUSWANDI, SH.M.Kn selaku Pengurus Barang unit Biro Hukum, an. J POLLY SIAHAYA selaku Pimpinan CV. KARYA BERSAMA ABADI dan mengetahui an. JORNAL EFFENDI SIAHAAN, SH, MSi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Serah Terima Barang ;
- g. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Barang (BAPB) Nomor : 30/BAPB/BH/XI/2006 tertanggal 18 Oktober 2006, ditanda tangani oleh Panitia Pemeriksa Barang nomor urut 1 (satu) Ketua sampai dengan 5 (lima) anggota, an. POLLY SIAHAYA selaku Pimpinan CV. KARYA BERSAMA ABADI dan mengetahui an. JORNAL EFFENDI SIAHAAN, SH, MSi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang ;
- 42. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Nomor : 447/A/078.23 tentang Pengadaan Konsumsi Untuk Peserta Penyuluhan Hukum Terpadu Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta tanggal 19 Juli 2006 untuk CV. JURINDO PUTRA UTAMA ;
- 43. 1 (satu) bundel Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Dalam Rangka Seminar menumbuhkan Kesadaran Minat baca Masyarakat terhadap Buku Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta antara Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta dengan CV. MULTITAMA PERSADA Nomor : 627/A/077.92 tanggal 22 September 2006 ;
- 44. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran atas Seminar Menumbuhkan Kesadaran Minat baca Masyarakat terhadap Buku Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta antara Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta dengan CV. MULTITAMA PERSADA nomor : 627/A/077.92 tanggal 22 September 2006, yang berisi antara lain :
 - a. 1 (satu) lembar asli Dokumen SPM Giro No : 00307082006 Tahun 2006 tertanggal 23 Desember 2006, sebesar Rp. 82.564.323,- (delapan puluh dua juta lima ratus enam puluh empat ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah) kepada CV. MULTI TAMA PERSADA ;

Hal. 151 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar asli Kwitansi CV. MULTITAMA PERSADA tertanggal 11 Desember 2006 sebesar Rp. 96.617.825,- (sembilan puluh enam juta enam ratus tujuh belas ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah), yang ditandatangani diatas materei 6.000 an. JEFRI SIALLAGAN selaku Direktur CV. MULTITAMA PERSADA dan an. BAHIR ROMSAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum DKI Jakarta, terdapat stempel dan tandatangan an. JORNAL E. SIAHAAN, Sh, Msi selaku Kepala Biro Hukum Prov. DKI Jakarta ;
- c. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 2302/SPP/SWD/BB/XII/2006 tertanggal 11 Desember 2006, yang ditanda tangani an. H. BUDIYONO selaku Pemegang Kas Setdaprov DKI Jakarta dan an. Drs. SYAUKI YAHYA selaku Kepala Biro Keuangan ;
- d. 1 (satu) lembar asli Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap No. 2302/SPP/SWD/BB/XII/2006 tertanggal 11 Desember 2006, yang ditanda tangani an. H. BUDIYONO selaku Pemegang Kas Setdaprov DKI Jakarta dan an. Drs. SYAUKI YAHYA selaku Kepala Biro Keuangan, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Daftar Rincian rencana penggunaan beban tetap ;
- e. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Rincian Penggunaan Beban Tetap No. 170/SPP/2006 tertanggal (tanpa tanggal) yang ditandatangani oleh an. BAHIR ROMSAH selaku Pemegang Kas Cabang dan an. JORNAL E. SIAHAAN selaku Kepala Biro Hukum ;
- f. 1 (satu) lembar asli Dokumen Invoice CV. MULTITAMA PERSADA Nomor : 038/INV/PM/XI/2006 tertanggal November 2006, yang ditanda tangani an. JEFRI SIALLAGAN selaku Direktur CV. MULTITAMA PERSADA ;
- g. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 22/BAST/BH/XI/2006 tanggal 1 November 2006, yang ditanda tangani an. IRUSWANDI, SH.M.Kn selaku Pengurus Barang unit Biro Hukum, an. JEFRI SIALLAGAN selaku Direktur CV. MULTITAMA PERSADA dan mengetahui an. JORNAL EFFENDI SIAHAAN, SH, MSi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Serah Terima Barang ;

Hal. 152 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Barang (BAPB) Nomor : 26/BAPB/BH/XI/2006 tertanggal 1 November 2006, ditanda tangani oleh Panitia Pemeriksa Barang nomor urut 1 (satu) Ketua sampai dengan 5 (lima) anggota, an. JEFRI SIALLAGAN selaku Direktur CV. MULTITAMA PERSADA dan mengetahui an. JORNAL EFFENDI SIAHAAN, SH, MSi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang ;
45. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Nomor : 01/075.72 tentang Pengadaan Liputan Televisi Penyuluhan Terpadu Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta tanggal 31 Agustus 2006 untuk CV. VEGAR BINTANG PRIMA ;
46. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Nomor : 454/A/078.23 tentang Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) untuk pembinaan Keluarga sadar Hukum Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta tanggal 19 Juli 2006 untuk PT. FERDINAN SENTOSA ABADI ;
47. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Nomor : 02/075.31 tentang Pengadaan Pemuatan Peraturan Perundang-undangan di Media Cetak Harian Ibukota kebutuhan Biro Hukum setdaprov DKI Jakarta tanggal 31 Agustus 2006 untuk CV. ISWARI MANINJAU MASA ;
48. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran atas Surat Perintah Kerja Nomor : 02/075.31 tentang Pengadaan Pemuatan Peraturan Perundang-undangan di Media Cetak Harian Ibukota kebutuhan Biro Hukum setdaprov DKI Jakarta tanggal 31 Agustus 2006 untuk CV. ISWARI MANINJAU MASA, yang berisi antara lain :
- a. 1 (satu) lembar asli Dokumen SPM Giro No : 00304202006 Tahun 2006 tertanggal 22 Desember 2006, sebesar Rp. 41.862.500,- (empat puluh satu juta delapan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) kepada CV. ISWARI MANINJAU MASA ;
- b. 1 (satu) lembar asli Kwitansi CV. ISWARI MANINJAU MASA tertanggal 18 Desember 2006 sebesar Rp. 46.750.000,- (empat puluh enam juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah), yang ditandatangani diatas materei 6.000 an. NY. NURSATIA MANALU selaku Direktur CV. ISWARI MANINJAU MASA dan an. BAHIR ROMSAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum DKI Jakarta, terdapat stempel dan tandatangan an.

Hal. 153 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JORNAL E. SIAHAAN, Sh, Msi selaku Kepala Biro Hukum Prov. DKI Jakarta ;

- c. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 2557/SPP/SWD/BB/XII/2006 tertanggal 18 Desember 2006, yang ditanda tangani an. H. BUDIYONO selaku Pemegang Kas Setdaprov DKI Jakarta dan an. Drs. SYAUKI YAHYA selaku Kepala Biro Keuangan ;
- d. 1 (satu) lembar asli Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap No. 2557/SPP/SWD/BB/XII/2006 tertanggal 18 Desember 2006, yang ditanda tangani an. H. BUDIYONO selaku Pemegang Kas Setdaprov DKI Jakarta dan an. Drs. SYAUKI YAHYA selaku Kepala Biro Keuangan, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Daftar Rincian rencana penggunaan beban tetap ;
- e. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Rincian Penggunaan Beban Tetap No. 188/SPP/2006 tertanggal 18 Desember 2006 yang ditandatangani oleh an. BAHIR ROMSAH selaku Pemegang Kas Cabang dan an. JORNAL E. SIAHAAN selaku Kepala Biro Hukum ;
- f. 1 (satu) lembar asli Dokumen Faktur CV. ISWARI MANINJAU MASA Nomor : 012/FK/IMM/XII/2006 tertanggal Desember 2006, yang ditanda tangani an. NY. NURSATIA MANALU selaku Direktur CV. ISWARI MANINJAU MASA ;
- g. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 29/BAST/BH/XI/2006 tanggal 14 Desember 2006, yang ditanda tangani an. IRUSWANDI, SH.M.Kn selaku Pengurus Barang unit Biro Hukum, an. NY. NURSATIA MANALU selaku Direktur CV. ISWARI MANINJAU MASA dan mengetahui an. HR. DEDED SUKANDAR, SH, MH selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Serah Terima Barang ;
- h. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Barang (BAPB) Nomor : 39/BAPB/BH/VII/2006 tertanggal 14 Desember 2006, ditanda tangani oleh Panitia Pemeriksa Barang nomor urut 1 (satu) Ketua sampai dengan 5 (lima) anggota, an. NY. NURSATIA MANALU selaku Direktur CV. ISWARI MANINJAU MASA dan mengetahui an. HR. DEDED SUKANDAR, SH, MH

Hal. 154 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran
Berita Acara Pemeriksaan Barang ;

49. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Nomor : 373/A/077.922 tentang Pengadaan Buku Abstrak Peraturan Perundang-undangan Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta tanggal 8 Juni 2006 untuk CV. CITRA SARANA MULY ;
50. 1 (satu) bundel Dokumen pembayaran atas Surat perintah Kerja Nomor : 373/A/077.922 tentang Pengadaan Buku Abstrak Peraturan Perundang-undangan Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta tanggal 8 Juni 2006 untuk CV. CITRA SARANA MULYA, yang berisi antara lain :
 - a. 1 (satu) lembar asli Dokumen SPM Giro No : 00182742006 Tahun 2006 tertanggal 9 Oktober 2006, sebesar Rp. 28.995.937,- (dua puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah) kepada CV. CITRA SARANA MULYA sehubungan Kontrak Nomor. 373/A/077.922, tanggal 19 Juli 2006 ;
 - b. 1 (satu) lembar asli Kwitansi CV. CITRA SARANA MULYA tertanggal 29 September 2006 sebesar Rp. 32.381.250,- (tiga puluh dua juta tiga ratus delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah), yang ditandatangani diatas materai 6.000 an. SUDIRMAN selaku Direktur CV. CITRA SARANA MULYA dan an. BAHIR ROMSAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum DKI Jakarta, terdapat stempel dan tandatangan an. JORNAL E. SIAHAAN, Sh, Msi selaku Kepala Biro Hukum Prov. DKI Jakarta ;
 - c. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 1310/SPP/SWD/BB/X/2006 tertanggal 29 September 2006, yang ditanda tangani an. H. BUDIYONO selaku Pemegang Kas Setdaprov DKI Jakarta dan an. Drs. SYAUKI YAHYA selaku Kepala Biro Keuangan ;
 - d. 1 (satu) lembar asli Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap No. 1310/SPP/SWD/BB/IX/2006 tertanggal 29 September 2006, yang ditanda tangani an. H. BUDIYONO selaku Pemegang Kas Setdaprov DKI Jakarta dan an. Drs. SYAUKI YAHYA selaku Kepala Biro Keuangan, berikut 1 (satu)

Hal. 155 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar asli lampiran Daftar Rincian rencana penggunaan beban tetap ;

- e. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 04/BAST/BH/VII/2006 tanggal 6 Juli 2006, yang ditanda tangani an. IRUSWANDI, SH.M.Kn selaku Pengurus Barang unit Biro Hukum, an. SUDIRMAN selaku Direktur CV.CITRA SARANA MULYA dan mengetahui an. HR. DEDED SUKANDAR, SH, MH selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Serah Terima Barang ;
- f. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Barang (BAPB) Nomor : 07/BAPB/BH/VII/2006 tertanggal 6 Juli 2006, ditanda tangani oleh Panitia Pemeriksaan Barang nomor urut 1 (satu) Ketua sampai dengan 5 (lima) anggota, an. SUDIRMAN selaku Pimpinan CV.CITRA SARANA MULYA dan mengetahui an. HR. DEDED SUKANDAR, SH, MH selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang ;
- 51. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Nomor : 424/A/078.23 tentang Pengadaan Percetakan Buku Booklet Peraturan Perundang-undangan Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta tanggal 8 Juni 2006 untuk CV. WIDYA JAYA ;
- 52. 1 (satu) bundel Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Penayangan Hukum Melalui Penayangan Materi Vidiotron Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta antara Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta dengan CV. DEWI CITRA MANDIRI nomor : 519/A/073 tanggal 3 Agustus 2006 ;
- 53. 1 (satu) bundel Dokumen pembayaran atas Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Penayangan Hukum Melalui Penayangan Materi Vidiotron Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta antara Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta dengan CV. DEWI CITRA MANDIRI nomor : 519/A/073 tanggal 3 Agustus 2006, yang berisi antara lain :
 - a. 1 (satu) lembar asli Dokumen SPM Giro No : 00231232006 Tahun 2006 tertanggal 28 November 2006, sebesar Rp. 82.250.000,- (delapan puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada CV. DEWI CITRA MANDIRI ;
 - b. 1 (satu) lembar asli Kwitansi CV. DEWI CITRA MANDIRI tertanggal 6 November 2006 sebesar Rp. 96.250.000,- (sembilan

Hal. 156 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang ditandatangani diatas materai 6.000 an. MARWAN selaku Direktur CV. DEWI CITRA MANDIRI dan an. BAHIR ROMSAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum DKI Jakarta, terdapat stempel dan tandatangan an. JORNAL E. SIAHAAN, Sh, Msi selaku Kepala Biro Hukum Prov. DKI Jakarta ;

- c. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 1602/SPP/SWD/BB/XI/2006 tertanggal 6 Nopember 2006, yang ditanda tangani an. H. BUDIYONO selaku Pemegang Kas Setdaprov DKI Jakarta dan an. Drs. SYAUKI YAHYA selaku Kepala Biro Keuangan ;
- d. 1 (satu) lembar asli Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap No. 1602/SPP/SWD/BB/XI/2006 tertanggal 6 November 2006, yang ditandatangani an. H. BUDIYONO selaku Pemegang Kas Setdaprov DKI Jakarta dan an. Drs. SYAUKI YAHYA selaku Kepala Biro Keuangan, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Daftar Rincian rencana penggunaan beban tetap ;
- e. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Rincian Rencana Penggunaan Beban Tetap Nomor : 123/SPP/2006 tanggal 6 November 2006, yang ditanda tangani an. BAHIR ROMSAH selaku Pemegang Kas Cabang dan an. JORNAL E. SIAHAAN, Sh, Msi selaku Kepala Biro Hukum Prov. DKI Jakarta ;
- f. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 10/BAST/BH/X/2006 tanggal 30 Oktober 2006, yang ditanda tangani an. IRUSWANDI, SH.M.Kn selaku Pengurus Barang unit Biro Hukum, an. MARWAN selaku Direktur CV. DEWI CITRA MANDIRI dan mengetahui an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Serah Terima Barang ;
- g. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Barang (BAPB) Nomor : 15/BAPB/BH/X/2006 tertanggal 30 Oktober 2006, ditanda tangani oleh Panitia Pemeriksa Barang nomor urut 1 (satu) Ketua sampai dengan 5 (lima) anggota, an. MARWAN selaku Direktur CV. DEWI CITRA MANDIRI dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang ;

Hal. 157 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Nomor : 444/A/078.23 tentang Pengadaan Percetakan Bahan Penyuluhan Pengendalian Pencemaran Udara dan Kawasan Larangan Merokok Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta tanggal 19 Juli 2006 untuk CV. ANDHIKA PATRIA NUSANTARA ;
55. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran atas Surat Perintah Kerja Nomor : 444/A/078.23 tentang Pengadaan Percetakan Bahan Penyuluhan Pengendalian Pencemaran Udara dan Kawasan Larangan Merokok Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta tanggal 19 Juli 2006 untuk CV. ANDHIKA PATRIA NUSANTARA, yang berisi antara lain :
- a. 1 (satu) lembar asli Dokumen SPM Giro No : 00185682006 Tahun 2006 tertanggal 10 Oktober 2006, sebesar Rp. 48.279.000,- (empat puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) kepada CV. ANDHIKA PATRIA NUSANTARA sehubungan Kontrak Nomor. 444/A/078.23, tanggal 19 Juli 2006 ;
 - b. 1 (satu) lembar asli Kwitansi CV. ANDHIKA PATRIA NUSANTARA tertanggal 29 September 2006 sebesar Rp. 48.279.000,- (empat puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), yang ditandatangani diatas materai 6.000 an. MULYADI GUNTUR selaku Direktur CV. ANDHIKA PATRIA NUSANTARA dan an. BAHIR ROMSAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum DKI Jakarta, terdapat stempel dan tandatangan an. JORNAL E. SIAHAAN, Sh, Msi selaku Kepala Biro Hukum Prov. DKI Jakarta ;
 - c. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 1309/SPP/SWD/BB/IX/2006 tertanggal 29 September 2006, yang ditanda tangani an. H. BUDIYONO selaku Pemegang Kas Setdaprov DKI Jakarta dan an. Drs. SYAUKI YAHYA selaku Kepala Biro Keuangan ;
 - d. 1 (satu) lembar asli Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap No. 1309/SPP/SWD/BB/IX/2006 tertanggal 29 September 2006, yang ditanda tangani an. H. BUDIYONO selaku Pemegang Kas Setdaprov DKI Jakarta dan an. Drs. SYAUKI YAHYA selaku Kepala Biro Keuangan, berikut 1 (satu)

Hal. 158 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar asli lampiran Daftar Rincian rencana penggunaan beban tetap ;

- f. 1 (satu) lembar asli Dokumen Faktur CV. ANDHIKA PATRIA NUSANTARA Nomor 0017/F/APN/VIII/2006 sebesar Rp. 48.279.000,- (empat puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), ditujukan kepada Yth. Kepala Biro Hukum Setda Prov DKI Jakarta Jl. Medan Merdeka Selatan NO. 8-9, ditandatangani an. MULYADI GUNTUR selaku Direktur CV. ANDHIKA PATRIA NUSANTARA ;
- g. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 05/BAST/BH/VIII/2006 tanggal 16 Agustus 2006, yang ditanda tangani an. IRUSWANDI, SH.M.Kn selaku Pengurus Barang unit Biro Hukum, an. MULYADI GUNTUR selaku Direktur CV. ANDHIKA PATRIA NUSANTARA dan mengetahui an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Serah Terima Barang ;
- h. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Barang (BAPB) Nomor : 08/BAPB/BH/VIII/2006 tertanggal 16 Agustus 2006, ditanda tangani oleh Panitia Pemeriksa Barang nomor urut 1 (satu) Ketua sampai dengan 5 (lima) anggota, an. MULYADI GUNTUR selaku Direktur CV. ANDHIKA PATRIA NUSANTARA dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang ;
- 56. 1 (satu) bundel Perjanjian Pelelangan Umum Pelaksanaan Jasa Talk Show Interaktif di Stasiun Radio Swasta DKI Jakarta Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta nomor 759/077.92 tanggal 17 November 2006 antara Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta dengan CV. ASTERMIDO PANTHER HABINDO ;
- 57. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran atas Pelaksanaan Jasa Talk Show Interaktif di Stasiun Radio Swasta DKI Jakarta Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta nomor 759/077.92 tanggal 17 November 2006 antara Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta dengan CV. ASTERMIDO PANTHER HABINDO, yang berisi antara lain :
 - a. 1 (satu) lembar asli Dokumen SPM Giro No : 00325762006 Tahun 2006 tertanggal 27 Desember 2006, sebesar Rp.

Hal. 159 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

192.700.000,- (seratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada CV. ASTERMINDO PANTHER HABINDO ;

- b. 1 (satu) lembar asli Kwitansi CV. ASTERMINDO PANTHER HABINDO tertanggal 6 Desember 2006 sebesar Rp. 225.500.000,- (dua ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), yang ditandatangani diatas materai 6.000 an. ESTER PAULINA P selaku Direktur CV. ASTERMINDO PANTHER HABINDO dan an. BAHIR ROMSAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum DKI Jakarta, terdapat stempel dan tandatangan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, MSI selaku Kepala Biro Hukum Prov. DKI Jakarta ;
- c. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 2306/SPP/SWD/BB/XII/2006 tertanggal 11 Desember 2006, yang ditanda tangani an. H. BUDIYONO selaku Pemegang Kas Setdaprov DKI Jakarta dan an. Drs. SYAUKI YAHYA selaku Kepala Biro Keuangan ;
- d. 1 (satu) lembar asli Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap No. 2306/SPP/SWD/BB/XII/2006 tertanggal 11 Desember 2006, yang ditanda tangani an. H. BUDIYONO selaku Pemegang Kas Setdaprov DKI Jakarta dan an. Drs. SYAUKI YAHYA selaku Kepala Biro Keuangan, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Daftar Rincian rencana penggunaan beban tetap ;
- e. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Rincian Penggunaan Beban Tetap No. 173/SPP/2006 yang ditandatangani oleh an. BAHIR ROMSAH selaku Pemegang Kas Cabang dan an. JORNAL E. SIAHAAN selaku Kepala Biro Hukum ;
- f. 1 (satu) lembar asli Dokumen Faktur CV. ASTERMINDO PANTHER HABINDO Nomor 030/FB/APH/XII/2006 , ditandatangani an. ESTER PAULINA P selaku Direktur CV. ASTERMINDO PANTHER HABINDO dan an. IRUSWANDI, SH.M.Kn selaku Pengurus Barang unit Biro Hukum ;
- g. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Barang (BAPB) Nomor : 31/BAPB/BH/XII/2006 tertanggal 4 Desember 2006, ditanda tangani oleh Panitia Pemeriksa Barang nomor urut 1 (satu) Ketua sampai dengan 5 (lima) anggota, an. ESTER PAULINA P selaku Direktur CV. ASTERMINDO PANTHER HABINDO dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala

Hal. 160 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biro Hukum, berikut 2 (dua) lembar asli lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang ;

- h. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 33/BAST/BH/XII/2006 tanggal 5 Desember 2006, yang ditanda tangani an. IRUSWANDI, SH.M.Kn selaku Pengurus Barang unit Biro Hukum, an. ESTER PAULINA P selaku Direktur CV. ASTERMINDO PANTHER HABINDO dan mengetahui an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 2 (dua) lembar asli lampiran Berita Acara Serah Terima Barang ;
 - i. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Serah Terima Pengguna Barang Nomor : 33/BASTPB/BH/XII/2006 tanggal 6 Desember 2006, yang ditanda tangani an. IRUSWANDI, SH.M.Kn selaku Pengurus Barang unit Biro Hukum, an. Drs. NOORMAN, MM selaku Kabag Dokumentasi dan Publikasi dan mengetahui an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 2 (dua) lembar asli lampiran Berita Acara Serah Terima Barang ;
 - j. 1 (satu) lembar asli Dokumen Absen Tenaga Ahli Pelaksanaan Talk Show Interaktif di Stasiun Radio Biro Hukum Sekretariat Daerah Prov. DKI Jakarta Tahun 2006, yang ditanda tangani an. ESTER PAULINA P selaku Direktur CV. ASTERMINDO PANTHER HABINDO dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 2 (dua) lembar asli lampiran Berita Acara Serah Terima Barang ;
58. 1 (satu) bundel Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Dalam rangka Pengetikan Peraturan Perundang-undangan Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta antara Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta dengan CV. LESTARI SEJAHTERA nomor : 625/A/077.92 tanggal 22 September 2006 ;
59. 1 (satu) bundel Dokumen pembayaran atas Pengetikan Peraturan Perundang-undangan Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta antara Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta dengan CV. LESTARI SEJAHTERA nomor : 625/A/077.92 tanggal 22 September 2006, yang berisi antara lain :
- a. 1 (satu) lembar asli Dokumen SPM Giro No : 00325752006 tertanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp. 60.446.021,- (enam

Hal. 161 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta empat ratus empat puluh enam ribu dua puluh satu rupiah) kepada CV. LESTARI SEJAHTERA ;

- b. 1 (satu) lembar asli Kwitansi CV. LESTARI SEJAHTERA tertanggal 11 Desember 2006 sebesar Rp. 71.881.755,- (tujuh puluh satu juta delapan ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah), yang ditandatangani diatas materei 6.000 an. GOKMA AMBARITA selaku Direktur Utama CV. LESTARI SEJAHTERA dan BAHIR ROMSAH selaku Pemegang Kas Cabang, serta terdapat stempel dan tanda tangan an. H. BUDIYONO selaku Pemegang Kas Setdaprov DKI Jakarta, dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum Prov. DKI Jakarta ;
- c. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 2303/SPP/SWD/BB/XII/2006 tertanggal 11 Desember 2006, yang ditanda tangani an. H. BUDIYONO selaku Pemegang Kas Setdaprov DKI Jakarta dan an. Drs. H. SYAUKI YAHYA selaku Kepala Biro Keuangan ;
- d. 1 (satu) lembar asli Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap No. 2303/SPP/SWD/BB/XII/2006 tertanggal 11 Desember 2006, yang ditanda tangani an. H. BUDIYONO selaku Pemegang Kas Setdaprov DKI Jakarta dan an. Drs. H. SYAUKI YAHYA selaku Kepala Biro Keuangan ;
- e. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Rincian Penggunaan Beban Tetap No. 169/SPP/2006 yang ditandatangani oleh an. BAHIR ROMSAH selaku Pemegang Kas Cabang dan an. JORNAL E. SIAHAAN selaku Kepala Biro Hukum ;
- f. 1 (satu) lembar asli Dokumen Faktur CV. LESTARI SEJAHTERA Nomor : 029/FK/LS/XI/2006 yang ditanda tangani an. GOKMA AMBARITA selaku Direktur Utama CV. LESTARI SEJAHTERA ;
- g. 1 (satu) lembar asli Dokumen Surat Jalan CV. LESTARI SEJAHTERA Nomor : 037/SJ/LS/X/2006, tertanggal Oktober 2006, yang ditanda tangani an. GOKMA AMBARITA selaku Direktur Utama CV. LESTARI SEJAHTERA ;
- h. 1 (satu) lembar asli Dokumen Invoice CV. LESTARI SEJAHTERA Nomor : 037/INV/LS/XI/2006 tertanggal November 2006, yang ditanda tangani an. GOKMA AMBARITA selaku Direktur Utama CV. LESTARI SEJAHTERA ;

Hal. 162 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Barang (BAPB) Nomor : 25/BAPB/BH/X/2006 tertanggal 19 Oktober 2006, ditanda tangani oleh Panitia Pemeriksa Barang nomor urut 1 (satu) Ketua sampai dengan 5 (lima) anggota, an. GOKMA AMBARITA selaku Direktur Utama CV. LESTARI SEJAHTERA dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang ;
- j. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 23/BAST/BH/X/2006 tanggal 19 Oktober 2006, yang ditanda tangani an. IRUSWANDI, SH selaku Pengurus Barang unit Biro Hukum, an. GOKMA AMBARITA selaku Direktur Utama CV. LESTARI SEJAHTERA dan mengetahui an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Serah Terima Barang ;
- k. 2 (dua) lembar asli Dokumen Daftar Hadir Tenaga Ahli CV. LESTARI SEJAHTERA Pengetikan Peraturan Perundang-undangan Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta bulan September 2006, yang ditanda tangani an. GOKMA AMBARITA selaku Direktur Utama CV. LESTARI SEJAHTERA ;
- l. 2 (dua) lembar asli Dokumen Daftar Hadir Tenaga Ahli CV. LESTARI SEJAHTERA Pengetikan Peraturan Perundang-undangan Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta bulan Oktober 2006, yang ditanda tangani an. GOKMA AMBARITA selaku Direktur Utama CV. LESTARI SEJAHTERA ;
60. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Nomor : 465/A/078.23 tentang Pengadaan Konsumsi Untuk Pembinaan Keluarga Sadar Hukum Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta tanggal 19 Juli 2006 untuk CV. WIJAYA ANUGERAH KREASINDO ;
61. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Nomor : 384/A/077.922 tentang Pengadaan Percetakan Buku Warta Peraturan Perundang-undangan Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta tanggal 8 juni 2006 untuk CV. SUEZ RAYA ;
62. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran atas Surat Perintah Kerja Nomor : 384/A/077.922 tentang Pengadaan Percetakan Buku Warta Peraturan Perundang-undangan Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov

Hal. 163 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DKI Jakarta tanggal 8 juni 2006 untuk CV. SUEZ RAYA, yang berisi antara lain :

- a. 1 (satu) lembar asli Dokumen SPM Giro No : 00182202006 Tahun 2006 sebesar Rp. 29.032.875,- (dua puluh sembilan juta tiga puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) kepada PT. SUEZ JAYA sehubungan Kontrak Nomor. 384/A/077.92 ;
- b. 1 (satu) lembar asli Kwitansi PT. SUEZ RAYA tertanggal 3 Oktober 2006 sebesar Rp. 32.422.500,- (tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah), yang ditandatangani diatas materei 6.000 an. EDIWIRMAN TAHER selaku Direktur Utama PT. SUEZ JAYA dan BAHIR ROMSAH selaku Pemegang Kas Cabang, serta terdapat stempel dan tanda tangan an. H. BUDIYONO selaku Pemegang Kas Setdaprov DKI Jakarta, dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum Prov. DKI Jakarta ;
- c. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 1333/SPP/SWD/BB/X/2006 tertanggal 3 Oktober 2006, yang ditanda tangani an. H. BUDIYONO selaku Pemegang Kas Setdaprov DKI Jakarta dan an. Drs. H. SYAUKI YAHYA selaku Kepala Biro Keuangan. ;
- d. 1 (satu) lembar asli Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap No. 1333/SPP/SWD/BB/X/2006 tertanggal 3 Oktober 2006, yang ditanda tangani an. H. BUDIYONO selaku Pemegang Kas Setdaprov DKI Jakarta dan an. Drs. H. SYAUKI YAHYA selaku Kepala Biro Keuangan ;
- e. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Rincian Penggunaan Beban Tetap No. 120/SPP/2006 tertanggal 3 Oktober 2006 yang ditandatangani oleh an. BAHIR ROMSAH selaku Pemegang Kas Cabang dan an. JORNAL E. SIAHAAN selaku Kepala Biro Hukum ;
- f. 1 (satu) lembar asli Dokumen Faktur PT. SUEZ JAYA Nomor : 030/F/SR/06, yang ditanda tangani an. EDIWIRMAN TAHER selaku Direktur Utama PT. SUEZ JAYA ;
- g. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Barang (BAPB) Nomor : 06/BAPB/BH/VII/2006 tertanggal 6 Juli 2006, ditanda tangani oleh Panitia Pemeriksa Barang nomor urut 1 (satu) Ketua sampai dengan 5 (lima) anggota, an. EDIWIRMAN

Hal. 164 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAHER selaku Direktur Utama PT. SUEZ JAYA dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang ;

h. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 06/BAST/BH/VII/2006 tanggal 6 Juli 2006, yang ditanda tangani an. IRUSWANDI, SH selaku Pengurus Barang unit Biro Hukum, an. EDIWIRMAN TAHER selaku Direktur Utama PT. SUEZ JAYA dan mengetahui an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Serah Terima Barang ;

63. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Nomor : 396/A/077.922 tentang Pengadaan Perbaikan dan Pemeliharaan Billboard Penerangan Hukum Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta tanggal 19 Juni 2006 untuk CV. DUTA MANUNGGAL SEJATI ;
64. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Nomor : 366/A/077.922 tentang Pengadaan Buku Informasi Peraturan Perundang-undangan Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta tanggal 8 Juni 2006 untuk CV. INDAH RIZKI PRATAMA ;
65. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Nomor : 429/A/078.23 tentang Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) untuk penyuluhan Hukum terpadu Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta tanggal 19 Juli 2006 untuk CV. ANUGERAH KELUARGA ;
66. 1 (satu) bundel Perjanjian Pengadaan Jasa Konsultansi Sistem Komputerisasi Kepustakaan Hukum Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta antara Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta dengan CV. ANDIKA DARATAMA nomor : 738/A/077.92 tanggal 15 November 2006 ;
67. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran atas Pengadaan Jasa Konsultansi Sistem Komputerisasi Kepustakaan Hukum Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta antara Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta dengan PT. ANDIKA DARATAMA Nomor : 738/A/077.92 tanggal 15 November 2006, yang berisi antara lain :
 - a. 1 (satu) lembar asli Dokumen SPM Giro No : 00310452006 Tahun 2006 sebesar Rp. 164.751.408,- (seratus enam puluh empat juta tujuh ratus lima puluh satu ribu empat ratus delapan

Hal. 165 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kepada PT. ANDIKA DARATAMA sehubungan Kontrak Nomor. 738/A/077.92 tanggal 15 November 2006 ;

- b. 1 (satu) lembar asli Kwitansi PT. ANDIKA DARATAMA tertanggal 19 Desember 2006 sebesar Rp. 192.794.200,- (seratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus rupiah), yang ditandatangani diatas materai 6.000 an. WALDIYONO, SE selaku Direktur Utama PT. ANDIKA DARATAMA dan BAHIR ROMSAH selaku Pemegang Kas Cabang, serta terdapat stempel dan tanda tangan an. H. BUDIYONO selaku Pemegang Kas Setdaprov DKI Jakarta, dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum Prov. DKI Jakarta ;
- c. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 2625/SPP/SWD/BB/XII/2006 tertanggal 19 Desember 2006, yang ditanda tangani an. H. BUDIYONO selaku Pemegang Kas Setdaprov DKI Jakarta dan an. Drs. H. SYAUKI YAHYA selaku Kepala Biro Keuangan ;
- d. 1 (satu) lembar asli Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap No. 2625/SPP/SWD/BB/XII/2006 tertanggal 19 Desember 2006, yang ditanda tangani an. H. BUDIYONO selaku Pemegang Kas Setdaprov DKI Jakarta dan an. Drs. H. SYAUKI YAHYA selaku Kepala Biro Keuangan ;
- e. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Rincian Penggunaan Beban Tetap No. 194/SPP/2006 tertanggal 19 Desember 2006 yang ditandatangani oleh an. BAHIR ROMSAH selaku Pemegang Kas Cabang dan an. JORNAL E. SIAHAAN selaku Kepala Biro Hukum ;
- f. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Serah Bobot Volume Pekerjaan Pelaksanaan Rincian Kegiatan Sistem Komputerisasi tanggal 11 Desember 2006, yang ditanda tangani an. WALDIYONO, SE selaku Direktur Utama PT. ANDIKA DARATAMA dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 2 (dua) lembar asli lampiran Berita Acara Serah Terima Barang ;
- g. 2 (dua) lembar asli Dokumen Daftar Hadir Tenaga Ahli PT. ANDIKA DARATAMA Sistem Komputerisasi Kepustakaan Hukum, bulan November 2006, terdapat tanda tangan an.

Hal. 166 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WALDIYONO, SE selaku Direktur Utama PT. ANDIKA DARATAMA dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 2 (dua) lembar asli lampiran Berita Acara Serah Terima Barang ;

- h. 2 (dua) lembar asli Dokumen Daftar Hadir Tenaga Ahli PT. ANDIKA DARATAMA Sistem Komputerisasi Kepustakaan Hukum, bulan Desember 2006, terdapat tanda tangan an. WALDIYONO, SE selaku Direktur Utama PT. ANDIKA DARATAMA dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum ;
- i. 1 (satu) lembar Dokumen Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, tertanggal 11 Desember 2006, yang ditanda tangani an. WALDIYONO, SE selaku Direktur Utama PT. ANDIKA DARATAMA dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Bobot Kemajuan Pekerjaan ;
- j. 1 (satu) lembar asli Dokumen Invoice Nomor : 053/INV/AD/XII/2006 tertanggal Desember 2006 yang ditandatangani an. WALDIYONO, SE selaku Direktur Utama PT. ANDIKA DARATAMA ;
- k. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 48/BAST/BH/XII/2006 tanggal 12 Desember 2006, yang ditanda tangani an. IRUSWANDI, SH selaku Pengurus Barang unit Biro Hukum, an. WALDIYONO, SE selaku Direktur Utama PT. ANDIKA DARATAMA dan mengetahui an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Serah Terima Barang ;
- l. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Barang (BAPB) Nomor : 42/BAPB/BH/XII/2006 tertanggal 11 Desember 2006, ditanda tangani oleh Panitia Pemeriksa Barang nomor urut 1 (satu) Ketua sampai dengan 5 (lima) anggota, an. WALDIYONO, SE selaku Direktur Utama PT. ANDIKA DARATAMA dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang ;
- m. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Serah Terima Pengguna Barang Nomor : 48/BASTPB/BH/XII/2006, tertanggal

Hal. 167 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



13 Desember 2006, yang ditanda tangani oleh an. IRUSWANDI, SH selaku Pengurus Barang unit Biro Hukum, an. WALDIYONO, SE selaku Direktur Utama PT. ANDIKA DARATAMA dan mengetahui an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Serah Terima Pengguna Barang ;

68. 1 (satu) bundel Perjanjian Pengadaan Jasa Konsultansi Pengelolaan sarana dan Prasarana Perpustakaan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta antara Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta dengan CV. MENCISY BANGUN PERSADA nomor : 741/A/077.92 tanggal 20 November 2006 ;

69. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran atas Pengadaan Jasa Konsultansi Pengelolaan sarana dan Prasarana Perpustakaan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta antara Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta dengan CV. MENCISY BANGUN PERSADA nomor : 741/A/077.92 tanggal 20 November 2006, yang berisi antara lain :

a. 1 (satu) lembar asli Dokumen SPM Giro No : 00310662006 Tahun 2006 sebesar Rp. 113.875.909,- (seratus tiga belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus sembilan rupiah) kepada PT. MENCISY BANGUN PERSADA ;

b. 1 (satu) lembar asli Kwitansi PT. MENCISY BANGUN PERSADA tertanggal 19 Desember 2006 sebesar Rp. 135.420.000,- (seratus tiga puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu rupiah), yang ditandatangani diatas materai 6.000 an. CECEP SUTISNA selaku Direktur Utama PT. MENCISY BANGUN PERSADA dan BAHIR ROMSAH selaku Pemegang Kas Cabang, serta terdapat stempel dan tanda tangan an. H. BUDIYONO selaku Pemegang Kas Setdaprov DKI Jakarta, dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum Prov. DKI Jakarta ;

c. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 2648/SPP/SWD/BB/ /2006 tertanggal 19 Desember 2006, yang ditanda tangani an. H. BUDIYONO selaku Pemegang Kas Setdaprov DKI Jakarta dan an. Drs. H. SYAUKI YAHYA selaku Kepala Biro Keuangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) lembar asli Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap No. 2648/SPP/SWD/BB/XII/2006 tertanggal 19 Desember 2006, yang ditanda tangani an. H. BUDIYONO selaku Pemegang Kas Setdaprov DKI Jakarta dan an. Drs. H. SYAUKI YAHYA selaku Kepala Biro Keuangan ;
- e. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Rincian Penggunaan Beban Tetap No. 198/SPP/2006 tertanggal 19 Desember 2006 yang ditandatangani oleh an. BAHIR ROMSAH selaku Pemegang Kas Cabang dan an. JORNAL E. SIAHAAN selaku Kepala Biro Hukum ;
- e. 1 (satu) lembar asli dokumen Faktur PT. MENCISY BANGUN PERSADA yang ditanda tangani an. CECEP SUTISNA selaku Direktur Utama PT. MENCISY BANGUN PERSADA ;
- f. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Barang (BAPB) Nomor : 45/BAPB/BH/XII/2006 tertanggal 11 Desember 2006, ditanda tangani oleh Panitia Pemeriksa Barang nomor urut 1 (satu) Ketua sampai dengan 5 (lima) anggota, an. CECEP SUTISNA selaku Direktur Utama PT. MENCISY BANGUN PERSADA dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang ;
- g. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 48/BAST/BH/XII/2006 tanggal 12 Desember 2006, yang ditanda tangani an. IRUSWANDI, SH selaku Pengurus Barang unit Biro Hukum, an. CECEP SUTISNA selaku Direktur Utama PT. MENCISY BANGUN PERSADA dan mengetahui an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Serah Terima Barang ;
- h. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Serah Terima Pengguna Barang Nomor : 52/BASTPB/BH/XII/2006, tertanggal 13 Desember 2006, yang ditanda tangani oleh an. IRUSWANDI, SH selaku Pengurus Barang unit Biro Hukum, an. CECEP SUTISNA selaku Direktur Utama PT. MENCISY BANGUN PERSADA dan mengetahui an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Serah Terima Pengguna Barang ;

Hal. 169 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Hadir Tenaga Ahli, bulan Desember 2006, terdapat tanda tangan an. CECEP SUTISNA selaku Direktur Utama PT. MENCISY BANGUN PERSADA dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 2 (dua) lembar asli lampiran Berita Acara Serah Terima Barang ;
- j. 2 (dua) lembar asli Dokumen Berita Acara Bobot Pekerjaan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan kegiatan peningkatan Perpustakaan Hukum Nomor : 37/BABP/MBP/XII/2006, tertanggal 13 Desember 2006, yang ditanda tangani oleh an. CECEP SUTISNA selaku Direktur Utama PT. MENCISY BANGUN PERSADA dan mengetahui an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Serah Terima Pengguna Barang ;
- k. 2 (dua) lembar asli Dokumen Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan kegiatan peningkatan Perpustakaan Hukum Nomor : 38/BABP/MBP/XII/2006, tertanggal 13 Desember 2006, yang ditanda tangani oleh an. CECEP SUTISNA selaku Direktur Utama PT. MENCISY BANGUN PERSADA dan mengetahui an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Serah Terima Pengguna Barang ;
70. 1 (satu) bundel Perjanjian Pengadaan Jasa Konsultansi Penataan dan Pengelolaan Bahan Pustaka Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta antara Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta dengan CV. GALUH nomor : 743/A/077.92 tanggal 20 November 2006 ;
71. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran atas Pengadaan Jasa Konsultansi Penataan dan Pengelolaan Bahan Pustaka Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta antara Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta dengan CV. GALUH nomor : 743/A/077.92 tanggal 20 November 2006, yang berisi antara lain :
 - a. 1 (satu) lembar asli Dokumen SPM Giro No : 00307122006 tertanggal 23 Desember 2006 sebesar Rp. 113.067.000,-

Hal. 170 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus tiga belas juta enam puluh tujuh ribu rupiah) kepada CV. GALUH ;

- b. 1 (satu) lembar asli Kwitansi CV. GALUH tertanggal 19 Desember 2006 sebesar Rp. 133.067.000,- (seratus tiga puluh tiga juta enam puluh tujuh ribu rupiah), yang ditandatangani diatas materai 6.000 an. H. OMON SOEDARISMAN selaku Direktur CV. GALUH dan BAHIR ROMSAH selaku Pemegang Kas Cabang, serta terdapat stempel dan tanda tangan an. H. BUDIYONO selaku Pemegang Kas Setdaprov DKI Jakarta, dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum Prov. DKI Jakarta ;
- c. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 2624/SPP/SWD/BB/XII/2006 tertanggal 19 Desember 2006, yang ditanda tangani an. H. BUDIYONO selaku Pemegang Kas Setdaprov DKI Jakarta dan an. Drs. H. SYAUKI YAHYA selaku Kepala Biro Keuangan ;
- d. 1 (satu) lembar asli Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap No. 2624/SPP/SWD/BB/XII/2006 tertanggal 19 Desember 2006, yang ditanda tangani an. H. BUDIYONO selaku Pemegang Kas Setdaprov DKI Jakarta dan an. Drs. H. SYAUKI YAHYA selaku Kepala Biro Keuangan ;
- e. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Rincian Penggunaan Beban Tetap No. 197/SPP/2006 tertanggal 19 Desember 2006 yang ditandatangani oleh an. BAHIR ROMSAH selaku Pemegang Kas Cabang dan an. JORNAL E. SIAHAAN selaku Kepala Biro Hukum ;
- f. 1 (satu) lembar asli Dokumen Faktur CV. GALUH Nomor : 012/F/CG/XII/06 yang ditanda tangani an. H. OMON SOEDARISMAN selaku Direktur CV. GALUH ;
- g. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Barang (BAPB) Nomor : 43/BAPB/BH/XII/2006 tertanggal 11 Desember 2006, ditanda tangani oleh Panitia Pemeriksa Barang nomor urut 1 (satu) Ketua sampai dengan 5 (lima) anggota, an. H. OMON SOEDARISMAN selaku Direktur CV. GALUH dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang ;

Hal. 171 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : (tanpa nomor)/BAST/BH/XII/2006 tanggal 12 Desember 2006, yang ditanda tangani an. IRUSWANDI, SH selaku Pengurus Barang unit Biro Hukum, an. H. OMON SOEDARISMAN selaku Direktur CV. GALUH dan mengetahui an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Serah Terima Barang ;
- i. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Serah Terima Pengguna Barang Nomor : 43/BASTPB/BH/XII/2006, tertanggal 13 Desember 2006, yang ditanda tangani oleh an. IRUSWANDI, SH selaku Pengurus Barang unit Biro Hukum, an. H. OMON SOEDARISMAN selaku Direktur CV. GALUH dan mengetahui an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Serah Terima Pengguna Barang ;
- j. 2 (dua) lembar asli Dokumen Berita Acara Bobot Pekerjaan Penataan dan Pengelolaan bahan dan Pustaka Hukum Peraturan Perundang-undangan kegiatan peningkatan Perpustakaan Hukum Nomor : 009/B/CG/XII/2006, tertanggal 13 Desember 2006, yang ditanda tangani oleh an. H. OMON SOEDARISMAN selaku Direktur CV. GALUH dan mengetahui an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Serah Terima Pengguna Barang ;
- k. 2 (dua) lembar asli Dokumen Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Penataan dan Pengelolaan bahan dan Pustaka Hukum Peraturan Perundang-undangan kegiatan peningkatan Perpustakaan Hukum Nomor : 009/B/CG/XII/2006, tertanggal 13 Desember 2006, yang ditanda tangani oleh an. H. OMON SOEDARISMAN selaku Direktur CV. GALUH dan mengetahui an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Serah Terima Pengguna Barang ;
- l. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Hadir Tenaga Ahli, bulan Desember 2006, terdapat tanda tangan an. H. OMON SOEDARISMAN selaku Direktur CV. GALUH dan an. JORNAL

Hal. 172 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 2 (dua) lembar asli lampiran Berita Acara Serah Terima Barang ;

72. 1 (satu) bundel Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Souvenir Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta nomor 03/072 tanggal 8 Desember 2006 antara Biro Hukum Sekdaprov DKI Jakarta dengan PT. ARDIYAN PUSPITA HATIGRAHA ;
73. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran atas Pengadaan Souvenir Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta nomor 12.1/-1.712.35 tanggal 8 Desember 2006 antara Biro Hukum Sekdaprov DKI Jakarta dengan PT. ARDIYAN PUSPITA HATIGRAHA, yang antara lain berisi:
 - a. 1 (satu) lembar asli Dokumen SPM Giro No : 00306842006 tertanggal 23 Desember 2006 sebesar Rp. 83.429.500,- (delapan puluh tiga juta empat ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) kepada PT. ARDIYAN PUSPITA HATIGRAHA;
 - b. 1 (satu) lembar asli Kwitansi PT. ARDIYAN PUSPITA HATIGRAHA tertanggal 18 Desember 2006 sebesar Rp. 93.170.000,- (sembilan puluh tiga juta seratus tujuh puluh ribu rupiah), yang ditandatangani diatas materei 6.000 an. LARDI selaku Direktur PT. ARDIYAN PUSPITA HATIGRAHA dan an. H. BUDIYONO selaku Pemegang Kas Setdaprov DKI Jakarta, terdapat stempel dan tandatangan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum Prov. DKI Jakarta ;
 - c. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 2563/SPP/SWD/BB/XII/2006 tertanggal 18 Desember 2006, yang ditanda tangani an. H. BUDIYONO selaku Pemegang Kas Setdaprov DKI Jakarta dan an. Drs. H. SYAUKI YAHYA selaku Kepala Biro Keuangan ;
 - d. 1 (satu) lembar asli Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap No. 2563/SPP/SWD/BB/XII/2006 tertanggal 18 Desember 2006, yang ditanda tangani an. H. BUDIYONO selaku Pemegang Kas Setdaprov DKI Jakarta dan an. Drs. H. SYAUKI YAHYA selaku Kepala Biro Keuangan ;
 - e. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Rincian Penggunaan Beban Tetap No. 182/SPP/2006 tertanggal 18 Desember 2006 yang ditandatangani oleh an. BAHIR ROMSAH selaku Pemegang Kas

Hal. 173 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang dan an. JORNAL E. SIAHAAN selaku Kepala Biro Hukum ;

- f. 1 (satu) lembar asli Dokumen Faktur PT. ARDIYAN PUSPITA HATIGRAHA Nomor : 044/FB – APH/XII/2006 tertanggal 12 Desember 2006 yang ditanda tangani an. LARDI selaku Direktur PT. ARDIYAN PUSPITA HATIGRAHA dan an. IRUSWANDI, SH selaku Pengurus Barang unit Biro Hukum ;
- g. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 47/BAST/BH/XII/2006 tanggal 13 Desember 2006, yang ditanda tangani an. IRUSWANDI, SH selaku Pengurus Barang unit Biro Hukum, an. LARDI selaku Direktur PT. ARDIYAN PUSPITA HATIGRAHA dan mengetahui an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Serah Terima Barang ;
- h. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Barang (BAPB) Nomor : 52/BAPB/BH/XII/2006 tertanggal 12 Desember 2006, ditanda tangani oleh Panitia Pemeriksa Barang nomor urut 1 (satu) Ketua sampai dengan 5 (lima) anggota, an. LARDI selaku Direktur PT. ARDIYAN PUSPITA HATIGRAHA dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang ;
- 74. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Nomor : 667/A/077.92 Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta dengan CV. DOMPU JAYA tanggal 12 Oktober 2006;
- 75. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Nomor : 701/077.92 Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta dengan PT. LAUTAN PRAPTA RAYA tanggal 1 November 2006 ;
- 76. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran atas Surat Perintah Kerja Nomor : 701/077.92 Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta dengan PT. LAUTAN PRAPTA RAYA tanggal 1 November 2006, yang berisi antara lain :
 - a. 1 (satu) lembar asli Dokumen SPM Giro No : 00304192006 Tahun 2006 sebesar Rp. 104.086.920,- (seratus empat juta delapan puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) kepada PT. LAUTAN PRAPTA RAYA ;

Hal. 174 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar asli Kwitansi PT. LAUTAN PRAPTA RAYA tertanggal 7 Desember 2006 sebesar Rp. 116.239.200,- (seratus enam belas juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus rupiah), yang ditandatangani diatas materai 6.000 an. ARIFIN SIRAIT selaku Direktur PT. LAUTAN PRAPTA RAYA dan an. H. BUDIYONO selaku Pemegang Kas Setdaprov DKI Jakarta, terdapat stempel dan tandatangan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum Prov. DKI Jakarta ;
- c. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 2559/SPP/SWD/BB/XII/2006 tertanggal 18 Desember 2006, yang ditanda tangani an. H. BUDIYONO selaku Pemegang Kas Setdaprov DKI Jakarta dan an. Drs. H. SYAUKI YAHYA selaku Kepala Biro Keuangan ;
- d. 1 (satu) lembar asli Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap No. 2559/SPP/SWD/BB/XII/2006 tertanggal 18 Desember 2006, yang ditanda tangani an. H. BUDIYONO selaku Pemegang Kas Setdaprov DKI Jakarta dan an. Drs. H. SYAUKI YAHYA selaku Kepala Biro Keuangan ;
- e. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Rincian Penggunaan Beban Tetap No. 190/SPP/2006 tertanggal 18 Desember 2006 yang ditandatangani oleh an. BAHIR ROMSAH selaku Pemegang Kas Cabang dan an. JORNAL E. SIAHAAN selaku Kepala Biro Hukum ;
- f. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Barang (BAPB) Nomor : 48/BAPB/BH/XII/2006 tertanggal 4 Desember 2006, ditanda tangani oleh Panitia Pemeriksa Barang nomor urut 1 (satu) Ketua sampai dengan 5 (lima) anggota, an. ARIFIN SIRAIT selaku Direktur PT. LAUTAN PRAPTA RAYA dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang ;
- g. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 43/BAST/BH/XII/2006 tanggal 4 Desember 2006, yang ditanda tangani an. IRUSWANDI, SH selaku Pengurus Barang unit Biro Hukum, an. ARIFIN SIRAIT selaku Direktur PT. LAUTAN PRAPTA RAYA dan mengetahui an. JORNAL E.

Hal. 175 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Serah Terima Barang ;

77. 1 (satu) bundel Perjanjian Pengadaan Konsumsi Dalam Rangka Peningkatan Temu Wicara Debat Hukum Dengan Generasi Muda Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov. DKI Jakarta antara Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta dengan PT. MEGA COPILAS nomor 699/077.92 tanggal 1 November 2006 ;
78. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran atas Pengadaan Konsumsi Dalam Rangka Peningkatan Temu Wicara Debat Hukum Dengan Generasi Muda Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov. DKI Jakarta antara Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta dengan PT. MEGA COPILAS nomor 699/077.92 tanggal 1 November 2006, yang berisi antara lain :
 - a. 1 (satu) lembar asli Dokumen SPM Giro No : 00310982006 Tahun 2006 sebesar Rp. 139.929.592,- (seratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah) kepada PT. MEGA COPILAS sehubungan Kontrak Nomor. 699/077.92, tanggal 1 November 2006 ;
 - b. 1 (satu) lembar asli Kwitansi PT. MEGA COPILAS tertanggal 5 Desember 2006 sebesar Rp. 156.266.550,- (seratus lima puluh enam juta dua ratus enam puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah), yang ditandatangani diatas materai 6.000 an. ROMALDA VILLANI selaku Direktur PT. MEGA COPILAS dan an. H. BUDIYONO selaku Pemegang Kas Setdaprov DKI Jakarta, terdapat stempel dan tandatangan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum Prov. DKI Jakarta ;
 - c. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 2562/SPP/SWD/BB/XII/2006 tertanggal 18 Desember 2006, yang ditanda tangani an. H. BUDIYONO selaku Pemegang Kas Setdaprov DKI Jakarta dan an. Drs. H. SYAUKI YAHYA selaku Kepala Biro Keuangan ;
 - d. 1 (satu) lembar asli Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap No. 2562/SPP/SWD/BB/XII/2006 tertanggal 18 Desember 2006, yang ditanda tangani an. H. BUDIYONO selaku Pemegang Kas Setdaprov DKI Jakarta dan an. Drs. H. SYAUKI YAHYA selaku Kepala Biro Keuangan ;

Hal. 176 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Rincian Penggunaan Beban Tetap No. 185/SPP/2006 tertanggal 18 Desember 2006 yang ditandatangani oleh an. BAHIR ROMSAH selaku Pemegang Kas Cabang dan an. JORNAL E. SIAHAAN selaku Kepala Biro Hukum ;
- f. 1 (satu) lembar asli Dokumen Faktur Nomor : 031/FB/MC/XII/2006 tertanggal 7 Desember 2006 yang ditandatangani an. ROMALDA VILLANI selaku Direktur PT. MEGA COPILAS dan an. IRUSWANDI, SH, Mkn selaku Pengurus Barang Unit Biro Hukum ;
- h. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 34/BAST/BH/XII/2006 tanggal 7 Desember 2006, yang ditanda tangani an. IRUSWANDI, SH selaku Pengurus Barang unit Biro Hukum, an. ROMALDA VILLANI selaku Direktur PT. MEGA COPILAS dan mengetahui an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 2 (dua) lembar asli lampiran Berita Acara Serah Terima Barang ;
- i. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Barang (BAPB) Nomor : 37/BAPB/BH/XII/2006 tertanggal 7 Desember 2006, ditanda tangani oleh Panitia Pemeriksa Barang nomor urut 1 (satu) Ketua sampai dengan 5 (lima) anggota, an. ROMALDA VILLANI selaku Direktur PT. MEGA COPILAS dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 2 (dua) lembar asli lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang ;
- 79. 1 (satu) bundel Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) Dalam Rangka Kegiatan Kampanye Kesadaran Hukum Mahasiswa Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta nomor 694/A/077.92 tanggal 13 Oktober 2006 antara Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta dengan PT. PANCAIGUH PRATIKELTAMA ;
- 80. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran atas Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) Dalam Rangka Kegiatan Kampanye Kesadaran Hukum Mahasiswa Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta nomor 694/A/077.92 tanggal 13 Oktober 2006 antara Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta dengan PT. PANCAIGUH PRATIKELTAMA, yang berisi antara lain :
 - a. 1 (satu) lembar asli Dokumen SPM Giro No : 00310142006 Tahun 2006 sebesar Rp. 57.373.787,- (lima puluh tujuh juta tiga

Hal. 177 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus delapan rupiah) kepada PT. PANCAIGUH PRATIKELTAMA ;

- b. 1 (satu) lembar asli Kwitansi PT. PANCAIGUH PRATIKELTAMA tertanggal 5 Desember 2006 sebesar Rp. 64.027.250,- (enam puluh empat juta dua puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah), yang ditandatangani diatas materei 6.000 an. TIPUK PUJI LESTARI selaku Direktur PT. PANCAIGUH PRATIKELTAMA dan an. H. BUDIYONO selaku Pemegang Kas Setdaprov DKI Jakarta, terdapat stempel dan tandatangan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum Prov. DKI Jakarta ;
- c. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 2560/SPP/SWD/BB/XII/2006 tertanggal 18 Desember 2006, yang ditanda tangani an. H. BUDIYONO selaku Pemegang Kas Setdaprov DKI Jakarta dan an. Drs. H. SYAUKI YAHYA selaku Kepala Biro Keuangan ;
- d. 1 (satu) lembar asli Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap No. 2560/SPP/SWD/BB/XII/2006 tertanggal 18 Desember 2006, yang ditanda tangani an. H. BUDIYONO selaku Pemegang Kas Setdaprov DKI Jakarta dan an. Drs. H. SYAUKI YAHYA selaku Kepala Biro Keuangan ;
- e. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Rincian Penggunaan Beban Tetap No. 183/SPP/2006 tertanggal 18 Desember 2006 yang ditandatangani oleh an. BAHIR ROMSAH selaku Pemegang Kas Cabang dan an. JORNAL E. SIAHAAN selaku Kepala Biro Hukum ;
- f. 1 (satu) lembar asli Dokumen Faktur Nomor : 036/FB/PP/XII/2006 tertanggal 5 Desember 2006 yang ditandatangani an. TIPUK PUJI LESTARI selaku Direktur PT. PANCAIGUH PRATIKELTAMA dan an. IRUSWANDI, SH, Mkn selaku Pengurus Barang Unit Biro Hukum ;
- g. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 35/BAST/BH/XII/2006 tanggal 5 Desember 2006, yang ditanda tangani an. IRUSWANDI, SH selaku Pengurus Barang unit Biro Hukum, an. TIPUK PUJI LESTARI selaku Direktur PT. PANCAIGUH PRATIKELTAMA dan mengetahui an. JORNAL E.

Hal. 178 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Serah Terima Barang ;

- h. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Barang (BAPB) Nomor : 32/BAPB/BH/XII/2006 tertanggal 4 Desember 2006, ditanda tangani oleh Panitia Periksa Barang nomor urut 1 (satu) Ketua sampai dengan 5 (lima) anggota, an. TIPUK PUJI LESTARI selaku Direktur PT. PANCAIGUH PRATIKELTAMA dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang ;

81. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Nomor : 630/A/077.92 tentang Pengadaan Drafting Film 05 dan Back Droop Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta tanggal 29 September 2006 untuk CV. DIMAS EKA PRATAMA ;
82. 1 (satu) bundel Perjanjian Pengadaan Konsumsi Dalam Rangka Pelaksanaan Kampanye Kesadaran Hukum Pelajat Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov. DKI Jakarta antara Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta dengan CV. KARYA CIPTA MANDIRI nomor 01/072 tanggal 15 September 2006 ;
83. 1 (satu) bundel Dokumen pembayaran atas Pengadaan Konsumsi Dalam Rangka Pelaksanaan Kampanye Kesadaran Hukum Pelajat Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov. DKI Jakarta antara Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta dengan CV. KARYA CIPTA MANDIRI nomor 01/072 tanggal 15 September 2006, yang berisi antara lain :
- a. 1 (satu) lembar asli Dokumen SPM Giro No : 00300792006 tertanggal 21 Desember 2006 sebesar Rp. 243.184.680,- (dua ratus empat puluh tiga juta seratus delapan puluh empat ribu enam ratus delapan puluh rupiah) kepada CV. KARYA CIPTA MANDIRI ;
- b. 1 (satu) lembar asli Kwitansi CV. KARYA CIPTA MANDIRI tertanggal 11 Desember 2006 sebesar Rp. 271.576.800,- (dua ratus tujuh puluh satu juta lima ratus tujuh enam ribu delapan ratus rupiah), yang ditandatangani diatas materei 6.000 an. MUHAMMAD HABRI selaku Direktur CV. KARYA CIPTA MANDIRI dan an. H. BUDIYONO selaku Pemegang Kas Setdaprov DKI Jakarta, terdapat stempel dan tandatangan an.

Hal. 179 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum Prov. DKI Jakarta ;

- c. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 2304/SPP/SWD/BB/XII/2006 tertanggal 11 Desember 2006, yang ditanda tangani an. H. BUDIYONO selaku Pemegang Kas Setdaprov DKI Jakarta dan an. Drs. H. SYAUKI YAHYA selaku Kepala Biro Keuangan ;
- d. 1 (satu) lembar asli Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap No. 2340/SPP/SWD/BB/XII/2006 tertanggal 11 Desember 2006, yang ditanda tangani an. H. BUDIYONO selaku Pemegang Kas Setdaprov DKI Jakarta dan an. Drs. H. SYAUKI YAHYA selaku Kepala Biro Keuangan ;
- e. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Rincian Penggunaan Beban Tetap No. 172/SPP/2006 tertanggal 11 Desember 2006 yang ditandatangani oleh an. BAHIR ROMSAH selaku Pemegang Kas Cabang dan an. JORNAL E. SIAHAAN selaku Kepala Biro Hukum ;
- f. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Barang (BAPB) Nomor : 23/BAPB/BH/XII/2006 tertanggal 8 Desember 2006, ditanda tangani oleh Panitia Pemeriksa Barang nomor urut 1 (satu) Ketua sampai dengan 5 (lima) anggota, an. MUHAMMAD HABRI selaku pimpinan CV. KARYA CIPTA MANDIRI dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang ;
- g. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 27/BAST/BH/XII/2006 tanggal 8 Desember 2006, yang ditanda tangani an. IRUSWANDI, SH selaku Pengurus Barang unit Biro Hukum, an. MUHAMMAD HABRI selaku pimpinan CV. KARYA CIPTA MANDIRI dan mengetahui an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Serah Terima Barang ;
- h. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Serah Terima Pengguna Barang Nomor : 27/BASTPB/BH/XII/2006 tanggal 8 Desember 2006, yang ditanda tangani an. IRUSWANDI, SH selaku Pengurus Barang unit Biro Hukum, an. MUHAMMAD HABRI selaku pimpinan CV. KARYA CIPTA MANDIRI dan

Hal. 180 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Serah Terima Barang ;

84. 1 (satu) bundel Perjanjian Alat Tulis Kantor (ATK) Dalam rangka Peningkatan Temu Wicara Debat Hukum Dengan Generasi Muda Kebutuhan Biro Hukum Serdaprov DKI Jakarta antara Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta dengan CV. REZKY UTAMA nomor 693/077.92 tanggal 1 November 2006 ;
85. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) Dalam rangka Peningkatan Temu Wicara Debat Hukum Dengan Generasi Muda Kebutuhan Biro Hukum Serdaprov DKI Jakarta antara Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta dengan CV. REZKY UTAMA nomor 693/077.92 tanggal 1 November 2006, yang berisi antara lain :
 - a. 1 (satu) lembar asli Dokumen SPM Giro No : 00252512006 Tahun 2006 sebesar Rp. 147.429.875,- (seratus empat puluh tujuh juta empat ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) kepada CV. REZKY UTAMA sehubungan Kontrak Nomor. 693/077.92, tanggal 1 November 2006 ;
 - b. 1 (satu) lembar asli Kwitansi CV. REZKY UTAMA tertanggal 4 Desember 2006 sebesar Rp. 164.642.500,- (seratus enam puluh empat juta enam ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah), yang ditandatangani diatas materai 6.000 an. MARINCE NAINGGOLAN selaku Direktur dan an. BAHIR ROMSAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum DKI Jakarta, terdapat stempel dan tandatangan an. JORNAL E. SIAHAAN, Sh, Msi selaku Kepala Biro Hukum Prov. DKI Jakarta ;
 - c. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 2047/SPP/SWD/BB/XII/2006 tertanggal 4 Desember 2006, yang ditanda tangani an. H. BUDIYONO selaku Pemegang Kas Setdaprov DKI Jakarta dan an. Drs. H. SYAUKI YAHYA selaku Kepala Biro Keuangan ;
 - d. 1 (satu) lembar asli Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap No. 2047/SPP/SWD/BB/XII/2006 tertanggal 4 Desember 2006, yang ditanda tangani an. H. BUDIYONO selaku

Hal. 181 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang Kas Setdaprov DKI Jakarta dan an. Drs. H. SYAUKI YAHYA selaku Kepala Biro Keuangan ;

- e. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Rincian Penggunaan Beban Tetap No. 130/SPP/2006 tertanggal 4 Desember 2006 yang ditandatangani oleh an. BAHIR ROMSAH selaku Pemegang Kas Cabang dan an. JORNAL E. SIAHAAN selaku Kepala Biro Hukum ;
 - f. 1 (satu) lembar asli Dokumen Faktur Nomor : 025/FB/RU/XI/2006 tertanggal 21 November 2006 yang ditandatangani an. MARINCE NAINGGOLAN selaku Direktur CV. REZKY UTAMA dan an. IRUSWANDI, SH, Mkn selaku Pengurus Barang Unit Biro Hukum ;
 - g. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Barang (BAPB) Nomor : 33/BAPB/BH/XI/2006 tertanggal 20 November 2006, ditanda tangani oleh Panitia Pemeriksa Barang nomor urut 1 (satu) Ketua sampai dengan 5 (lima) anggota, an. MARINCE NAINGGOLAN selaku Direktur CV. REZKY UTAMA dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 2 (dua) lembar asli lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang ;
 - h. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 28/BAST/BH/XI/2006 tanggal 21 November 2006, yang ditanda tangani an. IRUSWANDI, SH selaku Pengurus Barang unit Biro Hukum, an. MARINCE NAINGGOLAN selaku Direktur CV. REZKY UTAMA dan mengetahui an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Serah Terima Barang ;
86. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Nomor : 467/A/078.23 tentang Pengadaan Cetakan Booklet Materi Kampanye Hukum Pelajar Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta tanggal 19 Juli 2006 untuk CV. FLORISTA REKANINDO ;
87. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran atas Surat Perintah Kerja Nomor : 467/A/078.23 tentang Pengadaan Cetakan Booklet Materi Kampanye Hukum Pelajar Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta tanggal 19 Juli 2006 untuk CV. FLORISTA REKANINDO, yang berisi antara lain :

Hal. 182 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar asli Dokumen SPM Giro No : 00205402006 tanggal 6 November 2006 sebesar Rp. 32.308.000,- (tiga puluh dua juta tiga ratus delapan ribu rupiah) kepada CV. FLORISTA REKANINDO ;
- b. 1 (satu) lembar asli Kwitansi CV. FLORISTA REKANINDO tertanggal 2 November 2006 sebesar Rp. 36.080.000,- (tiga puluh enam juta delapan puluh ribu rupiah), yang ditandatangani diatas materai 6.000 an. NURLAILA selaku Pimpinan CV. FLORISTA REKANINDO dan an. BAHIR ROMSAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum DKI Jakarta, terdapat stempel dan tandatangan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, MSi selaku Kepala Biro Hukum Prov. DKI Jakarta ;
- c. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 1596/SPP/SWD/BB/XI/2006 tertanggal 3 November 2006, yang ditanda tangani an. H. BUDIYONO selaku Pemegang Kas Setdaprov DKI Jakarta dan an. Drs. H. SYAUKI YAHYA selaku Kepala Biro Keuangan ;
- d. 1 (satu) lembar asli Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap No. 1596/SPP/SWD/BB/XI/2006 tertanggal 3 November 2006, yang ditanda tangani an. H. BUDIYONO selaku Pemegang Kas Setdaprov DKI Jakarta dan an. Drs. H. SYAUKI YAHYA selaku Kepala Biro Keuangan ;
- e. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Rincian Penggunaan Beban Tetap No. 125/SPP/2006 tertanggal 3 November 2006 yang ditandatangani oleh an. BAHIR ROMSAH selaku Pemegang Kas Cabang dan an. JORNAL E. SIAHAAN selaku Kepala Biro Hukum ;
- f. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Barang (BAPB) Nomor : 14/BAPB/BH/VIII/2006 tertanggal 16 Agustus 2006, ditanda tangani oleh Panitia Pemeriksa Barang nomor urut 1 (satu) Ketua sampai dengan 5 (lima) anggota, an. NURLAILA selaku Pimpinan CV. FLORISTA REKANINDO dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang ;
- g. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 13/BAST/BH/VIII/2006 tanggal 16 Agustus 2006, yang ditanda tangani an. IRUSWANDI, SH selaku Pengurus Barang

Hal. 183 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Biro Hukum, an. NURLAILA selaku Pimpinan CV. FLORISTA REKANINDO dan mengetahui an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Serah Terima Barang ;

h. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Serah Terima Pengguna Barang Nomor : 13/BASTPB/BH/VIII/2006 tanggal 16 Agustus 2006, yang ditanda tangani an. IRUSWANDI, SH selaku Pengurus Barang unit Biro Hukum, an. AGUSDIN SUSANTO, SH selaku Kabag Bantuan Hukum dan mengetahui an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Serah Terima Pengguna Barang ;

88. 1 (satu) bundel Perjanjian Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) dalam rangka Peningkatan Kesadaran Hukum Bagi Warga Komunitas Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov.DKI Jakarta antara Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta dengan CV. DHARMA HUTAMA KARYA nomor 691/077.92 tanggal 1 November 2006 ;

89. 1 (satu) bundel Dokumen pembayaran Pengadaan alat Tulis Kantor (ATK) Dalam rangka Peningkatan Kesadaran Hukum Bagi Warga Komunitas Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov.DKI Jakarta antara Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta dengan CV. DHARMA HUTAMA KARYA nomor 691/077.92 tanggal 1 November 2006, yang berisi antara lain :

a. 1 (satu) lembar asli Dokumen SPM Giro No : 00310152006 Tahun 2006 sebesar Rp. 107.011.744,- (seratus tujuh juta sebelas ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah) kepada CV. DHARMA HUTAMA KARYA sehubungan Kontrak Nomor. 691/077.92, tanggal 1 November 2006 ;

b. 1 (satu) lembar asli Kwitansi CV. DHARMA HUTAMA KARYA tertanggal 7 Desember 2006 sebesar Rp. 107.011.744,- (seratus tujuh juta sebelas ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah), yang ditandatangani diatas meterei 6.000 an. HANAFI H. HAMID selaku Direktur dan an. BAHIR ROMSAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum DKI Jakarta, terdapat stempel dan tandatangan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum Prov. DKI Jakarta ;

Hal. 184 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 2561/SPP/SWD/BB/XII/2006 tertanggal 18 Desember 2006, yang ditanda tangani an. H. BUDIYONO selaku

Hal.599 Putusan Tipikor
No.19/Pid.B/TPK/2010/PN.Jkt.Pst

Pemegang Kas Setdaprov DKI Jakarta dan an. Drs. H. SYAUKI YAHYA selaku Kepala Biro Keuangan ;

- d. 1 (satu) lembar asli Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap No. 2561/SPP/SWD/BB/XII/2006 tertanggal 18 Desember 2006, yang ditanda tangani an. H. BUDIYONO selaku Pemegang Kas Setdaprov DKI Jakarta dan an. Drs. H. SYAUKI YAHYA selaku Kepala Biro Keuangan ;
- e. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Rincian Penggunaan Beban Tetap No. 189/SPP/2006 tertanggal 18 Desember 2006 yang ditandatangani oleh an. BAHIR ROMSAH selaku Pemegang Kas Cabang dan an. JORNAL E. SIAHAAN selaku Kepala Biro Hukum ;
- f. 1 (satu) lembar asli dokumen Faktur Nomor : 022/F/BHK/XI/06 tertanggal 27 November 2006 yang ditandatangani an. HANAFI H. HAMID selaku Direktur CV. DHARMA HUTAMA KARYA ;
- g. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Barang (BAPB) Nomor : 50/BAPB/BH/XII/2006 tertanggal 27 November 2006, ditanda tangani oleh Panitia Pemeriksa Barang nomor urut 1 (satu) Ketua sampai dengan 5 (lima) anggota, an. HANAFI H. HAMID selaku Direktur CV. DHARMA HUTAMA KARYA dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang ;
- h. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 40/BAST/BH/XI/2006 tanggal 28 November 2006, yang ditanda tangani an. IRUSWANDI, SH selaku Pengurus Barang unit Biro Hukum, an. HANAFI H. HAMID selaku Direktur CV. DHARMA HUTAMA KARYA dan mengetahui an. JORNAL E.

Hal. 185 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Serah Terima Barang ;

90. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Nomor : 607/A/077.92 tentang Pengadaan Konsumsi Dalam Rangka Kegiatan Kampanye Kesadaran Hukum Mahasiswa Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta TA.2006 antara Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta dengan CV. TAMADO JAYA tanggal 29 September 2006 ;
91. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran atas Surat Perintah Kerja Nomor : 607/A/077.92 tentang Pengadaan Konsumsi Dalam Rangka Kegiatan Kampanye Kesadaran Hukum Mahasiswa Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta TA.2006 antara Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta dengan CV. TAMADO JAYA tanggal 29 September 2006, yang berisi antara lain :
 - a. 1 (satu) lembar asli Dokumen SPM Giro No : 00322622006 Tahun 2006 sebesar Rp. 43.093.750,- (empat puluh tiga juta sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) kepada CV. TAMADO JAYA sehubungan Surat Perintah Kerja nomor 607/A/077.92, tanggal 29 September 2006 ;
 - b. 1 (satu) lembar asli Kwitansi CV. TAMADO JAYA sebesar Rp. 48.125.000,- (empat puluh delapan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), yang ditandatangani diatas materei 6.000 an. Drs. SAUT SINAGA selaku Direktur dan an. BAHIR ROMSAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum DKI Jakarta, terdapat stempel dan tandatangan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum Prov. DKI Jakarta ;
 - c. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 2554/SPP/SWD/BB/...../2006 tertanggal 18 Desember 2006, yang ditanda tangani an. H. BUDIYONO selaku Pemegang Kas Setdaprov DKI Jakarta dan an. Drs. H. SYAUKI YAHYA selaku Kepala Biro Keuangan ;
 - d. 1 (satu) lembar asli Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap No. 2554/SPP/SWD/BB/..... /2006 tertanggal 18 Desember 2006, yang ditanda tangani an. H. BUDIYONO selaku Pemegang Kas Setdaprov DKI Jakarta dan an. Drs. H. SYAUKI YAHYA selaku Kepala Biro Keuangan ;
 - e. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Rincian Penggunaan Beban Tetap No. 184/SPP/2006 tertanggal 18 Desember 2006 yang

Hal. 186 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh an. BAHIR ROMSAH selaku Pemegang Kas Cabang dan an. JORNAL E. SIAHAAN selaku Kepala Biro Hukum ;

f. 1 (satu) lembar asli Dokumen Faktur Nomor : 031/FB/TJ/XI/2006 tertanggal 23 November 2006 yang ditandatangani an. Drs. SAUT SINAGA selaku Direktur CV. TAMADO JAYA dan an. IRUSWANDI, SH, Mkn selaku Pengurus Barang Unit Biro Hukum ;

g. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 32/BAST/BH/XII/2006 tanggal 23 November 2006, yang ditanda tangani an. IRUSWANDI, SH selaku Pengurus Barang unit Biro Hukum, an. Drs. SAUT SINAGA selaku Direktur CV. TAMADO JAYA dan mengetahui an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 2 (dua) lembar asli lampiran Berita Acara Serah Terima Barang ;

h. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Barang (BAPB) Nomor : 36/BAPB/BH/XI/2006 tertanggal 22 November 2006, ditanda tangani oleh Panitia Pemeriksa Barang nomor urut 1 (satu)

Ketua sampai dengan 5 (lima) anggota, an. HANAFI H. HAMID selaku Direktur CV. DHARMA HUTAMA KARYA dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 2 (dua) lembar asli lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang ;

92. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Nomor : 669/A/077.92 Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta dengan CV. IXORA EXSITING tanggal 12 Oktober 2006 ;

93. 1 (satu) bundel Dokumen Perjanjian Pengadaan Komputer dan Sarana Penunjang Kebutuhan Biro Hukum Setda Prov. DKI Jakarta antara Biro Hukum Setda Prov. DKI Jakarta dengan PT. SUMBER SARANA INFORMATIKA Nomor : 688/A/077.014 tertanggal 1 Nopember 2006 ;

94. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran atas Pengadaan Komputer dan sarana penunjang kebutuhan Biro Hukum Setda Prov. DKI Jakarta antara Biro Hukum Setda Prov. DKI Jakarta dengan PT. SUMBER SARANA INFORMATIKA Nomor : 688/A/077.014 tertanggal 1 Nopember 2006, yang berisi antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar asli Dokumen SPM Giro No : 00309572006 Tahun 2006 sebesar Rp. 106.222.400,- (seratus enam juta dua ratus dua puluh dua ribu empat ratus rupiah) kepada PT. SUMBER SARANA INFORMATIKA sehubungan Kontrak Nomor. 688/A/077.014, tanggal 1 November 2006 ;
- b. 1 (satu) lembar asli Kwitansi PT. SUMBER SARANA INFORMATIKA tertanggal 18 Desember 2006 sebesar Rp. 118.624.000,- (seratus delapan belas juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah), yang ditandatangani diatas materai 6.000 an. RIKO ROBERT M.H selaku Direktur PT. SUMBER SARANA INFORMATIKA dan an. BAHIR ROMSAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum DKI Jakarta, terdapat stempel dan tandatangan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, MSI selaku Kepala Biro Hukum Prov. DKI Jakarta ;
- c. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 2555/SPP/SWD/BB/XII/2006 tertanggal 18 Desember 2006, yang ditanda tangani an. H. BUDIYONO selaku Pemegang Kas Setdaprov DKI Jakarta dan an. Drs. H. SYAUKI YAHYA selaku Kepala Biro Keuangan ;
- d. 1 (satu) lembar asli Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap No. 2555/SPP/SWD/BB/XII/2006 tertanggal 18 Desember 2006, yang ditanda tangani an. H. BUDIYONO selaku Pemegang Kas Setdaprov DKI Jakarta dan an. Drs. H. SYAUKI YAHYA selaku Kepala Biro Keuangan ;
- e. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Rincian Penggunaan Beban Tetap No. 181/SPP/2006 tertanggal 18 Desember 2006 yang ditandatangani oleh an. BAHIR ROMSAH selaku Pemegang Kas Cabang dan an. JORNAL E. SIAHAAN selaku Kepala Biro Hukum ;
- f. 1 (satu) lembar asli Dokumen Faktur Nomor : 066/FT/SSI/XII/2006 tertanggal Desember 2006 yang ditandatangani an. RIKO ROBERT M.H selaku Direktur PT. SUMBER SARANA INFORMATIKA ;
- g. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Barang (BAPB) Nomor : 38/BAPB/BH/XI/2006 tertanggal 27 November 2006, ditanda tangani oleh Panitia Pemeriksa Barang nomor urut 1 (satu) Ketua sampai dengan 5 (lima) anggota, an. RIKO

Hal. 188 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROBERT M. HUTAURUK selaku Direktur PT. SUMBER SARANA INFORMATIKA dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang

h. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 46/BAST/BH/XI/2006 tanggal 28 November 2006, yang ditanda tangani an. IRUSWANDI, SH selaku Pengurus Barang unit Biro Hukum, an. RIKO ROBERT M. HUTAURUK selaku Direktur PT. SUMBER SARANA INFORMATIKA dan mengetahui an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Serah Terima Barang ;

95. 1 (satu) bundel Dokumen Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Peralatan Studio Visual Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta Nomor : 697/A/077.92 tertanggal 13 Oktober 2006, untuk PT. HOMBUTMAS;

96. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran atas Pengadaan Peralatan Studio Visual kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta Nomor : 697/A/077.92 tertanggal 13 Oktober 2006, untuk PT. HOMBUTMAS, yang berisi antara lain :

a. 1 (satu) lembar asli Dokumen SPM Giro No : 00310302006 Tahun 2006 sebesar Rp. 83.094.600,- (delapan puluh tiga juta sembilan puluh empat ribu enam ratus rupiah) kepada PT. HOMBUTMAS sehubungan Kontrak Nomor. 697/A/077.92, tanggal 13 Oktober 2006

b. 1 (satu) lembar asli Kwitansi PT. HOMBUT MAS tertanggal 6 Desember 2006 sebesar Rp. 92.796.000,- (sembilan puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus rupiah), yang ditandatangani diatas materai 6.000 an. ROBINA SIRAIT selaku Direktur PT. HOMBUT MAS dan an. BAHIR ROMSAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum DKI Jakarta, terdapat stempel dan tandatangan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, MSI selaku Kepala Biro Hukum Prov. DKI Jakarta ;

c. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 2558/SPP/SWD/BB/XII/2006 tertanggal 18 Desember 2006, yang ditanda tangani an. H.

Hal. 189 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDIYONO selaku Pemegang Kas Setdaprov DKI Jakarta dan an. Drs. H. SYAUKI YAHYA selaku Kepala Biro Keuangan ;

- d. 1 (satu) lembar asli Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap No. 2558/SPP/SWD/BB/XII/2006 tertanggal 18 Desember 2006, yang ditanda tangani an. H. BUDIYONO selaku Pemegang Kas Setdaprov DKI Jakarta dan an. Drs. H. SYAUKI YAHYA selaku Kepala Biro Keuangan ;
- e. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Rincian Penggunaan Beban Tetap No. 191/SPP/2006 tertanggal 18 Desember 2006 yang ditandatangani oleh an. BAHIR ROMSAH selaku Pemegang Kas Cabang dan an. JORNAL E. SIAHAAN selaku Kepala Biro Hukum ;
- f. 1 (satu) lembar asli dokumen Faktur Nomor : 295/F/HM/XII/2006 tertanggal 6 Desember 2006 yang ditandatangani an. ROBINA SIRAIT selaku Direktur PT. HOMBUT MAS ;
- g. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Barang (BAPB) Nomor : 53/BAPB/BH/XII/2006 tertanggal 6 November 2006, ditanda tangani oleh Panitia Pemeriksa Barang nomor urut 1 (satu) Ketua sampai dengan 5 (lima) anggota, an. ROBINA SIRAIT selaku Direktur PT. HOMBUT MAS dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang ;
- h. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 45/BAST/BH/XII/2006 tanggal 7 November 2006, yang ditanda tangani an. IRUSWANDI, SH selaku Pengurus Barang unit Biro Hukum, an. ROBINA SIRAIT selaku Direktur PT. HOMBUT MAS dan mengetahui an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Serah Terima Barang ;
97. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Kerja Nomor : 475/A/077.92 tanggal 19 Juli 2006 tentang Pengadaan Alat Pengukur Waktu kebutuhan Biro Hukum Setdaprov. DKI Jakarta untuk PT. INSAN DATA PERMATA ;
98. 1 (satu) bundel Dokumen Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Dalam Rangka Pengadaan Meubeler penunjang kebutuhan Biro Hukum Setda Prov. DKI Jakarta antara Biro Hukum Setda Prov. DKI Jakarta

Hal. 190 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan CV.SALSABILA Nomor : 613/A/077.92 tertanggal 22 September 2006 ;

99. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran atas Pengadaan Meubeler penunjang kebutuhan Biro Hukum Setda Prov. DKI Jakarta antara Biro Hukum Setda Prov. DKI Jakarta dengan CV. SALSABILA Nomor : 613/A/077.92 tertanggal 22 September 2006, yang berisi antara lain:
- 1 (satu) lembar asli Dokumen SPM Giro No : 00310432006 tanggal 23 Desember 2006 sebesar Rp. 57.752.789,- (lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah) kepada CV. SALSABILA ;
 - 1 (satu) lembar asli Kwitansi CV. SALSABILA tertanggal 20 Desember 2006 sebesar Rp. 64.495.500,- (enam puluh empat juta empat ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah), yang ditandatangani diatas materai 6.000 an. IZUDDINNUR, Sag selaku Direktur CV. SALSABILA dan an. BAHIR ROMSAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum DKI Jakarta, terdapat stempel dan tandatangan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, MSi selaku Kepala Biro Hukum Prov. DKI Jakarta;
 - 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 2667/SPP/SWD/BB/XII/2006 tertanggal 20 Desember 2006, yang ditanda tangani an. H. BUDIYONO selaku Pemegang Kas Setdaprov DKI Jakarta dan an. Drs. H. SYAUKI YAHYA selaku Kepala Biro Keuangan ;
 - 1 (satu) lembar asli Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap No. 2667/SPP/SWD/BB/XII/2006 tertanggal 20 Desember 2006, yang ditanda tangani an. H. BUDIYONO selaku Pemegang Kas Setdaprov DKI Jakarta dan an. Drs. H. SYAUKI YAHYA selaku Kepala Biro Keuangan ;
 - 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Rincian Penggunaan Beban Tetap No. 199/SPP/2006 tertanggal 20 Desember 2006 yang ditandatangani oleh an. BAHIR ROMSAH selaku Pemegang Kas Cabang dan an. JORNAL E. SIAHAAN selaku Kepala Biro Hukum ;
 - 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 53/BAST/BH/IX/2006 tanggal 16 November 2006, yang ditanda tangani an. IRUSWANDI, SH selaku Pengurus Barang

Hal. 191 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Biro Hukum, an. Ir. TJINDARSIH WEMMY, MM selaku Direktur Utama PT. ARSIWASTUADI dan mengetahui an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Serah Terima Barang ;

- g. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Barang (BAPB) Nomor : 44/BAPB/BH/IX/2006 tertanggal 15 November 2006, ditanda tangani oleh Panitia Pemeriksa Barang nomor urut 1 (satu)

Ketua sampai dengan 5 (lima) anggota, an. Ir. IZUDDINNUR, Sag selaku Direktur CV. SALSABILA dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang ;

100. 1 (satu) bundel Dokumen Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Dalam Rangka Penelitian Empiris terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan kebutuhan Biro Hukum Setda Prov. DKI Jakarta antara Biro Hukum Setda Prov. DKI Jakarta dengan PT. ARSIWASTUADI Nomor : 712/A/077.92 tertanggal 8 Nopember 2006;
101. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran atas Penelitian Empiris terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan kebutuhan Biro Hukum Setda Prov. DKI Jakarta antara Biro Hukum Setda Prov. DKI Jakarta dengan PT. ARSIWASTUADI Nomor : 712/A/077.9 tertanggal 8 Nopember 2006, yang berisi antara lain :
- a. 1 (satu) lembar asli Dokumen SPM Giro No : 00310442006 tanggal 23 Desember 2006 sebesar Rp. 224.350.341,- (dua ratus dua puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah) kepada PT. ARSIWASTUADI ;
- b. 1 (satu) lembar asli Kwitansi PT. ARSIWASTUADI tertanggal 19 Desember 2006 sebesar Rp. 266.795.000,- (dua ratus enam puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), yang ditandatangani diatas materei 6.000 an. Ir. TJINDARSIH WEMMY, MM selaku Direktur Utama PT. ARSIWASTUADI dan an. BAHIR ROMSAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum DKI Jakarta, terdapat stempel dan tandatangan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, MSi selaku Kepala Biro Hukum Prov. DKI Jakarta ;

Hal. 192 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 2608/SPP/SWD/BB/XII/2006 tertanggal 19 Desember 2006, yang ditanda tangani an. H. BUDIYONO selaku Pemegang Kas Setdaprov DKI Jakarta dan an. Drs. H. SYAUKI YAHYA selaku Kepala Biro Keuangan ;
- d. 1 (satu) lembar asli Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap No. 2608/SPP/SWD/BB/XII/2006 tertanggal 19 Desember 2006, yang ditanda tangani an. H. BUDIYONO selaku Pemegang Kas Setdaprov DKI Jakarta dan an. Drs. H. SYAUKI YAHYA selaku Kepala Biro Keuangan ;
- e. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Rincian Penggunaan Beban Tetap No. 193/SPP/2006 tertanggal 19 Desember 2006 yang ditandatangani oleh an. BAHIR ROMSAH selaku Pemegang Kas Cabang dan an. JORNAL E. SIAHAAN selaku Kepala Biro Hukum ;
- f. 2 (dua) lembar asli Dokumen Bill of Quantity PT. ARSIWASTUADI tertanggal 13 Oktober 2006 yang ditanda tangani an. Ir. TJINDARSIH WEMMY, MM selaku Direktur Utama PT. ARSIWASTUADI ;
- g. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 50/BAST/BH/XII/2006 tanggal 11 Desember 2006, yang ditanda tangani an. IRUSWANDI, SH selaku Pengurus Barang unit Biro Hukum, an. Ir. TJINDARSIH WEMMY, MM selaku Direktur Utama PT. ARSIWASTUADI dan mengetahui an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Serah Terima Barang ;
- h. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Barang (BAPB) Nomor : 47/BAPB/BH/XII/2006 tertanggal 8 Desember 2006, ditanda tangani oleh Panitia Pemeriksa Barang nomor urut 1 (satu) Ketua sampai dengan 5 (lima) anggota, an. Ir. TJINDARSIH WEMMY, MM selaku Direktur Utama PT. ARSIWASTUADI dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang ;
- i. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Serah Terima Pengguna Barang Nomor : 50/BASTPB/BH/XII/2006 tanggal 11

Hal. 193 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Desember 2006, yang ditanda tangani an. IRUSWANDI, SH selaku Pengurus Barang unit Biro Hukum, an. Ir. TJINDARSIH WEMMY, MM selaku Direktur Utama PT. ARSIWASTUADI dan mengetahui an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Serah Terima Pengguna Barang ;

- j. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Bobot Pekerjaan Nomor : 1/BABP/BH/XII/2006 tanggal 11 Desember 2006, yang ditanda tangani an. IRUSWANDI, SH selaku Pengurus Barang unit Biro Hukum, an. Ir. TJINDARSIH WEMMY, MM selaku Direktur Utama PT. ARSIWASTUADI dan mengetahui an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum ;
- k. 13 (tiga belas) lembar asli Dokumen Daftar Absensi Tenaga Ahli bulan November sampai dengan Desember, yang ditanda tangani an. Ir. TJINDARSIH WEMMY, MM selaku Direktur Utama PT. ARSIWASTUADI ;
- l. 1 (satu) lembar asli Dokumen Nomor : 101/AW-INV/XII/2006 tertanggal 13 Desember 2006 perihal Permohonan Pembayaran, yang ditanda tangani an. Ir. TJINDARSIH WEMMY, MM selaku Direktur Utama PT. ARSIWASTUADI ;
102. 1 (satu) bundel Dokumen Perjanjian Pengadaan Jasa Konsultasi Penyelenggaraan bimbingan teknis PKS/MOU kebutuhan Biro Hukum Setda Prov. DKI Jakarta antara Biro Hukum Setda Prov. DKI Jakarta dengan PT. QORINA KONSULTAN INDONESIA Nomor : 743/077.5 tertanggal 17 Nopember 2006 ;
103. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Qorina Konsultan, yang terdiri sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) lembar asli tindisan Dokumen SPM Giro No. 00324582006 TA. 2006 tertanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp. 539.846.200,- (lima ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh enam ribu dua ratus rupiah) untuk pembayaran Biaya Pekerjaan Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Penyusunan PKS/MOU Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov. DKI Jakarta dengan SPK Nomor 743/177.5 ;
 - b. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tertanggal 20 Desember 2006, sebesar Rp. 539.846.200,- (lima ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh enam ribu dua ratus rupiah), yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani an. Ir. AZHARSYAH selaku Direktur Utama PT. QORINA KONSULTAN INDONESIA, an. BAHIR ROMSAH selaku Pemegang Kas Cabang dan terdapat stempel dan tanda tangan an. JORNAL E. SIAHAAN selaku Kepala Biro Hukum DKI Jakarta ;

- c. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 2678/SPP/SWD/BB/XII/2006 tertanggal 20 Desember 2006, yang ditanda tangani an. H. BUDIYONO selaku Pemegang Kas Setdaprov DKI Jakarta dan an. HARI SANDJOJO, MJ selaku Asisten Keuangan ;
- d. 1 (satu) lembar asli Dokumen Surat Permintaan Pembayaran No. 2678/SPP/SWD/BB/XII/2006 tertanggal 20 Desember 2009, yang ditanda tangani an. H. BUDIYONO selaku Pemegang Kas Setdaprov DKI Jakarta dan an. HARI SANDJOJO, MJ selaku Asisten Keuangan ;
- e. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Rincian Rencana Penggunaan Beban Tetap No. 192/SPP/2006 tanggal 20 Desember 2006, ditandatangani an. BAHIR ROMSAH selaku Pemegang Kas Cabang dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum ;
- f. 1 (satu) lembar asli Dokumen Surat Nomor : 067/SP.Pem-QKI/XII/2006 tertanggal 15 Desember 2006 perihal Permohonan Pembayaran, ditujukan kepada Kepala Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta, yang ditandatangani an. Ir. AZHARSYAH selaku Direktur Utama PT. QORINA KONSULTAN INDONESIA, berikut 2 (dua) lembar asli lampiran rencana biaya ;
- g. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Barang (BAPB) Nomor : 52/BAPB/BH/XII/2006 tertanggal 14 Desember 2006, ditanda tangani oleh Panitia Pemeriksa Barang nomor urut 1 (satu) Ketua sampai dengan 5 (lima) anggota, an. Ir. AZHARSYAH selaku Direktur Utama PT. QORINA KONSULTAN dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang ;
- h. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 44/BAST/BH/XII/2006 tanggal 14 Desember 2006, yang ditanda tangani an. IRUSWANDI, SH selaku Pengurus Barang

Hal. 195 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



unit Biro Hukum, an. Ir. AZHARSYAH selaku Direktur Utama PT. QORINA KONSULTAN dan mengetahui an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Serah Terima Barang ;

- i. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Bobot Pekerjaan Nomor : 2/BAPB/BH/XII/2006 tertanggal 14 Desember 2006, yang ditanda tangani an. IRUSWANDI, SH selaku Pengurus Barang unit Biro Hukum, an. Ir. AZHARSYAH selaku Direktur Utama PT. QORINA KONSULTAN dan mengetahui an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Serah Terima Barang ;
 - j. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Hadir Tenaga Ahli Pekerjaan Bimbingan Teknis Penyusunan Perjanjian Kerjasama – MOU, tertanggal November 2006, yang ditanda tangani an. Ir. AZHARSYAH selaku Direktur Utama PT. QORINA KONSULTAN;
104. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Kerja Nomor : 470/A/078.23 kepada CV. BENEAGNESVAN tentang Penggandaan fotocopy dan penjilidan bahan-bahan dalam rangka penyusunan himpunan produk hukum daerah berupa Perda BD dan risalah pembahasan perda kebutuhan Biro Hukum Setda Prov. DKI Jakarta, tertanggal 19 Juli 2006 ;
105. 1 (satu) buah Dokumen Buku Kas Pengeluaran MK.10 – Pemegang Kas : Cabang – Unit Organisasi : Biro Hukum – Tahun Anggaran : 2006, pada pojok kanan atas terdapat angka romawi I ;
106. 1 (satu) buah Dokumen Buku Kas Pengeluaran MK.10 – Pemegang Kas : Cabang – Unit Organisasi : Biro Hukum Sekda Prop. DKI Jkt – Tahun Anggaran : 2006, pada pojok kanan atas terdapat angka romawi II ;
107. 1 (satu) buah Dokumen Buku Kas Pengeluaran MK.10, pada pojok kanan atas terdapat angka romawi III ;
108. 1 (satu) buah Dokumen Buku Kas Pengeluaran MK.10, pada pojok kanan atas terdapat angka romawi IV ;
109. 1 (satu) buah Dokumen Buku Kas Pengeluaran MK.10, pada pojok kanan atas terdapat angka romawi V ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110. 3 (tiga) lembar Laporan Keuangan Efisiensi bulan Juli s.d Desember 2006, terdapat tanda tangan an. BAHIR ROMSAH pada setiap lembarnya ;
111. 1 (satu) lembar asli Dokumen Rapat Kesepakatan untuk Menanggulangi Biaya-biaya Koordinasi, terdapat tanda tangan an. BAHIR ROMSAH pada setiap lembarnya ;
112. 4 (empat) lembar Dokumen Realisasi Anggaran sampai dengan Triwulan IV (Januari s.d 29 Desember 2006) tertanggal 29 Desember 2006, yang terdapat tanda tangan BAHIR ROMSAH pada setiap halaman pada pojok kanan bawah ;
113. 1 (satu) bundel Dokumen Penggunaan Uang Hasil Pengumpulan Pemotongan, antara lain :
 - a. 1 (satu) lembar asli Dokumen Surat dengan kop surat "Dewan Perwakilan Rakyat Daerah - Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta - Sekretariat", ditujukan kepada Bapak Kepala Biro, tertanggal 6 Desember 2006, ditanda tangani POLTAK SITUMEANG selaku koordinator, berikut 1 (satu) lembar disposisi tertanggal 7-12-2006, 1 (satu) lembar asli kwitansi dari Kepala Biro Hukum sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) diterima dan ditandatangani an. EFENDI dan 1 (satu) lembar tanda terima surat tertanggal 7 Desember 2006 ;
 - b. 1 (satu) lembar Kwitansi Sudah Terima dari Biro Hukum sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tertanggal 2 Agustus 2006;
 - c. 1 (satu) lembar asli Dokumen Nomor : 45/-085.4 tertanggal 10 April 2007 perihal Pembelian Cinderamata, ditujukan kepada Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta, yang ditanda tangani an. TRI JOKO RAHADJO, SH selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta ;
 - d. 1 (satu) lembar Dokumen Nomor : 072/YCS/LP-SP/V/07 tertanggal 2 Maret 2007 perihal Permohonan Partisipasi, ditujukan kepada Kepala Biro Hukum Provinsi DKI Jakarta, yang ditandatangani oleh Drs. ER. Kartasasmita selaku Ketua Panitia, Letjen TNI (Purn) R. Soeprapto selaku Pembina Panitia dan Mengetahui Prof. DR. H. Achmad Sutarmadi selaku Penasehat Panitia, berikut 1 (satu) lembar asli kwitansi No : 05/YCS/LP-SP/V/2007 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 22 Mei 2007 yang ditandatangani an. AHMAD

Hal. 197 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIBOWO selaku Bendahara dan 1 (satu) lembar disposisi tanggal 26-3-07 ;

- e. 1 (satu) lembar asli Kwitansi – Sudah Terima dari Kepala Biro Hukum sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal Juli 2006, yang ditanda tangani an. SUDONO ;
- f. 1 (satu) lembar asli Kwitansi – Sudah Terima dari Kepala Biro Hukum sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal Juli 2006, yang ditanda tangani an. SARIYAH ;
- g. 1 (satu) lembar asli Kwitansi LILIN MAS – ART PRINTING – Sudah Terima dari Biro Hukum Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 21 Juli 2006, terdapat tanda tangan penerima (tanpa nama) dan stempel LILIN MAS – Jakarta ;
- h. 1 (satu) lembar asli Kwitansi – Sudah Terima dari Kepala Biro Hukum sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal Agustus 2006, yang ditanda tangani an. SUDONO ;
- i. 1 (satu) lembar asli Kwitansi – Sudah Terima dari Kepala Biro Hukum sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal Agustus 2006, yang ditanda tangani an. SARIYAH ;
- j. 1 (satu) lembar asli Kwitansi – Sudah Terima dari Kepala Biro Hukum sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 14 Agustus 2006, yang ditanda tangani an. ARI LASTUTI ;
- k. 1 (satu) lembar asli Nota sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tertanggal 22 Agustus 2006 ;
- l. 1 (satu) lembar asli Kwitansi TUTY Catering – sudah terima dari Biro Hukum sebesar Rp. 3.135.000,- (tiga juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) tertanggal 21 September 2006, terdapat tanda tangan (tanpa nama) dan stempel TUTY Catering ;
- m. 1 (satu) lembar asli Kwitansi – Sudah Terima dari Kepala Biro Hukum sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) tertanggal 25 September 2006, yang ditanda tangani (tanpa nama) dan stempel A. MATSA'AN AGENCY. ;
- n. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Tanda Terima – Sudah Terima dari BAHIR ROMSAH (Pemegang Kas Cabang Biro Hukum) sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 27 September 2006, yang ditanda tangani an. ZAENAL WAHAB ;

Hal. 198 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Tanda Terima – Sudah Terima dari BAHIR ROMSAH (Pemegang Kas Cabang Biro Hukum) sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tertanggal 27 September 2006, yang ditanda tangani an. PUJI H ;
- p. 1 (satu) lembar asli Kwitansi – Sudah Terima dari Ny. JORNAL SA sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tertanggal 3 Oktober 2006, yang ditanda tangani an. Ny. MURDIMAN dan stempel Persatuan Dharma Wanita Setda Provinsi DKI Jakarta ;
- q. 1 (satu) lembar asli Kwitansi – Sudah Terima dari Ny. JORNAL SA sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 3 Oktober 2006, yang ditanda tangani an. Ny. MURDIMAN dan stempel Persatuan Dharma Wanita Setda Provinsi DKI Jakarta ;
- r. 1 (satu) lembar asli Kwitansi – Sudah Terima dari Biro Hukum sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), tertanggal 3 Oktober 2006, yang ditanda tangani an. Ny. SUPRIADI ;
- s. 1 (satu) lembar asli Kwitansi – Sudah Terima dari Kepala Biro Hukum sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 6 Oktober 2006, yang ditanda tangani an. SARIYAH ;
- t. 1 (satu) lembar asli Kwitansi – Sudah Terima dari Biro Hukum Prop DKI Jakarta sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 11 Oktober 2006, yang ditanda tangani an. E. KOSASIH ;
- u. 1 (satu) lembar asli Kwitansi – Sudah Terima dari Kepala Biro Hukum sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 6 Oktober 2006, yang ditanda tangani an. SUDONO ;
- v. 1 (satu) lembar asli Kwitansi – Sudah Terima dari Kepala Biro Hukum sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) tertanggal 30 Oktober 2006, yang ditanda tangani (tanpa nama) dan stempel A. MATSA'AN AGENCY ;
- w. 1 (satu) lembar asli Kwitansi – Sudah Terima dari Kepala Biro Hukum sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 6 November 2006, yang ditanda tangani an. SUDONO ;
- x. 1 (satu) lembar asli Kwitansi – Sudah Terima dari Kepala Biro Hukum sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 6 November 2006, yang ditanda tangani an. SARIYAH ;

Hal. 199 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- y. 1 (satu) lembar asli Kwitansi – Sudah Terima dari Biro Hukum Prop DKI Jakarta sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 17 Nopember 2006, yang ditanda tangani an. E. KOSASIH ;
- z. 1 (satu) lembar asli Kwitansi – Sudah terima dari Kepala Biro Hukum sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 6 Desember 2006, yang ditanda tangani an. SUDONO ;
- aa. 1 (satu) lembar asli Kwitansi – Sudah terima dari PKC Biro Hukum sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tertanggal 5 Desember 2006, yang ditanda tangani an. KADRIN ;
- ab. 1 (satu) lembar asli Kwitansi – Sudah terima dari Biro Hukum DKI Jakarta sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) tertanggal 27 November 2006, yang ditanda tangani (tanpa nama) dan stempel A. MATSA'AN AGENCY ;
- ac. 1 (satu) lembar asli Kwitansi – Sudah terima dari Kepala Biro Hukum sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 6 Desember 2006, yang ditanda tangani an. SARIYAH ;
- ad. 1 (satu) lembar asli Kwitansi – Sudah terima dari Biro Hukum sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 12 Desember 2006, yang ditanda tangani an. ETI R ;
- ae. 1 (satu) lembar asli Kwitansi – Sudah terima dari Biro Hukum Prop DKI Jakarta sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 22 Desember 2006, yang ditanda tangani an. E. KOSASIH ;
- af. 1 (satu) lembar asli Kwitansi – Sudah terima dari Biro Hukum DKI Jakarta sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) tertanggal 27 Desember 2006, yang ditanda tangani (tanpa nama) dan stempel A. MATSA'AN AGENCY ;
- ag. 1 (satu) lembar asli Daftar : Pembayaran transport petugas jaga bulan Desember 2006 ;
- ah. 1 (satu) lembar asli Kwitansi – Sudah terima dari PKC Biro Hukum sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), tertanggal 6 Desember 2006 yang ditandatngani an. IRUS WANDI, berikut 1 (satu) lembar foto copy Surat Nomor : 188/B-1/S-PEMB/i/SEMINAR/XI/2006 dan 1 (satu) lembar disposisi ;

Hal. 200 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ai. 1 (satu) lembar asli Daftar Rincian Anggaran Perjalanan Dalam Rangka menghadiri Resepsi Pernikahan Sdr. IWAN SATYOPRODJO, SH, MH dengan DIAN PUSPITO, SH di Blora Jawa Tengah ;
114. 1 (satu) bundel Dokumen Kwitansi Penerimaan Uang Hasil Pengumpulan Pemotongan oleh an. ELLEN SIAGIAN dan an. JORNAL EFFENDI SIAHAAN, antara lain :
- a. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima tertanggal 4 Agustus 2006, sudah terima dari BAHIR ROMSAH (Pemegang Kas Cabang Biro Hukum) sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), untuk keperluan kegiatan Kepala Biro Hukum bulan Agustus 2006, yang ditandatangani an. ELLEN SIAGIAN ;
 - b. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima tertanggal 7 Agustus 2006, sudah terima dari BAHIR ROMSAH (Pemegang Kas Cabang Biro Hukum) sebesar Rp 75.000.000,00, untuk keperluan pinjaman Kepala Biro Hukum dalam rangka pembelian Meubelair ruangan, yang ditandatangani an. ELLEN SIAGIAN ;
 - c. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima tertanggal 5 September 2006, sudah terima dari BAHIR ROMSAH (Pemegang Kas Cabang Biro Hukum) sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), untuk keperluan kegiatan Kepala Biro Hukum bulan September 2006, yang ditandatangani an. ELLEN SIAGIAN ;
 - d. 1 (satu) lembar Kwitansi Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tertanggal 8 September 2006, sudah terima dari Bapak H. BAHIR sebesar Rp 25.000.000,00, untuk pembayaran keperluan Karo, yang ditandatangani an. ELLEN. S ;
 - e. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima tertanggal 4 Oktober 2006, sudah terima dari BAHIR ROMSAH (Pemegang Kas Cabang Biro Hukum) sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), untuk keperluan kegiatan Kepala Biro Hukum bulan Oktober 2006, yang ditandatangani an. ELLEN SIAGIAN ;
 - f. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima tertanggal 6 November 2006, sudah terima dari BAHIR ROMSAH (Pemegang Kas Cabang Biro Hukum) sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), untuk keperluan kegiatan Kepala Biro Hukum bulan November 2006, yang ditandatangani an. ELLEN SIAGIAN ;

Hal. 201 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima tertanggal 5 Desember 2006, sudah terima dari BAHIR ROMSAH (Pemegang Kas Cabang Biro Hukum) sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), untuk keperluan kegiatan Kepala Biro Hukum bulan Desember 2006, yang ditandatangani an. ELLEN SIAGIAN ;
- h. 1 (satu) lembar Bon Pengeluaran tertanggal 29 Desember 2006, Efisiensi bulan Desember 2006 sebesar Rp 200.000.000,00, terdapat tanda tangan atas nama Karo Hukum (tanpa nama) ;
115. 1 (satu) bundel foto copy Buku I Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta TA.2007 ;
116. 1 (satu) bundel foto copy Buku VII Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta TA.2007 ;
117. 1 (satu) bundel Dokumen DPA SKPD Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2007 ;
118. 4 (empat) lembar foto copy legalisir Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2007 Nomor : 006/DPPA/2007 tanggal 20-11-2007, terdapat Cap Mengetahui/menyetujui sesuai dengan aslinya dan ditandatangani oleh RETNOWATI selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Pemprov DKI Jakarta ;
119. 3 (tiga) lembar asli Dokumen Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 486/2007, tanggal 9 April 2007 perihal Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2007, berikut 57 (lima puluh tujuh) lembar asli lampirannya ;
120. 6 (enam) lembar salinan asli Dokumen Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2007 tanggal 30 Maret 2007 perihal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 ;
121. 4 (empat) lembar salinan asli Dokumen Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 52 Tahun 2007 tanggal 30 Maret 2007 perihal Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 ;
122. 6 (enam) lembar salinan asli Dokumen Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 9 Tahun 2007 tanggal 19

Hal. 202 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2007 perihal Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 ;

123. 4 (empat) lembar salinan asli Dokumen Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 158 Tahun 2007 tanggal 19 November 2007 perihal Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2007 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 ;
124. 3 (tiga) lembar asli Keputusan Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 02 Tahun 2007 perihal Pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2007 ;
125. 3 (tiga) lembar asli Keputusan Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 01 Tahun 2007 perihal Pembentukan Panitia Pemeriksaan Barang / Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2007 ;
126. 3 (tiga) lembar salinan asli Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 191 / 2007 perihal Penetapan Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Atasan Langsungnya Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2007, berikut 2 (dua) lembar lampirannya ;
127. 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Keputusan Kepala Biro Hukum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 292/2007 perihal Pembentukan Pembantu Pemegang Kas Cabang Biro Hukum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2007, berikut 1 lembar lampirannya ;
128. 1 (satu) buah asli Buku Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 92 Tahun 2001 – Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2001 tanggal 13 Desember 2001 tentang Pokok pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
129. 1 (satu) bundel foto copy Buku I Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta TA.2007;

Hal. 203 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

130. 1 (satu) bundel foto copy Buku VI Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta TA.2007 ;
131. 1 (satu) bundel asli Dokumen Perjanjian Pelelangan Umum Pengadaan Jasa Filler Kebutuhan Biro Hukum Sekda Prov. DKI Jakarta antara Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan CV. Sandi Perkasa Nomor 508/077.72, yang berisi antara lain :
- a. 8 (delapan) lembar asli Dokumen Perjanjian Pelelangan Umum Pengadaan Jasa Filler Hukum Kebutuhan Biro Hukum Sekda Prov. DKI Jakarta antara Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan CV. Sandi Perkasa Nomor. 508/077.72, tanggal 25 September 2007, yang ditandatangani oleh Pihak Pertama an. JORNAL E. SIAHAAN, SH. M.Si selaku Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Pihak Kedua an. Ir. RATNANINGSIH, MSi selaku Direktur CV. Sandi Perkasa, beserta lampirannya ;
 - b. 4 (empat) lembar Surat Sandi Perkasa CV beserta lampirannya, tertanggal 6 September 2007 Nomor : 282/SP-ADM/IX/07, ditujukan kepada Ketua Pengadaan Barang/Jasa Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta, ditandatangani an. Ir. RATNANINGSIH, Msi selaku Direktur CV. Sandi Perkasa ;
 - c. 1 (satu) lembar foto copy Dokumen Jaminan Penawaran PT. ASURANSI PAROLAMAS Nomor Bond : JKT/SNA/00252/07, Nilai Bond : Rp. 67.056.000,- (enam puluh tujuh juta lima puluh enam ribu rupiah), tertanggal 6 September 2007 yang ditandatangani oleh an. BANDA HARO HARAHAP, SE selaku Manager PT. ASURANSI PAROLAMAS (Surety), dan an. Ir. RATNANINGSIH selaku Direktur CV. SANDI PERKASA (Principal) ;
 - d. 3 (tiga) lembar asli Dokumen Keputusan Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 506/077.92, tanggal 18 September 2007 tentang Penetapan Penyedia Barang/Jasa Pelelangan Umum Pengadaan Jasa Filler Hukum Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov. DKI Jakarta, yang ditandatangani oleh an. JORNAL

Hal. 204 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- E. SIAHAAN, SH. M.Si selaku Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
- e. 2 (dua) lembar asli Dokumen Keputusan Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 508/077.92, tanggal 25 September 2007 tentang Penunjukkan CV. Sandi Perkasa sebagai perusahaan penyedia barang/jasa pengadaan Jasa Filler Hukum Kebutuhan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta, yang ditandatangani oleh an. JORNAL E. SIAHAAN, SH. M.Si selaku Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
 - f. 1 (satu) lembar asli Dokumen pengumuman pemenang pelelangan umum pengadaan jasa filler hukum kebutuhan biro hukum setdaprov DKI Jakarta, Nomor : 25/PPBJ/Peng/L/Filler/IX/2007, tertanggal 17 September 2007, ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua ;
 - g. 1 (satu) lembar asli Dokumen Nomor : 482/075.72, tanggal 17 September 2007 perihal Penetapan Pemenang Lelang Umum Pengadaan Jasa Filler Hukum Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov. DKI Jakarta, yang ditujukan kepada Panitia Pengadaan Barang / Jasa Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta, yang ditandatangani oleh an. JORNAL E. SIAHAAN, SH. M.Si selaku Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
 - h. 5 (lima) lembar asli Dokumen Nomor : 24/PPBJ/Lap./Filler/IX/2007, tanggal 14 September 2007 perihal Laporan lelang umum pengadaan jasa filler hukum kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta, yang ditujukan kepada Kepala Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta, ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua ;
 - i. 2 (dua) lembar asli Dokumen Berita Acara Penetapan Calon Pemenang Lelang dan Cadangan Calon Pemenang Pengadaan Jasa Filler Hukum Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov. DKI Jakarta Nomor : 23/PPBJ/BA/Filler-ABT/IX/2007 tanggal 14 September 2007, yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan

Hal. 205 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang/Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua, IWAN SATYOPRODJO, SH, MM selaku Sekretaris, ISMIYATUN, SH, Endang SUMARDI, SH, KM. JAUHARI, SH, RADIAH, SH dan SUCI RAHAYU selaku Anggota ;

- j. 4 (empat) lembar asli Dokumen Berita Acara Hasil Pelelangan Umum Pengadaan Jasa Filler Hukum Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov. DKI

Jakarta Nomor : 22/PPBJ/BA/FILLER/IX/2007 tanggal 14 September 2007, yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua, IWAN SATYOPRODJO, SH, MM selaku Sekretaris, ISMIYATUN, SH, Endang SUMARDI, SH, KM. JAUHARI, SH, RADIAH, SH dan SUCI RAHAYU selaku Anggota ;

- k. 3 (tiga) lembar asli Dokumen Berita Acara Penilaian dan Pembuktian Kualifikasi Dokumen Penawaran Pelelangan Umum Dalam Rangka Pengadaan Jasa Filler Hukum Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov. DKI Jakarta Nomor : 21/PPBJ/BA/FILLER/IX/2007 tanggal 14 September 2007, yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua, IWAN SATYOPRODJO, SH, MM selaku Sekretaris, ISMIYATUN, SH, Endang SUMARDI, SH, KM. JAUHARI, SH, RADIAH, SH dan SUCI RAHAYU selaku Anggota;

- l. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Hadir Tenaga Ahli dalam rangka Pengadaan Jasa Filler Hukum Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta, pada hari/tanggal : Jum'at, 14 September 2007, pukul 09.00 WIB, Tempat : Ruang Rapat Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Blok G lantai 9 Jl. Merdeka Selatan 8-9 Jakarta Pusat, Acara : Penilaian dan Pembuktian Kualifikasi Dokumen Surat Penawaran Harga (SPH) Pelelangan Umum Pengadaan Jasa Filler Hukum Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov. DKI Jakarta, yang terdapat tanda tangan nomor urut 1 (satu) an. MADE SUARJAYA, SH (Jabatan Ketua) sampai dengan nomor urut 17 (tujuh belas) an. AGUS SAMBODO (Jabatan Team Kreatif/Animator/Editor), yang

Hal. 206 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;

- m. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Hadir pada hari/tanggal : Jum'at, 14 September 2007, pukul 09.30 WIB, Tempat : Ruang Rapat Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Blok G lantai 9 Jl. Merdeka Selatan 8-9 Jakarta Pusat, Acara Penilaian dan Pembuktian Kualifikasi Dokumen Surat Penawaran Harga (SPH) Pelelangan Umum Pengadaan Jasa Filler Hukum Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov. DKI Jakarta, yang terdapat tanda tangan nomor urut 1 (satu) an. MADE SUARJAYA, SH sampai dengan nomor urut 8 (delapan) an. TRIYITNO (CV. SANDI PERKASA), yang ditandatangani oleh an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;
- n. 1 (satu) lembar foto copy Dokumen Nomor : 20/PPBJ/UND/Filler/IX/2007, tanggal 13 September 2007 perihal Undangan, yang ditujukan kepada Direktur/pimpinan CV. SANDI PERKASA Jl. Adhyaksa II No. 37 E, Kel. Cilandak, Jakarta Selatan, yang ditandatangani oleh an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;
- o. 1 (satu) lembar foto copy Dokumen Nomor : 19/PPBJ/UND/Filler/IX/2007, tanggal 13 September 2007 perihal Undangan, yang ditujukan kepada IWAN SATYOPRODJO, SH, MM, ISMIYATUN, SH, Endang SUMARDI, SH, KM. JAUHARI, SH, RADIAH, SH dan SUCI RAHAYU, yang ditandatangani oleh an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;
- p. 3 (tiga) lembar asli Dokumen Berita Acara Evaluasi Dokumen Kualifikasi Surat Penawaran Harga (SPH) Pelelangan Umum Dalam Rangka Pengadaan Jasa Filler Hukum Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov. DKI Jakarta Nomor : 18/PPBJ/BA/FillerI/X/2007, tanggal 13 September 2007, yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua,

Hal. 207 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IWAN SATYOPRODJO, SH, MM selaku Sekretaris, ISMIYATUN, SH, Endang SUMARDI, SH, KM. JAUHARI, SH, RADIAH, SH dan SUCI RAHAYU selaku Anggota;

- q. 7 (tujuh) lembar asli Dokumen Berita Acara Evaluasi Teknis dan Harga Dokumen Penawaran Pelelangan Umum Dalam Rangka Pengadaan Jasa Filler Hukum Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov. DKI Jakarta beserta lampirannya, Nomor : 17/PPBJ/BA/Filler/IX/2007, tanggal 13 September 2007, yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua, IWAN SATYOPRODJO, SH, MM selaku Sekretaris, ISMIYATUN, SH, Endang SUMARDI, SH, KM. JAUHARI, SH, RADIAH, SH dan SUCI RAHAYU selaku Anggota;
- r. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran (SPH) Sampul II Pelelangan Umum Dalam Rangka Pengadaan Jasa Filler Hukum Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta, Nomor : 16/PPBJ/BA/FILLER/IX/2007, tanggal 12 September 2007, yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua, IWAN SATYOPRODJO, SH, MM selaku Sekretaris, ISMIYATUN, SH, Endang SUMARDI, SH, KM. JAUHARI, SH, RADIAH, SH dan SUCI RAHAYU selaku anggota, dan Penyedia Barang/Jasa an. ANTISTIN yang mewakili PT. Crown Entertama, an. IRFAN. E yang mewakili CV. Sandi Perkasa ;
- s. 2 (dua) lembar foto copy Dokumen Nomor : 15/PPBJ/UND/Filler/IX/2007, tanggal 11 September 2007 perihal Undangan, yang ditujukan kepada Direktur/Pimpinan PT. KALINGGA ROMANSA FILM, Wisma Nugra Santana Lt. 14 Suites 1416, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 7-8, Jakarta dan PT. MELIA MEDIA KREASI Jln. Tebet Barat Dalam III No. 6 Jakarta Selatan, yang ditandatangani oleh an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;
- t. 1 (satu) lembar asli Dokumen Nomor : 15/PPBJ/UND/Filler/IX/2007, tanggal 11 September 2007 perihal

Hal. 208 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undangan, yang ditujukan kepada Direktur/Pimpinan CV. ANANTO SINAR KASIH, Jl. Keselamatan No. 6 RT 001/03, Manggarai Selatan, Jakarta Selatan, yang ditandatangani oleh an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;

- u. 1 (satu) lembar asli Dokumen Nomor : 15/PPBJ/UND/Filler/IX/2007, tanggal 11 September 2007 perihal Undangan, yang ditujukan kepada Direktur/Pimpinan PT. MAXINDO BINTANG TEKNIKA, Jl. Amil Wahab No. 13, Kramat Jati, Jakarta Timur, yang ditandatangani oleh an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;
- v. 1 (satu) lembar asli Dokumen Nomor : 15/PPBJ/UND/Filler/IX/2007, tanggal 11 September 2007 perihal Undangan, yang ditujukan kepada Direktur/Pimpinan PT. CAHAYA KRISTAL MEDIA, Jl. Gaharu Terusan I No. 5 A Kel. Cilandak, Jakarta Selatan, yang ditandatangani oleh an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;
- w. 1 (satu) lembar asli Dokumen Nomor : 15/PPBJ/UND/Filler/IX/2007, tanggal 11 September 2007 perihal Undangan, yang ditujukan kepada Direktur/Pimpinan PT. DEMI GISELA CITRA UTAMA, Komplek Rukan Taman Pondok Kelapa Blok B-7 RT 001/01, Kel. Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur, yang ditandatangani oleh an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;
- x. 1 (satu) lembar asli Dokumen Nomor : 15/PPBJ/UND/Filler/IX/2007, tanggal 11 September 2007 perihal Undangan, yang ditujukan kepada Direktur/Pimpinan PT. SATU VISI PERKASA, Wijaya Grand Center Blok E-11 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang ditandatangani oleh an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;

Hal. 209 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- y. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Hadir pada hari/tanggal :
Rabu, 12 September 2007, pukul 13.00 WIB, Tempat : Ruang
Rapat Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Blok
G lantai 9 Jl. Merdeka Selatan 8-9 Jakarta Pusat, Acara
Pembukaan Dokumen Penawaran (SPH) Sampul II Pelelangan
Umum Dalam Rangka Pengadaan Jasa Filler Hukum Kebutuhan
Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta, yang terdapat tanda tangan
nomor urut 1 (satu) an. MADE SUARJAYA, SH sampai dengan
nomor urut 10 (sepuluh) an. IRFAN. E (CV. SANDI PERKASA),
yang ditandatangani oleh an. MADE SUARJAYA, SH selaku
Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Biro Hukum Sekretariat
Daerah Provinsi DKI Jakarta ;
- z. 1 (satu) lembar asli Dokumen Nomor : 14/PPBJ/UND/Filler/IX/
2007, tanggal 11 September 2007 perihal Undangan, yang
ditujukan kepada Direktur/Pimpinan PT. CROWN ENTERTAMA,
Jl. Kapuas No. 21 Kel. Cideng, Kec. Gambir, Jakarta Pusat dan
kepada Direktur/Pimpinan CV. SANDI PERKASA, Jl. Adhyaksa II
No. 37 E, Kel. Cilandak, Jakarta Selatan, yang ditandatangani
oleh an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia
Pengadaan Barang / Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah
Provinsi DKI Jakarta ;
- aa. 1 (satu) lembar asli Dokumen Nomor : 13/PPBJ/UND/Filler/IX/
2007, tanggal 11 September 2007 perihal Undangan, yang
ditujukan kepada IWAN SATYOPRODJO, SH, MM, ISMIYATUN,
SH, Endang SUMARDI, SH, KM. JAUHARI, SH, RADIAH, SH
dan SUCI RAHAYU, yang ditandatangani oleh an. MADE
SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa
Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;
- ab. 5 (lima) lembar asli Dokumen Surat dari Crown Entertama
besreta lampirannya, Nomor : 005/SK-CR.ETA/IX/2007, perihal
Penawaran Pelelangan Umum dalam Rangka pengadaan filler
hukum kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta, tertanggal
6 September 2007, ditujukan kepada Ketua Pengadaan
Barang/Jasa Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta, yang
ditandatangani oleh an. Ir. ANTISTIN selaku Direktur Utama PT.
CROWN ENTERTAMA ;
- ac. 1 (satu) lembar Dokumen asli Penawaran PSA Station TVRI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ad. 1 (satu) lembar Dokumen asli Special Package periode Oktober – November 2007 station Lativi ;
- ae. 1 (satu) lembar Dokumen asli Media Order Special Package Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta, Periode September 2007, station Jak TV;
- ae. 1 (satu) lembar Dokumen asli Loose Spot Package “Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta”, Periode 2007, station Metro TV ;
- ag. 1 (satu) lembar Dokumen asli Spesial Paket PSA For Dept. Kesehatan periode September 2007, station RCTI ;
- ah. 1 (satu) lembar Dokumen asli Special Package PSA periode September 2007 station TPI ;
- ai. 2 (dua) lembar Dokumen asli Daftar Rekapitulasi Penawaran ;
- aj. 1 (satu) bendel Dokumen asli Data Administrasi PT. CROWN ENTERTAMA ;
- ak. 1 (satu) bundel Dokumen asli Data Teknis PT. CROWN ENTERTAMA;
- al. 1 (satu) bundel Dokumen foto copy Lampiran dari PT. CROWN ENTERTAMA ;
- am. 81 (delapan satu) bundel Dokumen foto copy Data Pengalaman Perusahaan CV. SANDI PERKASA ;
- an. 1 (satu) lembar Dokumen Jadwal Kerja Produksi Filler Hukum Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;
- ao. 1 (satu) lembar Dokumen asli Media Plan penayangan iklan layanan masyarakat Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta TA. 2007, tertanggal 6 September 2007, ditandatangani oleh an. Ir. RATNANINGSIH, Msi selaku Direktur CV. SANDI PERKASA ;
- ap. 5 (lima) lembar Dokumen asli Story Board dengan tema “Bersih Lingkungan”, durasi 30 detik ;
- aq. 5 (lima) lembar Dokumen asli Story Board dengan tema “Kawasan dilarang merokok”, durasi 30 detik ;
- ar. 11 (sebelas) lembar Dokumen asli Dukungan TV, dari PT. Lativi Media Karya dan PT. Cipta TPI ;
- as. 102 (seratus dua) lembar Dokumen foto copy data personalia yang terlibat dalam produksi PSA ;
- at. 13 (tiga belas) lembar Dokumen asli formulir isian kualifikasi yang terdiri atas Pakta Integritas, Surat Pernyataan Minat CV.

Hal. 211 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sandi Perkasa untuk mengikuti pengadaan jasa Filler hukum, dan Formulir isian penilaian kualifikasi ;

- au. 1 (satu) lembar Dokumen foto copy Surat Keterangan dukungan keuangan Bank DKI Nomor : 20/SKDKB/GND/IX/2007 tertanggal 5 September 2007, ditandatangani oleh an. OMON SAMANHUDI selaku Wakil pimpinan Kantor Bank DKI cabang pembantu Gunadarma ;
- av. 5 (lima) lembar Dokumen asli Data Administrasi CV. SANDI PERKASA, yang terdiri atas Surat Pernyataan KD tertinggi, surat pernyataan kebenaran data/dokumen, surat pernyataan pernah memiliki pengalaman pekerjaan sejenis, surat pernyataan bukan pegawai negeri sipil/BI/BHMN/BUMN, dan surat pernyataan ;
- aw. 7 (tujuh) lembar Dokumen foto copy data Legalitas Perusahaan CV, SANDI PERKASA ;
- ax. 1 (satu) lembar Dokumen asli Jaminan Penawaran PT. ASURANSI PAROLAMAS Nomor Bond : JKT/SNA/00252/07, Nilai Bond : Rp. 67.056.000,- (enam puluh tujuh juta lima puluh enam ribu rupiah), tertanggal 6 September 2007 yang ditandatangani oleh an. BANDA HARO HARAHAP, SE selaku Manager PT. ASURANSI PAROLAMAS (Surety), dan an. Ir. RATNANINGSIH selaku Direktur CV. SANDI PERKASA (Principal) ;
- ay. 1 (satu) lembar Dokumen asli Surat Keterangan dukungan keuangan Bank DKI Nomor : 20/SKDKB/GND/IX/2007 tertanggal 5 September 2007, ditandatangani oleh an. OMON SAMANHUDI selaku Wakil pimpinan Kantor Bank DKI cabang pembantu Gunadarma ;
- az. 5 (lima) lembar Dokumen foto copy Akta Notaris berupa pemasukan dan perubahan anggaran Dasar CV. Sandi Perkasa, ditandatangani oleh an. WINDALINA, SH selaku Notaris ;
- ba. 12 (dua belas) lembar Dokumen foto copy Akta Notaris berupa Perseroan Komanditer "CV. SANDI PERKASA", ditandatangani oleh an. SINTA SUSIKTO, SH selaku Notaris ;
- bb. 55 (lima puluh lima) lembar Dokumen foto copy Data Keuangan dan Pajak CV. SANDI PERKASA ;
- bc. 24 (dua puluh empat) lembar Dokumen asli Proposal Teknis "Sosialisasi produk hukum melalui media televisi swasta/nasional

Hal. 212 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikemas dalam satu rangkaian cerita yang utuh melalui iklan layanan masyarakat dalam rangka peningkatan kesadaran hukum (Pengadaan Filler Hukum)” oleh CV. SANDI PERKASA ;

bd. 1 (satu) lembar Dokumen foto copy Berita Acara Evaluasi Administrasi Dokumen Penawaran Pelelangan Umum dalam rangka Pengadaan Jasa Filler Hukum Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta Nomor : 12/PPBJ/BA/Filler/IX/2007, tertanggal 7 September 2007 ;

132. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Pengadaan Jasa Filler Kebutuhan Biro Hukum Sekda Prov. DKI Jakarta antara Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan CV. Sandi Perkasa Nomor 508/077.72, yang berisi antara lain :

- a. 1 (satu) lembar asli Dokumen SPM Giro No : 00126702007 Tahun 2007 sebesar Rp. 1.998.318.750,- (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) kepada CV SANDI PERKASA sehubungan Pengadaan Jasa Filler Hukum sesuai Kontrak Nomor. 508/077.72, tanggal 25 September 2007 ;
- b. 1 (satu) lembar asli tindisan Dokumen Tanda Terima SPP No. SPMG20070013147 No Kontrak : 508/077.72, terdapat tanda tangan petugas penerima an. Lia ;
- c. 1 (satu) lembar asli Dokumen Telahaan Staf SPP tertanggal 1 November 2007 No Kontrak : 508/077.72 kepada CV. SANDI PERKASA sebesar Rp. 2.231.625.000,- (dua milyar dua ratus tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- d. 1 (satu) lembar asli tindisan Dokumen Kontrak tertanggal 25 September 2007 oleh CV. SANDI PERKASA ;
- e. 1 (satu) lembar asli Dokumen Checking List ;
- f. 1 (satu) lembar asli Dokumen Kwitansi SANDI PERKARA CV. No. 03/SP-KEU/X/07 tertanggal 26 Oktober 2007, sebesar Rp. 2.231.625.000,- (dua milyar dua ratus tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), terdapat tanda tangan diatas materei 6.000 (enam ribu rupiah) an. Ir. RATNANINGSIH, MSI selaku Direktur dan an. BAHIR ROMSAH selaku Bendahara Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta, berikut 2 (dua) lembar tindisan ;
- g. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 68/SPP/BHK/BT/2007 tertanggal

Hal. 213 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Oktober 2007, yang ditanda tangani an. BAHIR ROMSAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum ;

- h. 1 (satu) lembar foto copy Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap No. 68/SPP/BT/BHK/2007 tertanggal 26 Oktober 2007, yang ditanda tangani an. BAHIR ROMSAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum ;
 - i. 13 (tiga belas) lembar asli Dokumen Permohonan Pembayaran Tagihan CV. SANDI PERKASA ;
 - j. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Barang (BAPB) Nomor : 03/BAPB/BH/X/2007 tertanggal 3 Oktober 2007, ditanda tangani oleh Panitia Pemeriksa Barang nomor urut 1 (satu) Ketua sampai dengan 5 (lima) anggota, an. Ir. RATNANINGSIH, Msi selaku Direktur CV. SANDI PERKASA dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang ;
 - k. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 03/BAST/BH/X/2007 tanggal 3 Oktober 2007, yang ditanda tangani an. IRUSWANDI, SH selaku Pengurus Barang unit Biro Hukum, an. Ir. RATNANINGSIH, Msi selaku Direktur CV. SANDI PERKASA dan mengetahui an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Serah Terima Barang ;
133. 1 (satu) bundel Dokumen terkait dengan penayangan Filler 2007 di TPI, antara lain :
- a. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen MEDIA ORDER – Filler Hukum, PO Number : 006/PSA/09/2007 dari Agency CV. SANDI PERKASA, Advertiser BIRO HUKUM PROVINSI DKI JAKARTA, Product PSA, Priode September 2007, yang ditanda tangani IR. RATNANINGSIH, Msi selaku Direktur CV. SANDI PERKASA dan approved by media an. RINA LILIANOVA, berikut 1 (satu) lembar lampirannya ;

Hal. 214 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen Reguler Package Nomor : 4248/REG.PKT – SANDI PERKASA/MKS CTPI/IX/07, Special for “FILLER HUKUM” periode : September 2007 ;
 - c. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen LOG PROOF register nomor : 20070900964 periode September 2007, Order Type PSA, Brand PSA Biro Hukum Propinsi DKI. Order Number 006/PSA/09/2007, Agency CV. SANDI PERKASA, Approved by ANGLING HARI PRIYADI selaku Acct. Dept Head ;
 - d. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen LOG PROOF register nomor : 20071000298 periode Oktober 2007, Order Type PSA, Brand PSA Biro Hukum Propinsi DKI. Order Number 006/PSA/09/2007, Agency CV. SANDI PERKASA, Approved by ANGLING HARI PRIYADI selaku Acct. Dept Head ;
 - e. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Slip Pengiriman Uang Dalam Negeri / Kliring kepada PT. CIPTA Televisi Pendidikan Indonesia Mandiri Cab TMII Nomor rekening 129.0001071519 tertanggal 26 September 2007 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
 - f. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Slip Pengiriman Uang Dalam Negeri / Kliring kepada PT. CIPTA Televisi Pendidikan Indonesia Mandiri Cabang TMII Nomor rekening 129.0001071519 tertanggal 27 September 2007 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
134. 1 (satu) bundel Dokumen terkait dengan penayangan Filler 2007 di Lativi (saat ini berubah menjadi TV One), antara lain :
- a. 1 (satu) lembar foto copy legalisir SPECIAL PACKAGE – LATIVI tertanggal 24 September 2007 Nomor : 075/TS-WA/IX/2007 klien PSA BIRO HUKUM, periode 25 – 30 September 2007 ;
 - b. 1 (satu) lembar foto copy legalisir MEDIA PLAN PSA BIRO HUKUM periode September 2007, klien : SANDI PERKASA ;
 - c. 2 (dua) lembar foto copy legalisir LOG PROVE – Based on data of 02/10/2007 15:31:21 atas PO Nomor : PO/MP-010/PSA/BIHU/0907[paid], periode : 25/09/2007 – 30/09/2007 tertanggal 2 Oktober 2007 ;
 - d. 1 (satu) lembar foto copy legalisir INVOICE Nomor : 09.004.0208-07 tertanggal 2 Oktober 2007 ;

Hal. 215 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) lembar foto copy Dokumen FAKTUR PAJAK STANDAR Nomor seri : 010-000-07.00001935 tertanggal 31 Oktober 2007 ;
- f. 1 (satu) lembar foto copy legalisir BUKTI PENERIMAAN KAS / BANK PT. LATIVI MEDIA KARYA tertanggal 25 September 2007 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- g. 1 (satu) lembar foto copy legalisir SLIP STORAN Bank BRI tertanggal 25 September 2007 kepada PT. LATIVI MEDIA KARYA sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- h. 1 (satu) lembar foto copy legalisir REKENING KORAN PT. LATIVI MEDIA KARYA pada Bank Mandiri Nomor Rekening 125.000 212 843.7 periode 1 September s/d 4 Oktober 2007 ;
- 135. 2 (dua) lembar Dokumen asli Harga Pokok Produksi Filler Hukum, tertanggal 3 Maret 2010, ditandatangani atas nama TRIYITNO UNARTO ;
- 136. 1 (satu) bundel Dokumen terkait penerimaan 10 % dari pengadaan Filler Hukum 2007, sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 15 Januari 2006, telah terima dari Bagian Dokumentasi Hukum untuk pembayaran efisiensi kegiatan filler sebesar Rp.84.630.000,00 yang ditandatangani oleh an. BAHIR R ;
 - b. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 9 Maret 2007, telah terima dari Bagian Dokumentasi untuk pembayaran fee dari PT.Fortune untuk panitia pemeriksaan barang sebesar Rp.16.927.000,00 yang ditandatangani oleh an. YOSIFA ISMAYANTI ;
 - c. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 15 Januari 2006, telah terima dari Bagian Dokumentasi Hukum untuk pembayaran efisiensi kegiatan filler ABT sebesar Rp.186.700.000,00 yang ditandatangani oleh an. BAHIR R ;
 - d. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 24 Januari 2007, telah terima dari Bagian Dokumentasi untuk pembayaran dari PT.Raditya Putra Bahtera (Filler ABT) untuk pengurus barang sebesar Rp.18.668.000,00 yang ditandatangani oleh an. IRUS WANDI ;
 - e. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 24 Januari 2007, telah terima dari Bagian Dokumentasi untuk pembayaran dari PT.Raditya (Filler ABT) untuk PKC Biro hukum sebesar Rp.37.336.000,00 yang ditandatangani oleh an. BAHIR R ;

Hal. 216 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 15 November 2007, telah terima dari Bagian Dokumentasi Hukum untuk pembayaran Jasa Filler 2007 Karo Hukum sebesar Rp.199.831.000,00 yang ditandatangani oleh an. BAHIR ROMSAH ;
- g. 15 (lima belas) lembar Daftar Insentif/ Prestasi Kerja Karyawan Bagian Dokumentasi dan Publikasi Hukum ;
- 137. 1 (satu) bundel Dokumen terkait Kerjasama PT. Global Vision Universal dengan CV. Sandi Perkasa dalam hal pengadaan Filler 2007, antara lain :
 - a. 3 (tiga) lembar asli Dokumen PERJANJIAN KERJASAMA Nomor : 126/GVU-HF/114-SPK/VIII/2007 tertanggal 27 Agustus 2007 yang ditanda tangani Pihak Pertama an. YOS SANTO selaku Komisaris CV. SANDI PERKASA dan Pihak Kedua (diatas meterai 6.000) an. HERMAN FELANI selaku Direktur Utama PT. Global Vision Universal ;
 - b. 1 (satu) lembar asli Dokumen ADDENDUM Nomor : 126/GVU-HF/114-SPK/VIII/2007 tertanggal 17 September 2007 yang ditanda tangani Pihak Pertama an. YOS SANTO selaku Komisaris CV. SANDI PERKASA dan Pihak Kedua an. HERMAN FELANI selaku Direktur Utama PT. Global Vision Universal ;
- 138. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Tanda Setoran terkait penayangan Filler 2007, antara lain :
 - a. 1 (satu) lembar Dokumen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Surat Tanda Setoran Nomor : 24165 tanggal 24 Juni 2008 yang berisi Kantor Perbendaharaan Dan Kas Daerah Provinsi DKI Jakarta Harap Menerima Dari CV.Sandi Perkasa / Biro Hukum uang sejumlah Rp.184.000.000,00 (seratus delapan puluh empat juta rupiah) untuk : Pengembalian Uang kelebihan atas pekerjaan penayangan Filler Hukum yang terdapat kekurangan jumlah spot yang ditayangkan untuk 2 TV yaitu TPI dan Lativi sesuai perjanjian antara Biro Hukum dan CV.Sandi Perkasa No.508/077.72 tanggal 25 September 2007 (Cicilan I) yang ditandatangani oleh penyeter an. AGUS SUMARSONO ;
 - b. 1 (satu) lembar Dokumen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Surat Tanda Setoran Nomor : 25777 tanggal 1 Juli 2008 yang berisi Kantor Perbendaharaan Dan Kas Daerah Provinsi DKI Jakarta Harap Menerima Dari CV.Sandi Perkasa / Biro Hukum uang

Hal. 217 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.41.800.000,00 (empat puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk : Pengembalian Uang kelebihan atas pekerjaan penayangan Filler Hukum yang terdapat kekurangan jumlah spot yang ditayangkan untuk 2 TV yaitu TPI dan Lativi sesuai perjanjian antara Biro Hukum dan CV.Sandi Perkasa No.508/077.72 tanggal 25 September 2007 (Cicilan II) yang ditandatangani oleh penyeter an.AGUS SUMARSONO;

- c. 1 (satu) lembar Dokumen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Surat Tanda Setoran Nomor :8005 tanggal 21 Juli 2008 yang berisi Kantor Perbendaharaan Dan Kas Daerah Provinsi DKI Jakarta Harap Menerima Dari CV.Sandi Perkasa / Biro Hukum uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk : Pengembalian Uang kelebihan atas pekerjaan penayangan Filler Hukum yang terdapat kekurangan jumlah spot yang ditayangkan untuk 2 TV yaitu TPI dan Lativi sesuai perjanjian antara Biro Hukum dan CV.Sandi Perkasa No.508/077.72 tanggal 25 September 2007 (Cicilan III) yang ditandatangani oleh penyeter an.AGUS SUMARSONO ;
- d. 1 (satu) lembar Dokumen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Surat Tanda Setoran Nomor : 36601 tanggal 26 September 2008 yang berisi Kantor Perbendaharaan Dan Kas Daerah Provinsi DKI Jakarta Harap Menerima Dari CV.Sandi Perkasa / Biro Hukum uang sejumlah Rp.435.000.000,00 (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah) untuk : Pengembalian Uang kelebihan atas pekerjaan penayangan Filler Hukum yang terdapat kekurangan jumlah spot yang ditayangkan untuk 2 TV yaitu TPI dan Lativi sesuai perjanjian antara Biro Hukum dan CV.Sandi Perkasa No.508/077.72 tanggal 25 September 2007 (Cicilan IV) yang ditandatangani oleh penyeter an.AGUS SUMARSONO ;
- e. 1 (satu) lembar Dokumen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Surat Tanda Setoran Nomor : 42505 tanggal 24 Novemembr 2008 yang berisi Kantor Perbendaharaan Dan Kas Daerah Provinsi DKI Jakarta Harap Menerima Dari CV.Sandi Perkasa / Biro Hukum uang sejumlah Rp.277.200.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) untuk : Pengembalian Uang kelebihan atas pekerjaan penayangan Filler Hukum yang terdapat kekurangan jumlah spot yang ditayangkan untuk 2 TV yaitu

Hal. 218 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TPI dan Lativi sesuai perjanjian antara Biro Hukum dan CV.Sandi Perkasa No.508/077.72 tanggal 25 September 2007 (Cicilan V) yang ditandatangani oleh penyeter an.AGUS SUMARSONO ;

- f. 1 (satu) lembar Dokumen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Surat Tanda Setoran Nomor : 43671 tanggal 28 November 2008 yang berisi Kantor Perbendaharaan Dan Kas Daerah Provinsi DKI Jakarta Harap Menerima Dari CV.Sandi Perkasa / Biro Hukum uang sejumlah Rp.181.000.000,00 (seratus delapan puluh satu juta rupiah) untuk : Pengembalian Uang kelebihan atas pekerjaan penayangan Filler Hukum yang terdapat kekurangan jumlah spot yang ditayangkan untuk 2 TV yaitu TPI dan Lativi sesuai perjanjian antara Biro Hukum dan CV.Sandi Perkasa No.508/077.72 tanggal 25 September 2007 (Cicilan VI) yang ditandatangani oleh penyeter an.AGUS SUMARSONO ;
- 139. 1 (satu) bundel asli Dokumen Perjanjian Pelelangan Umum Pengadaan Jasa Gema Hukum Ibukota Jakarta Kebutuhan Biro Hukum Sekda Prov. DKI Jakarta antara Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan PT. ADILA JAYA SUKSES Nomor 654/077.92, yang berisi antara lain :
 - a. 5 (lima) lembar asli Dokumen Perjanjian Pelelangan Umum Pengadaan Jasa Gema Hukum Ibukota Jakarta Kebutuhan Biro Hukum Sekda Prov. DKI Jakarta antara Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan PT. ADILA JAYA SUKSES Nomor 654/077.92, tanggal 5 November 2007, yang ditandatangani oleh Pihak Pertama an. JORNAL E. SIAHAAN, SH. M.Si selaku Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Pihak Kedua an. IRADAH HASBOELLAH selaku Direktur Utama PT. ADILA JAYA SUKSES, beserta 2 (dua) lembar lampirannya;
 - b. 5 (lima) lembar foto copy Dokumen Perjanjian Pelelangan Umum Pengadaan Jasa Gema Hukum Ibukota Jakarta Kebutuhan Biro Hukum Sekda Prov. DKI Jakarta antara Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan PT. ADILA JAYA SUKSES Nomor 654/077.92, tanggal 5 November 2007, yang ditandatangani oleh Pihak Pertama an. JORNAL E. SIAHAAN, SH. M.Si selaku Kepala Biro

Hal. 219 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hukum Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Pihak Kedua an. IRADAH HASBOELLAH selaku Direktur Utama PT. ADILA JAYA SUKSES, beserta 2 (dua) lembar lampirannya;

- c. 1 (satu) lembar foto copy Dokumen Jaminan Pelaksanaan ASURANSI PURI ASIH Nomor Bond : 81.0.14.27160.10.07.LR, Nilai Bond : Rp.139.425.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), tertanggal 5 November 2007, yang ditandatangani oleh an. CHARLES MD. SIANIPAR, SE selaku Branch Manager PT. ASURANSI PURI ASIH (Surety), dan an. IRADAH HASBOELAH selaku Direktur Utama PT. ADILA JAYA SUKSES (Principal) ;
- d. 2 (dua) lembar asli Dokumen Keputusan Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 652/077.922, tanggal 5 November 2007 tentang Penunjukkan PT. ADILA JAYA SUKSES sebagai perusahaan penyedia barang/jasa pengadaan Jasa Gema Hukum Ibukota Jakarta Kebutuhan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta, yang ditandatangani oleh an. JORNAL E. SIAHAAN, SH. M.Si selaku Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
- e. 3 (tiga) lembar asli Dokumen Keputusan Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 644/077.92, tanggal 30 Oktober 2007 tentang Penetapan Penyedia Barang/Jasa Pelelangan Umum Pengadaan Jasa Gema Hukum Ibukota Jakarta Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov. DKI Jakarta, yang ditandatangani oleh an. JORNAL E. SIAHAAN, SH. M.Si selaku Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
- f. 1 (satu) lembar asli Dokumen pengumuman pemenang pelelangan umum pengadaan jasa Gema hukum kebutuhan biro hukum Setdaprov DKI Jakarta, Nomor : 25/PPBJ/Peng/L/GH/X/2007, tertanggal 29 Oktober 2007, ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua ;
- g. 1 (satu) lembar asli Dokumen Nomor : 643/079.32, tanggal 29 Oktober 2007 perihal Penetapan Pemenang Lelang Umum Pengadaan Jasa Gema Hukum Kebutuhan Biro Hukum

Hal. 220 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setdaprov. DKI Jakarta, yang ditujukan kepada Panitia Pengadaan Barang / Jasa Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta, yang ditandatangani oleh an. JORNAL E. SIAHAAN, SH. M.Si selaku Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;

- h. 4 (empat) lembar asli Dokumen Nomor : 24/PPBJ/Lap./GH/X/2007, tanggal 26 Oktober 2007 perihal Laporan lelang umum pengadaan jasa Gema hukum Ibukota Jakarta kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta, yang ditujukan kepada Kepala Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta, ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua ;
- i. 3 (tiga) lembar asli Dokumen Berita Acara Penetapan Calon Pemenang Lelang dan Cadangan Calon Pemenang Pengadaan Jasa Gema Hukum Ibukota Jakarta Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov. DKI Jakarta Nomor : 23/PPBJ/BA/GH/X/2007 tanggal 26 Oktober 2007, yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua, IWAN SATYOPRODJO, SH, MM selaku Sekretaris, ISMIYATUN, SH, ENDANG SUMARDI, SH, KM. JAUHARI, SH, RADIAH, SH dan SUCI RAHAYU selaku Anggota ;
- j. 4 (empat) lembar asli Dokumen Berita Acara Hasil Pelelangan Umum Pengadaan Jasa Gema Hukum Ibukota Jakarta Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov. DKI Jakarta Nomor : 22/PPBJ/BA/GH/X/2007 tanggal 26 Oktober 2007, yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua, IWAN SATYOPRODJO, SH, MM selaku Sekretaris, ISMIYATUN, SH, Endang SUMARDI, SH, KM. JAUHARI, SH, RADIAH, SH dan SUCI RAHAYU selaku Anggota;
- k. 2 (dua) lembar asli Dokumen Berita Acara Peninjauan ke Stasiun Televisi Swasta PT. Indosiar Visual Mandiri dalam rangka klarifikasi penayangan pengadaan jasa Gema Hukum Ibukota Jakarta Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov. DKI Jakarta, Nomor : 21/PPBJ/BA/GH/X/2007 tanggal 25 Oktober 2007, yang

Hal. 221 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua, IWAN SATYOPRODJO, SH, MM selaku Sekretaris, ISMIYATUN, SH, Endang SUMARDI, SH, KM. JAUHARI, SH, RADIAH, SH dan SUCI RAHAYU selaku anggota serta tanda tangan an. ALVONSUS SUSANTO dari PT. INDOSIAR VISUAL MANDIRI ;

- I. 3 (tiga) lembar asli Dokumen Berita Acara Penilaian dan Pembuktian Kualifikasi Dokumen Penawaran Pelelangan Umum Dalam Rangka Pengadaan Jasa Gema Hukum Ibukota Jakarta Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov. DKI Jakarta Nomor : 20/PPBJ/BA/GH/X/2007 tanggal 25 Oktober 2007, yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua, IWAN SATYOPRODJO, SH, MM selaku Sekretaris, ISMIYATUN, SH, Endang SUMARDI, SH, KM. JAUHARI, SH, RADIAH, SH dan SUCI RAHAYU selaku Anggota;
- m. 1 (satu) lembar asli Dokumen Nomor : 19/PPBJ/UND/GH/X/2007, tanggal 24 Oktober 2007 perihal Undangan, yang ditujukan kepada IWAN SATYOPRODJO, SH, MM, ISMIYATUN, SH, Endang SUMARDI, SH, KM. JAUHARI, SH, RADIAH, SH dan SUCI RAHAYU, yang ditandatangani oleh an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;
- n. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Hadir pada hari/tanggal : Kamis, 25 Oktober 2007, pukul 09.00 WIB, Tempat : Ruang Rapat Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Blok G lantai 9 Jl. Merdeka Selatan 8-9 Jakarta Pusat, Acara Penilaian dan Pembuktian Kualifikasi Dokumen Surat Penawaran Harga (SPH) Pelelangan Umum Pengadaan Jasa Filler Hukum Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov. DKI Jakarta, yang terdapat tanda tangan nomor urut 1 (satu) an. MADE SUARJAYA, SH sampai dengan nomor urut 10 (sepuluh) an. INDRI NOVITASARI (PT. DWI PUTRA KREASI), yang ditandatangani oleh an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua

Hal. 222 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia Pengadaan Barang / Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;

- o. 1 (satu) lembar asli Dokumen Nomor : 18/PPBJ/UND/GH/X/2007, tanggal 24 Oktober 2007 perihal Undangan, yang ditujukan kepada Direktur/pimpinan CV. KARYA CHRISNA JAYA Jl. Gardu No. 17 Kelurahan Balekambang Jakarta Timur, yang ditandatangani oleh an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;
- p. 1 (satu) lembar asli Dokumen Nomor : 18/PPBJ/UND/GH/X/2007, tanggal 24 Oktober 2007 perihal Undangan, yang ditujukan kepada Direktur/pimpinan PT. DWI PUTRA KREASI Jln. Merpati No. 20 Cidodol Jakarta Selatan, yang ditandatangani oleh an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;
- q. 1 (satu) lembar asli Dokumen Nomor : 18/PPBJ/UND/GH/X/2007, tanggal 24 Oktober 2007 perihal Undangan, yang ditujukan kepada Direktur/pimpinan PT. ADILA JAYA SUKSES Jln. Gatot Subroto Komp. Timah No. 20 Kel. Menteng Dalam Kec. Tebet Jakarta Selatan, yang ditandatangani oleh an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;
- r. 3 (tiga) lembar asli Dokumen Berita Acara Evaluasi Dokumen Kualifikasi Surat Penawaran Harga (SPH) Pelelangan Umum Dalam Rangka Pengadaan Jasa Gema Hukum Ibukota Jakarta Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov. DKI Jakarta Nomor : 17/PPBJ/BA/GH/X/2007, tanggal 24 Oktober 2007, yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua, IWAN SATYOPRODJO, SH, MM selaku Sekretaris, ISMIYATUN, SH, Endang SUMARDI, SH, KM. JAUHARI, SH, RADIAH, SH dan SUCI RAHAYU selaku Anggota;
- s. 3 (tiga) lembar asli Dokumen Berita Acara Evaluasi Teknis dan Harga Dokumen Penawaran Pelelangan Umum Dalam Rangka Pengadaan Jasa Gema Hukum Kebutuhan Biro Hukum

Hal. 223 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setdaprov. DKI Jakarta beserta lampirannya, Nomor : 16/PPBJ/BA/GA/X/2007, tanggal 24 Oktober 2007, yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua (tidak ditanda tangan), IWAN SATYOPRODJO, SH, MM selaku Sekretaris, ISMIYATUN, SH, Endang SUMARDI, SH, KM. JAUHARI, SH, RADIAH, SH dan SUCI RAHAYU selaku anggota, berikut 14 (empat belas) lampirannya ;

- t. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran (SPH) Sampul II Pelelangan Umum Dalam Rangka Pengadaan Jasa Gema Hukum Ibukota Jakarta Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta, Nomor : 15/PPBJ/BA/GH/X/2007, tanggal 23 Oktober 2007, yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua, IWAN SATYOPRODJO, SH, MM selaku Sekretaris, ISMIYATUN, SH, Endang SUMARDI, SH, KM. JAUHARI, SH, RADIAH, SH dan SUCI RAHAYU selaku anggota, dan Penyedia Barang/Jasa PT. ADILA JS, PT. DWI PUTRA K, PT. KARYA CJ dan PT. TREND yang ditanda tangan tanpa nama ;
- u. 1 (satu) lembar asli Dokumen Nomor : 14/PPBJ/UND/GH/X/2007, tanggal 22 Oktober 2007 perihal Undangan, yang ditujukan kepada IWAN SATYOPRODJO, SH, MM, ISMIYATUN, SH, Endang SUMARDI, SH, KM. JAUHARI, SH, RADIAH, SH dan SUCI RAHAYU, yang ditandatangani oleh an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;
- v. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Hadir, Hari/tanggal Selasa, 23 Oktober 2007, waktu 15.00 WIB, tempat Ruang rapat Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Blok G lantai 9 Jln. Merdeka Selatan 8 – 9 Jakarta Pusat, Acara Pembukaan surat penawaran harga (SPH) Sampul II Pelelangan Umum pengadaan jasa penyelenggaraan Gema Hukum Ibukota Jakarta, terdapat tanda tangan nomor urut 1 (satu) an. MADE SUARJAYA, SH sampai dengan nomor urut 11 (sebelas) an. IRMA DAHLIA dari PT. TRENDEKA, yang ditanda tangani oleh

Hal. 224 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa ;

- w. 1 (satu) lembar asli Dokumen Nomor : 13/PPBJ/UND/GH/X/2007, tanggal 22 Oktober 2007 perihal Undangan, yang ditujukan kepada Direktur/Pimpinan PT. TRENDEKA LESTARI Jln. Tebet Barat Dalam 8 G No. 11 Jakarta Selatan, yang ditandatangani oleh an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;
- x. 1 (satu) lembar asli Dokumen Nomor : 13/PPBJ/UND/GH/X/2007, tanggal 22 Oktober 2007 perihal Undangan, yang ditujukan kepada Direktur/Pimpinan CV. KARYA CHRISNA JAYA Jln. Gardu No. 17 Kel. Balekambang Jakarta Timur, yang ditandatangani oleh an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;
- y. 1 (satu) lembar asli Dokumen Nomor : 13/PPBJ/UND/GH/X/2007, tanggal 22 Oktober 2007 perihal Undangan, yang ditujukan kepada Direktur/Pimpinan PT. DWI PUTRA KREASI Jln. Merpati No. 20 Cidodol Jakarta Selatan, yang ditandatangani oleh an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;
- z. 1 (satu) lembar asli Dokumen Nomor : 13/PPBJ/UND/GH/X/2007, tanggal 22 Oktober 2007 perihal Undangan, yang ditujukan kepada Direktur/Pimpinan PT. ADILA JAYA SUKSES Jln. Gatot Subroto Komp. Timah No. 20 Kel. Menteng Dalam Kec. Tebet Jakarta Selatan, yang ditandatangani oleh an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;
- aa. 3 (tiga) lembar asli Dokumen Berita Acara Evaluasi Administrasi Dokumen Penawaran Pelelangan Umum dalam rangka pengadaan jasa Gema Hukum Ibukota Jakarta kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta Nomor : 12/PPBJ/BA/GH/X/2007 tanggal 22 Oktober 2007, yang ditanda tangani oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua,

Hal. 225 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IWAN SATYOPRODJO, SH, MM selaku Sekretaris, ISMIYATUN, SH, Endang SUMARDI, SH, KM. JAUHARI, SH, RADIAH, SH dan SUCI RAHAYU selaku Anggota ;

- ab. 1 (satu) lembar asli Dokumen Nomor : 11/PPBJ/UND/GH/X/2007, tanggal 11 Oktober 2007 perihal Undangan, yang ditujukan kepada IWAN SATYOPRODJO, SH, MM, ISMIYATUN, SH, Endang SUMARDI, SH, KM. JAUHARI, SH, RADIAH, SH dan SUCI RAHAYU, yang ditandatangani oleh an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;
- ac. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Hadir, Hari/tanggal Senin, 22 Oktober 2007, waktu 09.00 WIB, tempat Ruang rapat Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Blok G lantai 9 Jln. Merdeka Selatan 8 – 9 Jakarta Pusat, Acara Evaluasi dokumen penawaran Pelelangan Umum pengadaan jasa penyelenggaraan Gema Hukum Ibukota Jakarta, terdapat tanda tangan nomor urut 1 (satu) an. MADE SUARJAYA, SH sampai dengan nomor urut 7 (tujuh) an. SUCI RAHAYU, yang ditandatangani oleh MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa ;
- ad. 2 (dua) lembar asli Dokumen Berita Acara Pembukaan dokumen Penawaran (SPH) Sampul I Pelelangan Umum dalam rangka pengadaan jasa Gema Hukum Ibukota Jakarta kebutuhan Biro Hukum Setdaprov. DKI Jakarta Nomor : 10/PPBJ/BA/GH/X/2007 tanggal 11 Oktober 2007, yang ditandatangani Panitia Pengadaan Barang/Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua, IWAN SATYOPRODJO, SH, MM selaku Sekretaris, ISMIYATUN, SH, Endang SUMARDI, SH, KM. JAUHARI, SH, RADIAH, SH dan SUCI RAHAYU selaku anggota ;
- ae. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Hadir, Hari/tanggal Kamis, 11 Oktober 2007, waktu 09.00 WIB, tempat Ruang rapat Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Blok G lantai 9 Jln. Merdeka Selatan 8 – 9 Jakarta Pusat, Acara Evaluasi dokumen penawaran Pelelangan Umum pengadaan jasa penyelenggaraan Gema Hukum Ibukota Jakarta, terdapat tanda tangan nomor urut 1 (satu) an. MADE SUARJAYA, SH sampai

Hal. 226 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor urut 7 (tujuh) an. SUCI RAHAYU, yang ditanda tangani oleh MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa ;

- af. 1 (satu) lembar asli Dokumen Nomor : 09/PPBJ/UND/GH/X/2007, tanggal 10 Oktober 2007 perihal Undangan, yang ditujukan kepada IWAN SATYOPRODJO, SH, MM, ISMIYATUN, SH, Endang SUMARDI, SH, KM. JAUHARI, SH, RADIAH, SH dan SUCI RAHAYU, yang ditandatangani oleh an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;
- ag. 1 (satu) lembar asli Dokumen Nomor : 08/PPBJ/UND/GH/X/2007, tanggal 10 Oktober 2007 perihal Undangan, yang ditujukan kepada Direktur/Pimpinan PT. Sebagaimana terlampir, yang ditandatangani oleh an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;
- ah. 4 (empat) lembar asli Dokumen Data Kelengkapan Surat Perintah Kerja (SPH) ;
- ai. 6 (enam) lembar asli Dokumen Data Penawaran Harga PT. Adila Jaya Sukses ;
- aj. 83 (delapan puluh tiga) lembar Dokumen Proposal Administrasi Gema Hukum Ibukota Jakarta, PT. ADILA JAYA SUKSES ;
- ak. 144 (seratus empat puluh empat) lembar Dokumen Penawaran PT. DWI PUTRA KREASI ;
- al. 188 (seratus delapan puluh delapan) lembar Dokumen Penawaran CV. KARYA CHRISNA JAYA ;
- am. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Hadir, Hari/tanggal Rabu s.d Kamis, 10 s.d 11 Oktober 2007, waktu 08.00 s.d 15.00 WIB, tempat Ruang rapat Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Blok G lantai 9 Jln. Merdeka Selatan 8 – 9 Jakarta Pusat, Acara Pemasukan dokumen penawaran Pelelangan Umum pengadaan jasa penyelenggaraan Gema Hukum Ibukota Jakarta, terdapat tanda tangan nomor urut 1 (satu) an. MADE SUARJAYA, SH sampai dengan nomor urut 7 (tujuh) an. SUCI RAHAYU, yang ditanda tangani oleh MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa ;

Hal. 227 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- an. 2 (dua) lembar asli Dokumen Nomor : 07/PPBJ/UND/GH/X/2007, tanggal 9 Oktober 2007 perihal Undangan, yang ditujukan kepada Direktur/Pimpinan PT., yang ditandatangani oleh an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;
- ao. 2 (dua) lembar dokumen asli Berita Acara Penjelasan Rencana Kerja dan Syarat-syarat Pelelangan Umum Pengadaan Jasa Penyelenggaraan Gema Hukum Ibukota Jakarta Nomor : 06/PPBJ/BA/ GH/X/2007 tanggal 2 Oktober 2007, yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua, IWAN SATYOPRODJO, SH, MM selaku Sekretaris, ISMIYATUN, SH, Endang SUMARDI, SH, KM. JAUHARI, SH, RADIAH, SH dan SUCI RAHAYU selaku anggota serta terdapat tanda tangan PT. ADILA JAYA SUKSES, PT DWI PUTRA KREASI, PT. TRENDEKA LESTARI dan CV. KARYA C JAYA ;
- ap. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Hadir, Hari/tanggal Selasa, 9 Oktober 2007, waktu 14.00 WIB, tempat Ruang rapat Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Blok G lantai 9 Jln. Merdeka Selatan 8 – 9 Jakarta Pusat, Acara Pelaksanaan Penjelasan (Aanwijzing) rencana kerja dan syarat-syarat Pelelangan Umum pengadaan jasa penyelenggaraan Gema Hukum Ibukota Jakarta, terdapat tanda tangan nomor urut 1 (satu) an. MADE SUARJAYA, SH sampai dengan nomor urut 11 (sebelas) an. S. LUBIS, yang ditanda tangani oleh MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa ;
- aq. 2 (dua) lembar asli Dokumen Nomor : 05/PPBJ/UND/GH/X/2007, tanggal 3 Oktober 2007 perihal Undangan, yang ditujukan kepada Direktur/Pimpinan PT., yang ditandatangani oleh an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;
- ar. 1 (satu) lembar asli Dokumen Nomor : 04a/PPBJ/UND/GH/X/2007 tertanggal 3 Oktober 2007 perihal Undangan, yang ditujukan kepada IWAN SATYOPRODJO, SH, MM, ISMIYATUN,

Hal. 228 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH, Endang SUMARDI, SH, KM. JAUHARI, SH, RADIAH, SH dan SUCI RAHAYU, yang ditandatangani oleh an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;

- as. 2 (dua) lembar asli Dokumen Peserta Hadir Pendaftaran Pelelangan Umum Penyelenggaraan Gema Hukum Ibukota Jakarta kebutuhan Biro Hukum Setdaprov. DKI Jakarta Tahun Anggaran 2007, yang ditandatangani oleh an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta dan mengetahui JORNAL E. SIAHAAN selaku Kepala Biro Hukum (tanpa tanda tangan) ;
- at. 2 (dua) lembar foto copy Kwitansi IKL – 062068 dengan tanggal cetak 01-10-2007 ;
- au. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak Standar Nomor : 020.000-07.00005054 ;
- av. 2 (dua) lembar Kliping Koran perihal Pengumuman Lelang Nomor : 04/PPBJ/L/Peng/X/2007 ;
- aw. 2 (dua) lembar asli Dokumen Pengumuman Pelelangan Umum Pengadaan Jasa Penyelenggaraan Gema Hukum Ibukota Jakarta Dengan Pascakualifikasi Nomor : 03/PPBJ/L/GH/X/2007 tanggal 2 Oktober 2007, yang ditandatangani oleh an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;
- ax. 2 (dua) lembar asli Dokumen Harga Perkiraan Sendiri / OE, tertanggal 24 September 2007 yang ditanda tangani oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua, IWAN SATYOPRODJO, SH, MM selaku Sekretaris, ISMIYATUN, SH, Endang SUMARDI, SH, KM. JAUHARI, SH, RADIAH, SH dan SUCI RAHAYU selaku anggota serta mengetahui JORNAL E. SIAHAAN selaku Kepala Biro Hukum DKI Jakarta ;
- ay. 12 (dua belas) lembar foto copy Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-syarat Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi Nomor : 02/PPBJ/RKS/GH/IX/2007 tanggal 24 September 2007, yang ditandatangani oleh an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Biro Hukum Sekretariat

Hal. 229 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Provinsi DKI Jakarta dan mengetahui JORNAL E. SIAHAAN selaku Kepala Biro Hukum, berikut 3 (tiga) lembar lampirannya ;

- az. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Hadir, Hari/tanggal Jum'at, 28 September 2007, waktu 14.00 WIB, tempat Ruang rapat Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Blok G lantai 9 Jln. Merdeka Selatan 8 – 9 Jakarta Pusat, Acara Persiapan Pelelangan Umum pengadaan jasa penyelenggaraan Gema Hukum Ibukota Jakarta, terdapat tanda tangan nomor urut 1 (satu) an. MADE SUARJAYA, SH sampai dengan nomor urut 7 (tujuh) an. SUCI RAHAYU, yang ditanda tangani oleh MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa ;
- ba. 1 (satu) lembar asli Notulen Rapat Hari/tanggal Jum'at, 28 September 2007, waktu 14.00 WIB, tempat Ruang rapat Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Blok G lantai 9 Jln. Merdeka Selatan 8 – 9 Jakarta Pusat, Acara Persiapan Pelelangan Umum pengadaan jasa penyelenggaraan Gema Hukum Ibukota Jakarta, yang ditanda tangani oleh MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa ;
- bb. 1 (satu) lembar asli Dokumen Nomor : 01/PPBJ/UND/GH/IX/2007 tertanggal 27 September 2007 perihal Undangan, yang ditujukan kepada IWAN SATYOPRODJO, SH, MM, ISMIYATUN, SH, Endang SUMARDI, SH, KM. JAUHARI, SH, RADIAH, SH dan SUCI RAHAYU, yang ditandatangani oleh an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;
- bc. 1 (satu) lembar asli Dokumen Nomor : 561/077.921 tertanggal 24 September 2007 perihal Permintaan Pelelangan Umum Penyelenggaraan Gema Hukum Ibukota Jakarta, yang ditujukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa, yang ditanda tangani JORNAL E. SIAHAAN selaku Kepala Biro Hukum DKI Jakarta, berikut 2 (dua) lembar lampirannya ;
- bd. 1 (satu) lembar asli Dokumen Nomor : 4164/073.532 tertanggal 5 September 2007 perihal Permintaan Patoka Harga, yang ditujukan kepada Kepala Biro Hukum Provinsi DKI Jakarta, yang

Hal. 230 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani Drs. H. RIYANTO, Msi selaku Kepala Biro
Perlengkapan Prov. DKI Jakarta ;

be. 2 (dua) lembar foto copy Dokumen Keputusan Kepala Biro
Perlengkapan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor :
2747/073.532 tertanggal 17 Juli 2006 tentang Penetapan
Patokan Harga Satuan Barang Insidental Kebutuhan Pemerintah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk kebutuhan Biro
Hukum Provinsi DKI Jakarta, berikut 2 (dua) lembar lampirannya;

140. 1 (satu) bundel asli Dokumen Perjanjian Pelelangan Umum
Pengadaan Jasa Gema Hukum Ibukota Jakarta Kebutuhan Biro
Hukum Sekda Prov. DKI Jakarta antara Biro Hukum Sekretariat
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan PT. ADILA
JAYA SUKSES Nomor 654/077.92, yang berisi antara lain :

- a. 1 (satu) lembar asli Dokumen SPM Giro No : 00143352007
Tahun 2007 tertanggal 28 November 2007, sebesar Rp.
2.420.952.000,- (dua milyar empat ratus dua puluh juta sembilan
ratus lima puluh dua ribu rupiah) kepada PT. ADILA JAYA
SUKSES sehubungan Kontrak Nomor. 654/077.92, tanggal 5
November 2007 ;
- b. 1 (satu) lembar asli Kwitansi PT. ADILA JAYA SUKSES
tertanggal 27 November 2007 sebesar Rp. 2.788.500.000,- (dua
milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribu
rupiah), yang ditandatangani diatas materai 6.000 an. IRADAH
HASBOELAH selaku Direktur dan an. BAHIR ROMSAH
selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum DKI
Jakarta, terdapat stempel dan tandatangan an. JORNAL E.
SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum Prov. DKI Jakarta;
- c. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Pengantar Surat
Permintaan Pembayaran No. 77/SPP/BHK/BT/2007 tertanggal
27 November 2007, yang ditanda tangani an. BAHIR ROMSAH
selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum
Setdaprov DKI Jakarta dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi
selaku Kepala Biro Hukum ;
- d. 1 (satu) lembar asli Dokumen Surat Permintaan Pembayaran
Beban Tetap No. 77/SPP/BT/BHK/2007 tertanggal 27 November
2007, yang ditanda tangani an. BAHIR ROMSAH selaku
Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum Setdaprov DKI

Hal. 231 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum ;

- e. 2 (dua) lembar asli Dokumen Berita Acara Bobot Volume Pekerjaan Penayangan Jasa Gema Hukum Ibukota Jakarta dalam rangka Sosialisasi produk hukum melalui media televisi swasta nasional kebutuhan Biro Hukum Sekda Prov DKI Jakarta Nomor : 072/AJS-BA/DKI/X/2007 tanggal 20 November 2007, yang ditandatangani an. IRADAH HASBOELAH selaku Direktur Utama PT. ADILA JAYA SUKSES dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum Prov. DKI Jakarta;
- f. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Barang (BAPB) Nomor : 17/BAPB/BH/XI/2007 tertanggal 20 November 2007, ditanda tangani oleh Panitia Pemeriksa Barang nomor urut 1 (satu) Ketua sampai dengan 5 (lima) anggota, an. IRADAH HASBOELAH selaku Direktur Utama PT. ADILA JAYA SUKSES dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 3 (tiga) lembar asli lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang ;
- g. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 22/BAST/BH/XI/2007 tanggal 20 November 2007, yang ditanda tangani an. IRUSWANDI, SH.M.Kn selaku Pengurus Barang unit Biro Hukum, an. IRADAH HASBOELAH selaku Direktur Utama PT. ADILA JAYA SUKSES dan mengetahui an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 3 (tiga) lembar asli lampiran Berita Acara Serah Terima Barang ;
- h. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Penyerahan Pekerjaan, yang ditandatangani an. an. IRADAH HASBOELAH selaku Direktur Utama PT. ADILA JAYA SUKSES dan an. JORNAL E. SIAHAAN, Sh, Msi selaku Kepala Biro Hukum Prov. DKI Jakarta ;
- i. 3 (tiga) lembar asli Dokumen Post Transmission Log dari PT. INDOSIAR VISUAL MANDIRI, tertanggal 21 November 2007, ditandatangani (tanpa nama) oleh pejabat selaku Traffic Assistant dan selaku Senior Supervisor ;
- j. 1 (satu) lembar asli Dokumen Invoice dari PT. ADILA JAYA SUKSES tertanggal 20 November 2007, sebesar Rp. 2.788.500,-

Hal. 232 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus ribu rupiah), ditujukan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Jl. Medan Merdeka Selatan No. 8-9 Jakarta Pusat, ditandatangani oleh pihak PT. ADILA JAYA SUKSES (tanpa nama) ;

141. 1 (satu) bundel Dokumen terkait penayangan Gema Hukum 2007 di PT. Indosiar Visual Mandiri, antara lain :

a. 1 (satu) bundel Dokumen, yang terdiri dari :

- 1) 1 (satu) lembar asli tindisan INVOICE Nomor 030973 tertanggal 21 November 2006 sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- 2) 1 (satu) lembar asli tindisan FAKTUR PAJAK STANDAR Nomor seri : 010.000-07.00005329 tertanggal 21 November 2006 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 3) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Rekening Koran PT. Indosiar Visual Mandiri pada Bank Central Asia Nomor : 1623123450 periode 30 November s/d 31 Desember 2007 ;
- 4) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Rekening Koran PT. Indosiar Visual Mandiri pada Bank Central Asia Nomor : 1623123450 periode 31 Oktober s/d 30 November 2006 ;

b. 1 (satu) bundel Dokumen, yang terdiri dari :

- 1) 1 (satu) lembar asli tindisan INVOICE Nomor 030974 tertanggal 21 November 2006 sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) ;
- 2) 1 (satu) lembar asli tindisan FAKTUR PAJAK STANDAR Nomor seri : 010.000-07.00005827 tertanggal 21 November 2006 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- 3) 1 (satu) lembar asli tindisan POST TRANSMISSION LOG pada tanggal 3 s/d 5 November 2007 ;
- 4) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Rekening Koran PT. Indosiar Visual Mandiri pada Bank Central Asia Nomor : 1623123450 periode 30 November s/d 31 Desember 2007 ;

c. 1 (satu) bundel Dokumen, yang terdiri dari :

- 1) 1 (satu) lembar asli tindisan INVOICE Nomor 030975 tertanggal 21 November 2006 sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah). ;

Hal. 233 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) lembar asli tindisan FAKTUR PAJAK STANDAR Nomor seri : 010.000-07.00005825 tertanggal 21 November 2006 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 3) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Rekening Koran PT. Indosiar Visual Mandiri pada Bank Central Asia Nomor : 1623123450 periode 30 November s/d 31 Desember 2007 ;
- 4) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Rekening Koran PT. Indosiar Visual Mandiri pada Bank Central Asia Nomor : 1623123450 periode 31 Oktober s/d 30 November 2006 ;
- d. 1 (satu) bundel Dokumen, yang terdiri dari :
 - 1) 1 (satu) lembar asli tindisan INVOICE Nomor 030976 tertanggal 21 November 2006 sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;
 - 2) 1 (satu) lembar asli tindisan FAKTUR PAJAK STANDAR Nomor seri : 010.000-07.00005826 tertanggal 21 November 2006 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - 3) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Rekening Koran PT. Indosiar Visual Mandiri pada Bank Central Asia Nomor : 1623123450 periode 30 November s/d 31 Desember 2007 ;
 - 4) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Rekening Koran PT. Indosiar Visual Mandiri pada Bank Central Asia Nomor : 1623123450 periode 31 Oktober s/d 30 November 2006 ;
- e. 1 (satu) bundel Dokumen, yang terdiri dari :
 - 1) 1 (satu) lembar asli tindisan INVOICE Nomor 030977 tertanggal 21 November 2006 sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) ;
 - 2) 1 (satu) lembar asli tindisan FAKTUR PAJAK STANDAR Nomor seri : 010.000-07.00005828 tertanggal 21 November 2006 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
 - 3) 1 (satu) lembar asli tindisan POST TRANSMISSION LOG pada tanggal 10 s/d 12 November 2007 ;
 - 4) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Rekening Koran PT. Indosiar Visual Mandiri pada Bank Central Asia Nomor : 1623123450 periode 30 November s/d 31 Desember 2007;
- f. 1 (satu) bundel Dokumen, yang terdiri dari :

Hal. 234 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) lembar asli tindisan INVOICE Nomor 030993 tertanggal 21 November 2006 sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) ;
- 2) 1 (satu) lembar asli tindisan FAKTUR PAJAK STANDAR Nomor seri : 010.000-07.00005829 tertanggal 21 November 2006 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- 3) 1 (satu) lembar asli tindisan POST TRANSMISSION LOG pada tanggal 17 s/d 19 November 2007 ;
- 4) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Rekening Koran PT. Indosiar Visual Mandiri pada Bank Central Asia Nomor : 1623123450 periode 30 November s/d 31 Desember 2007 ;
- g. 4 (empat) lembar asli dokumen Daftar Pengisi Acara PROGRAM ACARA : "CINTA JAKARTA" di INDOSIAR periode 2006 – 2007 ;
142. 1 (satu) bundel Dokumen terkait penggunaan anggaran terkait penayangan Gema Hukum oleh PT. Adila Jaya Sukses, yang berisi antara lain :
 - a. 1 (satu) lembar Dokumen Budget/ Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Proyek "Cinta Jakarta Pemda DKI" Tahun 2007 PT. Adila Jaya Sukses ;
 - b. 1 (satu) lembar Tanda Terima Bilyet Giro Bank DKI No. BI. 455008 senilai Rp. 100.000.000,00 dan No. BI. 455009 senilai Rp. 140.000.000,00 keterangan Biaya Production Cost Cinta Jakarta 2007 (Stage, perlengkapan) yang ditanda tangani oleh penerima an. ALVON tanggal 31 Oktober 2007 ;
 - c. 1 (satu) lembar Tanda Terima Giro Bank DKI No. BI. 409317 senilai Rp. 366.750.000,-, yang ditanda tangai oleh penerima an.WAWAN tanggal 7 Desember 2007, dengan keterangan Pembayaran Invoice :
 - 1) No. 030973 senilai Rp. 275.000.000,- ;
 - 2) No. 030976 senilai Rp. 275.000.000,- ;
 - 3) No. 030975 senilai Rp. 275.000.000,- ;
 - 4) No. 030993 senilai Rp. 110.000.000,- ;
 - 5) No. 030997 senilai Rp. 110.000.000,- ;
 - 6) No. 030974 senilai Rp. 110.000.000,- ;
 - d. 1 (satu) lembar Tanda Terima Bilyet Giro Bank DKI No.BI.409311 senilai Rp. 250.000.000,00, No. BI. 409312 senilai Rp. 250.000.000,00 dan No. BI. 409313 senilai Rp.

Hal. 235 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



250.000.000,00 keterangan Biaya Production Cost Cinta Jakarta untuk 3 (tiga) Episode yang ditanda tangani oleh penerima an. ALVON tanggal 31 Oktober 2007 ;

- e. 1 (satu) lembar Kwitansi Fee Artis Pengisi Acara "Cinta Jakarta" sebesar Rp. 300.000.000,00 yang ditanda tangani oleh penerima an. ERRI RIZALDI tanggal 28 Oktober 2007 ;
- f. 1 (satu) lembar kwitansi Pelunasan Fee Artis pengisi Acara "Cinta Jakarta" sebesar Rp. 255.000.000,00 yang ditanda tangani oleh penerima an. ERRI RIZALDI tanggal 12 Nopember 2007 ;
- g. 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Tunai sebesar Rp. 7.500.000,00 keterangan Biaya Supervisi team kreatif Cinta Jakarta sebanyak 3 episode yang ditanda tangani oleh penerima an. BAMBANG WIDHIYANTO tanggal 1 Nopember 2007 ;
- h. 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Tunai sebesar Rp. 7.500.000,00 keterangan Pelunasan Biaya Supervisi team kreatif Cinta Jakarta sebanyak 3 episode yang ditanda tangani oleh penerima an. BAMBANG WIDHIYANTO tanggal 21 Nopember 2007 ;
- i. 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Tunai sebesar Rp. 4.000.000,00 keterangan Biaya Dokumentasi Foto Acara Cinta Jakarta Episode I tanggal 5 Nopemebr 2007 yang ditanda tangani oleh penerima an. BIMA KAROS tanggal 6 Nopember 2007 ;
- j. 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Tunai sebesar Rp. 8.000.000,00 keterangan Biaya Dokumentasi Foto Acara Cinta Jakarta Episode II dan III tanggal 12 dan 19 Nopember 2007 yang ditanda tangani oleh penerima an. BIMA KAROS tanggal 20 Nopember 2007 ;
- k. 1 (satu) lembar bukti Setoran Bank BCA tanggal 28 Nopember 2007 sebesar Rp. 2.000.000,00 ke No. rek. 162.3123.450 an. PT. INDOSIAR VISUAL MANDIRI yang ditanda tangani penyetor an. SUTRISNO dengan alamat penyetor PT. Adila Jaya Sukses ;
- l. 1 (satu) lembar bukti Setoran bBank BCA tanggal 14 Nopember 2007 sebesar Rp. 4.000.000,00 ke No. Rek. 162.3123.450 an. PT. INDOSIAR VISUAL MANDIRI yang ditand tangai penyetor an. SUTRISNO dengan alamat penyetor PT. Adila Jaya Sukses ;

Hal. 236 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Paket Dinner dan Coffee Break 300 pack tanggal 5 Nopember 2007 di Indosiar sebesar Rp. 15.000.000,00 yang ditanda tangani oleh an. IDA CATERING tanggal 2 Nopember 2007 ;
- n. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Paket Dinner dan Coffee Break 300 pack tanggal 12 Nopember 2007 di Indosiar sebesar Rp. 15.000.000,00 yang ditanda tangani an. IDA CATERING tanggal 8 Nopember 2007 ;
- o. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran paket Dinner dan Coffee Break 300 pack tanggal 19 Nopember 2007 di Indosiar sebesar Rp. 15.000.000,00 yang ditanda tangani an. IDA CATERING tanggal 15 Nopember 2007 ;
- 143. 10 (sepuluh) lembar asli Rekening Koran Bank DKI Cap Tebet Barat No. AC : 402-08-00668-9 periode 01 Januari 2007 s/d 30 September 2007 Milik PT. Adila Jaya Sukses ;
- 144. 1 (satu) bundel Dokumen terkait Pembayaran Pajak Penayangan Gema Hukum 2007, berisi sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) lembar Dokumen Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tebet Bukti Penerimaan Surat Nomor s-005080/PPH23/WPJ.04/KP.0303/2008 tanggal 17 Januari 2008 yang ditanda tangani oleh Petugas Penerima an.IVAN STYO WIBOWO ;
 - b. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP : 02.145.870.8-015.000, nama WP PT.Adila Jaya Sukses, masa pajak Desember 2007 sebesar Rp.33.750.000,00 yang ditanda tangani oleh Wajib Pajak an.IRADAH HASBOELAH ;
 - c. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP : 02.145.870.8-015.000, nama WP PT.Adila Jaya Sukses, masa pajak Desember 2007 sebesar Rp.4.500.000,00 yang ditanda tangani oleh Wajib Pajak an.IRADAH HASBOELAH ;
- 145. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran oleh PT. Adila Jaya Sukses kepada PT. Indosiar Visual Mandiri atas penayangan Gema Hukum 2007, antara lain :
 - a. 1 (satu) lembar BILYET GIRO Bank DKI Capem Tebet Barat No.BI 409314 tanggal 01-11-07, memindahkan dana sejumlah

Hal. 237 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp 250.000.000,00 untuk untung rekening nomor 162.3123.450 atas nama PT. Indosiar Visual Mandiri ;
- b. 1 (satu) lembar BILYET GIRO Bank DKI Capem Tebet Barat No.BI 409315 tanggal 08-11-07, memindahkan dana sejumlah Rp 250.000.000,00 untuk untung rekening nomor 162.3123.450 atas nama PT. Indosiar Visual Mandiri ;
- c. 1 (satu) lembar BILYET GIRO Bank DKI Capem Tebet Barat No.BI 409316 tanggal 14-11-07, memindahkan dana sejumlah Rp 250.000.000,00 untuk untung rekening nomor 162.3123.450 atas nama PT. Indosiar Visual Mandiri ;
- d. 1 (satu) lembar BILYET GIRO Bank DKI Capem Tebet Barat No. BI 409317 tanggal 15-12-07, memindahkan dana sejumlah Rp 366.750.000,00 untuk untung rekening nomor 162.3123.450 atas nama PT. Indosiar Visual Mandiri ;
- e. 1 (satu) lembar BILYET GIRO Bank DKI Capem Tebet Barat No.BI 455008 tanggal 02-11-07, memindahkan dana sejumlah Rp 100.000.000,00 untuk untung rekening nomor 073.1061784 atas nama Alvonsus Susanto pada Bank BCA ;
- f. 1 (satu) lembar BILYET GIRO Bank DKI Capem Tebet Barat No.BI 455009 tanggal 20-11-07, memindahkan dana sejumlah Rp 140.000.000,00 untuk untung rekening nomor 073.1061784 atas nama Alvonsus Susanto pada Bank BCA ;
146. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Nomor : 600/077.92 tentang Percetakan Bahan Materi Penyuluhan Hukum Terpadu Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta tanggal 19 September 2007 untuk CV. PERMATA MELATI INDAH ;
147. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran atas Surat Perintah Kerja Nomor : 600/077.92 tentang Percetakan Bahan Materi Penyuluhan Hukum Terpadu Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta tanggal 19 September 2007 untuk CV. PERMATA MELATI INDAH, yang berisi antara lain :
- a. 1 (satu) lembar asli Dokumen SPM Giro No : 00137362007 Tahun 2007 sebesar Rp. 43.819.990,- (empat puluh tiga juta delapan ratus sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) kepada CV. PERMATA MELATI INDAH sehubungan SPK Nomor. 600/072.222, tanggal 19 September 2007 ;

Hal. 238 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar asli Kwitansi CV. PERMATA MELATI INDAH tertanggal 20 November 2007 sebesar Rp. 48.936.030,- (empat puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu tiga puluh rupiah), yang ditandatangani diatas materai 6.000 an. ROMASDA DEWI SAMOSIR selaku Direktur CV. PERMATA MELATI INDAH dan an. BAHIR ROMSAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum DKI Jakarta ;
- c. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 75/SPP/BHK/BT/2007 tertanggal 20 November 2007, yang ditanda tangani an. BAHIR ROMSAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum ;
- d. 1 (satu) lembar asli Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap No. 75/SPP/BT/BHK/2007 tertanggal 20 November 2007, yang ditanda tangani an. BAHIR ROMSAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum ;
- e. 1 (satu) lembar asli Dokumen Faktur Barang tertanggal 30 Oktober 2007 yang ditandatangani an. ROMASDA DEWI SAMOSIR selaku Direktur CV. PERMATA MELATI INDAH ;
- f. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 10/BAST/BH/X/2007 tanggal 30 Oktober 2007, yang ditanda tangani an. IRUSWANDI, SH selaku Pengurus Barang unit Biro Hukum, an. ROMASDA DEWI SAMOSIR selaku Direktur CV. PERMATA MELATI INDAH dan mengetahui an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Serah Terima Barang ;
- g. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Barang (BAPB) Nomor : 11/BAPB/BH/X/2007 tertanggal 30 Oktober 2007, ditanda tangani oleh Panitia Pemeriksa Barang nomor urut 1 (satu) Ketua sampai dengan 5 (lima) anggota, an. ROMASDA DEWI SAMOSIR selaku Direktur CV. PERMATA MELATI INDAH dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro

Hal. 239 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang ;

148. 1 (satu) bundel Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pencetakan Buku Abstrak Peraturan Perundang-undangan, Buku Warta Perundang-undangan dan Buku Informasi Peraturan Perundang-undangan Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta antara Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta dengan CV. INDAH RIZKI PRATAMA nomor :499/072.222 tanggal 30 Agustus 2007;

149. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran atas Pekerjaan Pencetakan Buku Abstrak Peraturan Perundang-undangan, Buku Warta Perundang-undangan dan Buku Informasi Peraturan Perundang-undangan Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta antara Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta dengan CV. INDAH RIZKI PRATAMA nomor :499/072.222 tanggal 30 Agustus 2007, yang berisi antara lain :

- a. 1 (satu) lembar asli Dokumen SPM Giro No : 00136022007 Tahun 2007 sebesar Rp. 57.253.125,- (lima puluh tujuh juta dua ratus lima puluh tiga ribu seratus dua puluh lima rupiah) kepada CV. INDAH RIZKI PRATAMA sehubungan Kontrak Nomor. 499/072.222, tanggal 30 Agustus 2007 ;
- b. 1 (satu) lembar asli Kwitansi CV. INDAH RIZKI PRATAMA Nomor : 120/K/IRP/XI/2007 tertanggal 15 November 2007 sebesar Rp. 63.937.500,- (enam puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), yang ditandatangani diatas materei 6.000 an. MUSTIZAR ZN selaku Direktur dan an. BAHIR ROMSAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum DKI Jakarta ;
- c. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 71/SPP/BT/BHK/2007 tertanggal 15 November 2007, yang ditanda tangani an. BAHIR ROMSAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum ;
- d. 1 (satu) lembar asli Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap No. 71/SPP/BT/BHK/2007 tertanggal 15 November 2007, yang ditanda tangani an. BAHIR ROMSAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum Setdaprov DKI

Hal. 240 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Jakarta dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum ;

- e. 1 (satu) lembar asli Dokumen Faktur Barang Nomor : 120/SJ/IRP/IX/2007 tertanggal 15 November 2007 yang ditandatangani an. MUSTIZAR. ZN selaku Direktur CV. INDAH RIZKI PRATAMA ;
- f. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 02/BAST/BH/IX/2007 tanggal 28 September 2007, yang ditanda tangani an. IRUSWANDI, SH selaku Pengurus Barang unit Biro Hukum, an. MUSTIZAR ZN selaku Direktur CV. INDAH RIZKI PRATAMA dan mengetahui an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Serah Terima Barang ;
- g. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Barang (BAPB) Nomor : 02/BAPB/BH/IX/2007 tertanggal 28 September 2007, ditanda tangani oleh Panitia Pemeriksa Barang nomor urut 1 (satu) Ketua sampai dengan 5 (lima) anggota, an. MUSTIZAR ZN selaku Direktur CV. INDAH RIZKI PRATAMA dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang ;
- h. 1 (satu) lembar asli Dokumen Surat Pernyataan Nomor : 04/SP/IRP/XI/2007, yang ditandatangani an. MUSTIZAR ZN selaku Direktur CV. INDAH RIZKI PRATAMA ;
- 150. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Nomor : 723/077.222 tentang Penunjukan Langsung Pengadaan ATK Kegiatan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta tanggal 1 November 2007 untuk CV. FERDINAN SENTOSA ABADI ;
- 151. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran atas Surat Perintah Kerja Nomor : 723/077.222 tentang Penunjukan Langsung Pengadaan ATK Kegiatan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta tanggal 1 November 2007 untuk PT. FERDINAN SENTOSA ABADI, yang berisi antara lain :
 - a. 1 (satu) lembar asli Dokumen SPM Giro No : 00177592007 Tahun 2007 sebesar Rp. 26.077.875,- (dua puluh enam juta tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PT. FERDINAN SENTOSA ABADI sehubungan Kontrak Nomor. 723/072.222, tanggal 30 Agustus 2007 ;

- b. 1 (satu) lembar asli Kwitansi PT. FERDINAN SENTOSA ABADI tertanggal 10 November 2007 sebesar Rp. 29.122.500,- (dua puluh sembilan juta seratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah), yang ditandatangani diatas materai 6.000 an. JHONI SOLOAN NABABAN selaku Direktur dan an. BAHIR ROMSAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum DKI Jakarta ;
- c. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 71/SPP/BT/BHK/2007 tertanggal 15 November 2007, yang ditanda tangani an. BAHIR ROMSAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum ;
- d. 1 (satu) lembar asli Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap No. 87/SPP/BT/BHK/2007 tertanggal 10 November 2007, yang ditanda tangani an. BAHIR ROMSAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum ;
- e. 2 (dua) lembar asli Dokumen Faktur PT. FERDINAN SENTOSA ABADI tertanggal 26 November 2007 yang ditandatangani an. JHONI SOLOAN NABABAN selaku Direktur ;
- f. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Barang (BAPB) Nomor : 29/BAPB/BH/XI/2007 tertanggal 26 November 2007, ditanda tangani oleh Panitia Pemeriksa Barang nomor urut 1 (satu) Ketua sampai dengan 5 (lima) anggota, an. JHONI SOLOAN NABABAN selaku Direktur PT. FERDINAN SENTOSA ABADI dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang ;
- g. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 26/BAST/BH/XI/2007 tanggal 26 November 2007, yang ditanda tangani an. IRUSWANDI, SH selaku Pengurus Barang unit Biro Hukum, an. JHONI SOLOAN NABABAN selaku Direktur PT. FERDINAN SENTOSA ABADI dan mengetahui an. JORNAL

Hal. 242 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Serah Terima Barang ;
152. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Nomor : 549/A/075.72 tentang Pengadaan Konsumsi Dalam Rangka Pelaksanaan Talk Show Interaktif di Radio Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta tanggal 2 November 2007 untuk CV. JURINDO PUTRA UTAMA ;
153. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Nomor : 607/077.222 tentang Penunjukan Langsung Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta untuk CV. FEBRI SINAR KASIH ;
154. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Nomor : 650/A/077.92 tentang Penunjukan Langsung Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) Kegiatan Pengumpulan Pencetakan dan Pendistribusian Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Daerah Provinsi DKI Jakarta) Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta tanggal 1 November 2007 untuk CV. ANUGERAH KELUARGA ;
155. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Nomor : 724/A/077.222 tentang Pengadaan Pemasangan dan Pemeliharaan Billboard Hukum Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta tanggal 1 November 2007 untuk PT. DIVAINTAN PUTRIPRATAMA ;
156. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran atas Surat Perintah Kerja Nomor : 724/A/077.222 tentang Pengadaan Pemasangan dan Pemeliharaan Billboard Hukum Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta tanggal 1 November 2007 untuk PT. DIVAINTAN PUTRIPRATAMA, yang berisi antara lain :
- a. 1 (satu) lembar asli Dokumen SPM Giro No : 00188292007 Tahun 2007 sebesar Rp. 30.626.430,- (tiga puluh juta enam ratus dua puluh enam ribu empat ratus tiga puluh rupiah) kepada PT. DIVAINTAN PUTRI PRATAMA sehubungan Surat Perintah Kerja Nomor. 724/A/077.222, tanggal 1 November 2007 ;
- b. 1 (satu) lembar asli Kwitansi PT. DIVAINTAN PUTRIPRATAMA Nomor : 159/KW/DIPP/XII/2007 tertanggal 18 Desember 2007 sebesar Rp. 35.276.516,- (empat puluh lima juta sembilan ratus tiga ribu rupiah), yang ditandatangani an. H. DADANG HERMANSYAH, SH selaku Direktur dan an. BAHIR ROMSAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum DKI

Hal. 243 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta, serta mengetahui/menyetujui an. JORNAL E. SIAHAAN selaku Kepala Biro Hukum DKI Jakarta

- c. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 106/SPP/BT/BHK/2007 tertanggal 18 Desember 2007, yang ditanda tangani an. BAHIR ROMSAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum ;
 - d. 1 (satu) lembar asli Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap No. 106/SPP/BT/BHK/2007 tertanggal 18 Desember 2007, yang ditanda tangani an. BAHIR ROMSAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum ;
 - e. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Barang (BAPB) Nomor : 41/BAPB/BH/XII/2007 tertanggal 5 Desember 2007, ditanda tangani oleh Panitia Pemeriksa Barang nomor urut 1 (satu) Ketua sampai dengan 5 (lima) anggota, an. H. DADANG HERMANSYAH, SH selaku Direktur PT. DINANTAN PUTRIPRATAMA dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 2 (dua) lembar asli lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang ;
 - f. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 61/BAST/BH/XII/2007 tanggal 5 Desember 2007, yang ditanda tangani an. IRUSWANDI, SH selaku Pengurus Barang unit Biro Hukum, an. H. DADANG HERMANSYAH, SH selaku Direktur PT. DIVANTAN PUTRIPRATAMA dan mengetahui an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 2 (dua) lembar asli lampiran Berita Acara Serah Terima Barang ;
157. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Nomor : 658/A/077 tentang Pemeliharaan Terbitan Berkala Dalam Rangka Peningkatan Perpustakaan Hukum Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta tanggal 1 November 2007 untuk CV. KHASINDO GEUBRINA, RIZKI ;
158. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Nomor : 817/A/077 tentang Penunjukan Langsung Pengadaan Pemeliharaan Buku Ilmu Sosial Dalam rangka Peningkatan Perpustakaan Hukum Kebutuhan Biro

Hal. 244 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Setdaprov DKI Jakarta tanggal 5 Desember 2007 untuk CV. MUDA TARUNA ;

159. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran atas Surat Perintah Kerja Nomor : 817/A/077 tentang Penunjukan Langsung Pengadaan Pemeliharaan Buku Ilmu Sosial Dalam rangka Peningkatan Perpustakaan Hukum Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta tanggal 5 Desember 2007 untuk CV. MUDA TARUNA, yang berisi antara lain :

- a. 1 (satu) lembar asli Dokumen SPM Giro No : 00187542007 Tahun 2007 tertanggal 19 Desember 2007, sebesar Rp. 33.204.350,- (tiga puluh tiga juta dua ratus lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah) kepada CV. MUDA TARUNA sehubungan SPK Nomor. 817/A/077, tanggal 5 Desember 2007 ;
- b. 1 (satu) lembar asli Kwitansi CV. MUDA TARUNA tertanggal 18 Desember 2007 sebesar Rp. 37.081.000,- (tiga puluh tujuh juta delapan puluh satu ribu rupiah), yang ditandatangani diatas materai 6.000 an. MUNAWAR, S.AG selaku Direktur CV. MUDA TARUNA dan an. BAHIR ROMSAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum DKI Jakarta, terdapat stempel dan tandatangan an. JORNAL E. SIAHAAN, Sh, Msi selaku Kepala Biro Hukum Prov. DKI Jakarta ;
- c. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 107/SPP/BT/BHK/2007 tertanggal 18 Desember 2007, yang ditanda tangani an. BAHIR ROMSAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum ;
- d. 1 (satu) lembar asli Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap No. 107/SPP/BT/BHK/2007 tertanggal 18 Desember 2007, yang ditanda tangani an. BAHIR ROMSAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum ;
- e. 1 (satu) lembar asli Dokumen Faktur dari CV. MUDA TARUNA Nomor : 28/F/MT/XII/2007, tertanggal 13 Desember 2007, ditujukan kepada Yth. Pemerintah Pemprov DKI Jakarta Jl.

Hal. 245 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan Merdeka Selatan No. 8-9, Jakarta, ditandatangani an.
MUNAWAR, S.AG selaku Direktur CV. MUDA TARUNA ;

- f. 1 (satu) lembar asli Dokumen Surat Jalan dari CV. MUDA TARUNA Nomor : 28/SJ/MT/XII/2007 tertanggal 13 Desember 2007, ditandatangani an. MUNAWAR, S.AG selaku Direktur CV. MUDA TARUNA dan ditandatangani oleh penerima barang an. IRUSWANDI ;
 - g. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Barang (BAPB) Nomor : 102/BAPB/BH/XII/2007 tertanggal 13 Desember 2007, ditanda tangani oleh Panitia Pemeriksa Barang nomor urut 1 (satu) Ketua sampai dengan 5 (lima) anggota, an. MUNAWAR, S.AG selaku Direktur CV. MUDA TARUNA dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang ;
 - h. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 108/BAST/BH/XII/2007 tanggal 13 Desember 2007, yang ditanda tangani an. IRUSWANDI, SH.M.Kn selaku Pengurus Barang unit Biro Hukum, an. MUNAWAR, S.AG selaku Direktur CV. MUDA TARUNA dan mengetahui an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Serah Terima Barang ;
160. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Nomor : 732/A/077.22 tentang Pengadaan Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi Dalam rangka Penyuluhan Hukum Terpadu Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta tanggal 2 November 2007 untuk CV. ALWI JAYA ;
161. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Nomor : 457/077.222 tentang Pengadaan Penggandaan Bahan Untuk Penyebarluasan ke 450 Instansi Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta tanggal 28 Mei 2007 untuk CV. CIPTA GRAHA NUSANTARA ;
162. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Nomor : 602/077.922 tentang Pengadaan Penggandaan Bahan-bahan Dalam rangka Sosialisasi Keluarga Sadar Hukum Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta untuk CV. CANDRA PUTRA MADA ;
163. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran atas Surat Perintah Kerja Nomor : 602/077.922 tentang Pengadaan Penggandaan Bahan-

Hal. 246 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan Dalam rangka Sosialisasi Keluarga Sadar Hukum Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta untuk CV. CANDRA PUTRA MADA, yang berisi antara lain :

- a. 1 (satu) lembar asli Dokumen SPM Giro No : 00137662007 Tahun 2007 tertanggal 22 November 2007, sebesar Rp. 14.694.624,- (empat belas juta enam ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus dua puluh empat rupiah) kepada CV. CANDRA PUTRA MADA sehubungan Kontrak Nomor. 602/077.922 ;
- b. 1 (satu) lembar asli Kwitansi CV. CANDRA PUTRA MADA tertanggal 20 November 2007 sebesar Rp. 16.410.240,- (enam belas juta empat ratus sepuluh ribu dua ratus empat puluh rupiah), yang ditandatangani diatas materai 6.000 an. LINA MARLINA ARUAN dan an. BAHIR ROMSAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum DKI Jakarta, terdapat stempel dan tandatangan an. JORNAL E. SIAHAAN, Sh, Msi selaku Kepala Biro Hukum Prov. DKI Jakarta ;
- c. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 73/SPP/BHK/BT/2007 tertanggal 20 November 2007, yang ditanda tangani an. BAHIR ROMSAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum ;
- d. 1 (satu) lembar asli Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap No. 73/SPP/BT/BHK/2007 tertanggal 20 November 2007, yang ditanda tangani an. BAHIR ROMSAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum ;
- e. 2 (dua) lembar asli Dokumen Faktur (tanpa nomor) tertanggal 30 Oktober 2007 ditujukan kepada Yth. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sebesar Rp. 16.410.240,- (enam belas juta empat ratus sepuluh ribu dua ratus empat puluh rupiah), ditandatangani an. LINA MARLINA ARUAN ;
- f. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Barang (BAPB) Nomor : 12/BAPB/BH/X/2007 tertanggal 30 Oktober 2007, ditanda tangani oleh Panitia Pemeriksa Barang nomor urut 1 (satu) Ketua sampai dengan 5 (lima) anggota, an. LINA

Hal. 247 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MARLINA ARUAN selaku direktur CV. CANDRA PUTRA MADA dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang ;

- g. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 11/BAST/BH/X/2007 tanggal 30 Oktober 2007, yang ditanda tangani an. IRUSWANDI, SH.M.Kn selaku Pengurus Barang unit Biro Hukum, an. LINA MARLINA ARUAN selaku direktur CV. CANDRA PUTRA MADA dan mengetahui an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Serah Terima Barang ;

164. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Nomor : 597/077.92 tentang Pencetakan Kodifikasi Hukum Perundang-undangan Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta tanggal 19 September 2007 untuk CV. ELFIMAS PUTRI ;

165. 1 (satu) bundel Pembayaran atas Surat Perintah Kerja Nomor : 597/077.92 tentang Pencetakan Kodifikasi Hukum Perundang-undangan Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta tanggal 19 September 2007 untuk CV. ELFIMAS PUTRI, yang berisi antara lain :

- a. 1 (satu) lembar asli Dokumen SPM Giro No : 00164532007 Tahun 2007 sebesar Rp. 40.976.000,- (empat puluh juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) kepada CV. ELFIMAS PUTRI sehubungan Surat Perintah Kerja Nomor.597/077.92 , tanggal 19 September 2007 ;
- b. 1 (satu) lembar asli Kwitansi CV. ELFIMAS PUTRI tertanggal 10 Desember 2007 sebesar Rp. 45.760.000,- (empat puluh lima juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), yang ditandatangani an. RAVIDA SAMOSIR selaku Direktur CV. ELFIMAS PUTRI dan an. BAHIR ROMSAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum DKI Jakarta, serta mengetahui/menyetujui an. JORNAL E. SIAHAAN selaku Kepala Biro Hukum DKI Jakarta ;
- c. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 86/SPP/BHK/BT/2007 tertanggal 10 Desember 2007, yang ditanda tangani an. BAHIR ROMSAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setdaprov DKI Jakarta dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum ;

- d. 1 (satu) lembar asli Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap No. 86/SPP/BT/BHK/2007 tertanggal 10 Desember 2007, yang ditandatangani an. BAHIR ROMSAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum ;
 - e. 1 (satu) lembar asli Faktur CV. ELFIMAS PUTRI tertanggal 1 November 2007 yang ditandatangani an. RAVIDA SAMOSIR selaku Direktur CV. ELFIMAS PUTRI ;
 - f. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Barang (BAPB) Nomor : 13/BAPB/BH/XI/2007 tertanggal 1 November 2007, ditanda tangani oleh Panitia Pemeriksa Barang nomor urut 1 (satu) Ketua sampai dengan 5 (lima) anggota, an. RAVIDA SAMOSIR selaku Direktur CV. ELFIMAS PUTRI dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang ;
 - g. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 12/BAST/BH/XI/2007 tanggal 1 November 2007, yang ditanda tangani an. IRUSWANDI, SH selaku Pengurus Barang unit Biro Hukum, an. RAVIDA SAMOSIR selaku Direktur CV. ELFIMAS PUTRI dan mengetahui an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Serah Terima Barang ;
166. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Nomor : 729/077.222 tentang Pengadaan Konsumsi Dalam Rangka Pembinaan Keluarga Sadar Hukum Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta tanggal 2 November 2007 untuk CV. RAFI JAYA DIKA ;
167. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Surat Perintah Kerja Nomor : 729/077.222 tentang Pengadaan Konsumsi Dalam Rangka Pembinaan Keluarga Sadar Hukum Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta tanggal 2 November 2007 untuk CV. RAFI JAYA DIKA, yang berisi antara lain :
- a. 1 (satu) lembar asli Dokumen SPM Giro No : 00192492007 Tahun 2007 tertanggal 21 Desember 2007, sebesar Rp.

Hal. 249 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.592.367,- (delapan belas juta lima ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah) kepada CV. RAFI JAYA DIKA sehubungan Kontrak Nomor.729/A/077.222 ;

- b. 1 (satu) lembar asli Kwitansi CV. RAFI JAYA DIKA tertanggal 18 Desember 2007 sebesar Rp. 20.763.050,- (dua puluh juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu lima puluh rupiah), yang ditandatangani diatas meterei 6.000 an. ISWANDRA selaku Direktur dan an. BAHIR ROMSAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum DKI Jakarta, terdapat stempel dan tandatangan an. JORNAL E. SIAHAAN, Sh, Msi selaku Kepala Biro Hukum Prov. DKI Jakarta ;
- c. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 98/SPP/BT/BHK/2007 tertanggal 18 Desember 2007, yang ditanda tangani an. BAHIR ROMSAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum ;
- d. 1 (satu) lembar asli Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap No. 98/SPP/BT/BHK/2007 tertanggal 18 Desember 2007, yang ditanda tangani an. BAHIR ROMSAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum ;
- e. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Barang (BAPB) Nomor : 64/BAPB/BH/XII/2007 tertanggal 6 Desember 2007, ditanda tangani oleh Panitia Pemeriksa Barang nomor urut 1 (satu) Ketua sampai dengan 5 (lima) anggota, an. ISWANDRA selaku Direktur CV. RAFI JAYA DIKA dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang ;
- f. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 76/BAST/BH/XII/2007 tanggal 6 Desember 2007, yang ditanda tangani an. IRUSWANDI, SH.M.Kn selaku Pengurus Barang unit Biro Hukum, a an. ISWANDRA selaku Direktur CV. RAFI JAYA DIKA dan mengetahui an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Serah Terima Barang ;

Hal. 250 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

168. 1 (satu) bundel Perjanjian Pelelangan Umum Pengadaan Pencetakan Lembara Daerah (LD) Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta antara Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta dengan CV. BAYINDO UTAMA nomor :631/077.92 tanggal 25 Oktober 2007 ;
169. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran atas Pengadaan Pencetakan Lembara Daerah (LD) Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta antara Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta dengan CV. BAYINDO UTAMA nomor :631/077.92 tanggal 25 Oktober 2007, yang berisi antara lain : ;
- a. 1 (satu) lembar asli Dokumen SPM Giro No : 00138812007 Tahun 2007 tertanggal 23 November 2007, sebesar Rp. 126.194.772,- (seratus dua puluh enam juta seratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah) kepada CV. BAYINDO UTAMA sehubungan Kontrak Nomor. 631/077.92 ;
 - b. 1 (satu) lembar asli Kwitansi CV. BAYINDO UTAMA tertanggal 19 November 2007 sebesar Rp. 140.928.172,- (seratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu seratus tujuh puluh dua rupiah), yang ditandatangani diatas materei 6.000 an. WARNERY RASSOELL dan an. BAHIR ROMSAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum DKI Jakarta, terdapat stempel dan tandatangan an. JORNAL E. SIAHAAN, Sh, Msi selaku Kepala Biro Hukum Prov. DKI Jakarta ;
 - c. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 72/SPP/BHK/BT/2007 tertanggal 19 November 2007, yang ditanda tangani an. BAHIR ROMSAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum ;
 - d. 1 (satu) lembar asli Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap No. 72/SPP/BT/BHK/2007 tertanggal 19 November 2007, yang ditanda tangani an. BAHIR ROMSAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum ;
 - e. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Barang (BAPB) Nomor : 07/BAPB/BH/XI/2007 tertanggal 5 November 2007, ditanda tangani oleh Panitia Pemeriksa Barang nomor urut

Hal. 251 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Ketua sampai dengan 5 (lima) anggota, an. WARNERY RASSOELL selaku Direktur CV. BAYINDO UTAMA dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang ;
- f. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 06/BAST/BH/XI/2007 tanggal 5 November 2007, yang ditanda tangani an. IRUSWANDI, SH.M.Kn selaku Pengurus Barang unit Biro Hukum, an. WARNERY RASSOELL selaku Direktur CV. BAYINDO UTAMA dan mengetahui an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Serah Terima Barang ;
170. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Nomor : 720/077.92 tentang Penggandaan Fotocopy Dalam rangka Pelaksanaan Talk Show Interaktif Di Radio Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta tanggal 1 November 2007 untuk CV. CITRA SARANA MULYA ;
171. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran atas Surat Perintah Kerja Nomor : 720/077.922 tentang Pengadaan foto copy pelaksanaan Talk Show Interaktif Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta untuk CV. CITRA SARANA MULYA, yang berisi antara lain :
- a. 1 (satu) lembar asli Dokumen SPM Giro No : 00188242007 Tahun 2007 tertanggal 19 Desember 2007, sebesar Rp. 17.444.104,- (tujuh belas juta empat ratus empat puluh empat ribu seratus empat rupiah) kepada CV. CITRA SARANA MULYA;
- b. 1 (satu) lembar asli Kwitansi CV. CITRA SARANA MULYA tertanggal 18 Desember 2007 sebesar Rp. 19.480.725,- (sembilan belas juta empat ratus delapan puluh ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah), yang ditandatangani diatas meterei 6.000 an. SUDIRMAN selaku Direktur CV. CITRA SARANA MULYA dan an. BAHIR ROMSAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum DKI Jakarta, terdapat stempel dan tandatangan an. JORNAL E. SIAHAAN, Sh, Msi selaku Kepala Biro Hukum Prov. DKI Jakarta ;
- c. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 102/SPP/BT/BHK/2007 tertanggal 18 Desember 2007, yang ditanda tangani an. BAHIR ROMSAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum

Hal. 252 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setdaprov DKI Jakarta dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum ;

- d. 1 (satu) lembar asli Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap No. 102/SPP/BT/BHK/2007 tertanggal 18 Desember 2007, yang ditanda tangani an. BAHIR ROMSAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum ;
 - e. 2 (dua) lembar asli Faktur CV. CITRA SARANA MULYA Nomor : 14/CSM/XII/2007 tanggal 30 November 2007, yang ditanda tangani an. SUDIRMAN selaku Direktur CV. CITRA SARANA MULYA ;
 - f. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Barang (BAPB) Nomor : 37/BAPB/BH/XI/2007 tertanggal 30 November 2007, ditanda tangani oleh Panitia Pemeriksa Barang nomor urut 1 (satu) Ketua sampai dengan 5 (lima) anggota, an. SUDIRMAN selaku Direktur CV. CITRA SARANA MULYA dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang ;
 - g. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 36/BAST/BH/XI/2007 tanggal 30 November 2007, yang ditanda tangani an. IRUSWANDI, SH.M.Kn selaku Pengurus Barang unit Biro Hukum, an. SUDIRMAN selaku Direktur CV. CITRA SARANA MULYA dan mengetahui an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Serah Terima Barang ;
172. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Nomor : 585/077.922 tentang Pengadaan Konsumsi Kegiatan Penyuluhan Hukum Terpadu Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta tanggal 19 September 2007 untuk CV. PRATAMA CATERING ;
173. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran atas Surat Perintah Kerja Nomor : 585/077.922 tentang Pengadaan Konsumsi Kegiatan Penyuluhan Hukum Terpadu Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta tanggal 19 September 2007 untuk CV. PRATAMA, yang berisi antara lain :
- a. 1 (satu) lembar asli Dokumen SPM Giro No : 00141732007 Tahun 2007 sebesar Rp. 34.209.050,- (tiga puluh empat juta dua

Hal. 253 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus sembilan ribu lima puluh rupiah) kepada CV. PRATAMA sehubungan Kontrak Nomor. 585/077.922, tanggal 27 November 2007 ;

- b. 1 (satu) lembar asli Kwitansi CV. PRATAMA nomor : 25/K/P3/XI/2007 tertanggal 20 Desember 2007 sebesar Rp. 38.203.000,- (tiga puluh delapan juta dua ratus tiga ribu rupiah), yang ditandatangani diatas meterei 6.000 an. SUDIAR dan an. BAHIR ROMSAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum DKI Jakarta, terdapat stempel dan tandatangan an. JORNAL E. SIAHAAN, Sh, Msi selaku Kepala Biro Hukum Prov. DKI Jakarta ;
- c. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 74/SPP/BHK/BT/2007 tertanggal 20 November 2007, yang ditanda tangani an. BAHIR ROMSAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum ;
- d. 1 (satu) lembar asli Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap No. 74/SPP/BT/BHK/2007 tertanggal 20 November 2007, yang ditanda tangani an. BAHIR ROMSAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum ;
- e. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Barang (BAPB) Nomor : 14/BAPB/BH/X/2007 tertanggal 30 Oktober 2007, ditanda tangani oleh Panitia Pemeriksa Barang nomor urut 1 (satu) Ketua sampai dengan 5 (lima) anggota, an. SUDIAR selaku Direktur CV. PRATAMA dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang ;
- f. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 13/BAST/BH/X/2007 tanggal 30 Oktober 2007, yang ditanda tangani an. IRUSWANDI, SH selaku Pengurus Barang unit Biro Hukum, an. SUDIAR selaku Direktur CV. PRATAMA dan mengetahui an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Serah Terima Barang ;

Hal. 254 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



174. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Nomor : 475/A/077.142 tentang Pemeliharaan Alat Penyimpanan (Lemari Arsip) Dalam Rangka Peningkatan Perpustakaan Hukum Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta tanggal 28 September 2007 untuk CV. INTAN JAYA ;
175. 1 (satu) bundel Pembayaran Surat Perintah Kerja Nomor : 475/A/077.142 tentang Pemeliharaan Alat Penyimpanan (Lemari Arsip) Dalam Rangka Peningkatan Perpustakaan Hukum Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta tanggal 28 September 2007 untuk CV.INTAN JAYA, yang berisi antara lain :
- a. 1 (satu) lembar asli Dokumen SPM Giro No : 00190002007 Tahun 2007 sebesar Rp. 45.903.000,- (empat puluh lima juta sembilan ratus tiga ribu rupiah) kepada CV INTAN JAYA sehubungan Surat Perintah Kerja Nomor. 475/A/077.142, tanggal 19 Desember 2007 ;
 - b. 1 (satu) lembar asli Kwitansi CV. INTAN JAYA Nomor : 25/K/IJ/DKI/XII/2007 tertanggal 18 Desember 2007 sebesar Rp. 45.903.000,- (empat puluh lima juta sembilan ratus tiga ribu rupiah), yang ditandatangani an. M. TAUFIQ HIDAYAT selaku Direktur CV. INTAN JAYA dan an. BAHIR ROMSAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum DKI Jakarta ;
 - c. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 99/SPP/BT/BHK/2007 tertanggal 18 Desember 2007, yang ditanda tangani an. BAHIR ROMSAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum ;
 - d. 1 (satu) lembar foto copy Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap No. 99/SPP/BT/BHK/2007 tertanggal 18 Desember 2007, yang ditanda tangani an. BAHIR ROMSAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum ;
 - e. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Barang (BAPB) Nomor : 06/BAPB/BH/XI/2007 tertanggal 9 November 2007, ditanda tangani oleh Panitia Pemeriksa Barang nomor urut 1 (satu) Ketua sampai dengan 5 (lima) anggota, an. M. TAUFIQ HIDAYAT selaku Direktur CV. INTAN JAYA dan an. JORNAL E.

Hal. 255 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang ;

- f. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 46/BAST/BH/XI/2007 tanggal 3 Oktober 2007, yang ditanda tangani an. IRUSWANDI, SH selaku Pengurus Barang unit Biro Hukum, an. M. TAUFIQ HIDAYAT selaku Direktur CV. INTAN JAYA dan mengetahui an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Serah Terima Barang ;

176. 1 (satu) bundel Perjanjian Pelelangan Umum Pengadaan Jasa Produksi dan Penayangan Peraturan Perundang-undangan Daerah di TV Plasma (Videotron) dan Pemuatan Peraturan Perundang-undangan di Media Cetak Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta antara Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta dengan CV. SALSABILA SUKSES MANDIRI nomor :629/077.92 tanggal 25 Oktober 2007 ;

177. 1 (satu) bundel Pembayaran atas Perjanjian Pelelangan Umum Pengadaan Jasa Produksi dan Penayangan Peraturan Perundang-undangan Daerah di TV Plasma (Videotron) dan Pemuatan Peraturan Perundang-undangan di Media Cetak Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta antara Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta dengan CV. SALSABILA SUKSES MANDIRI nomor :629/077.92 tanggal 25 Oktober 2007, yang berisi antara lain :

- a. 1 (satu) lembar asli Dokumen SPM Giro No : 00134852007 Tahun 2007 sebesar Rp. 104.744.900,- (seratus empat juta tujuh ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus rupiah) kepada CV SALSABILA SUKSES MANDIRI sehubungan Kontrak Nomor. 629/077.92, tanggal 25 Oktober 2007 ;
- b. 1 (satu) lembar asli Kwitansi CV. SALSABILA SUKSES MANDIRI tertanggal 15 November 2007 sebesar Rp. 116.974.000,- (seratus enam belas juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), yang ditandatangani an. IWAN AGUS PURWANTO selaku Direktur CV. SALSABILA SUKSES MANDIRI dan an. BAHIR ROMSAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum DKI Jakarta, terdapat stempel dan tanda tangan an. JORNAL E SIAHAAN selaku Kepala Biro Hukum DKI Jakarta ;

Hal. 256 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 70/SPP/BT/BHK/2007 tertanggal 15 November 2007, yang ditanda tangani an. BAHIR ROMSAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum ;
 - d. 1 (satu) lembar asli Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap No. 70/SPP/BT/BHK/2007 tertanggal 15 November 2007, yang ditanda tangani an. BAHIR ROMSAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum ;
 - e. 1 (satu) lembar asli Dokumen Faktur Nomor : 089/FK/SSM/XI/2007 tanggal 15 November 2007, yang ditandatangani an. IWAN AGUS PURWANTO selaku Direktur CV. SALSABILA SUKSES MANDIRI ;
 - f. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Barang (BAPB) Nomor : 05/BAPB/BH/XI/2007 tertanggal 5 November 2007, ditanda tangani oleh Panitia Pemeriksa Barang nomor urut 1 (satu) Ketua sampai dengan 5 (lima) anggota, an. IWAN AGUS PURWANTO selaku Direktur CV. SALSABILA SUKSES MANDIRI dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang ;
 - g. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 05/BAST/BH/XI/2007 tanggal 5 November 2007, yang ditanda tangani an. IRUSWANDI, SH selaku Pengurus Barang unit Biro Hukum, an. IWAN AGUS PURWANTO selaku Direktur CV. SALSABILA SUKSES MANDIRI dan mengetahui an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Serah Terima Barang ;
178. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Kerja Nomor : 504/075.72 Biro Hukum Setdaprov. DKI Jakarta dengan CV. SINAR HARAPAN tanggal 28 September 2007 ;
179. 1 (satu) bundel Perjanjian Pemilihan Langsung Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) Dalam Rangka temu Wicara Peningkatan Kesadaran

Hal. 257 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Bagi Warga Komunitas Kebutuhan Biro Hukum Sekdaprov DKI Jakarta antara Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta dengan PT. METRO FURNITURE INDAH nomor : 647/A/079.92 tanggal 2 November 2007 ;

180. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) Dalam Rangka temu Wicara Peningkatan Kesadaran Hukum Bagi Warga Komunitas Kebutuhan Biro Hukum Sekdaprov DKI Jakarta antara Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta dengan PT. METRO FURNITURE INDAH nomor : 647/A/079.92 tanggal 2 November 2007, yang berisi antara lain :

- a. 1 (satu) lembar asli Dokumen SPM Giro No : 00188182007 Tahun 2007 sebesar Rp. 49.087.278,- (empat puluh sembilan juta delapan puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah) kepada PT. METRO FURNITURE INDONESIA sehubungan Kontrak Nomor. 647/A/079.92, tanggal 2 November 2007 ;
- b. 1 (satu) lembar asli Kwitansi PT. METRO FI Nomor : 021/KWITANSI/MFI/XII/2007 tertanggal 18 Desember 2007 sebesar Rp. 49.087.278,- (empat puluh sembilan juta delapan puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah), yang ditandatangani an. Drs. ARTHUR SARUFI selaku Direktur PT. FURNITURE INDAH dan an. BAHIR ROMSAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum DKI Jakarta dan terdapat stempel dan tandatangan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum ;
- c. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 108/SPP/BT/BHK/2007 tertanggal 18 Desember 2007, yang ditanda tangani an. BAHIR ROMSAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum ;
- d. 1 (satu) lembar foto copy Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap No. 108/SPP/BT/BHK/2007 tertanggal 18 Desember 2007, yang ditanda tangani an. BAHIR ROMSAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum ;

Hal. 258 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) lembar asli Dokumen Faktur No : 018/FAKTUR/MFI/XII/2007 tertanggal 10 Desember 2007, yang ditandatangani an. Drs. ARTHUR SARUFI selaku Direktur PT. METRO FURNITURE INDONESIA ;
- f. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Barang (BAPB) Nomor : 90/BAPB/BH/XII/2007 tertanggal 10 Desember 2007, ditanda tangani oleh Panitia Pemeriksa Barang nomor urut 1 (satu) Ketua sampai dengan 5 (lima) anggota, an. Drs. ARTHUR SARUFI selaku Direktur PT. METRO FURNITURE INDONESIA dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang ;
- g. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 104/BAST/BH/XII/2007 tanggal 10 Desember 2007, yang ditanda tangani an. IRUSWANDI, SH selaku Pengurus Barang unit Biro Hukum, an. Drs. ARTHUR SARUFI selaku Direktur PT. METRO FURNITURE INDONESIA dan mengetahui an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Serah Terima Barang ;
181. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Nomor : 506/A/077.32 tentang Pengadaan liputan TV dalam rangka sosialisasi tindak pidana korupsi kebutuhan biro hukum Setdaprov DKI Jakarta tanggal 1 November 2007 untuk CV. MAHARANI MANDIRI ;
182. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Nomor : 693/A/077.222 tentang Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) Dalam Rangka Kampanye Kesadaran Hukum Mahasiswa Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta tanggal 1 November 2007 untuk CV. PANIOR GIRESTARI ;
183. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Nomor : 708/077.32 tentang Pengadaan Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi dalam Rangka Temu Wicara Peningkatan Kesadaran Hukum Bagi Warga Komunitas Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta tanggal 29 September 2007 untuk CV. PUTRA MANDIRI ;
184. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Nomor : 503/A/077.92 tentang Pengadaan Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi Dalam Rangka Kampanye Kesadaran Hukum Mahasiswa Kebutuhan Biro Hukum

Hal. 259 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setdaprov DKI Jakarta tanggal 1 November 2007 untuk CV. LESTARI SEJAHTERA ;

185. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Nomor : 588/077.922 tentang Penunjukan Langsung Pengadaan Materai Dalam rangka Penanganan Perkara Perdata, Pidana dan TUN Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta untuk CV. ANUGRAH JAYA ;
186. 1 (satu) bundel Surat Penawaran Harga CV. MAWANY INTI KARYA kepada Karo Hukum Provinsi DKI Jakarta dan Surat Perintah Kerja nomor 735/A/077.22 tentang Pengadaan Penggandaan /Fotocopy Dalam Rangka Kegiatan Pengurusan Perkara Perdata, Pidana dan TUN Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta untuk CV. MAWANY INTI KARYA ;
187. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Nomor : 540/A/077.92 tentang Penggandaan foto copy Dalam Rangka Sosialisasi Tindak Pidana Korupsi Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta 1 November 2007 untuk CV. DHITA KASIH MANDIRI ;
188. Perjanjian Pengadaan Konsumsi Dalam Rangka Temu Wicara Debat Hukum dengan Generasi Muda Kebutuhan Biro Hukum Sekdaprov DKI Jakarta antara Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta dengan CV. TAMADO JAYA nomor 491/072.922 tanggal 31 Oktober 2007 ;
189. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Nomor : 581/077.922 tentang Pengadaan Alat Tulis Kantor Dalam rangka Kegiatan Sosialisasi Tindak Pidana Korupsi Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta tanggal 19 September 2007 untuk CV. SAISUBA JAYA ;
190. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran atas Surat Perintah Kerja nomor 581/077.922 tentang Pengadaan Alat Tulis Kantor Dalam rangka Kegiatan Sosialisasi Tindak Pidana Korupsi Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta tanggal 19 September 2007 untuk CV. SAISUBA JAYA, yang berisi antara lain :
 - a. 1 (satu) lembar asli Dokumen SPM Giro No : 00165722007 Tahun 2007 sebesar Rp. 40.683.947,- (empat puluh juta enam ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah) kepada CV. SAISUBA JAYA sehubungan Kontrak Nomor. 581/077.922, tanggal 12 Desember 2007 ;
 - b. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 85/SPP/BHK/BT/2007 tertanggal 10 Desember 2007, yang ditanda tangani an. BAHIR ROMSAH

Hal. 260 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum ;

- c. 1 (satu) lembar asli Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap No. 85/SPP/BT/BHK/2007 tertanggal 10 Desember 2007, yang ditanda tangani an. BAHIR ROMSAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum ;
- d. 1 (satu) lembar asli Kwitansi CV. SAISUBA JAYA (tanpa nomor) tertanggal 10 Desember 2007 sebesar Rp. 45.433.850,- (empat puluh lima juta empat ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah), yang ditandatangani diatas materai 6.000 an. SUGENG RIYADI dan an. BAHIR ROMSAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum DKI Jakarta, terdapat stempel dan tandatangan an. JORNAL E. SIAHAAN, Sh, Msi selaku Kepala Biro Hukum Prov. DKI Jakarta ;
- e. 1 (satu) lembar asli Dokumen Faktur CV. SAISUBA JAYA (tanpa nomor), tertanggal 19 Oktober 2007, sebesar Rp. 45.433.850,- (empat puluh lima juta empat ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah), ditandatangani oleh an. SUGENG RIYADI selaku Direktur Utama CV. SAISUBA JAYA dan an. IRUSWANDI ;
- f. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Barang (BAPB) Nomor : 20/BAPB/BH/XI/2007 tertanggal 19 Oktober 2007, ditanda tangani oleh Panitia Pemeriksa Barang nomor urut 1 (satu) Ketua sampai dengan 5 (lima) anggota, an. SUGENG RIYADI selaku Direktur Utama CV. SAISUBA JAYA dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang ;
- g. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 17/BAST/BH/IX/2007 tanggal 19 Oktober 2007, yang ditanda tangani an. IRUSWANDI, SH selaku Pengurus Barang unit Biro Hukum, an. SUGENG RIYADI selaku Direktur Utama CV. SAISUBA JAYA dan mengetahui an. JORNAL E. SIAHAAN,

Hal. 261 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli
lampiran Berita Acara Serah Terima Barang ;

191. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Nomor : 583/077.922 tentang Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) dalam rangka Kegiatan Temu Wicara Debat hukum Dengan generasi Muda Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta tanggal 19 September 2007 untuk CV. YANCO MITRA COMUNIKA ;
192. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Nomor : 738/A/077.222 tentang Penunjukan Langsung Pengadaan Alat Tulis kantor (ATK) Kegiatan Penyegaran Dan Pemantapan PPNS Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta tanggal 1 November 2007 untuk CV. RAJIMMY BERSAUDARA ;
193. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Nomor : 543/A/075.72 tentang Pengadaan Konsumsi Dalam Rangka Kampanye Kesadaran Hukum Pelajar Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta tanggal 1 November 2007 untuk CV. MAWANY INTI KARYA ;
194. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Nomor : 717/075.72 tentang Pengadaan Konsumsi Dalam Rangka Penyelesaian Pertanahan di Provinsi DKI Jakarta Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta tanggal 1 November 2007 untuk CV. DERMAGA TUA ;
195. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Nomor : 744/A/077.222 tentang Pengadaan Alat Tulis Kantor Dalam Rangka Penyelesaian Masalah Sengketa Pertanahan di Provinsi DKI Jakarta Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta untuk CV. DUA PUTERI ANUGERAH ;
196. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Nomor : 537/A/075.72 tentang Pengadaan Konsumsi Dalam Rangka Sosialisasi Tindak Pidana Korupsi Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta tanggal 1 November 2007 untuk CV. DHITA KASIH MANDIRI ;
197. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Nomor : 714/077.92 tentang Pengadaan Penggandaan Fotocopy Dalam Rangka Temu Wicara Debat Hukum dengan Generasi Muda Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta tanggal 19 September 2007 untuk CV. KEMUNING JAYA UTAMA ;
198. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Nomor : 500/A/077.92 tentang Pengadaan Penggandaan Fotocopy Dalam Rangka Kampanye Kesadaran Hukum Mahasiswa Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI

Hal. 262 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta tanggal 1 November 2007 untuk CV. ROMORA COMSELINDO JAYA ;

199. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Nomor : 520/A/077.22 tentang Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) Dalam Rangka Inventarisasi dan Evaluasi Perkara Di Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta tanggal 1 November 2007 untuk CV. SAISUBA JAYA ;
200. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Kerja Nomor : 523/A/077.222 tertanggal 1 Nopember 2007 tentang Pengadaan Penggandaan Fotocopy dalam rangka Inventarisasi dan Evaluasi Perkara di Biro Hukum kebutuhan Biro Hukum Setda Prov. DKI Jakarta, untuk PT. SAISUBA JAYA ;
201. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Kerja Nomor : 716/A/077.92 tertanggal 1 November 2007 tentang Penunjukan Langsung Pengadaan Penggandaan Bahan (Fotocopy) kegiatan penataan arsip Biro Hukum kebutuhan Biro Hukum Setda Prov. DKI Jakarta, untuk PT. MARAX INDONESIA ;
202. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Kerja Nomor : 508/A/077.92 tertanggal 1 November 2007 tentang Pengadaan Penggandaan Foto Copy dalam rangka kegiatan evaluasi yuridis terhadap perjanjian kerjasama pemanfaatan / penggunaan aset kebutuhan Biro Hukum Setda Prov. DKI Jakarta, untuk CV. TEGUH PACKINDO MAKMUR ;
203. 1 (satu) bendel Dokumen Surat Perintah Kerja Nomor : 545/A/077.522 tertanggal 1 November 2007 tentang Pengadaan Pemeliharaan Peralatan Studio Visual dalam rangka sarana penunjang kebutuhan Biro Hukum Setda Prov. DKI Jakarta, untuk CV. CITRA ABADI ;
204. 1 (satu) bendel Dokumen Pembayaran atas Surat Perintah Kerja Nomor : 545/A/077.522 tertanggal 1 November 2007 tentang Pengadaan Pemeliharaan Peralatan Studio Visual dalam rangka sarana penunjang kebutuhan Biro Hukum Setda Prov. DKI Jakarta, untuk CV. CITRA ABADI, yang berisi antara lain :
 - a. 1 (satu) lembar asli Dokumen SPM Giro No : 00187562007 tertanggal 19 Desember 2007, sebesar Rp. 13.688.742,- (tiga belas juta enam ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah) kepada CV. CITRA ABADI ;
 - b. 1 (satu) lembar asli Kwitansi CV. CITRA ABADI Nomor : CA/XI?LX/07 tertanggal 18 Desember 2007 sebesar Rp.

Hal. 263 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.286.920,- (lima belas juta dua ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh rupiah), yang ditandatangani diatas materai 6.000 an. MUKJIJAH selaku Direktur CV. CITRA ABADI dan an. BAHIR ROMSAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum DKI Jakarta, terdapat stempel dan tandatangan an. JORNAL E. SIAHAAN, Sh, Msi selaku Kepala Biro Hukum Prov. DKI Jakarta ;

- c. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 04/SPP/BT/BHK/2007 tertanggal 18 Desember 2007, yang ditanda tangani an. BAHIR ROMSAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum ;
- d. 1 (satu) lembar asli Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap No. 104/SPP/BT/BHK/2007 tertanggal 18 Desember 2007, yang ditanda tangani an. BAHIR ROMSAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum ;
- e. 1 (satu) lembar asli Dokumen Faktur Nomor : CA/XI/LX/07 tertanggal 3 Desember 2007 yang ditandatangani an. MUKJIJAH selaku Direktur CV. CITRA ABADI ;
- f. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Barang (BAPB) Nomor : 83/BAPB/BH/XII/2007 tertanggal 3 Desember 2007, ditanda tangani oleh Panitia Pemeriksa Barang nomor urut 1 (satu) Ketua sampai dengan 5 (lima) anggota, an. MUKJIJAH selaku Direktur CV. CITRA ABADI dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Pemeriksaan Baran ;
- g. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 68/BAST/BH/XII/2007 tanggal 3 Desember 2007, yang ditanda tangani an. IRUSWANDI, SH selaku Pengurus Barang unit Biro Hukum, an. MUKJIJAH selaku Direktur CV. CITRA ABADI dan mengetahui an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Serah Terima Barang ;

Hal. 264 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



205. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Kerja Nomor : 503/A/077.222 tertanggal 19 September 2007 tentang Pengadaan Penggandaan Fotocopy pembahasan revisi undang-undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara kebutuhan Biro Hukum Setda Prov. DKI Jakarta, untuk CV. DUA PUTERI ANUGERAH ;
206. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran terhadap Surat Perintah Kerja Nomor : 503/A/077.222 tertanggal 19 September 2007 tentang Pengadaan Penggandaan Fotocopy pembahasan revisi undang-undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara kebutuhan Biro Hukum Setda Prov. DKI Jakarta, untuk CV. DUA PUTERI ANUGERAH, yang berisi antara lain :
- a. 1 (satu) lembar asli Dokumen SPM Giro No : 00134522007 Tahun 2007 tanggal 15 November 2007, sebesar Rp. 26.792.000,- (dua puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) kepada CV. DUA PUTERI ANUGERAH ;
 - b. 1 (satu) lembar asli Kwitansi CV. DUA PUTERI ANUGERAH Nomor : 008/DPA/XI/2007 tertanggal 9 November 2007 sebesar Rp. 29.920.000,- (dua puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), yang ditandatangani diatas materei 6.000 an. TIOLINA L. TOBING selaku Direktur dan an. BAHIR ROMSAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum DKI Jakarta, terdapat stempel dan tandatangan an. JORNAL E. SIAHAAN, Sh, Msi selaku Kepala Biro Hukum Prov. DKI Jakarta ;
 - c. 1 (satu) lembar foto copy Dokumen Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 69/SPP/BT/BHK/2007 tertanggal 9 November 2007, yang ditanda tangani an. BAHIR ROMSAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum ;
 - d. 1 (satu) lembar asli Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap No. 69/SPP/BT/BHK/2007 tertanggal 9 November 2007, yang ditanda tangani an. BAHIR ROMSAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum Setdaprov DKI

Hal. 265 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum ;

- e. 1 (satu) lembar asli Dokumen Faktur Nomor : KWT.008/DPA/XI/07 tertanggal 9 November 2007 yang ditandatangani an. TIO LONA L. TOBING selaku Direktur CV. DUA PUTERI ANUGERAH ;
 - f. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Barang (BAPB) Nomor : 04/BAPB/BH/X/2007 tertanggal 29 Oktober 2007, ditanda tangani oleh Panitia Pemeriksa Barang nomor urut 1 (satu) Ketua sampai dengan 5 (lima) anggota, an. TIO LONA L. TOBING selaku Direktur CV. DUA PUTERI ANUGERAH dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang ;
 - g. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 04/BAST/BH/XII/2007 tanggal 29 Oktober 2007, yang ditanda tangani an. IRUSWANDI, SH selaku Pengurus Barang unit Biro Hukum, an. TIO LONA L. TOBING selaku Direktur CV. DUA PUTERI ANUGERAH dan mengetahui an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Serah Terima Barang ;
207. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Kerja Nomor : 576/A/077.92 tertanggal 19 September 2007 tentang Pengadaan Fotocopy kegiatan evaluasi dan pengkajian peraturan perundang-undangan tentang pengosongan hunian tanpa hak kebutuhan Biro Hukum Setda Prov. DKI Jakarta, untuk PT. JOZAVINDO INTI KARYA ;
208. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Kerja Nomor : 574/A/077.92 tertanggal 19 September 2007 tentang Pengadaan Fotocopy kegiatan evaluasi dan pengkajian peraturan perundang-undangan tentang penanganan bantuan sosial dalam rangka penanggulangan bencana dan pengungsi kebutuhan Biro Hukum Setda Prov. DKI Jakarta, untuk PT. JOZAVINDO INTI KARYA ;
209. 1 (satu) bundel Dokumen Perjanjian Jasa Konsultasi seleksi umum penyelenggaraan bimbingan teknis penyusunan PKS/MOU kebutuhan Biro Hukum Setda Prov. DKI Jakarta, antara Biro Hukum Setda Prov. DKI Jakarta dengan PT. ALFRIZ AULIATAMA Nomor : 691/A/079.32 tertanggal 21 November 2007 ;

Hal. 266 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

210. 1 (satu) bundel Dokumen pembayaran Jasa Konsultasi seleksi umum penyelenggaraan bimbingan teknis penyusunan PKS/MOU kebutuhan Biro Hukum Setda Prov. DKI Jakarta, antara Biro Hukum Setda Prov. DKI Jakarta dengan PT. ALFRIZ AULIATAMA Nomor : 691/A/079.32 tertanggal 21 November 2007, yang berisi antara lain :
- a. 1 (satu) lembar asli Dokumen SPM Giro No : 00177572007 Tahun 2007 sebesar Rp. 175.301.900,- (seratus tujuh puluh lima juta tiga ratus satu ribu sembilan ratus rupiah) kepada PT. ALFRIZ AULIATAMA sehubungan Kontrak Nomor. 691/A/079.32, tanggal 21 November 2007 ;
 - b. 1 (satu) lembar asli Kwitansi PT. ALFRIZ AULIATAMA (tanpa nomor) tertanggal 4 Desember 2007 sebesar Rp. 175.301.900,- (seratus tujuh puluh lima juta tiga ratus satu ribu sembilan ratus rupiah), yang ditandatangani diatas materai 6.000 an. ADUNG KARNANEN selaku Direktur Utama PT. ALFRIZ AULIATAMA dan an. BAHIR ROMSAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum DKI Jakarta, terdapat stempel dan tandatangan an. JORNAL E. SIAHAAN, Sh, Msi selaku Kepala Biro Hukum Prov. DKI Jakarta ;
 - c. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 96/SPP/BT/BHK/2007 tertanggal 12 Desember 2007, yang ditanda tangani an. BAHIR ROMSAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum ;
 - d. 1 (satu) lembar asli Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap No. 96/SPP/BT/BHK/2007 tertanggal 12 Desember 2007, yang ditanda tangani an. BAHIR ROMSAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum ;
 - e. 1 (satu) lembar asli Dokumen Invoice PT. ALFRIZ AULIATAMA Nomor : 120/ALF-Invoice/ /2007 tertanggal 29 November 2007, sebesar Rp. 175.530.190,- (seratus tujuh puluh lima juta lima ratus tiga puluh ribu seratus sembilan puluh rupiah), ditujukan kepada Yth. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Jl. Medan merdeka Selatan No. 8-9, Jakarta Pusat, ditandatangani oleh an. ADUNG

Hal. 267 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARNANEN selaku Direktur Utama PT. ALFRIZ AULIATAMA dan an. IRUSWANDI ;

- f. 2 (dua) lembar asli Dokumen Berita Acara Bobot Volume Pekerjaan bimbingan Teknis Penyusunan PKS/MOU kebutuhan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor : 01/BABVP/BH/XI/07 tanggal 29 November 2007, yang ditandatangani an. ADUNG KARNANEN selaku Direktur Utama PT. ALFRIZ AULIATAMA dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum Prov. DKI Jakarta ;
- g. 2 (dua) lembar asli Dokumen Berita Acara Penyerahan Pekerjaan, yang ditandatangani an. ADUNG KARNANEN selaku Direktur Utama PT. ALFRIZ AULIATAMA dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum Prov. DKI Jakarta ;
- h. 1 (satu) lembar asli Dokumen daftar hadir personil Pekerjaan bimbingan teknis penyusunan PKS/MOU kebutuhan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta, periode bulan November 2007, tertanggal 20 November 2007, ditandatangani an. ADUNG KARNANEN selaku Direktur Utama PT. ALFRIZ AULIATAMA ;
- i. 1 (satu) lembar asli Dokumen daftar hadir personil Pekerjaan bimbingan teknis penyusunan PKS/MOU kebutuhan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta, periode bulan November 2007, tertanggal 29 November 2007, ditandatangani an. ADUNG KARNANEN selaku Direktur Utama PT. ALFRIZ AULIATAMA ;
- j. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Barang (BAPB) Nomor : 62/BAPB/BH/XI/2007 tertanggal 29 November 2007, ditanda tangani oleh Panitia Pemeriksa Barang nomor urut 1 (satu) Ketua sampai dengan 5 (lima) anggota, an. ADUNG KARNANEN selaku Direktur Utama PT. ALFRIZ AULIATAMA dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 2 (dua) lembar asli lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang ;
- k. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 35/BASTB/BH/XI/2007 tanggal 29 November 2007, yang ditanda tangani an. IRUSWANDI, SH selaku Pengurus

Hal. 268 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang unit Biro Hukum, an. ADUNG KARNANEN selaku Direktur Utama PT. ALFRIZ AULIATAMA dan mengetahui an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 2 (dua) lembar asli lampiran Berita Acara Serah Terima Barang ;

211. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Kerja Nomor : 517/A/077.92 tertanggal 1 November 2007 tentang Pengadaan Penggandaan Fotocopy dalam rangka kegiatan evaluasi dan pengkajian peraturan perundang-undangan tentang kedudukan yayasan yang dikelola oleh pemerintah daerah kebutuhan Biro Hukum Setda Prov. DKI Jakarta, untuk CV. HAPPY EKA MANDIRI ;
212. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Kerja Nomor : 564/A/077.92 tertanggal 2 November 2007 tentang Pengadaan ATK dalam rangka kegiatan evaluasi dan pengkajian peraturan perundang-undangan tentang kedudukan yayasan yang dikelola oleh pemerintah daerah kebutuhan Biro Hukum Setda Prov. DKI Jakarta, untuk CV. HAPPY EKA MANDIRI, yang terdiri antara lain :
 - a. 1 (satu) lembar asli Dokumen SPM Giro No : 00164622007 Tahun 2007 sebesar Rp. 62.238.505,- (enam puluh dua juta dua ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus lima rupiah) kepada CV. HAPPY EKA MANDIRI sehubungan Kontrak Nomor. 364/A/077.92 tertanggal 2 November 2007 ;
 - b. 1 (satu) lembar asli Kwitansi CV. HAPPY EKA MANDIRI nomor : 02/HEM/ATK/XII/07 tertanggal 10 Desember 2007 sebesar Rp. 69.504.930,- (enam puluh sembilan juta lima ratus empat ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah), yang ditandatangani diatas materai 6.000 an. HAPPY JAN ANGGRAENI selaku Direktur CV. HAPPY EKA MANDIRI dan an. BAHIR ROMSAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum DKI Jakarta, terdapat stempel dan tandatangan an. JORNAL E. SIAHAAN, Sh, Msi selaku Kepala Biro Hukum Prov. DKI Jakarta ;
 - c. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 84/SPP/BT/BHK/2007 tertanggal 10 Desember 2007, yang ditanda tangani an. BAHIR ROMSAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum ;

Hal. 269 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) lembar asli Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap No. 84/SPP/BT/BHK/2007 tertanggal 10 Desember 2007, yang ditanda tangani an. BAHIR ROMSAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum ;
- e. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Barang (BAPB) Nomor : 64/BAPB/BH/XII/2007 tertanggal 3 Desember 2007, ditanda tangani oleh Panitia Pemeriksa Barang nomor urut 1 (satu) Ketua sampai dengan 5 (lima) anggota, an. HAPPY JAN ANGGRAENI selaku Direktur CV. HAPPY EKA MANDIRI dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 2 (dua) lembar asli lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang ;
- f. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 49/BASTB/BH/XII/2007 tanggal 3 Desember 2007, yang ditanda tangani an. IRUSWANDI, SH selaku Pengurus Barang unit Biro Hukum, an. HAPPY JAN ANGGRAENI selaku Direktur CV. HAPPY EKA MANDIRI dan mengetahui an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 2 (dua) lembar asli lampiran Berita Acara Serah Terima Barang ;
- 213. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Kerja Nomor : 514/A/077.92 tertanggal 1 November 2007 tentang Pengadaan Penggandaan Foto Copy dalam rangka kegiatan penyusunan program kegiatan Biro Hukum kebutuhan Biro Hukum Setda Prov. DKI Jakarta, untuk CV. HAPPY EKA MANDIRI ;
- 214. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Kerja Nomor : 572/077.92 tertanggal 19 September 2007 tentang Penunjukan Langsung Pengadaan Pekerjaan Fotocopy kegiatan evaluasi yuridis terhadap perjanjian kerjasama penyediaan dan peningkatan air bersih kebutuhan Biro Hukum Setda Prov. DKI Jakarta, untuk PT. JOZAVINDO INTI KARYA ;
- 215. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Kerja Nomor : 578/A/077.92 tertanggal 19 September 2007 tentang Penunjukan Langsung Pengadaan Pekerjaan Fotocopy kegiatan evaluasi yuridis terhadap perjanjian kerjasama pembangunan dan penyelenggaraan monorail

Hal. 270 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan Biro Hukum Setda Prov. DKI Jakarta, untuk PT. JOZAVINDO INTI KARYA ;

216. 1 (satu) bundel Dokumen Perjanjian Pemilihan Langsung Pengadaan Penggandaan Cetakan dalam rangka kegiatan sarana penunjang kebutuhan Biro Hukum Setda Prov. DKI Jakarta, antara Biro Hukum Setda Prov. DKI Jakarta dengan CV. OISELI SUMBER MAKMUR Nomor : 549/A/075.6 tertanggal 2 November 2007 ;

217. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Pengadaan Penggandaan Cetakan dalam rangka kegiatan sarana penunjang kebutuhan Biro Hukum Setda Prov. DKI Jakarta, antara Biro Hukum Setda Prov. DKI Jakarta dengan CV. OISELI SUMBER MAKMUR Nomor : 549/A/075.6 tertanggal 2 November 2007, yang berisi antara lain :

- a. 1 (satu) lembar asli Dokumen SPM Giro No : 00167412007 Tahun 2007 sebesar Rp. 55.348.135,- (lima puluh lima juta tiga ratus empat puluh lima ribu seratus tiga puluh lima rupiah) kepada CV. OISELI SUMBER MAKMUR sehubungan Kontrak Nomor. 549/A/075.6, tanggal 2 November 2007 ;
- b. 1 (satu) lembar asli Kwitansi CV. IOISELI SUMBER MAKMUR Nomor : 014/KWT/OSM/2007 tertanggal 11 Desember 2007 sebesar Rp. 61.810.100,- (enam puluh satu juta delapan ratus sepuluh ribu seratus rupiah), yang ditandatangani diatas materei 6.000 an. ABDULLAH selaku Direktur dan an. BAHIR ROMSAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum DKI Jakarta, terdapat stempel dan tandatangan an. JORNAL E. SIAHAAN, Sh, Msi selaku Kepala Biro Hukum Prov. DKI Jakarta;
- c. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 88/SPP/BT/BHK/2007 tertanggal 11 Desember 2007, yang ditanda tangani an. BAHIR ROMSAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum ;
- d. 1 (satu) lembar asli Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap No. 88/SPP/BT/BHK/2007 tertanggal 11 Desember 2007, yang ditanda tangani an. BAHIR ROMSAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum ;

Hal. 271 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) lembar asli Dokumen Faktur Nomor : 013/FTR/OSM/2007 tertanggal 3 Desember 2007 yang ditandatangani an. ABDULLAH selaku Direktur CV. OSIELI SUMBER MAKMUR ;
 - f. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Barang (BAPB) Nomor : 40/BAPB/BH/XII/2007 tertanggal 3 Desember 2007, ditanda tangani oleh Panitia Pemeriksa Barang nomor urut 1 (satu) Ketua sampai dengan 5 (lima) anggota, an. ABDULLAH selaku Direktur CV. OISELI SUMBER MAKMUR dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang ;
 - g. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 48/BAST/BH/XII/2007 tanggal 3 Desember 2007, yang ditanda tangani an. IRUSWANDI, SH selaku Pengurus Barang unit Biro Hukum, an. ABDULLAH selaku Direktur CV. OISELI SUMBER MAKMUR dan mengetahui an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Serah Terima Barang ;
218. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 370/A/077.92 tentang Kegiatan Penyusunan Raperda dan Penyempurnaan Perda serta Produk Hukum lainnya, tertanggal 27 Juli 2007 antara Biro Hukum DKI Jakarta dengan PT. METRO BHAKTI DINAMIKA ;
219. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran atas Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 370/A/077.92 tentang Kegiatan Penyusunan Raperda dan Penyempurnaan Perda serta Produk Hukum lainnya, tertanggal 27 Juli 2007 antara Biro Hukum DKI Jakarta dengan PT. METRO BHAKTI DINAMIKA, yang berisi antara lain :
- a. 1 (satu) lembar asli Dokumen SPM Giro No : 00172922007 Tahun 2007 sebesar Rp. 85.902.250,- (delapan puluh lima juta sembilan ratus dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) kepada PT. METRO BHAKTI DINAMIKA sehubungan Kontrak Nomor. 370/A/077.92, tanggal 27 Juli 2007 ;
 - b. 1 (satu) lembar asli Kwitansi PT. METRO BHAKTI DINAMIKA CONSULTAN (tanpa nomor) tertanggal 10 Desember 2007 sebesar Rp. 98.945.000,- (sembilan puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah), yang ditandatangani diatas

Hal. 272 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterei 6.000 an. Ir. MOHAMAD RAFI selaku Direktur Utama PT. METRO BHAKTI DINAMIKA dan an. BAHIR ROMSAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum DKI Jakarta, terdapat stempel dan tandatangan an. JORNAL E. SIAHAAN, Sh, Msi selaku Kepala Biro Hukum Prov. DKI Jakarta ;

- c. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 78/SPP/BHK/BT/2007 tertanggal 10 Desember 2007, yang ditanda tangani an. BAHIR ROMSAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum ;
- d. 1 (satu) lembar asli Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap No. 78/SPP/BT/BHK/2007 tertanggal 10 Desember 2007, yang ditanda tangani an. BAHIR ROMSAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum ;
- e. 1 (satu) lembar asli Dokumen Invoice PT. METRO BHAKTI DINAMIKA Nomor : 35/MBD-Invoice/X/2007 tertanggal 25 Oktober 2007, sebesar Rp. 98.945.000,- (sembilan puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah), ditujukan kepada Yth. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Jl. Medan merdeka Selatan No. 8-9, Jakarta Pusat, ditandatangani oleh an. Ir. MOHAMAD RAFI selaku Direktur Utama PT. METRO BHAKTI DINAMIKA dan an. IRUSWANDI ;
- f. 2 (dua) lembar asli Dokumen Berita Acara Bobot Volume Pekerjaan Susunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pendirian Rumah Ibadah Nomor : 043/BA/MBD/DKI/X/2007 tanggal 24 Oktober 2007, yang ditandatangani an. Ir. MOHAMAD RAFI selaku Direktur Utama PT. METRO BHAKTI DINAMIKA dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum Prov. DKI Jakarta ;
- g. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Penyerahan Pekerjaan, yang ditandatangani an. Ir. MOHAMAD RAFI selaku Direktur Utama PT. METRO BHAKTI DINAMIKA dan an.

Hal. 273 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum Prov. DKI Jakarta ;

- h. 1 (satu) lembar asli Dokumen daftar hadir Pekerjaan penyusunan Naskah Akademis Raperda Tentang Pendirian Rumah Ibadah, periode 27 Juli s/d 17 Agustus 2007, tertanggal 16 Agustus 2007, ditandatangani an. Ir. MOHAMAD RAFI selaku Direktur Utama PT. METRO BHAKTI DINAMIKA ;
- i. 1 (satu) lembar asli Dokumen daftar hadir Pekerjaan penyusunan Naskah Akademis Raperda Tentang Pendirian Rumah Ibadah, periode 18 Agustus s/d 8 September 2007, tertanggal 9 September 2007, ditandatangani an. Ir. MOHAMAD RAFI selaku Direktur Utama PT. METRO BHAKTI DINAMIKA ;
- j. 1 (satu) lembar asli Dokumen daftar hadir Pekerjaan penyusunan Naskah Akademis Raperda Tentang Pendirian Rumah Ibadah, periode 9 September s/d 1 Oktober 2007, tertanggal 2 Oktober 2007, ditandatangani an. Ir. MOHAMAD RAFI selaku Direktur Utama PT. METRO BHAKTI DINAMIKA ;
- k. 1 (satu) lembar asli Dokumen daftar hadir Pekerjaan penyusunan Naskah Akademis Raperda Tentang Pendirian Rumah Ibadah, periode 2 s/d 24 Oktober 2007, tertanggal 25 Oktober 2007, ditandatangani an. Ir. MOHAMAD RAFI selaku Direktur Utama PT. METRO BHAKTI DINAMIKA ;
- l. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Barang (BAPB) Nomor : 53/BAPB/BH/XII/2007 tertanggal 25 Oktober 2007, ditanda tangani oleh Panitia Pemeriksa Barang nomor urut 1 (satu) Ketua sampai dengan 5 (lima) anggota, an. Ir. MOHAMAD RAFI selaku Direktur Utama PT. METRO BHAKTI DINAMIKA dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang ;
- m. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 42/BASTB/BH/X/2007 tanggal 25 Oktober 2007, yang ditanda tangani an. IRUSWANDI, SH selaku Pengurus Barang unit Biro Hukum, an. Ir. MOHAMAD RAFI selaku Direktur Utama PT. METRO BHAKTI DINAMIKA dan mengetahui an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Serah Terima Barang ;

Hal. 274 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



220. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Kerja Nomor : 553/077.922 tentang Pengadaan Penggandaan fotocopy bahan-bahan dalam rangka penyusunan Raperda tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Shodaqoh kebutuhan Biro Hukum Setda Prov. DKI Jakarta untuk CV. ANUGRAH JAYA ;
221. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Kerja Nomor : 555/077.922 tentang Pengadaan Penggandaan fotocopy bahan-bahan dalam rangka penyusunan Raperda tentang pengelolaan panti sosial kebutuhan Biro Hukum Setda Prov. DKI Jakarta untuk CV. ANUGRAH JAYA ;
222. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Kerja Nomor : 594/077.922 tentang Pengadaan Penggandaan fotocopy bahan-bahan bahan-bahan penyusunan Raperda Penanggulangan Penyakit Epidem (Wabah) kebutuhan Biro Hukum Setda Prov. DKI Jakarta untuk CV. MANUNGAL TEGUH MANDIRI ;
223. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Kerja Nomor : 596/077.922 tentang Pengadaan Penggandaan fotocopy bahan penyusunan Raperda tentang pengelolaan sampah kebutuhan Biro Hukum Setda Prov. DKI Jakarta untuk CV. MANUNGAL TEGUH MANDIRI ;
224. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Kerja Nomor : 565/077.922 tentang Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) dalam rangka penyusunan Raperda tentang pengelolaan zakat, infak, shodaqoh kebutuhan Biro Hukum Setda Prov. DKI Jakarta untuk CV. MANUNGAL TEGUH MANDIRI ;
225. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Kerja Nomor : 557/077.922 tentang Pengadaan Penggandaan fotocopy bahan-bahan dalam rangka penyusunan himpunan produk hukum daerah berupa Perda, Surat Pengantar Gubernur dan Risalah Pembahasan Perda kebutuhan Biro Hukum Setda Prov. DKI Jakarta untuk CV. ANUGRAH JAYA ;
226. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 347/A/077.92 tentang Kegiatan Penyusunan Raperda dan Penyempurnaan Perda serta Produk Hukum lainnya dengan rincian kegiatan Penyusunan Naskah Akademis Raperda tentang Pembatasan Usia Kendaraan, tertanggal 27 Juli 2007 antara Biro Hukum DKI Jakarta dengan PT. BINA MITRA WAHANA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

227. 1 (satu) bundel Dokumen pembayaran atas Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 347/A/077.92 tentang Kegiatan Penyusunan Raperda dan Penyempurnaan Perda serta Produk Hukum lainnya dengan rincian kegiatan Penyusunan Naskah Akademis Raperda tentang Pembatasan Usia Kendaraan, tertanggal 27 Juli 2007 antara Biro Hukum DKI Jakarta dengan PT. BINA MITRA WAHANA, yang berisi antara lain :

- a. 1 (satu) lembar asli Dokumen SPM Giro No : 00172912007 Tahun 2007 tertanggal 13 Desember 2007, sebesar Rp. 85.424.750,- (delapan puluh lima juta empat ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) kepada PT. BINA MITRA WAHANA sehubungan Kontrak Nomor. 347/A/077.92, tanggal 27 Juli 2007 ;
- b. 1 (satu) lembar asli Kwitansi PT. BINA MITRA WAHANA tertanggal 10 Desember 2007 sebesar Rp. 98.395.000,- (sembilan puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), yang ditandatangani diatas meterei 6.000 an. Ir. MARIMAN selaku Direktur dan an. BAHIR ROMSAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum DKI Jakarta, terdapat stempel dan tandatangan an. JORNAL E. SIAHAAN, Sh, Msi selaku Kepala Biro Hukum Prov. DKI Jakarta ;
- c. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 79/SPP/BHK/BT/2007 tertanggal 10 Desember 2007, yang ditanda tangani an. BAHIR ROMSAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum ;
- d. 1 (satu) lembar asli Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap No. 79/SPP/BT/BHK/2007 tertanggal 10 Desember 2007, yang ditanda tangani an. BAHIR ROMSAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum ;
- e. 1 (satu) lembar asli Dokumen Invoice PT. BINA MITRA WAHANA Nomor : 022/Invoice-BMW/X/2007 tertanggal 25 Oktober 2007, tang ditanda tangani an. Ir. MARIMAN selaku Direktur Utama PT. BINA MITRA WAHANA ;

Hal. 276 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. 2 (dua) lembar asli Dokumen Berita Acara Bobot Volume Pekerjaan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembatasan Usia Kendaraan Nomor : 076/BMW-BA/DKI/X/2007 tanggal 24 Oktober 2007, yang ditandatangani an. Ir. MARIMAN selaku Direktur Utama PT. BINA MITRA WAHANA dan an. JORNAL E. SIAHAAN, Sh, Msi selaku Kepala Biro Hukum Prov. DKI Jakarta ;
- g. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Penyerahan Pekerjaan, yang ditandatangani an. Ir. MARIMAN selaku Direktur Utama PT. BINA MITRA WAHANA dan an. JORNAL E. SIAHAAN, Sh, Msi selaku Kepala Biro Hukum Prov. DKI Jakarta, berikut 4 (empat) lembar Daftar Hadir pekerjaan penyusunan naskah akademis Raperda tentang Pembatasan Usia Kendaraan ;
- h. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Barang (BAPB) Nomor : 52/BAPB/BH/X/2007 tertanggal 25 Oktober 2007, ditandatangani oleh Panitia Pemeriksaan Barang nomor urut 1 (satu) Ketua sampai dengan 5 (lima) anggota, an. Ir. MARIMAN selaku Direktur Utama PT. BINA MITRA WAHANA dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang ;
- i. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 44/BAST/BH/X/2007 tanggal 25 Oktober 2007, yang ditandatangani an. IRUSWANDI, SH selaku Pengurus Barang unit Biro Hukum, an. Ir. MARIMAN selaku Direktur Utama PT. BINA MITRA WAHANA dan mengetahui an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum ;
228. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Kerja Nomor : 613/077.222 tentang Pengadaan ATK kegiatan Penyusunan Raperda tentang Pengelolaan Sampah kebutuhan Biro Hukum Setda Prov. DKI Jakarta untuk CV. MANUNGAL TEGUH MANDIRI ;
229. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Kerja Nomor : 615/077.222 tentang Penunjukan Langsung Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) penyusunan peraturan Daerah tentang Penanggulangan Penyakit Epidemi (Wabah) kebutuhan Biro Hukum Setda Prov. DKI Jakarta untuk CV. FEBRI SINAR KASIH ;



230. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Kerja Nomor : 567/077.922 tentang Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) dalam rangka penyusunan Raperda tentang Pengelolaan Panti Sosial kebutuhan Biro Hukum Setda Prov. DKI Jakarta untuk CV. MANUNGAL TEGUH MANDIRI ;
231. 1 (satu) bendel Dokumen Surat Perintah Kerja Nomor : 580/077.922 tentang Pengadaan Penggandaan foto copy bahan-bahan Perda dan Peraturan Gubernur kebutuhan Biro Hukum Setda Prov. DKI Jakarta untuk CV. MANUNGAL TEGUH MANDIRI ;
232. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Kerja Nomor : 611/077.222 tentang Pengadaan ATK kegiatan hasil revisi Undang-undang No. 34 Tahun 1999 (sosialisasi Undang-undang No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Prov. DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia) kebutuhan Biro Hukum Setda Prov. DKI Jakarta untuk PT. JOZAVINDO INTI KARYA ;
233. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran atas Surat Perintah Kerja Nomor : 611/077.222 tentang Pengadaan ATK kegiatan hasil revisi Undang-undang No. 34 Tahun 1999 (sosialisasi Undang-undang No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Prov. DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia) kebutuhan Biro Hukum Setda Prov. DKI Jakarta untuk PT. JOZAVINDO INTI KARYA, yang antara lain :
- a. 1 (satu) lembar asli Dokumen SPM Giro No : 00164522007 Tahun 2007 tertanggal 11 Desember 2007, sebesar Rp. 44.522.000,- (empat puluh empat juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah) kepada PT. JOZAVINDO INTI KARYA sehubungan Kontrak Nomor. 611/077.222, tanggal 27 Juli 2007 ;
 - b. 1 (satu) lembar asli Kwitansi PT. JOZAVINDO INTI KARYA tertanggal 10 Desember 2007 sebesar Rp. 49.720.000,- (empat puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), yang ditandatangani di atas meterei 6.000 an. ROBERT SIANIPAR, SE selaku Direktur PT. JOZAVINDO INTI KARYA dan an. BAHIR ROMSAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum DKI Jakarta, terdapat stempel dan tandatangan an. JORNAL E. SIAHAAN, Sh, Msi selaku Kepala Biro Hukum Prov. DKI Jakarta ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 82/SPP/BHK/BT/2007 tertanggal 10 Desember 2007, yang ditanda tangani an. BAHIR ROMSAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum ;
 - d. 1 (satu) lembar asli Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap No. 82/SPP/BT/BHK/2007 tertanggal 10 Desember 2007, yang ditanda tangani an. BAHIR ROMSAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum ;
 - e. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Barang (BAPB) Nomor : 39/BAPB/BH/X/2007 tertanggal 23 Oktober 2007, ditanda tangani oleh Panitia Pemeriksa Barang nomor urut 1 (satu) Ketua sampai dengan 5 (lima) anggota, an. ROBERT SIANIPAR, SE selaku Direktur PT. JOZAVINDO INTI KARYA dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang ;
 - f. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 30/BASTPB/BH/X/2007 tanggal 23 Oktober 2007, yang ditanda tangani an. IRUSWANDI, SH.M.Kn selaku Pengurus Barang unit Biro Hukum, an. ROBERT SIANIPAR, SE selaku Direktur PT. JOZAVINDO INTI KARYA dan mengetahui an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Serah Terima Barang ;
234. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Kerja Nomor : 493/A/077.222 tentang Penunjukan Langsung Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) penyusunan peraturan Gubernur tentang Pedoman RT/RW di Provinsi DKI Jakarta kebutuhan Biro Hukum Setda Prov. DKI Jakarta untuk PT. MARAX INDONESIA ;
235. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Kerja Nomor : 580/077.922 tentang Pengadaan Penggandaan foto copy bahan-bahan Perda dan Peraturan Gubernur kebutuhan Biro Hukum Setda Prov. DKI Jakarta untuk CV. MANUNGAL TEGUH MANDIRI ;

Hal. 279 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

236. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 360/A/077.92 tentang Kegiatan Penyusunan Raperda dan Penyempurnaan Perda serta Produk Hukum lainnya dengan rincian kegiatan Penyusunan Naskah Akademis Raperda tentang Moda Transportasi Ojek, tertanggal 27 Juli 2007 antara Biro Hukum DKI Jakarta dengan PT. RAMA MITRA KONSULTAN ;
237. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran terhadap Perjanjian/Kontrak Nomor : 360/A/077.92 tentang Kegiatan Penyusunan Raperda dan Penyempurnaan Perda serta Produk Hukum lainnya dengan rincian kegiatan Penyusunan Naskah Akademis Raperda tentang Moda Transportasi Ojek, tertanggal 27 Juli 2007 antara Biro Hukum DKI Jakarta dengan PT. RAMA MITRA KONSULTAN, yang berisi antara lain :
- a. 1 (satu) lembar asli Dokumen SPM Giro No : 00172882007 Tahun 2007 tertanggal 13 Desember 2007, sebesar Rp. 85.281.500,- (delapan puluh lima juta dua ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah) kepada PT. RAMA MITRA KONSULTAN sehubungan Kontrak Nomor. 360/A/077.92, tanggal 27 Juli 2007 ;
 - b. 1 (satu) lembar asli Kwitansi PT. RAMA MITRA KONSULTAN tertanggal 10 Desember 2007 sebesar Rp. 85.281.500,- (delapan puluh lima juta dua ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah), yang ditandatangani diatas materei 6.000 an. Ir. PURWANTO selaku Direktur dan an. BAHIR ROMSAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum DKI Jakarta, terdapat stempel dan tandatangan an. JORNAL E. SIAHAAN, Sh, Msi selaku Kepala Biro Hukum Prov. DKI Jakarta ;
 - c. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 80/SPP/BT/BHK/2007 tertanggal 10 Desember 2007, yang ditanda tangani an. BAHIR ROMSAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum ;
 - d. 1 (satu) lembar asli Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap No. 80/SPP/BT/BHK/2007 tertanggal 10 Desember 2007, yang ditanda tangani an. BAHIR ROMSAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum Setdaprov DKI

Hal. 280 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum ;

- e. 2 (dua) lembar asli Dokumen Berita Acara Bobot Volume Pekerjaan Susunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Moda Transportasi Ojek Nomor : 019/RMK-BA/DKI/X/2007 tanggal 24 Oktober 2007, yang ditandatangani an. Ir. PURWANTO selaku Direktur PT. RAMA MITRA KONSULTAN dan an. JORNAL E. SIAHAAN, Sh, Msi selaku Kepala Biro Hukum Prov. DKI Jakarta ;
 - f. 1 (satu) lembar asli dokumen Berita Acara Penyerahan Pekerjaan, yang ditandatangani an. Ir. PURWANTO selaku Direktur PT. RAMA MITRA KONSULTAN dan an. JORNAL E. SIAHAAN, Sh, Msi selaku Kepala Biro Hukum Prov. DKI Jakarta;
 - g. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Barang (BAPB) Nomor : 51/BAPB/BH/X/2007 tertanggal 25 Oktober 2007, ditanda tangani oleh Panitia Pemeriksa Barang nomor urut 1 (satu) Ketua sampai dengan 5 (lima) anggota, an. Ir. PURWANTO selaku Direktur PT. RAMA MITRA KONSULTAN dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang ;
 - h. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 41/BAST/BH/X/2007 tanggal 25 Oktober 2007, yang ditanda tangani an. IRUSWANDI, SH selaku Pengurus Barang unit Biro Hukum, an. Ir. PURWANTO selaku Direktur PT. RAMA MITRA KONSULTAN dan mengetahui an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum ;
238. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 365/A/077.92 tentang Kegiatan Penyusunan Raperda dan Penyempurnaan Perda serta Produk Hukum lainnya dengan rincian kegiatan Penyusunan Naskah Akademis Raperda tentang Kedudukan Walikotamadya dalam format otonomi tunggal di Prov. DKI Jakarta, tertanggal 27 Juli 2007 antara Biro Hukum DKI Jakarta dengan PT. PANCA KARYA GUMILANG ;
239. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran atas Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 365/A/077.92 tentang Kegiatan Penyusunan Raperda dan Penyempurnaan Perda serta Produk Hukum lainnya dengan rincian

Hal. 281 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan Penyusunan Naskah Akademis Raperda tentang Kedudukan Walikotamadya dalam format otonomi tunggal di Prov. DKI Jakarta, tertanggal 27 Juli 2007 antara Biro Hukum DKI Jakarta dengan PT. PANCA KARYA GUMILANG, yang berisi antara lain :

- a. 1 (satu) lembar asli Dokumen SPM Giro No : 00172932007 Tahun 2007 tertanggal 13 Desember 2007, sebesar Rp. 85.902.250,- (delapan puluh lima juta sembilan ratus dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) kepada PT. PANCA KARYA GUMILANG sehubungan Kontrak Nomor. 365/A/077.92, tanggal 27 Juli 2007 ;
- b. 1 (satu) lembar asli Kwitansi PT. PANCA KARYA GUMILANG tertanggal 10 Desember 2007 sebesar Rp. 98.945.000,- (sembilan puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah), yang ditandatangani di atas meterai 6.000 an. Ir. SUTOMO selaku Direktur Utama dan an. BAHIR ROMSAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum DKI Jakarta, terdapat stempel dan tandatangan an. JORNAL E. SIAHAAN, Sh, Msi selaku Kepala Biro Hukum Prov. DKI Jakarta ;
- c. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 83/SPP/BT/BHK/2007 tertanggal 10 Desember 2007, yang ditanda tangani an. BAHIR ROMSAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum ;
- d. 1 (satu) lembar asli Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap No. 83/SPP/BT/BHK/2007 tertanggal 10 Desember 2007, yang ditanda tangani an. BAHIR ROMSAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum ;
- e. 1 (satu) lembar asli Dokumen Invoice dari PT. PANCA KARYA GUMILANG tertanggal 25 Oktober 2007, sebesar Rp. 98.945.000,- (sembilan puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah), ditujukan kepada Yth. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Jl. Medan Merdeka Selatan No. 8-9 Jakarta

Hal. 282 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat, ditandatangani an. Ir. SUTOMO selaku Direktur Utama PT. PANCA KARYA GUMILANG ;

- f. 2 (dua) lembar asli Dokumen Berita Acara Bobot Volume Pekerjaan Susunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Kedudukan Walikotamdya dalam Format Otonomi Tunggal Di Provinsi DKI Jakarta Nomor : 55/PKG/BA/DKI/X/2007 tanggal 24 Oktober 2007, yang ditandatangani an. Ir. SUTOMO selaku Direktur Utama PT. PANCA KARYA GUMILANG dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum Prov. DKI Jakarta ;
- g. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Penyerahan Pekerjaan, yang ditandatangani an. Ir. SUTOMO selaku Direktur Utama PT. PANCA KARYA GUMILANG dan an. JORNAL E. SIAHAAN, Sh, Msi selaku Kepala Biro Hukum Prov. DKI Jakarta. ;
- h. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Barang (BAPB) Nomor : 50/BAPB/BH/X/2007 tertanggal 25 Oktober 2007, ditanda tangani oleh Panitia Pemeriksa Barang nomor urut 1 (satu) Ketua sampai dengan 5 (lima) anggota, an. Ir. SUTOMO selaku Direktur Utama PT. PANCA KARYA GUMILANG dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang ;
- i. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 43/BASTB/BH/X/2007 tanggal 25 Oktober 2007, yang ditanda tangani an. IRUSWANDI, SH.M.Kn selaku Pengurus Barang unit Biro Hukum, an. Ir. SUTOMO selaku Direktur Utama PT. PANCA KARYA GUMILANG dan mengetahui an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Serah Terima Barang ;
- j. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Hadir Pekerjaan Penyusunan Naskah Akademis Raperda Tentang Kedudukan Walikotamdya dalam Format Otonomi Tunggal Di Provinsi DKI Jakarta, periode 27 Juli s/d 17 Agustus 2007, tertanggal 16 Agustus 2007, ditandatangani an. Ir. SUTOMO selaku Direktur Utama PT. PANCA KARYA GUMILANG ;

Hal. 283 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Hadir Pekerjaan Penyusunan Naskah Akademis Raperda Tentang Kedudukan Walikotamadya dalam Format Otonomi Tunggal Di Provinsi DKI Jakarta, periode 18 Agustus s/d 8 September 2007, tertanggal 9 September 2007, ditandatangani an. Ir. SUTOMO selaku Direktur Utama PT. PANCA KARYA GUMILANG ;
- l. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Hadir Pekerjaan Penyusunan Naskah Akademis Raperda Tentang Kedudukan Walikotamadya dalam Format Otonomi Tunggal Di Provinsi DKI Jakarta, periode 9 September s/d 1 Oktober 2007, tertanggal 2 Oktober 2007, ditandatangani an. Ir. SUTOMO selaku Direktur Utama PT. PANCA KARYA GUMILANG ;
- m. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Hadir Pekerjaan penyusunan Naskah Akademis Raperda Tentang Kedudukan Walikotamadya dalam Format Otonomi Tunggal Di Provinsi DKI Jakarta, periode 2 s/d 24 Oktober 2007, tertanggal 25 Oktober 2007, ditandatangani an. Ir. SUTOMO selaku Direktur Utama PT. PANCA KARYA GUMILANG ;
240. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 370/A/077.92 tentang Kegiatan Penyusunan Raperda dan Penyempurnaan Perda serta Produk Hukum lainnya dengan rincian kegiatan Penyusunan Naskah Akademis Raperda tentang Pendirian Rumah Ibadah, tertanggal 27 Juli 2007 antara Biro Hukum DKI Jakarta dengan PT. METRO BHAKTI DINAMIKA ;
241. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 354/A/077.92 tentang Kegiatan Penyusunan Raperda dan Penyempurnaan Perda serta Produk Hukum lainnya dengan rincian kegiatan Penyusunan Naskah Akademis Raperda tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, tertanggal 27 Juli 2007 antara Biro Hukum DKI Jakarta dengan PT. MITRAPLAN KONSULTAN ;
242. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran atas Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 354/A/077.92 tentang Kegiatan Penyusunan Raperda dan Penyempurnaan Perda serta Produk Hukum lainnya dengan rincian kegiatan Penyusunan Naskah Akademis Raperda tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, tertanggal 27 Juli 2007 antara

Hal. 284 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biro Hukum DKI Jakarta dengan PT. MITRAPLAN KONSULTAN, yang berisi antara lain :

- a. 1 (satu) lembar asli Dokumen SPM Giro No : 00172902007 Tahun 2007 tertanggal 13 Desember 2007, sebesar Rp. 85.902.250,- (delapan puluh lima juta sembilan ratus dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) kepada PT. MITRAPLAN KONSULTAN sehubungan Kontrak Nomor. 354/A/077.92, tanggal 27 Juli 2007 ;
- b. 1 (satu) lembar asli Kwitansi PT. MITRAPLAN KONS tertanggal 10 Desember 2007 sebesar Rp. 98.945.000,- (sembilan puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah), yang ditandatangani diatas meterai 6.000 an. TARNI ANDIYANTO, Amd selaku Direktur Utama PT. MITRAPLAN KONS dan an. BAHIR ROMSAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum DKI Jakarta, terdapat stempel dan tandatangan an. JORNAL E. SIAHAAN, Sh, Msi selaku Kepala Biro Hukum Prov. DKI Jakarta ;
- c. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 81/SPP/BHK/BT/2007 tertanggal 10 Desember 2007, yang ditanda tangani an. BAHIR ROMSAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum ;
- d. 1 (satu) lembar asli Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap No. 81/SPP/BT/BHK/2007 tertanggal 10 Desember 2007, yang ditanda tangani an. BAHIR ROMSAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum ;
- e. 1 (satu) lembar asli Dokumen Invoice dari PT. MITRAPLAN KONSULTAN tertanggal 25 Oktober 2007, sebesar Rp. 98.945.000,- (sembilan puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah), ditujukan kepada Yth. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Jl. Medan Merdeka Selatan No. 8-9 Jakarta Pusat, ditandatangani an. TARNI ANDIYANTO, Amd selaku Direktur Utama PT. MITRAPLAN KONSULTAN ;

Hal. 285 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 2 (dua) lembar asli Dokumen Berita Acara Bobot Volume Pekerjaan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Lembaga Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Nomor : 025/MPK-BA/DKI/X/2007 tanggal 24 Oktober 2007, yang ditandatangani an. TARNI ANDIYANTO, Amd selaku Direktur Utama PT. MITRAPLAN KONSULTAN dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum Prov. DKI Jakarta ;
- g. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Penyerahan Pekerjaan, yang ditandatangani an. TARNI ANDIYANTO, Amd selaku Direktur Utama PT. MITRAPLAN KONSULTAN dan an. JORNAL E. SIAHAAN, Sh, Msi selaku Kepala Biro Hukum Prov. DKI Jakarta ;
- h. 1 (satu) lembar asli Dokumen daftar hadir Pekerjaan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Lembaga Pemberdayaan masyarakat Kelurahan, periode 27 Juli s/d 17 Agustus 2007, tertanggal 16 Agustus 2007, ditandatangani an. TARNI ANDIYANTO, Amd selaku Direktur Utama PT. MITRAPLAN KONSULTAN ;
- i. 1 (satu) lembar asli Dokumen daftar hadir Pekerjaan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Lembaga Pemberdayaan masyarakat Kelurahan, periode 18 Agustus s/d 8 September 2007, tertanggal 9 September 2007, ditandatangani an. TARNI ANDIYANTO, Amd selaku Direktur Utama PT. MITRAPLAN KONSULTAN ;
- j. 1 (satu) lembar asli Dokumen daftar hadir Pekerjaan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Lembaga Pemberdayaan masyarakat Kelurahan, periode 9 September s/d 1 Oktober 2007, tertanggal 2 Oktober 2007, ditandatangani an. TARNI ANDIYANTO, Amd selaku Direktur Utama PT. MITRAPLAN KONSULTAN ;
- k. 1 (satu) lembar asli Dokumen daftar hadir Pekerjaan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Lembaga Pemberdayaan masyarakat Kelurahan, periode 2 s/d 24 Oktober 2007, tertanggal 25 Oktober 2007, ditandatangani an. TARNI ANDIYANTO, Amd selaku Direktur Utama PT. MITRAPLAN KONSULTAN ;

Hal. 286 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Barang (BAPB) Nomor : 49/BAPB/BH/X/2007 tertanggal 25 Oktober 2007, ditanda tangani oleh Panitia Pemeriksa Barang nomor urut 1 (satu) Ketua sampai dengan 5 (lima) anggota, an. an. TARNI ANDIYANTO, Amd selaku Direktur Utama PT. MITRAPLAN KONSULTAN dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang ;
- m. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 45/BASTB/BH/X/2007 tanggal 25 Oktober 2007, yang ditandatangani an. IRUSWANDI, SH.M.Kn selaku Pengurus Barang unit Biro Hukum, an.TARNI ANDIYANTO, Amd selaku Direktur Utama PT. MITRAPLAN KONSULTAN dan mengetahui an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Serah Terima Barang ;
243. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Kerja Nomor : 511/A/077.922 tentang Pengadaan Penggandaan foto copy dalam rangka kegiatan penyusunan Renstra SKPD 2007-2012 kebutuhan Biro Hukum Setda Prov. DKI Jakarta untuk CV. TEGUH PACKINDO MAKMUR ;
244. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Kerja Nomor : 490/A/077.922 tentang Penunjukan Langsung Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) penyusunan peraturan Gubernur tentang Pengaturan Tenaga Lepas di Kecamatan/Kelurahan di Prov. DKI Jakarta kebutuhan Biro Hukum Setda Prov. DKI Jakarta untuk PT. MARAX INDONESIA ;
245. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Kerja Nomor : 503/077.222 tentang Pengadaan Penggandaan fotocopy pembahasan revisi Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara kebutuhan Biro Hukum Setda Prov. DKI Jakarta untuk CV. DUA PUTERI ANUGERAH ;
246. 4 (empat) lembar asli Dokumen Kegiatan Pelaksanaan Penunjukan Langsung, Pemilihan Langsung dan Lelang Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov. DKI Jakarta, tertanggal 23 Agustus 2006 yang ditanda tangani an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Biro Hukum Setdaprov. DKI Jakarta, berikut terdapat 1 (satu) lembar kertas disposisi tertulis (tulisan tangan dengan pulpen warna hitam) "P. MADE – BICARAKAN DENGAN SAYA" dan tertera

Hal. 287 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama JORNAL EFFENDI SIAHAAN, SH, Msi pada sudut kanan bawah ;

247. 1 (satu) buah Dokumen Buku Kas Pengeluaran MK.10 – Pemegang Kas : – Unit Organisasi : Biro Hukum – Tahun Anggaran : 2007, pada pojok kanan atas terdapat angka romawi I ;
248. 1 (satu) buah Dokumen Buku Kas Pengeluaran MK.9 – Pemegang Kas : – Unit Organisasi : Biro Hukum – Tahun Anggaran : 2007, pada pojok kanan atas terdapat angka romawi II ;
249. 1 (satu) buah Dokumen Buku Kas Pengeluaran MK.9 – Pemegang Kas : – Unit Organisasi : Biro Hukum – Tahun Anggaran : 2007, pada pojok kanan atas terdapat angka romawi III ;
250. 1 (satu) buah Dokumen Buku Kas Pengeluaran MK.10, pada pojok kanan atas terdapat tulisan Buku IV ;
251. 2 (dua) lembar Laporan Keuangan Efisiensi bulan Februari s.d Mei 2007, terdapat tanda tangan an. BAHIR ROMSAH pada setiap lembarnya ;
252. 3 (tiga) lembar Laporan Keuangan Efisiensi bulan Juni s.d Desember 2007, terdapat tanda tangan an. BAHIR ROMSAH pada setiap lembarnya ;
253. 4 (empat) lembar Dokumen Realisasi Anggaran sampai dengan Triwulan IV (Januari s.d 28 Desember 2007) tertanggal 28 Desember 2007, yang terdapat tanda tangan BAHIR ROMSAH pada setiap halaman pada pojok kanan bawah ;
254. 1 (satu) bundel Dokumen kwitansi penggunaan uang pengumpulan pemotongan, sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) lembar asli Kwitansi – Sudah terima dari Kepala Biro Hukum sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 5 Januari 2007, yang ditanda tangani an. SUDONO ;
 - b. 1 (satu) lembar asli Kwitansi – Sudah terima dari Kepala Biro Hukum sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 5 Januari 2007, yang ditanda tangani an. SARIYAH ;
 - c. 1 (satu) lembar asli Kwitansi LILIN MAS – ART PRINTING – Sudah Terima dari Biro Hukum Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) tertanggal 29 Januari 2007, terdapat tanda tangan penerima (tanpa nama) dan stempel LILIN MAS – Jakarta ;

Hal. 288 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) lembar asli Kwitansi – Sudah terima dari Biro Hukum Prop DKI Jakarta sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 17 Januari 2007, yang ditanda tangani an. E. KOSASIH ;
- e. 1 (satu) lembar asli Kwitansi – Sudah terima dari Biro Hukum sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), tertanggal 30 Januari 2007, yang ditanda tangani an. Ny. SUPRIADI ;
- f. 1 (satu) lembar asli Kwitansi – Sudah terima dari Biro Hukum sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), tertanggal 30 Januari 2007, yang ditanda tangani an. Ny. SUPRIADI ;
- g. 1 (satu) lembar asli Kwitansi – Sudah terima dari Kepala Biro Hukum sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 6 Februari 2007, yang ditanda tangani an. SUDONO ;
- h. 1 (satu) lembar asli Kwitansi – Sudah terima dari Kepala Biro Hukum sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 6 Februari 2007, yang ditanda tangani an. SARIYAH ;
- i. 1 (satu) lembar asli Kwitansi – Sudah terima dari Kepala Biro Hukum sebesar Rp. 112.500,- (seratus dua belas ribu lima ratus rupiah) tertanggal 29 Januari 2007, yang ditanda tangani (tanpa nama) dan stempel A. MATSA'AN AGENCY ;
- j. 1 (satu) lembar Dokumen Nomor : 03/Tenis-BP/II/2007 tertanggal 6 Februari 2007 perihal penyelenggaraan permainan tenis, ditujukan kepada Ka Biro Hukum Provinsi DKI Jakarta, yang ditanda tangani an. H. RITOLA TASMAYA selaku Sekretaris Daerah Propinsi DKI Jakarta berikut 3 (tiga) lembar lampiran Jadwal Sponsor Tenis Tahun 2007, dan 1 (satu) lembar Daftar Perlengkapan Penyelenggaraan Tenis Pejabat Pemda Provinsi DKI Jakarta, 1 (satu) lembar disposisi tertanggal 6 Januari 2007 dan 1 (satu) lembar disposisi tertanggal 15 February 2007 ;
- k. 1 (satu) lembar asli Kwitansi – Sudah terima dari Kepala Biro Hukum sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) tertanggal 26 February 2007, yang ditanda tangani (tanpa nama) dan stempel A. MATSA'AN AGENCY ;
- l. 1 (satu) lembar asli Nota ROYAL STAR tertanggal 19 February 2007 sebesar Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Hal. 289 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. 1 (satu) lembar asli Kwitansi – Sudah terima dari Biro Hukum Prop DKI Jakarta sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 7 Maret 2007, yang ditanda tangani an. E. KOSASIH ;
- n. 1 (satu) lembar asli Kwitansi – Sudah terima dari Kepala Biro Hukum sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 2 Maret 2007, yang ditanda tangani an. SARIYAH ;
- o. 1 (satu) lembar asli Kwitansi – Sudah terima dari Kepala Biro Hukum sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 2 Maret 2007, yang ditanda tangani an. SUDONO ;
- p. 1 (satu) lembar asli Dokumen Laporan – ditujukan kepada Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta – Dari Kepala Sub Bagian Tata Usaha, yang ditanda tangani oleh TRI JOKO RAHARJO, SH selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta ;
- q. 1 (satu) lembar asli Kwitansi – Sudah terima dari Kepala Biro Hukum sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 3 April 2007, yang ditanda tangani an. SUDONO ;
- r. 1 (satu) lembar asli Kwitansi – Sudah terima dari Kepala Biro Hukum sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 3 Maret 2007, yang ditanda tangani an. SARIYAH ;
- s. 1 (satu) lembar asli Kwitansi – Sudah terima dari Kepala Biro Hukum sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) tertanggal 26 Maret 2007, yang ditanda tangani (tanpa nama) dan stempel A. MATSA'AN AGENCY ;
- t. 1 (satu) lembar asli Kwitansi LILIN MAS – ART PRINTING – Sudah Terima dari Biro Hukum Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 23 April 2007, terdapat tanda tangan penerima an. NUR dan stempel LILIN MAS – Jakarta ;
- u. 1 (satu) lembar asli Kwitansi – Sudah terima dari Biro Hukum Prop DKI Jakarta sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 18 April 2007, yang ditanda tangani an. E. KOSASIH. ;
- v. 1 (satu) lembar asli Kwitansi – Sudah terima dari Kepala Biro Hukum sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 1 Mei 2007, yang ditanda tangani an. SARIYAH ;

Hal. 290 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- w. 1 (satu) lembar asli Kwitansi – Sudah terima dari Kepala Biro Hukum sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 1 Mei 2007, yang ditanda tangani an. SUDONO ;
- x. 1 (satu) lembar asli Kwitansi – Sudah terima dari Kepala Biro Hukum sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tertanggal 30 April 2007, yang ditanda tangani (tanpa nama) dan stempel A. MATSA'AN AGENCY ;
- y. 1 (satu) lembar asli Kwitansi – Sudah terima dari Kepala Biro Hukum sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 4 Juni 2007, yang ditanda tangani an. SARIYAH ;
- x. 1 (satu) lembar asli Kwitansi – Sudah terima dari Biro Hukum Prop DKI Jakarta sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 20 Mei 2007, yang ditanda tangani an. E. KOSASIH ;
- z. 1 (satu) lembar asli Kwitansi – Sudah terima dari Kepala Biro Hukum sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) tertanggal 28 Mei 2007, yang ditanda tangani (tanpa nama) dan stempel A. MATSA'AN AGENCY ;
- aa. 1 (satu) lembar asli Kwitansi – Sudah terima dari Kepala Biro Hukum sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) tertanggal 25 Juni 2007, yang ditanda tangani (tanpa nama) dan stempel A. MATSA'AN AGENCY ;
- ab. 1 (satu) lembar asli Kwitansi – Sudah terima dari Biro Hukum Prop DKI Jakarta sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 18 Juni 2007, yang ditanda tangani an. E. KOSASIH ;
- ac. 1 (satu) lembar asli Kwitansi – Sudah terima dari H. BAHIR ROMSAH (PKC Biro Hukum) sebesar Rp. 5.890.000,- (lima juta delapan ratus sembilan puluh juta rupiah) tertanggal 5 Juni 2007, yang ditanda tangani an. Hj. SRI RAHAYU ;
- ad. 1 (satu) lembar asli dokumen tertanggal 12 Juni 2007 ditujukan kepada Bapak Kepala Biro Hukum Setda Prov. DKI Jakarta, perihal Permohonan Bantuan Dana, yang ditanda tangani oleh Ibu JORNAL E. SIAHAAN, berikut 1 (satu) lembar lampirannya ;
- ae. 1 (satu) lembar asli Kwitansi – Sudah terima dari Biro Hukum sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), tertanggal 10 Juli 2007, yang ditanda tangani an. Ny. SUPRIADI ;

Hal. 291 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- af. 1 (satu) lembar asli Kwitansi – Sudah terima dari Kepala Biro Hukum sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 2 Juli 2007, yang ditanda tangani an. SUDONO ;
- ag. 1 (satu) lembar asli Kwitansi – Sudah terima dari Kepala Biro Hukum sebesar Rp. 205.000,- (dua ratus lima ribu rupiah) tertanggal 30 Juli 2007, yang ditanda tangani (tanpa nama) dan stempel A. MATSA'AN AGENCY ;
- ah. 1 (satu) lembar asli Kwitansi – Sudah terima dari Biro Hukum Prop DKI Jakarta sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 12 Juli 2007, yang ditanda tangani an. E. KOSASIH ;
- ai. 1 (satu) lembar asli Kwitansi – Sudah terima dari Kepala Biro Hukum sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 2 Juli 2007, yang ditanda tangani an. SARIYAH ;
- aj. 1 (satu) lembar asli Kwitansi – Sarasehan Tingkatkan Jiwa Nasionalisme Menghadapi Ancaman Narkoba tertanggal 1 Agustus 2007, sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang ditanda tangani an. TIANA DEWI ;
- ak. 1 (satu) lembar asli Kwitansi – Sudah terima dari Biro Hukum Prop DKI Jakarta sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 1 Agustus 2007, yang ditanda tangani an. E. KOSASIH ;
- al. 1 (satu) lembar asli Kwitansi – Sudah terima dari Kepala Biro Hukum sebesar Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) tertanggal 27 Agustus 2007, yang ditanda tangani (tanpa nama) dan stempel A. MATSA'AN AGENCY ;
- am. 1 (satu) lembar asli Kwitansi – Sudah terima dari Kepala Biro Hukum sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 3 Agustus 2007, yang ditanda tangani (tanpa nama) ;
- an. 1 (satu) lembar asli Kwitansi – Sudah terima dari Kepala Biro Hukum sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 3 Agustus 2007, yang ditanda tangani an. SUDONO ;
- ao. 1 (satu) lembar asli Kwitansi – Sudah terima dari Biro Hukum sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tertanggal 21 September 2007, yang ditanda tangani an. IBU ARSYAD ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ap. 1 (satu) lembar asli Kwitansi – Sudah terima dari Kepala Biro Hukum sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 3 September 2007, yang ditanda tangani an. SARIYAH ;
- aq. 1 (satu) lembar asli Kwitansi – Sudah terima dari Kepala Biro Hukum sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 3 September 2007, yang ditanda tangani an. SUDONO ;
- ar. 1 (satu) lembar asli Dokumen Perkiraan Biaya Pengeluaran Acara Silaturahmi Menjelang Bulan Suci Ramadhan 1427 H Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta, Rabu 12 September 2007, yang ditandatangani oleh TRI JOKO RAHARDJO, SH selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha ;
- as. 1 (satu) lembar asli Kwitansi – Sudah terima dari Kepala Biro Hukum sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 1 Oktober 2007, yang ditanda tangani an. SARIYAH ;
- at. 1 (satu) lembar asli Kwitansi – Sudah terima dari Bendahara sebesar Rp. 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tertanggal (tanpa tanggal), yang ditanda tangani an. ZAENAL WAHAB ;
- au. 1 (satu) lembar asli Kwitansi – Sudah terima dari Bendahara sebesar Rp. 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tertanggal (tanpa tanggal), yang ditanda tangani an. SIGIT PRIYONO ;
- av. 1 (satu) lembar asli Kwitansi – Sudah terima dari Kepala Biro Hukum sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam ribu rupiah) tertanggal 24 September 2007, yang ditanda tangani (tanpa nama) dan stempel A. MATSA'AN AGENCY ;
- aw. 1 (satu) lembar asli Kwitansi – Sudah terima dari Biro Hukum Prop DKI Jakarta sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 10 September 2007, yang ditanda tangani an. E. KOSASIH
- ax. 1 (satu) lembar asli Kwitansi – Sudah terima dari Kepala Biro Hukum sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 2 Oktober 2007, yang ditanda tangani an. SUDONO ;
- ay. 1 (satu) lembar asli Kwitansi – Sudah terima dari Kepala Biro Hukum sebesar Rp. 182.500,- (seratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) tertanggal 29 Oktober 2007, yang ditanda tangani (tanpa nama) dan stempel A. MATSA'AN AGENCY ;

Hal. 293 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- az. 1 (satu) lembar asli Kwitansi – Sudah terima dari Biro Hukum Prop DKI Jakarta sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 2 Oktober 2007, yang ditanda tangani an. E. KOSASIH ;
- ba. 1 (satu) lembar asli Kwitansi – Sudah terima dari Biro Hukum Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 1 Oktober 2007, yang ditanda tangani an. UNTUNG PRASETYO, S.Sos ;
- bb. 1 (satu) lembar asli Dokumen Laporan – ditujukan kepada Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta – Dari Kepala Sub Bagian Tata Usaha, yang ditanda tangani oleh TRI JOKO RAHARJO, SH selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta ;
- bc. 1 (satu) lembar asli Kwitansi – Sudah terima dari Biro Hukum Prop DKI Jakarta sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 1 Nopember 2007, yang ditanda tangani an. E. KOSASIH ;
- bd. 1 (satu) lembar asli Kwitansi – Sudah terima dari Kepala Biro Hukum sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 8 November 2007, yang ditanda tangani an. SUDONO ;
- be. 1 (satu) lembar asli Kwitansi – Sudah terima dari ... sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 2 November 2007, yang ditanda tangani (tanpa nama) ;
- bf. 2 (dua) lembar asli Dokumen Daftar Hadir Wartawan Media Elektronik tertanggal 15 November 2007 ;
- bg. 1 (satu) lembar asli Kwitansi – Sudah terima dari Kepala Biro Hukum sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 3 Desember 2007, yang ditanda tangani an. SUDONO ;
- bh. 1 (satu) lembar asli Kwitansi – Sudah terima dari Kepala Biro Hukum sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 3 Desember 2007, yang ditanda tangani an. SARIYAH ;
- bi. 1 (satu) lembar asli Kwitansi – Sudah terima dari Kepala Biro Hukum sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) tertanggal 26 November 2007, yang ditanda tangani (tanpa nama) dan stempel A. MATSA'AN AGENCY ;
- bj. 1 (satu) lembar asli Kwitansi – Sudah terima dari Biro Hukum Prop DKI Jakarta sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) tertanggal 1 Desember 2007, yang ditanda tangani an. E. KOSASIH ;

bk. 1 (satu) lembar asli Kwitansi – Sudah terima dari Biro Hukum sebesar Rp. 1.110.000,- (satu juta seratus sepuluh ribu rupiah) tertanggal 18 Desember 2007, yang ditanda tangani (tanpa nama) dan stempel Ayam Tulang Lunak Hayam Wuruk ;

bl. 1 (satu) lembar asli Kwitansi – Sudah terima dari Kepala Biro Hukum sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tertanggal 28 Desember 2007, yang ditanda tangani (tanpa nama) dan stempel A. MATSA'AN AGENCY ;

255. 1 (satu) bundel Dokumen kwitansi penerimaan oleh ELLEN SIAGIAN dan JORNAL E. SIAHAAN, sebagai berikut :

a. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima tertanggal 3 Januari 2007, sudah terima dari BAHIR ROMSAH (Pemegang Kas Cabang Hukum) sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), untuk keperluan kegiatan Kepala Biro Hukum bulan Januari 2007, yang ditandatangani an. ELLEN SIAGIAN ;

b. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima tertanggal 7 Februari 2007, sudah terima dari BAHIR ROMSAH (Pemegang Kas Cabang Hukum) sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), untuk keperluan kegiatan Kepala Biro Hukum bulan Februari 2007, yang ditandatangani an. ELLEN SIAGIAN ;

c. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima tertanggal 5 Maret 2007, sudah terima dari BAHIR ROMSAH (Pemegang Kas Cabang Hukum) sebesar Rp 5.000.000,00, untuk keperluan kegiatan Kepala Biro Hukum, yang ditandatangani an. ELLEN SIAGIAN ;

d. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima tertanggal 5 Maret 2007, sudah terima dari BAHIR ROMSAH (Pemegang Kas Cabang Biro Hukum) sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), untuk keperluan kegiatan Kepala Biro Hukum bulan Maret 2007, yang ditandatangani an. ELLEN SIAGIAN ;

e. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima tertanggal 2 April 2007, sudah terima dari BAHIR ROMSAH (Pemegang Kas Cabang Biro Hukum) sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), untuk keperluan kegiatan Kepala Biro Hukum bulan April 2007, yang ditandatangani an. ELLEN SIAGIAN ;

Hal. 295 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima tertanggal 3 Mei 2007, sudah terima dari BAHIR ROMSAH (Pemegang Kas Cabang Biro Hukum) sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), untuk keperluan kegiatan Kepala Biro Hukum bulan Mei 2007, yang ditandatangani an. ELLEN SIAGIAN ;
- g. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima tertanggal 10 Mei 2007, sudah terima dari BAHIR ROMSAH (Pemegang Kas Cabang Biro Hukum) sebesar Rp 30.000.000,00, untuk keperluan Pinjaman Kepala Biro Hukum, yang ditandatangani an. JORNAL E. SIAHAAN ;
- h. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima tertanggal 4 Juni 2007, sudah terima dari BAHIR ROMSAH (Pemegang Kas Cabang Biro Hukum) sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), untuk keperluan kegiatan Kepala Biro Hukum bulan Juni 2007, yang ditandatangani an. ELLEN SIAGIAN ;
- i. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima tertanggal 5 Juli 2007, sudah terima dari Kepala Biro Hukum sebesar Rp 15.000.000,00, untuk keperluan Bantuan Umroh, yang ditandatangani an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi ;
- j. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima tertanggal 6 Juli 2007, sudah terima dari BAHIR ROMSAH (Pemegang Kas Cabang Biro Hukum) sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), untuk keperluan kegiatan Kepala Biro Hukum bulan Juli 2007, yang ditandatangani an. ELLEN SIAGIAN ;
- k. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima tertanggal 13 Juli 2007, sudah terima dari Kepala Biro Hukum sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), untuk keperluan Bon Pengeluaran, yang ditandatangani an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi ;
- l. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima tertanggal 6 Agustus 2007, sudah terima dari BAHIR ROMSAH (Pemegang Kas Cabang Biro Hukum) sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), untuk keperluan kegiatan Kepala Biro Hukum bulan Agustus 2007, yang ditandatangani an. ELLEN SIAGIAN ;
- m. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima tertanggal 20 Agustus 2007, sudah terima dari Bapak H. BAHIR ROMSAH (Pemegang Kas Cabang Biro Hukum) sebesar Rp 5.520.000,00, untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Tiket Pesawat ke Bali PP tanggal 21 Agustus 2007, yang ditandatangani an. ELLEN SIAGIAN ;

- n. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima tertanggal 4 September 2007, sudah terima dari BAHIR ROMSAH (Pemegang Kas Cabang Biro Hukum) sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), untuk keperluan kegiatan Kepala Biro Hukum bulan September 2007, yang ditandatangani an. ELLEN SIAGIAN ;
 - o. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima tertanggal 4 Oktober 2007, sudah terima dari BAHIR ROMSAH (Pemegang Kas Cabang Biro Hukum) sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), untuk keperluan kegiatan Kepala Biro Hukum bulan Oktober 2007, yang ditandatangani an. ELLEN SIAGIAN ;
 - p. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima tertanggal 29 Oktober 2007, sudah terima dari BAHIR ROMSAH (Pemegang Kas Cabang Biro Hukum) sebesar Rp 6.700.000,00, untuk keperluan kegiatan Kepala Biro Hukum, yang ditandatangani an. ELLEN SIAGIAN ;
 - q. 1 (satu) lembar Tanda Terima (tulisan tangan) tertanggal 1 November 2007, telah terima dari H. BAHIR sebesar Rp 50.000.000,00, untuk keperluan Kepala Biro, yang ditandatangani an. ELLEN SIAGIAN ;
 - r. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima tertanggal 2 November 2007, sudah terima dari BAHIR ROMSAH (Pemegang Kas Cabang Biro Hukum) sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), untuk keperluan kegiatan Kepala Biro Hukum bulan November 2007, yang ditandatangani an. ELLEN SIAGIAN ;
 - s. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima tertanggal 6 Desember 2007, sudah terima dari BAHIR ROMSAH (Pemegang Kas Cabang Biro Hukum) sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), untuk keperluan kegiatan Kepala Biro Hukum bulan Desember 2007, yang ditandatangani an. ELLEN SIAGIAN ;
 - t. 1 (satu) lembar Bon Pengeluaran tertanggal 7 Desember 2007, sudah terima dari BAHIR ROMSAH sebesar Rp 500.000.000,00, untuk pembayaran Efisiensi, yang ditandatangani an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum ;
256. 1 (satu) bundel Dokumen penggunaan pengumpulan pemotongan pada tahun 2007, sebagai berikut :

Hal. 297 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 2 (dua) lembar Laporan Keuangan Efisiensi bulan Februari 2008, terdapat tanda tangan an. BAHIR ROMSAH pada setiap lembarnya ;
 - b. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Sudah terima dari Kepala Biro Hukum sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 3 Januari 2008, yang ditanda tangani an. SUDONO ;
 - c. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima tertanggal 8 Januari 2008, sudah terima dari BAHIR ROMSAH (Pemegang Kas Cabang Biro Hukum) sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), untuk keperluan kegiatan Kepala Biro Hukum bulan Januari 2008, yang ditandatangani an. ELLEN SIAGIAN ;
 - d. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima tertanggal 4 Februari 2008, sudah terima dari Bapak H. BAHIR (Pemegang Kas Cabang Biro Hukum) sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), untuk keperluan biaya operasional Kepala Biro Hukum, yang ditandatangani an. ELLEN SIAGIAN ;
 - e. 1 (satu) lembar copy dilegalisir Kwitansi sudah terima dari BAHIR ROMSAH sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tanggal 2 Nopember 2008 yang ditanda tangani an. PANITYONO ;
257. 1 (satu) buah dokumen BUKU EXPEDISI berisi rincian catatan penggunaan Kepala Biro Hukum. Terdapat logo "JAYA RAYA" dengan sampul warna kuning, pada sampul terdapat banyak tulisan tangan berupa angka dan nama ;
258. 1 (satu) bundel Dokumen terkait pengembalian atas penerimaan 10 % atas pengadaan Filler Hukum 2007, sebagai berikut :
- a. 1 (satu) lembar asli Kwitansi berwarna merah tertulis telah terima dari Panitia Pemeriksa Barang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), tertanggal 14 Juli 2008, terdapat tanda tangan an. PANITYONO ;
 - b. 1 (satu) lembar asli Kwitansi berwarna hijau tertulis telah terima dari Panitia Pemeriksa Barang sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), tertanggal 19 September 2008, terdapat tanda tangan an. PANITYONO ;
 - c. 1 (satu) lembar asli Kwitansi berwarna kuning tertulis telah terima dari Panitia Pemeriksa Barang sebesar Rp. 14.000.000,- (empat

Hal. 298 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas juta rupiah), tertanggal 14 November 2008, terdapat tanda tangan an. PANITYONO ;

259. 2 (dua) lembar foto copy dengan Cap Stempel asli, Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor : 532/2001 tentang Pemberian Biaya Penanganan Perkara di Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, tanggal 15 Februari 2001, ditandatangani oleh SUTIYOSO selaku Gubernur Propinsi DKI Jakarta, berikut 1 (satu) lembar lampiran Pemberian Biaya Operasional Penanganan Perkara di Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara ;
260. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor : 564/2005 tentang Penunjukan/Penetapan Advokat sebagai Penasihat hukum dan Konsultasi Hukum Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, tanggal 4 Maret 2005, ditandatangani oleh SUTIYOSO selaku Gubernur Propinsi DKI Jakarta ;
261. 1 (satu) bundel Dokumen sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) lembar asli SPM Giro Pemprop DKI Jakarta No. 00132932006 tanggal 25 Agustus 2006, untuk pembayaran biaya pengurusan perkara perdata, pidana & TUN (Perkara No. 2086K/PDT/2004 Jo No. 63/PDT.G/2002/PN.JAK SEL) sejumlah Rp 976.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh enam juta rupiah);
 - b. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pemprop DKI Jakarta tanggal 15 Agustus 2006, untuk pembayaran pengurusan perkara perdata, pidana dan TUN (Perkara No. 2086K/PDT/2004 Jo No. 63/Pdt.G/2002/PN.Jak Sel) sejumlah Rp 976.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh enam juta rupiah), ditandatangani oleh BAHIR ROMSAH selaku Pemegang Kas Cabang ;
 - c. 1 (satu) lembar asli Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No.1046/SPP/SWD/BB/VIII/2006 tanggal 15 Agustus 2006, ditandatangani oleh HARI SANDJOJO MJ selaku Assisten Keuangan Sekdaprov DKI Jakarta dan H. BUDIYONO selaku Pemegang Kas Cabang ;
 - d. 1 (satu) lembar asli Surat permintaan Pembayaran Beban Tetap No. 1046/SPP/SWD/BB/VIII/2006 tanggal 15 Agustus 2006, ditandatangani oleh HARI SANDJOJO MJ selaku Assisten Keuangan Sekdaprov DKI Jakarta dan H. BUDIYONO selaku Pemegang Kas Cabang ;

Hal. 299 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) lembar asli Lampiran SPP Beban Tetap SKO No. 18022/2006 tanggal 17 Juli 2006 berupa rincian permohonan biaya perkara nomor 2086 K/PDT/2004 jo No. 63/PDT.G/2002/PN.JAK SEL, seluas 9.164 M2 Keputusan Gubernur Nomor 532 tahun 2001, ditandatangani oleh JORNAL E. SIAHAAN, SH, M.Si selaku Kepala Biro Hukum dan BAHIR ROMSAH selaku Pemegang Kas Cabang ;
262. 1 (satu) bundel Dokumen sebagai berikut :
- a. 1 (satu) lembar foto copy SPM Giro Pemprop DKI Jakarta No. 00168412007 tanggal 12 Desember 2007, untuk pembayaran biaya pengurusan perkara perdata, pidana & TUN (Perkara No. 101/PDT.G/2007/PN. JA-PUS) TRW. IV sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ;
- b. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pemprop DKI Jakarta tanggal 12 Desember 2007, untuk pembayaran pengurusan perkara perdata, pidana & TUN (Perkara No. 101/PGT.G/2007/PN. JA-PUS) Triwulan IV sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), ditandatangani oleh BAHIR ROMSAH selaku Pemegang Kas Cabang ;
- c. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 95/SPP/BT/BHK/2007 tanggal 12 Desember 2007, ditandatangani oleh JORNAL E. SIAHAAN, SH, M.Si selaku Kepala Biro Hukum dan BAHIR ROMSAH selaku Pemegang Kas Cabang ;
- d. 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap No. 95/SPP/BT/BHK/2007 tanggal 12 Desember 2007, ditandatangani oleh JORNAL E. SIAHAAN, SH, M.Si selaku Kepala Biro Hukum dan BAHIR ROMSAH selaku Pemegang Kas Cabang ;
- e. 1 (satu) lembar foto copy Rincian permohonan Biaya Gugatan Banjir (Class Action) Perkara No. 101/PDT.G/2007/PN.JKT.PST, sesuai Keputusan Gubernur Nomor 532 tahun 2001, ditandatangani oleh JORNAL E. SIAHAAN, SH, M.Si selaku Kepala Biro Hukum dan BAHIR ROMSAH selaku Pemegang Kas Cabang ;
263. 1 (satu) bundel Dokumen sebagai berikut :

Hal. 300 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar foto copy SPM Giro Pemprop DKI Jakarta No. 00104712007 tanggal 21 September 2007, untuk pembayaran biaya pengurusan perkara perdata, pidana & TUN (Perkara No. 476/PDT.G/2005/PN. JKT.BRT) sejumlah Rp 1.120.654.429,00 (satu milyar seratus dua puluh juta enam ratus lima puluh empat ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah) ;
 - b. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pemprop DKI Jakarta tanggal 21 September 2007, untuk pembayaran biaya pengurusan perkara perdata, pidana & TUN (Perkara No. 476/PDT.G/2005/PN. JKT.BRT) sejumlah Rp 1.120.654.429,00 (satu milyar seratus dua puluh juta enam ratus lima puluh empat ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah), ditandatangani oleh BAHIR ROMSAH selaku Pemegang Kas Cabang ;
 - c. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 66/SPP/BHK/BT/2007 tanggal 21 September 2007, ditandatangani oleh JORNAL E. SIAHAAN, SH, M.Si selaku Kepala Biro Hukum dan BAHIR ROMSAH selaku Pemegang Kas Cabang ;
 - d. 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap No. 66/SPP/BT/BHK/2007 tanggal 21 September 2007, ditandatangani oleh JORNAL E. SIAHAAN, SH, M.Si selaku Kepala Biro Hukum dan BAHIR ROMSAH selaku Pemegang Kas Cabang ;
 - e. 1 (satu) lembar foto copy lampiran SPP Beban Tetap berupa Rincian permohonan Biaya Perkara No. 476/PDT.G/2005/PN. JKT.BRT, sesuai Keputusan Gubernur Nomor 532 tahun 2001, ditandatangani oleh JORNAL E. SIAHAAN, SH, M.Si selaku Kepala Biro Hukum dan BAHIR ROMSAH selaku Pemegang Kas Cabang ;
264. 1 (satu) bundel Dokumen sebagai berikut :
- a. 1 (satu) lembar asli SPM Giro Pemprop DKI Jakarta No. 00030242007 tanggal 6 Juni 2007, untuk pembayaran biaya pengurusan perkara perdata, pidana & TUN (Perkara No. 182/PDT.G/2005/PN. JAKBAR) Triwulan II sejumlah Rp 1.029.345.571,00 (satu milyar dua puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah) ;

Hal. 301 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pemprop DKI Jakarta tanggal 6 Juni 2007, untuk pembayaran biaya pengurusan perkara perdata, pidana & TUN (Perkara No. 182/PDT.G/2005/PN. JAKBAR) Triwulan II sejumlah Rp.1.029.345.571,00 (satu milyar dua puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah), ditandatangani oleh BAHIR ROMSAH selaku Pemegang Kas Cabang
 - c. 1 (satu) lembar asli Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 51/SPP/BHK/2007 tanggal 6 Juni 2007, ditandatangani oleh JORNAL E. SIAHAAN, SH, M.Si selaku Kepala Biro Hukum dan BAHIR ROMSAH selaku Pemegang Kas Cabang ;
 - d. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap No. 51/SPP/BHK/2007 tanggal 6 Juni 2007, ditandatangani oleh JORNAL E. SIAHAAN, SH, M.Si selaku Kepala Biro Hukum dan BAHIR ROMSAH selaku Pemegang Kas Cabang ;
 - e. 1 (satu) lembar asli Rincian Permohonan Biaya Perkara No. 182/PDT.G/2005/PN. JKT.Barat tanggal 6 Juni 2001, ditandatangani oleh JORNAL E. SIAHAAN, SH, M.Si selaku Kepala Biro Hukum dan BAHIR ROMSAH selaku Pemegang Kas Cabang ;
265. 1 (satu) lembar asli tindisan Dokumen SPM Giro No. 00267222006 TA. 2006 tertanggal 12 Desember 2006 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima juta rupiah) untuk pembayaran Biaya Bantuan Hukum / Advokasi Perkara Pidana Penebangan Pohon Beringin di HCB Jl. Hayam Wuruk sesuai dengan SPK Nomor 05/DPS/TH 2006 berikut lampiran pendukungnya ;
266. 1 (satu) lembar asli tindisan Dokumen SPM Giro No. 00307612006 TA. 2006 tertanggal 23 Desember 2006 sebesar Rp. 49.500.000,- (empat puluh sembilan juta lima ratus rupiah) untuk pembayaran Biaya Pengurusan Perkara Perdata, Pidana dan TUN berikut lampiran pendukungnya ;
267. 1 (satu) lembar asli tindisan Dokumen SPM Giro No. 00276742006 TA. 2006 tertanggal 15 Desember 2006 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk pembayaran Biaya Pengurusan Perkara Perdata, Pidana dan TUN (Penggunaan Jasa Profesional dalam

Hal. 302 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakili kepentingan Hukum Pemda DKI Jakarta dalam Perkara Nomor 275/, berikut lampiran pendukungnya ;

268. 1 (satu) lembar asli tindisan Dokumen SPM Giro No. 00060102007 TA. 2007 tertanggal 3 Juli 2007 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) untuk memberi Bantuan Hukum kepada semua unsur Pemda & masyarakat, Pengurus perkara Perdata, Pidana & TUN berkaitan dengan Perk Nomor : 130/G.TUN/2006/PTUN JKT, berikut lampiran pendukungnya
269. 1 (satu) lembar asli tindisan Dokumen SPM Giro No. 00060112007 TA. 2007 tertanggal 3 Juli 2007 sebesar Rp. 297.000.000,- (dua ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) untuk Biaya Lawyer Fee / Legal Fee untuk pengurusan perkara 406 PDT.8/2006/PN.JKT.PST.DITK. PN JAKPUS, PT. JKT & MA, SPK Nomor : 01/DPS/2007, berikut lampiran pendukungnya ;
270. 1 (satu) lembar asli tindisan Dokumen SPM Giro No. 00192732007 TA. 2007 tertanggal 21 Desember 2007 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) untuk Pengurusan perkara Perdata, Pidana & TUN dengan SPK Nomor : 019/PLH/LMPP/X/2007, berikut lampiran pendukungnya ;
271. 1 (satu) buah Buku Agenda Surat Verbal terdapat tulisan “ Catatan Penerimaan dan Pengeluaran Untuk Operasional Perkara, ATK, Transport Rapat, Konsumsi Rapat, Materi, Segling, Fek Surat, dsb mulai Januari Tahun 2006 “ ;
272. 1 (satu) buah Buku Agenda Surat Verbal terdapat tulisan “ Catatan Penerimaan dan Pengeluaran Untuk Operasional Perkara, ATK, Transport Rapat, Konsumsi/Snek Rapat, Materi, Segling, Fek Surat, dsb mulai Januari Tahun 2007 “ ;
273. 3 (tiga) bundel Kwitansi atas biaya pengurusan perkara, sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal ... Agustus 2006 sebesar Rp.82.400.000,- (delapan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) yang diterima oleh JORNAL E. SIAHAAN ;
 - b. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal ... Agustus 2006 sebesar Rp.29.450.000,- (dua puluh Sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh Dr. RITOLA TASMA, MPH ;

Hal. 303 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal ... Agustus 2006 sebesar Rp.23.550.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh H. MOERDIMAN,RM,SH,Msi ;
- d. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal ... Agustus 2006 sebesar Rp.72.140.000,- (tujuh puluh dua juta seratus empat puluh ribu rupiah) yang diterima oleh AGUSDIN SUSANTO ;
- e. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal ... Agustus 2006 sebesar Rp.58.850.000,- (lima puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh AGUSDIN SUSANTO ;
- f. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal ... Agustus 2006 sebesar Rp.35.300.000,- (tiga puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) yang diterima oleh SRI ASTUTI.R,SH ;
- g. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal ... Agustus 2006 sebesar Rp.35.300.000,- (tiga puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) yang diterima oleh MADE SUARJAYA ;
- h. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal ... Agustus 2006 sebesar Rp.35.300.000,- (tiga puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) yang diterima oleh MANSYUR MAHMUD,SH ;
- i. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal ... Agustus 2006 sebesar Rp.23.550.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh rupiah) yang diterima oleh RAHMAT,SH ;
- j. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal ... Agustus 2006 sebesar Rp.23.550.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh rupiah) yang diterima oleh MANGATUR.P,SH ;
- k. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal ... Agustus 2006 sebesar Rp.23.550.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh rupiah) yang diterima oleh ENDANG SRI RAHAYU ;
- l. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal ... Agustus 2006 sebesar Rp.23.550.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh rupiah) yang diterima oleh ISMIYATUN,SH ;
- m. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal ... Agustus 2006 sebesar Rp.23.550.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh rupiah) yang diterima oleh OR.ZAKARIAS,SH ;
- n. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal ... Agustus 2006 sebesar Rp.23.550.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh rupiah) yang diterima oleh ENDANG SUMARDI,SH ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal ... Agustus 2006 sebesar Rp.23.550.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh rupiah) yang diterima oleh BUDI HARTONO,SH ;
- p. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal ... Agustus 2006 sebesar Rp.23.550.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh rupiah) yang diterima oleh RADIAH,SH ;
- q. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal ... Agustus 2006 sebesar Rp.23.550.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh rupiah) yang diterima oleh KAROLIS SIMATUPANG,SH,MH ;
- r. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal ... Agustus 2006 sebesar Rp.23.550.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh rupiah) yang diterima oleh MUKHLIS,SH ;
- s. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal ... Agustus 2006 sebesar Rp.23.550.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh rupiah) yang diterima oleh ROMY PURNAMA,SH ;
- t. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal ... Agustus 2006 sebesar Rp.29.450.000,- (dua puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh BAHIR ROMSAH ;
- u. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal ... Agustus 2006 sebesar Rp.17.750.000,- (tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh H. RONY SASTRO ;
- v. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal ... Agustus 2006 sebesar Rp.11.800.000,- (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah) yang diterima oleh BERNADO YULIANTO ;
- w. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal ... Agustus 2006 sebesar Rp.11.800.000,- (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah) yang diterima oleh KIYO ;
- x. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal ... Agustus 2006 sebesar Rp.5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) yang diterima oleh NOERWENDA,SH ;
- y. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal ... Agustus 2006 sebesar Rp.5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) yang diterima oleh VIRGIN DWIGUNA ;
- z. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal ... Agustus 2006 sebesar Rp.5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) yang diterima oleh BENNY CAHYO ;

Hal. 305 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



- aa. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal ... Agustus 2006 sebesar Rp.5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) yang diterima oleh IWAN KURNIAWAN ;
- ab. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal ... Agustus 2006 sebesar Rp.5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) yang diterima oleh ANTON SYAMSUDIN ;
- ac. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal ... Agustus 2006 sebesar Rp.5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) yang diterima oleh HELEN SIAGIAN ;
- ad. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal ... Agustus 2006 sebesar Rp.5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) yang diterima oleh SUCI RAHAYU ;
- ae. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal ... Agustus 2006 sebesar Rp.5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) yang diterima oleh TRI JOKO RAHARDJO,SH ;
- af. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal ... Agustus 2006 sebesar Rp.5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) yang diterima oleh AGUS GUNAWAN,SH ;
- ag. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal ... Agustus 2006 sebesar Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang diterima oleh MARDHANI ;
- ah. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal ... Agustus 2006 sebesar Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang diterima oleh FEMMI ;
- ai. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal ... Agustus 2006 sebesar Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang diterima oleh DINA ROSALINA ;
- aj. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal ... Agustus 2006 sebesar Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang diterima oleh KADERIN ;
- ak. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal ... Agustus 2006 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diterima oleh HERY SUPARDAN,SH ;
- al. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal ... Agustus 2006 sebesar Rp.750.000- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh H. BUDIONO ;



- am. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal ... Agustus 2006 sebesar Rp.590.000,- (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang diterima oleh MULYANTO ;
- an. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal ... Agustus 2006 sebesar Rp.590.000,- (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang diterima oleh ABD KOHAR ;
- ao. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal ... Agustus 2006 sebesar Rp.590.000,- (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang diterima oleh SUDONO ;
- ap. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal ... Agustus 2006 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Hj. TITI KARTIKAWATI,SH ;
- aq. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal ... Agustus 2006 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Drs. NACHROWI ;
- ar. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal ... Agustus 2006 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh MUCHLIS ;
- as. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal ... Agustus 2006 sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang diterima oleh H. SUNARDI ;
- at. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal ... Agustus 2006 sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang diterima oleh GUNAWAN CAHYONO ;
- au. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal ... Agustus 2006 sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh BASRI ;
- av. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal ... Agustus 2006 sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang diterima oleh RAMLI ;
- aw. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 8 Juni 2007 sebesar Rp.70.040.000,- (tujuh puluh juta empat puluh ribu rupiah) yang diterima oleh JORNAL E. SIAHAAN ;
- ax. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 8 Juni 2007 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diterima oleh Dr. RITOLA TASMAYA,MPH ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ay. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 8 Juni 2007 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diterima oleh H. MOERDIMAN,RM,SH,Msi ;
- az. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 8 Juni 2007 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang diterima oleh AGUSDIN SUSANTO ;
- ba. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 8 Juni 2007 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang diterima oleh AGUSDIN SUSANTO ;
- bb. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 8 Juni 2007 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang diterima oleh AGUSDIN SUSANTO ;
- bc. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 8 Juni 2007 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang diterima oleh AGUSDIN SUSANTO ;
- be. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 8 Juni 2007 sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh SRI ASTUTI.R,SH ;
- bf. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 8 Juni 2007 sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh MANSYUR MAHMUD,SH ;
- bg. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 8 Juni 2007 sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh SAUT PURBA,SH ;
- bh. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 8 Juni 2007 sebesar Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh RAHMAT,SH ;
- bi. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 8 Juni 2007 sebesar Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh MANGATUR.P,SH ;
- bj. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 8 Juni 2007 sebesar Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh ENDANG SRI RAHAYU ;
- bk. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 8 Juni 2007 sebesar Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh ISMIYATUN,SH ;

Hal. 308 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bl. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 8 Juni 2007 sebesar Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh OR.ZAKARIAS,SH ;
- bm. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 8 Juni 2007 sebesar Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh ENDANG SUMARDI,SH ;
- bn. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 8 Juni 2007 sebesar Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh BUDI HARTONO,SH ;
- bo. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 8 Juni 2007 sebesar Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh RADIAH,SH ;
- bp. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 8 Juni 2007 sebesar Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh KAROLIS SIMATUPANG,SH,MH ;
- bq. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 8 Juni 2007 sebesar Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh MUKHLIS,SH ;
- br. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 8 Juni 2007 sebesar Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh ROMY PURNAMA,SH ;
- bs. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 8 Juni 2007 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang diterima oleh BAHIR ROMSAH ;
- bt. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 8 Juni 2007 sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh H. RONY SASTRO ;
- bu. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 8 Juni 2007 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diterima oleh BERNADO YULIANTO ;
- bv. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 8 Juni 2007 sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh KIYO ;
- bw. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 8 Juni 2007 sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang diterima oleh MELLISA,SH ;

Hal. 309 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



- bx. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 8 Juni 2007 sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang diterima oleh SOLAFIDE SIHITE,SH ;
- by. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 8 Juni 2007 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima oleh NOERWENDA,SH;
- bz. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 8 Juni 2007 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima oleh SRI RAHAYU,SH
- ca. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 8 Juni 2007 sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) yang diterima oleh IWAN KURNIAWAN ;
- cb. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 8 Juni 2007 sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) yang diterima oleh ANTON SYAMSUDIN ;
- cc. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 8 Juni 2007 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima oleh HELEN SIAGIAN
- cd. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 8 Juni 2007 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima oleh SUCI RAHAYU ;
- ce. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 8 Juni 2007 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima oleh TRI JOKO RAHARDJO,SH ;
- cf. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 8 Juni 2007 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima oleh AGUS GUNAWAN,SH ;
- cg. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 8 Juni 2007 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diterima oleh DINA ROSALINA
- ch. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 8 Juni 2007 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diterima oleh MULYANTO ;
- ci. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 8 Juni 2007 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diterima oleh DONO ;
- cj. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 8 Juni 2007 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diterima oleh SILAEN ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ck. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 8 Juni 2007 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diterima oleh MARDHANI
- cl. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 8 Juni 2007 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh AINI (staf Wagub) ;
- cm. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 8 Juni 2007 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh L. SETIAWAN (staf Wagub) ;
- cn. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 8 Juni 2007 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh H. CHOLIK (staf Wagub) ;
- co. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 8 Juni 2007 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diterima oleh SALIM (staf TU Wagub) ;
- cp. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 8 Juni 2007 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh ETTY HR (staf TU Wagub) ;
- cq. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 8 Juni 2007 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh SUSANTI (staf Aspraja) ;
- cr. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 8 Juni 2007 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh NURUL HIDAYAH (staf Aspraja) ;
- ct. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 8 Juni 2007 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh GATOT SUMARYONO (staf Aspraja) ;
- cu. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 8 Juni 2007 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh BUNAYAR (staf Aspraja) ;
- cv. 5 (lima) lembar asli Kwitansi tanggal 8 Juni 2007 untuk staf Biro Umum masing-masing sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- cw. 4 (empat) lembar asli Kwitansi tanggal 8 Juni 2007 untuk staf Sekda masing-masing sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Hal. 311 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- cx. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 25 September 2007 sebesar Rp.50.040.000,- (lima puluh juta empat puluh ribu rupiah) yang diterima oleh JORNAL E. SIAHAAN ;
- cy. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 25 September 2007 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diterima oleh Dr. RITOLA TASMAHA,MPH ;
- cz. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 25 September 2007 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diterima oleh H. MOERDIMAN,RM,SH,Msi ;
- da. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 25 September 2007 sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang diterima oleh AGUSDIN SUSANTO ;
- db. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 25 September 2007 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang diterima oleh AGUSDIN SUSANTO ;
- dc. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 25 September 2007 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang diterima oleh AGUSDIN SUSANTO ;
- dd. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 25 September 2007 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang diterima oleh AGUSDIN SUSANTO ;
- de. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 25 September 2007 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang diterima oleh SRI ASTUTI.R,SH ;
- df. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 25 September 2007 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang diterima oleh MADE SUARJAYA ;
- dg. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 25 September 2007 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang diterima oleh MANSYUR MAHMUD,SH ;
- dh. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 25 September 2007 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang diterima oleh SAUT PURBA,SH ;
- di. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 25 September 2007 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diterima oleh RAHMAT,SH ;

Hal. 312 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dj. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 25 September 2007 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diterima oleh MANGATUR.P,SH ;
- dk. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 25 September 2007 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diterima oleh ENDANG SRI RAHAYU ;
- dl. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 25 September 2007 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diterima oleh ISMIYATUN,SH ;
- dm. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 25 September 2007 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diterima oleh OR.ZAKARIAS ;
- dn. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 25 September 2007 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diterima oleh ENDANG SUMARDI,SH ;
- do. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 25 September 2007 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diterima oleh BUDI HARTONO,SH ;
- dp. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 25 September 2007 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diterima oleh RADIAH,SH ;
- dq. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 25 September 2007 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diterima oleh KAROLIS SIMATUPANG,SH,MH ;
- dr. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 25 September 2007 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diterima oleh MUKHLIS,SH ;
- ds. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 25 September 2007 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diterima oleh ROMY PURNAMA,SH ;
- dt. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 25 September 2007 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh BAHIR ROMSAH ;
- du. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 25 September 2007 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diterima oleh H. RONY SASTRO ;

Hal. 313 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



- dv. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 25 September 2007 sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh BERNADO YULIANTO ;
- dw. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 25 September 2007 sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh KIYO ;
- dx. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 25 September 2007 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang diterima oleh MELLISA,SH ;
- dy. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 25 September 2007 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang diterima oleh SOLAFIDE SIHITE,SH ;
- dz. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 25 September 2007 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima oleh NOERWENDA,SH;
- ea. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 25 September 2007 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima oleh VIRGIN DWIGUNA ;
- eb. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 25 September 2007 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima oleh SRI RAHAYU,SH
- ec. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 25 September 2007 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima oleh IWAN KURNIAWAN ;
- ed. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 25 September 2007 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima oleh ANTON SYAMSUDIN ;
- ee. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 25 September 2007 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima oleh HELENSIAGIAN
- ef. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 25 September 2007 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima oleh SUCI RAHAYU ;
- eg. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 25 September 2007 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima oleh TRI JOKO RAHARDJO,SH ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- eh. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 25 September 2007 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima oleh AGUS GUNAWAN,SH ;
- ei. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 25 September 2007 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diterima oleh DINA ROSALINA ;
- ej. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 25 September 2007 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sesuai yang diterima oleh MARDHANI ;
- ek. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 25 September 2007 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sesuai yang diterima oleh MULYANTO ;
- el. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 25 September 2007 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sesuai yang diterima oleh DONO ;
- em. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 25 September 2007 sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) sesuai yang diterima oleh SILAEN ;
274. 1 (satu) lembar asli tindisan Kwitansi Pemprov DKI Jakarta tanggal 25 Agustus 2006, sebesar Rp 976.000.000,00-, untuk pembayaran Biaya Pengurusan Perkara, Perdata, Pidana dan TUN (Perkara No. 2086 K/Pdt/2004 Jo No. 63/Pdt.G/2002/PN. Jakarta Selatan), diterima dari : Pemegang Kas Cabang Biro Hukum DKI Jakarta, dan yang menerima serta ditandatangani oleh JORNAL E. SIAHAAN ;
275. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pemprov DKI Jakarta tanggal 8 Juni 2007, sebesar Rp 1.029.345.571,00-, untuk pembayaran Biaya Pengurusan Perkara, Perdata, Pidana dan TUN (Perkara No. 182/PDT.G/2005/PN. JKT. Barat) triwulan II, diterima dari : Pemegang Kas Cabang Biro Hukum DKI Jakarta, dan yang menerima serta ditandatangani oleh JORNAL E. SIAHAAN ;
276. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pemprov DKI Jakarta tanggal 21 September 2007, sebesar Rp 1.120.654.429,00-, untuk pembayaran Biaya Pengurusan Perkara, Perdata, Pidana dan TUN (Perkara No. 476/Pdt.G/2005/PN. JKT. Barat), diterima dari : Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan yang menerima serta ditandatangani oleh JORNAL E. SIAHAAN ;

Hal. 315 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

277. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pemprov DKI Jakarta tanggal 17 Desember 2007, sebesar Rp 1.000.000.000,00-, untuk pembayaran Biaya Pengurusan Perkara, Perdata, Pidana dan TUN (Perkara No. 101/Pdt.G/2007/PN. Jakarta Pusat), diterima dari : Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum DKI Jakarta, dan yang menerima serta ditandatangani oleh JORNAL E. SIAHAAN ;
278. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen SPM Giro No. 00267222006 TA. 2006 tertanggal 12 Desember 2006 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima juta rupiah) untuk pembayaran Biaya Bantuan Hukum / Advokasi Perkara Pidana Penebangan Pohon Beringin di HCB Jl. Hayam Wuruk sesuai dengan SPK Nomor 05/DPS/TH 2006 berikut lampiran pendukungnya (antara lain kontrak kepada Kantor Hukum Adji, Nuryasin & Rekan) ;
279. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen SPM Giro No. 00307612006 TA. 2006 tertanggal 23 Desember 2006 sebesar Rp. 49.500.000,- (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Biaya Pengurusan Perkara Perdata, Pidana dan TUN berikut lampiran pendukungnya (antara lain kontrak kepada Kantor Otto Hasibuan) ;
280. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen SPM Giro No. 00276742006 TA. 2006 tertanggal 15 Desember 2006 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk pembayaran Biaya Pengurusan Perkara Perdata, Pidana dan TUN (Penggunaan Jasa Profesional dalam mewakili kepentingan Hukum Pemda DKI Jakarta Dalam Perkara No. 275) berikut lampiran pendukungnya (antara lain kontrak kepada Novian & Partners) ;
281. 1 (satu) lembar asli Dokumen SPM Giro No. 00083502006 TA. 2006 tertanggal 22 Juni 2006 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk pembayaran Biaya Lawyer Fee / Legal Fee atas perkara No. 149/G.T UN/2005/PTUN.JKT, sesuai Surat Kuasa Gub. DKI No. 245/-1.711.323 berikut lampiran pendukungnya (antara lain kontrak kepada Novian & Partners) ;
282. 1 (satu) lembar asli Dokumen SPM Giro No. 00083492006 TA. 2006 tertanggal 22 Juni 2006 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk pembayaran Biaya Lawyer Fee / Legal Fee atas perkara No. 049/G.T UN/2006/PN.JKT.PST, perjanjian kerjasama No.

Hal. 316 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0331/N P.072006 berikut lampiran pendukungnya (antara lain kontrak kepada Novian & Partners) ;

283. 1 (satu) lembar asli Dokumen SPM Giro No. 00164802006 TA. 2006 tertanggal 25 September 2006 sebesar Rp. 49.500.000,- (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Biaya Jasa Hukum tentang Pendapat Hukum Revitalisasi Ex Stadion Menteng Jakpus No. Kontrak 04/DPS/TAHUN 2006 berikut lampiran pendukungnya (antara lain kontrak kepada Kantor Hukum Yan Juanda Saputra & Partners) ;
284. 1 (satu) lembar asli Dokumen SPM Giro No. 00088232006 TA. 2006 tertanggal 28 Juni 2006 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran Biaya Penanganan Proses Kasasi Perkara Tanah Abang No. 123/PDT.G/2004PN.JKT.PST Jo. Nomor 121/SRT/PDT/BDC/2006, berikut lampiran pendukungnya (antara lain kontrak kepada Kantor Hukum ADJI, NURYASIN & Rekan) ;
285. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen SPM Giro No. 00329322006 TA. 2006 tertanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran Biaya Penanganan Perkara Pidana Metro Jaya sesuai No. 08/DPS TH. 2006 ;
286. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen SPM Giro No. 00311232006 TA. 2006 tertanggal 23 Desember 2006 sebesar Rp. 49.500.000,- (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Biaya Pengurusan Perkara Perdata, Pidana dan TUN (By Pendapat Hukum untuk permasalahan Penat. Tmn Eks STAD Menteng) ;
287. 1 (satu) bundel Dokumen dari Bank BNI perihal transaksi rekening an. JORNAL E. SIAHAAN, sebagai berikut :
- a. 1 (satu) lembar foto copy legalisir berupa KTP Nomor : 09.5304.011253.0007 an. JORNAL E. SIAHAAN, SH ;
 - b. 1 (satu) lembar asli RTGS tanggal 29 Maret 2006 dari Bank BCA dengan pengirim SRI ROHANI MEGAWATI sebesar Rp. 120.000.000 ;
 - c. 1 (satu) lembar foto copy legalisir bukti penarikan tertanggal 7 Agustus 2006, sebesar Rp. 98.000.000,- ;

Hal. 317 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) lembar asli RTGS tanggal 25 Oktober 2007, dari Bank BCA dengan pengirim ALBERT IBRAHIM sebesar Rp. 80.000.000,- ;
 - e. 1 (satu) lembar foto copy legalisir bukti setoran tanggal 5 Nopember 2007, sebesar Rp. 90.000.000,- ;
 - f. 1 (satu) lembar RTGS tanggal 15 Januari 2008 dari Bank BCA dengan pengirim ALBERT IBRAHIM sebesar Rp. 65.000.000,- sebagai pembayaran sewa ruko warnet 88 ;
 - g. 1 (satu) lembar asli RTGS tanggal 3 Maret 2008 dari Bank BCA dengan pengirim ALBERT IBRAHIM sebesar Rp. 102.000.000,- sebagai uang mobil Panther ;
 - h. 1 (satu) lembar asli RTGS tanggal 3 September 2008 dari Bank Permata dengan pengirim PT. Sarijaya Permana Sekuritas sebesar Rp. 136.120.000,- sebagai Withdraw Sarijaya ;
 - i. 1 (satu) lembar asli RTGS tanggal 3 September 2008 dari Bank BCA dengan pengirim ALBERT IBRAHIM sebesar Rp. 125.000.000,- sebagai uang sewa ruko 88 B Kelapa Dua ;
 - j. 1 (satu) lembar foto copy legalisir berupa bukti penarikan tanggal 5 Maret 2008 sebesar Rp. 65.000.000,- ;
288. 1 (satu) bundel Dokumen dari Bank BNI, perihal transaksi rekening JORNAL E. SIAHAAN sebagai berikut :
- a. 8 (delapan) lembar asli Rekening Koran No. 0101153226 an. JORNAL E. SIAHAAN, SH periode tanggal 26 April s/d 28 Februari 2009 ;
 - b. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen formulir setor tunai tabungan tanggal 26 April 2006 sebesar Rp. 2.500.000.000,- oleh JORNAL E. SIAHAAN ;
 - c. 1 (satu) lembar foto copy legalisir berupa formulir setor rekening tanggal 24 Juli 2006 sebesar Rp. 200.000.000,- oleh ISAAC PANGIHUTAN ;
 - d. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen formulir setor rekening tanggal 3 Januari 2007 sebesar Rp. 800.000.000,- oleh JORNAL E. SIAHAAN ;
 - e. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen formulir setor rekening tanggal 23 Januari 2007 sebesar Rp. 500.000.000,- oleh ELLEN SIAGIAN ;

Hal. 318 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen RTGS tanggal 9 April 2007 sebesar Rp. 65.000.000,- ;
- g. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen setor kliring tanggal 28 September 2007, Bank Mega sebesar Rp. 457.762.500,- oleh ELLEN ;
- h. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen RTGS tanggal 8 Oktober 2007 sebesar Rp. 100.000.000,- oleh PT. Sarijaya Permana Sekuritas Bank Permata ;
- i. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen RTGS tanggal 1 Nopember 2007 sebesar Rp. 105.000.000,- oleh PT. Sarijaya Permana Sekuritas ;
- j. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen RTGS tanggal 8 Nopember 2007 sebesar Rp. 105.000.000,- oleh PT. Sarijaya Permana Sekuritas ;
- k. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen RTGS tanggal 13 Nopember 2007 sebesar Rp. 406.300.000,- oleh FORMAN TAMBUNAN ;
- l. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen RTGS tanggal 30 Nopember 2007 sebesar Rp. 100.000.000,- oleh PT. Mahakarya Arta Sekuritas ;
- m. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen setoran tunai tabungan tanggal 1 Februari 2008 sebesar Rp. 1.150.000.000,- oleh JORNAL E. SIAHAAN ;
- n. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen formulir kirim uang tanggal 21 Juli 2008, pemindahbukuan masuk sebesar Rp. 150.000.000,- dari Rekening 19732864 oleh JORNAL E. SIAHAAN ;
- o. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen formulir setoran tunai tabungan tanggal 17 Desember 2008 sebesar Rp. 400.000.000,- oleh ELLEN ;
- p. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen formulir setoran tunai tabungan tanggal 8 Januari 2009 sebesar Rp. 410.000.000,- oleh ELLEN ;
- q. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen formulir setoran kliring tanggal 9 Februari 2009 sebesar Rp. 195.000.000,- oleh ELLEN ;

Hal. 319 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- r. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen Formulir Kiriman Uang pemindahbukuan tanggal 2 Juni 2006 sebesar Rp. 167.020.000,- kerekening 61143856 an. BINA HAR NAPITUPULU pada Bank BNI ;
- s. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen Formulir Kiriman Uang pemindahbukuan tanggal 2 Juni 2006, sebesar Rp. 220.500.000,- kerekening 103000492 an. MARINUS NAPITUPULU pada Bank BNI ;
- t. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen Formulir Kiriman Uang pemindahbukuan tanggal 2 Juni 2006, sebesar Rp. 69.700.000,- kerekening 14635651 an. VICTOR HAMONANGAN SIAHAAN pada Bank BNI ;
- u. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen Formulir Kiriman Uang pemindahbukuan tanggal 21 Juni 2006, sebesar Rp. 100.200.000,- kerekening 104069056 an. M. AZIS ERDIN pada Bank BNI ;
- v. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen Formulir penarikan tanggal 29 Agustus 2006, sebesar 197.451.000,- oleh JORNAL E. SIAHAAN ;
- w. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen formulir penarikan tanggal 20 September 2006, sebesar Rp. 60.001.000,- oleh JORNAL E. SIAHAAN ;
- x. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen Formulir Kiriman Uang RTGS keluar tanggal 31 Juli 2007 sebesar Rp. 500.000.000,- ke PT. Sarijaya Permana Sekuritas pada Bank BCA ;
- y. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen Formulir Kiriman Uang RTGS keluar tanggal 30 Agustus 2007, sebesar Rp. 600.000.000,- ke PT. Mahakarya Arta Sekuritas pada Bank BCA ;
- z. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen formulir penarikan tanggal 19 September 2007, sebesar Rp. 500.000.000,- oleh JORNAL E. SIAHAAN ;
- aa. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen formulir penarikan tanggal 18 Oktober 2007, sebesar Rp. 250.000.000,- oleh JORNAL E. SIAHAAN ;

Hal. 320 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ab. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen formulir penarikan tanggal 5 Nopember 2007, sebesar Rp. 190.000.000,- oleh JORNAL E. SIAHAAN ;
- ac. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen formulir penarikan tanggal 6 Nopember 2007, sebesar Rp. 499.801.000,- oleh JORNAL E. SIAHAAN ;
- ad. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen formulir penarikan tanggal 12 Nopember 2007, sebesar Rp. 94.501.000,- oleh JORNAL E. SIAHAAN ;
- ae. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen RTGS keluar tanggal 12 Maret 2008, sebesar Rp. 650.000.000,- ke PT. Sarijaya Permana Sekuritas pada Bank BCA ;
- af. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen formulir penarikan tanggal 18 Juli 2008, sebesar Rp. 500.000.000,- oleh JORNAL E. SIAHAAN ;
- ag. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen RTGS keluar tanggal 21 Juli 2008, sebesar Rp. 1.000.000.000,- ke PT. Sarijaya Permana Sekuritas pada Bank BCA ;
- ah. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen formulir penarikan tanggal 21 Juli 2008, sebesar Rp. 150.000.000,- oleh JORNAL E. SIAHAAN ;
- ai. 1 (satu) lembar foto copy legalisir dokumen formulir penarikan tanggal 24 Juli 2008, sebesar Rp. 81.000.000,- oleh JORNAL E. SIAHAAN ;
- aj. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen transfer kliring keluar tanggal 5 September 2008, sebesar Rp. 45.400.000,- ke PT. Bangun Cipta Karya Perkasa pada Bank Mandiri ;
- ak. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen RTGS keluar tanggal 16 Oktober 2008, sebesar Rp. 350.000.000,- ke PT. Sarijaya Permana Sekuritas pada Bank BCA ;
- al. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen pemindahbukuan tanggal 28 April 2009, sebesar Rp. 1.000.947.500,- ke PT. Berkah Sukses Sejahtera Bank BNI No. Rek. 2157142012 ;
- 289. 1 (satu) bundel Dokumen dari Bank Mandiri, sebagai berikut :
 - a. 2 (dua) lembar asli print out RTGS TERMINAL IFT607CP-002082 transaksi pada tanggal 2 Januari 2006 ;

Hal. 321 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 2 (dua) lembar asli Print out RTGS TERMINAL IFT607CP-002083 transaksi pada tanggal 26 Desember 2006 ;
- c. 1 (satu) lembar foto copy legalisir CEK MANDIRI Nomor : DM 221233 tertanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), berikut 1 (satu) lembar foto copy legalisir KTP Nomor : 09.5003.171263.0229 an. MURDIYANTO ;
- d. 1 (satu) lembar foto copy legalisir CEK MANDIRI Nomor : DM 221234 tertanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), berikut 1 (satu) lembar foto copy legalisir KTP Nomor : 09.5103.120970.0862 an. AGUS SUMARYONO ;
- e. 1 (satu) bundel Dokumen yang terdiri dari :
 - 1) 1 (satu) lembar foto copy legalisir CEK MANDIRI Nomor : CM 084846 tertanggal 13 Juli 2006 sebesar Rp. 465.000.000,- (empat ratus enam puluh lima juta rupiah), berikut 1 (satu) lembar foto copy legalisir KTP Nomor : an. HERU SURONO ;
 - 2) 1 (satu) lembar foto copy legalisir CEK MANDIRI Nomor : DM 221236 tertanggal 22 Januari 2007 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), berikut 1 (satu) lembar foto copy legalisir KTP Nomor : 09.5005.020174.0343 an. SUGIADI ;
 - 3) 1 (satu) lembar foto copy legalisir SLIP SETORAN MANDIRI tertanggal 13 Januari 2006, kepada PT. MEGAVISION UTAMA Nomor rekening : 120.0004377888 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ;
- f. 1 (satu) bundel Dokumen yang terdiri dari :
 - 1) 1 (satu) lembar foto copy legalisir SLIP SETORAN MANDIRI tertanggal 3 Januari 2007, kepada PT. RADITYA PUTRA BAHTERA Nomor rekening : 120.0001232698 dari MEGAVISION UTAMA sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) ;
 - 2) 1 (satu) lembar foto copy legalisir CEK MANDIRI Nomor : DA 115658 tertanggal 3 Januari 2007 sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) ;

Hal. 322 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) lembar foto copy legalisir KTP Nomor : 09.5103.120970.0862 an. AGUS SUMARYONO ;
- g. 1 (satu) bundel Dokumen yang terdiri dari :
- 1) 1 (satu) lembar foto copy legalisir CEK MANDIRI Nomor : DM 221237 tertanggal 3 Januari 2007 sebesar Rp. 559.500.000,-
(lima ratus lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah),
berikut 1 (satu) lembar foto copy legalisir KTP Nomor : 09.5103.120970.0862 an. AGUS SUMARYONO ;
- 2) 1 (satu) lembar foto copy legalisir CEK MANDIRI Nomor : DM 221240 tertanggal 28 Desember 2007 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), berikut 1 (satu) lembar foto copy legalisir KTP Nomor : 09.5003.171263.0229 an. MURDIYANTO ;
- 3) 1 (satu) lembar foto copy legalisir SLIP SETORAN MANDIRI tertanggal 3 Januari 2007, kepada PT. GLOBAL INFORMASI BERMUTU Nomor rekening : 123.0002098376 dari MEGAVISION sebesar Rp. 310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah) ;
- 4) 1 (satu) lembar foto copy legalisir SLIP SETORAN MANDIRI tertanggal 3 Januari 2007, kepada PT. LATIVI MEDIA KARYA Nomor rekening : 125.0002128437 dari MEGAVISION sebesar Rp. 113.000.000,- (seratus tiga belas juta rupiah) ;
- 5) 1 (satu) lembar foto copy legalisir SLIP SETORAN MANDIRI tertanggal 3 Januari 2007, kepada PT. GLOBAL INFORMASI BERMUTU Nomor rekening : 123.0002098376 dari MEGAVISION sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) ;
- 6) 1 (satu) lembar foto copy legalisir SLIP SETORAN MANDIRI tertanggal 3 Januari 2007, kepada PT. GLOBAL INFORMASI BERMUTU Nomor rekening : 123.0002098376 dari MEGAVISION sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- h. 1 (satu) lembar foto copy legalisir SLIP SETORAN MANDIRI tertanggal 3 Januari 2006, kepada PT. RADITYA PUTRA BAHTERA Nomor rekening : 120.0001232698 dari

Hal. 323 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEGAVISION UTAMA sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;

- i. 1 (satu) lembar foto copy legalisir CEK MANDIRI Nomor : DM 221235 tertanggal 3 Januari 2007 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), berikut 1 (satu) lembar foto copy legalisir SLIP SETORAN MANDIRI tertanggal 3 Januari 2006, kepada MUTHIA DATAU Nomor rekening : 101.0004336838 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ;
- j. 2 (dua) lembar asli Print out RTGS TERMINAL IFT607CP-002084 transaksi pada tanggal 19 Desember 2007. ;
- k. 1 (satu) lembar foto copy legalisir CEK MANDIRI Nomor : DM 221242 tertanggal 28 Desember 2007 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- l. 1 (satu) lembar foto copy legalisir CEK MANDIRI Nomor : DM 221239 tertanggal 28 Desember 2007 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), berikut 1 (satu) lembar foto copy legalisir KTP Nomor : 32.03.38.2002.261287.00790 an. ACHMAD DANI ;
- m. 1 (satu) lembar foto copy legalisir CEK MANDIRI Nomor : DM 221241 tertanggal 28 Desember 2007 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), berikut 1 (satu) lembar foto copy legalisir KTP an. NURHASAN ;
- n. 4 (empat) lembar foto copy legalisir dokumen APLIKASI PEMBUKAAN REKENING PERUSAHAAN PT. RADITYA PUTRA BAHTERA tertanggal 30 Oktober 2001 ;
- o. 1 (satu) lembar foto copy legalisir dokumen APLIKASI PEMBUKAAN REKENING PRODUK DANA PERORANGAN tertanggal 11 April 2008, berikut 1 (satu) lembar foto copy legalisir KTP Nomor : 09.5304.011253.0007 an. JORNAL E. SIAHAAN, SH ;

Barang bukti No.1 s/d No.289 Terlampir dalam berkas perkara ;

290. Uang sebesar 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
291. Uang sebesar 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) ;
292. Uang sebesar 18.668.000,- (delapan belas juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah) ;
293. Uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

Hal. 324 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

294. Uang sebesar Rp. 22.330.000,- (dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) ;
295. Uang sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) ;
296. Uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
297. Uang sebesar Rp. 15.015.000,- (lima belas juta lima belas ribu rupiah);
298. a. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tertanggal 1 Juni 2010 yang ditanda tangani oleh MADE SUARJAYA ;
- b. Uang sebesar Rp. 95.005.000,- (sembilan puluh lima juta lima ribu rupiah) ;
299. a. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tanpa tanggal yang ditanda tangani oleh MOERDIMAN, RM, SH, Msi ;
- b. Uang sebesar Rp. 60.017.500,- (enam puluh juta tujuh belas ribu lima ratus rupiah) ;
300. Uang sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) ;
- Barang bukti No.290 s/d No.300 berupa uang sebesar Rp.427.569.000,- (empat ratus dua puluh tujuh juta blima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), dinyatakan dirampas untuk Negara ;
7. Membebankan kepada Terdakwa JORNAL EFFENDI SIAHAAN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta No. 01/PID/TPK/2010/ PT.DKI. tanggal 10 Februari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
- Menerima permintaan banding dari Terdakwa/Tim Penasihat Hukum, serta Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut ;
 - Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 19/Pid.B/TPK/2010/PN.JKT.PST tanggal 22 Nopember 2010, yang dimintakan banding mengenai kualifikasi dan penjatuhan pidana, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut ;
1. Menyatakan Terdakwa JORNAL EFFENDI SIAHAAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan beberapa tindak pidana korupsi secara bersama-sama;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JORNAL EFFENDI SIAHAAN dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan menjatuhkan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair selama 2 (dua) bulan kurungan;

Hal. 325 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Terdakwa JORNAL EFFENDI SIAHAAN untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. Rp. 4.630.009.375,--(empat milyar enam ratus tiga puluh juta sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa JORNAL EFFENDI SIAHAAN tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1(satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan dapat dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama1 (satu.) tahun ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel Dokumen terkait pengangkatan Jurnal E Siahaan sebagai Kepala Biro Hukum Setdaprov. DKI Jakarta, antara lain :
 - a. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Dokumen Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor : 1035/2006 tanggal 5 Juli 2006 tentang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas nama Drs. ISMET SADELI HASAN,MSi, berikut 1 (satu) lembar lampirannya ;
 - b. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 925/-082.72 tertanggal 6 Juli 2006 yang ditanda tangani oleh H. RITOLA TASMAYA ;
 - c. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Berita Acara Sumpah Jabatan ;
 - d. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Naskah Serah Terima Jabatan;
 2. Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor : 553/2008 tanggal 22 April 2008 ;
 3. 1 (satu) buah asli Buku Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 71 Tahun 2001 – Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 70 Tahun 2002, tanggal 22 Mei 2002 perihal Organisasi dan Tata

Hal. 326 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;

4. 1 (satu) buah asli Buku Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 108 Tahun 2003 perihal Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
5. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Buku I Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta TA.2006 ;
6. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Buku VII Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta TA.2006 ;
7. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Buku I Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta TA.2006 ;
8. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Buku VII Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta TA.2006 ;
9. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Buku VII Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta TA.2006 ;
10. 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor : 0027567/2006 tanggal 27-11-2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006, ditandatangani oleh HARI SANDJOJO, MJ selaku PLH. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, terdapat Cap Salinan/Photo Copy Sesuai aslinya diperiksa dan ditandatangani oleh Drs. WAHYUDIN, MM selaku Kasubbag Umum BPKD Propinsi DKI Jakarta ;
11. 7 (tujuh) lembar salinan asli Dokumen Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2006 tanggal 13 Maret 2006 perihal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2006 ;
12. 4 (empat) lembar salinan asli Dokumen Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 24 Tahun 2006 tanggal 13 Maret 2006 perihal Penjabaran Anggaran

Hal. 327 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2006 ;

13. 7 (tujuh)I lembar salinan asli Dokumen Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 2006 tanggal 15 November 2006 perihal Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2006 ;
14. 4 (empat) lembar salinan asli Dokumen Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 113 Tahun 2006 tanggal 15 November 2006 perihal Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2006 ;
15. 2 (dua) lembar asli Dokumen Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 288/2006, tanggal 3 Maret 2006 perihal Pendelegasian sebagian Kewenangan Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dalam Rangka Pelaksanaan dan Pengelolaan Anggaran Biro Hukum Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2006, berikut 3 (tiga) lembar asli lampirannya ;
16. 3 (tiga) lembar salinan asli Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 21 / 2006 perihal Penetapan Pemegang Kas Cabang di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Atasan Langsungnya Tahun Anggaran 2006, berikut 4 (empat) lembar lampirannya ;
17. 3 (tiga) lembar asli / FC legalisir Keputusan Kepala Biro Hukum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 01/2006 perihal Penunjukan Pembantu Pemegang Kas Cabang Biro Hukum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2006, berikut 1 lembar lampirannya ;
18. 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Keputusan Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 03 Tahun 2006 perihal Pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2006 ;

Hal. 328 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Keputusan Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 05 Tahun 2006 perihal Pembentukan Panitia Pemeriksaan Barang / Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2006 ;
20. 1 (satu) bundel Dokumen terkait penerbitan Patokan Harga Satuan Filler, antara lain :
 - a. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 333/-077.2 tertanggal 1 Juni 2006, perihal Permohonan Harga Satuan yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta Up. Kepala Biro Perlengkapan Provinsi DKI Jakarta dari Kepala Biro Hukum Provinsi DKI Jakarta an. H. R. DEDED SUKANDAR, SH, MH;
 - b. 1 (satu) lembar usulan PHS Barang Non Standar (Insidentil) yang Belum Tercantum dalam Buku Patokan Harga Satuan, tertanggal 1 Juni 2006, yang ditanda tangani Kepala Biro Hukum Provinsi DKI Jakarta an. H. R. DEDED SUKANDAR, SH, MH ;
 - c. 9 (sembilan) lembar Dokumen Penawaran Harga dari Fortune Indonesia ;
 - d. 4 (empat) lembar Dokumen Penawaran Harga dari Pelita Alembana ;
 - e. 4 (empat lembar Dokumen Penawaran Harga dari Dwi Cipta Design ;
 - f. 2 (dua) lembar Dokumen Keputusan Kepala Biro Perlengkapan Provinsi DKI Jakarta Nomor : 3359/073.532 tertanggal 16 Agustus 2006 tentang Penetapan Patokan Harga Satuan Barang Insidental Kebutuhan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang ditandatangani oleh Kepala Biro Perlengkapan Prov. DKI Jakarta an. Ir. EKO BHARUNO, MT ;
 - g. 4 (empat) lembar dokumen lampiran Keputusan Kepala Biro Perlengkapan Prov. DKI Jakarta Nomor : 3359/073.532 tertanggal 16 Agustus 2006 tentang Penetapan Patokan Harga Satuan Barang Insidental Kebutuhan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang ditandatangani oleh Kepala Biro Perlengkapan Prov. DKI Jakarta an. Ir. EKO BHARUNO, MT ;

Hal. 329 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 2 (dua) lembar Berita Acara Penelitian dan Evaluasi Usulan Patokan Harga Satuan Insidental No. 154/BAHS/BP/VII /2006 tertanggal 5 Juli 2006 ;
- i. 5 (lima) lembar Dokumen lampiran Berita Acara Hasil Survey dan Pembahasan Nomor 154 ;
- 21. 1 (satu) bundel asli Dokumen Perjanjian Pelelangan Umum Pengadaan Jasa Filler Kebutuhan Biro Hukum Sekda Prov. DKI Jakarta antara Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan PT. ANUGRAH CIPTA PRATAMA PRIMA Nomor 746/077.5, yang berisi antara lain :
 - a. 5 (lima) lembar asli Dokumen Perjanjian Pelelangan Umum Pengadaan Jasa Filler Kebutuhan Biro Hukum Sekda Prov. DKI Jakarta antara Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan PT. Anugrah Cipta Pratama Prima Nomor 746/077.5, tanggal 17 November 2006, yang ditandatangani oleh Pihak Pertama an. JORNAL E. SIAHAAN, SH. M.Si selaku Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Pihak Kedua an. ASEP YUDI PRIBADI selaku Direktur Utama PT. Anugrah Cipta Pratama Prima ;
 - b. 5 (lima) lembar asli Dokumen Perjanjian Pelelangan Umum Pengadaan Jasa Filler Kebutuhan Biro Hukum Sekda Prov. DKI Jakarta antara Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan PT. Anugrah Cipta Pratama Prima Nomor 746/077.5, tanggal 17 November 2006, yang ditandatangani oleh Pihak Pertama an. JORNAL E. SIAHAAN, SH. M.Si selaku Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Pihak Kedua an. ASEP YUDI PRIBADI selaku Direktur Utama PT. Anugrah Cipta Pratama Prima ;
 - c. 1 (satu) lembar asli Dokumen Lampiran Spesifikasi Penayangan Materi Filler Hukum Nomor : 746/077.5, tanggal 17 November 2006, Volume 268 kali Tayang @ 30 detik, yang ditandatangani oleh an. JORNAL E. SIAHAAN, SH. M.Si selaku Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan an. ASEP YUDI PRIBADI selaku Direktur Utama PT. Anugrah Cipta Pratama Prima ;

Hal. 330 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 3 (tiga) lembar asli Dokumen Keputusan Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 744/077.92, tanggal 17 November 2006 tentang Penunjukan PT. Anugrah Cipta Pratama Prima sebagai Perusahaan Penyedia Barang/Jasa Filler Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov. DKI Jakarta, yang ditandatangani oleh an. JORNAL E. SIAHAAN, SH. M.Si selaku Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
- e. 1 (satu) lembar asli Dokumen Jaminan Pelaksanaan ASIA INSURANCE Reg P 041032 Nomor Bond : 72.01.06.000419, Nilai Bond : Rp. 49.520.625,- (empat puluh sembilan juta lima ratus dua puluh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) tertanggal 17 November 2006 ;
- f. 3 (tiga) lembar asli Dokumen Keputusan Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 719/A/077.92, tanggal 9 November 2006 tentang Penetapan Penyedia Barang/Jasa Pelaksana Pelelangan Umum Pengadaan Jasa Filler Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov. DKI Jakarta, yang ditandatangani oleh an. JORNAL E. SIAHAAN, SH. M.Si selaku Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
- g. 1 (satu) lembar asli Dokumen Pengumuman Pemenang Pelelangan Umum Pengadaan Jasa Filler Hukum Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov. DKI Jakarta Nomor : 31/PPBJ/Peng/L/Filler/XI/2006, tanggal 9 November 2006 yang ditandatangani oleh an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;
- h. 1 (satu) lembar asli Dokumen Nomor : 711/A/077.92, tanggal 9 November 2006 perihal Penetapan Pemenang Lelang Umum Pengadaan Jasa Filler Hukum Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov. DKI Jakarta, yang ditujukan kepada Panitia Pengadaan Barang / Jasa Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta, yang ditandatangani oleh an. JORNAL E. SIAHAAN, SH. M.Si selaku Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Hal. 331 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 4 (empat) lembar asli Dokumen Nomor : 26/PPBJ/Lap/Filler/XI/2006, tanggal 6 November 2006 perihal Laporan Lelang Umum Pengadaan Jasa Filler Hukum Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov. DKI Jakarta, yang ditujukan kepada Kepala Biro Hukum Setdaprov. DKI Jakarta, yang ditandatangani oleh an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;
- j. 3 (tiga) lembar asli Dokumen Berita Acara Penetapan Calon Pemenang Lelang dan Cadangan Calon Pemenang Pengadaan Jasa Filler Hukum Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov. DKI Jakarta Nomor : 25/PPBJ/BA/Filler/XI/2006 tanggal 6 November 2006, yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua, ISMIYATUN, SH selaku Sekretaris, IWAN SATYOPRODJO, SH, MM, Endang SUMARDI, SH dan OR. ZAKARIAS, SH selaku anggota ;
- k. 4 (empat) lembar asli Dokumen Berita Acara Hasil Pelelangan Umum Pengadaan Jasa Filler Hukum Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov. DKI Jakarta Nomor : 24/PPBJ/BA/FILLER/XI/2006 tanggal 6 November 2006, yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua, ISMIYATUN, SH selaku Sekretaris, IWAN SATYOPRODJO, SH, MM, Endang SUMARDI, SH dan OR. ZAKARIAS, SH selaku anggota ;
- l. 3 (tiga) lembar asli Dokumen Berita Acara Penilaian dan Pembuktian Kualifikasi Dokumen Penawaran Pelelangan Umum Dalam Rangka Pengadaan Jasa Filler Hukum Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov. DKI Jakarta Nomor : 23/PPBJ/BA/FILLER/XI/2006 tanggal 3 November 2006, yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua, ISMIYATUN, SH selaku Sekretaris, IWAN SATYOPRODJO, SH, MM, Endang SUMARDI, SH dan OR. ZAKARIAS, SH selaku Anggota ;

Hal. 332 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Hadir pada hari/tanggal :
Jum'at, 3 November 2006, pukul 10.00 WIB, Tempat : Ruang
Rapat Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Blok G lantai 9 Jl. Merdeka Selatan 8-9 Jakarta Pusat, Acara
Penilaian dan Pembuktian Kualifikasi Dokumen Penawaran
Pelelangan Umum Dalam Rangka Pengadaan Jasa Filler
Hukum Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov. DKI Jakarta, yang
terdapat tanda tangan nomor urut 1 (satu) an. MADE
SUARJAYA, SH sampai dengan nomor urut 8 (delapan) an.
INDRA APRIAL (CV. Honga Jaya), yang ditandatangani oleh
an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan
Barang / Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI
Jakarta ;
- n. 1 (satu) lembar asli Dokumen Nomor : 22/PPBJ/UND/Filler/
XI/2006, tanggal 2 November 2006 perihal Undangan, yang
ditujukan kepada Direktur/pimpinan PT. ANUGRAH CIPTA
PRATAMA PRIMA Jln. Adam Ujung No. 7A, RT.08/10 Kel.
Sukabumi Utara, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat, yang
ditandatangani oleh an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua
Panitia Pengadaan Barang / Jasa Biro Hukum Sekretariat
Daerah Provinsi DKI Jakarta ;
- o. 1 (satu) lembar asli Dokumen Nomor : 22/PPBJ/UND/Filler/
XI/2006, tanggal 2 November 2006 perihal Undangan, yang
ditujukan kepada Direktur/Pimpinan CV. SALSABILA Jln. Kp.
Baru No. 101, RT. 03/10 Kel. Kembangan Utara Jakarta
Barat, yang ditandatangani oleh an. MADE SUARJAYA, SH
selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Biro Hukum
Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;
- p. 1 (satu) lembar asli Dokumen Nomor : 22/PPBJ/UND/Filler/
XI/2006, tanggal 2 November 2006 perihal Undangan, yang
ditujukan kepada Direktur/Pimpinan CV. BUANA PERMAI Jln.
Warung Silah No. 20 Ciganjur Jakarta Selatan, yang
ditandatangani oleh an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua
Panitia Pengadaan Barang / Jasa Biro Hukum Sekretariat
Daerah Provinsi DKI Jakarta ;
- q. 1 (satu) lembar asli Dokumen Nomor : 21/PPBJ/UND/Filler/
XI/2006, tanggal 2 November 2006 perihal Undangan, yang

Hal. 333 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditujukan kepada Ismiyatun, SH, Iwan Satyoprodjo, SH, MH, Endang Sumardi, SH dan OR. Zakarias, SH, yang ditandatangani oleh an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;
- r. 3 (tiga) lembar asli Dokumen Berita Acara Evaluasi Dokumen Kualifikasi Surat Penawaran Harga (SPH) Pelelangan Umum Dalam Rangka Pengadaan Jasa Filler Hukum Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov. DKI Jakarta Nomor : 20/PPBJ/BA/Filler/XI/ 2006, tanggal 2 November 2006, yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua, ISMIYATUN, SH selaku Sekretaris, IWAN SATYOPRODJO, SH, MM, Endang SUMARDI, SH dan OR. ZAKARIAS, SH selaku Anggota ;
- s. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Hadir pada Hari/Tanggal : Kamis, 2 November 2006, pukul : 09.00 WIB, Tempat : Ruang Rapat Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Blok G lantai 9 Jln. Merdeka Selatan 8 – 9 Jakarta Pusat, Acara : Pemberitahuan Hasil Evaluasi Administrasi, Teknis dan Harga Dokumen Penawaran Harga (SPH) Pelelangan Umum Pengadaan jasa Filler Hukum dan Pengambilan Asli Jaminan Penawaran (agar membawa identitas resmi dari Direktur/Pimpinan Perusahaan atau sesuai Surat Kuasa Pendaftaran), terdapat tanda tangan nomor urut 1 (satu) an. MADE SUARJAYA, SH sampai dengan nomor urut 9 (sembilan) an. CV. POLY LESTARI, yang ditandatangani oleh an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;
- t. 1 (satu) lembar asli Dokumen Nomor : 19/PPBJ/UND/Filler/XI/ 2006, tanggal 1 November 2006 perihal Undangan, yang ditujukan kepada Direktur/Pimpinan CV. MANDIRI JAYA ABADI, yang ditandatangani oleh an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;

Hal. 334 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



- u. 1 (satu) lembar asli dokumen Nomor : 19/PPBJ/UND/Filler/XI/2006, tanggal 1 November 2006 perihal Undangan, yang ditujukan kepada Direktur/Pimpinan CV. SINAR AZKA, yang ditandatangani oleh an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;
- v. 1 (satu) lembar asli Dokumen Nomor : 19/PPBJ/UND/Filler/XI/2006, tanggal 1 November 2006 perihal Undangan, yang ditujukan kepada Direktur/Pimpinan CV. HONGGA JAYA, yang ditandatangani oleh an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;
- w. 1 (satu) lembar asli Dokumen Nomor : 19/PPBJ/UND/Filler/XI/2006, tanggal 1 November 2006 perihal Undangan, yang ditujukan kepada Direktur/Pimpinan CV. POLY LESTARI, yang ditandatangani oleh an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;
- x. 1 (satu) lembar asli Dokumen Nomor : 18/PPBJ/UND/Filler/XI/2006, tanggal 1 November 2006 perihal Undangan, yang ditujukan kepada Ismiyatun, SH, Iwan Satyoprodjo, SH, MH, Endang Sumardi, SH dan OR. Zakarias, SH, yang ditandatangani oleh an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;
- y. 3 (tiga) lembar asli Dokumen Berita Acara Evaluasi Teknis dan Harga Dokumen Penawaran Pelelangan Umum Dalam Rangka Pengadaan Jasa Filler Hukum Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov. DKI Jakarta Nomor : 17/PPBJ/BA/Filler/XI/2006, tanggal 1 November 2006, yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua, ISMIYATUN, SH selaku Sekretaris, IWAN SATYOPRODJO, SH, MM, Endang SUMARDI, SH dan OR. ZAKARIAS, SH selaku Anggota ;
- z. 2 (dua) lembar asli Dokumen Lampiran : Berita Acara Evaluasi Teknis dan Harga, Nomor : 17/PPBJ/BA/Filler/XI/2006, tanggal 1 November 2006, yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua, ISMIYATUN, SH selaku Sekretaris, IWAN SATYOPRODJO, SH, MM, Endang SUMARDI, SH dan OR. ZAKARIAS, SH selaku Anggota ;

Hal. 335 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006, Tanggal 1 November 2006 terhadap PT. ANUGRAH CIPTA PRATAMA PRIMA, yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua, ISMIYATUN, SH selaku Sekretaris, IWAN SATYOPRODJO, SH, MM, Endang SUMARDI, SH dan OR. ZAKARIAS, SH selaku Anggota ;

aa.2 (dua) lembar asli Dokumen Lampiran : Berita Acara Evaluasi Teknis dan Harga, Nomor : 17/PPBJ/BA/Filler/X/2006, Tanggal 1 November 2006 terhadap CV. BUANA PERMAI, yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua, ISMIYATUN, SH selaku Sekretaris, IWAN SATYOPRODJO, SH, MM, Endang SUMARDI, SH dan OR. ZAKARIAS, SH selaku Anggota ;

ab.2 (dua) lembar asli Dokumen Lampiran : Berita Acara Evaluasi Teknis dan Harga, Nomor : 17/PPBJ/BA/Filler/X/2006, Tanggal 1 November 2006 terhadap CV. SALSABILA, yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua, ISMIYATUN, SH selaku Sekretaris, IWAN SATYOPRODJO, SH, MM, Endang SUMARDI, SH dan OR. ZAKARIAS, SH selaku Anggota ;

ac.2 (dua) lembar asli Dokumen Lampiran : Berita Acara Evaluasi Teknis dan Harga, Nomor : 17/PPBJ/BA/Filler/X/2006, Tanggal 1 November 2006 terhadap CV. POLY LESTARI, yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua, ISMIYATUN, SH selaku Sekretaris, IWAN SATYOPRODJO, SH, MM, Endang SUMARDI, SH dan OR. ZAKARIAS, SH selaku Anggota ;

ad.2 (dua) lembar asli Dokumen Lampiran : Berita Acara Evaluasi Teknis dan Harga, Nomor : 17/PPBJ/BA/Filler/X/2006, Tanggal 1 November 2006 terhadap CV. HONGGA JAYA, yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan

Hal. 336 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang/Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua, ISMIYATUN, SH selaku Sekretaris, IWAN SATYOPRODJO, SH, MM, Endang SUMARDI, SH dan OR. ZAKARIAS, SH selaku Anggota ;

ae.2 (dua) lembar asli Dokumen Lampiran : Berita Acara Evaluasi Teknis dan Harga, Nomor : 17/PPBJ/BA/Filler/X/2006, Tanggal 1 November 2006 terhadap CV. SINAR AZKA, yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua, ISMIYATUN, SH selaku Sekretaris, IWAN SATYOPRODJO, SH, MM, Endang SUMARDI, SH dan OR. ZAKARIAS, SH selaku Anggota ;

af. 2 (dua) lembar asli Dokumen Lampiran : Berita Acara Evaluasi Teknis dan Harga, Nomor : 17/PPBJ/BA/Filler/X/2006, Tanggal 1 November 2006 terhadap CV. MANDIRA JAYA ABADI, yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua, ISMIYATUN, SH selaku Sekretaris, IWAN SATYOPRODJO, SH, MM, Endang SUMARDI, SH dan OR. ZAKARIAS, SH selaku Anggota ;

ag.2 (dua) lembar asli Dokumen Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran (SPH) Sampul II Pelelangan Umum Dalam Rangka Pengadaan Jasa Filler Hukum Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov. DKI Jakarta Nomor : 16/PPBJ/BA/Filler/XI/2006, tanggal 1 November 2006, yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua, ISMIYATUN, SH selaku Sekretaris, IWAN SATYOPRODJO, SH, MM, Endang SUMARDI, SH dan OR. ZAKARIAS, SH selaku Anggota ;

ah.1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Hadir pada Hari/Tanggal : Rabu, 1 November 2006, pukul : 14.00 WIB, Tempat : Ruang Rapat Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Blok G lantai 9 Jln. Merdeka Selatan 8 – 9 Jakarta Pusat, Acara : Pembukaan Surat Penawaran Harga (SPH)

Hal. 337 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampul II Pelelangan Umum Pengadaan jasa Filler Hukum Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov. DKI Jakarta, terdapat tanda tangan nomor urut 1 (satu) an. MADE SUARJAYA, SH sampai dengan nomor urut 11 (sebelas) an. SUMARDI CV. POLY LESTARI, yang ditandatangani oleh an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;

ai. 1 (satu) lembar asli Dokumen Nomor : 15/PPBJ/UND/Filler/X/2006, tanggal 31 Oktober 2006 perihal Undangan, yang ditujukan kepada Direktur/Pimpinan PT. ANUGRAH CIPTA PRATAMA PRIMA Jl. Adam Ujung No. 7A RT. 08/10, Sukabumi Utara Kebon Jeruk Jakarta Barat, yang ditandatangani oleh an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;

aj. 1 (satu) lembar asli Dokumen Nomor : 15/PPBJ/UND/Filler/X/2006, tanggal 31 Oktober 2006 perihal Undangan, yang ditujukan kepada Direktur/Pimpinan CV. SINAR AZKA Jl. Rahayu No. 1 Jelambar Grogol Petamburan Jakarta Barat, yang ditandatangani oleh an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;

ak. 1 (satu) lembar asli Dokumen Nomor : 15/PPBJ/UND/Filler/X/2006, tanggal 31 Oktober 2006 perihal Undangan, yang ditujukan kepada Direktur/Pimpinan CV. MANDIRA JAYA ABADI Jl. Kp. Gaga Semanan Blok H Merdeka No. 85 Jakarta Barat, yang ditandatangani oleh an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;

al. 1 (satu) lembar asli Dokumen Nomor : 15/PPBJ/UND/Filler/X/2006, tanggal 31 Oktober 2006 perihal Undangan, yang ditujukan kepada Direktur/Pimpinan CV. POLY LESTARI Jl. Kp. Baru No. 1 RT. 09/10 Kembangan Utara Jakarta Barat, yang ditandatangani oleh an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;

Hal. 338 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

am. 1 (satu) lembar asli Dokumen Nomor : 15/PPBJ/UND/ Filler/X/2006, tanggal 31 Oktober 2006 perihal Undangan, yang ditujukan kepada Direktur/Pimpinan CV. BUANA PERMAI Jl. Warung Silah No. 20 Ciganjur Jakarta Selatan, yang ditandatangani oleh an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;

an.1 (satu) lembar asli Dokumen Nomor : 15/PPBJ/UND/Filler/X/ 2006, tanggal 31 Oktober 2006 perihal Undangan, yang ditujukan kepada Direktur/Pimpinan CV. SALSABILA Jln. Kp. Baru No. 101 Jakarta Barat, yang ditandatangani oleh an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;

ao.1 (satu) lembar asli Dokumen Nomor : 15/PPBJ/UND/Filler/X/ 2006, tanggal 31 Oktober 2006 perihal Undangan, yang ditujukan kepada Direktur/Pimpinan CV. HONGGA JAYA Jl. Gaga No. 42 Semanan Kalideres Jakarta Barat, yang ditandatangani oleh an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;

ap.1 (satu) lembar asli Dokumen Nomor : 14/PPBJ/UND/Filler/X/ 2006, tanggal 31 Oktober 2006 perihal Undangan, yang ditujukan kepada ISMIYATUH, SH, IWAN SATYOPRODJO, SH, MH, ENDANG SUMARDI, SH dan OR. ZAKARIAS, SH, yang ditandatangani oleh an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;

aq.3 (tiga) lembar asli Dokumen Berita Acara Evaluasi Administrasi Dokumen Penawaran Pelelangan Umum Dalam Rangka Pengadaan Jasa Filler Hukum Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov. DKI Jakarta Nomor : 12/PPBJ/BA/Filler/X/ 2006, tanggal 31 Oktober 2006, yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua, ISMIYATUN, SH selaku Sekretaris, IWAN

Hal. 339 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SATYOPRODJO, SH, MM, Endang SUMARDI, SH dan OR.

ZAKARIAS, SH selaku Anggota ;

ar. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Hadir pada Hari/Tanggal

: Selasa, 31 Oktober 2006, pukul : 09.00 WIB, Tempat : Biro

Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Blok G lantai

9 Jln. Merdeka Selatan 8 – 9 Jakarta Pusat, Acara : Evaluasi

Dokumen Penawaran Pelelangan Umum Pengadaan jasa

Filler Hukum Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov. DKI Jakarta,

terdapat tanda tangan nomor urut 1 (satu) an. MADE

SUARJAYA, SH sampai dengan nomor urut 5 (lima) an. OR.

ZAKARIAS, SH, yang ditandatangani oleh an. MADE

SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang /

Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;

as. 1 (satu) lembar asli Dokumen Nomor : 11/PPBJ/UND/Filler/X/

2006, tanggal 30 Oktober 2006 perihal Undangan, yang

ditujukan kepada ISMIYATUN, SH, IWAN SATYOPRODJO,

SH, MH, ENDANG SUMARDI, SH dan OR. ZAKARIAS, SH,

yang ditandatangani oleh an. MADE SUARJAYA, SH selaku

Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Biro Hukum

Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;

at. 1 (satu) lembar asli Dokumen Surat Penawaran Harga Nomor

: 30/ACP/DKI/X/2006 tanggal 30 Oktober 2006, yang

ditujukan kepada Ketua Pengadaan Barang/Jasa Biro Hukum

Setdaprov. DKI Jakarta, perihal Penawaran Pelelangan

Pengadaan Filler Hukum, yang ditandatangani oleh Penawar

an. ASEP YUDI PRIADI selaku Direktur Utama PT.

ANUGRAH CIPTA PRATAMA PRIMA, berikut 2 (dua) lembar

penawaran harga yang ditandatangani an. ASEP YUDI

PRIADI selaku Direktur Utama PT. ANUGRAH CIPTA

PRATAMA PRIMA ;

au.2 (dua) lembar asli Dokumen penawaran harga Anugrah

Cipta production, yang ditandatangani oleh ASEP YUDI

PRIADI selaku Direktur Utama ;

av.1 (satu) lembar asli dokumen Nomor : 047/PH-S/X/2006,

tertanggal 30 Oktober 2006 perihal Penawaran Harga, yang

ditujukan kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa Biro

Hukum DKI Jakarta, yang ditandatangani oleh an.

Hal. 340 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IZUDDINUR, S.AG selaku Direktur CV. SALSABILA, berikut 1 (satu) lembar asli Dokumen Rincian Penawaran Harga, yang ditandatangani oleh an. IZUDDINUR, S.AG selaku Direktur CV. SALSABILA ;

aw. 1 (satu) lembar asli Dokumen Jaminan Penawaran Bank BNI A-042352 Nomor : 2006/DKB/GB/048/2459/JUM'AT tanggal 27 Oktober 2006, yang ditandatangani oleh HENNI WIDAYATI, Dra, MM selaku Pemimpin PT. Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Dukuh Bawah ;

ax.1 (satu) lembar asli Dokumen Nomor : 022/PH/BP/X/06, tertanggal 30 Oktober 2006 perihal Penawaran Harga, yang ditujukan kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa Biro Hukum DKI Jakarta, yang ditandatangani oleh an. JAINUDDIN HARAHAH selaku Direktur CV. BUANA PERMAI, berikut 1 (satu) lembar asli dokumen Rincian Penawaran Harga, yang ditandatangani oleh an. JAINUDDIN HARAHAH selaku Direktur CV. BUANA PERMAI ;

ay.1 (satu) lembar asli Dokumen Jaminan Penawaran Bank BNI A-0194364 Nomor : 2006/MTG/GB/024/2387/Jum'at tanggal 27 Oktober 2006, yang ditandatangani oleh Drs. TONNY SYARIF GANTANA, MM selaku Pemimpin PT. Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Menteng ;

az.2 (dua) lembar asli Dokumen Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran (SPH) Sampul I Pelelangan Umum Dalam Rangka Pengadaan Jasa Filler Hukum Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov. DKI Jakarta Nomor : 10/PPBJ/BA/Filler/X/2006, tanggal 30 Oktober 2006, yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua, ISMIYATUN, SH selaku Sekretaris, IWAN SATYOPRODJO, SH, MM, Endang SUMARDI, SH dan OR. ZAKARIAS, SH selaku anggota dan terdapat tanda tangan ANUGRAH CIPTA PRATAMA PRIMA, BUANA PERMAI, HONGGA JAYA, SINAR AZKA, SALSABILA, POLY LESTARI dan MANDIRI JAYA ABADI ;

Hal. 341 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



- ba.1 (satu) lembar asli Dokumen Dua Sampul (Administrasi & SPH) CV. MANDIRI JAYA ABADI Nomor : 10/PPBJ/BA/Filler/X/2006, tertanggal 30 Oktober 2006 ;
- bb.1 (satu) lembar asli dokumen Dua Sampul (Administrasi & SPH) CV. POLY LESTARI Nomor : 10/PPBJ/BA/Filler/X/2006, tertanggal 30 Oktober 2006 ;
- bc.1 (satu) lembar asli Dokumen Dua Sampul (Administrasi & SPH) CV. BUANA PERMAI Nomor : 10/PPBJ/BA/Filler/X/2006, tertanggal 30 Oktober 2006 ;
- bd.1 (satu) lembar asli Dokumen Dua Sampul (Administrasi & SPH) CV. SALSABILA Nomor : 10/PPBJ/BA/Filler/X/2006, tertanggal 30 Oktober 2006 ;
- be.1 (satu) lembar asli Dokumen Dua Sampul (Administrasi & SPH) CV. HONGGA JAYA Nomor : 10/PPBJ/BA/Filler/X/2006, tertanggal 30 Oktober 2006 ;
- bf. 1 (satu) lembar asli Dokumen Dua Sampul (Administrasi & SPH) CV. SINAR AZKA Nomor : 10/PPBJ/BA/Filler/X/2006, tertanggal 30 Oktober 2006 ;
- bg.1 (satu) lembar asli Dokumen Dua Sampul (Administrasi & SPH) PT. ANUGRAH CIPTA PRATAMA PRIMA Nomor : 10/PPBJ/BA/ Filler/X/2006, tertanggal 30 Oktober 2006 ;
- bh.1 (satu) lembar asli Dokumen Nomor : 09/PPBJ/UND/Filler/X/2006 tanggal 20 Oktober 2006 perihal Undangan yang ditujukan kepada ISMIYATUN, SH, IWAN SATYOPRODJO, SH, MH, ENDANG SUMARDI, SH dan OR. ZAKARIAS, SH, yang ditandatangani oleh an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
- bi. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Hadir pada Hari/Tanggal : Senin, 30 Oktober 2006, pukul : 15.15 WIB, Tempat : Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Blok G lantai 9 Jln. Merdeka Selatan 8 – 9 Jakarta Pusat, Acara : Pembukaan Dokumen Penawaran Sampul I Pelelangan Umum Pengadaan Jasa Filler Hukum Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov. DKI Jakarta, terdapat tanda tangan nomor urut 1 (satu) an. MADE SUARJAYA, SH sampai dengan nomor urut 12 (dua belas) an. DENY M – CV. BUANA PERMAI, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;

bj. 2 (dua) lembar asli Dokumen Nomor : 08/PPBJ/UND/Filler/X/2006 tanggal 20 Oktober 2006 perihal Undangan yang ditujukan kepada Direktur/Pimpinan PT., yang ditandatangani oleh an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;

bk. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Hadir pada Hari/Tanggal : Jum'at dan Senin, 20 dan 30 Oktober 2006, pukul : 08.00 s/d 15.00 WIB, Tempat : Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Blok G lantai 9 Jln. Merdeka Selatan 8 – 9 Jakarta Pusat, Acara : Pemasukan Dokumen Penawaran Pelelangan Umum Pengadaan Filler Hukum Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov. DKI Jakarta, terdapat tanda tangan nomor urut 1 (satu) an. MADE SUARJAYA, SH sampai dengan nomor urut 12 (dua belas) an. DENY M, yang ditandatangani oleh an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;

bl. 1 (satu) lembar asli Dokumen Nomor : 07/PPBJ/UND/Filler/X/2006 tanggal 19 Oktober 2006 perihal Undangan yang ditujukan kepada Direktur/Pimpinan PT. Sebagaimana Terlampir, yang ditandatangani oleh an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;

bm. 2 (dua) lembar Berita Acara Penjelasan Rencana Kerja dan Syarat-syarat Pelelangan Umum dalam rangka pengadaan Filler Hukum kebutuhan Biro hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta, Nomor 06/PPBJ/BA/Filler/X/2006, tanggal 19 Oktober 2006;

bn. 1 (satu) lembar asli Dokumen Nomor : 05/PPBJ/UND/Filler/X/2006 tanggal 12 Oktober 2006 perihal Undangan yang ditujukan kepada Direktur/Pimpinan PT., yang ditandatangani oleh an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua

Hal. 343 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia Pengadaan Barang/Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;

bo.1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Hadir pada Hari/Tanggal : Kamis, 19 Oktober 2006, pukul : 10.00 WIB, Tempat : Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Blok G lantai 9 Jln. Merdeka Selatan 8 – 9 Jakarta Pusat, Acara : Penjelasan (Aanwijzing) rencana kerja dan syarat-syarat Pelelangan Umum Pengadaan Filler Hukum Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov. DKI Jakarta, terdapat tanda tangan nomor urut 1 (satu) an. MADE SUARJAYA, SH sampai dengan nomor urut 12 (dua belas) an. M. ALI, yang ditandatangani oleh an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;

bp.1 (satu) lembar asli Dokumen Nomor : 04/PPBJ/UND/Filler/X/2006 tanggal 12 Oktober 2006 perihal Undangan yang ditujukan kepada ISMIYATUN, SH, IWAN SATYOPRODJO, SH, MH, ENDANG SUMARDI, SH dan OR. ZAKARIAS, SH, yang ditandatangani oleh an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta;

bq.1 (satu) lembar asli Dokumen Harga Perkiraan Sendiri / OE, tertanggal 30 Oktober 2006 yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Barang / Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta dan mengetahui JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta ;

br. 2 (dua) lembar Dokumen Television Schedule – Client Pemda DKI – Product Kampanye Dilarang Merokok & Busway – period Nov 2006 ;

bs.79 (tujuh puluh sembilan) lembar Data Administrasi dan Teknis Filler Hukum Sosialisasi Busway dan Kawasan Dilarang Merokok ;

bt. 41 (empat puluh satu) lembar Dokumen penawaran CV Salsabila – Alat tulis kantor, Meubelair, Mekanikal, Komputer, Percetakan – Jl. Kp. Baru No. 101 Jakarta Barat Telp. (021) 5817018 HP. 081511425020 ;

Hal. 344 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bu.46 (empat puluh enam) lembar Dokumen penawaran CV.
Buana Permai ;

bv.12 (dua belas) lembar asli Dokumen Rencana Kerja dan
Syarat-syarat Pelelangan Umum Dengan Pascakualifikasi
Nomor : 02/PPBJ/RKS/Filler/IX/2006 tanggal 18 September
2006, yang ditandatangani oleh MADE SUARJAYA, SH
selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan
Menyetujui JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala
Biro Hukum DKI Jakarta, berikut 2 (dua) lembar Lampirannya;

bw. 1 (satu) lembar asli Dokumen Notulen Rapat Hari/Tanggal
Kamis, 7 September 2006, Waktu 10.00 WIB, Tempat Biro
Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Blok G lantai
9 Jl. Merdeka Selatan 8 – 9 Jakarta Pusat, Acara Persiapan
pelelangan Umum Pengadaan Filler Hukum kebutuhan Biro
Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta, yang
ditandatangani oleh MADE SUARJAYA, Sh selaku Ketua
Panitia ;

bx.1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Hadir Hari/Tanggal
Kamis, 7 September 2006, Waktu 10.00 WIB, Tempat Biro
Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Blok G lantai
9 Jl. Merdeka Selatan 8 – 9 Jakarta Pusat, Acara Persiapan
pelelangan Umum Pengadaan Filler Hukum kebutuhan Biro
Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta, terdapat
tanda tangan pesertra nomor urut 1 (satu) an. MADE
SUARJAYA, SH sampai dengan nomor urut 5 (lima) OR.
ZAKARIAS, ,SH, yang ditandatangani oleh MADE
SUARJAYA, Sh selaku Ketua Panitia ;

by.1 (satu) lembar asli Dokumen Nomor : 01/PPBJ/UND/Filler/
IX/2006 tanggal 6 September 2006 perihal Undangan yang
ditujukan kepada ISMIYATUN, SH, IWAN SATYOPRODJO,
SH, MH, ENDANG SUMARDI, SH dan OR. ZAKARIAS, SH,
yang ditandatangani oleh an. MADE SUARJAYA, SH selaku
Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Biro Hukum
Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;

bz.1 (satu) lembar asli Dokumen Nomor : 386 / 072, tertanggal
26 juni 2006 perihal Permintaan Pelelangan Penayangan
Materi Filler Hukum, ditujukan kepada Ketua Panitia

Hal. 345 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Barang dan jasa Biro hukum Provinsi DKI Jakarta yang ditandatangani oleh H. R. DEDED SUKANDAR, SH, MH selaku Kepala Biro Hukum Provinsi DKI Jakarta, berikut 1 (satu) lembar lampirannya ;

22. 1 (satu) bundel Dokumen pembayaran Pengadaan Jasa Filler Kebutuhan Biro Hukum Sekda Prov. DKI Jakarta antara Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan PT. ANUGRAH CIPTA PRATAMA PRIMA Nomor 746/077.5, yang berisi antara lain :

- a. 1 (satu) lembar asli tindisan Dokumen SPM Giro No. 00325772006 TA. 2006 tertanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp. 804.352.500,- (delapan ratus empat juta tiga ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran biaya pengadaan jasa filler hukum kebutuhan Biro Hukum Sekdaprov DKI Jakarta, Kontrak No. 746/077.5, tertanggal 17 November 2006 ;
- b. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Nomor : 039/ACP/INV/XII/2006 tertanggal 16 Desember 2006, sebesar Rp. 990.412.500,- (sembilan ratus sembilan puluh juta empat ratus dua belas ribu lima ratus rupiah), yang ditandatangani an. MA'MUN selaku Direktur PT. ANUGRAH CIPTA PRATAMA PRIMA, an. BAHIR ROMSAH selaku Pemegang Kas Cabang dan terdapat stempel dan tanda tangan an. JORNAL E. SIAHAAN selaku Kepala Biro Hukum DKI Jakarta ;
- c. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 2600/SPP/SWD/BB/XII/2006 tertanggal 19 Desember 2006, yang ditanda tangani an. H. BUDIYONO selaku Pemegang Kas Setdaprov DKI Jakarta dan an. HARI SANDJOJO, MJ selaku Asisten Keuangan ;
- d. 1 (satu) lembar asli Dokumen Surat Permintaan Pembayaran No. 2600/SPP/SWD/BB/XII/2006 tertanggal 19 Desember 2009, yang ditanda tangani an. H. BUDIYONO selaku Pemegang Kas Setdaprov DKI Jakarta dan an. HARI SANDJOJO, MJ selaku Asisten Keuangan ;
- e. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Rincian Rencana Penggunaan Beban Tetap No. 187/SPP/2006 tanggal 19 Desember 2006, ditandatangani an. BAHIR ROMSAH selaku

Hal. 346 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang Kas Cabang dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH,
Msi selaku Kepala Biro Hukum ;

- f. 1 (satu) lembar asli Dokumen Invoice PT. ANUGRAH CIPTA PRATAMA PRIMA No. 039/ACP/INV?XII/2006 tertanggal Desember 2006, ditujukan kepada Pemerintah Prov. DKI Jakarta, ditandatangani diatas materai 6.000 (enam ribu rupiah) an. MA'MUN selaku PT. ANUGRAH CIPTA PRATAMA PRIMA ;
- g. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Barang (BAPB) Nomor : 40/BAPB/BH/XII/2006 tertanggal 14 Desember 2006, ditanda tangani oleh Panitia Pemeriksa Barang nomor urut 1 (satu) Ketua sampai dengan 5 (lima) anggota, an.ASEP YUDI PRIADI selaku Direktur Utama PT. ANUGRAH CIPTA PRATAMA PRIMA dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang;
- h. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 37/BAST/BH/XII/2006 tanggal 14 Desember 2006, yang ditanda tangani an. IRUSWANDI, SH selaku Pengurus Barang unit Biro Hukum, an. ASEP YUDI PRIADI selaku Direktur Utama PT. ANUGRAH CIPTA PRATAMA PRIMA dan mengetahui an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Serah Terima Barang ;
- 23. 1 (satu) bundel Dokumen yang terdiri dari :
 - a. 2 (dua) lembar asli Dokumen Kesepakatan Bersama (Memorandum of Understanding) antara PT. Anugerah Cipta Pratama dengan PT. Fortune Indonesia, Tbk, tertanggal 25 Agustus 2006, ditandatangani oleh ASEP YUDI PRIADI selaku Direktur Utama PT. Anugerah Cipta Pratama dan ARIS BOEDIHARJO selaku Vice President Director PT. Fortune Indonesia serta terdapat Materai 6000 ;
 - b. 1 (satu) lembar asli Dokumen Kesepakatan antara PT. Fortune Indonesia,Tbk dengan PT. Anugerah Cipta Pratama, tertanggal 28 Februari 2007, ditandatangani oleh YULIANA

Hal. 347 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- LEONARDA selaku Pihak Pertama dan ASEP YUDI PRIADI selaku Pihak Kedua serta terdapat Materai 6000 ;
- c. 1 (satu) lembar asli tindisan Formulir Setoran Bank Mandiri cabang Warung Buncit tertanggal 22 Februari 2007, nama pemilik rekening PT. Fortune Indonesia dengan Nomor rekening 127-0091009884 sejumlah Rp 250.000.000,00 ;
 - d. 1 (satu) lembar asli tindisan Formulir Setoran Bank Mandiri cabang Fatmawati tertanggal 11 Januari 2007, nama pemilik rekening PT. Fortune Indonesia dengan Nomor rekening 127-0091009884 sejumlah Rp 120.545.454,00 ;
 - e. 1 (satu) lembar asli Dokumen RTGS Terminal PT. Bank Ekonomi Raharja tanggal 02 Januari 2007, nomor IFT607CP-000415, Total Amount (IDR) : 846.317.500,00 dari Bank DKI Cabang Balaikota ;
 - f. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran PT. Bank Ekonomi Raharja Cabang Pembantu Cibubur, pemilik rekening PT. Anugrah Cipta Pratama Prima, Jenis Rekening Giro Perusahaan, Nomor Rekening 2191866561, periode 01 Nopember 2006 – 30 Nopember 2006 ;
 - g. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran PT. Bank Ekonomi Raharja Cabang Pembantu Cibubur, pemilik rekening PT. Anugrah Cipta Pratama Prima, Jenis Rekening Giro Perusahaan, Nomor Rekening 2191866561, periode 29 Desember 2006 – 31 Januari 2007 ;
 - h. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran PT. Bank Ekonomi Raharja Cabang Pembantu Cibubur, pemilik rekening PT. Anugrah Cipta Pratama Prima, Jenis Rekening Giro Perusahaan, Nomor Rekening 2191866561, periode 01 Februari 2007 – 28 Februari 2007 ;
24. 3 (tiga) lembar asli Dokumen Rincian Biaya Produksi Pengadaan Jasa Filler Hukum Tahun 2006 ;
25. 1 (satu) bundel Dokumen yang terkait penayangan Filler Hukum di Global TV, antara lain :
- a. 1 (satu) lembar foto copy legalisir SURAT PESANAN No : (tanpa nomor) NPWP : 02.361.294.8-027.000 tertanggal 6 Desember 2006, yang ditanda tangani dan berstempel PT. MEGAVISON UTAMA ;

Hal. 348 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 3 (tiga) lembar asli tindisan FINAL TIME LOG PROOF GLOBAL TV atas Order No : 01/PEMDA DKI BIRO HUKUM/1206 tertanggal 7 Desember 2006 ;
 - c. 4 (empat) lembar asli INVOICE Nomor : 0612000208 tertanggal 1 January 2007 atas Order No : 01/PEMDA DKI BIRO HUKUM/12 ;
 - d. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Rekening Koran PT. GLOBAL INFORMASI BERMUTU Nomor : 123-00-0209837-6, periode 1 s/d 31 January 2007 ;
 - e. 1 (satu) keping DVD-R kapasitas 120 min VIDEO / 4,7 GB DATA merk MAXELL serial number QGH804305854H09, terdapat tulisan "Hello Jakarta – 06 Desember '06" ;
 - f. 1 (satu) keping DVD-R kapasitas 120 min VIDEO / 4,7 GB DATA merk MAXELL serial number QGH804301412H10, terdapat tulisan "Pesta Film Remaja – 08 Desember '06" ;
26. 1 (satu) bundel Dokumen yang terkait penayangan Filler Hukum di Indosiar, antara lain :
- a. 1 (satu) lembar asli tindisan Dokumen POST TRANSMISSION LOG PT. Indosiar Visual Mandiri atas Order Nomor : 13370.001/FORU/BDM/1106 tertanggal 29 November 2006 oleh PT. FORTUNE INDONESIA, Tbk ;
 - b. 1 (satu) lembar asli tindisan INVOICE PT. Indosiar Visual Mandiri Nomor 024906 tertanggal 30 November 2006, kepada PT. FORTUNE INDONESIA, Tbk ;
 - c. 1 (satu) lembar asli tindisan Dokumen FAKTUR PAJAK STANDAR kode dan Nomor seri : DKRPV-091-0023461 tertanggal 1 Desember 2006, atas Invoice Nomor 024906 ;
 - d. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Rekening Koran PT. Indosiar Visual Mandiri Nomor : 0353061663 periode 28 Februari 2007 s/d 31 Maret 2007 ;
 - e. 1 (satu) lembar asli tindisan Dokumen POST TRANSMISSION LOG PT. Indosiar Visual Mandiri atas Order Nomor : 13370.002/FORU/BDM/1206 tertanggal 29 November 2006 oleh PT. FORTUNE INDONESIA, Tbk ;
 - f. 1 (satu) lembar asli tindisan INVOICE PT. Indosiar Visual Mandiri Nomor 024984 tertanggal 11 Desember 2006, kepada PT. FORTUNE INDONESIA, Tbk ;

Hal. 349 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) lembar asli tindisan Dokumen FAKTUR PAJAK STANDAR kode dan Nomor seri : DKRPV-091-0023539 tertanggal 11 Desember 2006, atas Invoice Nomor 024984 ;
- h. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Rekening Koran PT. Indosiar Visual Mandiri Nomor : 0353061663 periode 28 Februari 2007 s/d 31 Maret 2007 ;
- i. 1 (satu) lembar asli tindisan Dokumen POST TRANSMISSION LOG PT. Indosiar Visual Mandiri atas Order Nomor : 13370.002/ FORU/BDM/1206 tertanggal 29 November 2006 oleh PT. FORTUNE INDONESIA, Tbk ;
- j. 1 (satu) lembar asli tindisan INVOICE PT. Indosiar Visual Mandiri Nomor 024984 tertanggal 11 Desember 2006, kepada PT. FORTUNE INDONESIA, Tbk ;
- k. 1 (satu) lembar asli tindisan Dokumen FAKTUR PAJAK STANDAR kode dan Nomor seri : DKRPV-091-0023539 tertanggal 11 Desember 2006, atas Invoice Nomor 024984 ;
- l. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Rekening Koran PT. Indosiar Visual Mandiri Nomor : 0353061663 periode 28 Februari 2007 s/d 31 Maret 2007 ;
- 27. 1 (satu) bundel Dokumen yang terkait penayangan Filler Hukum di TPI, antara lain :
 - a. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen MEDIA ORDER Nomor : 031/TBP-PO/1206 dari Agency JUANG BANGUN PERSADA, Product PSA Biro Hukum, Periode 15 \$& 16 Desember 2006, Budget Netto Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), Prepared By RINA LILIANOVA, Approval By NURLELA SARI ;
 - b. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen SPECIAL PACKAGE Nomor : 4530/SPC.PKT – JUANG BANGUN PERSADA/MKS CTPI/XII/06, Special for “PSA BIRO HUKUM” periode : 15 Dec – 16 Dec 2006 ;
 - c. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen CLEARENCE REPORT register nomor : 2006120000678, tertanggal 15 Desember 2006 ;
 - d. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Dokumen LOG PROVE register nomor : 2006120000678, Agency PT. JUANG

Hal. 350 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BANGUN PERSADA, Brand PSA Biro Hukum, Order Number 031/JBP-PO/1206, Approved by ANGLING HARI PRIYADI ;
- e. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Formulir Setoran Bank Mandiri kepada PT.CIPTA TPI Nomor rekening 129.0001071519 tertanggal 15 Desember 2006 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
 - f. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Formulir Setoran Bank Mandiri kepada PT.CIPTA TPI Nomor rekening 129.0001071519 tertanggal 15 Desember 2006 sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus rupiah) ;
28. 1 (satu) bundel Dokumen yang terkait penayangan Filler Hukum di Lativi (saat ini menjadi TVOne), antara lain :
- a. 1 (satu) lembar foto copy legalisir dokumen FULL BLOCKING TIME LATIVI Nomor : (tanpa nomor)/MKT-GROUP2/X/2006 tertanggal 28 November 2006, atas klien PT.TRIAS MULYA ABADI PERKASA ;
 - b. 1 (satu) lembar foto copy legalisir dokumen MEDIA PLAN SINETRON KEHUTANAN "MEWUJUDKAN IMPIAN" bulan Desember 2006, agen : TRIAS MULYA ABADI PERKASA, yang ditanda tangani an. RUDI SANJAYA ;
 - c. 1 (satu) lembar foto copy legalisir dokumen INVOICE Nomor : 012.00400184 – 06 tertanggal 3 January 2007 ;
 - d. 5 (lima) lembar foto copy dokumen LOG PROVE – Based on Data 02/01/2007 16:13:37 atas PO : PO/214/SLS-PLAN/1206 tertanggal 2 January 2007 ;
 - e. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Bukti Penerimaan Kas / BANK PT.LATIVI MEDIA KARYA tertanggal 8 Desember 2006 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
 - f. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Rekening Koran PT.LATIVI MEDIA KARYA Nomor : 125-00-0212843-7 periode 1 s/d 31 Desember 2006 ;
 - g. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Bukti Penerimaan Kas / BANK PT.LATIVI MEDIA KARYA tertanggal 3 Januari 2007 sebesar Rp.113.000.000,- (seratus tiga belas juta rupiah) ;
 - h. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Bukti Penerimaan Kas / BANK PT.LATIVI MEDIA KARYA tertanggal 3 Januari 2007 sebesar Rp.113.000.000,- (seratus tiga belas juta rupiah) ;

Hal. 351 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen Full Blocking Time Lativi Nomor : (tanpa nomor) / GROUP II/XI/2006 tertanggal 30 November 2006, atas klien PT.TRIAS MULYA ABADI PERKASA ;
- j. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen MEDIA PLAN "HALO JAKARTA" tanggal 2,3,9,10 Desember 2006, agen : TRIAS MULYA ABADI PERKASA, yang ditanda tangani an. RUDI SANJAYA ;
- k. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen FULL BLOCKING TIME LATIVI Nomor : 001/18 - WA/XI/2006 tertanggal 1 November 2006, atas klien PT.TRIAS MULYA ABADI PERKASA ;
- l. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen INVOICE Nomor : 012.00400185 – 06 tertanggal 3 January 2007 ;
- m. 3 (tiga) lembar foto copy Dokumen LOG PROVE – Based on Data 02/01/2007 16:13:37 atas PO : PO/23910/SLS-PLAN/1206 tertanggal 2 January 2007 ;
- n. 1 (satu) lembar foto copy legalisir BUKTI PENERIMAAN KAS / BANK PT.LATIVI MEDIA KARYA tertanggal 1 Desember 2006 sebesar Rp.187.500.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- o. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Cheque Bank IndoMonex Nomor : MCKP 321600 tertanggal 30 November 2006 ;
- p. 1 (satu) lembar foto copy legalisir PERMOHONAN PENGIRIMAN UANG Bank IndoMonex Nomor : 228377 tertanggal 1 Desember 2006 sebesar Rp. 187.500.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- q. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen PT.MEGAVISION UTAMA tertanggal 11 Desember 2006, yang ditujukan kepada Bapak INDRA MADEWA selaku Sales Manager LATIVI, yang ditanda tangani an. Drs. RAJ INDRA SINGH selaku Direktur Utama PT.MEGAVISION UTAMA ;
- r. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen MEDIA PLAN PENAYANGAN PSA DIPENDA & BIRO HUKUM DKI JAKARTA judul BPHTP, Kebersihan dan Ketertiban, tertanggal 12 Desember 2006, yang ditanda tangani an. Drs.

Hal. 352 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAJ INDRA SINGH selaku Direktur Utama PT. MEGAVISON UTAMA ;

- s. 1 (satu) lembar foto copy legalisir TRAFFIC ORDER Nomor : 15097 atas PO Nomor : PO/12136/SLS-PLAN/1206 ;
- t. 1 (satu) lembar foto copy legalisir LOG PROVE – Based on data of 01/01/2007 16:13:37 atas PO Nomor : PO/12136/SLS-PLAN/1206, periode : 12/12/2006 – 31/12/2006 ;
- u. 1 (satu) lembar foto copy legalisir PURCHASE ORDER PENAYANGAN PSA BIRO HUKUM DKI JAKARTA, judul Kebersihan dan Ketertiban tertanggal 15 Desember 2006, yang ditanda tangani an. Drs. RAJ INDRA SINGH selaku Direktur Utama PT.MEGAVISON UTAMA ;
- v. 1 (satu) lembar foto copy legalisir TRAFFIC ORDER Nomor : 15143 atas PO Nomor : REF : PO/12136/SLS-PLAN/1206 & PO/23910/SLS-PLAN/1206 ;
- w. 1 (satu) lembar foto copy legalisir LOG PROVE – Based on data of 02/01/2007 16:13:37 atas PO Nomor : PO/12136/SLS-PLAN/ 1206 dan PO/23910/SLS-PLAN/12, periode : 15/12/2006 – 19/12/2006 ;
- x. 1 (satu) lembar foto copy legalisir MEDIA PLAN tertanggal 9, 10 Desember 2006, klien : TRIAS MULYA ABADI PERKASA, produk : DISPENDA JAKARTA ;
- y. 1 (satu) lembar foto copy legalisir TRAFFIC ORDER Nomor : 15096 atas PO Nomor : PO/12126/SLS-PLAN/1206 ;
- z. 1 (satu) lembar foto copy legalisir MEDIA ORDER – LATIVI atas PO Nomor : (tanpa nomor)/SLS-Plan/XI-06 ;
- aa.1 (satu) lembar foto copy legalisir INVOICE Nomor : 012.00400076-06 tertanggal 3 Januari 2007 ;
- ab.2 (dua) lembar foto copy legalisir LOG PROVE – Based on data of 02/01/2007 16:13:37 atas PO Nomor : PO/12126/SLS-PLAN/1206, periode : 12/12/2006 – 31/12/2006 tertanggal 2 Januari 2007 ;
- ac.1 (satu) lembar foto copy legalisir BUKTI PENERIMAAN KAS / BANK PT.LATIVI MEDIA KARYA tertanggal 14 Desember 2006 sebesar Rp.61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah) ;

Hal. 353 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ad.1 (satu) lembar foto copy legalisir SLIP SETORAN BANK MANDIRI tertanggal 14 Desember 2006 kepada PT.LATIVI MEDIA KARYA dari penyeter MEGAVISION sebesar Rp.61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah) ;

29. 1 (satu) bundel asli Dokumen Perjanjian Pelelangan Umum Pengadaan Jasa Filler Kebutuhan Biro Hukum Sekda Prov. DKI Jakarta antara Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan PT.RADITYA PUTRA BAHTERA Nomor. 783/077.92, yang berisi antara lain :

a. 9 (sembilan) lembar asli Dokumen Perjanjian Pelelangan Umum Pengadaan Jasa Filler Hukum Kebutuhan Biro Hukum Sekda Prov. DKI Jakarta antara Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan PT. Raditya Putra Bahtera Nomor. 783/077.92, tanggal 06 Desember 2006, yang ditandatangani oleh Pihak Pertama an. JORNAL E. SIAHAAN, SH. M.Si selaku Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Pihak Kedua an. GUNTUR INDRAYANA selaku Direktur Utama PT. Raditya Putra Bahtera, beserta lampirannya ;

b. 3 (tiga) lembar asli Dokumen Keputusan Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 782/077.92, tanggal 06 Desember 2006 tentang Penunjukan PT. Raditya Putra Bahtera sebagai Perusahaan Penyedia Barang/Jasa Pengadaan Jasa Filler Hukum Kebutuhan Biro Hukum Sekdaprov. DKI Jakarta, yang ditandatangani oleh an. JORNAL E. SIAHAAN, SH. M.Si selaku Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;

c. 3 (tiga) lembar asli Dokumen Keputusan Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 781/077.92, tanggal 05 Desember 2006 tentang Penetapan Penyedia Barang/Jasa Pelelangan Umum Pengadaan Jasa Filler Hukum Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov. DKI Jakarta, yang ditandatangani oleh an. JORNAL E. SIAHAAN, SH. M.Si selaku Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;

Hal. 354 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) lembar asli Dokumen Pengumuman Pemenang Pelelangan Umum Pengadaan Jasa Filler Hukum Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov. DKI Jakarta Nomor : 24/PPBJ/Peng/L/Filler-ABT/XII/2006, tanggal 05 Desember 2006 yang ditandatangani oleh an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;
- e. 1 (satu) lembar asli Dokumen Nomor : 78/077.92, tanggal 05 Desember 2006 perihal Penetapan Pemenang Lelang Umum Pengadaan Jasa Filler Hukum Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov. DKI Jakarta, yang ditujukan kepada Panitia Pengadaan Barang / Jasa Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta, yang ditandatangani oleh an. JORNAL E. SIAHAAN, SH. M.Si selaku Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
- f. 5 (lima) lembar asli Dokumen Berita Acara Hasil Pelelangan Umum Pengadaan Jasa Filler Hukum Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov. DKI Jakarta Nomor : 21/PPBJ/BA/FILLER-ABT/XII/2006 tanggal 04 Desember 2006, yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua, ISMIYATUN, SH selaku Sekretaris, IWAN SATYOPRODJO, SH, MM, Endang SUMARDI, SH dan OR. ZAKARIAS, SH selaku Anggota ;
- g. 2 (dua) lembar asli Dokumen Berita Acara Penetapan Calon Pemenang Lelang dan Cadangan Calon Pemenang Pengadaan Jasa Filler Hukum Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov. DKI Jakarta Nomor : 22/PPBJ/BA/Filler-ABT/XII/2006 tanggal 04 Desember 2006, yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua, ISMIYATUN, SH selaku Sekretaris, IWAN SATYOPRODJO, SH, MM, Endang SUMARDI, SH dan OR. ZAKARIAS, SH selaku anggota ;
- h. 5 (lima) lembar asli Dokumen Nomor : 23/PPBJ/Lap./Filler/XII/ 2006, tanggal 04 Desember 2006 perihal Laporan Lelang Umum Pengadaan Jasa Filler Hukum

Hal. 355 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov. DKI Jakarta, yang ditujukan kepada Kepala Biro Hukum Setdaprov. DKI Jakarta, yang ditandatangani oleh an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;

- i. 3 (tiga) lembar asli Dokumen Berita Acara Penilaian dan Pembuktian Kualifikasi Dokumen Penawaran Pelelangan Umum Dalam Rangka Pengadaan Jasa Filler Hukum Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov. DKI Jakarta Nomor : 20/PPBJ/BA/FILLER-ABT/XII/2006 tanggal 04 Desember 2006, yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua, ISMIYATUN, SH selaku Sekretaris, IWAN SATYOPRODJO, SH, MM, Endang SUMARDI, SH dan OR. ZAKARIAS, SH selaku anggota ;
- j. 1 (satu) lembar asli Dokumen Nomor : 19/PPBJ/UND/Filler-ABT/XII/2006, tanggal 01 Desember 2006 perihal Undangan, yang ditujukan kepada Direktur/pimpinan PT. TRIASMULYA ABADI PERKASA Jln. H. Abdul Jalil No. 21, Jakarta Pusat, yang ditandatangani oleh an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;
- k. 1 (satu) lembar asli Dokumen Nomor : 19/PPBJ/UND/Filler-ABT/XII/2006, tanggal 01 Desember 2006 perihal Undangan, yang ditujukan kepada Direktur/pimpinan PT. RADITYA NPUTRA BAHTERA Jln. Tanah Tinggi Barat No. 5, Kel. Bungur, Jakarta Pusat, yang ditandatangani oleh an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;
- l. 1 (satu) lembar asli Dokumen Nomor : 18/PPBJ/UND/Filler-ABT/XII/2006, tanggal 01 Desember 2006 perihal Undangan, yang ditujukan kepada Ismiyatun, SH, Iwan Satyoprodjo, SH, MH, Endang Sumardi, SH dan OR. Zakarias, SH, yang ditandatangani oleh an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;

Hal. 356 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Hadir pada hari/tanggal :
Senin, 04 Desember 2006, pukul 09.00 WIB, Tempat : Ruang
Rapat Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Blok G lantai 9 Jl. Merdeka Selatan 8-9 Jakarta Pusat, Acara
Penilaian dan Pembuktian Kualifikasi Dokumen Surat
Penawaran Harga (SPH) Pelelangan Umum Pengadaan Jasa
Filler Hukum Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov. DKI Jakarta,
yang terdapat tanda tangan nomor urut 1 (satu) an. MADE
SUARJAYA, SH sampai dengan nomor urut 7 (tujuh) an.
HERMAN FELANI (PT. Trias Mulya Abadi Perkasa), yang
ditandatangani oleh an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua
Panitia Pengadaan Barang / Jasa Biro Hukum Sekretariat
Daerah Provinsi DKI Jakarta ;
- n. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Hadir Tenaga Ahli dalam
rangka Pengadaan Jasa Filler Hukum Kebutuhan Biro Hukum
Setdaprov DKI Jakarta, pada hari/tanggal : Senin, 04
Desember 2006, pukul 09.00 WIB, Tempat : Ruang Rapat
Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Blok G
lantai 9 Jl. Merdeka Selatan 8-9 Jakarta Pusat, Acara :
Penilaian dan Pembuktian Kualifikasi Dokumen Surat
Penawaran Harga (SPH) Pelelangan Umum Pengadaan Jasa
Filler Hukum Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov. DKI Jakarta,
yang terdapat tanda tangan
nomor urut 1 (satu) an. MADE SUARJAYA, SH (Jabatan
Ketua) sampai dengan nomor urut 18 (delapan belas) an.
HENDY (Jabatan Freeland/Ass. Lighting), yang
ditandatangani oleh an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua
Panitia Pengadaan Barang / Jasa Biro Hukum Sekretariat
Daerah Provinsi DKI Jakarta ;
- o. 3 (tiga) lembar asli Dokumen Berita Acara Evaluasi Dokumen
Kualifikasi Surat Penawaran Harga (SPH) Pelelangan Umum
Dalam Rangka Pengadaan Jasa Filler Hukum Kebutuhan
Biro Hukum Setdaprov. DKI Jakarta Nomor :
17/PPBJ/BA/Filler-ABT/XII/2006, tanggal 01 Desember 2006,
yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa
Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta an.
MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua, ISMIYATUN, SH

Hal. 357 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- selaku Sekretaris, IWAN SATYOPRODJO, SH, MM, Endang SUMARDI, SH dan OR. ZAKARIAS, SH selaku Anggota ;
- p. 3 (tiga) lembar asli Dokumen Berita Acara Evaluasi Teknis dan Harga Dokumen Penawaran Pelelangan Umum Dalam Rangka Pengadaan Jasa Filler Hukum Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov. DKI Jakarta Nomor : 16/PPBJ/BA/Filler-ABT/XII/2006, tanggal 1 Desember 2006, yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua, ISMIYATUN, SH selaku Sekretaris, IWAN SATYOPRODJO, SH, MM, Endang SUMARDI, SH dan OR. ZAKARIAS, SH selaku Anggota ;
- q. 2 (dua) lembar asli lampiran Berita Acara Evaluasi Teknis dan Harga Nomor : 16/PPBJ/BA/Filler-ABT/XII/2006, tanggal 1 Desember 2006, Kriteria Evaluasi Proposal Pengadaan Jasa Filler Hukum Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta, Nama: PT. Triasmulya Abadi Perkasa, yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua, ISMIYATUN, SH selaku Sekretaris, IWAN SATYOPRODJO, SH, MM, Endang SUMARDI, SH dan OR. ZAKARIAS, SH selaku Anggota ;
- r. 2 (dua) lembar asli lampiran Berita Acara Evaluasi Teknis dan Harga Nomor : 16/PPBJ/BA/Filler-ABT/XII/2006, tanggal 1 Desember 2006, Kriteria Evaluasi Proposal Pengadaan Jasa Filler Hukum Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta, Nama: PT. Raditya Putra Bahtera, yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua, ISMIYATUN, SH selaku Sekretaris, IWAN SATYOPRODJO, SH, MM, Endang SUMARDI, SH dan OR. ZAKARIAS, SH selaku Anggota ;
- s. 8 (delapan) lembar asli Data Penawaran Harga pekerjaan Sosialisasi Peningkatan kesadaran hukum masyarakat, PT. Raditya Putra Bahtera ;
- t. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran (SPH) Sampul II Pelelangan Umum Dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka Pengadaan Jasa Filler Hukum Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta, Nomor : 15/PPBJ/BA/FILLER-ABT/XII/2006, tanggal 01 Desember 2006, yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua, ISMIYATUN, SH selaku Sekretaris, IWAN SATYOPRODJO, SH, MM, Endang SUMARDI, SH dan OR. ZAKARIAS, SH selaku anggota, dan Penyedia Barang/Jasa an. GUNTUR INDRAYANA yang mewakili perusahaan PT. Raditya Putra Bahtera, (tanpa nama) yang mewakili PT. Triasmulya Abadi Perkasa ;

- u. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Hadir pada hari/tanggal : Jum'at, 01 Desember 2006, pukul 10.00 WIB, Tempat : Ruang Rapat Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Blok G lantai 9 Jl. Merdeka Selatan 8-9 Jakarta Pusat, Acara Pembukaan surat penawaran harga (SPH) sampul II Pelelangan Umum Pengadaan Jasa Filler Hukum Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov. DKI Jakarta, yang terdapat tanda tangan nomor urut 1 (satu) an. MADE SUARJAYA, SH sampai dengan nomor urut 7 (tujuh) an. PT.Raditya Putra Bahtera, yang ditandatangani oleh an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;
- v. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Hadir pada hari/tanggal : Jum'at, 01 Desember 2006, pukul 11.00 WIB, Tempat : Ruang Rapat Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Blok G lantai 9 Jl. Merdeka Selatan 8-9 Jakarta Pusat, Acara Pemberitahuan hasil evaluasi administrasi, teknis dan harga dokumen penawaran harga (SPH) Pelelangan Umum Pengadaan Jasa Filler Hukum dan pengambilan asli jaminan penawaran, yang terdapat tanda tangan nomor urut 1 (satu) an. MADE SUARJAYA, SH sampai dengan nomor urut 7 (tujuh) an. EDED JUNAEDI (PT. Pilot P. Production), yang ditandatangani oleh an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;

Hal. 359 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- w. 1 (satu) lembar asli Dokumen Nomor : 14/PPBJ/UND/Filler-ABT/XI/2006, tanggal 30 November 2006 perihal Undangan, yang ditujukan kepada Direktur/pimpinan PT. PILOT PROJECT PRODUCTION, Plaza III Pondok Indah Blok A-3, Jln. TB. Simatupang, Jakarta Selatan, yang ditandatangani oleh an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;
- x. 1 (satu) lembar asli Dokumen Nomor : 14/PPBJ/UND/Filler-ABT/XI/2006, tanggal 30 November 2006 perihal Undangan, yang ditujukan kepada Direktur/pimpinan PT. TOGA VISION, Jln. Delima Raya No. 5/10, Klender, Jakarta Timur, yang ditandatangani oleh an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;
- y. 1 (satu) lembar asli Dokumen Nomor : 14/PPBJ/UND/Filler-ABT/ XI/2006, tanggal 30 November 2006 perihal Undangan, yang ditujukan kepada Direktur/pimpinan PT. MEGA VISION, Komp. Ruko Cempaka Mas Blok M 1 No. 12, Jln. Letjen Suprpto, Jakarta Pusat, yang ditandatangani oleh an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;
- z. 1 (satu) lembar asli Dokumen Nomor : 14/PPBJ/UND/Filler-ABT/XI/2006, tanggal 30 November 2006 perihal Undangan, yang ditujukan kepada Direktur/pimpinan PT. TRIAS MULYA ABADI PERKASA, Jln. H. Abdul Jalil No. 21, Jakarta Pusat, yang ditandatangani oleh an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;
- aa.1 (satu) lembar asli Dokumen Nomor : 14/PPBJ/UND/Filler-ABT/XI/2006, tanggal 30 November 2006 perihal Undangan, yang ditujukan kepada Direktur/pimpinan PT. RADITYA PUTRA BAHTERA, Jln. Tanah Tinggi Barat No. 5, Kel. Bungur, Jakarta Pusat, yang ditandatangani oleh an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;

Hal. 360 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ab.1 (satu) lembar asli Dokumen Nomor : 14/PPBJ/UND/Filler-ABT/XI/2006, tanggal 30 November 2006 perihal Undangan, yang ditujukan kepada Ismiyatun, SH, Iwan Satyoprodjo, SH, MH, Endang Sumardi, SH dan OR. Zakarias, SH,, yang ditandatangani oleh an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;

ac.3 (tiga) lembar asli Dokumen Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Pelelangan Umum Dalam Rangka Pengadaan Jasa Filler Hukum Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov. DKI Jakarta Nomor : 12/PPBJ/BA/Filler-ABT/XI/2006, tanggal 30 November 2006, yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua, ISMIYATUN, SH selaku Sekretaris, IWAN SATYOPRODJO, SH, MM, Endang SUMARDI, SH dan OR. ZAKARIAS, SH selaku anggota ;

ad.1 (satu) lembar asli Dokumen Nomor : 11/PPBJ/UND/Filler-ABT/XI/2006, tanggal 29 November 2006 perihal Undangan, yang ditujukan kepada Ismiyatun, SH, Iwan Satyoprodjo, SH, MH, Endang Sumardi, SH dan OR. Zakarias, SH,, yang ditandatangani oleh an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;

ae.1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Hadir pada hari/tanggal : Kamis, 30 November 2006, pukul 09.00 WIB, Tempat : Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Blok G lantai 9 Jl. Merdeka Selatan 8-9 Jakarta Pusat, Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Pelelangan Umum Pengadaan Jasa Filler Hukum Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov. DKI, yang terdapat tanda tangan nomor urut 1 (satu) an. MADE SUARJAYA, SH sampai dengan nomor urut 5 (lima) an.OR. ZAKARIAS, yang ditandatangani oleh an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;

Hal. 361 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- af. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran (SPH) Sampul I Pelelangan Umum Dalam Rangka Pengadaan Jasa Filler Hukum Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta, Nomor : 10/PPBJ/BA/FILLER-ABT/XI/2006, tanggal 29 November 2006, yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua, ISMIYATUN, SH selaku Sekretaris, IWAN SATYOPRODJO, SH, MM, Endang SUMARDI, SH dan OR. ZAKARIAS, SH selaku anggota, dan Penyedia Barang/Jasa an. PT. PILOT PROJECT. P, PT. TRIAS MULYA ABADI PERKASA, PT. MEGA. V, dan PT. RADITYA ;
- ag.69 (enam puluh sembilan) lembar foto copy Dokumen Data Administrasi pekerjaan sosialisasi peningkatan kesadaran hukum masyarakat, PT. RADITYA PUTRA BAHTERA ;
- ah.16 (enam belas) lembar foto copy dokumen Data Kualifikasi pekerjaan sosialisasi peningkatan kesadaran hukum masyarakat, PT. RADITYA PUTRA BAHTERA ;
- ai. 1 (satu) lembar foto copy Dokumen Jaminan Penawaran ASURANSI PURI ASIH No. 245604 Nomor Bond : 80.0.14.9373.11.06.S, Nilai Bond : Rp. 46.160.000,- (empat puluh enam juta seratus enampuluh ribu rupiah), tertanggal 28 November 2006 yang ditandatangani oleh an. MANUSUN SITOMPUL, SE, AAAIK selaku Kepala Divisi Pemasaran PT. ASURANSI PURI ASIH (Surety), dan an. GUNTUR INDRAYANA selaku Direktur PT. RADITYA PUTRA BAHTERA;
- aj. 16 (enam belas) lembar asli Data Teknis Pekerjaan Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat, PT. RADITYA PUTRA BAHTERA, yang pada lembaran akhirnya terdapat tanda tangan an. GUNTUR INDRAYANA selaku Direktur Utama PT. RADITYA PUTRA BAHTERA ;
- ak.6 (enam) lembar asli STORY BOARD Pesan Layanan Masyarakat Versi – I “Sampah Membawa Bencana” oleh Biro Hukum Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ;

Hal. 362 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- al. 5 (lima) lembar asli STORY BOARD Pesan Layanan Masyarakat Versi – II “Jangan Menyeberang Seenaknya” oleh Biro Hukum Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ;
- am. 1 (satu) lembar Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan Sosialisasi Produk Hukum – Iklan Layanan Masyarakat (PSAF/FILLER HUKUM) Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta TA. 2006 ;
- an.6 (enam) lembar Dokumen Data Peralatan PT. RADITYA PUTRA BAHTERA ;
- ao.28 (dua puluh sembilan) lembar foto copy Dokumen Daftar Nama Tenaga Ahli dan Crew Pendukung lainnya PT. RADITYA PUTRA BAHTERA ;
- ap. 13 (tiga belas) lembar foto copy Kontrak Pengalaman ;
- aq. 18 (delapan belas) lembar Dokumen Jadwal Penayangan Iklan Layanan Masyarakat Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta;
- ar. 1 (satu) lembar asli Dokumen Surat tertanggal 27 November 2006, ditujukan kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta, yang ditandatangani an. SANTI PRATIWI selaku Account Executive PT. CIPTA TPI ;
- as. 1 (satu) lembar asli Dokumen Surat tertanggal 28 November 2006, ditujukan kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta, yang ditandatangani an. ALVONSUS SUSAN selaku Sales Supervisor PT. INDOSIAR VISUAL MANDIRI ;
- at. 1 (satu) lembar asli Dokumen Surat tertanggal 28 November 2006, ditujukan kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta, yang ditandatangani an. MARIA G. LIMY selaku Perwakilan PT. LATIVI MEDIA KARYA ;
- au. 1 (satu) lembar asli Dokumen Surat keterangan tertanggal 27 November 2006, yang ditandatangani an. EMIL ISKANDAR selaku Sr. Account Executive PT. GLOBAL INFORMASI BERMUTU ;
- av. 1 (satu) lembar asli Dokumen Surat tertanggal 29 November 2006, ditujukan kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta, yang

Hal. 363 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditandatangani an. PRITA WIDYA OKTAVIANI selaku Account Executive PT. DUTA VISUAL NUSANTARA TIVITUJUH ;
- aw. 6 (enam) lembar asli Dokumen Penawaran Pekerjaan Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat, berupa Data Administrasi PT. TRIASMULYA ABADI PERKASA ;
- ax. 23 (lima belas) lembar asli Dokumen Penawaran Pekerjaan sosialisasi peningkatan kesadaran hukum masyarakat, berupa Data Kualifikasi PT. TRIASMULYA ABADI PERKASA;
- ay. 70 (tujuh puluh) lembar foto copy Dokumen Akte Perusahaan PT. TRIASMULYA ABADI PERKASA ;
- az. 11 (sebelas) lembar foto copy Dokumen Pajak Perusahaan PT. TRIASMULYA ABADI PERKASA ;
- ba. 18 (delapan belas) lembar foto copy Dokumen Laporan Keuangan PT. TRIASMULYA ABADI PERKASA tahun 2005 ;
- bb. 1 (satu) lembar foto copy Dokumen Jaminan Penawaran (BID/TENDER BOND) RAYA INSURANCE Nomor Bond : 81.646.0106.25074, Nilai Bond : Rp. 46.160.000,- (empat puluh enam juta seratus enampuluh ribu rupiah), tertanggal 28 November 2006 yang ditandatangani oleh an. IR. YUDA BAKTI SETIA BUDI, AAAIK selaku Manager Operasional PT. ASURANSI RAYA(Surety), dan an. HERMAN FELANI selaku Direktur PT. TRIASMULYA ABADI PERKASA ;
- bc 1 (satu) lembar foto copy Dokumen Jaminan Penawaran (BID/TENDER BOND) RAYA INSURANCE Nomor Bond : 81.646.0106.25074, Nilai Bond : Rp. 46.160.000,- (empat puluh enam juta seratus enampuluh ribu rupiah), tertanggal 28 November 2006 yang ditandatangani oleh an. IR. YUDA BAKTI SETIA BUDI, AAAIK selaku Manager Operasional PT. ASURANSI RAYA(Surety), dan an. HERMAN FELANI selaku Direktur PT. TRIASMULYA ABADI PERKASA ;
- bd. 10 (sepuluh) lembar Dokumen Penawaran Pekerjaan Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat, berupa Data Teknis PT. TRIASMULYA ABADI PERKASA ;
- be. 7 (tujuh) lembar Dokumen STORY BOARD ;

Hal. 364 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bf. 6 (enam) lembar Dokumen STORY BOARD FILLER HUKUM
Biro Hukum DKI Jakarta ;
- bg.1 (dua) lembar Dokumen Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan
Sosialisasi Produk Hukum – Iklan Layanan Masyarakat
(PSA/FILLER HUKUM) Biro Hukum Sekretariat Daerah
Provinsi DKI Jakarta TA. 2006 ;
- bh.4 (empat) lembar Dokumen Data Peralatan PT.
TRIASMULYA ABADI PERKASA ;
- bi. 19 (sembilan belas) lembar foto copy Dokumen Daftar Nama
Tenaga Ahli dan Crew Pendukung lainnya PT. TRIASMULYA
ABADI PERKASA ;
- bj. 12 (dua belas) lembar foto copy Dokumen Surat Perjanjian
Kerja Produksi dan Penayangan Iklan Layanan Masyarakat di
Stasiun Televisi Nomor: SPK-04/PISPK/VI/2004 tanggal 4
Juni 2004 antara proyek induk sarana penunjang
ketenagalistrikan dengan PT. TRIASMULYA ABADI
PERKASA. Tahun 2004 ;
- bk.6 (enam) lembar foto copy Dokumen Surat Perjanjian Kerja
Sama / Kontrak Nomor : 119/kont/Pry-PLPP/X/2003 tanggal
13 Oktober 2003 antara Proyek pengembangan kebijakan
peningkatan peran lintas pelaku pengambang KUKM
Kementerian Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah dengan
PT. TRIASMULYA ABADI PERKASA tentang produksi iklan
layanan masyarakat tentang publikasi koperasi dan UKM
melalui televisi sebanyak 5 paket ;
- bl. 2 (dua) lembar Dokumen Surat Perintah Kerja No. SPK.
NO.29/ VII/2003/PASPHS, tertanggal 5 Agustus 2003,
ditandatangani an. Dr. KUSMAN SURJAKUSUMAH, Sp. KJ.
MPH selaku Pihak Pertama Pemimpin proyek promosi
advokasi dan sosialisasi perilaku hidup sehat, dan an. NONY
selaku pihak kedua Direktur PT. TRIASMULYA ABADI
PERKASA, serta mengetahui an. Dr. NANANG A.
PARWOTOM, SPKJ, MARS Kepala Pusat Laboratorium
Terapi dan Rehabilitasi selaku Lakhar BNN ;
- bm. 7 (tujuh) lembar foto copy Dokumen Surat Perjanjian
Pemborongan (Kontrak) Nomor: 26/PPP-AKA/PAS/VIII/2003
tanggal 7-8 Agustus 2003 tentang pekerjaan pembuatan

Hal. 365 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Trilogi Audio Visual tentang terapi dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba oleh pihak ke III BNN, antara Pimpinan proyek promosi advokasi dan sosialisasi perilaku hidup sehat tahun dinas 2003 dengan PT. TRIASMULYA ABADI PERKASA ;

bn.10 (sepuluh) lembar foto copy Dokumen Surat Perjanjian Kerja Nomor : 04/DPK-P3K/LBL/IV/02 dan Nomor : 02/TAP/SPK/IV/ 2002, tentang pekerjaan pengadaan produksi dan penayangan iklan label sosialisasi undang-undang perlindungan konsumen melalui media televisi, antara Proyek pemberdayaan perlindungan konsumen dengan PT. TRIASMULYA ABADI PERKASA, tertanggal 10 April 2002 ;

bo.2 (dua) lembar foto copy Dokumen Surat Perintah Kerja Nomor: 71/SPK/P3K/XI/2001 tertanggal 02 November 2001, yang ditandatangani an. Ir. ADANG SOPANDI, Msc selaku pihak pertama dan NONY selaku Direktur PT. TRIASMULYA ABADI PERKASA ;

bp.10 (sepuluh) lembar Surat Perjanjian/Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan Pembuatan Program Talk Show TV masyarakat (Bloking Time), Nomor : 14/S.P3/SETWAN/VIII/2006 tanggal 07 Agustus 2006, yang ditandatangani an. Drs. H. SARWO EDHI, Msi selaku pihak pertama Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat DPRD PROV. DKI Jakarta, dan an. HERMAN FELANI selaku pihak kedua Direktur PT. TRIASMULYA ABADI PERKASA, serta mengetahui an. H.R. DEDED SUKANDAR, SH, MM selaku Sekretaris DPRD PROPINSI DKI JAKARTA ;

bq.1 (satu) lembar asli Dokumen Jadwal Penayangan Iklan Layanan Masyarakat Biro hukum Pemprov DKI Jakarta ;

br. 1 (satu) lembar asli Dokumen surat keterangan tertanggal 27 November 2006, yang ditandatangani an. EMIL ISKANDAR selaku Sr. Account Executive PT. GLOBAL INFORMASI BERMUTU ;

bs. 1 (satu) lembar asli Dokumen surat tertanggal 27 November 2006, ditujukan kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta, yang



ditandatangani an. MARIA G. LIMi selaku Perwakilan PT.
LATIVI MEDIA KARYA ;

bt. 1 (satu) lembar asli Dokumen surat tertanggal 26 November
2006, ditujukan kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa
Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta, yang
ditandatangani an. SANTI PRATIWI selaku Account
Executive PT. CIPTA TPI ;

bu.5 (lima) lembar asli Dokumen Data kelengkapan surat
penawaran harga (SPH) Jasa Filler hukum kebutuhan Biro
Hukum SetdaProv DKI Jakarta ;

by. 1 (satu) lembar asli Dokumen Nomor : 09/PPBJ/UND/Filler-
ABT/XI/2006, tanggal 28 November 2006 perihal
Undangan, yang ditujukan kepada Ismiyatun, SH, Iwan
Satyoprodjo, SH, MH, Endang Sumardi, SH dan OR.
Zakarias, SH,, yang ditandatangani oleh an. MADE
SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang /
Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;

bw. 2 (dua) lembar asli Dokumen Nomor : 08/PPBJ/UND/Filler-
ABT/XI/2006, tanggal 28 November 2006 perihal Undangan,
yang ditujukan kepada Direktur/pimpinan PT. (tidak
tercantum), yang ditandatangani oleh an. MADE SUARJAYA,
SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Biro
Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;

bx. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Hadir pada hari/tanggal :
Rabu, 29 November 2006, pukul 15.15 WIB, Tempat : Biro
Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Blok G lantai
9 Jl. Merdeka Selatan 8-9 Jakarta Pusat, Acara Pembukaan
dokumen penawaran sampul I Pelelangan Umum Pengadaan
Jasa Filler Hukum Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov. DKI,
yang terdapat tanda tangan nomor urut 1 (satu) an. MADE
SUARJAYA, SH sampai dengan nomor urut 10 (sepuluh)
an.GUNTUR INDRAYANA (PT. RADITYA PUTRA
BAHTERA), yang ditandatangani oleh an. MADE
SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang /
Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;

by. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Hadir pada hari/tanggal :
Selasa dan Rabu, 28 dan 29 November 2006, pukul 10.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB s.d 15.00 WIB, Tempat : Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Blok G lantai 9 Jl. Merdeka Selatan 8-9 Jakarta Pusat, Acara Pemasukan dokumen penawaran Pelelangan Umum Pengadaan Jasa Filler Hukum Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov. DKI, yang terdapat tanda tangan nomor urut 1 (satu) an. MADE SUARJAYA, SH sampai dengan nomor urut 10 (sepuluh) an. EDED JUNAEDI (PT. PILOT P. PRODUCTION), yang ditandatangani oleh an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;

bz.1 (satu) lembar foto copy Dokumen Nomor : 07/PPBJ/UND/Filler-ABT/XI/2006, tanggal 27 November 2006 perihal Undangan, yang ditujukan kepada Direktur/pimpinan PT. Sebagaimana terlampir, yang ditandatangani oleh an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;

ca.1 (satu) lembar asli Dokumen Nomor : 07/PPBJ/UND/Filler-ABT/XI/2006, tanggal 27 November 2006 perihal Undangan, yang ditujukan kepada Direktur/pimpinan PT. (tidak tercantum), yang ditandatangani oleh an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta, yang pada bagian belakang lembarannya terdapat catatan nama orang, perusahaan dan tanda tangan ;

cb.2 (dua) lembar asli Dokumen Berita Acara penjelasan rencana kerja dan syarat-syarat pelelangan umum dalam rangka pengadaan Filler Hukum kebutuhan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor: 06/PPBJ/BA/Filler-ABT/XI/2006, yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua, ISMIYATUN, SH selaku Sekretaris, IWAN SATYOPRODJO, SH, MM, Endang SUMARDI, SH dan OR. ZAKARIAS, SH selaku anggota, dan 11 (sebelas) perusahaan sebagai peserta ;

Hal. 368 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



cc. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Hadir pada hari/tanggal : Senin, 27 November 2006, pukul 10.00 WIB, Tempat : Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Blok G lantai 9 Jl. Merdeka Selatan 8-9 Jakarta Pusat, Acara Penjelasan (Aanwijzing) rencana kerja dan syarat-syarat pelelangan Umum Pengadaan Jasa Filler Hukum Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov. DKI, yang terdapat tanda tangan nomor urut 1 (satu) an. MADE SUARJAYA, SH sampai dengan nomor urut 15 (lima belas) an. MANOLOP SAMOSIR (PT. TOGA VISION), yang ditandatangani oleh an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;

cd. 1 (satu) lembar asli Dokumen Harga Perkiraan Sendiri, dengan jenis pekerjaan pengadaan filler hukum kebutuhan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta, tahun anggaran 2006, volume 320 spot @ 30 detik, yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua, ISMIYATUN, SH selaku Sekretaris, IWAN SATYOPRODJO, SH, MM, Endang SUMARDI, SH dan OR. ZAKARIAS, SH, dan mengetahui an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta ;

ce. 1 (satu) lembar foto copy Dokumen Nomor : 05/PPBJ/UND/ Filler-ABT/XI/2006, tanggal 20 November 2006 perihal Undangan, yang ditujukan kepada Direktur/pimpinan PT. Sebagaimana terlampir, yang ditandatangani oleh an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;

cf. 1 (satu) lembar foto copy Dokumen Nomor : 05/PPBJ/UND/ Filler-ABT/XI/2006, tanggal 20 November 2006 perihal Undangan, yang ditujukan kepada Direktur/pimpinan PT. Sebagaimana terlampir, yang ditandatangani oleh an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada bagian bawah halaman depan terdapat catatan nama orang, perusahaan dan tanda tangan ;

cg. 1 (satu) lembar foto copy Dokumen Nomor : 05/PPBJ/UND/ Filler-ABT/XI/2006, tanggal 20 November 2006 perihal Undangan, yang ditujukan kepada Direktur/pimpinan PT. Sebagaimana terlampir, yang ditandatangani oleh an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta, terdapat tanda tangan kecil di bagian bawah an. TRIYADI ;

ch. 1 (satu) lembar foto copy Dokumen Nomor : 05/PPBJ/UND/ Filler-ABT/XI/2006, tanggal 20 November 2006 perihal Undangan, yang ditujukan kepada Direktur/pimpinan PT. Sebagaimana terlampir, yang ditandatangani oleh an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta, terdapat tulisan "Arsip Ratih" ;

30. 1 (satu) bundel Dokumen pembayaran Pengadaan Jasa Filler Kebutuhan Biro Hukum Sekda Prov. DKI Jakarta antara Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan PT. RADITYA PUTRA BAHTERA Nomor 783/077.92, yang berisi antara lain :

a. 1 (satu) lembar asli tindisan Dokumen SPM Giro No. 00303452006 TA. 2006 sebesar Rp. 1.866.840.000,- (satu milyar delapan ratus empat puluh juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) untuk pembayaran biaya pengadaan jasa filler hukum kebutuhan Biro Hukum Sekdaprov DKI Jakarta, SPK No. 783/077.92, tertanggal 12 Desember 2006 ;

b. 1 (satu) lembar asli Dokumen Telahaan Staf SPP tertanggal 21 Desember 2006 No Kontrak : 783/077.92 kepada PT. RADITYA PUTRA BAHTERA sebesar Rp. 2.184.600.000,- (dua milyar seratus delapan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) ;

c. 1 (satu) lembar asli tindisan Dokumen Tanda Terima SPP No. SPMG20060031967 No Kontrak : 783/077.92, terdapat tanda tangan petugas penerima an. Lina ;

d. 1 (satu) lembar asli Dokumen Kwitansi PT. RADITYA PUTRA BAHTERA No. 001/RB-KWY/12.06 tertanggal 20 Desember

Hal. 370 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2006, sebesar Rp. 2.184.600.000,- (dua milyar seratus delapan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah), terdapat tanda tangan diatas materai 6.000 (enam ribu rupiah) an. GUNTUR INDRAYANA selaku Direktur PT. Radityaputra Bahtera dan an. H. BUDIYONO selaku Pemegang Kas Setdaprov DKI Jakarta ;

- e. 1 (satu) lembar foto copy Dokumen Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 2677/SPP/SWD/BB/XII/2006 tertanggal 20 Desember 2006, yang ditanda tangani an. H. BUDIYONO selaku Pemegang Kas Setdaprov DKI Jakarta dan an. HARI SANDJOJO, MJ selaku Asisten Keuangan ;
- f. 1 (satu) lembar foto copy Dokumen Surat Permintaan Pembayaran No. 2677/SPP/SWD/BB/XII/2006 tertanggal 20 Desember 2006, yang ditanda tangani an. H. BUDIYONO selaku Pemegang Kas Setdaprov DKI Jakarta dan an. HARI SANDJOJO, MJ selaku Asisten Keuangan ;
- g. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Rincian Rencana Penggunaan Beban Tetap No. 196/SPP/2006 tanggal 20 Desember 2006, ditandatangani an. BAHIR ROMSAH selaku Pemegang Kas Cabang dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum ;
- h. 1 (satu) lembar asli Dokumen Invoice PT. Radityaputra Bahtera No. 001/RB-INV/12.06 tertanggal Desember 2006, ditujukan kepada Biro Hukum Sekretariat Daerah Prov. DKI Jakarta, ditandatangani diatas materai 6.000 (enam ribu rupiah) an. GUNTUR INDRAYANA selaku Direktur PT. Radityaputra Bahtera;
- i. 1 (satu) lembar asli Dokumen Surat Pernyataan PT. Raditya Putra Bahtera, tertanggal 18 Desember 2006, yang ditandatangani diatas materai 6.000 (enam ribu rupiah) an. GUNTUR INDRAYANA selaku Direktur PT. Radityaputra Bahtera;
- j. 1 (satu) lembar asli Dokumen Surat Jalan PT. Raditya Putra Bahtera No. 01/SJ/RB/XII/2006, yang ditujukan kepada Biro Hukum Sekretariat Daerah Prov. DKI Jakarta tertanggal Desember 2006, yang ditandatangani an. GUNTUR INDRAYANA selaku Direktur PT. Radityaputra Bahtera ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 78/BAST/BH/XII/2006 tanggal 14 Desember 2006, yang ditanda tangani an. IRUSWANDI, SH selaku Pengurus Barang unit Biro Hukum, an. GUNTUR INDRAYANA selaku Direktur Utama PT. RADITYA INDRAYANA dan mengetahui an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Serah Terima Barang ;
- l. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Barang (BAPB) Nomor : 41/BAPB/BH/XII/2006 tertanggal 14 Desember 2006, ditanda tangani oleh Panitia Pemeriksa Barang nomor urut 1 (satu) Ketua sampai dengan 5 (lima) anggota, an. GUNTUR INDRAYANA selaku Direktur Utama PT. RADITYA INDRAYANA dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang ;
31. 1 (satu) bundel Dokumen yang terkait penayangan Filler Hukum (ABT) di JakTV, antara lain :
- a. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Bilyet Giro Mandiri Nomor : TG 858762 tertanggal 19 April 2007 sebesar Rp. 49.500.000,- (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ;
- b. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak Standar Nomor : ECETC-012-0000745 tertanggal 12 Desember 2006 ;
- c. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kwitansi Nomor : J07040068 tertanggal 17 April 2007, tertulis sudah terima dari PT. FORTUNE INDONESIA sebesar Rp. Rp. 49.500.000,- (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran INVOICE Nomor : J0601200843 ;
- d. 1 (satu) lembar asli Dokumen Transaksi Pembayaran Invoice J061200843 ;
- e. 2 (dua) lembar Dokumen LOG PROVE atas PO register Nomor : 13379.001/FORU/BDM/1106 ;
- f. 5 (lima) lembar Dokumen LOG PROVE atas PO register Nomor : 13379.002/FORU/BDM/1206 ;
- g. 5 (lima) lembar Dokumen INVOICE Nomor : J061200843 tertanggal 12 Desember 2006 atas PO register Nomor :

Hal. 372 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13379.002/FORU/BDM/1206 sebesar Rp. 49.500.000,-
(empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ;
- h. 1 (satu) keping DVD-R merk VERBATIM dengan Serial
Number DVD : ZD9906-DVR-J47F4 ;
- i. 1 (satu) keping DVD-R merk VERBATIM dengan Serial
Number DVD : ZD9955-DVR-J47F4 ;
32. 1 (satu) bundel Dokumen yang terkait penayangan Filler Hukum
(ABT) di Indosiar, antara lain :
- a. 1 (satu) lembar asli tindisan Dokumen POST
TRANSMISSION LOG atas ORDER Nomor : MT.06000473
dari ARTEK n PARTNERS tanggal 7 Desember 2006 ;
- b. 1 (satu) lembar asli tindisan INVOICE PT. Indosiar Visual
Mandiri Nomor 025114 tertanggal 21 Desember 2006,
kepada ARTEK'N PARTNER COMMUNICATIONS ;
- c. 1 (satu) lembar asli tindisan Dokumen FAKTUR PAJAK
STANDAR kode dan Nomor Seri : DKRPV-091-0023665
tertanggal 21 Desember 2006, atas Invoice Nomor 025114 ;
- d. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Rekening Koran PT.
Indosiar Visual Mandiri Nomor : 1623123450 periode 31
Maret 2007 s/d 30 April 2007 ;
33. 1 (satu) bundel Dokumen terkait dengan penerbitan Patokan
Harga Satuan Gema Hukum 2006, berisi antara lain :
- a. 1 (satu) lembar Disposisi kepada Mohammad Effendi, S.Kom
tertanggal 9 Juni 2006 ;
- b. 1 (satu) lembar Disposisi/Catatan No. 439 tanggal masuk 8
Juni 2006, Kode : 182, perihal Permintaan Harga Satuan,
ditujukan kepada Bagian Analisa Kebutuhan ;
- c. 1 (satu) lembar Surat Nomor : 347/-077.2 tanggal 6 Juni 2006
perihal Permintaan Harga Satuan Program Gema Hukum
Ibukota Jakarta di Stasiun Televisi Swasta Nasional yang
ditujukan kepada Kepala Biro Perlengkapan Setda Prov. DKI
Jakarta dari Kepala Biro Hukum Prov. DKI Jakarta an. H. R.
DEDED SUKANDAR, SH, MH ;
- d. 2 (dua) lembar lampiran Surat Nomor : 347/-077.2 tanggal 6
Juni 2006, yang ditandatangani Kepala Biro Hukum Prov. DKI
Jakarta an. H. R. DEDED SUKANDAR, SH, MH ;

Hal. 373 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 3 (tiga) lembar asli Dokumen Penawaran Harga dari PT. Trendeka Lestari ;
 - f. 2 (dua) lembar Dokumen Penawaran Harga dari PT. Veranita Indah Jaya Langgeng ;
 - g. 2 (dua) lembar Dokumen Penawaran Harga dari PT. Adila Jaya Sukses ;
 - h. 2 (dua) lembar Dokumen Penawaran Harga dari PT. Tinta Rengga Dunia ;
 - i. 2 (dua) lembar Dokumen Keputusan Kepala Biro Perlengkapan Prov. DKI Jakarta Nomor : 2747/073.532 tertanggal 17 Juli 2006 perihal Penetapan Patokan Harga Satuan Barang Insidental Kebutuhan Pemerintah Prov. DKI Jakarta untuk kebutuhan Biro Hukum Prov. DKI Jakarta yang ditanda tangani kepala Biro Perlengkapan Prov. DKI Jakarta an. Ir. EKO BHARUNA, MT ;
 - j. 2 (dua) lembar lampiran Keputusan Kepala Biro Perlengkapan Prov. DKI Jakarta Nomor : 2747/073.532 tertanggal 17 Juli 2006 yang ditanda tangani kepala Biro Perlengkapan Prov. DKI Jakarta an. Ir. EKO BHARUNA, MT ;
 - k. 2 (dua) lembar Berita Acara Penelitian dan Evaluasi Usulan Patokan Harga Satuan Insidental No. 135/BAHS/BP/VI/ 2006 tertanggal 28 Juni 2006 ;
 - l. 3 (tiga) lembar Dokumen lampiran Berita Acara Hasil Survey dan Pembahasan ;
 - m. 1 (satu) lembar Analisa Perhitungan Blocking Time, terdapat tulisan tangan dengan menggunakan tinta pulpen warna biru ;
 - n. 1 (satu) lembar Pengantar Nota Dinas Penetapan Harga Satuan Barang dan Jasa ;
 - o. 1 (satu) lembar Mekanisme Proses Penetapan Harga Satuan barang/Jasa ;
 - p. 1 (satu) lembar Verbal Naskah Dinas, tertanggal 17 juli 2006, yang ditanda tangani oleh Ir. EKO BHARUNA, MT selaku Kepala Biro Perlengkapan Prov. DKI Jakarta ;
34. 1 (satu) bundel asli Dokumen Perjanjian Pelelangan Umum Pengadaan Jasa Gema Hukum Ibukota Jakarta Dalam Rangka Sosialisasi Produk Hukum melalui media Televisi Swasta Nasional Kebutuhan Biro Hukum Sekda Prov. DKI Jakarta antara

Hal. 374 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan PT. TRENDEKA LESTARI Nomor 588/077.92, yang berisi antara lain :

- a. 5 (lima) lembar asli Dokumen Perjanjian Pelelangan Umum Pengadaan Jasa Gema Hukum Ibukota Jakarta Dalam Rangka Sosialisasi Produk Hukum melalui media Televisi Swasta Nasional Kebutuhan Biro Hukum Sekda Prov. DKI Jakarta antara Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan PT. Trendeka Lestari Nomor 588/077.92, tanggal 15 November 2006, yang ditandatangani oleh Pihak Pertama an. JORNAL E. SIAHAAN, SH. M.Si selaku Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Pihak Kedua an. ANNA DAHLIA selaku Direktur PT. Trendeka Lestari, berikut 2 (dua) lembar lampiran Nomor : 588/077.92 dan 1 (satu) lembar lampiran Nomor : 587/077.92 ;
- b. 5 (lima) lembar copy Dokumen Perjanjian Pelelangan Umum Pengadaan Jasa Gema Hukum Ibukota Jakarta Dalam Rangka Sosialisasi Produk Hukum melalui media Televisi Swasta Nasional Kebutuhan Biro Hukum Sekda Prov. DKI Jakarta antara Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan PT. Trendeka Lestari Nomor 588/077.92, tanggal 15 November 2006, yang ditandatangani oleh Pihak Pertama an. JORNAL E. SIAHAAN, SH. M.Si selaku Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Pihak Kedua an. ANNA DAHLIA selaku Direktur PT. Trendeka Lestari, berikut 2 (dua) lembar lampiran Nomor : 588/077.92 dan 1 (satu) lembar lampiran Nomor : 587/077.92 ;
- c. 1 (satu) lembar asli Dokumen Jaminan Pelaksanaan PT. Asuransi Mega Pratama 00011560, Nomor Bond : PL11630206H.0014/0114 Nilai Rp. 227.700.000,- (dua ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah), tertanggal 15 September 2006, yang ditanda tangani oleh SUKARMAN, AAAIK selaku Asst. Technical Manager PT. ASURANSI MEGA PRATAMA dan ANNA DAHLIA selaku Direktur PT. Trendeka Lestari ;

Hal. 375 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 2 (dua) lembar asli Dokumen Harga Perkiraan Sendiri / OE pada jenis pekerjaan Gema Hukum Ibukota Jakarta TA 2006 volume 5 (lima) kali penayangan tertanggal 22 Agustus 2006, yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan (MADE SUARJAYA, SH, ISMIYATUN, SH, IWAN SETYOPRODJO, SH, MH, ENDANG SUMARDI, SH dan OR ZAKARIAS, SH, serta Mengetahui JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum ;
- e. 3 (tiga) lembar asli Dokumen Keputusan Kepala Biro Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 587/077.92 tertanggal 15 September 2006 tentang Penunjukan PT. Trendeka Lestari sebagai perusahaan penyedia barang/jasa pelaksana pengadaan jasa gema hukum ibukota jakarta kebutuhan biro hukum sekdaprov DKI Jakarta Tahun Anggaran 2006, yang ditandatangani oleh JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;
- f. 1 (satu) lembar asli Dokumen Nomor : 28/PPBJ/L/GH/IX/2006 tertanggal 15 September 2006 perihal Penyerahan jaminan pelaksanaan pelelangan umum Jasa Gema Hukum Ibukota Jakarta Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta, yang ditujukan kepada PT. TRENDEKA LESTARI Jl. Tebet Barat Dalam VIII G No. 11 Jakarta Selatan 12810, yang ditandatangani oleh MADE SUARJAYA, SH selaku Panitia Pengadaan Barang/Jasa, berikut 1 (satu) lembar lampiran dokumen Jaminan Pelaksanaan PT. Asuransi Mega Pratama 00011560, Nomor Bond : PL11630206H.0014/0114 Nilai Rp. 227.700.000,- (dua ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah), tertanggal 15 September 2006 ;
- g. 1 (satu) lembar asli Dokumen Pengumuman Pemenang Lelang Nomor : 27/PPBJ/Peng/L/Peng/IX/2006, tanggal 8 September 2006 yang ditandatangani oleh an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;
- h. 1 (satu) lembar asli Dokumen Nomor : 567/077.92, tanggal 8 September 2006 perihal Penetapan Pemenang Lelang Umum Pengadaan Jasa Gema Hukum Ibukota Jakarta, yang

Hal. 376 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ditujukan kepada Panitia Pengadaan Barang / Jasa Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta, yang ditandatangani oleh an. JORNAL E. SIAHAAN, SH. M.Si selaku Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
- i. 6 (enam) lembar asli Dokumen Nomor : 26/PPBJ/Lap./Gema/IX/ 2006, tanggal 5 September 2006 perihal Laporan Lelang Umum Pengadaan Jasa Gema Hukum Ibukota Jakarta Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov. DKI Jakarta, yang ditujukan kepada Kepala Biro Hukum Setdaprov. DKI Jakarta, yang ditandatangani oleh an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;
- j. 2 (dua) lembar asli Dokumen Berita Acara Penetapan Calon Pemenang Lelang dan Cadangan Calon Pemenang Pengadaan Jasa Gema Hukum Ibukota Jakarta Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov. DKI Jakarta Nomor : 25/PPBJ/BA/GH/IX/2006 tanggal 5 September 2006, yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua, ISMIYATUN, SH selaku Sekretaris, IWAN SATYOPRODJO, SH, MM, Endang SUMARDI, SH dan OR. ZAKARIAS, SH selaku anggota ;
- k. 5 (lima) lembar asli Dokumen Berita Acara Hasil Pelelangan Umum Pengadaan Jasa Gema Hukum Ibukota Jakarta Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov. DKI Jakarta Nomor : 24/PPBJ/BA/GH/IX/2006 tanggal 5 September 2006, yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua, ISMIYATUN, SH selaku Sekretaris, IWAN SATYOPRODJO, SH, MM, Endang SUMARDI, SH dan OR. ZAKARIAS, SH selaku anggota ;
- l. 2 (dua) lembar asli Dokumen Berita Acara Peninjauan ke Stasiun Televisi Swasta PT. Indosiar Visual Mandiri dalam rangka Klarifikasi Penayangan Pengadaan Jasa Gema Hukum Ibukota Jakarta kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan

Hal. 377 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang/Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua, ISMIYATUN, SH selaku Sekretaris, IWAN SATYOPRODJO, SH, MM, Endang SUMARDI, SH dan OR. ZAKARIAS, SH selaku anggota dan ALVONSUS SUSANTO selaku SALES SUPERVISOR PT. Indosiar Mandiri ;

- m. 3 (tiga) lembar asli Dokumen Berita Acara Penilaian dan Pembuktian Kualifikasi Dokumen Penawaran Pelelangan Umum Dalam Rangka Pengadaan Jasa Gema Hukum Ibukota Jakarta Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov. DKI Jakarta Nomor : 22/PPBJ/BA/FILLER/IX/2006 tanggal 5 September 2006, yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua, ISMIYATUN, SH selaku Sekretaris, IWAN SATYOPRODJO, SH, MM, Endang SUMARDI, SH dan OR. ZAKARIAS, SH selaku anggota serta IRADAH HS dari PT. ADILA JAYA SUKSES dan ETIKA S dari PT. TRENDEKA LESTARI ;
- n. 1 (satu) lembar asli Dokumen Nomor : 21/PPBJ/UND/GH/IX/2006 tanggal 4 September 2006 perihal undangan yang ditujukan kepada ISMIYATUN, SH, IWAN SATYOPRODJO, SH, MH, ENDANG SUMARDI, SH dan OR. ZAKARIAS, SH, yang ditandatangani oleh MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;
- o. 1 (satu) lembar asli Dokumen Nomor : 20/PPBJ/UND/GH/IX/2006 tanggal 4 September 2006 perihal undangan yang ditujukan kepada PT. TRENDEKA LESTARI Jl. Tebet Barat Dalam 8 G No. 11 Jakarta Selatan, yang ditandatangani oleh MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;
- p. 1 (satu) lembar asli Dokumen Nomor : 20/PPBJ/UND/GH/IX/2006 tanggal 4 September 2006 perihal undangan yang ditujukan kepada PT. ADILA JAYA SUKSES Jl. Gatot Subroto Komp. Timah No. 20 Kel. Menteng Dalam Kec. Tebet

Hal. 378 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan, yang ditandatangani oleh MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;

- q. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Hadir pada Hari/Tanggal Selasa, 5 September 2006 waktu 09.00 WIB tempat Ruang Rapat Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Blok G lantai 9 Jl. Merdeka Selatan 8 – 9 Jakarta Pusat, Acara Penilaian dan pembuktian kualifikasi dokumen Surat Penawaran Harga (SPH) Pelelangan Umum pengadaan jasa Penyelenggaraan Gema hukum Ibukota Jakarta, terdapat tanda tangan peserta nomor urut 1 (satu) an. MADE SUARJAYA, SH sampai dengan nomor urut 7 (tujuh) an ETIKA S – PT. TRENDEKA LESTARI, yang ditanda tangani oleh MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;
- r. 3 (tiga) lembar asli Dokumen Berita Acara evaluasi dokumen kualifikasi surat penawaran harga (SPH) Pelelangan Umum Dalam rangka pengadaan jasa Gema Hukum Ibukota Jakarta kebutuhan biro hukum Ibukota Jakarta nomor : 19/PPBJ/BA/GH/IX/2006 tertanggal 4 September, yang ditanda tangani oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua, ISMIYATUN, SH selaku Sekretaris, IWAN SATYOPRODJO, SH, MM, Endang SUMARDI, SH dan OR. ZAKARIAS, SH selaku Anggota ;
- s. 3 (tiga) lembar asli Dokumen Berita Acara Evaluasi teknis dan harga dokumen penawaran pelelangan umum dalam rangka pengadaan jasa gema hukum Ibukota Jakarta kebutuhan biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta Nomor : 18/PPBJ/BA/GH/IX/2006 tertanggal 04 September 2006, yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua, ISMIYATUN, SH selaku Sekretaris, IWAN

Hal. 379 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- SATYOPRODJO, SH, MM, Endang SUMARDI, SH dan OR.
ZAKARIAS, SH selaku Anggota ;
- t. 2 (dua) lembar asli Dokumen Lampiran I - Kriteria proposal teknis dan harga kegiatan pengadaan jasa Gema Hukum ibukota Jakarta Biro hukum Setdaprov DKI Jakarta terhadap PT. TRENDEKA LESTARI, yang ditandatangani oleh oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua, ISMIYATUN, SH selaku Sekretaris, IWAN SATYOPRODJO, SH, MM, Endang SUMARDI, SH dan OR. ZAKARIAS, SH selaku anggota ;
- u. 2 (dua) lembar asli Dokumen Lampiran I - Kriteria proposal teknis dan harga kegiatan pengadaan jasa Gema Hukum ibukota Jakarta Biro hukum Setdaprov DKI Jakarta terhadap PT. ADILA JAYA SUKSES, yang ditandatangani oleh oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua, ISMIYATUN, SH selaku Sekretaris, IWAN SATYOPRODJO, SH, MM, Endang SUMARDI, SH dan OR. ZAKARIAS, SH selaku anggota ;
- v. 2 (dua) lembar asli Dokumen Lampiran II – Perbandingan masing-masing komponen penilaian kegiatan pengadaan jasa Gema Hukum ibukota Jakarta Biro hukum Setdaprov DKI Jakarta, yang ditandatangani oleh oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua, ISMIYATUN, SH selaku Sekretaris, IWAN SATYOPRODJO, SH, MM, Endang SUMARDI, SH dan OR. ZAKARIAS, SH selaku anggota ;
- w. 2 (dua) lembar asli Dokumen Lampiran III – Pertimbangan Teknis Panitia pengadaan barang/jasa dalam penilaian terhadap komponen yang mempengaruhi dalam kegiatan pengadaan jasa Gema Hukum ibukota Jakarta Biro hukum Setdaprov DKI Jakarta, yang ditandatangani oleh oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISMIYATUN, SH selaku Sekretaris, IWAN SATYOPRODJO, SH, MM, Endang SUMARDI, SH dan OR. ZAKARIAS, SH selaku anggota ;

- x. 2 (dua) lembar asli Dokumen Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran (SPH) Sampul II Pelelangan Umum dalam rangka pengadaan jasa Gema Hukum ibukota Jakarta Biro hukum Setdaprov DKI Jakarta Nomor : 17/PPBJ/BA/GH/IX/2006, yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua, ISMIYATUN, SH selaku Sekretaris, IWAN SATYOPRODJO, SH, MM, Endang SUMARDI, SH dan OR. ZAKARIAS, SH selaku anggota serta ETIKA S – PT. TRENDEKA LESTARI dan IRADAH HS – PT. ADILA JAYA SUKSES selaku Penyedia Barang/Jasa ;
- y. 1 (satu) lembar asli Dokumen Nomor : 16/PPBJ/UND/GH/IX/2006 tanggal 1 September 2006 perihal undangan yang ditujukan kepada ISMIYATUN, SH, IWAN SATYOPRODJO, SH, MH, ENDANG SUMARDI, SH dan OR. ZAKARIAS, SH, yang ditandatangani oleh MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;
- z. 1 (satu) lembar asli Dokumen Nomor : 15/PPBJ/UND/GH/IX/2006 tanggal 1 September 2006 perihal undangan yang ditujukan kepada PT. TRENDEKA LESTARI Jln. Tebet Barat Dalam 8 G No. 11 Jakarta Selatan, yang ditandatangani oleh MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;
- aa.1 (satu) lembar asli Dokumen Nomor : 15/PPBJ/UND/GH/IX/2006 tanggal 1 September 2006 perihal undangan yang ditujukan kepada PT. ADILA JAYA SUKSES Jl. Gatot Subroto Komp. Timah No. 20 Kel. Menteng Dalam Kec. Tebet Jakarta Selatan, yang ditandatangani oleh MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;

Hal. 381 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ab.1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Hadir, hari/tanggal
Senin, 4 September 2006, waktu 14.00 WIB, tempat ruang
rapat Biro hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Blok G lantai 9 Jl. Merdeka Selatan 8 – 9 Jakarta Pusat,
acara pembukaan Surat Penawaran Harga (SPH) Sampul II
Pelelangan Umum pengadaan jasa penyelenggaraan Gema
Hukum Ibukota Jakarta, terdapat tanda
tangan peserta nomor urut 1 (satu) an. MADE SUARJAYA,
SH sampai dengan nomor urut 7 (tujuh) an. IRADAH HS – PT
ADILA JAYA SUKSES, yang ditandatangani oleh MADE
SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia ;
- ac.1 (satu) lembar asli Dokumen Nomor : 14/PPBJ/UND/GH/IX/
2006 tanggal 1 September 2006 perihal undangan yang
ditujukan kepada ISMIYATUN, SH, IWAN SATYOPRODJO,
SH, MH, ENDANG SUMARDI, SH dan OR. ZAKARIAS, SH,
yang ditandatangani oleh MADE SUARJAYA, SH selaku
Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Biro Hukum
Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;
- ad.1 (satu) lembar asli Dokumen Nomor : 13/PPBJ/UND/GH/IX/
2006 tanggal 1 September 2006 perihal undangan yang
ditujukan kepada PT. PRIMA MEDIA ANTARA, yang
ditandatangani oleh MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua
Panitia Pengadaan Barang/Jasa Biro Hukum Sekretariat
Daerah Provinsi DKI Jakarta ;
- ae.1 (satu) lembar asli Dokumen Nomor : 13/PPBJ/UND/GH/IX/
2006 tanggal 1 September 2006 perihal undangan yang
ditujukan kepada PT. RADITYA PUTRA BAHTERA, yang
ditandatangani oleh MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua
Panitia Pengadaan Barang/Jasa Biro Hukum Sekretariat
Daerah Provinsi DKI Jakarta ;
- af. 1 (satu) lembar asli Dokumen Nomor : 13/PPBJ/UND/GH/IX/
2006 tanggal 1 September 2006 perihal undangan yang
ditujukan kepada PT. MEGA VISION, yang ditandatangani
oleh MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan
Barang/Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI
Jakarta ;

Hal. 382 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ag.1 (satu) lembar asli Dokumen Nomor : 13/PPBJ/UND/GH/IX/2006 tanggal 1 September 2006 perihal undangan yang ditujukan kepada PT. SATUVISI PERKASA, yang ditandatangani oleh MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;
- ah.1 (satu) lembar asli Dokumen Nomor : 13/PPBJ/UND/GH/IX/2006 tanggal 1 September 2006 perihal undangan yang ditujukan kepada PT. DEMI GISELA CITRA CINEMA, yang ditandatangani oleh MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;
- ai. 1 (satu) lembar asli Dokumen Nomor : 13/PPBJ/UND/GH/IX/2006 tanggal 1 September 2006 perihal undangan yang ditujukan kepada PT. TRIAS MULYA ABADI PERKASA, yang ditandatangani oleh MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;
- aj. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Hadir, hari/tanggal Senin, 4 September 2006, waktu 11.00 WIB, tempat ruang rapat Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Blok G lantai 9 Jl. Merdeka Selatan 8 – 9 Jakarta Pusat, Acara Pemberitahuan hasil Evaluasi Adminitrasi Surat Penawaran Harga (SPH) Sampul I Pelelangan Umum Pengadaan jasa penyelenggaraan Gema Hukum Ibukota Jakarta dan Pengambilan Asli Jaminan Penawaran dan Asli Surat Dukungan Keuangan dari Bank, yang ditandatangani oleh MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/ Jasa ;
- ak.3 (tiga) lembar asli Dokumen Berita Acara Evaluasi Administrasi Dokumen Penawaran pelelangan umum dalam rangka pengadaan jasa Gema Hukum Ibukota Jakarta kebutuhan Biro Hukum Setdaprov. DKI Jakarta Nomor : 12/PPBJ/BA/GH/VIII/ 2006 tanggal 31 Agustus 2006, yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua, ISMIYATUN, SH selaku

Hal. 383 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris, IWAN SATYOPRODJO, SH, MM, Endang SUMARDI, SH dan OR. ZAKARIAS, SH selaku anggota ;

al. 8 (delapan) lembar asli Dokumen Daftar Check List / Daftar pemeriksaan berkas evaluasi administrasi kegiatan gema hukum Ibukota Jakarta kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta ;

am. 1 (satu) lembar asli Dokumen Nomor : 11/PPBJ/UND/GH/VIII/ 2006 tanggal 29 Agustus 2006 perihal undangan yang ditujukan kepada ISMIYATUN, SH, IWAN SATYOPRODJO, SH, MH, ENDANG SUMARDI, SH dan OR. ZAKARIAS, SH, yang ditandatangani oleh MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;

an.1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar hadir, hari Rabu tanggal 30 Agustus 2006 pukul 09.00 WIB, tempat Biro hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Blok G lantai 9 Jln. Merdeka Selatan 8 – 9 Jakarta Pusat, Acara evaluasi dokumen penawaran pelelangan umum pengadaan jasa penyelenggaraan Gema Hukum Ibukota Jakarta, terdapat tanda tangan peserta nomor urut 1 (satu) an. MADE SUARJAYA, SH sampai dengan nomor urut 5 (lima) an. OR. ZAKARIAS, SH, yang ditanda tangani oleh MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa ;

ao.2 (dua) lembar asli Dokumen Berita Acara Pembukaan dokumen penawaran (SPH) Sampul I pelelangan umum dalam rangka pengadaan jasa Gema Hukum Ibukota Jakarta kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta Nomor : 10/PPBJ/BA/GH/VIII/ 2006 tanggal 29 Agustus 2006, yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua, ISMIYATUN, SH selaku Sekretaris, IWAN SATYOPRODJO, SH, MM, Endang SUMARDI, SH dan OR. ZAKARIAS, SH selaku anggota, berikut 8 (delapan) lembar lampirannya ;

Hal. 384 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ap.6 (enam) lembar Dokumen Surat Penawaran Harga PT. TRENDEKA LESTARI ;
- aq.68 (enam puluh delapan) lembar Dokumen Proposal Teknis PT. TRENDEKA LESTARI ;
- ar. 234 (dua ratus tiga puluh empat) Data Administrasi PT. TRENDEKA LESTARI ;
- as.195 (seratus sembilan puluh lima) Data Penawaran PT. ADILA JAYA SUKSES ;
- at. 1 (satu) lembar asli dokumen Nomor : 09/PPBJ/UND/GH/VIII/2006 tanggal 28 Agustus 2006 perihal Undangan yang ditujukan kepada ISMIYATUN, SH, IWAN SATYOPRODJO, SH, MH, ENDANG SUMARDI, SH dan OR. ZAKARIAS, SH, yang ditandatangani oleh MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;
- au.1 (satu) lembar asli Dokumen Nomor : 08/PPBJ/UND/GH/VIII/2006 tanggal 28 Agustus 2006 perihal Undangan yang ditujukan kepada Direktur / Pimpinan PT., yang ditandatangani oleh MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta, berikut 1 (satu) lembar lampirannya ;
- av.1 (satu) lembar asli dokumen Nomor : 07/PPBJ/UND/GH/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 perihal Undangan yang ditujukan kepada Direktur / Pimpinan PT., yang ditandatangani oleh MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;
- aw. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Hadir Hari Jumat s.d Senin, tanggal 25 s.d 28 Agustus 2006 pukul 08.00 s.d 16.00 WIB, tempat Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Blok G lantai 9 Jl. Merdeka Selatan 8 – 9 Jakarta Pusat, Acara Pemasukan SPH pelelangan umum pengadaan jasa penyelenggaraan Gema Hukum Ibukota Jakarta, terdapat tanda tangan peserta nomor urut 1 (satu) an. MADE SUARJAYA, SH sampai dengan nomor urut 14 (empat belas) an. TRIYITNO – PT. MEGAVISION, yang ditandatangani oleh

Hal. 385 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa ;

ax.1 (satu) lembar asli Dokumen ADDENDUM Rencana Kerja dan Syarat-syarat pelelangan umum dengan Pasca Kualifikasi Nomor : 02/PPBJ/RKS/GH/VIII/2006 tanggal 11 Agustus 2006, tertanggal 24 Agustus 2006 yang ditandatangani oleh MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Menyetujui JORNAL E. SIAHAAN selaku Kepala Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta ;

ay.2 (dua) lembar asli Dokumen Berita Acara Penjelasan Rencana Kerja dan Syarat-syarat pelelangan umum dalam rangka pengadaan jasa Gema Hukum Ibukota Jakarta Nomor : 06/PPBJ/BA/GH/VII/2006, yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua, ISMIYATUN, SH selaku Sekretaris, IWAN SATYOPRODJO, SH, MM, Endang SUMARDI, SH dan OR. ZAKARIAS, SH selaku anggota ;

az.1 (satu) lembar asli Dokumen Nomor : 05/PPBJ/UND/GH/VIII/2006 tanggal 14 Agustus 2006 perihal undangan yang ditujukan kepada Direktur / Pimpinan PT., yang ditandatangani oleh MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta, berikut 1 (satu) lembar lampirannya ;

ba.1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Hadir Hari Kamis, tanggal 14 Agustus 2006 pukul 14.00 WIB, tempat Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Blok G lantai 9 Jl. Merdeka Selatan 8 – 9 Jakarta Pusat, Acara Pelaksanaan Penjelasan (Aanwijzing) rencana kerja dan syarat-syarat pelelangan umum pengadaan jasa penyelenggaraan Gema Hukum Ibukota Jakarta, terdapat tanda tangan peserta nomor urut 1 (satu) an. MADE SUARJAYA, SH sampai dengan nomor urut 17 (tujuh belas) an. SLAMET R – PT. DAYA MEKAR, yang ditandatangani oleh MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa ;

Hal. 386 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bb.1 (satu) lembar asli Dokumen Nomor : 04/PPBJ/UND/GH/VIII/2006 tanggal 14 Agustus 2006 perihal Undangan yang ditujukan kepada ISMIYATUN, SH, IWAN SATYOPRODJO, SH, MH, ENDANG SUMARDI, SH dan OR. ZAKARIAS, SH, yang ditandatangani oleh MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;
- bc.2 (dua) lembar asli Dokumen Daftar Hadir Pendaftaran Pelelangan Umum Pengadaan Gema Hukum Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta Tahun Anggaran 2006, dengan nomor urut 1 (satu) dari PT. PANCA KARYA GUMILANG an. JOKO SUSILO sampai dengan nomor urut 17 (tujuh belas) dari RADITYA PUTRA BAHTERA an. GUNTUR INDRAYANA, tertanggal 15 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh MADE SUARJAYA selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa ;
- bd.2 (dua) lembar asli Dokumen Peserta Hadir Pendaftaran Pelelangan Umum Pengadaan Gema Hukum Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta Tahun Anggaran 2006, dengan nomor urut 1 (satu) dari PT. PANCA KARYA GUMILANG an. JOKO SUSILO sampai dengan nomor urut 17 (tujuh belas) dari RADITYA PUTRA BAHTERA an. GUNTUR INDRAYANA, tertanggal 25 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh MADE SUARJAYA selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa ;
- be.2 (dua) lembar asli Dokumen Pengumuman Lelang Nomor 03/PPBJ/L/Peng/VIII/2006, tanggal 14 Agustus 2006, yang ditandatangani oleh MADE SUARJAYA selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa ;
- bf. 1 (satu) lembar kliping koran MEDIA INDONESIA Senin, 14 Agustus 2006/NO. 9365/Tahun XXXVII perihal Pengumuman Lelang No. 03/PPBJ/L/Peng/VIII/2006 ;
- bg.1 (satu) lembar asli Dokumen Kwitansi IKL – 046143 tertanggal 14 Agustus 2006, berikut 1 (satu) lembar asli dokumen Faktur Pajak Standar dengan Kode dan Nomor Seri CXTKC-035-0068411, tertanggal 14 Agustus 2006 yang ditandatangani oleh PRIANTO A. SURYONO selaku Finance Controller PT. CITRA MEDIA NUSA PRIMA dan 12 (dua belas) lembar asli dokumen Rencana Kerja dan Syarat-syarat

Hal. 387 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelelangan umum dengan Pascakualifikasi Nomor : 02/PPBJ/RKS/GH/VIII/2006 tanggal 11 Agustus 2006 yang ditandatangani oleh MADE SUARJAYA selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan mengetahui JORNAL E. SIAHAAN selaku Kepala Biro Hukum Setdapriv DKI Jakarta berikut Lampiran I, II dan III ;

bh.1 (satu) lembar asli Dokumen Nomor : 01/PPBJ/UND/GH/VIII/2006 tanggal 10 Agustus 2006 perihal undangan yang ditujukan kepada ISMIYATUN, SH, IWAN SATYOPRODJO, SH, MH, ENDANG SUMARDI, SH dan OR. ZAKARIAS, SH, yang ditandatangani oleh MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;

bi. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Hadir pada Hari/Tanggal Jum'at, 11 September 2006 waktu 14.00 WIB, tempat Ruang Rapat Biro hukum Setdaprov DKI Jakarta Blok G lantai 9 Jl. Merdeka Selatan 8 – 9 Jakarta Pusat, Acara Persiapan pelelangan umum pengadaan jasa penyelenggaraan Gema Hukum Ibukota Jakarta, yang dihadiri oleh ISMIYATUN, SH, IWAN SATYOPRODJO, SH, MH, ENDANG SUMARDI, SH dan OR. ZAKARIAS, SH, yang ditandatangani oleh MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta, berikut 1 (satu) lembar asli Notulen Rapat ;

bj. 2 (dua) lembar foto copy Dokumen Keputusan Kepala Biro Perlengkapan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 2747/073.532 tentang Penetapan Patoka Harga Satuan Barang Insidental Kebutuhan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk Kebutuhan Biro Hukum Provinsi DKI Jakarta, tertanggal 17 Juli 2006 yang ditandatangani oleh Ir. EKO BHARUNA, MT, berikut 2 (dua) lembar lampirannya ;

bk.1 (satu) lembar asli Dokumen Nomor : 475/-077.521 tertanggal 2 Agustus 2006 perihal Permintaan pelelangan umum Gema Hukum Ibukota Jakarta di Stasiun Televisi Swasta Nasional, yang ditujukan kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta, yang

Hal. 388 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum DKI Jakarta, berikut 1 (satu) lembar lampirannya ;

35. 1 (satu) bundel asli Dokumen pembayaran atas Pengadaan Jasa Gema Hukum Ibukota Jakarta Dalam Rangka Sosialisasi Produk Hukum melalui media Televisi Swasta Nasional Kebutuhan Biro Hukum Sekda Prov. DKI Jakarta antara Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan PT. TRENDEKA LESTARI Nomor 588/077.92, yang berisi antara lain:
- a. 1 (satu) lembar asli tindisan Dokumen SPM Giro No. 00208572006 TA. 2006 sebesar Rp. 3.891.600.000,- (tiga milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran biaya pengadaan jasa gema hukum kebutuhan Biro Hukum Sekdaprov DKI Jakarta, Kontrak No. 588/077.92 ;
 - b. 1 (satu) lembar asli Dokumen Kwitansi PT. TRENDEKA LESTARI No. 030/TL/X/2006 tertanggal 8 November 2006, sebesar Rp. 4.554.000.000,- (empat milyar lima ratus lima puluh empat juta rupiah), terdapat tanda tangan diatas materai 6.000 (enam ribu rupiah) an. ANNA DALILA selaku Direktur PT. TRENDEKA LESTARI dan an. H. BUDIYONO selaku Pemegang Kas Setdaprov DKI Jakarta ;
 - c. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 1607/SPP/SWD/BB/XI/2006 tertanggal 8 November 2006, yang ditanda tangani an. H. BUDIYONO selaku Pemegang Kas Setdaprov DKI Jakarta dan an. HARI SANDJOJO, MJ selaku Asisten Keuangan ;
 - d. 1 (satu) lembar asli Dokumen Surat Permintaan Pembayaran No. 1607/SPP/SWD/BB/XI/2006 tertanggal 8 November 2006, yang ditanda tangani an. H. BUDIYONO selaku Pemegang Kas Setdaprov DKI Jakarta dan an. HARI SANDJOJO, MJ selaku Asisten Keuangan ;
 - e. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Rincian Rencana Penggunaan Beban Tetap No. 126/SPP/2006 tanggal 8 November 2006, ditandatangani an. BAHIR ROMSAH selaku

Hal. 389 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemegang Kas Cabang dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH,
Msi selaku Kepala Biro Hukum ;
- f. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Barang (BAPB) Nomor : 24/BAPB/BH/X/2006 tertanggal 17 Oktober 2006, ditanda tangani oleh Panitia Pemeriksa Barang nomor urut 1 (satu) Ketua sampai dengan 5 (lima) anggota, an. ANNA DALILA selaku Pimpinan PT. TRENDEKA LESTARI dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 3 (tiga) lembar asli lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang ;
- g. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 18/BAST/BH/X/2006 tanggal 18 Oktober 2006, yang ditanda tangani an. IRUSWANDI, SH selaku Pengurus Barang unit Biro Hukum, an. ANNA DALILA selaku Pimpinan PT. TRENDEKA LESTARI dan mengetahui an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 3 (tiga) lembar asli lampiran Berita Acara Serah Terima Barang ;
- h. 2 (dua) lembar asli Dokumen Berita Acara Bobot Volume Pekerjaan Penayangan Jasa Gema Hukum Ibukota Jakarta dalam rangka Sosialisasi produk hukum melalui media televisi swasta nasional kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta TA. 2006 tanggal 17 Oktober 2006, yang ditanda tangani an. ANNA DALILA selaku Pimpinan PT. TRENDEKA LESTARI dan mengetahui an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar Daftar Hadir ;
- i. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Penyerahan Pekerjaan tertanggal 17 Oktober 2006, yang ditandatangani an. ANNA DALILA selaku Pimpinan PT. TRENDEKA LESTARI dan mengetahui an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 6 (enam) lembar asli dokumen POST TRANSMISSION LOG ;
36. 1 (satu) bundel Dokumen terkait pengadaan Gema Hukum 2006 oleh PT. Trendeka Lestari, berisi antara lain :
- a. 1 (satu) lembar asli Dokumen Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran PT. Trendeka Lestari tahun 2006 dengan tema

Hal. 390 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



- “CINTA JAKARTA PEMDA DKI”, terdapat tandatangan an. ANNA D. Tertanggal 21/4/09 ;
- b. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen Tanda Terima “United Trend”, diterima oleh PT. Aktifindo, tercantum Nama Barang : BG 302533 Bank DKI 18/10 Rp 100 Juta, untuk pembayaran DP. Produksi Cinta Jakarta, ditandatangani oleh VERA selaku yang menerima pada tanggal 18 Oktober 2006;
- c. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen Tanda Terima “United Trend”, diterima oleh PT. Aktifindo, tercantum Nama Barang : 1 lembar Bilyet Giro Bank DKI No. BI 302536 tanggal 15-11-06 sebesar Rp 370.000.000,00 ditandatangani oleh HARMONO selaku yang menerima pada tanggal 14 November 2006 ;
37. 1 (satu) bundel Dokumen yang terkait penayangan Gema Hukum di Indosiar, antara lain :
- a. 1 (satu) bundel yang terdiri dari :
- 1) 1 (satu) lembar asli tindisan INVOICE Nomor 023521 tertanggal 30 September 2006 sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) ;
 - 2) 1 (satu) lembar asli tindisan FAKTUR PAJAK STANDAR Nomor seri : DKRPV-091-0022446 tertanggal 1 Oktober 2006 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
 - 3) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Rekening Koran PT. Indosiar Visual Mandiri pada Bank Central Asia Nomor : 1623123450 periode 31 Agustus s/d 30 September 2006 ;
 - 4) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Rekening Koran PT. Indosiar Visual Mandiri pada Bank Central Asia Nomor : 1623123450 periode 30 November s/d 31 Desember 2006;
- b. 1 (satu) bundel yang terdiri dari :
- 1) 1 (satu) lembar asli tindisan INVOICE Nomor 023522 tertanggal 30 September 2006 sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) ;
 - 2) 1 (satu) lembar asli tindisan FAKTUR PAJAK STANDAR Nomor seri : DKRPV-091-0022093 tertanggal 1 Oktober 2006 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) lembar asli tindisan POST TRANSMISSION LOG pada tanggal 19 September 2006 ;
- 4) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Rekening Koran PT. Indosiar Visual Mandiri pada Bank Central Asia Nomor : 1623123450 periode 30 November s/d 31 Desember 2006
- c. 1 (satu) bundel yang terdiri dari :
 - 1) 1 (satu) lembar asli tindisan INVOICE Nomor 023523 tertanggal 30 September 2006 sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) ;
 - 2) 1 (satu) lembar asli tindisan FAKTUR PAJAK STANDAR Nomor seri : DKRPV-091-0022472 tertanggal 1 Oktober 2006 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
 - 3) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Rekening Koran PT. Indosiar Visual Mandiri pada Bank Central Asia Nomor : 1623123450 periode 30 November s/d 31 Desember 2006;
 - 4) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Rekening Koran PT. Indosiar Visual Mandiri pada Bank Central Asia Nomor : 1623123450 periode 30 September s/d 31 Oktober 2006 ;
- d. 1 (satu) bundel yang terdiri dari :
 - 1) 1 (satu) lembar asli tindisan INVOICE Nomor 023863 tertanggal 30 September 2006 sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) ;
 - 2) 1 (satu) lembar asli tindisan FAKTUR PAJAK STANDAR Nomor seri : DKRPV-091-0022408 tertanggal 1 Oktober 2006 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
 - 3) 2 (dua) lembar asli tindisan POST TRANSMISSION LOG pada tanggal 24 s/d 26 September 2006 ;
 - 4) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Rekening Koran PT. Indosiar Visual Mandiri pada Bank Central Asia Nomor : 1623123450 periode 30 November s/d 31 Desember 2006;
- e. 1 (satu) bundel yang terdiri dari :
 - 1) 1 (satu) lembar asli tindisan INVOICE Nomor 024039 tertanggal 31 Oktober 2006 sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) ;

Hal. 392 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) lembar asli tindisan FAKTUR PAJAK STANDAR Nomor seri : DKRPV-091-0023006 tertanggal 1 November 2006 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- 3) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Rekening Koran PT. Indosiar Visual Mandiri pada Bank Central Asia Nomor : 1623123450 periode 30 September s/d 31 Oktober 2006 ;
- 4) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Rekening Koran PT. Indosiar Visual Mandiri pada Bank Central Asia Nomor : 1623123450 periode 30 November s/d 31 Desember 2006;
- f. 1 (satu) bundel yang terdiri dari :
 - 1) 1 (satu) lembar asli tindisan INVOICE Nomor 024040 tertanggal 31 Oktober 2006 sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) ;
 - 2) 1 (satu) lembar asli tindisan FAKTUR PAJAK STANDAR Nomor Seri : DKRPV-091-0022606 tertanggal 1 November 2006 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
 - 3) 1 (satu) lembar asli tindisan POST TRANSMISSION LOG pada tanggal 9 s/d 10 Oktober 2006 ;
 - 4) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Rekening Koran PT. Indosiar Visual Mandiri pada Bank Central Asia Nomor : 1623123450 periode 30 November s/d 31 Desember 2006;
- g. 1 (satu) bundel yang terdiri dari :
 - 1) 1 (satu) lembar asli tindisan INVOICE Nomor 024041 tertanggal 31 Oktober 2006 sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) ;
 - 2) 1 (satu) lembar asli tindisan FAKTUR PAJAK STANDAR Nomor seri : DKRPV-091-0023007 tertanggal 1 November 2006 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
 - 3) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Rekening Koran PT. Indosiar Visual Mandiri pada Bank Central Asia Nomor : 1623123450 periode 30 November s/d 31 Desember 2006;

Hal. 393 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Rekening Koran PT. Indosiar Visual Mandiri pada Bank Central Asia Nomor : 1623123450 periode 31 Agustus s/d 30 September 2006 ;
- h. 1 (satu) bundel yang terdiri dari :
 - 1) 1 (satu) lembar asli tindisan INVOICE Nomor 024042 tertanggal 31 Oktober 2006 sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) ;
 - 2) 1 (satu) lembar asli tindisan FAKTUR PAJAK STANDAR Nomor seri : DKRPV-091-0022607 tertanggal 1 November 2006 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
 - 3) 1 (satu) lembar asli tindisan POST TRANSMISSION LOG pada tanggal 1 s/d 3 Oktober 2006 ;
 - 4) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Rekening Koran PT. Indosiar Visual Mandiri pada Bank Central Asia Nomor : 1623123450 periode 30 November s/d 31 Desember 2006;
- i. 1 (satu) bundel yang terdiri dari :
 - 1) 1 (satu) lembar asli tindisan INVOICE Nomor 024043 tertanggal 31 Oktober 2006 sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) ;
 - 2) 1 (satu) lembar asli tindisan FAKTUR PAJAK STANDAR Nomor seri : DKRPV-091-0023008 tertanggal 1 November 2006 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
 - 3) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Rekening Koran PT. Indosiar Visual Mandiri pada Bank Central Asia Nomor : 1623123450 periode 30 November s/d 31 Desember 2006;
 - 4) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Rekening Koran PT. Indosiar Visual Mandiri pada Bank Central Asia Nomor : 1623123450 periode 30 September s/d 31 Oktober 2006 ;
- j. 1 (satu) bundel yang terdiri dari :
 - 1) 1 (satu) lembar asli tindisan INVOICE Nomor 024287 tertanggal 31 Oktober 2006 sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) ;
 - 2) 1 (satu) lembar asli tindisan FAKTUR PAJAK STANDAR Nomor seri : DKRPV-091-0022844 tertanggal 1 November 2006 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Hal. 394 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) lembar asli tindisan POST TRANSMISSION LOG pada tanggal 15 s/d 17 Oktober 2006 ;
- 4) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Rekening Koran PT. Indosiar Visual Mandiri pada Bank Central Asia Nomor : 1623123450 periode 30 November s/d 31 Desember 2006;
38. 1 (satu) bundel Dokumen Bilyet Giro pembayaran terkait pengadaan Gema Hukum 2006, antara lain :
 - a. 1 (satu) lembar BILYET GIRO Bank DKI Capem Tebet Barat No.BI 243115 tanggal 22-09-06, memindahkan dana sejumlah Rp 208.000.000,00 untuk untung rekening nomor 162.3123.450 atas nama PT. Indosiar ;
 - b. 1 (satu) lembar BILYET GIRO Bank DKI Capem Tebet Barat No.BI 243116 tanggal 29-09-06, memindahkan dana sejumlah Rp 208.000.000,00 untuk untung rekening nomor 162.3123.450 atas nama PT. Indosiar ;
 - c. 1 (satu) lembar BILYET GIRO Bank DKI Capem Tebet Barat No.BI 243117 tanggal 06-10-06, memindahkan dana sejumlah Rp 208.000.000,00 untuk untung rekening nomor 162.3123.450 atas nama PT. Indosiar sejumlah Rp 208.000.000,- ;
 - d. 1 (satu) lembar BILYET GIRO Bank DKI Capem Tebet Barat No.BI 243118 tanggal 13-10-06, memindahkan dana sejumlah Rp 208.000.000,00 untuk untung rekening nomor 162.3123.450 atas nama PT. Indosiar ;
 - e. 1 (satu) lembar BILYET GIRO Bank DKI Capem Tebet Barat No.BI 302533 tanggal 18-10-06, memindahkan dana sejumlah Rp 100.000.000,00 untuk untung rekening nomor (tanpa nomor rekening) atas nama PT. Aktifindo Cipta Media;
 - f. 1 (satu) lembar BILYET GIRO Bank DKI Capem Tebet Barat No.BI 302536 tanggal 15-11-06, memindahkan dana sejumlah Rp 370.000.000,00 untuk untung rekening nomor (tanpa nomor rekening) atas nama PT. Aktifindo Cipta Media;
 - g. 1 (satu) lembar BILYET GIRO Bank DKI Capem Tebet Barat No.BI 337152 tanggal 05-12-06, memindahkan dana sejumlah Rp 220.000.000,00 untuk untung rekening nomor 162.3123.450 atas nama PT. Indosiar Visual Mandiri ;

Hal. 395 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. 1 (satu) lembar BILYET GIRO Bank DKI Capem Tebet Barat No.BI 337157 tanggal 19-12-06, memindahkan dana sejumlah Rp 330.000.000,00 untuk untung rekening nomor 162.3123.450 atas nama PT. Indosiar Visual Mandiri ;
- i. 1 (satu) lembar foto copy KTP Nomor : 09.5301.471259.0301 atas nama ANNA DALILA ;
- j. 1 (satu) lembar CEK Bank DKI Capem Tebet Barat No.CI 852609 tanggal 15 November 2006 sejumlah Rp 30.000.000,00 ;
- k. 1 (satu) lembar CEK Bank DKI Capem Tebet Barat No.BI 243119 tanggal 15 September 2006 sejumlah Rp 208.000.000,00 ;
- l. 1 (satu) lembar CEK Bank DKI Capem Tebet Barat No.BI 337161 tanggal 18 Desember 2006 sejumlah Rp 60.000.000,00 ;
- 39. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Nomor : 403/A/077.922 tentang Pengadaan Jasa Kurir Untuk Penyampaian 1 (satu) Booklet Peraturan Perundang-undangan kepada 3.600 Tokoh Masyarakat Di Wilayah Provinsi DKI Jakarta Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta tanggal 19 Juni 2006 untuk CV. POS INDONESIA ;
- 40. 1 (satu) bundel Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Buku Himpunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta antara Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta dengan CV. KARYA BERSAMA ABADI nomor : 580/A/077.91 tanggal 3 Agustus 2006 ;
- 41. 1 (satu) bundel Dokumen pembayaran atas Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Buku Himpunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta antara Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta dengan CV. KARYA BERSAMA ABADI nomor : 580/A/077.91 tanggal 3 Agustus 2006, yang berisi antara lain :
 - a. 1 (satu) lembar asli Dokumen SPM Giro No : 00329572006 Tahun 2006 tertanggal 28 Desember 2006, sebesar Rp. 51.072.250,- (lima puluh satu juta tujuh puluh dua ribu dua

Hal. 396 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ratus lima puluh rupiah) kepada CV. KARYA BERSAMA ABADI ;
- b. 1 (satu) lembar asli Kwitansi CV. KARYA BERSAMA ABADI tertanggal 18 Desember 2006 sebesar Rp. 57.035.000,- (lima puluh tujuh juta tiga puluh lima ribu rupiah), yang ditandatangani diatas materai 6.000 an. POLLY SIAHAYA selaku Pimpinan CV. KARYA BERSAMA ABADI dan an. BAHIR ROMSAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum DKI Jakarta, terdapat stempel dan tandatangan an. JORNAL E. SIAHAAN, Sh, Msi selaku Kepala Biro Hukum Prov. DKI Jakarta ;
 - c. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 2556/SPP/SWD/BB/XII/2006 tertanggal 18 Desember 2006, yang ditanda tangani an. H. BUDIYONO selaku Pemegang Kas Setdaprov DKI Jakarta dan an. Drs. SYAUKI YAHYA selaku Kepala Biro Keuangan ;
 - d. 1 (satu) lembar asli Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap No. 2556/SPP/SWD/BB/XII/2006 tertanggal 18 Desember 2006, yang ditanda tangani an. H. BUDIYONO selaku Pemegang Kas Setdaprov DKI Jakarta dan an. Drs. SYAUKI YAHYA selaku Kepala Biro Keuangan, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Daftar Rincian rencana penggunaan beban tetap ;
 - e. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Rincian Penggunaan Beban Tetap No. 186/SPP/2006 tertanggal (tanpa tanggal) yang ditandatangani oleh an. BAHIR ROMSAH selaku Pemegang Kas Cabang dan an. JORNAL E. SIAHAAN selaku Kepala Biro Hukum ;
 - f. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 36/BAST/BH/XI/2006 tanggal 19 Oktober 2006, yang ditanda tangani an. IRUSWANDI, SH.M.Kn selaku Pengurus Barang unit Biro Hukum, an. J POLLY SIAHAYA selaku Pimpinan CV. KARYA BERSAMA ABADI dan mengetahui an. JORNAL EFFENDI SIAHAAN, SH, MSI selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Serah Terima Barang ;

Hal. 397 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Barang (BAPB) Nomor : 30/BAPB/BH/XI/2006 tertanggal 18 Oktober 2006, ditanda tangani oleh Panitia Pemeriksa Barang nomor urut 1 (satu) Ketua sampai dengan 5 (lima) anggota, an. POLLY SIAHAYA selaku Pimpinan CV. KARYA BERSAMA ABADI dan mengetahui an. JORNAL EFFENDI SIAHAAN, SH, MSi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang ;
42. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Nomor : 447/A/078.23 tentang Pengadaan Konsumsi Untuk Peserta Penyuluhan Hukum Terpadu Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta tanggal 19 Juli 2006 untuk CV. JURINDO PUTRA UTAMA ;
43. 1 (satu) bundel Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Dalam Rangka Seminar menumbuhkan Kesadaran Minat baca Masyarakat terhadap Buku Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta antara Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta dengan CV. MULTITAMA PERSADA Nomor : 627/A/077.92 tanggal 22 September 2006 ;
44. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran atas Seminar Menumbuhkan Kesadaran Minat baca Masyarakat terhadap Buku Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta antara Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta dengan CV. MULTITAMA PERSADA nomor : 627/A/077.92 tanggal 22 September 2006, yang berisi antara lain :
- a. 1 (satu) lembar asli Dokumen SPM Giro No : 00307082006 Tahun 2006 tertanggal 23 Desember 2006, sebesar Rp. 82.564.323,- (delapan puluh dua juta lima ratus enam puluh empat ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah) kepada CV. MULTI TAMA PERSADA ;
- b. 1 (satu) lembar asli Kwitansi CV. MULTITAMA PERSADA tertanggal 11 Desember 2006 sebesar Rp. 96.617.825,- (sembilan puluh enam juta enam ratus tujuh belas ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah), yang ditandatangani diatas materei 6.000 an. JEFRI SIALLAGAN selaku Direktur CV. MULTITAMA PERSADA dan an. BAHIR ROMSAH

Hal. 398 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum DKI Jakarta, terdapat stempel dan tandatangan an. JORNAL E. SIAHAAN, Sh, Msi selaku Kepala Biro Hukum Prov. DKI Jakarta ;

- c. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 2302/SPP/SWD/BB/XII/2006 tertanggal 11 Desember 2006, yang ditanda tangani an. H. BUDIYONO selaku Pemegang Kas Setdaprov DKI Jakarta dan an. Drs. SYAUKI YAHYA selaku Kepala Biro Keuangan ;
- d. 1 (satu) lembar asli Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap No. 2302/SPP/SWD/BB/XII/2006 tertanggal 11 Desember 2006, yang ditanda tangani an. H. BUDIYONO selaku Pemegang Kas Setdaprov DKI Jakarta dan an. Drs. SYAUKI YAHYA selaku Kepala Biro Keuangan, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Daftar Rincian rencana penggunaan beban tetap ;
- e. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Rincian Penggunaan Beban Tetap No. 170/SPP/2006 tertanggal (tanpa tanggal) yang ditandatangani oleh an. BAHIR ROMSAH selaku Pemegang Kas Cabang dan an. JORNAL E. SIAHAAN selaku Kepala Biro Hukum ;
- f. 1 (satu) lembar asli Dokumen Invoice CV. MULTITAMA PERSADA Nomor : 038/INV/PM/XI/2006 tertanggal November 2006, yang ditanda tangani an. JEFRI SIALLAGAN selaku Direktur CV. MULTITAMA PERSADA ;
- g. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 22/BAST/BH/XI/2006 tanggal 1 November 2006, yang ditanda tangani an. IRUSWANDI, SH.M.Kn selaku Pengurus Barang unit Biro Hukum, an. JEFRI SIALLAGAN selaku Direktur CV. MULTITAMA PERSADA dan mengetahui an. JORNAL EFFENDI SIAHAAN, SH, MSI selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Serah Terima Barang ;
- h. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Barang (BAPB) Nomor : 26/BAPB/BH/XI/2006 tertanggal 1 November 2006, ditanda tangani oleh Panitia Pemeriksa Barang nomor urut 1 (satu) Ketua sampai dengan 5 (lima)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota, an. JEFRI SIALLAGAN selaku Direktur CV. MULTITAMA PERSADA dan mengetahui an. JORNAL EFFENDI SIAHAAN, SH, MSi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang ;

45. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Nomor : 01/075.72 tentang Pengadaan Liputan Televisi Penyuluhan Terpadu Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta tanggal 31 Agustus 2006 untuk CV. VEGAR BINTANG PRIMA ;
46. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Nomor : 454/A/078.23 tentang Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) untuk pembinaan Keluarga sadar Hukum Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta tanggal 19 Juli 2006 untuk PT. FERDINAN SENTOSA ABADI ;
47. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Nomor : 02/075.31 tentang Pengadaan Pemuatan Peraturan Perundang-undangan di Media Cetak Harian Ibukota kebutuhan Biro Hukum setdaprov DKI Jakarta tanggal 31 Agustus 2006 untuk CV. ISWARI MANINJAU MASA ;
48. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran atas Surat Perintah Kerja Nomor : 02/075.31 tentang Pengadaan Pemuatan Peraturan Perundang-undangan di Media Cetak Harian Ibukota kebutuhan Biro Hukum setdaprov DKI Jakarta tanggal 31 Agustus 2006 untuk CV. ISWARI MANINJAU MASA, yang berisi antara lain :
 - a. 1 (satu) lembar asli Dokumen SPM Giro No : 00304202006 Tahun 2006 tertanggal 22 Desember 2006, sebesar Rp. 41.862.500,- (empat puluh satu juta delapan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) kepada CV. ISWARI MANINJAU MASA ;
 - b. 1 (satu) lembar asli Kwitansi CV. ISWARI MANINJAU MASA tertanggal 18 Desember 2006 sebesar Rp. 46.750.000,- (empat puluh enam juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah), yang ditandatangani diatas materei 6.000 an. NY. NURSATIA MANALU selaku Direktur CV. ISWARI MANINJAU MASA dan an. BAHIR ROMSAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum DKI Jakarta, terdapat stempel dan

Hal. 400 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tandatangan an. JORNAL E. SIAHAAN, Sh, Msi selaku Kepala Biro Hukum Prov. DKI Jakarta ;
- c. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 2557/SPP/SWD/BB/XII/2006 tertanggal 18 Desember 2006, yang ditanda tangani an. H. BUDIYONO selaku Pemegang Kas Setdaprov DKI Jakarta dan an. Drs. SYAUKI YAHYA selaku Kepala Biro Keuangan ;
 - d. 1 (satu) lembar asli Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap No. 2557/SPP/SWD/BB/XII/2006 tertanggal 18 Desember 2006, yang ditanda tangani an. H. BUDIYONO selaku Pemegang Kas Setdaprov DKI Jakarta dan an. Drs. SYAUKI YAHYA selaku Kepala Biro Keuangan, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Daftar Rincian rencana penggunaan beban tetap ;
 - e. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Rincian Penggunaan Beban Tetap No. 188/SPP/2006 tertanggal 18 Desember 2006 yang ditandatangani oleh an. BAHIR ROMSAH selaku Pemegang Kas Cabang dan an. JORNAL E. SIAHAAN selaku Kepala Biro Hukum ;
 - f. 1 (satu) lembar asli Dokumen Faktur CV. ISWARI MANINJAU MASA Nomor : 012/FK/IMM/XII/2006 tertanggal Desember 2006, yang ditanda tangani an. NY. NURSATIA MANALU selaku Direktur CV. ISWARI MANINJAU MASA ;
 - g. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 29/BAST/BH/XI/2006 tanggal 14 Desember 2006, yang ditanda tangani an. IRUSWANDI, SH.M.Kn selaku Pengurus Barang unit Biro Hukum, an. NY. NURSATIA MANALU selaku Direktur CV. ISWARI MANINJAU MASA dan mengetahui an. HR. DEDED SUKANDAR, SH, MH selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Serah Terima Barang;
 - h. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Barang (BAPB) Nomor : 39/BAPB/BH/VII/2006 tertanggal 14 Desember 2006, ditanda tangani oleh Panitia Pemeriksa Barang nomor urut 1 (satu) Ketua sampai dengan 5 (lima) anggota, an. NY. NURSATIA MANALU selaku Direktur CV.

Hal. 401 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISWARI MANINJAU MASA dan mengetahui an. HR. DEDED SUKANDAR, SH, MH selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang;

49. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Nomor : 373/A/077.922 tentang Pengadaan Buku Abstrak Peraturan Perundang-undangan Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta tanggal 8 Juni 2006 untuk CV. CITRA SARANA MULY ;
50. 1 (satu) bundel Dokumen pembayaran atas Surat perintah Kerja Nomor : 373/A/077.922 tentang Pengadaan Buku Abstrak Peraturan Perundang-undangan Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta tanggal 8 Juni 2006 untuk CV. CITRA SARANA MULYA, yang berisi antara lain :
 - a. 1 (satu) lembar asli Dokumen SPM Giro No : 00182742006 Tahun 2006 tertanggal 9 Oktober 2006, sebesar Rp. 28.995.937,- (dua puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah) kepada CV. CITRA SARANA MULYA sehubungan Kontrak Nomor. 373/A/077.922, tanggal 19 Juli 2006 ;
 - b. 1 (satu) lembar asli Kwitansi CV. CITRA SARANA MULYA tertanggal 29 September 2006 sebesar Rp. 32.381.250,- (tiga puluh dua juta tiga ratus delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah), yang ditandatangani diatas materei 6.000 an. SUDIRMAN selaku Direktur CV. CITRA SARANA MULYA dan an. BAHIR ROMSAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum DKI Jakarta, terdapat stempel dan tandatangan an. JORNAL E. SIAHAAN, Sh, Msi selaku Kepala Biro Hukum Prov. DKI Jakarta ;
 - c. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 1310/SPP/SWD/BB/X/2006 tertanggal 29 September 2006, yang ditanda tangani an. H. BUDIYONO selaku Pemegang Kas Setdaprov DKI Jakarta dan an. Drs. SYAUKI YAHYA selaku Kepala Biro Keuangan ;
 - d. 1 (satu) lembar asli Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap No. 1310/SPP/SWD/BB/IX/2006 tertanggal 29 September 2006, yang ditanda tangani an. H. BUDIYONO selaku Pemegang Kas Setdaprov DKI Jakarta dan an. Drs.

Hal. 402 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SYAUKI YAHYA selaku Kepala Biro Keuangan, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Daftar Rincian rencana penggunaan beban tetap ;
- e. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 04/BAST/BH/VII/2006 tanggal 6 Juli 2006, yang ditanda tangani an. IRUSWANDI, SH.M.Kn selaku Pengurus Barang unit Biro Hukum, an. SUDIRMAN selaku Direktur CV.CITRA SARANA MULYA dan mengetahui an. HR. DEDED SUKANDAR, SH, MH selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Serah Terima Barang ;
- f. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Barang (BAPB) Nomor : 07/BAPB/BH/VII/2006 tertanggal 6 Juli 2006, ditanda tangani oleh Panitia Pemeriksa Barang nomor urut 1 (satu) Ketua sampai dengan 5 (lima) anggota, an. SUDIRMAN selaku Pimpinan CV.CITRA SARANA MULYA dan mengetahui an. HR. DEDED SUKANDAR, SH, MH selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang ;
51. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Nomor : 424/A/078.23 tentang Pengadaan Percetakan Buku Booklet Peraturan Perundang-undangan Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta tanggal 8 Juni 2006 untuk CV. WIDYA JAYA ;
52. 1 (satu) bundel Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Penayangan Hukum Melalui Penayangan Materi Vidiotron Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta antara Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta dengan CV. DEWI CITRA MANDIRI nomor : 519/A/073 tanggal 3 Agustus 2006 ;
53. 1 (satu) bundel Dokumen pembayaran atas Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Penayangan Hukum Melalui Penayangan Materi Vidiotron Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta antara Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta dengan CV. DEWI CITRA MANDIRI nomor : 519/A/073 tanggal 3 Agustus 2006, yang berisi antara lain :
- a. 1 (satu) lembar asli Dokumen SPM Giro No : 00231232006 Tahun 2006 tertanggal 28 November 2006, sebesar Rp.

Hal. 403 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 82.250.000,- (delapan puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada CV. DEWI CITRA MANDIRI ;
- b. 1 (satu) lembar asli Kwitansi CV. DEWI CITRA MANDIRI tertanggal 6 November 2006 sebesar Rp. 96.250.000,- (sembilan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang ditandatangani diatas materei 6.000 an. MARWAN selaku Direktur CV. DEWI CITRA MANDIRI dan an. BAHIR ROMSAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum DKI Jakarta, terdapat stempel dan tandatangan an. JORNAL E. SIAHAAN, Sh, Msi selaku Kepala Biro Hukum Prov. DKI Jakarta ;
- c. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 1602/SPP/SWD/BB/XI/2006 tertanggal 6 Nopember 2006, yang ditanda tangani an. H. BUDIYONO selaku Pemegang Kas Setdaprov DKI Jakarta dan an. Drs. SYAUKI YAHYA selaku Kepala Biro Keuangan ;
- d. 1 (satu) lembar asli Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap No. 1602/SPP/SWD/BB/XI/2006 tertanggal 6 November 2006, yang ditandatangani an. H. BUDIYONO selaku Pemegang Kas Setdaprov DKI Jakarta dan an. Drs. SYAUKI YAHYA selaku Kepala Biro Keuangan, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Daftar Rincian rencana penggunaan beban tetap ;
- e. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Rincian Rencana Penggunaan Beban Tetap Nomor : 123/SPP/2006 tanggal 6 November 2006, yang ditanda tangani an. BAHIR ROMSAH selaku Pemegang Kas Cabang dan an. JORNAL E. SIAHAAN, Sh, Msi selaku Kepala Biro Hukum Prov. DKI Jakarta ;
- f. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 10/BAST/BH/X/2006 tanggal 30 Oktober 2006, yang ditanda tangani an. IRUSWANDI, SH.M.Kn selaku Pengurus Barang unit Biro Hukum, an. MARWAN selaku Direktur CV. DEWI CITRA MANDIRI dan mengetahui an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Serah Terima Barang ;

Hal. 404 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Barang (BAPB) Nomor : 15/BAPB/BH/X/2006 tertanggal 30 Oktober 2006, ditanda tangani oleh Panitia Pemeriksa Barang nomor urut 1 (satu) Ketua sampai dengan 5 (lima) anggota, an. MARWAN selaku Direktur CV. DEWI CITRA MANDIRI dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang ;
54. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Nomor : 444/A/078.23 tentang Pengadaan Percetakan Bahan Penyuluhan Pengendalian Pencemaran Udara dan Kawasan Larangan Merokok Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta tanggal 19 Juli 2006 untuk CV. ANDHIKA PATRIA NUSANTARA ;
55. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran atas Surat Perintah Kerja Nomor : 444/A/078.23 tentang Pengadaan Percetakan Bahan Penyuluhan Pengendalian Pencemaran Udara dan Kawasan Larangan Merokok Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta tanggal 19 Juli 2006 untuk CV. ANDHIKA PATRIA NUSANTARA, yang berisi antara lain :
- a. 1 (satu) lembar asli Dokumen SPM Giro No : 00185682006 Tahun 2006 tertanggal 10 Oktober 2006, sebesar Rp. 48.279.000,- (empat puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) kepada CV. ANDHIKA PATRIA NUSANTARA sehubungan Kontrak Nomor. 444/A/078.23, tanggal 19 Juli 2006 ;
- b. 1 (satu) lembar asli Kwitansi CV. ANDHIKA PATRIA NUSANTARA tertanggal 29 September 2006 sebesar Rp. 48.279.000,- (empat puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), yang ditandatangani diatas materei 6.000 an. MULYADI GUNTUR selaku Direktur CV. ANDHIKA PATRIA NUSANTARA dan an. BAHIR ROMSAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum DKI Jakarta, terdapat stempel dan tandatangan an. JORNAL E. SIAHAAN, Sh, Msi selaku Kepala Biro Hukum Prov. DKI Jakarta ;
- c. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 1309/SPP/SWD/BB/IX/2006 tertanggal 29 September 2006, yang ditanda tangani an. H.

Hal. 405 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BUDIYONO selaku Pemegang Kas Setdaprov DKI Jakarta dan an. Drs. SYAUKI YAHYA selaku Kepala Biro Keuangan ;
- d. 1 (satu) lembar asli Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap No. 1309/SPP/SWD/BB/IX/2006 tertanggal 29 September 2006, yang ditanda tangani an. H. BUDIYONO selaku Pemegang Kas Setdaprov DKI Jakarta dan an. Drs. SYAUKI YAHYA selaku Kepala Biro Keuangan, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Daftar Rincian rencana penggunaan beban tetap ;
- f. 1 (satu) lembar asli Dokumen Faktur CV. ANDHIKA PATRIA NUSANTARA Nomor 0017/F/APN/VIII/2006 sebesar Rp. 48.279.000,- (empat puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), ditujukan kepada Yth. Kepala Biro Hukum Setda Prov DKI Jakarta Jl. Medan Merdeka Selatan NO. 8-9, ditandatangani an. MULYADI GUNTUR selaku Direktur CV. ANDHIKA PATRIA NUSANTARA ;
- g. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 05/BAST/BH/VIII/2006 tanggal 16 Agustus 2006, yang ditanda tangani an. IRUSWANDI, SH.M.Kn selaku Pengurus Barang unit Biro Hukum, an. MULYADI GUNTUR selaku Direktur CV. ANDHIKA PATRIA NUSANTARA dan mengetahui an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Serah Terima Barang ;
- h. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Barang (BAPB) Nomor : 08/BAPB/BH/VIII/2006 tertanggal 16 Agustus 2006, ditanda tangani oleh Panitia Pemeriksa Barang nomor urut 1 (satu) Ketua sampai dengan 5 (lima) anggota, an. MULYADI GUNTUR selaku Direktur CV. ANDHIKA PATRIA NUSANTARA dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang;
56. 1 (satu) bundel Perjanjian Pelelangan Umum Pelaksanaan Jasa Talk Show Interaktif di Stasiun Radio Swasta DKI Jakarta Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta nomor 759/077.92 tanggal 17 November 2006 antara Biro Hukum

Hal. 406 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setdaprov DKI Jakarta dengan CV. ASTERMIDO PANTHER HABINDO ;

57. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran atas Pelaksanaan Jasa Talk Show Interaktif di Stasiun Radio Swasta DKI Jakarta Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta nomor 759/077.92 tanggal 17 November 2006 antara Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta dengan CV. ASTERMIDO PANTHER HABINDO, yang berisi antara lain :

a. 1 (satu) lembar asli Dokumen SPM Giro No : 00325762006 Tahun 2006 tertanggal 27 Desember 2006, sebesar Rp. 192.700.000,- (seratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada CV. ASTERMINDO PANTHER HABINDO;

b. 1 (satu) lembar asli Kwitansi CV. ASTERMINDO PANTHER HABINDO tertanggal 6 Desember 2006 sebesar Rp. 225.500.000,- (dua ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), yang ditandatangani diatas materei 6.000 an. ESTER PAULINA P selaku Direktur CV. ASTERMINDO PANTHER HABINDO dan an. BAHIR ROMSAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum DKI Jakarta, terdapat stempel dan tandatangan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, MSi selaku Kepala Biro Hukum Prov. DKI Jakarta ;

c. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 2306/SPP/SWD/BB/XII/2006 tertanggal 11 Desember 2006, yang ditanda tangani an. H. BUDIYONO selaku Pemegang Kas Setdaprov DKI Jakarta dan an. Drs. SYAUKI YAHYA selaku Kepala Biro Keuangan ;

d. 1 (satu) lembar asli Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap No. 2306/SPP/SWD/BB/XII/2006 tertanggal 11 Desember 2006, yang ditanda tangani an. H. BUDIYONO selaku Pemegang Kas Setdaprov DKI Jakarta dan an. Drs. SYAUKI YAHYA selaku Kepala Biro Keuangan, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Daftar Rincian rencana penggunaan beban tetap ;

e. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Rincian Penggunaan Beban Tetap No. 173/SPP/2006 yang ditandatangani oleh an.

Hal. 407 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BAHIR ROMSAH selaku Pemegang Kas Cabang dan an. JORNAL E. SIAHAAN selaku Kepala Biro Hukum ;
- f. 1 (satu) lembar asli Dokumen Faktur CV. ASTERMINDO PANTHER HABINDO Nomor 030/FB/APH/XII/2006 , ditandatangani an. ESTER PAULINA P selaku Direktur CV. ASTERMINDO PANTHER HABINDO dan an. IRUSWANDI, SH.M.Kn selaku Pengurus Barang unit Biro Hukum ;
- g. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Barang (BAPB) Nomor : 31/BAPB/BH/XII/2006 tertanggal 4 Desember 2006, ditanda tangani oleh Panitia Pemeriksa Barang nomor urut 1 (satu) Ketua sampai dengan 5 (lima) anggota, an. ESTER PAULINA P selaku Direktur CV. ASTERMINDO PANTHER HABINDO dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 2 (dua) lembar asli lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang;
- h. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 33/BAST/BH/XII/2006 tanggal 5 Desember 2006, yang ditanda tangani an. IRUSWANDI, SH.M.Kn selaku Pengurus Barang unit Biro Hukum, an. ESTER PAULINA P selaku Direktur CV. ASTERMINDO PANTHER HABINDO dan mengetahui an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 2 (dua) lembar asli lampiran Berita Acara Serah Terima Barang ;
- i. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Serah Terima Pengguna Barang Nomor : 33/BASTPB/BH/XII/2006 tanggal 6 Desember 2006, yang ditanda tangani an. IRUSWANDI, SH.M.Kn selaku Pengurus Barang unit Biro Hukum, an. Drs. NOORMAN, MM selaku Kabag Dokumentasi dan Publikasi dan mengetahui an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 2 (dua) lembar asli lampiran Berita Acara Serah Terima Barang ;
- j. 1 (satu) lembar asli Dokumen Absen Tenaga Ahli Pelaksanaan Talk Show Interaktif di Stasiun Radio Biro Hukum Sekretariat Daerah Prov. DKI Jakarta Tahun 2006, yang ditanda tangani an. ESTER PAULINA P selaku Direktur CV. ASTERMINDO PANTHER HABINDO dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum,

Hal. 408 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut 2 (dua) lembar asli lampiran Berita Acara Serah Terima Barang ;

58. 1 (satu) bundel Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Dalam rangka Pengetikan Peraturan Perundang-undangan Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta antara Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta dengan CV. LESTARI SEJAHTERA nomor : 625/A/077.92 tanggal 22 September 2006 ;
59. 1 (satu) bundel Dokumen pembayaran atas Pengetikan Peraturan Perundang-undangan Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta antara Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta dengan CV. LESTARI SEJAHTERA Nomor : 625/A/077.92 tanggal 22 September 2006, yang berisi antara lain;
 - a. 1 (satu) lembar asli Dokumen SPM Giro No : 00325752006 tertanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp. 60.446.021,- (enam puluh juta empat ratus empat puluh enam ribu dua puluh satu rupiah) kepada CV. LESTARI SEJAHTERA ;
 - b. 1 (satu) lembar asli Kwitansi CV. LESTARI SEJAHTERA tertanggal 11 Desember 2006 sebesar Rp. 71.881.755,- (tujuh puluh satu juta delapan ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah), yang ditandatangani diatas materai 6.000 an. GOKMA AMBARITA selaku Direktur Utama CV. LESTARI SEJAHTERA dan BAHIR ROMSAH selaku Pemegang Kas Cabang, serta terdapat stempel dan tanda tangan an. H. BUDIYONO selaku Pemegang Kas Setdaprov DKI Jakarta, dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum Prov. DKI Jakarta ;
 - c. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 2303/SPP/SWD/BB/XII/2006 tertanggal 11 Desember 2006, yang ditanda tangani an. H. BUDIYONO selaku Pemegang Kas Setdaprov DKI Jakarta dan an. Drs. H. SYAUKI YAHYA selaku Kepala Biro Keuangan ;
 - d. 1 (satu) lembar asli Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap No. 2303/SPP/SWD/BB/XII/2006 tertanggal 11 Desember 2006, yang ditanda tangani an. H. BUDIYONO selaku Pemegang Kas Setdaprov DKI Jakarta dan an. Drs. H. SYAUKI YAHYA selaku Kepala Biro Keuangan ;

Hal. 409 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Rincian Penggunaan Beban Tetap No. 169/SPP/2006 yang ditandatangani oleh an. BAHIR ROMSAH selaku Pemegang Kas Cabang dan an. JORNAL E. SIAHAAN selaku Kepala Biro Hukum ;
- f. 1 (satu) lembar asli Dokumen Faktur CV. LESTARI SEJAHTERA Nomor : 029/FK/LS/XI/2006 yang ditandatangani an. GOKMA AMBARITA selaku Direktur Utama CV. LESTARI SEJAHTERA ;
- g. 1 (satu) lembar asli Dokumen Surat Jalan CV. LESTARI SEJAHTERA Nomor : 037/SJ/LS/X/2006, tertanggal Oktober 2006, yang ditanda tangani an. GOKMA AMBARITA selaku Direktur Utama CV. LESTARI SEJAHTERA ;
- h. 1 (satu) lembar asli Dokumen Invoice CV. LESTARI SEJAHTERA Nomor : 037/INV/LS/XI/2006 tertanggal November 2006, yang ditanda tangani an. GOKMA AMBARITA selaku Direktur Utama CV. LESTARI SEJAHTERA ;
- i. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Barang (BAPB) Nomor : 25/BAPB/BH/X/2006 tertanggal 19 Oktober 2006, ditanda tangani oleh Panitia Pemeriksa Barang nomor urut 1 (satu) Ketua sampai dengan 5 (lima) anggota, an. GOKMA AMBARITA selaku Direktur Utama CV. LESTARI SEJAHTERA dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang ;
- j. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 23/BAST/BH/X/2006 tanggal 19 Oktober 2006, yang ditanda tangani an. IRUSWANDI, SH selaku Pengurus Barang unit Biro Hukum, an. GOKMA AMBARITA selaku Direktur Utama CV. LESTARI SEJAHTERA dan mengetahui an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Serah Terima Barang ;
- k. 2 (dua) lembar asli Dokumen Daftar Hadir Tenaga Ahli CV. LESTARI SEJAHTERA Pengetikan Peraturan Perundang-undangan Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta bulan September 2006, yang ditanda tangani an. GOKMA

Hal. 410 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMBARITA selaku Direktur Utama CV. LESTARI SEJAHTERA ;

- I. 2 (dua) lembar asli Dokumen Daftar Hadir Tenaga Ahli CV. LESTARI SEJAHTERA Pengetikan Peraturan Perundang-undangan Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta bulan Oktober 2006, yang ditanda tangani an. GOKMA AMBARITA selaku Direktur Utama CV. LESTARI SEJAHTERA ;
60. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Nomor : 465/A/078.23 tentang Pengadaan Konsumsi Untuk Pembinaan Keluarga Sadar Hukum Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta tanggal 19 Juli 2006 untuk CV. WIJAYA ANUGERAH KREASINDO ;
61. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Nomor : 384/A/077.922 tentang Pengadaan Percetakan Buku Warta Peraturan Perundang-undangan Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta tanggal 8 juni 2006 untuk CV. SUEZ RAYA ;
62. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran atas Surat Perintah Kerja Nomor : 384/A/077.922 tentang Pengadaan Percetakan Buku Warta Peraturan Perundang-undangan Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta tanggal 8 juni 2006 untuk CV. SUEZ RAYA, yang berisi antara lain :
 - a. 1 (satu) lembar asli Dokumen SPM Giro No : 00182202006 Tahun 2006 sebesar Rp. 29.032.875,- (dua puluh sembilan juta tiga puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) kepada PT. SUEZ JAYA sehubungan Kontrak Nomor. 384/A/077.92 ;
 - b. 1 (satu) lembar asli Kwitansi PT. SUEZ RAYA tertanggal 3 Oktober 2006 sebesar Rp. 32.422.500,- (tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah), yang ditandatangani diatas materei 6.000 an. EDIWIRMAN TAHER selaku Direktur Utama PT. SUEZ JAYA dan BAHIR ROMSAH selaku Pemegang Kas Cabang, serta terdapat stempel dan tanda tangan an. H. BUDIYONO selaku Pemegang Kas Setdaprov DKI Jakarta, dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum Prov. DKI Jakarta ;

Hal. 411 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 1333/SPP/SWD/BB/X/2006 tertanggal 3 Oktober 2006, yang ditanda tangani an. H. BUDIYONO selaku Pemegang Kas Setdaprov DKI Jakarta dan an. Drs. H. SYAUKI YAHYA selaku Kepala Biro Keuangan. ;
 - d. 1 (satu) lembar asli Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap No. 1333/SPP/SWD/BB/X/2006 tertanggal 3 Oktober 2006, yang ditanda tangani an. H. BUDIYONO selaku Pemegang Kas Setdaprov DKI Jakarta dan an. Drs. H. SYAUKI YAHYA selaku Kepala Biro Keuangan ;
 - e. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Rincian Penggunaan Beban Tetap No. 120/SPP/2006 tertanggal 3 Oktober 2006 yang ditandatangani oleh an. BAHIR ROMSAH selaku Pemegang Kas Cabang dan an. JORNAL E. SIAHAAN selaku Kepala Biro Hukum ;
 - f. 1 (satu) lembar asli Dokumen Faktur PT. SUEZ JAYA Nomor : 030/F/SR/06, yang ditanda tangani an. EDIWIRMAN TAHER selaku Direktur Utama PT. SUEZ JAYA ;
 - g. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Barang (BAPB) Nomor : 06/BAPB/BH/VII/2006 tertanggal 6 Juli 2006, ditanda tangani oleh Panitia Periksa Barang nomor urut 1 (satu) Ketua sampai dengan 5 (lima) anggota, an. EDIWIRMAN TAHER selaku Direktur Utama PT. SUEZ JAYA dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang ;
 - h. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 06/BAST/BH/VII/2006 tanggal 6 Juli 2006, yang ditanda tangani an. IRUSWANDI, SH selaku Pengurus Barang unit Biro Hukum, an. EDIWIRMAN TAHER selaku Direktur Utama PT. SUEZ JAYA dan mengetahui an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Serah Terima Barang;
63. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Nomor : 396/A/077.922 tentang Pengadaan Perbaikan dan Pemeliharaan Billboard

Hal. 412 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penerangan Hukum Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta tanggal 19 Juni 2006 untuk CV. DUTA MANUNGGA SEJATI ;

64. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Nomor : 366/A/077.922 tentang Pengadaan Buku Informasi Peraturan Perundang-undangan Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta tanggal 8 Juni 2006 untuk CV. INDAH RIZKI PRATAMA ;
65. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Nomor : 429/A/078.23 tentang Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) untuk penyuluhan Hukum terpadu Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta tanggal 19 Juli 2006 untuk CV. ANUGERAH KELUARGA ;
66. 1 (satu) bundel Perjanjian Pengadaan Jasa Konsultansi Sistem Komputerisasi Kepustakaan Hukum Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta antara Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta dengan CV. ANDIKA DARATAMA nomor : 738/A/077.92 tanggal 15 November 2006 ;
67. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran atas Pengadaan Jasa Konsultansi Sistem Komputerisasi Kepustakaan Hukum Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta antara Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta dengan PT. ANDIKA DARATAMA Nomor : 738/A/077.92 tanggal 15 November 2006, yang berisi antara lain :
 - a. 1 (satu) lembar asli Dokumen SPM Giro No : 00310452006 Tahun 2006 sebesar Rp. 164.751.408,- (seratus enam puluh empat juta tujuh ratus lima puluh satu ribu empat ratus delapan rupiah) kepada PT. ANDIKA DARATAMA sehubungan Kontrak Nomor. 738/A/077.92 tanggal 15 November 2006 ;
 - b. 1 (satu) lembar asli Kwitansi PT. ANDIKA DARATAMA tertanggal 19 Desember 2006 sebesar Rp. 192.794.200,- (seratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus rupiah), yang ditandatangani diatas materai 6.000 an. WALDIYONO, SE selaku Direktur Utama PT. ANDIKA DARATAMA dan BAHIR ROMSAH selaku Pemegang Kas Cabang, serta terdapat stempel dan tanda tangan an. H. BUDIYONO selaku Pemegang Kas Setdaprov



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DKI Jakarta, dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum Prov. DKI Jakarta ;
- c. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 2625/SPP/SWD/BB/XII/2006 tertanggal 19 Desember 2006, yang ditanda tangani an. H. BUDIYONO selaku Pemegang Kas Setdaprov DKI Jakarta dan an. Drs. H. SYAUKI YAHYA selaku Kepala Biro Keuangan ;
- d. 1 (satu) lembar asli Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap No. 2625/SPP/SWD/BB/XII/2006 tertanggal 19 Desember 2006, yang ditanda tangani an. H. BUDIYONO selaku Pemegang Kas Setdaprov DKI Jakarta dan an. Drs. H. SYAUKI YAHYA selaku Kepala Biro Keuangan ;
- e. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Rincian Penggunaan Beban Tetap No. 194/SPP/2006 tertanggal 19 Desember 2006 yang ditandatangani oleh an. BAHIR ROMSAH selaku Pemegang Kas Cabang dan an. JORNAL E. SIAHAAN selaku Kepala Biro Hukum ;
- f. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Serah Bobot Volume Pekerjaan Pelaksanaan Rincian Kegiatan Sistem Komputerisasi tanggal 11 Desember 2006, yang ditanda tangani an. WALDIYONO, SE selaku Direktur Utama PT. ANDIKA DARATAMA dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 2 (dua) lembar asli lampiran Berita Acara Serah Terima Barang ;
- g. 2 (dua) lembar asli Dokumen Daftar Hadir Tenaga Ahli PT. ANDIKA DARATAMA Sistem Komputerisasi Kepustakaan Hukum, bulan November 2006, terdapat tanda tangan an. WALDIYONO, SE selaku Direktur Utama PT. ANDIKA DARATAMA dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 2 (dua) lembar asli lampiran Berita Acara Serah Terima Barang ;
- h. 2 (dua) lembar asli Dokumen Daftar Hadir Tenaga Ahli PT. ANDIKA DARATAMA Sistem Komputerisasi Kepustakaan Hukum, bulan Desember 2006, terdapat tanda tangan an. WALDIYONO, SE selaku Direktur Utama PT. ANDIKA

Hal. 414 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARATAMA dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum ;

- i. 1 (satu) lembar Dokumen Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, tertanggal 11 Desember 2006, yang ditanda tangani an. WALDIYONO, SE selaku Direktur Utama PT. ANDIKA DARATAMA dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Bobot Kemajuan Pekerjaan ;
- j. 1 (satu) lembar asli Dokumen Invoice Nomor : 053/INV/AD/XII/2006 tertanggal Desember 2006 yang ditandatangani an. WALDIYONO, SE selaku Direktur Utama PT. ANDIKA DARATAMA ;
- k. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 48/BAST/BH/XII/2006 tanggal 12 Desember 2006, yang ditanda tangani an. IRUSWANDI, SH selaku Pengurus Barang unit Biro Hukum, an. WALDIYONO, SE selaku Direktur Utama PT. ANDIKA DARATAMA dan mengetahui an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Serah Terima Barang ;
- l. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Barang (BAPB) Nomor : 42/BAPB/BH/XII/2006 tertanggal 11 Desember 2006, ditanda tangani oleh Panitia Pemeriksa Barang nomor urut 1 (satu) Ketua sampai dengan 5 (lima) anggota, an. WALDIYONO, SE selaku Direktur Utama PT. ANDIKA DARATAMA dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang ;
- m. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Serah Terima Pengguna Barang Nomor : 48/BASTPB/BH/XII/2006, tertanggal 13 Desember 2006, yang ditanda tangani oleh an. IRUSWANDI, SH selaku Pengurus Barang unit Biro Hukum, an. WALDIYONO, SE selaku Direktur Utama PT. ANDIKA DARATAMA dan mengetahui an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Serah Terima Pengguna Barang ;

Hal. 415 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. 1 (satu) bundel Perjanjian Pengadaan Jasa Konsultansi Pengelolaan sarana dan Prasarana Perpustakaan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta antara Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta dengan CV. MENCISY BANGUN PERSADA nomor : 741/A/077.92 tanggal 20 November 2006 ;
69. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran atas Pengadaan Jasa Konsultansi Pengelolaan sarana dan Prasarana Perpustakaan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta antara Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta dengan CV. MENCISY BANGUN PERSADA nomor : 741/A/077.92 tanggal 20 November 2006, yang berisi antara lain:
- a. 1 (satu) lembar asli Dokumen SPM Giro No : 00310662006 Tahun 2006 sebesar Rp. 113.875.909,- (seratus tiga belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus sembilan rupiah) kepada PT. MENCISY BANGUN PERSADA ;
 - b. 1 (satu) lembar asli Kwitansi PT. MENCISY BANGUN PERSADA tertanggal 19 Desember 2006 sebesar Rp. 135.420.000,- (seratus tiga puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu rupiah), yang ditandatangani diatas materei 6.000 an. CECEP SUTISNA selaku Direktur Utama PT. MENCISY BANGUN PERSADA dan BAHIR ROMSAH selaku Pemegang Kas Cabang, serta terdapat stempel dan tanda tangan an. H. BUDIYONO selaku Pemegang Kas Setdaprov DKI Jakarta, dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum Prov. DKI Jakarta ;
 - c. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 2648/SPP/SWD/BB/ /2006 tertanggal 19 Desember 2006, yang ditanda tangani an. H. BUDIYONO selaku Pemegang Kas Setdaprov DKI Jakarta dan an. Drs. H. SYAUKI YAHYA selaku Kepala Biro Keuangan ;
 - d. 1 (satu) lembar asli Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap No. 2648/SPP/SWD/BB/XII/2006 tertanggal 19 Desember 2006, yang ditanda tangani an. H. BUDIYONO

Hal. 416 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Pemegang Kas Setdaprov DKI Jakarta dan an. Drs. H. SYAUKI YAHYA selaku Kepala Biro Keuangan ;

- e. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Rincian Penggunaan Beban Tetap No. 198/SPP/2006 tertanggal 19 Desember 2006 yang ditandatangani oleh an. BAHIR ROMSAH selaku Pemegang Kas Cabang dan an. JORNAL E. SIAHAAN selaku Kepala Biro Hukum ;
- e. 1 (satu) lembar asli dokumen Faktur PT. MENCISY BANGUN PERSADA yang ditanda tangani an. CECEP SUTISNA selaku Direktur Utama PT. MENCISY BANGUN PERSADA ;
- f. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Barang (BAPB) Nomor : 45/BAPB/BH/XII/2006 tertanggal 11 Desember 2006, ditanda tangani oleh Panitia Pemeriksa Barang nomor urut 1 (satu) Ketua sampai dengan 5 (lima) anggota, an. CECEP SUTISNA selaku Direktur Utama PT. MENCISY BANGUN PERSADA dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang ;
- g. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 48/BAST/BH/XII/2006 tanggal 12 Desember 2006, yang ditanda tangani an. IRUSWANDI, SH selaku Pengurus Barang unit Biro Hukum, an. CECEP SUTISNA selaku Direktur Utama PT. MENCISY BANGUN PERSADA dan mengetahui an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Serah Terima Barang ;
- h. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Serah Terima Pengguna Barang Nomor : 52/BASTPB/BH/XII/2006, tertanggal 13 Desember 2006, yang ditanda tangani oleh an. IRUSWANDI, SH selaku Pengurus Barang unit Biro Hukum, an. CECEP SUTISNA selaku Direktur Utama PT. MENCISY BANGUN PERSADA dan mengetahui an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Serah Terima Pengguna Barang ;

Hal. 417 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Hadir Tenaga Ahli, bulan Desember 2006, terdapat tanda tangan an. CECEP SUTISNA selaku Direktur Utama PT. MENCISY BANGUN PERSADA dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 2 (dua) lembar asli lampiran Berita Acara Serah Terima Barang ;
 - j. 2 (dua) lembar asli Dokumen Berita Acara Bobot Pekerjaan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan kegiatan peningkatan Perpustakaan Hukum Nomor : 37/BABP/MBP/XII/2006, tertanggal 13 Desember 2006, yang ditanda tangani oleh an. CECEP SUTISNA selaku Direktur Utama PT. MENCISY BANGUN PERSADA dan mengetahui an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Serah Terima Pengguna Barang ;
 - k. 2 (dua) lembar asli Dokumen Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan kegiatan peningkatan Perpustakaan Hukum Nomor : 38/BABP/MBP/XII/2006, tertanggal 13 Desember 2006, yang ditanda tangani oleh an. CECEP SUTISNA selaku Direktur Utama PT. MENCISY BANGUN PERSADA dan mengetahui an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Serah Terima Pengguna Barang ;
70. 1 (satu) bundel Perjanjian Pengadaan Jasa Konsultansi Penataan dan Pengelolaan Bahan Pustaka Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta antara Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta dengan CV. GALUH nomor : 743/A/077.92 tanggal 20 November 2006 ;
71. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran atas Pengadaan Jasa Konsultansi Penataan dan Pengelolaan Bahan Pustaka Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta antara Biro Hukum Setdaprov DKI

Hal. 418 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta dengan CV. GALUH nomor : 743/A/077.92 tanggal 20 November 2006, yang berisi antara lain :

- a. 1 (satu) lembar asli Dokumen SPM Giro No : 00307122006 tertanggal 23 Desember 2006 sebesar Rp. 113.067.000,- (seratus tiga belas jutaan enam puluh tujuh ribu rupiah) kepada CV. GALUH ;
- b. 1 (satu) lembar asli Kwitansi CV. GALUH tertanggal 19 Desember 2006 sebesar Rp. 133.067.000,- (seratus tiga puluh tiga juta enam puluh tujuh ribu rupiah), yang ditandatangani diatas materai 6.000 an. H. OMON SOEDARISMAN selaku Direktur CV. GALUH dan BAHIR ROMSAH selaku Pemegang Kas Cabang, serta terdapat stempel dan tanda tangan an. H. BUDIYONO selaku Pemegang Kas Setdaprov DKI Jakarta, dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum Prov. DKI Jakarta ;
- c. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 2624/SPP/SWD/BB/XII/2006 tertanggal 19 Desember 2006, yang ditanda tangani an. H. BUDIYONO selaku Pemegang Kas Setdaprov DKI Jakarta dan an. Drs. H. SYAUKI YAHYA selaku Kepala Biro Keuangan ;
- d. 1 (satu) lembar asli Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap No. 2624/SPP/SWD/BB/XII/2006 tertanggal 19 Desember 2006, yang ditanda tangani an. H. BUDIYONO selaku Pemegang Kas Setdaprov DKI Jakarta dan an. Drs. H. SYAUKI YAHYA selaku Kepala Biro Keuangan ;
- e. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Rincian Penggunaan Beban Tetap No. 197/SPP/2006 tertanggal 19 Desember 2006 yang ditandatangani oleh an. BAHIR ROMSAH selaku Pemegang Kas Cabang dan an. JORNAL E. SIAHAAN selaku Kepala Biro Hukum ;
- f. 1 (satu) lembar asli Dokumen Faktur CV. GALUH Nomor : 012/F/CG/XII/06 yang ditanda tangani an. H. OMON SOEDARISMAN selaku Direktur CV. GALUH ;
- g. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Barang (BAPB) Nomor : 43/BAPB/BH/XII/2006 tertanggal 11

Hal. 419 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desember 2006, ditanda tangani oleh Panitia Pemeriksa Barang nomor urut 1 (satu) Ketua sampai dengan 5 (lima) anggota, an. H. OMON SOEDARISMAN selaku Direktur CV. GALUH dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang ;
- h. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : (tanpa nomor)/BAST/BH/XII/2006 tanggal 12 Desember 2006, yang ditanda tangani an. IRUSWANDI, SH selaku Pengurus Barang unit Biro Hukum, an. H. OMON SOEDARISMAN selaku Direktur CV. GALUH dan mengetahui an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Serah Terima Barang ;
- i. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Serah Terima Pengguna Barang Nomor : 43/BASTPB/BH/XII/2006, tertanggal 13 Desember 2006, yang ditanda tangani oleh an. IRUSWANDI, SH selaku Pengurus Barang unit Biro Hukum, an. H. OMON SOEDARISMAN selaku Direktur CV. GALUH dan mengetahui an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Serah Terima Pengguna Barang ;
- j. 2 (dua) lembar asli Dokumen Berita Acara Bobot Pekerjaan Penataan dan Pengelolaan bahan dan Pustaka Hukum Peraturan Perundang-undangan kegiatan peningkatan Perpustakaan Hukum Nomor : 009/B/CG/XII/2006, tertanggal 13 Desember 2006, yang ditanda tangani oleh an. H. OMON SOEDARISMAN selaku Direktur CV. GALUH dan mengetahui an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Serah Terima Pengguna Barang ;
- k. 2 (dua) lembar asli Dokumen Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Penataan dan Pengelolaan bahan dan Pustaka Hukum Peraturan Perundang-undangan kegiatan peningkatan Perpustakaan Hukum Nomor : 009/B/CG/XII/2006, tertanggal 13 Desember 2006, yang ditanda tangani oleh an. H. OMON SOEDARISMAN selaku

Hal. 420 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur CV. GALUH dan mengetahui an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Serah Terima Pengguna Barang ;

- I. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Hadir Tenaga Ahli, bulan Desember 2006, terdapat tanda tangan an. H. OMON SOEDARISMAN selaku Direktur CV. GALUH dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 2 (dua) lembar asli lampiran Berita Acara Serah Terima Barang ;
72. 1 (satu) bundel Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Souvenir Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta nomor 03/072 tanggal 8 Desember 2006 antara Biro Hukum Sekdaprov DKI Jakarta dengan PT. ARDIYAN PUSPITA HATIGRAHA ;
73. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran atas Pengadaan Souvenir Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta nomor 12.1/-1.712.35 tanggal 8 Desember 2006 antara Biro Hukum Sekdaprov DKI Jakarta dengan PT. ARDIYAN PUSPITA HATIGRAHA, yang antara lain berisi:
 - a. 1 (satu) lembar asli Dokumen SPM Giro No : 00306842006 tertanggal 23 Desember 2006 sebesar Rp. 83.429.500,- (delapan puluh tiga juta empat ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) kepada PT. ARDIYAN PUSPITA HATIGRAHA;
 - b. 1 (satu) lembar asli Kwitansi PT. ARDIYAN PUSPITA HATIGRAHA tertanggal 18 Desember 2006 sebesar Rp. 93.170.000,- (sembilan puluh tiga juta seratus tujuh puluh ribu rupiah), yang ditandatangani diatas materai 6.000 an. LARDI selaku Direktur PT. ARDIYAN PUSPITA HATIGRAHA dan an. H. BUDIYONO selaku Pemegang Kas Setdaprov DKI Jakarta, terdapat stempel dan tandatangan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum Prov. DKI Jakarta ;
 - c. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 2563/SPP/SWD/BB/XII/2006 tertanggal 18 Desember 2006, yang ditanda tangani an. H. BUDIYONO selaku Pemegang Kas Setdaprov DKI Jakarta

Hal. 421 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan an. Drs. H. SYAUKI YAHYA selaku Kepala Biro Keuangan ;
- d. 1 (satu) lembar asli Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap No. 2563/SPP/SWD/BB/XII/2006 tertanggal 18 Desember 2006, yang ditanda tangani an. H. BUDIYONO selaku Pemegang Kas Setdaprov DKI Jakarta dan an. Drs. H. SYAUKI YAHYA selaku Kepala Biro Keuangan ;
- e. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Rincian Penggunaan Beban Tetap No. 182/SPP/2006 tertanggal 18 Desember 2006 yang ditandatangani oleh an. BAHIR ROMSAH selaku Pemegang Kas Cabang dan an. JORNAL E. SIAHAAN selaku Kepala Biro Hukum ;
- f. 1 (satu) lembar asli Dokumen Faktur PT. ARDIYAN PUSPITA HATIGRAHA Nomor : 044/FB – APH/XII/2006 tertanggal 12 Desember 2006 yang ditanda tangani an. LARDI selaku Direktur PT. ARDIYAN PUSPITA HATIGRAHA dan an. IRUSWANDI, SH selaku Pengurus Barang unit Biro Hukum ;
- g. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 47/BAST/BH/XII/2006 tanggal 13 Desember 2006, yang ditanda tangani an. IRUSWANDI, SH selaku Pengurus Barang unit Biro Hukum, an. LARDI selaku Direktur PT. ARDIYAN PUSPITA HATIGRAHA dan mengetahui an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Serah Terima Barang ;
- h. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Barang (BAPB) Nomor : 52/BAPB/BH/XII/2006 tertanggal 12 Desember 2006, ditanda tangani oleh Panitia Pemeriksa Barang nomor urut 1 (satu) Ketua sampai dengan 5 (lima) anggota, an. LARDI selaku Direktur PT. ARDIYAN PUSPITA HATIGRAHA dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang ;
74. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Nomor : 667/A/077.92 Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta dengan CV. DOMPU JAYA tanggal 12 Oktober 2006;

Hal. 422 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Nomor : 701/077.92 Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta dengan PT. LAUTAN PRAPTA RAYA tanggal 1 November 2006 ;
76. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran atas Surat Perintah Kerja Nomor : 701/077.92 Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta dengan PT. LAUTAN PRAPTA RAYA tanggal 1 November 2006, yang berisi antara lain :
- a. 1 (satu) lembar asli Dokumen SPM Giro No : 00304192006 Tahun 2006 sebesar Rp. 104.086.920,- (seratus empat juta delapan puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) kepada PT. LAUTAN PRAPTA RAYA ;
 - b. 1 (satu) lembar asli Kwitansi PT. LAUTAN PRAPTA RAYA tertanggal 7 Desember 2006 sebesar Rp. 116.239.200,- (seratus enam belas juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus rupiah), yang ditandatangani diatas materai 6.000 an. ARIFIN SIRAIT selaku Direktur PT. LAUTAN PRAPTA RAYA dan an. H. BUDIYONO selaku Pemegang Kas Setdaprov DKI Jakarta, terdapat stempel dan tandatangan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum Prov. DKI Jakarta ;
 - c. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 2559/SPP/SWD/BB/XII/2006 tertanggal 18 Desember 2006, yang ditanda tangani an. H. BUDIYONO selaku Pemegang Kas Setdaprov DKI Jakarta dan an. Drs. H. SYAUKI YAHYA selaku Kepala Biro Keuangan ;
 - d. 1 (satu) lembar asli Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap No. 2559/SPP/SWD/BB/XII/2006 tertanggal 18 Desember 2006, yang ditanda tangani an. H. BUDIYONO selaku Pemegang Kas Setdaprov DKI Jakarta dan an. Drs. H. SYAUKI YAHYA selaku Kepala Biro Keuangan ;
 - e. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Rincian Penggunaan Beban Tetap No. 190/SPP/2006 tertanggal 18 Desember 2006 yang ditandatangani oleh an. BAHIR ROMSAH selaku Pemegang Kas Cabang dan an. JORNAL E. SIAHAAN selaku Kepala Biro Hukum ;

Hal. 423 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Barang (BAPB) Nomor : 48/BAPB/BH/XII/2006 tertanggal 4 Desember 2006, ditanda tangani oleh Panitia Pemeriksa Barang nomor urut 1 (satu) Ketua sampai dengan 5 (lima) anggota, an. ARIFIN SIRAIT selaku Direktur PT. LAUTAN PRAPTA RAYA dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang ;
- g. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 43/BAST/BH/XII/2006 tanggal 4 Desember 2006, yang ditanda tangani an. IRUSWANDI, SH selaku Pengurus Barang unit Biro Hukum, an. ARIFIN SIRAIT selaku Direktur PT. LAUTAN PRAPTA RAYA dan mengetahui an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Serah Terima Barang ;
77. 1 (satu) bundel Perjanjian Pengadaan Konsumsi Dalam Rangka Peningkatan Temu Wicara Debat Hukum Dengan Generasi Muda Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov. DKI Jakarta antara Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta dengan PT. MEGA COPILAS nomor 699/077.92 tanggal 1 November 2006 ;
78. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran atas Pengadaan Konsumsi Dalam Rangka Peningkatan Temu Wicara Debat Hukum Dengan Generasi Muda Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov. DKI Jakarta antara Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta dengan PT. MEGA COPILAS nomor 699/077.92 tanggal 1 November 2006, yang berisi antara lain :
- a. 1 (satu) lembar asli Dokumen SPM Giro No : 00310982006 Tahun 2006 sebesar Rp. 139.929.592,- (seratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah) kepada PT. MEGA COPILAS sehubungan Kontrak Nomor. 699/077.92, tanggal 1 November 2006 ;
- b. 1 (satu) lembar asli Kwitansi PT. MEGA COPILAS tertanggal 5 Desember 2006 sebesar Rp. 156.266.550,- (seratus lima puluh enam juta dua ratus enam puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah), yang ditandatangani diatas materai 6.000

Hal. 424 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- an. ROMALDA VILLANI selaku Direktur PT. MEGA COPILAS dan an. H. BUDIYONO selaku Pemegang Kas Setdaprov DKI Jakarta, terdapat stempel dan tandatangan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum Prov. DKI Jakarta ;
- c. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 2562/SPP/SWD/BB/XII/2006 tertanggal 18 Desember 2006, yang ditanda tangani an. H. BUDIYONO selaku Pemegang Kas Setdaprov DKI Jakarta dan an. Drs. H. SYAUKI YAHYA selaku Kepala Biro Keuangan ;
- d. 1 (satu) lembar asli Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap No. 2562/SPP/SWD/BB/XII/2006 tertanggal 18 Desember 2006, yang ditanda tangani an. H. BUDIYONO selaku Pemegang Kas Setdaprov DKI Jakarta dan an. Drs. H. SYAUKI YAHYA selaku Kepala Biro Keuangan ;
- e. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Rincian Penggunaan Beban Tetap No. 185/SPP/2006 tertanggal 18 Desember 2006 yang ditandatangani oleh an. BAHIR ROMSAH selaku Pemegang Kas Cabang dan an. JORNAL E. SIAHAAN selaku Kepala Biro Hukum ;
- f. 1 (satu) lembar asli Dokumen Faktur Nomor : 031/FB/MC/XII/2006 tertanggal 7 Desember 2006 yang ditandatangani an. ROMALDA VILLANI selaku Direktur PT. MEGA COPILAS dan an. IRUSWANDI, SH, Mkn selaku Pengurus Barang Unit Biro Hukum ;
- h. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 34/BAST/BH/XII/2006 tanggal 7 Desember 2006, yang ditanda tangani an. IRUSWANDI, SH selaku Pengurus Barang unit Biro Hukum, an. ROMALDA VILLANI selaku Direktur PT. MEGA COPILAS dan mengetahui an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 2 (dua) lembar asli lampiran Berita Acara Serah Terima Barang ;
- i. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Barang (BAPB) Nomor : 37/BAPB/BH/XII/2006 tertanggal 7 Desember 2006, ditanda tangani oleh Panitia Pemeriksa

Hal. 425 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Barang nomor urut 1 (satu) Ketua sampai dengan 5 (lima) anggota, an. ROMALDA VILLANI selaku Direktur PT. MEGA COPILAS dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 2 (dua) lembar asli lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang ;

79. 1 (satu) bundel Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) Dalam Rangka Kegiatan Kampanye Kesadaran Hukum Mahasiswa Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta nomor 694/A/077.92 tanggal 13 Oktober 2006 antara Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta dengan PT. PANCAIGUH PRATIKELTAMA ;

80. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran atas Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) Dalam Rangka Kegiatan Kampanye Kesadaran Hukum Mahasiswa Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta nomor 694/A/077.92 tanggal 13 Oktober 2006 antara Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta dengan PT. PANCAIGUH PRATIKELTAMA, yang berisi antara lain :

a. 1 (satu) lembar asli Dokumen SPM Giro No : 00310142006 Tahun 2006 sebesar Rp. 57.373.787,- (lima puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus delapan rupiah) kepada PT. PANCAIGUH PRATIKELTAMA ;

b. 1 (satu) lembar asli Kwitansi PT. PANCAIGUH PRATIKELTAMA tertanggal 5 Desember 2006 sebesar Rp. 64.027.250,- (enam puluh empat juta dua puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah), yang ditandatangani diatas materei 6.000 an. TIPIK PUJI LESTARI selaku Direktur PT. PANCAIGUH PRATIKELTAMA dan an. H. BUDIYONO selaku Pemegang Kas Setdaprov DKI Jakarta, terdapat stempel dan tandatangan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum Prov. DKI Jakarta ;

c. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 2560/SPP/SWD/BB/XII/2006 tertanggal 18 Desember 2006, yang ditanda tangani an. H. BUDIYONO selaku Pemegang Kas Setdaprov DKI Jakarta dan an. Drs. H. SYAUKI YAHYA selaku Kepala Biro Keuangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) lembar asli Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap No. 2560/SPP/SWD/BB/XII/2006 tertanggal 18 Desember 2006, yang ditanda tangani an. H. BUDIYONO selaku Pemegang Kas Setdaprov DKI Jakarta dan an. Drs. H. SYAUKI YAHYA selaku Kepala Biro Keuangan ;
 - e. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Rincian Penggunaan Beban Tetap No. 183/SPP/2006 tertanggal 18 Desember 2006 yang ditandatangani oleh an. BAHIR ROMSAH selaku Pemegang Kas Cabang dan an. JORNAL E. SIAHAAN selaku Kepala Biro Hukum ;
 - f. 1 (satu) lembar asli Dokumen Faktur Nomor : 036/FB/PP/XII/2006 tertanggal 5 Desember 2006 yang ditandatangani an. TIPIK PUJI LESTARI selaku Direktur PT. PANCAIGUH PRATIKELTAMA dan an. IRUSWANDI, SH, Mkn selaku Pengurus Barang Unit Biro Hukum ;
 - g. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 35/BAST/BH/XII/2006 tanggal 5 Desember 2006, yang ditanda tangani an. IRUSWANDI, SH selaku Pengurus Barang unit Biro Hukum, an. TIPIK PUJI LESTARI selaku Direktur PT. PANCAIGUH PRATIKELTAMA dan mengetahui an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Serah Terima Barang ;
 - h. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Barang (BAPB) Nomor : 32/BAPB/BH/XII/2006 tertanggal 4 Desember 2006, ditanda tangani oleh Panitia Pemeriksa Barang nomor urut 1 (satu) Ketua sampai dengan 5 (lima) anggota, an. TIPIK PUJI LESTARI selaku Direktur PT. PANCAIGUH PRATIKELTAMA dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang;
81. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Nomor : 630/A/077.92 tentang Pengadaan Drafting Film 05 dan Back Droop Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta tanggal 29 September 2006 untuk CV. DIMAS EKA PRATAMA ;

Hal. 427 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. 1 (satu) bundel Perjanjian Pengadaan Konsumsi Dalam Rangka Pelaksanaan Kampanye Kesadaran Hukum Pelajat Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov. DKI Jakarta antara Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta dengan CV. KARYA CIPTA MANDIRI nomor 01/072 tanggal 15 September 2006 ;
83. 1 (satu) bundel Dokumen pembayaran atas Pengadaan Konsumsi Dalam Rangka Pelaksanaan Kampanye Kesadaran Hukum Pelajat Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov. DKI Jakarta antara Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta dengan CV. KARYA CIPTA MANDIRI nomor 01/072 tanggal 15 September 2006, yang berisi antara lain :
- a. 1 (satu) lembar asli Dokumen SPM Giro No : 00300792006 tertanggal 21 Desember 2006 sebesar Rp. 243.184.680,- (dua ratus empat puluh tiga juta seratus delapan puluh empat ribu enam ratus delapan puluh rupiah) kepada CV. KARYA CIPTA MANDIRI ;
 - b. 1 (satu) lembar asli Kwitansi CV. KARYA CIPTA MANDIRI tertanggal 11 Desember 2006 sebesar Rp. 271.576.800,- (dua ratus tujuh puluh satu juta lima ratus tujuh enam ribu delapan ratus rupiah), yang ditandatangani diatas materei 6.000 an. MUHAMMAD HABRI selaku Direktur CV. KARYA CIPTA MANDIRI dan an. H. BUDIYONO selaku Pemegang Kas Setdaprov DKI Jakarta, terdapat stempel dan tandatangan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum Prov. DKI Jakarta ;
 - c. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 2304/SPP/SWD/BB/XII/2006 tertanggal 11 Desember 2006, yang ditanda tangani an. H. BUDIYONO selaku Pemegang Kas Setdaprov DKI Jakarta dan an. Drs. H. SYAUKI YAHYA selaku Kepala Biro Keuangan ;
 - d. 1 (satu) lembar asli Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap No. 2340/SPP/SWD/BB/XII/2006 tertanggal 11 Desember 2006, yang ditanda tangani an. H. BUDIYONO selaku Pemegang Kas Setdaprov DKI Jakarta dan an. Drs. H. SYAUKI YAHYA selaku Kepala Biro Keuangan ;

Hal. 428 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Rincian Penggunaan Beban Tetap No. 172/SPP/2006 tertanggal 11 Desember 2006 yang ditandatangani oleh an. BAHIR ROMSAH selaku Pemegang Kas Cabang dan an. JORNAL E. SIAHAAN selaku Kepala Biro Hukum ;
- f. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Barang (BAPB) Nomor : 23/BAPB/BH/XII/2006 tertanggal 8 Desember 2006, ditanda tangani oleh Panitia Pemeriksa Barang nomor urut 1 (satu) Ketua sampai dengan 5 (lima) anggota, an. MUHAMMAD HABRI selaku pimpinan CV. KARYA CIPTA MANDIRI dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang ;
- g. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 27/BAST/BH/XII/2006 tanggal 8 Desember 2006, yang ditanda tangani an. IRUSWANDI, SH selaku Pengurus Barang unit Biro Hukum, an. MUHAMMAD HABRI selaku pimpinan CV. KARYA CIPTA MANDIRI dan mengetahui an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Serah Terima Barang ;
- h. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Serah Terima Pengguna Barang Nomor : 27/BASTPB/BH/XII/2006 tanggal 8 Desember 2006, yang ditanda tangani an. IRUSWANDI, SH selaku Pengurus Barang unit Biro Hukum, an. MUHAMMAD HABRI selaku pimpinan CV. KARYA CIPTA MANDIRI dan mengetahui an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Serah Terima Barang ;
- 84. 1 (satu) bundel Perjanjian Alat Tulis Kantor (ATK) Dalam rangka Peningkatan Temu Wicara Debat Hukum Dengan Generasi Muda Kebutuhan Biro Hukum Serdaprov DKI Jakarta antara Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta dengan CV. REZKY UTAMA nomor 693/077.92 tanggal 1 November 2006 ;
- 85. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) Dalam rangka Peningkatan Temu Wicara Debat Hukum Dengan Generasi Muda Kebutuhan Biro Hukum

Hal. 429 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serdaprov DKI Jakarta antara Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta dengan CV. REZKY UTAMA nomor 693/077.92 tanggal 1 November 2006, yang berisi antara lain :

- a. 1 (satu) lembar asli Dokumen SPM Giro No : 00252512006 Tahun 2006 sebesar Rp. 147.429.875,- (seratus empat puluh tujuh juta empat ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) kepada CV. REZKY UTAMA sehubungan Kontrak Nomor. 693/077.92, tanggal 1 November 2006 ;
- b. 1 (satu) lembar asli Kwitansi CV. REZKY UTAMA tertanggal 4 Desember 2006 sebesar Rp. 164.642.500,- (seratus enam puluh empat juta enam ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah), yang ditandatangani diatas materai 6.000 an. MARINCE NAINGGOLAN selaku Direktur dan an. BAHIR ROMSAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum DKI Jakarta, terdapat stempel dan tandatangan an. JORNAL E. SIAHAAN, Sh, Msi selaku Kepala Biro Hukum Prov. DKI Jakarta ;
- c. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 2047/SPP/SWD/BB/XII/2006 tertanggal 4 Desember 2006, yang ditanda tangani an. H. BUDIYONO selaku Pemegang Kas Setdaprov DKI Jakarta dan an. Drs. H. SYAUKI YAHYA selaku Kepala Biro Keuangan ;
- d. 1 (satu) lembar asli Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap No. 2047/SPP/SWD/BB/XII/2006 tertanggal 4 Desember 2006, yang ditanda tangani an. H. BUDIYONO selaku Pemegang Kas Setdaprov DKI Jakarta dan an. Drs. H. SYAUKI YAHYA selaku Kepala Biro Keuangan ;
- e. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Rincian Penggunaan Beban Tetap No. 130/SPP/2006 tertanggal 4 Desember 2006 yang ditandatangani oleh an. BAHIR ROMSAH selaku Pemegang Kas Cabang dan an. JORNAL E. SIAHAAN selaku Kepala Biro Hukum ;
- f. 1 (satu) lembar asli Dokumen Faktur Nomor : 025/FB/RU/XI/2006 tertanggal 21 November 2006 yang ditandatangani an. MARINCE NAINGGOLAN selaku Direktur

Hal. 430 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



CV. REZKY UTAMA dan an. IRUSWANDI, SH, Mkn selaku
Pengurus Barang Unit Biro Hukum ;

- g. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Pemeriksaan
Barang (BAPB) Nomor : 33/BAPB/BH/XI/2006 tertanggal 20
November 2006, ditanda tangani oleh Panitia Pemeriksa
Barang nomor urut 1 (satu) Ketua sampai dengan 5 (lima)
anggota, an. MARINCE NAINGGOLAN selaku Direktur CV.
REZKY UTAMA dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi
selaku Kepala Biro Hukum, berikut 2 (dua) lembar asli
lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang ;
- h. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Serah Terima
Barang Nomor : 28/BAST/BH/XI/2006 tanggal 21 November
2006, yang ditanda tangani an. IRUSWANDI, SH selaku
Pengurus Barang unit Biro Hukum, an. MARINCE
NAINGGOLAN selaku Direktur CV. REZKY UTAMA dan
mengetahui an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku
Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran
Berita Acara Serah Terima Barang ;
86. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Nomor : 467/A/078.23
tentang Pengadaan Cetakan Booklet Materi Kampanye Hukum
Pelajar Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta tanggal
19 Juli 2006 untuk CV. FLORISTA REKANINDO ;
87. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran atas Surat Perintah Kerja
Nomor : 467/A/078.23 tentang Pengadaan Cetakan Booklet
Materi Kampanye Hukum Pelajar Kebutuhan Biro Hukum
Setdaprov DKI Jakarta tanggal 19 Juli 2006 untuk CV.
FLORISTA REKANINDO, yang berisi antara lain :
- a. 1 (satu) lembar asli Dokumen SPM Giro No : 00205402006
tanggal 6 November 2006 sebesar Rp. 32.308.000,- (tiga
puluh dua juta tiga ratus delapan ribu rupiah) kepada CV.
FLORISTA REKANINDO ;
- b. 1 (satu) lembar asli Kwitansi CV. FLORISTA REKANINDO
tertanggal 2 November 2006 sebesar Rp. 36.080.000,- (tiga
puluh enam juta delapan puluh ribu rupiah), yang
ditandatangani diatas materai 6.000 an. NURLAILA selaku
Pimpinan CV. FLORISTA REKANINDO dan an. BAHIR
ROMSAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro

Hal. 431 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum DKI Jakarta, terdapat stempel dan tandatangan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, MSi selaku Kepala Biro Hukum Prov. DKI Jakarta ;

- c. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 1596/SPP/SWD/BB/XI/2006 tertanggal 3 November 2006, yang ditanda tangani an. H. BUDIYONO selaku Pemegang Kas Setdaprov DKI Jakarta dan an. Drs. H. SYAUKI YAHYA selaku Kepala Biro Keuangan ;
- d. 1 (satu) lembar asli Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap No. 1596/SPP/SWD/BB/XI/2006 tertanggal 3 November 2006, yang ditanda tangani an. H. BUDIYONO selaku Pemegang Kas Setdaprov DKI Jakarta dan an. Drs. H. SYAUKI YAHYA selaku Kepala Biro Keuangan ;
- e. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Rincian Penggunaan Beban Tetap No. 125/SPP/2006 tertanggal 3 November 2006 yang ditandatangani oleh an. BAHIR ROMSAH selaku Pemegang Kas Cabang dan an. JORNAL E. SIAHAAN selaku Kepala Biro Hukum ;
- f. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Barang (BAPB) Nomor : 14/BAPB/BH/VIII/2006 tertanggal 16 Agustus 2006, ditanda tangani oleh Panitia Pemeriksa Barang nomor urut 1 (satu) Ketua sampai dengan 5 (lima) anggota, an. NURLAILA selaku Pimpinan CV. FLORISTA REKANINDO dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang ;
- g. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 13/BAST/BH/VIII/2006 tanggal 16 Agustus 2006, yang ditanda tangani an. IRUSWANDI, SH selaku Pengurus Barang unit Biro Hukum, an. NURLAILA selaku Pimpinan CV. FLORISTA REKANINDO dan mengetahui an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Serah Terima Barang ;
- h. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Serah Terima Pengguna Barang Nomor : 13/BASTPB/BH/VIII/2006 tanggal

Hal. 432 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Agustus 2006, yang ditanda tangani an. IRUSWANDI, SH selaku Pengurus Barang unit Biro Hukum, an. AGUSDIN SUSANTO, SH selaku Kabag Bantuan Hukum dan mengetahui an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Serah Terima Pengguna Barang ;

88. 1 (satu) bundel Perjanjian Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) dalam rangka Peningkatan Kesadaran Hukum Bagi Warga Komunitas Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov.DKI Jakarta antara Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta dengan CV. DHARMA HUTAMA KARYA nomor 691/077.92 tanggal 1 November 2006 ;
89. 1 (satu) bundel Dokumen pembayaran Pengadaan alat Tulis Kantor (ATK) Dalam rangka Peningkatan Kesadaran Hukum Bagi Warga Komunitas Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov.DKI Jakarta antara Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta dengan CV. DHARMA HUTAMA KARYA nomor 691/077.92 tanggal 1 November 2006, yang berisi antara lain :
 - a. 1 (satu) lembar asli Dokumen SPM Giro No : 00310152006 Tahun 2006 sebesar Rp. 107.011.744,- (seratus tujuh juta sebelas ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah) kepada CV. DHARMA HUTAMA KARYA sehubungan Kontrak Nomor. 691/077.92, tanggal 1 November 2006 ;
 - b. 1 (satu) lembar asli Kwitansi CV. DHARMA HUTAMA KARYA tertanggal 7 Desember 2006 sebesar Rp. 107.011.744,- (seratus tujuh juta sebelas ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah), yang ditandatangani diatas meterei 6.000 an. HANAFI H. HAMID selaku Direktur dan an. BAHIR ROMSAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum DKI Jakarta, terdapat stempel dan tandatangan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, MSi selaku Kepala Biro Hukum Prov. DKI Jakarta ;
 - c. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 2561/SPP/SWD/BB/XII/2006 tertanggal 18 Desember 2006, yang ditanda tangani an. H. BUDIYONO selaku Pemegang Kas Setdaprov DKI Jakarta dan an. Drs. H. SYAUKI YAHYA selaku Kepala Biro Keuangan ;

Hal. 433 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) lembar asli Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap No. 2561/SPP/SWD/BB/XII/2006 tertanggal 18 Desember 2006, yang ditanda tangani an. H. BUDIYONO selaku Pemegang Kas Setdaprov DKI Jakarta dan an. Drs. H. SYAUKI YAHYA selaku Kepala Biro Keuangan ;
- e. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Rincian Penggunaan Beban Tetap No. 189/SPP/2006 tertanggal 18 Desember 2006 yang ditandatangani oleh an. BAHIR ROMSAH selaku Pemegang Kas Cabang dan an. JORNAL E. SIAHAAN selaku Kepala Biro Hukum ;
- f. 1 (satu) lembar asli dokumen Faktur Nomor : 022/F/BHK/XI/06 tertanggal 27 November 2006 yang ditandatangani an. HANAFI H. HAMID selaku Direktur CV. DHARMA HUTAMA KARYA ;
- g. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Barang (BAPB) Nomor : 50/BAPB/BH/XII/2006 tertanggal 27 November 2006, ditanda tangani oleh Panitia Pemeriksa Barang nomor urut 1 (satu) Ketua sampai dengan 5 (lima) anggota, an. HANAFI H. HAMID selaku Direktur CV. DHARMA HUTAMA KARYA dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang ;
- h. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 40/BAST/BH/XI/2006 tanggal 28 November 2006, yang ditanda tangani an. IRUSWANDI, SH selaku Pengurus Barang unit Biro Hukum, an. HANAFI H. HAMID selaku Direktur CV. DHARMA HUTAMA KARYA dan mengetahui an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Serah Terima Barang ;
- 90. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Nomor : 607/A/077.92 tentang Pengadaan Konsumsi Dalam Rangka Kegiatan Kampanye Kesadaran Hukum Mahasiswa Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta TA.2006 antara Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta dengan CV. TAMADO JAYA tanggal 29 September 2006 ;

Hal. 434 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran atas Surat Perintah Kerja Nomor : 607/A/077.92 tentang Pengadaan Konsumsi Dalam Rangka Kegiatan Kampanye Kesadaran Hukum Mahasiswa Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta TA.2006 antara Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta dengan CV. TAMADO JAYA tanggal 29 September 2006, yang berisi antara lain :
- a. 1 (satu) lembar asli Dokumen SPM Giro No : 00322622006 Tahun 2006 sebesar Rp. 43.093.750,- (empat puluh tiga juta sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) kepada CV. TAMADO JAYA sehubungan Surat Perintah Kerja nomor 607/A/077.92, tanggal 29 September 2006 ;
 - b. 1 (satu) lembar asli Kwitansi CV. TAMADO JAYA sebesar Rp. 48.125.000,- (empat puluh delapan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), yang ditandatangani diatas materei 6.000 an. Drs. SAUT SINAGA selaku Direktur dan an. BAHIR ROMSAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum DKI Jakarta, terdapat stempel dan tandatangan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, MSi selaku Kepala Biro Hukum Prov. DKI Jakarta ;
 - c. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 2554/SPP/SWD/BB/...../2006 tertanggal 18 Desember 2006, yang ditanda tangani an. H. BUDIYONO selaku Pemegang Kas Setdaprov DKI Jakarta dan an. Drs. H. SYAUKI YAHYA selaku Kepala Biro Keuangan ;
 - d. 1 (satu) lembar asli Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap No. 2554/SPP/SWD/BB/..... /2006 tertanggal 18 Desember 2006, yang ditanda tangani an. H. BUDIYONO selaku Pemegang Kas Setdaprov DKI Jakarta dan an. Drs. H. SYAUKI YAHYA selaku Kepala Biro Keuangan ;
 - e. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Rincian Penggunaan Beban Tetap No. 184/SPP/2006 tertanggal 18 Desember 2006 yang ditandatangani oleh an. BAHIR ROMSAH selaku Pemegang Kas Cabang dan an. JORNAL E. SIAHAAN selaku Kepala Biro Hukum ;
 - f. 1 (satu) lembar asli Dokumen Faktur Nomor : 031/FB/TJ/XI/2006 tertanggal 23 November 2006 yang

Hal. 435 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditandatangani an. Drs. SAUT SINAGA selaku Direktur CV. TAMADO JAYA dan an. IRUSWANDI, SH, Mkn selaku Pengurus Barang Unit Biro Hukum ;
- g. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 32/BAST/BH/XII/2006 tanggal 23 November 2006, yang ditanda tangani an. IRUSWANDI, SH selaku Pengurus Barang unit Biro Hukum, an. Drs. SAUT SINAGA selaku Direktur CV. TAMADO JAYA dan mengetahui an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 2 (dua) lembar asli lampiran Berita Acara Serah Terima Barang ;
- h. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Barang (BAPB) Nomor : 36/BAPB/BH/XI/2006 tertanggal 22 November 2006, ditanda tangani oleh Panitia Pemeriksa Barang nomor urut 1 (satu) Ketua sampai dengan 5 (lima) anggota, an. HANAFI H. HAMID selaku Direktur CV. DHARMA HUTAMA KARYA dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 2 (dua) lembar asli lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang ;
92. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Nomor : 669/A/077.92 Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta dengan CV. IXORA EXSITING tanggal 12 Oktober 2006 ;
93. 1 (satu) bundel Dokumen Perjanjian Pengadaan Komputer dan Sarana Penunjang Kebutuhan Biro Hukum Setda Prov. DKI Jakarta antara Biro Hukum Setda Prov. DKI Jakarta dengan PT. SUMBER SARANA INFORMATIKA Nomor : 688/A/077.014 tertanggal 1 Nopember 2006 ;
94. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran atas Pengadaan Komputer dan sarana penunjang kebutuhan Biro Hukum Setda Prov. DKI Jakarta antara Biro Hukum Setda Prov. DKI Jakarta dengan PT. SUMBER SARANA INFORMATIKA Nomor : 688/A/077.014 tertanggal 1 Nopember 2006, yang berisi antara lain :
- a. 1 (satu) lembar asli Dokumen SPM Giro No : 00309572006 Tahun 2006 sebesar Rp. 106.222.400,- (seratus enam juta dua ratus dua puluh dua ribu empat ratus rupiah) kepada PT.

Hal. 436 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SUMBER SARANA INFORMATIKA sehubungan Kontrak Nomor. 688/A/077.014, tanggal 1 November 2006 ;
- b. 1 (satu) lembar asli Kwitansi PT. SUMBER SARANA INFORMATIKA tertanggal 18 Desember 2006 sebesar Rp. 118.624.000,- (seratus delapan belas juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah), yang ditandatangani diatas materei 6.000 an. RIKO ROBERT M.H selaku Direktur PT. SUMBER SARANA INFORMATIKA dan an. BAHIR ROMSAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum DKI Jakarta, terdapat stempel dan tandatangan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, MSi selaku Kepala Biro Hukum Prov. DKI Jakarta ;
 - c. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 2555/SPP/SWD/BB/XII/2006 tertanggal 18 Desember 2006, yang ditanda tangani an. H. BUDIYONO selaku Pemegang Kas Setdaprov DKI Jakarta dan an. Drs. H. SYAUKI YAHYA selaku Kepala Biro Keuangan ;
 - d. 1 (satu) lembar asli Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap No. 2555/SPP/SWD/BB/XII/2006 tertanggal 18 Desember 2006, yang ditanda tangani an. H. BUDIYONO selaku Pemegang Kas Setdaprov DKI Jakarta dan an. Drs. H. SYAUKI YAHYA selaku Kepala Biro Keuangan ;
 - e. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Rincian Penggunaan Beban Tetap No. 181/SPP/2006 tertanggal 18 Desember 2006 yang ditandatangani oleh an. BAHIR ROMSAH selaku Pemegang Kas Cabang dan an. JORNAL E. SIAHAAN selaku Kepala Biro Hukum ;
 - f. 1 (satu) lembar asli Dokumen Faktur Nomor : 066/FT/SSI/XII/2006 tertanggal Desember 2006 yang ditandatangani an. RIKO ROBERT M.H selaku Direktur PT. SUMBER SARANA INFORMATIKA ;
 - g. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Barang (BAPB) Nomor : 38/BAPB/BH/XI/2006 tertanggal 27 November 2006, ditanda tangani oleh Panitia Pemeriksa Barang nomor urut 1 (satu) Ketua sampai dengan 5 (lima) anggota, an. RIKO ROBERT M. HUTAURUK selaku Direktur PT. SUMBER SARANA INFORMATIKA dan an. JORNAL E.

Hal. 437 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang
- h. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 46/BAST/BH/XI/2006 tanggal 28 November 2006, yang ditanda tangani an. IRUSWANDI, SH selaku Pengurus Barang unit Biro Hukum, an. RIKO ROBERT M. HUTAURUK selaku Direktur PT. SUMBER SARANA INFORMATIKA dan mengetahui an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Serah Terima Barang ;
95. 1 (satu) bundel Dokumen Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Peralatan Studio Visual Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta Nomor : 697/A/077.92 tertanggal 13 Oktober 2006, untuk PT. HOMBUTMAS;
96. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran atas Pengadaan Peralatan Studio Visual kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta Nomor : 697/A/077.92 tertanggal 13 Oktober 2006, untuk PT. HOMBUTMAS, yang berisi antara lain :
- a. 1 (satu) lembar asli Dokumen SPM Giro No : 00310302006 Tahun 2006 sebesar Rp. 83.094.600,- (delapan puluh tiga juta sembilan puluh empat ribu enam ratus rupiah) kepada PT. HOMBUTMAS sehubungan Kontrak Nomor. 697/A/077.92, tanggal 13 Oktober 2006
- b. 1 (satu) lembar asli Kwitansi PT. HOMBUT MAS tertanggal 6 Desember 2006 sebesar Rp. 92.796.000,- (sembilan puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus rupiah), yang ditandatangani diatas materei 6.000 an. ROBINA SIRAIT selaku Direktur PT. HOMBUT MAS dan an. BAHIR ROMSAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum DKI Jakarta, terdapat stempel dan tandatangan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, MSI selaku Kepala Biro Hukum Prov. DKI Jakarta ;
- c. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 2558/SPP/SWD/BB/XII/2006 tertanggal 18 Desember 2006, yang ditanda tangani an. H. BUDIYONO selaku Pemegang Kas Setdaprov DKI Jakarta

Hal. 438 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan an. Drs. H. SYAUKI YAHYA selaku Kepala Biro Keuangan ;
- d. 1 (satu) lembar asli Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap No. 2558/SPP/SWD/BB/XII/2006 tertanggal 18 Desember 2006, yang ditanda tangani an. H. BUDIYONO selaku Pemegang Kas Setdaprov DKI Jakarta dan an. Drs. H. SYAUKI YAHYA selaku Kepala Biro Keuangan ;
- e. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Rincian Penggunaan Beban Tetap No. 191/SPP/2006 tertanggal 18 Desember 2006 yang ditandatangani oleh an. BAHIR ROMSAH selaku Pemegang Kas Cabang dan an. JORNAL E. SIAHAAN selaku Kepala Biro Hukum ;
- f. 1 (satu) lembar asli dokumen Faktur Nomor : 295/F/HM/XII/2006 tertanggal 6 Desember 2006 yang ditandatangani an. ROBINA SIRAIT selaku Direktur PT. HOMBUT MAS ;
- g. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Barang (BAPB) Nomor : 53/BAPB/BH/XII/2006 tertanggal 6 November 2006, ditanda tangani oleh Panitia Pemeriksa Barang nomor urut 1 (satu) Ketua sampai dengan 5 (lima) anggota, an. ROBINA SIRAIT selaku Direktur PT. HOMBUT MAS dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang ;
- h. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 45/BAST/BH/XII/2006 tanggal 7 November 2006, yang ditanda tangani an. IRUSWANDI, SH selaku Pengurus Barang unit Biro Hukum, an. ROBINA SIRAIT selaku Direktur PT. HOMBUT MAS dan mengetahui an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Serah Terima Barang ;
97. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Kerja Nomor : 475/A/077.92 tanggal 19 Juli 2006 tentang Pengadaan Alat Pengukur Waktu kebutuhan Biro Hukum Setdaprov. DKI Jakarta untuk PT. INSAN DATA PERMATA ;

Hal. 439 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98. 1 (satu) bundel Dokumen Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Dalam Rangka Pengadaan Meubeler penunjang kebutuhan Biro Hukum Setda Prov. DKI Jakarta antara Biro Hukum Setda Prov. DKI Jakarta dengan CV.SALSABILA Nomor : 613/A/077.92 tertanggal 22 September 2006 ;
99. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran atas Pengadaan Meubeler penunjang kebutuhan Biro Hukum Setda Prov. DKI Jakarta antara Biro Hukum Setda Prov. DKI Jakarta dengan CV. SALSABILA Nomor : 613/A/077.92 tertanggal 22 September 2006, yang berisi antara lain:
- a. 1 (satu) lembar asli Dokumen SPM Giro No : 00310432006 tanggal 23 Desember 2006 sebesar Rp. 57.752.789,- (lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah) kepada CV. SALSABILA ;
 - b. 1 (satu) lembar asli Kwitansi CV. SALSABILA tertanggal 20 Desember 2006 sebesar Rp. 64.495.500,- (enam puluh empat juta empat ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah), yang ditandatangani diatas materai 6.000 an. IZUDDINNUR, Sag selaku Direktur CV. SALSABILA dan an. BAHIR ROMSAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum DKI Jakarta, terdapat stempel dan tandatangan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, MSi selaku Kepala Biro Hukum Prov. DKI Jakarta;
 - c. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 2667/SPP/SWD/BB/XII/2006 tertanggal 20 Desember 2006, yang ditanda tangani an. H. BUDIYONO selaku Pemegang Kas Setdaprov DKI Jakarta dan an. Drs. H. SYAUKI YAHYA selaku Kepala Biro Keuangan ;
 - d. 1 (satu) lembar asli Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap No. 2667/SPP/SWD/BB/XII/2006 tertanggal 20 Desember 2006, yang ditanda tangani an. H. BUDIYONO selaku Pemegang Kas Setdaprov DKI Jakarta dan an. Drs. H. SYAUKI YAHYA selaku Kepala Biro Keuangan ;
 - e. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Rincian Penggunaan Beban Tetap No. 199/SPP/2006 tertanggal 20 Desember 2006 yang ditandatangani oleh an. BAHIR ROMSAH selaku

Hal. 440 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemegang Kas Cabang dan an. JORNAL E. SIAHAAN selaku Kepala Biro Hukum ;
- f. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 53/BAST/BH/IX/2006 tanggal 16 November 2006, yang ditanda tangani an. IRUSWANDI, SH selaku Pengurus Barang unit Biro Hukum, an. Ir. TJINDARSIH WEMMY, MM selaku Direktur Utama PT. ARSIWASTUADI dan mengetahui an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Serah Terima Barang ;
- g. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Barang (BAPB) Nomor : 44/BAPB/BH/IX/2006 tertanggal 15 November 2006, ditanda tangani oleh Panitia Pemeriksa Barang nomor urut 1 (satu) Ketua sampai dengan 5 (lima) anggota, an. Ir. IZUDDINNUR, Sag selaku Direktur CV. SALSABILA dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang;
100. 1 (satu) bundel Dokumen Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Dalam Rangka Penelitian Empiris terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan kebutuhan Biro Hukum Setda Prov. DKI Jakarta antara Biro Hukum Setda Prov. DKI Jakarta dengan PT. ARSIWASTUADI Nomor : 712/A/077.92 tertanggal 8 November 2006;
101. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran atas Penelitian Empiris terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan kebutuhan Biro Hukum Setda Prov. DKI Jakarta antara Biro Hukum Setda Prov. DKI Jakarta dengan PT. ARSIWASTUADI Nomor : 712/A/077.9 tertanggal 8 November 2006, yang berisi antara lain :
- a. 1 (satu) lembar asli Dokumen SPM Giro No : 00310442006 tanggal 23 Desember 2006 sebesar Rp. 224.350.341,- (dua ratus dua puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah) kepada PT. ARSIWASTUADI ;
- b. 1 (satu) lembar asli Kwitansi PT. ARSIWASTUADI tertanggal 19 Desember 2006 sebesar Rp. 266.795.000,- (dua ratus enam puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu

Hal. 441 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



- rupiah), yang ditandatangani diatas materai 6.000 an. Ir. TJINDARSIH WEMMY, MM selaku Direktur Utama PT. ARSIWASTUADI dan an. BAHIR ROMSAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum DKI Jakarta, terdapat stempel dan tandatangan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, MSi selaku Kepala Biro Hukum Prov. DKI Jakarta ;
- c. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 2608/SPP/SWD/BB/XII/2006 tertanggal 19 Desember 2006, yang ditanda tangani an. H. BUDIYONO selaku Pemegang Kas Setdaprov DKI Jakarta dan an. Drs. H. SYAUKI YAHYA selaku Kepala Biro Keuangan ;
- d. 1 (satu) lembar asli Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap No. 2608/SPP/SWD/BB/XII/2006 tertanggal 19 Desember 2006, yang ditanda tangani an. H. BUDIYONO selaku Pemegang Kas Setdaprov DKI Jakarta dan an. Drs. H. SYAUKI YAHYA selaku Kepala Biro Keuangan ;
- e. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Rincian Penggunaan Beban Tetap No. 193/SPP/2006 tertanggal 19 Desember 2006 yang ditandatangani oleh an. BAHIR ROMSAH selaku Pemegang Kas Cabang dan an. JORNAL E. SIAHAAN selaku Kepala Biro Hukum ;
- f. 2 (dua) lembar asli Dokumen Bill of Quantity PT. ARSIWASTUADI tertanggal 13 Oktober 2006 yang ditanda tangani an. Ir. TJINDARSIH WEMMY, MM selaku Direktur Utama PT. ARSIWASTUADI ;
- g. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 50/BAST/BH/XII/2006 tanggal 11 Desember 2006, yang ditanda tangani an. IRUSWANDI, SH selaku Pengurus Barang unit Biro Hukum, an. Ir. TJINDARSIH WEMMY, MM selaku Direktur Utama PT. ARSIWASTUADI dan mengetahui an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Serah Terima Barang ;
- h. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Barang (BAPB) Nomor : 47/BAPB/BH/XII/2006 tertanggal 8 Desember 2006, ditanda tangani oleh Panitia Pemeriksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang nomor urut 1 (satu) Ketua sampai dengan 5 (lima) anggota, an. Ir. TJINDARSIH WEMMY, MM selaku Direktur Utama PT. ARSIWASTUADI dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang ;
- i. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Serah Terima Pengguna Barang Nomor : 50/BASTPB/BH/XII/2006 tanggal 11 Desember 2006, yang ditanda tangani an. IRUSWANDI, SH selaku Pengurus Barang unit Biro Hukum, an. Ir. TJINDARSIH WEMMY, MM selaku Direktur Utama PT. ARSIWASTUADI dan mengetahui an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Serah Terima Pengguna Barang ;
 - j. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Bobot Pekerjaan Nomor : 1/BABP/BH/XII/2006 tanggal 11 Desember 2006, yang ditanda tangani an. IRUSWANDI, SH selaku Pengurus Barang unit Biro Hukum, an. Ir. TJINDARSIH WEMMY, MM selaku Direktur Utama PT. ARSIWASTUADI dan mengetahui an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum ;
 - k. 13 (tiga belas) lembar asli Dokumen Daftar Absensi Tenaga Ahli bulan November sampai dengan Desember, yang ditanda tangani an. Ir. TJINDARSIH WEMMY, MM selaku Direktur Utama PT. ARSIWASTUADI ;
 - l. 1 (satu) lembar asli Dokumen Nomor : 101/AW-INV/XII/2006 tertanggal 13 Desember 2006 perihal Permohonan Pembayaran, yang ditanda tangani an. Ir. TJINDARSIH WEMMY, MM selaku Direktur Utama PT. ARSIWASTUADI ;
102. 1 (satu) bundel Dokumen Perjanjian Pengadaan Jasa Konsultasi Penyelenggaraan bimbingan teknis PKS/MOU kebutuhan Biro Hukum Setda Prov. DKI Jakarta antara Biro Hukum Setda Prov. DKI Jakarta dengan PT. QORINA KONSULTAN INDONESIA Nomor : 743/077.5 tertanggal 17 Nopember 2006 ;
103. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Qorina Konsultan, yang terdiri sebagai berikut :
- a. 1 (satu) lembar asli tindisan Dokumen SPM Giro No. 00324582006 TA. 2006 tertanggal 27 Desember 2006

Hal. 443 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 539.846.200,- (lima ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh enam ribu dua ratus rupiah) untuk pembayaran Biaya Pekerjaan Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Penyusunan PKS/MOU Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov. DKI Jakarta dengan SPK Nomor 743/177.5 ;

- b. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tertanggal 20 Desember 2006, sebesar Rp. 539.846.200,- (lima ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh enam ribu dua ratus rupiah), yang ditandatangani an. Ir. AZHARSYAH selaku Direktur Utama PT. QORINA KONSULTAN INDONESIA, an. BAHIR ROMSAH selaku Pemegang Kas Cabang dan terdapat stempel dan tanda tangan an. JORNAL E. SIAHAAN selaku Kepala Biro Hukum DKI Jakarta ;
- c. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 2678/SPP/SWD/BB/XII/2006 tertanggal 20 Desember 2006, yang ditanda tangani an. H. BUDIYONO selaku Pemegang Kas Setdaprov DKI Jakarta dan an. HARI SANDJOJO, MJ selaku Asisten Keuangan ;
- d. 1 (satu) lembar asli Dokumen Surat Permintaan Pembayaran No. 2678/SPP/SWD/BB/XII/2006 tertanggal 20 Desember 2009, yang ditanda tangani an. H. BUDIYONO selaku Pemegang Kas Setdaprov DKI Jakarta dan an. HARI SANDJOJO, MJ selaku Asisten Keuangan ;
- e. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Rincian Rencana Penggunaan Beban Tetap No. 192/SPP/2006 tanggal 20 Desember 2006, ditandatangani an. BAHIR ROMSAH selaku Pemegang Kas Cabang dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum ;
- f. 1 (satu) lembar asli Dokumen Surat Nomor : 067/SP.Pem-QKI/XII/2006 tertanggal 15 Desember 2006 perihal Permohonan Pembayaran, ditujukan kepada Kepala Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta, yang ditandatangani an. Ir. AZHARSYAH selaku Direktur Utama PT. QORINA KONSULTAN INDONESIA, berikut 2 (dua) lembar asli lampiran rencana biaya ;

Hal. 444 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Barang (BAPB) Nomor : 52/BAPB/BH/XII/2006 tertanggal 14 Desember 2006, ditanda tangani oleh Panitia Pemeriksa Barang nomor urut 1 (satu) Ketua sampai dengan 5 (lima) anggota, an. Ir. AZHARSYAH selaku Direktur Utama PT. QORINA KONSULTAN dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang ;
- h. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 44/BAST/BH/XII/2006 tanggal 14 Desember 2006, yang ditanda tangani an. IRUSWANDI, SH selaku Pengurus Barang unit Biro Hukum, an. Ir. AZHARSYAH selaku Direktur Utama PT. QORINA KONSULTAN dan mengetahui an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Serah Terima Barang ;
- i. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Bobot Pekerjaan Nomor : 2/BAPB/BH/XII/2006 tertanggal 14 Desember 2006, yang ditanda tangani an. IRUSWANDI, SH selaku Pengurus Barang unit Biro Hukum, an. Ir. AZHARSYAH selaku Direktur Utama PT. QORINA KONSULTAN dan mengetahui an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Serah Terima Barang ;
- j. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Hadir Tenaga Ahli Pekerjaan Bimbingan Teknis Penyusunan Perjanjian Kerjasama – MOU, tertanggal November 2006, yang ditanda tangani an. Ir. AZHARSYAH selaku Direktur Utama PT. QORINA KONSULTAN;
104. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Kerja Nomor : 470/A/078.23 kepada CV. BENEAGNESVAN tentang Penggandaan fotocopy dan penjilidan bahan-bahan dalam rangka penyusunan himpunan produk hukum daerah berupa Perda BD dan risalah pembahasan perda kebutuhan Biro Hukum Setda Prov. DKI Jakarta, tertanggal 19 Juli 2006 ;
105. 1 (satu) buah Dokumen Buku Kas Pengeluaran MK.10 – Pemegang Kas : Cabang – Unit Organisasi : Biro Hukum –

Hal. 445 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran : 2006, pada pojok kanan atas terdapat angka romawi I ;

106. 1 (satu) buah Dokumen Buku Kas Pengeluaran MK.10 – Pemegang Kas : Cabang – Unit Organisasi : Biro Hukum Sekda Prop. DKI Jkt – Tahun Anggaran : 2006, pada pojok kanan atas terdapat angka romawi II ;
107. 1 (satu) buah Dokumen Buku Kas Pengeluaran MK.10, pada pojok kanan atas terdapat angka romawi III ;
108. 1 (satu) buah Dokumen Buku Kas Pengeluaran MK.10, pada pojok kanan atas terdapat angka romawi IV ;
109. 1 (satu) buah Dokumen Buku Kas Pengeluaran MK.10, pada pojok kanan atas terdapat angka romawi V ;
110. 3 (tiga) lembar Laporan Keuangan Efisiensi bulan Juli s.d Desember 2006, terdapat tanda tangan an. BAHIR ROMSAH pada setiap lembarnya ;
111. 1 (satu) lembar asli Dokumen Rapat Kesepakatan untuk Menanggulangi Biaya-biaya Koordinasi, terdapat tanda tangan an. BAHIR ROMSAH pada setiap lembarnya ;
112. 4 (empat) lembar Dokumen Realisasi Anggaran sampai dengan Triwulan IV (Januari s.d 29 Desember 2006) tertanggal 29 Desember 2006, yang terdapat tanda tangan BAHIR ROMSAH pada setiap halaman pada pojok kanan bawah ;
113. 1 (satu) bundel Dokumen Penggunaan Uang Hasil Pengumpulan Pemotongan, antara lain :
 - a. 1 (satu) lembar asli Dokumen Surat dengan kop surat “Dewan Perwakilan Rakyat Daerah - Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta - Sekretariat”, ditujukan kepada Bapak Kepala Biro, tertanggal 6 Desember 2006, ditanda tangani POLTAK SITUMEANG selaku koordinator, berikut 1 (satu) lembar disposisi tertanggal 7-12-2006, 1 (satu) lembar asli kwitansi dari Kepala Biro Hukum sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) diterima dan ditandatangani an. EFENDI dan 1 (satu) lembar tanda terima surat tertanggal 7 Desember 2006 ;
 - b. 1 (satu) lembar Kwitansi Sudah Terima dari Biro Hukum sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tertanggal 2 Agustus 2006;

Hal. 446 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar asli Dokumen Nomor : 45/-085.4 tertanggal 10 April 2007 perihal Pembelian Cinderamata, ditujukan kepada Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta, yang ditanda tangani an. TRI JOKO RAHADJO, SH selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta ;
- d. 1 (satu) lembar Dokumen Nomor : 072/YCS/LP-SP/V/07 tertanggal 2 Maret 2007 perihal Permohonan Partisipasi, ditujukan kepada Kepala Biro Hukum Provinsi DKI Jakarta, yang ditandatangani oleh Drs. ER. Kartasmita selaku Ketua Panitia, Letjen TNI (Purn) R. Soeprapto selaku Pembina Panitia dan Mengetahui Prof. DR. H. Achmad Sutarmadi selaku Penasehat Panitia, berikut 1 (satu) lembar asli kwitansi No : 05/YCS/LP-SP/V/2007 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 22 Mei 2007 yang ditandatangani an. AHMAD WIBOWO selaku Bendahara dan 1 (satu) lembar disposisi tanggal 26-3-07 ;
- e. 1 (satu) lembar asli Kwitansi – Sudah Terima dari Kepala Biro Hukum sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal Juli 2006, yang ditanda tangani an. SUDONO ;
- f. 1 (satu) lembar asli Kwitansi – Sudah Terima dari Kepala Biro Hukum sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal Juli 2006, yang ditanda tangani an. SARIYAH ;
- g. 1 (satu) lembar asli Kwitansi LILIN MAS – ART PRINTING – Sudah Terima dari Biro Hukum Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 21 Juli 2006, terdapat tanda tangan penerima (tanpa nama) dan stempel LILIN MAS – Jakarta ;
- h. 1 (satu) lembar asli Kwitansi – Sudah Terima dari Kepala Biro Hukum sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal Agustus 2006, yang ditanda tangani an. SUDONO;
- i. 1 (satu) lembar asli Kwitansi – Sudah Terima dari Kepala Biro Hukum sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal Agustus 2006, yang ditanda tangani an. SARIYAH;
- j. 1 (satu) lembar asli Kwitansi – Sudah Terima dari Kepala Biro Hukum sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Hal. 447 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tertanggal 14 Agustus 2006, yang ditanda tangani an. ARI LASTUTI ;
- k. 1 (satu) lembar asli Nota sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tertanggal 22 Agustus 2006 ;
- l. 1 (satu) lembar asli Kwitansi TUTY Catering – sudah terima dari Biro Hukum sebesar Rp. 3.135.000,- (tiga juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) tertanggal 21 September 2006, terdapat tanda tangan (tanpa nama) dan stempel TUTY Catering ;
- m. 1 (satu) lembar asli Kwitansi – Sudah Terima dari Kepala Biro Hukum sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) tertanggal 25 September 2006, yang ditanda tangani (tanpa nama) dan stempel A. MATSA'AN AGENCY. ;
- n. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Tanda Terima – Sudah Terima dari BAHIR ROMSAH (Pemegang Kas Cabang Biro Hukum) sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 27 September 2006, yang ditanda tangani an. ZAENAL WAHAB ;
- o. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Tanda Terima – Sudah Terima dari BAHIR ROMSAH (Pemegang Kas Cabang Biro Hukum) sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tertanggal 27 September 2006, yang ditanda tangani an. PUJI H ;
- p. 1 (satu) lembar asli Kwitansi – Sudah Terima dari Ny. JORNAL SA sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tertanggal 3 Oktober 2006, yang ditanda tangani an. Ny. MURDIMAN dan stempel Persatuan Dharma Wanita Setda Provinsi DKI Jakarta ;
- q. 1 (satu) lembar asli Kwitansi – Sudah Terima dari Ny. JORNAL SA sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 3 Oktober 2006, yang ditanda tangani an. Ny. MURDIMAN dan stempel Persatuan Dharma Wanita Setda Provinsi DKI Jakarta ;
- r. 1 (satu) lembar asli Kwitansi – Sudah Terima dari Biro Hukum sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), tertanggal 3 Oktober 2006, yang ditanda tangani an. Ny. SUPRIADI ;

Hal. 448 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



- s. 1 (satu) lembar asli Kwitansi – Sudah Terima dari Kepala Biro Hukum sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 6 Oktober 2006, yang ditanda tangani an. SARIYAH ;
- t. 1 (satu) lembar asli Kwitansi – Sudah Terima dari Biro Hukum Prop DKI Jakarta sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 11 Oktober 2006, yang ditanda tangani an. E. KOSASIH ;
- u. 1 (satu) lembar asli Kwitansi – Sudah Terima dari Kepala Biro Hukum sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 6 Oktober 2006, yang ditanda tangani an. SUDONO ;
- v. 1 (satu) lembar asli Kwitansi – Sudah Terima dari Kepala Biro Hukum sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) tertanggal 30 Oktober 2006, yang ditanda tangani (tanpa nama) dan stempel A. MATSA'AN AGENCY ;
- w. 1 (satu) lembar asli Kwitansi – Sudah Terima dari Kepala Biro Hukum sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 6 November 2006, yang ditanda tangani an. SUDONO ;
- x. 1 (satu) lembar asli Kwitansi – Sudah Terima dari Kepala Biro Hukum sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 6 November 2006, yang ditanda tangani an. SARIYAH ;
- y. 1 (satu) lembar asli Kwitansi – Sudah Terima dari Biro Hukum Prop DKI Jakarta sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 17 Nopember 2006, yang ditanda tangani an. E. KOSASIH ;
- z. 1 (satu) lembar asli Kwitansi – Sudah terima dari Kepala Biro Hukum sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 6 Desember 2006, yang ditanda tangani an. SUDONO ;
- aa.1 (satu) lembar asli Kwitansi – Sudah terima dari PKC Biro Hukum sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tertanggal 5 Desember 2006, yang ditanda tangani an. KADRIN ;



- ab.1 (satu) lembar asli Kwitansi – Sudah terima dari Biro Hukum DKI Jakarta sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) tertanggal 27 November 2006, yang ditanda tangani (tanpa nama) dan stempel A. MATSA'AN AGENCY ;
- ac.1 (satu) lembar asli Kwitansi – Sudah terima dari Kepala Biro Hukum sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 6 Desember 2006, yang ditanda tangani an. SARIYAH ;
- ad.1 (satu) lembar asli Kwitansi – Sudah terima dari Biro Hukum sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 12 Desember 2006, yang ditanda tangani an. ETI R ;
- ae.1 (satu) lembar asli Kwitansi – Sudah terima dari Biro Hukum Prop DKI Jakarta sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 22 Desember 2006, yang ditanda tangani an. E. KOSASIH ;
- af.1 (satu) lembar asli Kwitansi – Sudah terima dari Biro Hukum DKI Jakarta sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) tertanggal 27 Desember 2006, yang ditanda tangani (tanpa nama) dan stempel A. MATSA'AN AGENCY ;
- ag.1 (satu) lembar asli Daftar : Pembayaran transport petugas jaga bulan Desember 2006 ;
- ah.1 (satu) lembar asli Kwitansi – Sudah terima dari PKC Biro Hukum sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), tertanggal 6 Desember 2006 yang ditandatngani an. IRUS WANDI, berikut 1 (satu) lembar foto copy Surat Nomor : 188/B-1/S-PEMB/i/SEMINAR/XI/2006 dan 1 (satu) lembar disposisi ;
- ai.1 (satu) lembar asli Daftar Rincian Anggaran Perjalanan Dalam Rangka menghadiri Resepsi Pernikahan Sdr. IWAN SATYOPRODJO, SH, MH dengan DIAN PUSPITO, SH di Blora Jawa Tengah ;
115. 1 (satu) bundel Dokumen Kwitansi Penerimaan Uang Hasil Pengumpulan Pemotongan oleh an. ELLEN SIAGIAN dan an. JORNAL EFFENDI SIAHAAN, antara lain :
- a. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima tertanggal 4 Agustus 2006, sudah terima dari BAHIR ROMSAH (Pemegang Kas Cabang Biro Hukum) sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah), untuk keperluan kegiatan Kepala Biro Hukum bulan Agustus 2006, yang ditandatangani an. ELLEN SIAGIAN ;
- b. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima tertanggal 7 Agustus 2006, sudah terima dari BAHIR ROMSAH (Pemegang Kas Cabang Biro Hukum) sebesar Rp 75.000.000,00, untuk keperluan pinjaman Kepala Biro Hukum dalam rangka pembelian Meubelair ruangan, yang ditandatangani an. ELLEN SIAGIAN ;
- c. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima tertanggal 5 September 2006, sudah terima dari BAHIR ROMSAH (Pemegang Kas Cabang Biro Hukum) sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), untuk keperluan kegiatan Kepala Biro Hukum bulan September 2006, yang ditandatangani an. ELLEN SIAGIAN ;
- d. 1 (satu) lembar Kwitansi Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tertanggal 8 September 2006, sudah terima dari Bapak H. BAHIR sebesar Rp 25.000.000,00, untuk pembayaran keperluan Karo, yang ditandatangani an. ELLEN. S ;
- e. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima tertanggal 4 Oktober 2006, sudah terima dari BAHIR ROMSAH (Pemegang Kas Cabang Biro Hukum) sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), untuk keperluan kegiatan Kepala Biro Hukum bulan Oktober 2006, yang ditandatangani an. ELLEN SIAGIAN ;
- f. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima tertanggal 6 November 2006, sudah terima dari BAHIR ROMSAH (Pemegang Kas Cabang Biro Hukum) sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), untuk keperluan kegiatan Kepala Biro Hukum bulan November 2006, yang ditandatangani an. ELLEN SIAGIAN ;
- g. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima tertanggal 5 Desember 2006, sudah terima dari BAHIR ROMSAH (Pemegang Kas Cabang Biro Hukum) sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), untuk keperluan kegiatan Kepala Biro Hukum bulan Desember 2006, yang ditandatangani an. ELLEN SIAGIAN ;

Hal. 451 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



- h. 1 (satu) lembar Bon Pengeluaran tertanggal 29 Desember 2006, Efisiensi bulan Desember 2006 sebesar Rp 200.000.000,00, terdapat tanda tangan atas nama Karo Hukum (tanpa nama) ;
115. 1 (satu) bundel foto copy Buku I Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta TA.2007 ;
116. 1 (satu) bundel foto copy Buku VII Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta TA.2007 ;
117. 1 (satu) bundel Dokumen DPA SKPD Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2007 ;
118. 4 (empat) lembar foto copy legalisir Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2007 Nomor : 006/DPPA/2007 tanggal 20-11-2007, terdapat Cap Mengetahui/menyetujui sesuai dengan aslinya dan ditandatangani oleh RETNOWATI selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Pemprov DKI Jakarta ;
119. 3 (tiga) lembar asli Dokumen Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 486/2007, tanggal 9 April 2007 perihal Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2007, berikut 57 (lima puluh tujuh) lembar asli lampirannya ;
120. 6 (enam) lembar salinan asli Dokumen Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2007 tanggal 30 Maret 2007 perihal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 ;
121. 4 (empat) lembar salinan asli Dokumen Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 52 Tahun 2007 tanggal 30 Maret 2007 perihal Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 ;
122. 6 (enam) lembar salinan asli Dokumen Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 9 Tahun 2007 tanggal 19 November 2007 perihal Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 ;

Hal. 452 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123. 4 (empat) lembar salinan asli Dokumen Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 158 Tahun 2007 tanggal 19 November 2007 perihal Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2007 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 ;
124. 3 (tiga) lembar asli Keputusan Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 02 Tahun 2007 perihal Pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2007 ;
125. 3 (tiga) lembar asli Keputusan Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 01 Tahun 2007 perihal Pembentukan Panitia Pemeriksaan Barang / Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2007 ;
126. 3 (tiga) lembar salinan asli Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 191 / 2007 perihal Penetapan Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Atasan Langsungnya Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2007, berikut 2 (dua) lembar lampirannya ;
127. 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Keputusan Kepala Biro Hukum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 292/2007 perihal Pembentukan Pembantu Pemegang Kas Cabang Biro Hukum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2007, berikut 1 lembar lampirannya ;
128. 1 (satu) buah asli Buku Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 92 Tahun 2001 – Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2001 tanggal 13 Desember 2001 tentang Pokok pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
129. 1 (satu) bundel foto copy Buku I Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta TA.2007;

Hal. 453 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

130. 1 (satu) bundel foto copy Buku VI Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta TA.2007 ;
131. 1 (satu) bundel asli Dokumen Perjanjian Pelelangan Umum Pengadaan Jasa Filler Kebutuhan Biro Hukum Sekda Prov. DKI Jakarta antara Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan CV. Sandi Perkasa Nomor 508/077.72, yang berisi antara lain :
- a. 8 (delapan) lembar asli Dokumen Perjanjian Pelelangan Umum Pengadaan Jasa Filler Hukum Kebutuhan Biro Hukum Sekda Prov. DKI Jakarta antara Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan CV. Sandi Perkasa Nomor. 508/077.72, tanggal 25 September 2007, yang ditandatangani oleh Pihak Pertama an. JORNAL E. SIAHAAN, SH. M.Si selaku Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Pihak Kedua an. Ir. RATNANINGSIH, MSi selaku Direktur CV. Sandi Perkasa, beserta lampirannya ;
 - b. 4 (empat) lembar Surat Sandi Perkasa CV beserta lampirannya, tertanggal 6 September 2007 Nomor : 282/SP-ADM/IX/07, ditujukan kepada Ketua Pengadaan Barng/Jasa Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta, ditandatangani an. Ir. RATNANINGSIH, Msi selaku Direktur CV. Sandi Perkasa ;
 - c. 1 (satu) lembar foto copy Dokumen Jaminan Penawaran PT. ASURANSI PAROLAMAS Nomor Bond : JKT/SNA/00252/07, Nilai Bond : Rp. 67.056.000,- (enam puluh tujuh juta lima puluh enam ribu rupiah), tertanggal 6 September 2007 yang ditandatangani oleh an. BANDA HARO HARAHAP, SE selaku Manager PT. ASURANSI PAROLAMAS (Surety), dan an. Ir. RATNANINGSIH selaku Direktur CV. SANDI PERKASA (Principal) ;
 - d. 3 (tiga) lembar asli Dokumen Keputusan Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 506/077.92, tanggal 18 September 2007 tentang Penetapan Penyedia Barang/Jasa Pelelangan Umum Pengadaan Jasa Filler Hukum Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov. DKI Jakarta, yang ditandatangani oleh an.

Hal. 454 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- JORNAL E. SIAHAAN, SH. M.Si selaku Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
- e. 2 (dua) lembar asli Dokumen Keputusan Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 508/077.92, tanggal 25 September 2007 tentang Penunjukkan CV. Sandi Perkasa sebagai perusahaan penyedia barang/jasa pengadaan Jasa Filler Hukum Kebutuhan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta, yang ditandatangani oleh an. JORNAL E. SIAHAAN, SH. M.Si selaku Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
- f. 1 (satu) lembar asli Dokumen pengumuman pemenang pelelangan umum pengadaan jasa filler hukum kebutuhan biro hukum setdaprov DKI Jakarta, Nomor : 25/PPBJ/Peng/L/Filler/IX/ 2007, tertanggal 17 September 2007, ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua ;
- g. 1 (satu) lembar asli Dokumen Nomor : 482/075.72, tanggal 17 September 2007 perihal Penetapan Pemenang Lelang Umum Pengadaan Jasa Filler Hukum Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov. DKI Jakarta, yang ditujukan kepada Panitia Pengadaan Barang / Jasa Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta, yang ditandatangani oleh an. JORNAL E. SIAHAAN, SH. M.Si selaku Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
- h. 5 (lima) lembar asli Dokumen Nomor : 24/PPBJ/Lap./Filler/IX/ 2007, tanggal 14 September 2007 perihal Laporan lelang umum pengadaan jasa filler hukum kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta, yang ditujukan kepada Kepala Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta, ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua ;
- i. 2 (dua) lembar asli Dokumen Berita Acara Penetapan Calon Pemenang Lelang dan Cadangan Calon Pemenang Pengadaan Jasa Filler Hukum Kebutuhan Biro Hukum

Hal. 455 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setdaprov. DKI Jakarta Nomor : 23/PPBJ/BA/Filler-ABT/IX/2007 tanggal 14 September 2007, yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua, IWAN SATYOPRODJO, SH, MM selaku Sekretaris, ISMIYATUN, SH, Endang SUMARDI, SH, KM. JAUHARI, SH, RADIAH, SH dan SUCI RAHAYU selaku Anggota ;

- j. 4 (empat) lembar asli Dokumen Berita Acara Hasil Pelelangan Umum Pengadaan Jasa Filler Hukum Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov. DKI Jakarta Nomor : 22/PPBJ/BA/FILLER/IX/2007 tanggal 14 September 2007, yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua, IWAN SATYOPRODJO, SH, MM selaku Sekretaris, ISMIYATUN, SH, Endang SUMARDI, SH, KM. JAUHARI, SH, RADIAH, SH dan SUCI RAHAYU selaku Anggota ;
- k. 3 (tiga) lembar asli Dokumen Berita Acara Penilaian dan Pembuktian Kualifikasi Dokumen Penawaran Pelelangan Umum Dalam Rangka Pengadaan Jasa Filler Hukum Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov. DKI Jakarta Nomor : 21/PPBJ/BA/FILLER/IX/ 2007 tanggal 14 September 2007, yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua, IWAN SATYOPRODJO, SH, MM selaku Sekretaris, ISMIYATUN, SH, Endang SUMARDI, SH, KM. JAUHARI, SH, RADIAH, SH dan SUCI RAHAYU selaku Anggota;
- l. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Hadir Tenaga Ahli dalam rangka Pengadaan Jasa Filler Hukum Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta, pada hari/tanggal : Jum'at, 14 September 2007, pukul 09.00 WIB, Tempat : Ruang Rapat Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Blok G lantai 9 Jl. Merdeka Selatan 8-9 Jakarta Pusat, Acara : Penilaian dan Pembuktian Kualifikasi Dokumen Surat Penawaran Harga (SPH) Pelelangan Umum Pengadaan Jasa

Hal. 456 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Filler Hukum Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov. DKI Jakarta, yang terdapat tanda tangan nomor urut 1 (satu) an. MADE SUARJAYA, SH (Jabatan Ketua) sampai dengan nomor urut 17 (tujuh belas) an. AGUS SAMBODO (Jabatan Team Kreatif/Animator/Editor), yang ditandatangani oleh an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;
- m. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Hadir pada hari/tanggal : Jum'at, 14 September 2007, pukul 09.30 WIB, Tempat : Ruang Rapat Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Blok G lantai 9 Jl. Merdeka Selatan 8-9 Jakarta Pusat, Acara Penilaian dan Pembuktian Kualifikasi Dokumen Surat Penawaran Harga (SPH) Pelelangan Umum Pengadaan Jasa Filler Hukum Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov. DKI Jakarta, yang terdapat tanda tangan nomor urut 1 (satu) an. MADE SUARJAYA, SH sampai dengan nomor urut 8 (delapan) an. TRIYITNO (CV. SANDI PERKASA), yang ditandatangani oleh an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;
- n. 1 (satu) lembar foto copy Dokumen Nomor : 20/PPBJ/UND/Filler/ IX/2007, tanggal 13 September 2007 perihal Undangan, yang ditujukan kepada Direktur/pimpinan CV. SANDI PERKASA Jl. Adhyaksa II No. 37 E, Kel. Cilandak, Jakarta Selatan, yang ditandatangani oleh an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;
- o. 1 (satu) lembar foto copy Dokumen Nomor : 19/PPBJ/UND/ Filler/IX/2007, tanggal 13 September 2007 perihal Undangan, yang ditujukan kepada IWAN SATYOPRODJO, SH, MM, ISMIYATUN, SH, Endang SUMARDI, SH, KM. JAUHARI, SH, RADIAH, SH dan SUCI RAHAYU, yang ditandatangani oleh an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;



- p. 3 (tiga) lembar asli Dokumen Berita Acara Evaluasi Dokumen Kualifikasi Surat Penawaran Harga (SPH) Pelelangan Umum Dalam Rangka Pengadaan Jasa Filler Hukum Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov. DKI Jakarta Nomor : 18/PPBJ/BA/Fillerl/X/2007, tanggal 13 September 2007, yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua, IWAN SATYOPRODJO, SH, MM selaku Sekretaris, ISMIYATUN, SH, Endang SUMARDI, SH, KM. JAUHARI, SH, RADIAH, SH dan SUCI RAHAYU selaku Anggota;
- q. 7 (tujuh) lembar asli Dokumen Berita Acara Evaluasi Teknis dan Harga Dokumen Penawaran Pelelangan Umum Dalam Rangka Pengadaan Jasa Filler Hukum Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov. DKI Jakarta beserta lampirannya, Nomor : 17/PPBJ/BA/Filler/IX/2007, tanggal 13 September 2007, yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua, IWAN SATYOPRODJO, SH, MM selaku Sekretaris, ISMIYATUN, SH, Endang SUMARDI, SH, KM. JAUHARI, SH, RADIAH, SH dan SUCI RAHAYU selaku Anggota;
- r. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran (SPH) Sampul II Pelelangan Umum Dalam Rangka Pengadaan Jasa Filler Hukum Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta, Nomor : 16/PPBJ/BA/FILLER/IX/2007, tanggal 12 September 2007, yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua, IWAN SATYOPRODJO, SH, MM selaku Sekretaris, ISMIYATUN, SH, Endang SUMARDI, SH, KM. JAUHARI, SH, RADIAH, SH dan SUCI RAHAYU selaku anggota, dan Penyedia Barang/Jasa an. ANTISTIN yang mewakili PT. Crown Entertama, an. IRFAN. E yang mewakili CV. Sandi Perkasa ;
- s. 2 (dua) lembar foto copy Dokumen Nomor : 15/PPBJ/UND/Filler/IX/2007, tanggal 11 September 2007 perihal Undangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditujukan kepada Direktur/Pimpinan PT. KALINGGA ROMANSA FILM, Wisma Nugra Santana Lt. 14 Suites 1416, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 7-8, Jakarta dan PT. MELIA MEDIA KREASI Jln. Tebet Barat Dalam III No. 6 Jakarta Selatan, yang ditandatangani oleh an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;

t. 1 (satu) lembar asli Dokumen Nomor : 15/PPBJ/UND/Filler/IX/2007, tanggal 11 September 2007 perihal Undangan, yang ditujukan kepada Direktur/Pimpinan CV. ANANTO SINAR KASIH, Jl. Keselamatan No. 6 RT 001/03, Manggarai Selatan, Jakarta Selatan, yang ditandatangani oleh an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;

u. 1 (satu) lembar asli Dokumen Nomor : 15/PPBJ/UND/Filler/IX/2007, tanggal 11 September 2007 perihal Undangan, yang ditujukan kepada Direktur/Pimpinan PT. MAXINDO BINTANG TEKNIKA, Jl. Amil Wahab No. 13, Kramat Jati, Jakarta Timur, yang ditandatangani oleh an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;

v. 1 (satu) lembar asli Dokumen Nomor : 15/PPBJ/UND/Filler/IX/2007, tanggal 11 September 2007 perihal Undangan, yang ditujukan kepada Direktur/Pimpinan PT. CAHAYA KRISTAL MEDIA, Jl. Gaharu Terusan I No. 5 A Kel. Cilandak, Jakarta Selatan, yang ditandatangani oleh an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;

w. 1 (satu) lembar asli Dokumen Nomor : 15/PPBJ/UND/Filler/IX/2007, tanggal 11 September 2007 perihal Undangan, yang ditujukan kepada Direktur/Pimpinan PT. DEMI GISELA CITRA UTAMA, Komplek Rukan Taman Pondok Kelapa Blok B-7 RT 001/01, Kel. Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur, yang ditandatangani oleh an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;

Hal. 459 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- x. 1 (satu) lembar asli Dokumen Nomor : 15/PPBJ/UND/Filler/IX/2007, tanggal 11 September 2007 perihal Undangan, yang ditujukan kepada Direktur/Pimpinan PT. SATU VISI PERKASA, Wijaya Grand Center Blok E-11 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang ditandatangani oleh an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;
- y. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Hadir pada hari/tanggal : Rabu, 12 September 2007, pukul 13.00 WIB, Tempat : Ruang Rapat Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Blok G lantai 9 Jl. Merdeka Selatan 8-9 Jakarta Pusat, Acara Pembukaan Dokumen Penawaran (SPH) Sampul II Pelelangan Umum Dalam Rangka Pengadaan Jasa Filler Hukum Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta, yang terdapat tanda tangan nomor urut 1 (satu) an. MADE SUARJAYA, SH sampai dengan nomor urut 10 (sepuluh) an. IRFAN. E (CV. SANDI PERKASA), yang ditandatangani oleh an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;
- z. 1 (satu) lembar asli Dokumen Nomor : 14/PPBJ/UND/Filler/IX/2007, tanggal 11 September 2007 perihal Undangan, yang ditujukan kepada Direktur/Pimpinan PT. CROWN ENTERTAMA, Jl. Kapuas No. 21 Kel. Cideng, Kec. Gambir, Jakarta Pusat dan kepada Direktur/Pimpinan CV. SANDI PERKASA, Jl. Adhyaksa II No. 37 E, Kel. Cilandak, Jakarta Selatan, yang ditandatangani oleh an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;
- aa.1 (satu) lembar asli Dokumen Nomor : 13/PPBJ/UND/Filler/IX/ 2007, tanggal 11 September 2007 perihal Undangan, yang ditujukan kepada IWAN SATYOPRODJO, SH, MM, ISMIYATUN, SH, Endang SUMARDI, SH, KM. JAUHARI, SH, RADIAH, SH dan SUCI RAHAYU, yang ditandatangani oleh an. MADE SUARJAYA,

Hal. 460 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;
- ab.5 (lima) lembar asli Dokumen Surat dari Crown Entertama beserta lampirannya, Nomor : 005/SK-CR.ETA/IX/2007, perihal Penawaran Pelelangan Umum dalam Rangka pengadaan filler hukum kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta, tertanggal 6 September 2007, ditujukan kepada Ketua Pengadaan Barang/Jasa Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta, yang ditandatangani oleh an. Ir. ANTISTIN selaku Direktur Utama PT. CROWN ENTERTAMA ;
- ac.1 (satu) lembar Dokumen asli Penawaran PSA Station TVRI ;
- ad.1 (satu) lembar Dokumen asli Special Package periode Oktober – November 2007 station Lativi ;
- ae.1 (satu) lembar Dokumen asli Media Order Special Package Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta, Periode September 2007, station Jak TV;
- ae.1 (satu) lembar Dokumen asli Loose Spot Package “Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta”, Periode 2007, station Metro TV ;
- ag.1 (satu) lembar Dokumen asli Spesial Paket PSA For Dept. Kesehatan periode September 2007, station RCTI ;
- ah.1 (satu) lembar Dokumen asli Special Package PSA periode September 2007 station TPI ;
- ai. 2 (dua) lembar Dokumen asli Daftar Rekapitulasi Penawaran ;
- aj. 1 (satu) bundel Dokumen asli Data Administrasi PT. CROWN ENTERTAMA ;
- ak.1 (satu) bundel Dokumen asli Data Teknis PT. CROWN ENTERTAMA;
- al. 1 (satu) bundel Dokumen foto copy Lampiran dari PT. CROWN ENTERTAMA ;
- am. 81 (delapan satu) bundel Dokumen foto copy Data Pengalaman Perusahaan CV. SANDI PERKASA ;
- an.1 (satu) lembar Dokumen Jadwal Kerja Produksi Filler Hukum Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;
- ao.1 (satu) lembar Dokumen asli Media Plan penayangan iklan layanan masyarakat Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta TA.

Hal. 461 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2007, tertanggal 6 September 2007, ditandatangani oleh an. Ir. RATNANINGSIH, Msi selaku Direktur CV. SANDI PERKASA ;
- ap.5 (lima) lembar Dokumen asli Story Board dengan tema “Bersih Lingkungan”, durasi 30 detik ;
- aq.5 (lima) lembar Dokumen asli Story Board dengan tema “Kawasan dilarang merokok”, durasi 30 detik ;
- ar. 11 (sebelas) lembar Dokumen asli Dukungan TV, dari PT. Lativi Media Karya dan PT. Cipta TPI ;
- as. 102 (seratus dua) lembar Dokumen foto copy data personalia yang terlibat dalam produksi PSA ;
- at. 13 (tiga belas) lembar Dokumen asli formulir isian kualifikasi yang terdiri atas Pakta Integritas, Surat Pernyataan Minat CV. Sandi Perkasa untuk mengikuti pengadaan jasa Filler hukum, dan Formulir isian penilaian kualifikasi ;
- au.1 (satu) lembar Dokumen foto copy Surat Keterangan dukungan keuangan Bank DKI Nomor : 20/SKDKB/GND/IX/2007 tertanggal 5 September 2007, ditandatangani oleh an. OMON SAMANHUDI selaku Wakil pimpinan Kantor Bank DKI cabang pembantu Gunadarma ;
- av. 5 (lima) lembar Dokumen asli Data Administrasi CV. SANDI PERKASA, yang terdiri atas Surat Pernyataan KD tertinggi, surat pernyataan kebenaran data/dokumen, surat pernyataan pernah memiliki pengalaman pekerjaan sejenis, surat pernyataan bukan pegawai negeri sipil/BI/BHMN/BUMN, dan surat pernyataan ;
- aw. 7 (tujuh) lembar Dokumen foto copy data Legalitas Perusahaan CV, SANDI PERKASA ;
- ax.1 (satu) lembar Dokumen asli Jaminan Penawaran PT. ASURANSI PAROLAMAS Nomor Bond : JKT/SNA/00252/07, Nilai Bond : Rp. 67.056.000,- (enam puluh tujuh juta lima puluh enam ribu rupiah), tertanggal 6 September 2007 yang ditandatangani oleh an. BANDAHARO HARAHAP, SE selaku Manager PT. ASURANSI PAROLAMAS (Surety), dan an. Ir. RATNANINGSIH selaku Direktur CV. SANDI PERKASA (Principal) ;

Hal. 462 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ay.1 (satu) lembar Dokumen asli Surat Keterangan dukungan keuangan Bank DKI Nomor : 20/SKDKB/GND/IX/2007 tertanggal 5 September 2007, ditandatangani oleh an. OMON SAMANHUDI selaku Wakil pimpinan Kantor Bank DKI cabang pembantu Gunadarma ;

az.5 (lima) lembar Dokumen foto copy Akta Notaris berupa pemasukan dan perubahan anggaran Dasar CV. Sandi Perkasa, ditandatangani oleh an. WINDALINA, SH selaku Notaris ;

ba.12 (dua belas) lembar Dokumen foto copy Akta Notaris berupa Perseroan Komanditer "CV. SANDI PERKASA", ditandatangani oleh an. SINTA SUSIKTO, SH selaku Notaris ;

bb.55 (lima puluh lima) lembar Dokumen foto copy Data Keuangan dan Pajak CV. SANDI PERKASA ;

bc.24 (dua puluh empat) lembar Dokumen asli Proposal Teknis "Sosialisasi produk hukum melalui media televisi swasta/nasional yang dikemas dalam satu rangkaian cerita yang utuh melalui iklan layanan masyarakat dalam rangka peningkatan kesadaran hukum (Pengadaan Filler Hukum)" oleh CV. SANDI PERKASA ;

bd.1 (satu) lembar Dokumen foto copy Berita Acara Evaluasi Administrasi Dokumen Penawaran Pelelangan Umum dalam rangka Pengadaan Jasa Filler Hukum Kebutuhan Biro Hukum Setdaprof DKI Jakarta Nomor : 12/PPBJ/BA/Filler/IX/2007, tertanggal 7 September 2007 ;

133.1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Pengadaan Jasa Filler Kebutuhan Biro Hukum Sekda Prov. DKI Jakarta antara Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan CV. Sandi Perkasa Nomor 508/077.72, yang berisi antara lain :

a. 1 (satu) lembar asli Dokumen SPM Giro No : 00126702007 Tahun 2007 sebesar Rp. 1.998.318.750,- (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) kepada CV SANDI PERKASA sehubungan Pengadaan Jasa Filler Hukum sesuai Kontrak Nomor. 508/077.72, tanggal 25 September 2007 ;

Hal. 463 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar asli tindisan Dokumen Tanda Terima SPP No. SPMG20070013147 No Kontrak : 508/077.72, terdapat tanda tangan petugas penerima an. Lia ;
- c. 1 (satu) lembar asli Dokumen Telahaan Staf SPP tertanggal 1 November 2007 No Kontrak : 508/077.72 kepada CV. SANDI PERKASA sebesar Rp. 2.231.625.000,- (dua milyar dua ratus tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- d. 1 (satu) lembar asli tindisan Dokumen Kontrak tertanggal 25 September 2007 oleh CV. SANDI PERKASA ;
- e. 1 (satu) lembar asli Dokumen Checking List ;
- f. 1 (satu) lembar asli Dokumen Kwitansi SANDI PERKARA CV. No. 03/SP-KEU/X/07 tertanggal 26 Oktober 2007, sebesar Rp. 2.231.625.000,- (dua milyar dua ratus tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), terdapat tanda tangan diatas materai 6.000 (enam ribu rupiah) an. Ir. RATNANINGSIH, Msi selaku Direktur dan an. BAHIR ROMSAH selaku Bendahara Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta, berikut 2 (dua) lembar tindisan ;
- g. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 68/SPP/BHK/BT/2007 tertanggal 26 Oktober 2007, yang ditanda tangani an. BAHIR ROMSAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum ;
- h. 1 (satu) lembar foto copy Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap No. 68/SPP/BT/BHK/2007 tertanggal 26 Oktober 2007, yang ditanda tangani an. BAHIR ROMSAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum ;
- i. 13 (tiga belas) lembar asli Dokumen Permohonan Pembayaran Tagihan CV. SANDI PERKASA ;
- j. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Barang (BAPB) Nomor : 03/BAPB/BH/X/2007 tertanggal 3 Oktober 2007, ditanda tangani oleh Panitia Pemeriksa Barang nomor urut 1 (satu) Ketua sampai dengan 5 (lima) anggota, an. Ir. RATNANINGSIH, Msi

Hal. 464 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Direktur CV. SANDI PERKASA dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang;

k. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 03/BAST/BH/X/2007 tanggal 3 Oktober 2007, yang ditanda tangani an. IRUSWANDI, SH selaku Pengurus Barang unit Biro Hukum, an. Ir. RATNANINGSIH, Msi selaku Direktur CV. SANDI PERKASA dan mengetahui an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Serah Terima Barang ;

133. 1 (satu) bundel Dokumen terkait dengan penayangan Filler 2007 di TPI, antara lain :

a. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen MEDIA ORDER – Filler Hukum, PO Number : 006/PSA/09/2007 dari Agency CV. SANDI PERKASA, Advertiser BIRO HUKUM PROVINSI DKI JAKARTA, Product PSA, Priode September 2007, yang ditanda tangani IR. RATNANINGSIH, MSi selaku Direktur CV. SANDI PERKASA dan approved by media an. RINA LILIANOVA, berikut 1 (satu) lembar lampirannya ;

b. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen Reguler Package Nomor : 4248/REG.PKT – SANDI PERKASA/MKS CTPI/IX/07, Special for “FILLER HUKUM” periode : September 2007 ;

c. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen LOG PROOF register nomor : 20070900964 periode September 2007, Order Type PSA, Brand PSA Biro Hukum Propinsi DKI. Order Number 006/PSA/09/2007, Agency CV. SANDI PERKASA, Approved by ANGLING HARI PRIYADI selaku Acct. Dept Head ;

d. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen LOG PROOF register nomor : 20071000298 periode Oktober 2007, Order Type PSA, Brand PSA Biro Hukum Propinsi DKI. Order Number 006/PSA/09/2007, Agency CV. SANDI PERKASA, Approved by ANGLING HARI PRIYADI selaku Acct. Dept Head ;

Hal. 465 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Slip Pengiriman Uang Dalam Negeri / Kliring kepada PT. CIPTA Televisi Pendidikan Indonesia Mandiri Cab TMII Nomor rekening 129.0001071519 tertanggal 26 September 2007 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- f. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Slip Pengiriman Uang Dalam Negeri / Kliring kepada PT. CIPTA Televisi Pendidikan Indonesia Mandiri Cabang TMII Nomor rekening 129.0001071519 tertanggal 27 September 2007 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
134. 1 (satu) bundel Dokumen terkait dengan penayangan Filler 2007 di Lativi (saat ini berubah menjadi TV One), antara lain :
 - a. 1 (satu) lembar foto copy legalisir SPECIAL PACKAGE – LATIVI tertanggal 24 September 2007 Nomor : 075/TS-WA/IX/2007 klien PSA BIRO HUKUM, periode 25 – 30 September 2007 ;
 - b. 1 (satu) lembar foto copy legalisir MEDIA PLAN PSA BIRO HUKUM periode September 2007, klien : SANDI PERKASA ;
 - c. 2 (dua) lembar foto copy legalisir LOG PROVE – Based on data of 02/10/2007 15:31:21 atas PO Nomor : PO/MP-010/PSA/BIHU/0907[paid], periode : 25/09/2007 – 30/09/2007 tertanggal 2 Oktober 2007 ;
 - d. 1 (satu) lembar foto copy legalisir INVOICE Nomor : 09.004.0208-07 tertanggal 2 Oktober 2007 ;
 - e. 1 (satu) lembar foto copy Dokumen FAKTUR PAJAK STANDAR Nomor seri : 010-000-07.00001935 tertanggal 31 Oktober 2007 ;
 - f. 1 (satu) lembar foto copy legalisir BUKTI PENERIMAAN KAS / BANK PT. LATIVI MEDIA KARYA tertanggal 25 September 2007 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
 - g. 1 (satu) lembar foto copy legalisir SLIP STORAN Bank BRI tertanggal 25 September 2007 kepada PT. LATIVI MEDIA KARYA sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
 - h. 1 (satu) lembar foto copy legalisir REKENING KORAN PT. LATIVI MEDIA KARYA pada Bank Mandiri Nomor Rekening 125.000 212 843.7 periode 1 September s/d 4 Oktober 2007 ;

Hal. 466 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

135. 2 (dua) lembar Dokumen asli Harga Pokok Produksi Filler Hukum, tertanggal 3 Maret 2010, ditandatangani atas nama TRIYITNO UNARTO ;
136. 1 (satu) bundel Dokumen terkait penerimaan 10 % dari pengadaan Filler Hukum 2007, sebagai berikut :
- a. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 15 Januari 2006, telah terima dari Bagian Dokumentasi Hukum untuk pembayaran efisiensi kegiatan filler sebesar Rp.84.630.000,00 yang ditandatangani oleh an. BAHIR R ;
 - b. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 9 Maret 2007, telah terima dari Bagian Dokumentasi untuk pembayaran fee dari PT.Fortune untuk panitia pemeriksaan barang sebesar Rp.16.927.000,00 yang ditandatangani oleh an. YOSIFA ISMAYANTI ;
 - c. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 15 Januari 2006, telah terima dari Bagian Dokumentasi Hukum untuk pembayaran efisiensi kegiatan filler ABT sebesar Rp.186.700.000,00 yang ditandatangani oleh an. BAHIR R ;
 - d. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 24 Januari 2007, telah terima dari Bagian Dokumentasi untuk pembayaran dari PT.Raditya Putra Bahtera (Filler ABT) untuk pengurus barang sebesar Rp.18.668.000,00 yang ditandatangani oleh an. IRUS WANDI ;
 - e. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 24 Januari 2007, telah terima dari Bagian Dokumentasi untuk pembayaran dari PT.Raditya (Filler ABT) untuk PKC Biro hukum sebesar Rp.37.336.000,00 yang ditandatangani oleh an. BAHIR R ;
 - f. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 15 November 2007, telah terima dari Bagian Dokumentasi Hukum untuk pembayaran Jasa Filler 2007 Karo Hukum sebesar Rp.199.831.000,00 yang ditandatangani oleh an. BAHIR ROMSAH ;
 - g. 15 (lima belas) lembar Daftar Insentif/ Prestasi Kerja Karyawan Bagian Dokumentasi dan Publikasi Hukum ;
137. 1 (satu) bundel Dokumen terkait Kerjasama PT. Global Vision Universal dengan CV. Sandi Perkasa dalam hal pengadaan Filler 2007, antara lain :

Hal. 467 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. 3 (tiga) lembar asli Dokumen PERJANJIAN KERJASAMA Nomor : 126/GVU-HF/114-SPK/VIII/2007 tertanggal 27 Agustus 2007 yang ditanda tangani Pihak Pertama an. YOS SANTO selaku Komisaris CV. SANDI PERKASA dan Pihak Kedua (diatas meterai 6.000) an. HERMAN FELANI selaku Direktur Utama PT. Global Vision Universal ;
 - b. 1 (satu) lembar asli Dokumen ADDENDUM Nomor : 126/GVU-HF/114-SPK/VIII/2007 tertanggal 17 September 2007 yang ditanda tangani Pihak Pertama an. YOS SANTO selaku Komisaris CV. SANDI PERKASA dan Pihak Kedua an. HERMAN FELANI selaku Direktur Utama PT. Global Vision Universal ;
138. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Tanda Setoran terkait penayangan Filler 2007, antara lain :
- a. 1 (satu) lembar Dokumen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Surat Tanda Setoran Nomor : 24165 tanggal 24 Juni 2008 yang berisi Kantor Perbendaharaan Dan Kas Daerah Provinsi DKI Jakarta Harap Menerima Dari CV.Sandi Perkasa / Biro Hukum uang sejumlah Rp.184.000.000,00 (seratus delapan puluh empat juta rupiah) untuk : Pengembalian Uang kelebihan atas pekerjaan penayangan Filler Hukum yang terdapat kekurangan jumlah spot yang ditayangkan untuk 2 TV yaitu TPI dan Lativi sesuai perjanjian antara Biro Hukum dan CV.Sandi Perkasa No.508/077.72 tanggal 25 September 2007 (Cicilan I) yang ditandatangani oleh penyetor an. AGUS SUMARSONO ;
 - b. 1 (satu) lembar Dokumen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Surat Tanda Setoran Nomor : 25777 tanggal 1 Juli 2008 yang berisi Kantor Perbendaharaan Dan Kas Daerah Provinsi DKI Jakarta Harap Menerima Dari CV.Sandi Perkasa / Biro Hukum uang sejumlah Rp.41.800.000,00 (empat puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk : Pengembalian Uang kelebihan atas pekerjaan penayangan Filler Hukum yang terdapat kekurangan jumlah spot yang ditayangkan untuk 2 TV yaitu TPI dan Lativi sesuai perjanjian antara Biro Hukum dan CV.Sandi Perkasa No.508/077.72 tanggal 25 September

Hal. 468 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



2007 (Cicilan II) yang ditandatangani oleh penyeter an.AGUS SUMARSONO;

- c. 1 (satu) lembar Dokumen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Surat Tanda Setoran Nomor :8005 tanggal 21 Juli 2008 yang berisi Kantor Perbendaharaan Dan Kas Daerah Provinsi DKI Jakarta Harap Menerima Dari CV.Sandi Perkasa / Biro Hukum uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk : Pengembalian Uang kelebihan atas pekerjaan penayangan Filler Hukum yang terdapat kekurangan jumlah spot yang ditayangkan untuk 2 TV yaitu TPI dan Lativi sesuai perjanjian antara Biro Hukum dan CV.Sandi Perkasa No.508/077.72 tanggal 25 September 2007 (Cicilan III) yang ditandatangani oleh penyeter an.AGUS SUMARSONO ;
- d. 1 (satu) lembar Dokumen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Surat Tanda Setoran Nomor : 36601 tanggal 26 September 2008 yang berisi Kantor Perbendaharaan Dan Kas Daerah Provinsi DKI Jakarta Harap Menerima Dari CV.Sandi Perkasa / Biro Hukum uang sejumlah Rp.435.000.000,00 (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah) untuk : Pengembalian Uang kelebihan atas pekerjaan penayangan Filler Hukum yang terdapat kekurangan jumlah spot yang ditayangkan untuk 2 TV yaitu TPI dan Lativi sesuai perjanjian antara Biro Hukum dan CV.Sandi Perkasa No.508/077.72 tanggal 25 September 2007 (Cicilan IV) yang ditandatangani oleh penyeter an.AGUS SUMARSONO ;
- e. 1 (satu) lembar Dokumen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Surat Tanda Setoran Nomor : 42505 tanggal 24 Novemebr 2008 yang berisi Kantor Perbendaharaan Dan Kas Daerah Provinsi DKI Jakarta Harap Menerima Dari CV.Sandi Perkasa / Biro Hukum uang sejumlah Rp.277.200.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) untuk : Pengembalian Uang kelebihan atas pekerjaan penayangan Filler Hukum yang terdapat kekurangan jumlah spot yang ditayangkan untuk 2 TV yaitu TPI dan Lativi sesuai perjanjian antara Biro Hukum dan CV.Sandi Perkasa No.508/077.72 tanggal 25 September 2007 (Cicilan V) yang ditandatangani oleh penyeter an.AGUS SUMARSONO ;

Hal. 469 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) lembar Dokumen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Surat Tanda Setoran Nomor : 43671 tanggal 28 November 2008 yang berisi Kantor Perbendaharaan Dan Kas Daerah Provinsi DKI Jakarta Harap Menerima Dari CV.Sandi Perkasa / Biro Hukum uang sejumlah Rp.181.000.000,00 (seratus delapan puluh satu juta rupiah) untuk : Pengembalian Uang kelebihan atas pekerjaan penayangan Filler Hukum yang terdapat kekurangan jumlah spot yang ditayangkan untuk 2 TV yaitu TPI dan Lativi sesuai perjanjian antara Biro Hukum dan CV.Sandi Perkasa No.508/077.72 tanggal 25 September 2007 (Cicilan VI) yang ditandatangani oleh penyettor an.AGUS SUMARSONO ;
139. 1 (satu) bundel asli Dokumen Perjanjian Pelelangan Umum Pengadaan Jasa Gema Hukum Ibukota Jakarta Kebutuhan Biro Hukum Sekda Prov. DKI Jakarta antara Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan PT. ADILA JAYA SUKSES Nomor 654/077.92, yang berisi antara lain:
- a. 5 (lima) lembar asli Dokumen Perjanjian Pelelangan Umum Pengadaan Jasa Gema Hukum Ibukota Jakarta Kebutuhan Biro Hukum Sekda Prov. DKI Jakarta antara Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan PT. ADILA JAYA SUKSES Nomor 654/077.92, tanggal 5 November 2007, yang ditandatangani oleh Pihak Pertama an. JORNAL E. SIAHAAN, SH. M.Si selaku Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Pihak Kedua an. IRADAH HASBOELLAH selaku Direktur Utama PT. ADILA JAYA SUKSES, beserta 2 (dua) lembar lampirannya;
- b. 5 (lima) lembar foto copy Dokumen Perjanjian Pelelangan Umum Pengadaan Jasa Gema Hukum Ibukota Jakarta Kebutuhan Biro Hukum Sekda Prov. DKI Jakarta antara Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan PT. ADILA JAYA SUKSES Nomor 654/077.92, tanggal 5 November 2007, yang ditandatangani oleh Pihak Pertama an. JORNAL E. SIAHAAN, SH. M.Si selaku Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Daerah Khusus

Hal. 470 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibukota Jakarta dan Pihak Kedua an. IRADAH HASBOELLAH selaku Direktur Utama PT. ADILA JAYA SUKSES, beserta 2 (dua) lembar lampirannya;

- c. 1 (satu) lembar foto copy Dokumen Jaminan Pelaksanaan ASURANSI PURI ASIH Nomor Bond : 81.0.14.27160.10.07.LR, Nilai Bond : Rp.139.425.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), tertanggal 5 November 2007, yang ditandatangani oleh an. CHARLES MD. SIANIPAR, SE selaku Branch Manager PT. ASURANSI PURI ASIH (Surety), dan an. IRADAH HASBOELAH selaku Direktur Utama PT. ADILA JAYA SUKSES (Principal) ;
- d. 2 (dua) lembar asli Dokumen Keputusan Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 652/077.922, tanggal 5 November 2007 tentang Penunjukkan PT. ADILA JAYA SUKSES sebagai perusahaan penyedia barang/jasa pengadaan Jasa Gema Hukum Ibukota Jakarta Kebutuhan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta, yang ditandatangani oleh an. JORNAL E. SIAHAAN, SH. M.Si selaku Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
- e. 3 (tiga) lembar asli Dokumen Keputusan Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 644/077.92, tanggal 30 Oktober 2007 tentang Penetapan Penyedia Barang/Jasa Pelelangan Umum Pengadaan Jasa Gema Hukum Ibukota Jakarta Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov. DKI Jakarta, yang ditandatangani oleh an. JORNAL E. SIAHAAN, SH. M.Si selaku Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
- f. 1 (satu) lembar asli Dokumen pengumuman pemenang pelelangan umum pengadaan jasa Gema hukum kebutuhan biro hukum Setdaprov DKI Jakarta, Nomor : 25/PPBJ/Peng/L/GH/X/ 2007, tertanggal 29 Oktober 2007, ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua ;

Hal. 471 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) lembar asli Dokumen Nomor : 643/079.32, tanggal 29 Oktober 2007 perihal Penetapan Pemenang Lelang Umum Pengadaan Jasa Gema Hukum Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov. DKI Jakarta, yang ditujukan kepada Panitia Pengadaan Barang / Jasa Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta, yang ditandatangani oleh an. JORNAL E. SIAHAAN, SH. M.Si selaku Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
- h. 4 (empat) lembar asli Dokumen Nomor : 24/PPBJ/Lap./GH/X/2007, tanggal 26 Oktober 2007 perihal Laporan lelang umum pengadaan jasa Gema hukum Ibukota Jakarta kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta, yang ditujukan kepada Kepala Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta, ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua ;
- i. 3 (tiga) lembar asli Dokumen Berita Acara Penetapan Calon Pemenang Lelang dan Cadangan Calon Pemenang Pengadaan Jasa Gema Hukum Ibukota Jakarta Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov. DKI Jakarta Nomor : 23/PPBJ/BA/GH/X/2007 tanggal 26 Oktober 2007, yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua, IWAN SATYOPRODJO, SH, MM selaku Sekretaris, ISMIYATUN, SH, ENDANG SUMARDI, SH, KM. JAUHARI, SH, RADIAH, SH dan SUCI RAHAYU selaku Anggota ;
- j. 4 (empat) lembar asli Dokumen Berita Acara Hasil Pelelangan Umum Pengadaan Jasa Gema Hukum Ibukota Jakarta Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov. DKI Jakarta Nomor : 22/ PPBJ/BA/GH/X/2007 tanggal 26 Oktober 2007, yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua, IWAN SATYOPRODJO, SH, MM selaku Sekretaris, ISMIYATUN, SH, Endang SUMARDI, SH, KM. JAUHARI, SH, RADIAH, SH dan SUCI RAHAYU selaku Anggota;

Hal. 472 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. 2 (dua) lembar asli Dokumen Berita Acara Peninjauan ke Stasiun Televisi Swasta PT. Indosiar Visual Mandiri dalam rangka klarifikasi penayangan pengadaan jasa Gema Hukum Ibukota Jakarta Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov. DKI Jakarta, Nomor : 21/PPBJ/BA/GH/X/2007 tanggal 25 Oktober 2007, yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua, IWAN SATYOPRODJO, SH, MM selaku Sekretaris, ISMIYATUN, SH, Endang SUMARDI, SH, KM. JAUHARI, SH, RADIAH, SH dan SUCI RAHAYU selaku anggota serta tanda tangan an. ALVONSUS SUSANTO dari PT. INDOSIAR VISUAL MANDIRI ;
- l. 3 (tiga) lembar asli Dokumen Berita Acara Penilaian dan Pembuktian Kualifikasi Dokumen Penawaran Pelelangan Umum Dalam Rangka Pengadaan Jasa Gema Hukum Ibukota Jakarta Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov. DKI Jakarta Nomor : 20/PPBJ/BA/GH/X/2007 tanggal 25 Oktober 2007, yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua, IWAN SATYOPRODJO, SH, MM selaku Sekretaris, ISMIYATUN, SH, Endang SUMARDI, SH, KM. JAUHARI, SH, RADIAH, SH dan SUCI RAHAYU selaku Anggota;
- m. 1 (satu) lembar asli Dokumen Nomor : 19/PPBJ/UND/GH/X/2007, tanggal 24 Oktober 2007 perihal Undangan, yang ditujukan kepada IWAN SATYOPRODJO, SH, MM, ISMIYATUN, SH, Endang SUMARDI, SH, KM. JAUHARI, SH, RADIAH, SH dan SUCI RAHAYU, yang ditandatangani oleh an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;
- n. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Hadir pada hari/tanggal : Kamis, 25 Oktober 2007, pukul 09.00 WIB, Tempat : Ruang Rapat Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Blok G lantai 9 Jl. Merdeka Selatan 8-9 Jakarta Pusat, Acara Penilaian dan Pembuktian Kualifikasi Dokumen Surat

Hal. 473 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Penawaran Harga (SPH) Pelelangan Umum Pengadaan Jasa Filler Hukum Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov. DKI Jakarta, yang terdapat tanda tangan nomor urut 1 (satu) an. MADE SUARJAYA, SH sampai dengan nomor urut 10 (sepuluh) an. INDRI NOVITASARI (PT. DWI PUTRA KREASI), yang ditandatangani oleh an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;

- o. 1 (satu) lembar asli Dokumen Nomor : 18/PPBJ/UND/GH/X/2007, tanggal 24 Oktober 2007 perihal Undangan, yang ditujukan kepada Direktur/pimpinan CV. KARYA CHRISNA JAYA Jl. Gardu No. 17 Kelurahan Balekambang Jakarta Timur, yang ditandatangani oleh an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;
- p. 1 (satu) lembar asli Dokumen Nomor : 18/PPBJ/UND/GH/X/2007, tanggal 24 Oktober 2007 perihal Undangan, yang ditujukan kepada Direktur/pimpinan PT. DWI PUTRA KREASI Jln. Merpati No. 20 Cidodol Jakarta Selatan, yang ditandatangani oleh an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;
- q. 1 (satu) lembar asli Dokumen Nomor : 18/PPBJ/UND/GH/X/2007, tanggal 24 Oktober 2007 perihal Undangan, yang ditujukan kepada Direktur/pimpinan PT. ADILA JAYA SUKSES Jln. Gatot Subroto Komp. Timah No. 20 Kel. Menteng Dalam Kec. Tebet Jakarta Selatan, yang ditandatangani oleh an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;
- r. 3 (tiga) lembar asli Dokumen Berita Acara Evaluasi Dokumen Kualifikasi Surat Penawaran Harga (SPH) Pelelangan Umum Dalam Rangka Pengadaan Jasa Gema Hukum Ibukota Jakarta Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov. DKI Jakarta Nomor : 17/PPBJ/BA/GH/X/2007, tanggal 24 Oktober 2007, yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta an.

Hal. 474 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua, IWAN SATYOPRODJO, SH, MM selaku Sekretaris, ISMIYATUN, SH, Endang SUMARDI, SH, KM. JAUHARI, SH, RADIAH, SH dan SUCI RAHAYU selaku Anggota;

- s. 3 (tiga) lembar asli Dokumen Berita Acara Evaluasi Teknis dan Harga Dokumen Penawaran Pelelangan Umum Dalam Rangka Pengadaan Jasa Gema Hukum Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov. DKI Jakarta beserta lampirannya, Nomor : 16/PPBJ/ BA/GA/X/2007, tanggal 24 Oktober 2007, yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua (tidak ditanda tangan), IWAN SATYOPRODJO, SH, MM selaku Sekretaris, ISMIYATUN, SH, Endang SUMARDI, SH, KM. JAUHARI, SH, RADIAH, SH dan SUCI RAHAYU selaku anggota, berikut 14 (empat belas) lampirannya ;
- t. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran (SPH) Sampul II Pelelangan Umum Dalam Rangka Pengadaan Jasa Gema Hukum Ibukota Jakarta Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta, Nomor : 15/PPBJ/BA/GH/X/2007, tanggal 23 Oktober 2007, yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua, IWAN SATYOPRODJO, SH, MM selaku Sekretaris, ISMIYATUN, SH, Endang SUMARDI, SH, KM. JAUHARI, SH, RADIAH, SH dan SUCI RAHAYU selaku anggota, dan Penyedia Barang/Jasa PT. ADILA JS, PT. DWI PUTRA K, PT. KARYA CJ dan PT. TREND yang ditanda tangan tanpa nama ;
- u. 1 (satu) lembar asli Dokumen Nomor : 14/PPBJ/UND/GH/X/ 2007, tanggal 22 Oktober 2007 perihal Undangan, yang ditujukan kepada IWAN SATYOPRODJO, SH, MM, ISMIYATUN, SH, Endang SUMARDI, SH, KM. JAUHARI, SH, RADIAH, SH dan SUCI RAHAYU, yang ditandatangani oleh an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;

Hal. 475 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- v. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Hadir, Hari/tanggal Selasa, 23 Oktober 2007, waktu 15.00 WIB, tempat Ruang rapat Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Blok G lantai 9 Jln. Merdeka Selatan 8 – 9 Jakarta Pusat, Acara Pembukaan surat penawaran harga (SPH) Sampul II Pelelangan Umum pengadaan jasa penyelenggaraan Gema Hukum Ibukota Jakarta, terdapat tanda tangan nomor urut 1 (satu) an. MADE SUARJAYA, SH sampai dengan nomor urut 11 (sebelas) an. IRMA DAHLIA dari PT. TRENDEKA, yang ditanda tangani oleh MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa ;
- w. 1 (satu) lembar asli Dokumen Nomor : 13/PPBJ/UND/GH/X/2007, tanggal 22 Oktober 2007 perihal Undangan, yang ditujukan kepada Direktur/Pimpinan PT. TRENDEKA LESTARI Jln. Tebet Barat Dalam 8 G No. 11 Jakarta Selatan, yang ditandatangani oleh an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;
- x. 1 (satu) lembar asli Dokumen Nomor : 13/PPBJ/UND/GH/X/2007, tanggal 22 Oktober 2007 perihal Undangan, yang ditujukan kepada Direktur/Pimpinan CV. KARYA CHRISNA JAYA Jln. Gardu No. 17 Kel. Balekambang Jakarta Timur, yang ditandatangani oleh an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;
- y. 1 (satu) lembar asli Dokumen Nomor : 13/PPBJ/UND/GH/X/2007, tanggal 22 Oktober 2007 perihal Undangan, yang ditujukan kepada Direktur/Pimpinan PT. DWI PUTRA KREASI Jln. Merpati No. 20 Cidodol Jakarta Selatan, yang ditandatangani oleh an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;
- z. 1 (satu) lembar asli Dokumen Nomor : 13/PPBJ/UND/GH/X/2007, tanggal 22 Oktober 2007 perihal Undangan, yang ditujukan kepada Direktur/Pimpinan PT. ADILA JAYA SUKSES Jln. Gatot Subroto Komp. Timah No. 20 Kel. Menteng Dalam Kec. Tebet Jakarta Selatan, yang

Hal. 476 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;

aa.3 (tiga) lembar asli Dokumen Berita Acara Evaluasi Administrasi Dokumen Penawaran Pelelangan Umum dalam rangka pengadaan jasa Gema Hukum Ibukota Jakarta kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta Nomor : 12/PPBJ/BA/GH/X/2007 tanggal 22 Oktober 2007, yang ditanda tangani oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua, IWAN SATYOPRODJO, SH, MM selaku Sekretaris, ISMIYATUN, SH, Endang SUMARDI, SH, KM. JAUHARI, SH, RADIAH, SH dan SUCI RAHAYU selaku Anggota ;

ab.1 (satu) lembar asli Dokumen Nomor : 11/PPBJ/UND/GH/X/2007, tanggal 11 Oktober 2007 perihal Undangan, yang ditujukan kepada IWAN SATYOPRODJO, SH, MM, ISMIYATUN, SH, Endang SUMARDI, SH, KM. JAUHARI, SH, RADIAH, SH dan SUCI RAHAYU, yang ditandatangani oleh an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;

ac.1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Hadir, Hari/tanggal Senin, 22 Oktober 2007, waktu 09.00 WIB, tempat Ruang rapat Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Blok G lantai 9 Jln. Merdeka Selatan 8 – 9 Jakarta Pusat, Acara Evaluasi dokumen penawaran Pelelangan Umum pengadaan jasa penyelenggaraan Gema Hukum Ibukota Jakarta, terdapat tanda tangan nomor urut 1 (satu) an. MADE SUARJAYA, SH sampai dengan nomor urut 7 (tujuh) an. SUCI RAHAYU, yang ditanda tangani oleh MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa ;

ad.2 (dua) lembar asli Dokumen Berita Acara Pembukaan dokumen Penawaran (SPH) Sampul I Pelelangan Umum dalam rangka pengadaan jasa Gema Hukum Ibukota Jakarta kebutuhan Biro Hukum Setdaprov. DKI Jakarta

Hal. 477 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 10/PPBJ/BA/GH/X/2007 tanggal 11 Oktober 2007, yang ditanda tangani Panitia Pengadaan Barang/Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua, IWAN SATYOPRODJO, SH, MM selaku Sekretaris, ISMIYATUN, SH, Endang SUMARDI, SH, KM. JAUHARI, SH, RADIAH, SH dan SUCI RAHAYU selaku anggota ;

ae.1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Hadir, Hari/tanggal Kamis, 11 Oktober 2007, waktu 09.00 WIB, tempat Ruang rapat Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Blok G lantai 9 Jln. Merdeka Selatan 8 – 9 Jakarta Pusat, Acara Evaluasi dokumen penawaran Pelelangan Umum pengadaan jasa penyelenggaraan Gema Hukum Ibukota Jakarta, terdapat tanda tangan nomor urut 1 (satu) an. MADE SUARJAYA, SH sampai dengan nomor urut 7 (tujuh) an. SUCI RAHAYU, yang ditanda tangani oleh MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa ;

af. 1 (satu) lembar asli Dokumen Nomor : 09/PPBJ/UND/GH/X/2007, tanggal 10 Oktober 2007 perihal Undangan, yang ditujukan kepada IWAN SATYOPRODJO, SH, MM, ISMIYATUN, SH, Endang SUMARDI, SH, KM. JAUHARI, SH, RADIAH, SH dan SUCI RAHAYU, yang ditandatangani oleh an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;

ag.1 (satu) lembar asli Dokumen Nomor : 08/PPBJ/UND/GH/X/2007, tanggal 10 Oktober 2007 perihal Undangan, yang ditujukan kepada Direktur/Pimpinan PT. Sebagaimana terlampir, yang ditandatangani oleh an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;

ah.4 (empat) lembar asli Dokumen Data Kelengkapan Surat Perintah Kerja (SPH) ;

ai. 6 (enam) lembar asli Dokumen Data Penawaran Harga PT. Adila Jaya Sukses ;

Hal. 478 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- aj. 83 (delapan puluh tiga) lembar Dokumen Proposal Administrasi Gema Hukum Ibukota Jakarta, PT. ADILA JAYA SUKSES ;
- ak. 144 (seratus empat puluh empat) lembar Dokumen Penawaran PT. DWI PUTRA KREASI ;
- al. 188 (seratus delapan puluh delapan) lembar Dokumen Penawaran CV. KARYA CHRISNA JAYA ;
- am. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Hadir, Hari/tanggal Rabu s.d Kamis, 10 s.d 11 Oktober 2007, waktu 08.00 s.d 15.00 WIB, tempat Ruang rapat Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Blok G lantai 9 Jln. Merdeka Selatan 8 – 9 Jakarta Pusat, Acara Pemasukan dokumen penawaran Pelelangan Umum pengadaan jasa penyelenggaraan Gema Hukum Ibukota Jakarta, terdapat tanda tangan nomor urut 1 (satu) an. MADE SUARJAYA, SH sampai dengan nomor urut 7 (tujuh) an. SUCI RAHAYU, yang ditanda tangani oleh MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa ;
- an.2 (dua) lembar asli Dokumen Nomor : 07/PPBJ/UND/GH/X/2007, tanggal 9 Oktober 2007 perihal Undangan, yang ditujukan kepada Direktur/Pimpinan PT., yang ditandatangani oleh an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;
- ao.2 (dua) lembar dokumen asli Berita Acara Penjelasan Rencana Kerja dan Syarat-syarat Pelelangan Umum Pengadaan Jasa Penyelenggaraan Gema Hukum Ibukota Jakarta Nomor : 06/PPBJ/BA/ GH/X/2007 tanggal 2 Oktober 2007, yang ditanda tangani oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua, IWAN SATYOPRODJO, SH, MM selaku Sekretaris, ISMIYATUN, SH, Endang SUMARDI, SH, KM. JAUHARI, SH, RADIAH, SH dan SUCI RAHAYU selaku anggota serta terdapat tanda tangan PT. ADILA JAYA SUKSES, PT DWI PUTRA KREASI, PT. TRENDEKA LESTARI dan CV. KARYA C JAYA ;

Hal. 479 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



ap.1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Hadir, Hari/tanggal Selasa, 9 Oktober 2007, waktu 14.00 WIB, tempat Ruang rapat Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Blok G lantai 9 Jln. Merdeka Selatan 8 – 9 Jakarta Pusat, Acara Pelaksanaan Penjelasan (Aanwijzing) rencana kerja dan syarat-syarat Pelelangan Umum pengadaan jasa penyelenggaraan Gema Hukum Ibukota Jakarta, terdapat tanda tangan nomor urut 1 (satu) an. MADE SUARJAYA, SH sampai dengan nomor urut 11 (sebelas) an. S. LUBIS, yang ditanda tangani oleh MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa ;

aq.2 (dua) lembar asli Dokumen Nomor : 05/PPBJ/UND/GH/X/2007, tanggal 3 Oktober 2007 perihal Undangan, yang ditujukan kepada Direktur/Pimpinan PT., yang ditandatangani oleh an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;

ar. 1 (satu) lembar asli Dokumen Nomor : 04a/PPBJ/UND/GH/X/2007 tertanggal 3 Oktober 2007 perihal Undangan, yang ditujukan kepada IWAN SATYOPRODJO, SH, MM, ISMIYATUN, SH, Endang SUMARDI, SH, KM. JAUHARI, SH, RADIAH, SH dan SUCI RAHAYU, yang ditandatangani oleh an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;

as.2 (dua) lembar asli Dokumen Peserta Hadir Pendaftaran Pelelangan Umum Penyelenggaraan Gema Hukum Ibukota Jakarta kebutuhan Biro Hukum Setdaprov. DKI Jakarta Tahun Anggaran 2007, yang ditandatangani oleh an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta dan mengetahui JORNAL E. SIAHAAN selaku Kepala Biro Hukum (tanpa tanda tangan) ;

at. 2 (dua) lembar foto copy Kwitansi IKL – 062068 dengan tanggal cetak 01-10-2007 ;

au.1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak Standar Nomor : 020.000-07.00005054 ;



- av.2 (dua) lembar Kliping Koran perihal Pengumuman Lelang Nomor : 04/PPBJ/L/Peng/X/2007 ;
- aw. 2 (dua) lembar asli Dokumen Pengumuman Pelelangan Umum Pengadaan Jasa Penyelenggaraan Gema Hukum Ibukota Jakarta Dengan Pascakualifikasi Nomor : 03/PPBJ/L/GH/X/2007 tanggal 2 Oktober 2007, yang ditandatangani oleh an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;
- ax.2 (dua) lembar asli Dokumen Harga Perkiraan Sendiri / OE, tertanggal 24 September 2007 yang ditanda tangani oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua, IWAN SATYOPRODJO, SH, MM selaku Sekretaris, ISMIYATUN, SH, Endang SUMARDI, SH, KM. JAUHARI, SH, RADIAH, SH dan SUCI RAHAYU selaku anggota serta mengetahui JORNAL E. SIAHAAN selaku Kepala Biro Hukum DKI Jakarta ;
- ay.12 (dua belas) lembar foto copy Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-syarat Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi Nomor : 02/PPBJ/RKS/GH/IX/2007 tanggal 24 September 2007, yang ditandatangani oleh an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta dan mengetahui JORNAL E. SIAHAAN selaku Kepala Biro Hukum, berikut 3 (tiga) lembar lampirannya ;
- az.1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Hadir, Hari/tanggal Jum'at, 28 September 2007, waktu 14.00 WIB, tempat Ruang rapat Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Blok G lantai 9 Jln. Merdeka Selatan 8 – 9 Jakarta Pusat, Acara Persiapan Pelelangan Umum pengadaan jasa penyelenggaraan Gema Hukum Ibukota Jakarta, terdapat tanda tangan nomor urut 1 (satu) an. MADE SUARJAYA, SH sampai dengan nomor urut 7 (tujuh) an. SUCI RAHAYU, yang ditanda tangani oleh MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ba.1 (satu) lembar asli Notulen Rapat Hari/tanggal Jum'at, 28 September 2007, waktu 14.00 WIB, tempat Ruang rapat Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Blok G lantai 9 Jln. Merdeka Selatan 8 – 9 Jakarta Pusat, Acara Persiapan Pelelangan Umum pengadaan jasa penyelenggaraan Gema Hukum Ibukota Jakarta, yang ditanda tangani oleh MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa ;
- bb.1 (satu) lembar asli Dokumen Nomor : 01/PPBJ/UND/GH/IX/2007 tertanggal 27 September 2007 perihal Undangan, yang ditujukan kepada IWAN SATYOPRODJO, SH, MM, ISMIYATUN, SH, Endang SUMARDI, SH, KM. JAUHARI, SH, RADIAH, SH dan SUCI RAHAYU, yang ditandatangani oleh an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;
- bc.1 (satu) lembar asli Dokumen Nomor : 561/077.921 tertanggal 24 September 2007 perihal Permintaan Pelelangan Umum Penyelenggaraan Gema Hukum Ibukota Jakarta, yang ditujukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa, yang ditanda tangani JORNAL E. SIAHAAN selaku Kepala Biro Hukum DKI Jakarta, berikut 2 (dua) lembar lampirannya ;
- bd.1 (satu) lembar asli Dokumen Nomor : 4164/073.532 tertanggal 5 September 2007 perihal Permintaan Patoka Harga, yang ditujukan kepada Kepala Biro Hukum Provinsi DKI Jakarta, yang ditanda tangani Drs. H. RIYANTO, Msi selaku Kepala Biro Perlengkapan Prov. DKI Jakarta ;
- be.2 (dua) lembar foto copy Dokumen Keputusan Kepala Biro Perlengkapan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 2747/073.532 tertanggal 17 Juli 2006 tentang Penetapan Patokan Harga Satuan Barang Insidental Kebutuhan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk kebutuhan Biro Hukum Provinsi DKI Jakarta, berikut 2 (dua) lembar lampirannya;
141. 1 (satu) bundel asli Dokumen Perjanjian Pelelangan Umum Pengadaan Jasa Gema Hukum Ibukota Jakarta Kebutuhan Biro Hukum Sekda Prov. DKI Jakarta antara Biro Hukum Sekretariat

Hal. 482 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan PT. ADILA JAYA SUKSES Nomor 654/077.92, yang berisi antara lain:

- a. 1 (satu) lembar asli Dokumen SPM Giro No : 00143352007 Tahun 2007 tertanggal 28 November 2007, sebesar Rp. 2.420.952.000,- (dua milyar empat ratus dua puluh juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah) kepada PT. ADILA JAYA SUKSES sehubungan Kontrak Nomor. 654/077.92, tanggal 5 November 2007 ;
- b. 1 (satu) lembar asli Kwitansi PT. ADILA JAYA SUKSES tertanggal 27 November 2007 sebesar Rp. 2.788.500.000,- (dua milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), yang ditandatangani diatas materai 6.000 an. IRADAH HASBOELAH selaku Direktur dan an. BAHIR ROMSAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum DKI Jakarta, terdapat stempel dan tandatangan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum Prov. DKI Jakarta;
- c. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 77/SPP/BHK/BT/2007 tertanggal 27 November 2007, yang ditanda tangani an. BAHIR ROMSAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum ;
- d. 1 (satu) lembar asli Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap No. 77/SPP/BT/BHK/2007 tertanggal 27 November 2007, yang ditanda tangani an. BAHIR ROMSAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum ;
- e. 2 (dua) lembar asli Dokumen Berita Acara Bobot Volume Pekerjaan Penayangan Jasa Gema Hukum Ibukota Jakarta dalam rangka Sosialisasi produk hukum melalui media televisi swasta nasional kebutuhan Biro Hukum Sekda Prov DKI Jakarta Nomor : 072/AJS-BA/DKI/X/2007 tanggal 20 November 2007, yang ditandatangani an. IRADAH HASBOELAH selaku Direktur Utama PT. ADILA JAYA

Hal. 483 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SUKSES dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum Prov. DKI Jakarta;
- f. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Barang (BAPB) Nomor : 17/BAPB/BH/XI/2007 tertanggal 20 November 2007, ditanda tangani oleh Panitia Pemeriksa Barang nomor urut 1 (satu) Ketua sampai dengan 5 (lima) anggota, an. IRADAH HASBOELAH selaku Direktur Utama PT. ADILA JAYA SUKSES dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 3 (tiga) lembar asli lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang ;
- g. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 22/BAST/BH/XI/2007 tanggal 20 November 2007, yang ditanda tangani an. IRUSWANDI, SH.M.Kn selaku Pengurus Barang unit Biro Hukum, an. IRADAH HASBOELAH selaku Direktur Utama PT. ADILA JAYA SUKSES dan mengetahui an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 3 (tiga) lembar asli lampiran Berita Acara Serah Terima Barang ;
- h. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Penyerahan Pekerjaan, yang ditandatangani an. an. IRADAH HASBOELAH selaku Direktur Utama PT. ADILA JAYA SUKSES dan an. JORNAL E. SIAHAAN, Sh, Msi selaku Kepala Biro Hukum Prov. DKI Jakarta ;
- i. 3 (tiga) lembar asli Dokumen Post Transmission Log dari PT. INDOSIAR VISUAL MANDIRI, tertanggal 21 November 2007, ditandatangani (tanpa nama) oleh pejabat selaku Traffic Assistant dan selaku Senior Supervisor ;
- j. 1 (satu) lembar asli Dokumen Invoice dari PT. ADILA JAYA SUKSES tertanggal 20 November 2007, sebesar Rp. 2.788.500,- (dua juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus ribu rupiah), ditujukan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Jl. Medan Merdeka Selatan No. 8-9 Jakarta Pusat, ditandatangani oleh pihak PT. ADILA JAYA SUKSES (tanpa nama) ;
141. 1 (satu) bundel Dokumen terkait penayangan Gema Hukum 2007 di PT. Indosiar Visual Mandiri, antara lain :
- a. 1 (satu) bundel Dokumen, yang terdiri dari :

Hal. 484 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) lembar asli tindisan INVOICE Nomor 030973 tertanggal 21 November 2006 sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- 2) 1 (satu) lembar asli tindisan FAKTUR PAJAK STANDAR Nomor seri : 010.000-07.00005329 tertanggal 21 November 2006 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 3) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Rekening Koran PT. Indosiar Visual Mandiri pada Bank Central Asia Nomor : 1623123450 periode 30 November s/d 31 Desember 2007;
- 4) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Rekening Koran PT. Indosiar Visual Mandiri pada Bank Central Asia Nomor : 1623123450 periode 31 Oktober s/d 30 November 2006 ;
- b. 1 (satu) bundel Dokumen, yang terdiri dari :
 - 1) 1 (satu) lembar asli tindisan INVOICE Nomor 030974 tertanggal 21 November 2006 sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) ;
 - 2) 1 (satu) lembar asli tindisan FAKTUR PAJAK STANDAR Nomor seri : 010.000-07.00005827 tertanggal 21 November 2006 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
 - 3) 1 (satu) lembar asli tindisan POST TRANSMISSION LOG pada tanggal 3 s/d 5 November 2007 ;
 - 4) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Rekening Koran PT. Indosiar Visual Mandiri pada Bank Central Asia Nomor : 1623123450 periode 30 November s/d 31 Desember 2007;
- c. 1 (satu) bundel Dokumen, yang terdiri dari :
 - 1) 1 (satu) lembar asli tindisan INVOICE Nomor 030975 tertanggal 21 November 2006 sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah). ;
 - 2) 1 (satu) lembar asli tindisan FAKTUR PAJAK STANDAR Nomor seri : 010.000-07.00005825 tertanggal 21 November 2006 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Hal. 485 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Rekening Koran PT. Indosiar Visual Mandiri pada Bank Central Asia Nomor : 1623123450 periode 30 November s/d 31 Desember 2007;
- 4) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Rekening Koran PT. Indosiar Visual Mandiri pada Bank Central Asia Nomor : 1623123450 periode 31 Oktober s/d 30 November 2006 ;
- d. 1 (satu) bundel Dokumen, yang terdiri dari :
 - 1) 1 (satu) lembar asli tindisan INVOICE Nomor 030976 tertanggal 21 November 2006 sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;
 - 2) 1 (satu) lembar asli tindisan FAKTUR PAJAK STANDAR Nomor seri : 010.000-07.00005826 tertanggal 21 November 2006 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - 3) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Rekening Koran PT. Indosiar Visual Mandiri pada Bank Central Asia Nomor : 1623123450 periode 30 November s/d 31 Desember 2007 ;
 - 4) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Rekening Koran PT. Indosiar Visual Mandiri pada Bank Central Asia Nomor : 1623123450 periode 31 Oktober s/d 30 November 2006 ;
- e. 1 (satu) bundel Dokumen, yang terdiri dari :
 - 1) 1 (satu) lembar asli tindisan INVOICE Nomor 030977 tertanggal 21 November 2006 sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) ;
 - 2) 1 (satu) lembar asli tindisan FAKTUR PAJAK STANDAR Nomor seri : 010.000-07.00005828 tertanggal 21 November 2006 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
 - 3) 1 (satu) lembar asli tindisan POST TRANSMISSION LOG pada tanggal 10 s/d 12 November 2007 ;
 - 4) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Rekening Koran PT. Indosiar Visual Mandiri pada Bank Central Asia Nomor : 1623123450 periode 30 November s/d 31 Desember 2007;
- f. 1 (satu) bundel Dokumen, yang terdiri dari :

Hal. 486 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) lembar asli tindisan INVOICE Nomor 030993 tertanggal 21 November 2006 sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) ;
- 2) 1 (satu) lembar asli tindisan FAKTUR PAJAK STANDAR Nomor seri : 010.000-07.00005829 tertanggal 21 November 2006 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- 3) 1 (satu) lembar asli tindisan POST TRANSMISSION LOG pada tanggal 17 s/d 19 November 2007 ;
- 4) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Rekening Koran PT. Indosiar Visual Mandiri pada Bank Central Asia Nomor : 1623123450 periode 30 November s/d 31 Desember 2007;
- g. 4 (empat) lembar asli dokumen Daftar Pengisi Acara PROGRAM ACARA : "CINTA JAKARTA" di INDOSIAR periode 2006 – 2007 ;
142. 1 (satu) bundel Dokumen terkait penggunaan anggaran terkait penayangan Gema Hukum oleh PT. Adila Jaya Sukses, yang berisi antara lain :
 - a. 1 (satu) lembar Dokumen Budget/ Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Proyek "Cinta Jakarta Pemda DKI" Tahun 2007 PT. Adila Jaya Sukses ;
 - b. 1 (satu) lembar Tanda Terima Bilyet Giro Bank DKI No. BL. 455008 senilai Rp. 100.000.000,00 dan No. BL. 455009 senilai Rp. 140.000.000,00 keterangan Biaya Production Cost Cinta Jakarta 2007 (Stage, perlengkapan) yang ditanda tangani oleh penerima an. ALVON tanggal 31 Oktober 2007 ;
 - c. 1 (satu) lembar Tanda Terima Giro Bank DKI No. BL. 409317 senilai Rp. 366.750.000,-, yang ditanda tangai oleh penerima an.WAWAN tanggal 7 Desember 2007, dengan keterangan Pembayaran Invoice :
 - 1) No. 030973 senilai Rp. 275.000.000,- ;
 - 2) No. 030976 senilai Rp. 275.000.000,- ;
 - 3) No. 030975 senilai Rp. 275.000.000,- ;
 - 4) No. 030993 senilai Rp. 110.000.000,- ;
 - 5) No. 030997 senilai Rp. 110.000.000,- ;
 - 6) No. 030974 senilai Rp. 110.000.000,- ;

Hal. 487 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) lembar Tanda Terima Bilyet Giro Bank DKI No.BI.409311 senilai Rp. 250.000.000,00, No. BI. 409312 senilai Rp. 250.000.000,00 dan No. BI. 409313 senilai Rp. 250.000.000,00 keterangan Biaya Production Cost Cinta Jakarta untuk 3 (tiga) Episode yang ditanda tangani oleh penerima an. ALVON tanggal 31 Oktober 2007 ;
- e. 1 (satu) lembar Kwitansi Fee Artis Pengisi Acara "Cinta Jakarta" sebesar Rp. 300.000.000,00 yang ditanda tangani oleh penerima an. ERRI RIZALDI tanggal 28 Oktober 2007 ;
- f. 1 (satu) lembar kwitansi Pelunasan Fee Artis pengisi Acara "Cinta Jakarta" sebesar Rp. 255.000.000,00 yang ditanda tangani oleh penerima an. ERRI RIZALDI tanggal 12 Nopember 2007 ;
- g. 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Tunai sebesar Rp. 7.500.000,00 keterangan Biaya Supervisi team kreatif Cinta Jakarta sebanyak 3 episode yang ditanda tangani oleh penerima an. BAMBANG WIDHIYANTO tanggal 1 Nopember 2007 ;
- h. 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Tunai sebesar Rp. 7.500.000,00 keterangan Pelunasan Biaya Supervisi team kreatif Cinta Jakarta sebanyak 3 episode yang ditanda tangani oleh penerima an. BAMBANG WIDHIYANTO tanggal 21 Nopember 2007 ;
- i. 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Tunai sebesar Rp. 4.000.000,00 keterangan Biaya Dokumentasi Foto Acara Cinta Jakarta Episode I tanggal 5 Nopemebr 2007 yang ditanda tangani oleh penerima an. BIMA KAROS tanggal 6 Nopember 2007 ;
- j. 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Tunai sebesar Rp. 8.000.000,00 keterangan Biaya Dokumentasi Foto Acara Cinta Jakarta Episode II dan III tanggal 12 dan 19 Nopember 2007 yang ditanda tangani oleh penerima an. BIMA KAROS tanggal 20 Nopember 2007 ;
- k. 1 (satu) lembar bukti Setoran Bank BCA tanggal 28 Nopember 2007 sebesar Rp. 2.000.000,00 ke No. rek. 162.3123.450 an. PT. INDOSIAR VISUAL MANDIRI yang

Hal. 488 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditanda tangani penyeter an. SUTRISNO dengan alamat penyeter PT. Adila Jaya Sukses ;
- l. 1 (satu) lembar bukti Setoran bBank BCA tanggal 14 Nopember 2007 sebesar Rp. 4.000.000,00 ke No. Rek. 162.3123.450 an. PT. INDOSIAR VISUAL MANDIRI yang ditanda tangai penyeter an. SUTRISNO dengan alamat penyeter PT. Adila Jaya Sukses ;
 - m. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Paket Dinner dan Coffee Break 300 pack tanggal 5 Nopember 2007 di Indosiar sebesar Rp. 15.000.000,00 yang ditanda tangani oleh an. IDA CATERING tanggal 2 Nopember 2007 ;
 - n. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Paket Dinner dan Coffee Break 300 pack tanggal 12 Nopember 2007 di Indosiar sebesar Rp. 15.000.000,00 yang ditanda tangani an. IDA CATERING tanggal 8 Nopember 2007 ;
 - o. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran paket Dinner dan Coffee Break 300 pack tanggal 19 Nopember 2007 di Indosiar sebesar Rp. 15.000.000,00 yang ditanda tangani an. IDA CATERING tanggal 15 Nopember 2007 ;
143. 10 (sepuluh) lembar asli Rekening Koran Bank DKI Cap Tebet Barat No. AC : 402-08-00668-9 periode 01 Januari 2007 s/d 30 September 2007 Milik PT. Adila Jaya Sukses ;
144. 1 (satu) bundel Dokumen terkait Pembayaran Pajak Penayangan Gema Hukum 2007, berisi sebagai berikut :
- a. 1 (satu) lembar Dokumen Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tebet Bukti Penerimaan Surat Nomor s-005080/PPH23/WPJ.04/ KP.0303/2008 tanggal 17 Januari 2008 yang ditanda tangani oleh Petugas Penerima an.IVAN STYO WIBOWO ;
 - b. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP : 02.145.870.8-015.000, nama WP PT.Adila Jaya Sukses, masa pajak Desember 2007 sebesar Rp.33.750.000,00 yang ditanda tangani oleh Wajib Pajak an.IRADAH HASBOELAH ;
 - c. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP : 02.145.870.8-015.000, nama WP PT.Adila Jaya Sukses,

Hal. 489 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



- masa pajak Desember 2007 sebesar Rp.4.500.000,00 yang ditanda tangani oleh Wajib Pajak an.IRADAH HASBOELAH ;
145. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran oleh PT. Adila Jaya Sukses kepada PT. Indosiar Visual Mandiri atas penayangan Gema Hukum 2007, antara lain :
- a. 1 (satu) lembar BILYET GIRO Bank DKI Capem Tebet Barat No.BI 409314 tanggal 01-11-07, memindahkan dana sejumlah Rp 250.000.000,00 untuk untung rekening nomor 162.3123.450 atas nama PT. Indosiar Visual Mandiri ;
 - b. 1 (satu) lembar BILYET GIRO Bank DKI Capem Tebet Barat No.BI 409315 tanggal 08-11-07, memindahkan dana sejumlah Rp 250.000.000,00 untuk untung rekening nomor 162.3123.450 atas nama PT. Indosiar Visual Mandiri ;
 - c. 1 (satu) lembar BILYET GIRO Bank DKI Capem Tebet Barat No.BI 409316 tanggal 14-11-07, memindahkan dana sejumlah Rp 250.000.000,00 untuk untung rekening nomor 162.3123.450 atas nama PT. Indosiar Visual Mandiri ;
 - d. 1 (satu) lembar BILYET GIRO Bank DKI Capem Tebet Barat No. BI 409317 tanggal 15-12-07, memindahkan dana sejumlah Rp 366.750.000,00 untuk untung rekening nomor 162.3123.450 atas nama PT. Indosiar Visual Mandiri ;
 - e. 1 (satu) lembar BILYET GIRO Bank DKI Capem Tebet Barat No.BI 455008 tanggal 02-11-07, memindahkan dana sejumlah Rp 100.000.000,00 untuk untung rekening nomor 073.1061784 atas nama Alvonsus Susanto pada Bank BCA ;
 - f. 1 (satu) lembar BILYET GIRO Bank DKI Capem Tebet Barat No.BI 455009 tanggal 20-11-07, memindahkan dana sejumlah Rp 140.000.000,00 untuk untung rekening nomor 073.1061784 atas nama Alvonsus Susanto pada Bank BCA ;
146. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Nomor : 600/077.92 tentang Percetakan Bahan Materi Penyuluhan Hukum Terpadu Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta tanggal 19 September 2007 untuk CV. PERMATA MELATI INDAH ;
147. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran atas Surat Perintah Kerja Nomor : 600/077.92 tentang Percetakan Bahan Materi Penyuluhan Hukum Terpadu Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DKI Jakarta tanggal 19 September 2007 untuk CV. PERMATA MELATI INDAH, yang berisi antara lain :

- a. 1 (satu) lembar asli Dokumen SPM Giro No : 00137362007 Tahun 2007 sebesar Rp. 43.819.990,- (empat puluh tiga juta delapan ratus sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) kepada CV. PERMATA MELATI INDAH sehubungan SPK Nomor. 600/072.222, tanggal 19 September 2007 ;
- b. 1 (satu) lembar asli Kwitansi CV. PERMATA MELATI INDAH tertanggal 20 November 2007 sebesar Rp. 48.936.030,- (empat puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu tiga puluh rupiah), yang ditandatangani diatas materei 6.000 an. ROMASDA DEWI SAMOSIR selaku Direktur CV. PERMATA MELATI INDAH dan an. BAHIR ROMSAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum DKI Jakarta ;
- c. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 75/SPP/BHK/BT/2007 tertanggal 20 November 2007, yang ditanda tangani an. BAHIR ROMSAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum ;
- d. 1 (satu) lembar asli Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap No. 75/SPP/BT/BHK/2007 tertanggal 20 November 2007, yang ditanda tangani an. BAHIR ROMSAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum ;
- e. 1 (satu) lembar asli Dokumen Faktur Barang tertanggal 30 Oktober 2007 yang ditandatangani an. ROMASDA DEWI SAMOSIR selaku Direktur CV. PERMATA MELATI INDAH ;
- f. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 10/BAST/BH/X/2007 tanggal 30 Oktober 2007, yang ditanda tangani an. IRUSWANDI, SH selaku Pengurus Barang unit Biro Hukum, an. ROMASDA DEWI SAMOSIR selaku Direktur CV. PERMATA MELATI INDAH dan mengetahui an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku

Hal. 491 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Serah Terima Barang ;

- g. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Barang (BAPB) Nomor : 11/BAPB/BH/X/2007 tertanggal 30 Oktober 2007, ditanda tangani oleh Panitia Pemeriksa Barang nomor urut 1 (satu) Ketua sampai dengan 5 (lima) anggota, an. ROMASDA DEWI SAMOSIR selaku Direktur CV. PERMATA MELATI INDAH dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang;
148. 1 (satu) bundel Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pencetakan Buku Abstrak Peraturan Perundang-undangan, Buku Warta Perundang-undangan dan Buku Informasi Peraturan Perundang-undangan Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta antara Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta dengan CV. INDAH RIZKI PRATAMA nomor :499/072.222 tanggal 30 Agustus 2007;
149. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran atas Pekerjaan Pencetakan Buku Abstrak Peraturan Perundang-undangan, Buku Warta Perundang-undangan dan Buku Informasi Peraturan Perundang-undangan Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta antara Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta dengan CV. INDAH RIZKI PRATAMA nomor :499/072.222 tanggal 30 Agustus 2007, yang berisi antara lain :
- a. 1 (satu) lembar asli Dokumen SPM Giro No : 00136022007 Tahun 2007 sebesar Rp. 57.253.125,- (lima puluh tujuh juta dua ratus lima puluh tiga ribu seratus dua puluh lima rupiah) kepada CV. INDAH RIZKI PRATAMA sehubungan Kontrak Nomor. 499/072.222, tanggal 30 Agustus 2007 ;
- b. 1 (satu) lembar asli Kwitansi CV. INDAH RIZKI PRATAMA Nomor : 120/K/IRP/XI/2007 tertanggal 15 November 2007 sebesar Rp. 63.937.500,- (enam puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), yang ditandatangani diatas materai 6.000 an. MUSTIZAR ZN selaku Direktur dan an. BAHIR ROMSAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum DKI Jakarta ;

Hal. 492 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 71/SPP/BT/BHK/2007 tertanggal 15 November 2007, yang ditanda tangani an. BAHIR ROMSAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum ;
- d. 1 (satu) lembar asli Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap No. 71/SPP/BT/BHK/2007 tertanggal 15 November 2007, yang ditanda tangani an. BAHIR ROMSAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum ;
- e. 1 (satu) lembar asli Dokumen Faktur Barang Nomor : 120/SJ/IRP/IX/2007 tertanggal 15 November 2007 yang ditandatangani an. MUSTIZAR. ZN selaku Direktur CV. INDAH RIZKI PRATAMA ;
- f. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 02/BAST/BH/IX/2007 tanggal 28 September 2007, yang ditanda tangani an. IRUSWANDI, SH selaku Pengurus Barang unit Biro Hukum, an. MUSTIZAR ZN selaku Direktur CV. INDAH RIZKI PRATAMA dan mengetahui an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Serah Terima Barang ;
- g. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Barang (BAPB) Nomor : 02/BAPB/BH/IX/2007 tertanggal 28 September 2007, ditanda tangani oleh Panitia Pemeriksa Barang nomor urut 1 (satu) Ketua sampai dengan 5 (lima) anggota, an. MUSTIZAR ZN selaku Direktur CV. INDAH RIZKI PRATAMA dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang ;
- h. 1 (satu) lembar asli Dokumen Surat Pernyataan Nomor : 04/SP/IRP/XI/2007, yang ditandatangani an. MUSTIZAR ZN selaku Direktur CV. INDAH RIZKI PRATAMA ;
- 150. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Nomor : 723/077.222 tentang Penunjukan Langsung Pengadaan ATK Kegiatan

Hal. 493 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembinaan Keluarga Sadar Hukum Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta tanggal 1 November 2007 untuk CV. FERDINAN SENTOSA ABADI ;

151. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran atas Surat Perintah Kerja Nomor : 723/077.222 tentang Penunjukan Langsung Pengadaan ATK Kegiatan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta tanggal 1 November 2007 untuk PT. FERDINAN SENTOSA ABADI, yang berisi antara lain :
- a. 1 (satu) lembar asli Dokumen SPM Giro No : 00177592007 Tahun 2007 sebesar Rp. 26.077.875,- (dua puluh enam juta tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) kepada PT. FERDINAN SENTOSA ABADI sehubungan Kontrak Nomor. 723/072.222, tanggal 30 Agustus 2007 ;
 - b. 1 (satu) lembar asli Kwitansi PT. FERDINAN SENTOSA ABADI tertanggal 10 November 2007 sebesar Rp. 29.122.500,- (dua puluh sembilan juta seratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah), yang ditandatangani diatas materei 6.000 an. JHONI SOLOAN NABABAN selaku Direktur dan an. BAHIR ROMSAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum DKI Jakarta ;
 - c. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 71/SPP/BT/BHK/2007 tertanggal 15 November 2007, yang ditanda tangani an. BAHIR ROMSAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum ;
 - d. 1 (satu) lembar asli Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap No. 87/SPP/BT/BHK/2007 tertanggal 10 November 2007, yang ditanda tangani an. BAHIR ROMSAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum ;
 - e. 2 (dua) lembar asli Dokumen Faktur PT. FERDINAN SENTOSA ABADI tertanggal 26 November 2007 yang ditandatangani an. JHONI SOLOAN NABABAN selaku Direktur ;

Hal. 494 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Barang (BAPB) Nomor : 29/BAPB/BH/XI/2007 tertanggal 26 November 2007, ditanda tangani oleh Panitia Pemeriksa Barang nomor urut 1 (satu) Ketua sampai dengan 5 (lima) anggota, an. JHONI SOLOAN NABABAN selaku Direktur PT. FERDINAN SENTOSA ABADI dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang;
- g. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 26/BAST/BH/XI/2007 tanggal 26 November 2007, yang ditanda tangani an. IRUSWANDI, SH selaku Pengurus Barang unit Biro Hukum, an. JHONI SOLOAN NABABAN selaku Direktur PT. FERDINAN SENTOSA ABADI dan mengetahui an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Serah Terima Barang ;
152. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Nomor : 549/A/075.72 tentang Pengadaan Konsumsi Dalam Rangka Pelaksanaan Talk Show Interaktif di Radio Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta tanggal 2 November 2007 untuk CV. JURINDO PUTRA UTAMA ;
153. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Nomor : 607/077.222 tentang Penunjukan Langsung Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta untuk CV. FEBRI SINAR KASIH ;
154. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Nomor : 650/A/077.92 tentang Penunjukan Langsung Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) Kegiatan Pengumpulan Pencetakan dan Pendistribusian Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Daerah Provinsi DKI Jakarta) Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta tanggal 1 November 2007 untuk CV. ANUGERAH KELUARGA ;
155. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Nomor : 724/A/077.222 tentang Pengadaan Pemasangan dan Pemeliharaan Billboard Hukum Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta tanggal 1 November 2007 untuk PT. DIVAINTAN PUTRIPRATAMA ;

Hal. 495 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



156. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran atas Surat Perintah Kerja Nomor : 724/A/077.222 tentang Pengadaan Pemasangan dan Pemeliharaan Billboard Hukum Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta tanggal 1 November 2007 untuk PT. DIVAINTAN PUTRIPRATAMA, yang berisi antara lain :
- a. 1 (satu) lembar asli Dokumen SPM Giro No : 00188292007 Tahun 2007 sebesar Rp. 30.626.430,- (tiga puluh juta enam ratus dua puluh enam ribu empat ratus tiga puluh rupiah) kepada PT. DIVAINTAN PUTRI PRATAMA sehubungan Surat Perintah Kerja Nomor. 724/A/077.222, tanggal 1 November 2007 ;
 - b. 1 (satu) lembar asli Kwitansi PT. DIVAINTAN PUTRIPRATAMA Nomor : 159/KW/DIPP/XII/2007 tertanggal 18 Desember 2007 sebesar Rp. 35.276.516,- (empat puluh lima juta sembilan ratus tiga ribu rupiah), yang ditandatangani an. H. DADANG HERMANSYAH, SH selaku Direktur dan an. BAHIR ROMSAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum DKI Jakarta, serta mengetahui/menyetujui an. JORNAL E. SIAHAAN selaku Kepala Biro Hukum DKI Jakarta
 - c. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 106/SPP/BT/BHK/2007 tertanggal 18 Desember 2007, yang ditanda tangani an. BAHIR ROMSAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum ;
 - d. 1 (satu) lembar asli Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap No. 106/SPP/BT/BHK/2007 tertanggal 18 Desember 2007, yang ditanda tangani an. BAHIR ROMSAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum ;
 - e. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Barang (BAPB) Nomor : 41/BAPB/BH/XII/2007 tertanggal 5 Desember 2007, ditanda tangani oleh Panitia Pemeriksa Barang nomor urut 1 (satu) Ketua sampai dengan 5 (lima) anggota, an. H. DADANG HERMANSYAH, SH selaku Direktur PT. DIVAINTAN PUTRIPRATAMA dan an. JORNAL

Hal. 496 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 2 (dua) lembar asli lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang;
- f. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 61/BAST/BH/XII/2007 tanggal 5 Desember 2007, yang ditanda tangani an. IRUSWANDI, SH selaku Pengurus Barang unit Biro Hukum, an. H. DADANG HERMANSYAH, SH selaku Direktur PT. DIVAINTAN PUTRIPRATAMA dan mengetahui an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 2 (dua) lembar asli lampiran Berita Acara Serah Terima Barang ;
157. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Nomor : 658/A/077 tentang Pemeliharaan Terbitan Berkala Dalam Rangka Peningkatan Perpustakaan Hukum Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta tanggal 1 November 2007 untuk CV. KHASINDO GEUBRINA, RIZKI ;
158. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Nomor : 817/A/077 tentang Penunjukan Langsung Pengadaan Pemeliharaan Buku Ilmu Sosial Dalam rangka Peningkatan Perpustakaan Hukum Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta tanggal 5 Desember 2007 untuk CV. MUDA TARUNA ;
159. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran atas Surat Perintah Kerja Nomor : 817/A/077 tentang Penunjukan Langsung Pengadaan Pemeliharaan Buku Ilmu Sosial Dalam rangka Peningkatan Perpustakaan Hukum Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta tanggal 5 Desember 2007 untuk CV. MUDA TARUNA, yang berisi antara lain :
- a. 1 (satu) lembar asli Dokumen SPM Giro No : 00187542007 Tahun 2007 tertanggal 19 Desember 2007, sebesar Rp. 33.204.350,- (tiga puluh tiga juta dua ratus lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah) kepada CV. MUDA TARUNA sehubungan SPK Nomor. 817/A/077, tanggal 5 Desember 2007 ;
- b. 1 (satu) lembar asli Kwitansi CV. MUDA TARUNA tertanggal 18 Desember 2007 sebesar Rp. 37.081.000,- (tiga puluh tujuh juta delapan puluh satu ribu rupiah), yang ditandatangani diatas materei 6.000 an. MUNAWAR, S.AG selaku Direktur CV. MUDA TARUNA dan an. BAHIR

Hal. 497 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROMSAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum DKI Jakarta, terdapat stempel dan tandatangan an. JORNAL E. SIAHAAN, Sh, Msi selaku Kepala Biro Hukum Prov. DKI Jakarta ;

- c. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 107/SPP/BT/BHK/2007 tertanggal 18 Desember 2007, yang ditanda tangani an. BAHIR ROMSAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum ;
- d. 1 (satu) lembar asli Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap No. 107/SPP/BT/BHK/2007 tertanggal 18 Desember 2007, yang ditanda tangani an. BAHIR ROMSAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum ;
- e. 1 (satu) lembar asli Dokumen Faktur dari CV. MUDA TARUNA Nomor : 28/F/MT/XII/2007, tertanggal 13 Desember 2007, ditujukan kepada Yth. Pemerintah Pemprov DKI Jakarta Jl. Medan Merdeka Selatan No. 8-9, Jakarta, ditandatangani an. MUNAWAR, S.AG selaku Direktur CV. MUDA TARUNA ;
- f. 1 (satu) lembar asli Dokumen Surat Jalan dari CV. MUDA TARUNA Nomor : 28/SJ/MT/XII/2007 tertanggal 13 Desember 2007, ditandatangani an. MUNAWAR, S.AG selaku Direktur CV. MUDA TARUNA dan ditandatangani oleh penerima barang an. IRUSWANDI ;
- g. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Barang (BAPB) Nomor : 102/BAPB/BH/XII/2007 tertanggal 13 Desember 2007, ditanda tangani oleh Panitia Pemeriksa Barang nomor urut 1 (satu) Ketua sampai dengan 5 (lima) anggota, an. MUNAWAR, S.AG selaku Direktur CV. MUDA TARUNA dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang ;

Hal. 498 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 108/BAST/BH/XII/2007 tanggal 13 Desember 2007, yang ditanda tangani an. IRUSWANDI, SH.M.Kn selaku Pengurus Barang unit Biro Hukum, an. MUNAWAR, S.AG selaku Direktur CV. MUDA TARUNA dan mengetahui an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Serah Terima Barang ;
160. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Nomor : 732/A/077.22 tentang Pengadaan Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi Dalam rangka Penyuluhan Hukum Terpadu Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta tanggal 2 November 2007 untuk CV. ALWI JAYA ;
161. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Nomor : 457/077.222 tentang Pengadaan Penggandaan Bahan Untuk Penyebarluasan ke 450 Instansi Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta tanggal 28 Mei 2007 untuk CV. CIPTA GRAHA NUSANTARA ;
162. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Nomor : 602/077.922 tentang Pengadaan Penggandaan Bahan-bahan Dalam rangka Sosialisasi Keluarga Sadar Hukum Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta untuk CV. CANDRA PUTRA MADA ;
163. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran atas Surat Perintah Kerja Nomor : 602/077.922 tentang Pengadaan Penggandaan Bahan-bahan Dalam rangka Sosialisasi Keluarga Sadar Hukum Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta untuk CV. CANDRA PUTRA MADA, yang berisi antara lain :
- a. 1 (satu) lembar asli Dokumen SPM Giro No : 00137662007 Tahun 2007 tertanggal 22 November 2007, sebesar Rp. 14.694.624,- (empat belas juta enam ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus dua puluh empat rupiah) kepada CV. CANDRA PUTRA MADA sehubungan Kontrak Nomor. 602/077.922 ;
- b. 1 (satu) lembar asli Kwitansi CV. CANDRA PUTRA MADA tertanggal 20 November 2007 sebesar Rp. 16.410.240,- (enam belas juta empat ratus sepuluh ribu dua ratus empat puluh rupiah), yang ditandatangani diatas materei 6.000 an. LINA MARLINA ARUAN dan an. BAHIR ROMSAH selaku



- Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum DKI Jakarta, terdapat stempel dan tandatangan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum Prov. DKI Jakarta ;
- c. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 73/SPP/BHK/BT/2007 tertanggal 20 November 2007, yang ditanda tangani an. BAHIR ROMSAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum ;
- d. 1 (satu) lembar asli Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap No. 73/SPP/BT/BHK/2007 tertanggal 20 November 2007, yang ditanda tangani an. BAHIR ROMSAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum ;
- e. 2 (dua) lembar asli Dokumen Faktur (tanpa nomor) tertanggal 30 Oktober 2007 ditujukan kepada Yth. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sebesar Rp. 16.410.240,- (enam belas juta empat ratus sepuluh ribu dua ratus empat puluh rupiah), ditandatangani an. LINA MARLINA ARUAN ;
- f. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Barang (BAPB) Nomor : 12/BAPB/BH/X/2007 tertanggal 30 Oktober 2007, ditanda tangani oleh Panitia Pemeriksa Barang nomor urut 1 (satu) Ketua sampai dengan 5 (lima) anggota, an. LINA MARLINA ARUAN selaku direktur CV. CANDRA PUTRA MADA dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang ;
- g. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 11/BAST/BH/X/2007 tanggal 30 Oktober 2007, yang ditanda tangani an. IRUSWANDI, SH.M.Kn selaku Pengurus Barang unit Biro Hukum, an. LINA MARLINA ARUAN selaku direktur CV. CANDRA PUTRA MADA dan mengetahui an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Serah Terima Barang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

164. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Nomor : 597/077.92 tentang Pencetakan Kodifikasi Hukum Perundang-undangan Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta tanggal 19 September 2007 untuk CV. ELFIMAS PUTRI ;
165. 1 (satu) bundel Pembayaran atas Surat Perintah Kerja Nomor : 597/077.92 tentang Pencetakan Kodifikasi Hukum Perundang-undangan Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta tanggal 19 September 2007 untuk CV. ELFIMAS PUTRI, yang berisi antara lain :
- a. 1 (satu) lembar asli Dokumen SPM Giro No : 00164532007 Tahun 2007 sebesar Rp. 40.976.000,- (empat puluh juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) kepada CV. ELFIMAS PUTRI sehubungan Surat Perintah Kerja Nomor.597/077.92 , tanggal 19 September 2007 ;
 - b. 1 (satu) lembar asli Kwitansi CV. ELFIMAS PUTRI tertanggal 10 Desember 2007 sebesar Rp. 45.760.000,- (empat puluh lima juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), yang ditandatangani an. RAVIDA SAMOSIR selaku Direktur CV. ELFIMAS PUTRI dan an. BAHIR ROMSAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum DKI Jakarta, serta mengetahui/menyetujui an. JORNAL E. SIAHAAN selaku Kepala Biro Hukum DKI Jakarta ;
 - c. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 86/SPP/BHK/BT/2007 tertanggal 10 Desember 2007, yang ditanda tangani an. BAHIR ROMSAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum ;
 - d. 1 (satu) lembar asli Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap No. 86/SPP/BT/BHK/2007 tertanggal 10 Desember 2007, yang ditandatangani an. BAHIR ROMSAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum ;
 - e. 1 (satu) lembar asli Faktur CV. ELFIMAS PUTRI tertanggal 1 November 2007 yang ditandatangani an. RAVIDA SAMOSIR selaku Direktur CV. ELFIMAS PUTRI ;

Hal. 501 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Barang (BAPB) Nomor : 13/BAPB/BH/XI/2007 tertanggal 1 November 2007, ditanda tangani oleh Panitia Pemeriksa Barang nomor urut 1 (satu) Ketua sampai dengan 5 (lima) anggota, an. RAVIDA SAMOSIR selaku Direktur CV. ELFIMAS PUTRI dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang ;
- g. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 12/BAST/BH/XI/2007 tanggal 1 November 2007, yang ditanda tangani an. IRUSWANDI, SH selaku Pengurus Barang unit Biro Hukum, an. RAVIDA SAMOSIR selaku Direktur CV. ELFIMAS PUTRI dan mengetahui an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Serah Terima Barang ;
166. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Nomor : 729/077.222 tentang Pengadaan Konsumsi Dalam Rangka Pembinaan Keluarga Sadar Hukum Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta tanggal 2 November 2007 untuk CV. RAFI JAYA DIKA ;
167. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Surat Perintah Kerja Nomor : 729/077.222 tentang Pengadaan Konsumsi Dalam Rangka Pembinaan Keluarga Sadar Hukum Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta tanggal 2 November 2007 untuk CV. RAFI JAYA DIKA, yang berisi antara lain :
- a. 1 (satu) lembar asli Dokumen SPM Giro No : 00192492007 Tahun 2007 tertanggal 21 Desember 2007, sebesar Rp. 18.592.367,- (delapan belas juta lima ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah) kepada CV. RAFI JAYA DIKA sehubungan Kontrak Nomor.729/A/077.222 ;
- b. 1 (satu) lembar asli Kwitansi CV. RAFI JAYA DIKA tertanggal 18 Desember 2007 sebesar Rp. 20.763.050,- (dua puluh juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu lima puluh rupiah), yang ditandatangani diatas meterei 6.000 an. ISWANDRA selaku Direktur dan an. BAHIR ROMSAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum DKI Jakarta, terdapat

Hal. 502 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- stempel dan tandatangan an. JORNAL E. SIAHAAN, Sh, Msi selaku Kepala Biro Hukum Prov. DKI Jakarta ;
- c. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 98/SPP/BT/BHK/2007 tertanggal 18 Desember 2007, yang ditanda tangani an. BAHIR ROMSAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum ;
- d. 1 (satu) lembar asli Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap No. 98/SPP/BT/BHK/2007 tertanggal 18 Desember 2007, yang ditanda tangani an. BAHIR ROMSAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum ;
- e. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Barang (BAPB) Nomor : 64/BAPB/BH/XII/2007 tertanggal 6 Desember 2007, ditanda tangani oleh Panitia Pemeriksa Barang nomor urut 1 (satu) Ketua sampai dengan 5 (lima) anggota, an. ISWANDRA selaku Direktur CV. RAFI JAYA DIKA dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang ;
- f. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 76/BAST/BH/XII/2007 tanggal 6 Desember 2007, yang ditanda tangani an. IRUSWANDI, SH.M.Kn selaku Pengurus Barang unit Biro Hukum, a an. ISWANDRA selaku Direktur CV. RAFI JAYA DIKA dan mengetahui an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Serah Terima Barang ;
168. 1 (satu) bundel Perjanjian Pelelangan Umum Pengadaan Pencetakan Lembara Daerah (LD) Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta antara Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta dengan CV. BAYINDO UTAMA nomor :631/077.92 tanggal 25 Oktober 2007 ;
169. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran atas Pengadaan Pencetakan Lembara Daerah (LD) Kebutuhan Biro Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setdaprov DKI Jakarta antara Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta dengan CV. BAYINDO UTAMA nomor :631/077.92 tanggal 25 Oktober 2007, yang berisi antara lain :

- a. 1 (satu) lembar asli Dokumen SPM Giro No : 00138812007 Tahun 2007 tertanggal 23 November 2007, sebesar Rp. 126.194.772,- (seratus dua puluh enam juta seratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah) kepada CV. BAYINDO UTAMA sehubungan Kontrak Nomor. 631/077.92 ;
- b. 1 (satu) lembar asli Kwitansi CV. BAYINDO UTAMA tertanggal 19 November 2007 sebesar Rp. 140.928.172,- (seratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu seratus tujuh puluh dua rupiah), yang ditandatangani diatas materai 6.000 an. WARNERY RASSOELL dan an. BAHIR ROMSAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum DKI Jakarta, terdapat stempel dan tandatangan an. JORNAL E. SIAHAAN, Sh, Msi selaku Kepala Biro Hukum Prov. DKI Jakarta ;
- c. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 72/SPP/BHK/BT/2007 tertanggal 19 November 2007, yang ditanda tangani an. BAHIR ROMSAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum ;
- d. 1 (satu) lembar asli Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap No. 72/SPP/BT/BHK/2007 tertanggal 19 November 2007, yang ditanda tangani an. BAHIR ROMSAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum ;
- e. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Barang (BAPB) Nomor : 07/BAPB/BH/XI/2007 tertanggal 5 November 2007, ditanda tangani oleh Panitia Pemeriksa Barang nomor urut 1 (satu) Ketua sampai dengan 5 (lima) anggota, an. WARNERY RASSOELL selaku Direktur CV. BAYINDO UTAMA dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi

Hal. 504 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang ;

- f. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 06/BAST/BH/XI/2007 tanggal 5 November 2007, yang ditanda tangani an. IRUSWANDI, SH.M.Kn selaku Pengurus Barang unit Biro Hukum, an. WARNERY RASSOELL selaku Direktur CV. BAYINDO UTAMA dan mengetahui an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Serah Terima Barang ;
170. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Nomor : 720/077.92 tentang Penggandaan Fotocopy Dalam rangka Pelaksanaan Talk Show Interaktif Di Radio Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta tanggal 1 November 2007 untuk CV. CITRA SARANA MULYA ;
171. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran atas Surat Perintah Kerja Nomor : 720/077.922 tentang Pengadaan foto copy pelaksanaan Talk Show Interaktif Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta untuk CV. CITRA SARANA MULYA, yang berisi antara lain :
 - a. 1 (satu) lembar asli Dokumen SPM Giro No : 00188242007 Tahun 2007 tertanggal 19 Desember 2007, sebesar Rp. 17.444.104,- (tujuh belas juta empat ratus empat puluh empat ribu seratus empat rupiah) kepada CV. CITRA SARANA MULYA;
 - b. 1 (satu) lembar asli Kwitansi CV. CITRA SARANA MULYA tertanggal 18 Desember 2007 sebesar Rp. 19.480.725,- (sembilan belas juta empat ratus delapan puluh ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah), yang ditandatangani diatas meterei 6.000 an. SUDIRMAN selaku Direktur CV. CITRA SARANA MULYA dan an. BAHIR ROMSAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum DKI Jakarta, terdapat stempel dan tandatangan an. JORNAL E. SIAHAAN, Sh, Msi selaku Kepala Biro Hukum Prov. DKI Jakarta ;
 - c. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 102/SPP/BT/BHK/2007 tertanggal 18 Desember 2007, yang ditanda tangani an.

Hal. 505 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BAHIR ROMSAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum ;
- d. 1 (satu) lembar asli Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap No. 102/SPP/BT/BHK/2007 tertanggal 18 Desember 2007, yang ditanda tangani an. BAHIR ROMSAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum ;
- e. 2 (dua) lembar asli Faktur CV. CITRA SARANA MULYA Nomor : 14/CSM/XII/2007 tanggal 30 November 2007, yang ditanda tangani an. SUDIRMAN selaku Direktur CV. CITRA SARANA MULYA ;
- f. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Barang (BAPB) Nomor : 37/BAPB/BH/XI/2007 tertanggal 30 November 2007, ditanda tangani oleh Panitia Pemeriksa Barang nomor urut 1 (satu) Ketua sampai dengan 5 (lima) anggota, an. SUDIRMAN selaku Direktur CV. CITRA SARANA MULYA dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang ;
- g. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 36/BAST/BH/XI/2007 tanggal 30 November 2007, yang ditanda tangani an. IRUSWANDI, SH.M.Kn selaku Pengurus Barang unit Biro Hukum, an. SUDIRMAN selaku Direktur CV. CITRA SARANA MULYA dan mengetahui an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Serah Terima Barang ;
172. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Nomor : 585/077.922 tentang Pengadaan Konsumsi Kegiatan Penyuluhan Hukum Terpadu Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta tanggal 19 September 2007 untuk CV. PRATAMA CATERING ;
173. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran atas Surat Perintah Kerja Nomor : 585/077.922 tentang Pengadaan Konsumsi Kegiatan Penyuluhan Hukum Terpadu Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov

Hal. 506 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DKI Jakarta tanggal 19 September 2007 untuk CV. PRATAMA, yang berisi antara lain :

- a. 1 (satu) lembar asli Dokumen SPM Giro No : 00141732007 Tahun 2007 sebesar Rp. 34.209.050,- (tiga puluh empat juta dua ratus sembilan ribu lima puluh rupiah) kepada CV. PRATAMA sehubungan Kontrak Nomor. 585/077.922, tanggal 27 November 2007 ;
- b. 1 (satu) lembar asli Kwitansi CV. PRATAMA nomor : 25/K/P3/XI/2007 tertanggal 20 Desember 2007 sebesar Rp. 38.203.000,- (tiga puluh delapan juta dua ratus tiga ribu rupiah), yang ditandatangani diatas meterei 6.000 an. SUDIAR dan an. BAHIR ROMSAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum DKI Jakarta, terdapat stempel dan tandatangan an. JORNAL E. SIAHAAN, Sh, Msi selaku Kepala Biro Hukum Prov. DKI Jakarta ;
- c. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 74/SPP/BHK/BT/2007 tertanggal 20 November 2007, yang ditanda tangani an. BAHIR ROMSAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum ;
- d. 1 (satu) lembar asli Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap No. 74/SPP/BT/BHK/2007 tertanggal 20 November 2007, yang ditanda tangani an. BAHIR ROMSAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum ;
- e. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Barang (BAPB) Nomor : 14/BAPB/BH/X/2007 tertanggal 30 Oktober 2007, ditanda tangani oleh Panitia Pemeriksa Barang nomor urut 1 (satu) Ketua sampai dengan 5 (lima) anggota, an. SUDIAR selaku Direktur CV. PRATAMA dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang ;
- f. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 13/BAST/BH/X/2007 tanggal 30 Oktober

Hal. 507 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007, yang ditanda tangani an. IRUSWANDI, SH selaku Pengurus Barang unit Biro Hukum, an. SUDIAR selaku Direktur CV. PRATAMA dan mengetahui an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Serah Terima Barang;

174. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Nomor : 475/A/077.142 tentang Pemeliharaan Alat Penyimpanan (Lemari Arsip) Dalam Rangka Peningkatan Perpustakaan Hukum Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta tanggal 28 September 2007 untuk CV. INTAN JAYA ;

175. 1 (satu) bundel Pembayaran Surat Perintah Kerja Nomor : 475/A/077.142 tentang Pemeliharaan Alat Penyimpanan (Lemari Arsip) Dalam Rangka Peningkatan Perpustakaan Hukum Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta tanggal 28 September 2007 untuk CV.INTAN JAYA, yang berisi antara lain :

a. 1 (satu) lembar asli Dokumen SPM Giro No : 00190002007 Tahun 2007 sebesar Rp. 45.903.000,- (empat puluh lima juta sembilan ratus tiga ribu rupiah) kepada CV INTAN JAYA sehubungan Surat Perintah Kerja Nomor. 475/A/077.142, tanggal 19 Desember 2007 ;

b. 1 (satu) lembar asli Kwitansi CV. INTAN JAYA Nomor : 25/K/IJ/DKI/XII/2007 tertanggal 18 Desember 2007 sebesar Rp. 45.903.000,- (empat puluh lima juta sembilan ratus tiga ribu rupiah), yang ditandatangani an. M. TAUFIQ HIDAYAT selaku Direktur CV. INTAN JAYA dan an. BAHIR ROMSAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum DKI Jakarta ;

c. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 99/SPP/BT/BHK/2007 tertanggal 18 Desember 2007, yang ditanda tangani an. BAHIR ROMSAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum ;

d. 1 (satu) lembar foto copy Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap No. 99/SPP/BT/BHK/2007 tertanggal 18 Desember 2007, yang ditanda tangani an.

Hal. 508 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- BAHIR ROMSAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu
Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta dan an. JORNAL E.
SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum ;
- e. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Pemeriksaan
Barang (BAPB) Nomor : 06/BAPB/BH/XI/2007 tertanggal 9
November 2007, ditanda tangani oleh Panitia Pemeriksa
Barang nomor urut 1 (satu) Ketua sampai dengan 5 (lima)
anggota, an. M. TAUFIQ HIDAYAT selaku Direktur CV.
INTAN JAYA dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku
Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran
Berita Acara Pemeriksaan Barang ;
- f. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Serah Terima
Barang Nomor : 46/BAST/BH/XI/2007 tanggal 3 Oktober
2007, yang ditanda tangani an. IRUSWANDI, SH selaku
Pengurus Barang unit Biro Hukum, an. M. TAUFIQ HIDAYAT
selaku Direktur CV. INTAN JAYA dan mengetahui an.
JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum,
berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Serah
Terima Barang ;
178. 1 (satu) bundel Perjanjian Pelelangan Umum Pengadaan Jasa
Produksi dan Penayangan Peraturan Perundang-undangan
Daerah di TV Plasma (Videotron) dan Pemuatan Peraturan
Perundang-undangan di Media Cetak Kebutuhan Biro Hukum
Setdaprov DKI Jakarta antara Biro Hukum Setdaprov DKI
Jakarta dengan CV. SALSABILA SUKSES MANDIRI nomor
:629/077.92 tanggal 25 Oktober 2007 ;
179. 1 (satu) bundel Pembayaran atas Perjanjian Pelelangan Umum
Pengadaan Jasa Produksi dan Penayangan Peraturan
Perundang-undangan Daerah di TV Plasma (Videotron) dan
Pemuatan Peraturan Perundang-undangan di Media Cetak
Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta antara Biro
Hukum Setdaprov DKI Jakarta dengan CV. SALSABILA
SUKSES MANDIRI nomor :629/077.92 tanggal 25 Oktober 2007,
yang berisi antara lain :
- a. 1 (satu) lembar asli Dokumen SPM Giro No : 00134852007
Tahun 2007 sebesar Rp. 104.744.900,- (seratus empat juta
tujuh ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus rupiah)

Hal. 509 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada CV SALSABILA SUKSES MANDIRI sehubungan Kontrak Nomor. 629/077.92, tanggal 25 Oktober 2007 ;
- b. 1 (satu) lembar asli Kwitansi CV. SALSABILA SUKSES MANDIRI tertanggal 15 November 2007 sebesar Rp. 116.974.000,- (seratus enam belas juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), yang ditandatangani an. IWAN AGUS PURWANTO selaku Direktur CV. SALSABILA SUKSES MANDIRI dan an. BAHIR ROMSAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum DKI Jakarta, terdapat stempel dan tanda tangan an. JORNAL E SIAHAAN selaku Kepala Biro Hukum DKI Jakarta ;
 - c. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 70/SPP/BT/BHK/2007 tertanggal 15 November 2007, yang ditanda tangani an. BAHIR ROMSAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum ;
 - d. 1 (satu) lembar asli Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap No. 70/SPP/BT/BHK/2007 tertanggal 15 November 2007, yang ditanda tangani an. BAHIR ROMSAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum ;
 - e. 1 (satu) lembar asli Dokumen Faktur Nomor : 089/FK/SSM/XI/ 2007 tanggal 15 November 2007, yang ditandatangani an. IWAN AGUS PURWANTO selaku Direktur CV. SALSABILA SUKSES MANDIRI ;
 - f. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Barang (BAPB) Nomor : 05/BAPB/BH/XI/2007 tertanggal 5 November 2007, ditanda tangani oleh Panitia Pemeriksa Barang nomor urut 1 (satu) Ketua sampai dengan 5 (lima) anggota, an. IWAN AGUS PURWANTO selaku Direktur CV. SALSABILA SUKSES MANDIRI dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang ;

Hal. 510 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



- g. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 05/BAST/BH/XI/2007 tanggal 5 November 2007, yang ditanda tangani an. IRUSWANDI, SH selaku Pengurus Barang unit Biro Hukum, an. IWAN AGUS PURWANTO selaku Direktur CV. SALSABILA SUKSES MANDIRI dan mengetahui an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Serah Terima Barang ;
178. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Kerja Nomor : 504/075.72 Biro Hukum Setdaprov. DKI Jakarta dengan CV. SINAR HARAPAN tanggal 28 September 2007 ;
179. 1 (satu) bundel Perjanjian Pemilihan Langsung Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) Dalam Rangka temu Wicara Peningkatan Kesadaran Hukum Bagi Warga Komunitas Kebutuhan Biro Hukum Sekdaprov DKI Jakarta antara Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta dengan PT. METRO FURNITURE INDAH nomor : 647/A/079.92 tanggal 2 November 2007 ;
180. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) Dalam Rangka temu Wicara Peningkatan Kesadaran Hukum Bagi Warga Komunitas Kebutuhan Biro Hukum Sekdaprov DKI Jakarta antara Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta dengan PT. METRO FURNITURE INDAH nomor : 647/A/079.92 tanggal 2 November 2007, yang berisi antara lain :
- a. 1 (satu) lembar asli Dokumen SPM Giro No : 00188182007 Tahun 2007 sebesar Rp. 49.087.278,- (empat puluh sembilan juta delapan puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah) kepada PT. METRO FURNITURE INDONESIA sehubungan Kontrak Nomor. 647/A/079.92, tanggal 2 November 2007 ;
- b. 1 (satu) lembar asli Kwitansi PT. METRO FI Nomor : 021/KWITANSI/MFI/XII/2007 tertanggal 18 Desember 2007 sebesar Rp. 49.087.278,- (empat puluh sembilan juta delapan puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah), yang ditandatangani an. Drs. ARTHUR SARUFI selaku Direktur PT. FURNITURE INDAH dan an. BAHIR ROMSAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum DKI Jakarta



- dan terdapat stempel dan tandatangan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum ;
- c. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 108/SPP/BT/BHK/2007 tertanggal 18 Desember 2007, yang ditanda tangani an. BAHIR ROMSAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum ;
- d. 1 (satu) lembar foto copy Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap No. 108/SPP/BT/BHK/2007 tertanggal 18 Desember 2007, yang ditanda tangani an. BAHIR ROMSAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum ;
- e. 1 (satu) lembar asli Dokumen Faktur No : 018/FAKTUR/MFI/XII/2007 tertanggal 10 Desember 2007, yang ditandatangani an. Drs. ARTHUR SARUFI selaku Direktur PT. METRO FURNITURE INDONESIA ;
- f. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Barang (BAPB) Nomor : 90/BAPB/BH/XII/2007 tertanggal 10 Desember 2007, ditanda tangani oleh Panitia Pemeriksa Barang nomor urut 1 (satu) Ketua sampai dengan 5 (lima) anggota, an. Drs. ARTHUR SARUFI selaku Direktur PT. METRO FURNITURE INDONESIA dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang;
- g. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 104/BAST/BH/XII/2007 tanggal 10 Desember 2007, yang ditanda tangani an. IRUSWANDI, SH selaku Pengurus Barang unit Biro Hukum, an. Drs. ARTHUR SARUFI selaku Direktur PT. METRO FURNITURE INDONESIA dan mengetahui an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Serah Terima Barang ;
181. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Nomor : 506/A/077.32 tentang Pengadaan liputan TV dalam rangka sosialisasi tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pidana korupsi kebutuhan biro hukum Setdaprov DKI Jakarta tanggal 1 November 2007 untuk CV. MAHARANI MANDIRI ;
182. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Nomor : 693/A/077.222 tentang Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) Dalam Rangka Kampanye Kesadaran Hukum Mahasiswa Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta tanggal 1 November 2007 untuk CV. PANIOR GIRESTARI ;
183. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Nomor : 708/077.32 tentang Pengadaan Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi dalam Rangka Temu Wicara Peningkatan Kesadaran Hukum Bagi Warga Komunitas Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta tanggal 29 September 2007 untuk CV. PUTRA MANDIRI ;
184. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Nomor : 503/A/077.92 tentang Pengadaan Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi Dalam Rangka Kampanye Kesadaran Hukum Mahasiswa Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta tanggal 1 November 2007 untuk CV. LESTARI SEJAHTERA ;
185. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Nomor : 588/077.922 tentang Penunjukan Langsung Pengadaan Materai Dalam rangka Penanganan Perkara Perdata, Pidana dan TUN Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta untuk CV. ANUGRAH JAYA ;
186. 1 (satu) bundel Surat Penawaran Harga CV. MAWANY INTI KARYA kepada Karo Hukum Provinsi DKI Jakarta dan Surat Perintah Kerja nomor 735/A/077.22 tentang Pengadaan Penggandaan /Fotocopy Dalam Rangka Kegiatan Pengurusan Perkara Perdata, Pidana dan TUN Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta untuk CV. MAWANY INTI KARYA ;
187. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Nomor : 540/A/077.92 tentang Penggandaan foto copy Dalam Rangka Sosialisasi Tindak Pidana Korupsi Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta 1 November 2007 untuk CV. DHITA KASIH MANDIRI ;
188. Perjanjian Pengadaan Konsumsi Dalam Rangka Temu Wicara Debat Hukum dengan Generasi Muda Kebutuhan Biro Hukum Sekdaprov DKI Jakarta antara Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta dengan CV. TAMADO JAYA nomor 491/072.922 tanggal 31 Oktober 2007 ;

Hal. 513 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

189. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Nomor : 581/077.922 tentang Pengadaan Alat Tulis Kantor Dalam rangka Kegiatan Sosialisasi Tindak Pidana Korupsi Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta tanggal 19 September 2007 untuk CV. SAISUBA JAYA ;
190. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran atas Surat Perintah Kerja nomor 581/077.922 tentang Pengadaan Alat Tulis Kantor Dalam rangka Kegiatan Sosialisasi Tindak Pidana Korupsi Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta tanggal 19 September 2007 untuk CV. SAISUBA JAYA, yang berisi antara lain :
- a. 1 (satu) lembar asli Dokumen SPM Giro No : 00165722007 Tahun 2007 sebesar Rp. 40.683.947,- (empat puluh juta enam ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah) kepada CV. SAISUBA JAYA sehubungan Kontrak Nomor. 581/077.922, tanggal 12 Desember 2007 ;
 - b. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 85/SPP/BHK/BT/2007 tertanggal 10 Desember 2007, yang ditanda tangani an. BAHIR ROMSAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum ;
 - c. 1 (satu) lembar asli Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap No. 85/SPP/BT/BHK/2007 tertanggal 10 Desember 2007, yang ditanda tangani an. BAHIR ROMSAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum ;
 - d. 1 (satu) lembar asli Kwitansi CV. SAISUBA JAYA (tanpa nomor) tertanggal 10 Desember 2007 sebesar Rp. 45.433.850,- (empat puluh lima juta empat ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah), yang ditandatangani diatas materai 6.000 an. SUGENG RIYADI dan an. BAHIR ROMSAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum DKI Jakarta, terdapat stempel dan tandatangan an. JORNAL E. SIAHAAN, Sh, Msi selaku Kepala Biro Hukum Prov. DKI Jakarta ;

Hal. 514 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. 1 (satu) lembar asli Dokumen Faktur CV. SAISUBA JAYA (tanpa nomor), tertanggal 19 Oktober 2007, sebesar Rp. 45.433.850,- (empat puluh lima juta empat ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah), ditandatangani oleh an. SUGENG RIYADI selaku Direktur Utama CV. SAISUBA JAYA dan an. IRUSWANDI ;
- f. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Barang (BAPB) Nomor : 20/BAPB/BH/XI/2007 tertanggal 19 Oktober 2007, ditanda tangani oleh Panitia Pemeriksa Barang nomor urut 1 (satu) Ketua sampai dengan 5 (lima) anggota, an. SUGENG RIYADI selaku Direktur Utama CV. SAISUBA JAYA dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang ;
- g. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 17/BAST/BH/IX/2007 tanggal 19 Oktober 2007, yang ditanda tangani an. IRUSWANDI, SH selaku Pengurus Barang unit Biro Hukum, an. SUGENG RIYADI selaku Direktur Utama CV. SAISUBA JAYA dan mengetahui an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Serah Terima Barang ;
191. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Nomor : 583/077.922 tentang Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) dalam rangka Kegiatan Temu Wicara Debat hukum Dengan generasi Muda Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta tanggal 19 September 2007 untuk CV. YANCO MITRA KOMUNIKA ;
192. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Nomor : 738/A/077.222 tentang Penunjukan Langsung Pengadaan Alat Tulis kantor (ATK) Kegiatan Penyegaran Dan Pemantapan PPNS Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta tanggal 1 November 2007 untuk CV. RAJIMMY BERSAUDARA ;
193. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Nomor : 543/A/075.72 tentang Pengadaan Konsumsi Dalam Rangka Kampanye Kesadaran Hukum Pelajar Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta tanggal 1 November 2007 untuk CV. MAWANY INTI KARYA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

194. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Nomor : 717/075.72 tentang Pengadaan Konsumsi Dalam Rangka Penyelesaian Pertanahan di Provinsi DKI Jakarta Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta tanggal 1 November 2007 untuk CV. DERMAGA TUA ;
195. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Nomor : 744/A/077.222 tentang Pengadaan Alat Tulis Kantor Dalam Rangka Penyelesaian Masalah Sengketa Pertanahan di Provinsi DKI Jakarta Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta untuk CV. DUA PUTERI ANUGERAH ;
196. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Nomor : 537/A/075.72 tentang Pengadaan Konsumsi Dalam Rangka Sosialisasi Tindak Pidana Korupsi Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta tanggal 1 November 2007 untuk CV. DHITA KASIH MANDIRI ;
197. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Nomor : 714/077.92 tentang Pengadaan Penggandaan Fotocopy Dalam Rangka Temu Wicara Debat Hukum dengan Generasi Muda Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta tanggal 19 September 2007 untuk CV. KEMUNING JAYA UTAMA ;
198. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Nomor : 500/A/077.92 tentang Pengadaan Penggandaan Fotocopy Dalam Rangka Kampanye Kesadaran Hukum Mahasiswa Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta tanggal 1 November 2007 untuk CV. ROMORA COMSELINDO JAYA ;
199. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Nomor : 520/A/077.22 tentang Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) Dalam Rangka Inventarisasi dan Evaluasi Perkara Di Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta tanggal 1 November 2007 untuk CV. SAISUBA JAYA ;
200. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Kerja Nomor : 523/A/077.222 tertanggal 1 Nopember 2007 tentang Pengadaan Penggandaan Fotocopy dalam rangka Inventarisasi dan Evaluasi Perkara di Biro Hukum kebutuhan Biro Hukum Setda Prov. DKI Jakarta, untuk PT. SAISUBA JAYA ;
201. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Kerja Nomor : 716/A/077.92 tertanggal 1 November 2007 tentang Penunjukan Langsung Pengadaan Penggandaan Bahan (Fotocopy) kegiatan penataan arsip Biro Hukum kebutuhan Biro Hukum Setda Prov. DKI Jakarta, untuk PT. MARAX INDONESIA ;

Hal. 516 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



202. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Kerja Nomor : 508/A/077.92 tertanggal 1 November 2007 tentang Pengadaan Penggandaan Foto Copy dalam rangka kegiatan evaluasi yuridis terhadap perjanjian kerjasama pemanfaatan / penggunaan aset kebutuhan Biro Hukum Setda Prov. DKI Jakarta, untuk CV. TEGUH PACKINDO MAKMUR ;
203. 1 (satu) bendel Dokumen Surat Perintah Kerja Nomor : 545/A/077.522 tertanggal 1 November 2007 tentang Pengadaan Pemeliharaan Peralatan Studio Visual dalam rangka sarana penunjang kebutuhan Biro Hukum Setda Prov. DKI Jakarta, untuk CV. CITRA ABADI ;
204. 1 (satu) bendel Dokumen Pembayaran atas Surat Perintah Kerja Nomor : 545/A/077.522 tertanggal 1 November 2007 tentang Pengadaan Pemeliharaan Peralatan Studio Visual dalam rangka sarana penunjang kebutuhan Biro Hukum Setda Prov. DKI Jakarta, untuk CV. CITRA ABADI, yang berisi antara lain :
- a. 1 (satu) lembar asli Dokumen SPM Giro No : 00187562007 tertanggal 19 Desember 2007, sebesar Rp. 13.688.742,- (tiga belas juta enam ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah) kepada CV. CITRA ABADI ;
 - b. 1 (satu) lembar asli Kwitansi CV. CITRA ABADI Nomor : CA/XI?LX/07 tertanggal 18 Desember 2007 sebesar Rp. 15.286.920,- (lima belas juta dua ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh rupiah), yang ditandatangani diatas materai 6.000 an. MUKJIJAH selaku Direktur CV. CITRA ABADI dan an. BAHIR ROMSAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum DKI Jakarta, terdapat stempel dan tandatangan an. JORNAL E. SIAHAAN, Sh, Msi selaku Kepala Biro Hukum Prov. DKI Jakarta ;
 - c. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 04/SPP/BT/BHK/2007 tertanggal 18 Desember 2007, yang ditanda tangani an. BAHIR ROMSAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum ;
 - d. 1 (satu) lembar asli Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap No. 104/SPP/BT/BHK/2007 tertanggal 18



- Desember 2007, yang ditanda tangani an. BAHIR ROMSAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum ;
- e. 1 (satu) lembar asli Dokumen Faktur Nomor : CA/XI/LX/07 tertanggal 3 Desember 2007 yang ditandatangani an. MUKJIJAH selaku Direktur CV. CITRA ABADI ;
- f. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Barang (BAPB) Nomor : 83/BAPB/BH/XII/2007 tertanggal 3 Desember 2007, ditanda tangani oleh Panitia Periksa Barang nomor urut 1 (satu) Ketua sampai dengan 5 (lima) anggota, an. MUKJIJAH selaku Direktur CV. CITRA ABADI dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang ;
- g. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 68/BAST/BH/XII/2007 tanggal 3 Desember 2007, yang ditanda tangani an. IRUSWANDI, SH selaku Pengurus Barang unit Biro Hukum, an. MUKJIJAH selaku Direktur CV. CITRA ABADI dan mengetahui an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Serah Terima Barang;
205. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Kerja Nomor : 503/A/077.222 tertanggal 19 September 2007 tentang Pengadaan Penggandaan Fotocopy pembahasan revisi undang-undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara kebutuhan Biro Hukum Setda Prov. DKI Jakarta, untuk CV. DUA PUTERI ANUGERAH ;
206. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran terhadap Surat Perintah Kerja Nomor : 503/A/077.222 tertanggal 19 September 2007 tentang Pengadaan Penggandaan Fotocopy pembahasan revisi undang-undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara kebutuhan Biro Hukum Setda Prov. DKI Jakarta, untuk CV. DUA PUTERI ANUGERAH, yang berisi antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar asli Dokumen SPM Giro No : 00134522007 Tahun 2007 tanggal 15 November 2007, sebesar Rp. 26.792.000,- (dua puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) kepada CV. DUA PUTERI ANUGERAH ;
- b. 1 (satu) lembar asli Kwitansi CV. DUA PUTERI ANUGERAH Nomor : 008/DPA/XI/2007 tertanggal 9 November 2007 sebesar Rp. 29.920.000,- (dua puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), yang ditandatangani diatas materai 6.000 an. TIOLINA L. TOBING selaku Direktur dan an. BAHIR ROMSAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum DKI Jakarta, terdapat stempel dan tandatangan an. JORNAL E. SIAHAAN, Sh, Msi selaku Kepala Biro Hukum Prov. DKI Jakarta ;
- c. 1 (satu) lembar foto copy Dokumen Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 69/SPP/BT/BHK/2007 tertanggal 9 November 2007, yang ditanda tangani an. BAHIR ROMSAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum ;
- d. 1 (satu) lembar asli Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap No. 69/SPP/BT/BHK/2007 tertanggal 9 November 2007, yang ditanda tangani an. BAHIR ROMSAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum ;
- e. 1 (satu) lembar asli Dokumen Faktur Nomor : KWT.008/DPA/XI/07 tertanggal 9 November 2007 yang ditandatangani an. TIO LONA L. TOBING selaku Direktur CV. DUA PUTERI ANUGERAH ;
- f. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Barang (BAPB) Nomor : 04/BAPB/BH/X/2007 tertanggal 29 Oktober 2007, ditanda tangani oleh Panitia Pemeriksa Barang nomor urut 1 (satu) Ketua sampai dengan 5 (lima) anggota, an. TIO LONA L. TOBING selaku Direktur CV. DUA PUTERI ANUGERAH dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang ;

Hal. 519 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 04/BAST/BH/XII/2007 tanggal 29 Oktober 2007, yang ditanda tangani an. IRUSWANDI, SH selaku Pengurus Barang unit Biro Hukum, an. TIO LONA L. TOBING selaku Direktur CV. DUA PUTERI ANUGERAH dan mengetahui an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Serah Terima Barang ;
207. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Kerja Nomor : 576/A/077.92 tertanggal 19 September 2007 tentang Pengadaan Fotocopy kegiatan evaluasi dan pengkajian peraturan perundang-undangan tentang pengosongan hunian tanpa hak kebutuhan Biro Hukum Setda Prov. DKI Jakarta, untuk PT. JOZAVINDO INTI KARYA ;
208. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Kerja Nomor : 574/A/077.92 tertanggal 19 September 2007 tentang Pengadaan Fotocopy kegiatan evaluasi dan pengkajian peraturan perundang-undangan tentang penanganan bantuan sosial dalam rangka penanggulangan bencana dan pengungsi kebutuhan Biro Hukum Setda Prov. DKI Jakarta, untuk PT. JOZAVINDO INTI KARYA ;
209. 1 (satu) bundel Dokumen Perjanjian Jasa Konsultasi seleksi umum penyelenggaraan bimbingan teknis penyusunan PKS/MOU kebutuhan Biro Hukum Setda Prov. DKI Jakarta, antara Biro Hukum Setda Prov. DKI Jakarta dengan PT. ALFRIZ AULIATAMA Nomor : 691/A/079.32 tertanggal 21 November 2007 ;
210. 1 (satu) bundel Dokumen pembayaran Jasa Konsultasi seleksi umum penyelenggaraan bimbingan teknis penyusunan PKS/MOU kebutuhan Biro Hukum Setda Prov. DKI Jakarta, antara Biro Hukum Setda Prov. DKI Jakarta dengan PT. ALFRIZ AULIATAMA Nomor : 691/A/079.32 tertanggal 21 November 2007, yang berisi antara lain :
- a. 1 (satu) lembar asli Dokumen SPM Giro No : 00177572007 Tahun 2007 sebesar Rp. 175.301.900,- (seratus tujuh puluh lima juta tiga ratus satu ribu sembilan ratus rupiah) kepada

Hal. 520 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. ALFRIZ AULIATAMA sehubungan Kontrak Nomor. 691/A/079.32, tanggal 21 November 2007 ;
- b. 1 (satu) lembar asli Kwitansi PT. ALFRIZ AULIATAMA (tanpa nomor) tertanggal 4 Desember 2007 sebesar Rp. 175.301.900,- (seratus tujuh puluh lima juta tiga ratus satu ribu sembilan ratus rupiah), yang ditandatangani diatas materai 6.000 an. ADUNG KARNANEN selaku Direktur Utama PT. ALFRIZ AULIATAMA dan an. BAHIR ROMSAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum DKI Jakarta, terdapat stempel dan tandatangan an. JORNAL E. SIAHAAN, Sh, Msi selaku Kepala Biro Hukum Prov. DKI Jakarta ;
- c. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 96/SPP/BT/BHK/2007 tertanggal 12 Desember 2007, yang ditanda tangani an. BAHIR ROMSAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum ;
- d. 1 (satu) lembar asli Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap No. 96/SPP/BT/BHK/2007 tertanggal 12 Desember 2007, yang ditanda tangani an. BAHIR ROMSAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum ;
- e. 1 (satu) lembar asli Dokumen Invoice PT. ALFRIZ AULIATAMA Nomor : 120/ALF-Invoice/ /2007 tertanggal 29 November 2007, sebesar Rp. 175.530.190,- (seratus tujuh puluh lima juta lima ratus tiga puluh ribu seratus sembilan puluh rupiah), ditujukan kepada Yth. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Jl. Medan merdeka Selatan No. 8-9, Jakarta Pusat, ditandatangani oleh an. ADUNG KARNANEN selaku Direktur Utama PT. ALFRIZ AULIATAMA dan an. IRUSWANDI ;
- f. 2 (dua) lembar asli Dokumen Berita Acara Bobot Volume Pekerjaan bimbingan Teknis Penyusunan PKS/MOU kebutuhan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor : 01/BABVP/BH/XI/07 tanggal 29 November 2007, yang ditandatangani an. ADUNG KARNANEN selaku

Hal. 521 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Direktur Utama PT. ALFRIZ AULIATAMA dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum Prov. DKI Jakarta ;
- g. 2 (dua) lembar asli Dokumen Berita Acara Penyerahan Pekerjaan, yang ditandatangani an. ADUNG KARNANEN selaku Direktur Utama PT. ALFRIZ AULIATAMA dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum Prov. DKI Jakarta ;
- h. 1 (satu) lembar asli Dokumen daftar hadir personil Pekerjaan bimbingan teknis penyusunan PKS/MOU kebutuhan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta, periode bulan November 2007, tertanggal 20 November 2007, ditandatangani an. ADUNG KARNANEN selaku Direktur Utama PT. ALFRIZ AULIATAMA ;
- i. 1 (satu) lembar asli Dokumen daftar hadir personil Pekerjaan bimbingan teknis penyusunan PKS/MOU kebutuhan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta, periode bulan November 2007, tertanggal 29 November 2007, ditandatangani an. ADUNG KARNANEN selaku Direktur Utama PT. ALFRIZ AULIATAMA ;
- j. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Barang (BAPB) Nomor : 62/BAPB/BH/XI/2007 tertanggal 29 November 2007, ditanda tangani oleh Panitia Pemeriksa Barang nomor urut 1 (satu) Ketua sampai dengan 5 (lima) anggota, an. ADUNG KARNANEN selaku Direktur Utama PT. ALFRIZ AULIATAMA dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 2 (dua) lembar asli lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang ;
- k. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 35/BASTB/BH/XI/2007 tanggal 29 November 2007, yang ditanda tangani an. IRUSWANDI, SH selaku Pengurus Barang unit Biro Hukum, an. ADUNG KARNANEN selaku Direktur Utama PT. ALFRIZ AULIATAMA dan mengetahui an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 2 (dua) lembar asli lampiran Berita Acara Serah Terima Barang ;

Hal. 522 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

211. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Kerja Nomor : 517/A/077.92 tertanggal 1 November 2007 tentang Pengadaan Penggandaan Fotocopy dalam rangka kegiatan evaluasi dan pengkajian peraturan perundang-undangan tentang kedudukan yayasan yang dikelola oleh pemerintah daerah kebutuhan Biro Hukum Setda Prov. DKI Jakarta, untuk CV. HAPPY EKA MANDIRI ;
212. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Kerja Nomor : 564/A/077.92 tertanggal 2 November 2007 tentang Pengadaan ATK dalam rangka kegiatan evaluasi dan pengkajian peraturan perundang-undangan tentang kedudukan yayasan yang dikelola oleh pemerintah daerah kebutuhan Biro Hukum Setda Prov. DKI Jakarta, untuk CV. HAPPY EKA MANDIRI, yang terdiri antara lain :
- a. 1 (satu) lembar asli Dokumen SPM Giro No : 00164622007 Tahun 2007 sebesar Rp. 62.238.505,- (enam puluh dua juta dua ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus lima rupiah) kepada CV. HAPPY EKA MANDIRI sehubungan Kontrak Nomor. 364/A/077.92 tertanggal 2 November 2007 ;
 - b. 1 (satu) lembar asli Kwitansi CV. HAPPY EKA MANDIRI nomor : 02/HEM/ATK/XII/07 tertanggal 10 Desember 2007 sebesar Rp. 69.504.930,- (enam puluh sembilan juta lima ratus empat ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah), yang ditandatangani diatas materai 6.000 an. HAPPY JAN ANGGRAENI selaku Direktur CV. HAPPY EKA MANDIRI dan an. BAHIR ROMSAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum DKI Jakarta, terdapat stempel dan tandatangan an. JORNAL E. SIAHAAN, Sh, Msi selaku Kepala Biro Hukum Prov. DKI Jakarta ;
 - c. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 84/SPP/BT/BHK/2007 tertanggal 10 Desember 2007, yang ditanda tangani an. BAHIR ROMSAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum ;
 - d. 1 (satu) lembar asli Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap No. 84/SPP/BT/BHK/2007 tertanggal 10

Hal. 523 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Desember 2007, yang ditanda tangani an. BAHIR ROMSAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum ;
- e. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Barang (BAPB) Nomor : 64/BAPB/BH/XII/2007 tertanggal 3 Desember 2007, ditanda tangani oleh Panitia Pemeriksa Barang nomor urut 1 (satu) Ketua sampai dengan 5 (lima) anggota, an. HAPPY JAN ANGGRAENI selaku Direktur CV. HAPPY EKA MANDIRI dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 2 (dua) lembar asli lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang ;
- f. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 49/BASTB/BH/XII/2007 tanggal 3 Desember 2007, yang ditanda tangani an. IRUSWANDI, SH selaku Pengurus Barang unit Biro Hukum, an. HAPPY JAN ANGGRAENI selaku Direktur CV. HAPPY EKA MANDIRI dan mengetahui an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 2 (dua) lembar asli lampiran Berita Acara Serah Terima Barang ;
213. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Kerja Nomor : 514/A/077.92 tertanggal 1 November 2007 tentang Pengadaan Penggandaan Foto Copy dalam rangka kegiatan penyusunan program kegiatan Biro Hukum kebutuhan Biro Hukum Setda Prov. DKI Jakarta, untuk CV. HAPPY EKA MANDIRI ;
214. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Kerja Nomor : 572/077.92 tertanggal 19 September 2007 tentang Penunjukan Langsung Pengadaan Pekerjaan Fotocopy kegiatan evaluasi yuridis terhadap perjanjian kerjasama penyediaan dan peningkatan air bersih kebutuhan Biro Hukum Setda Prov. DKI Jakarta, untuk PT. JOZAVINDO INTI KARYA ;
215. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Kerja Nomor : 578/A/077.92 tertanggal 19 September 2007 tentang Penunjukan Langsung Pengadaan Pekerjaan Fotocopy kegiatan evaluasi yuridis terhadap perjanjian kerjasama pembangunan dan penyelenggaraan monorail kebutuhan Biro Hukum Setda Prov. DKI Jakarta, untuk PT. JOZAVINDO INTI KARYA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

216. 1 (satu) bundel Dokumen Perjanjian Pemilihan Langsung Pengadaan Penggandaan Cetakan dalam rangka kegiatan sarana penunjang kebutuhan Biro Hukum Setda Prov. DKI Jakarta, antara Biro Hukum Setda Prov. DKI Jakarta dengan CV. OISELI SUMBER MAKMUR Nomor : 549/A/075.6 tertanggal 2 November 2007 ;
217. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Pengadaan Penggandaan Cetakan dalam rangka kegiatan sarana penunjang kebutuhan Biro Hukum Setda Prov. DKI Jakarta, antara Biro Hukum Setda Prov. DKI Jakarta dengan CV. OISELI SUMBER MAKMUR Nomor : 549/A/075.6 tertanggal 2 November 2007, yang berisi antara lain :
- a. 1 (satu) lembar asli Dokumen SPM Giro No : 00167412007 Tahun 2007 sebesar Rp. 55.348.135,- (lima puluh lima juta tiga ratus empat puluh lima ribu seratus tiga puluh lima rupiah) kepada CV. OISELI SUMBER MAKMUR sehubungan Kontrak Nomor. 549/A/075.6, tanggal 2 November 2007 ;
 - b. 1 (satu) lembar asli Kwitansi CV. IOISELI SUMBER MAKMUR Nomor : 014/KWT/OSM/2007 tertanggal 11 Desember 2007 sebesar Rp. 61.810.100,- (enam puluh satu juta delapan ratus sepuluh ribu seratus rupiah), yang ditandatangani diatas materei 6.000 an. ABDULLAH selaku Direktur dan an. BAHIR ROMSAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum DKI Jakarta, terdapat stempel dan tandatangan an. JORNAL E. SIAHAAN, Sh, Msi selaku Kepala Biro Hukum Prov. DKI Jakarta;
 - c. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 88/SPP/BT/BHK/2007 tertanggal 11 Desember 2007, yang ditanda tangani an. BAHIR ROMSAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum ;
 - d. 1 (satu) lembar asli Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap No. 88/SPP/BT/BHK/2007 tertanggal 11 Desember 2007, yang ditanda tangani an. BAHIR ROMSAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum ;

Hal. 525 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



- e. 1 (satu) lembar asli Dokumen Faktur Nomor : 013/FTR/OSM/2007 tertanggal 3 Desember 2007 yang ditandatangani an. ABDULLAH selaku Direktur CV. OSIELI SUMBER MAKMUR ;
- f. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Barang (BAPB) Nomor : 40/BAPB/BH/XII/2007 tertanggal 3 Desember 2007, ditanda tangani oleh Panitia Pemeriksa Barang nomor urut 1 (satu) Ketua sampai dengan 5 (lima) anggota, an. ABDULLAH selaku Direktur CV. OISELI SUMBER MAKMUR dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang ;
- g. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 48/BAST/BH/XII/2007 tanggal 3 Desember 2007, yang ditanda tangani an. IRUSWANDI, SH selaku Pengurus Barang unit Biro Hukum, an. ABDULLAH selaku Direktur CV. OISELI SUMBER MAKMUR dan mengetahui an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Serah Terima Barang ;
- 218. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 370/A/077.92 tentang Kegiatan Penyusunan Raperda dan Penyempurnaan Perda serta Produk Hukum lainnya, tertanggal 27 Juli 2007 antara Biro Hukum DKI Jakarta dengan PT. METRO BHAKTI DINAMIKA ;
- 219. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran atas Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 370/A/077.92 tentang Kegiatan Penyusunan Raperda dan Penyempurnaan Perda serta Produk Hukum lainnya, tertanggal 27 Juli 2007 antara Biro Hukum DKI Jakarta dengan PT. METRO BHAKTI DINAMIKA, yang berisi antara lain :
 - a. 1 (satu) lembar asli Dokumen SPM Giro No : 00172922007 Tahun 2007 sebesar Rp. 85.902.250,- (delapan puluh lima juta sembilan ratus dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) kepada PT. METRO BHAKTI DINAMIKA sehubungan Kontrak Nomor. 370/A/077.92, tanggal 27 Juli 2007 ;
 - b. 1 (satu) lembar asli Kwitansi PT. METRO BHAKTI DINAMIKA CONSULTAN (tanpa nomor) tertanggal 10 Desember 2007 sebesar Rp. 98.945.000,- (sembilan puluh delapan juta

Hal. 526 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah), yang ditandatangani diatas meterei 6.000 an. Ir. MOHAMAD RAFI selaku Direktur Utama PT. METRO BHAKTI DINAMIKA dan an. BAHIR ROMSAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum DKI Jakarta, terdapat stempel dan tandatangan an. JORNAL E. SIAHAAN, Sh, Msi selaku Kepala Biro Hukum Prov. DKI Jakarta ;

- c. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 78/SPP/BHK/BT/2007 tertanggal 10 Desember 2007, yang ditanda tangani an. BAHIR ROMSAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum ;
- d. 1 (satu) lembar asli Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap No. 78/SPP/BT/BHK/2007 tertanggal 10 Desember 2007, yang ditanda tangani an. BAHIR ROMSAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum ;
- e. 1 (satu) lembar asli Dokumen Invoice PT. METRO BHAKTI DINAMIKA Nomor : 35/MBD-Invoice/X/2007 tertanggal 25 Oktober 2007, sebesar Rp. 98.945.000,- (sembilan puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah), ditujukan kepada Yth. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Jl. Medan merdeka Selatan No. 8-9, Jakarta Pusat, ditandatangani oleh an. Ir. MOHAMAD RAFI selaku Direktur Utama PT. METRO BHAKTI DINAMIKA dan an. IRUSWANDI ;
- f. 2 (dua) lembar asli Dokumen Berita Acara Bobot Volume Pekerjaan Susunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pendirian Rumah Ibadah Nomor : 043/BA/MBD/DKI/X/2007 tanggal 24 Oktober 2007, yang ditandatangani an. Ir. MOHAMAD RAFI selaku Direktur Utama PT. METRO BHAKTI DINAMIKA dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum Prov. DKI Jakarta ;

Hal. 527 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Penyerahan Pekerjaan, yang ditandatangani an. Ir. MOHAMAD RAFI selaku Direktur Utama PT. METRO BHAKTI DINAMIKA dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum Prov. DKI Jakarta ;
- h. 1 (satu) lembar asli Dokumen daftar hadir Pekerjaan penyusunan Naskah Akademis Raperda Tentang Pendirian Rumah Ibadah, periode 27 Juli s/d 17 Agustus 2007, tertanggal 16 Agustus 2007, ditandatangani an. Ir. MOHAMAD RAFI selaku Direktur Utama PT. METRO BHAKTI DINAMIKA ;
- i. 1 (satu) lembar asli Dokumen daftar hadir Pekerjaan penyusunan Naskah Akademis Raperda Tentang Pendirian Rumah Ibadah, periode 18 Agustus s/d 8 September 2007, tertanggal 9 September 2007, ditandatangani an. Ir. MOHAMAD RAFI selaku Direktur Utama PT. METRO BHAKTI DINAMIKA ;
- j. 1 (satu) lembar asli Dokumen daftar hadir Pekerjaan penyusunan Naskah Akademis Raperda Tentang Pendirian Rumah Ibadah, periode 9 September s/d 1 Oktober 2007, tertanggal 2 Oktober 2007, ditandatangani an. Ir. MOHAMAD RAFI selaku Direktur Utama PT. METRO BHAKTI DINAMIKA ;
- k. 1 (satu) lembar asli Dokumen daftar hadir Pekerjaan penyusunan Naskah Akademis Raperda Tentang Pendirian Rumah Ibadah, periode 2 s/d 24 Oktober 2007, tertanggal 25 Oktober 2007, ditandatangani an. Ir. MOHAMAD RAFI selaku Direktur Utama PT. METRO BHAKTI DINAMIKA ;
- l. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Barang (BAPB) Nomor : 53/BAPB/BH/XII/2007 tertanggal 25 Oktober 2007, ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa Barang nomor urut 1 (satu) Ketua sampai dengan 5 (lima) anggota, an. Ir. MOHAMAD RAFI selaku Direktur Utama PT. METRO BHAKTI DINAMIKA dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang ;

Hal. 528 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



- m. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 42/BASTB/BH/X/2007 tanggal 25 Oktober 2007, yang ditanda tangani an. IRUSWANDI, SH selaku Pengurus Barang unit Biro Hukum, an. Ir. MOHAMAD RAFI selaku Direktur Utama PT. METRO BHAKTI DINAMIKA dan mengetahui an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Serah Terima Barang ;
220. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Kerja Nomor : 553/077.922 tentang Pengadaan Penggandaan fotocopy bahan-bahan dalam rangka penyusunan Raperda tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Shodaqoh kebutuhan Biro Hukum Setda Prov. DKI Jakarta untuk CV. ANUGRAH JAYA ;
221. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Kerja Nomor : 555/077.922 tentang Pengadaan Penggandaan fotocopy bahan-bahan dalam rangka penyusunan Raperda tentang pengelolaan panti sosial kebutuhan Biro Hukum Setda Prov. DKI Jakarta untuk CV. ANUGRAH JAYA ;
222. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Kerja Nomor : 594/077.922 tentang Pengadaan Penggandaan fotocopy bahan-bahan dalam rangka penyusunan Raperda Penanggulangan Penyakit Epidemik (Wabah) kebutuhan Biro Hukum Setda Prov. DKI Jakarta untuk CV. MANUNGGA TEGUH MANDIRI ;
223. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Kerja Nomor : 596/077.922 tentang Pengadaan Penggandaan fotocopy bahan penyusunan Raperda tentang pengelolaan sampah kebutuhan Biro Hukum Setda Prov. DKI Jakarta untuk CV. MANUNGGA TEGUH MANDIRI ;
224. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Kerja Nomor : 565/077.922 tentang Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) dalam rangka penyusunan Raperda tentang pengelolaan zakat, infak, shodaqoh kebutuhan Biro Hukum Setda Prov. DKI Jakarta untuk CV. MANUNGGA TEGUH MANDIRI ;
225. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Kerja Nomor : 557/077.922 tentang Pengadaan Penggandaan fotocopy bahan-bahan dalam rangka penyusunan himpunan produk hukum daerah berupa Peraturan Daerah, Surat Pengantar Gubernur dan Risalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembahasan Perda kebutuhan Biro Hukum Setda Prov. DKI Jakarta untuk CV. ANUGRAH JAYA ;

226. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 347/A/077.92 tentang Kegiatan Penyusunan Raperda dan Penyempurnaan Perda serta Produk Hukum lainnya dengan rincian kegiatan Penyusunan Naskah Akademis Raperda tentang Pembatasan Usia Kendaraan, tertanggal 27 Juli 2007 antara Biro Hukum DKI Jakarta dengan PT. BINA MITRA WAHANA ;
227. 1 (satu) bundel Dokumen pembayaran atas Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 347/A/077.92 tentang Kegiatan Penyusunan Raperda dan Penyempurnaan Perda serta Produk Hukum lainnya dengan rincian kegiatan Penyusunan Naskah Akademis Raperda tentang Pembatasan Usia Kendaraan, tertanggal 27 Juli 2007 antara Biro Hukum DKI Jakarta dengan PT. BINA MITRA WAHANA, yang berisi antara lain :
- a. 1 (satu) lembar asli Dokumen SPM Giro No : 00172912007 Tahun 2007 tertanggal 13 Desember 2007, sebesar Rp. 85.424.750,- (delapan puluh lima juta empat ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) kepada PT. BINA MITRA WAHANA sehubungan Kontrak Nomor. 347/A/077.92, tanggal 27 Juli 2007 ;
 - b. 1 (satu) lembar asli Kwitansi PT. BINA MITRA WAHANA tertanggal 10 Desember 2007 sebesar Rp. 98.395.000,- (sembilan puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), yang ditandatangani diatas meterei 6.000 an. Ir. MARIMAN selaku Direktur dan an. BAHIR ROMSAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum DKI Jakarta, terdapat stempel dan tandatangan an. JORNAL E. SIAHAAN, Sh, Msi selaku Kepala Biro Hukum Prov. DKI Jakarta ;
 - c. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 79/SPP/BHK/BT/2007 tertanggal 10 Desember 2007, yang ditanda tangani an. BAHIR ROMSAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum ;
 - d. 1 (satu) lembar asli Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap No. 79/SPP/BT/BHK/2007 tertanggal 10

Hal. 530 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desember 2007, yang ditanda tangani an. BAHIR ROMSAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum ;
- e. 1 (satu) lembar asli Dokumen Invoice PT. BINA MITRA WAHANA Nomor : 022/Invoice-BMW/X/2007 tertanggal 25 Oktober 2007, tang ditanda tangani an. Ir. MARIMAN selaku Direktur Utama PT. BINA MITRA WAHANA ;
- f. 2 (dua) lembar asli Dokumen Berita Acara Bobot Volume Pekerjaan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembatasan Usia Kendaraan Nomor : 076/BMW-BA/DKI/X/2007 tanggal 24 Oktober 2007, yang ditandatangani an. Ir. MARIMAN selaku Direktur Utama PT. BINA MITRA WAHANA dan an. JORNAL E. SIAHAAN, Sh, Msi selaku Kepala Biro Hukum Prov. DKI Jakarta ;
- g. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Penyerahan Pekerjaan, yang ditandatangani an. Ir. MARIMAN selaku Direktur Utama PT. BINA MITRA WAHANA dan an. JORNAL E. SIAHAAN, Sh, Msi selaku Kepala Biro Hukum Prov. DKI Jakarta, berikut 4 (empat) lembar Daftar Hadir pekerjaan penyusunan naskah akademis Raperda tentang Pembatasan Usia Kendaraan ;
- h. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Barang (BAPB) Nomor : 52/BAPB/BH/X/2007 tertanggal 25 Oktober 2007, ditanda tangani oleh Panitia Pemeriksa Barang nomor urut 1 (satu) Ketua sampai dengan 5 (lima) anggota, an. Ir. MARIMAN selaku Direktur Utama PT. BINA MITRA WAHANA dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang ;
- i. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 44/BAST/BH/X/2007 tanggal 25 Oktober 2007, yang ditanda tangani an. IRUSWANDI, SH selaku Pengurus Barang unit Biro Hukum, an. Ir. MARIMAN selaku Direktur Utama PT. BINA MITRA WAHANA dan mengetahui an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum ;

Hal. 531 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

228. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Kerja Nomor : 613/077.222 tentang Pengadaan ATK kegiatan Penyusunan Raperda tentang Pengelolaan Sampah kebutuhan Biro Hukum Setda Prov. DKI Jakarta untuk CV. MANUNGGA TEGUH MANDIRI ;
229. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Kerja Nomor : 615/077.222 tentang Penunjukan Langsung Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) penyusunan peraturan Daerah tentang Penanggulangan Penyakit Epidem (Wabah) kebutuhan Biro Hukum Setda Prov. DKI Jakarta untuk CV. FEBRI SINAR KASIH ;
230. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Kerja Nomor : 567/077.922 tentang Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) dalam rangka penyusunan Raperda tentang Pengelolaan Panti Sosial kebutuhan Biro Hukum Setda Prov. DKI Jakarta untuk CV. MANUNGGA TEGUH MANDIRI ;
231. 1 (satu) bendel Dokumen Surat Perintah Kerja Nomor : 580/077.922 tentang Pengadaan Penggandaan foto copy bahan-bahan Perda dan Peraturan Gubernur kebutuhan Biro Hukum Setda Prov. DKI Jakarta untuk CV. MANUNGGA TEGUH MANDIRI ;
232. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Kerja Nomor : 611/077.222 tentang Pengadaan ATK kegiatan hasil revisi Undang-undang No. 34 Tahun 1999 (sosialisasi Undang-undang No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Prov. DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indoensia) kebutuhan Biro Hukum Setda Prov. DKI Jakarta untuk PT. JOZAVINDO INTI KARYA ;
233. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran atas Surat Perintah Kerja Nomor : 611/077.222 tentang Pengadaan ATK kegiatan hasil revisi Undang-undang No. 34 Tahun 1999 (sosialisasi Undang-undang No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Prov. DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indoensia) kebutuhan Biro Hukum Setda Prov. DKI Jakarta untuk PT. JOZAVINDO INTI KARYA, yang antara lain :
- a. 1 (satu) lembar asli Dokumen SPM Giro No : 00164522007 Tahun 2007 tertanggal 11 Desember 2007, sebesar Rp.

Hal. 532 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44.522.000,- (empat puluh empat juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah) kepada PT. JOZAVINDO INTI KARYA sehubungan Kontrak Nomor. 611/077.222, tanggal 27 Juli 2007 ;

- b. 1 (satu) lembar asli Kwitansi PT. JOZAVINDO INTI KARYA tertanggal 10 Desember 2007 sebesar Rp. 49.720.000,- (empat puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), yang ditandatangani di atas meterei 6.000 an. ROBERT SIANIPAR, SE selaku Direktur PT. JOZAVINDO INTI KARYA dan an. BAHIR ROMSAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum DKI Jakarta, terdapat stempel dan tandatangan an. JORNAL E. SIAHAAN, Sh, Msi selaku Kepala Biro Hukum Prov. DKI Jakarta ;
- c. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 82/SPP/BHK/BT/2007 tertanggal 10 Desember 2007, yang ditanda tangani an. BAHIR ROMSAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum ;
- d. 1 (satu) lembar asli Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap No. 82/SPP/BT/BHK/2007 tertanggal 10 Desember 2007, yang ditanda tangani an. BAHIR ROMSAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum ;
- e. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Barang (BAPB) Nomor : 39/BAPB/BH/X/2007 tertanggal 23 Oktober 2007, ditanda tangani oleh Panitia Pemeriksa Barang nomor urut 1 (satu) Ketua sampai dengan 5 (lima) anggota, an. ROBERT SIANIPAR, SE selaku Direktur PT. JOZAVINDO INTI KARYA dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang ;
- f. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 30/BASTPB/BH/X/2007 tanggal 23 Oktober 2007, yang ditanda tangani an. IRUSWANDI, SH.M.Kn

Hal. 533 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Pengurus Barang unit Biro Hukum, an. ROBERT SIANIPAR, SE selaku Direktur PT. JOZAVINDO INTI KARYA dan mengetahui an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Serah Terima Barang ;

234. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Kerja Nomor : 493/A/077.222 tentang Penunjukan Langsung Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) penyusunan peraturan Gubernur tentang Pedoman RT/RW di Provinsi DKI Jakarta kebutuhan Biro Hukum Setda Prov. DKI Jakarta untuk PT. MARAX INDONESIA ;
235. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Kerja Nomor : 580/077.922 tentang Pengadaan Penggandaan foto copy bahan-bahan Perda dan Peraturan Gubernur kebutuhan Biro Hukum Setda Prov. DKI Jakarta untuk CV. MANUNGAL TEGUH MANDIRI ;
236. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 360/A/077.92 tentang Kegiatan Penyusunan Raperda dan Penyempurnaan Perda serta Produk Hukum lainnya dengan rincian kegiatan Penyusunan Naskah Akademis Raperda tentang Moda Transportasi Ojek, tertanggal 27 Juli 2007 antara Biro Hukum DKI Jakarta dengan PT. RAMA MITRA KONSULTAN ;
237. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran terhadap Perjanjian/Kontrak Nomor : 360/A/077.92 tentang Kegiatan Penyusunan Raperda dan Penyempurnaan Perda serta Produk Hukum lainnya dengan rincian kegiatan Penyusunan Naskah Akademis Raperda tentang Moda Transportasi Ojek, tertanggal 27 Juli 2007 antara Biro Hukum DKI Jakarta dengan PT. RAMA MITRA KONSULTAN, yang berisi antara lain :
- a. 1 (satu) lembar asli Dokumen SPM Giro No : 00172882007 Tahun 2007 tertanggal 13 Desember 2007, sebesar Rp. 85.281.500,- (delapan puluh lima juta dua ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah) kepada PT. RAMA MITRA KONSULTAN sehubungan Kontrak Nomor. 360/A/077.92, tanggal 27 Juli 2007 ;

Hal. 534 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar asli Kwitansi PT. RAMA MITRA KONSULTAN tertanggal 10 Desember 2007 sebesar Rp. 85.281.500,- (delapan puluh lima juta dua ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah), yang ditandatangani diatas materai 6.000 an. Ir. PURWANTO selaku Direktur dan an. BAHIR ROMSAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum DKI Jakarta, terdapat stempel dan tandatangan an. JORNAL E. SIAHAAN, Sh, Msi selaku Kepala Biro Hukum Prov. DKI Jakarta ;
- c. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 80/SPP/BT/BHK/2007 tertanggal 10 Desember 2007, yang ditanda tangani an. BAHIR ROMSAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum ;
- d. 1 (satu) lembar asli Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap No. 80/SPP/BT/BHK/2007 tertanggal 10 Desember 2007, yang ditanda tangani an. BAHIR ROMSAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum ;
- e. 2 (dua) lembar asli Dokumen Berita Acara Bobot Volume Pekerjaan Susunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Moda Transportasi Ojek Nomor : 019/RMK-BA/DKI/X/2007 tanggal 24 Oktober 2007, yang ditandatangani an. Ir. PURWANTO selaku Direktur PT. RAMA MITRA KONSULTAN dan an. JORNAL E. SIAHAAN, Sh, Msi selaku Kepala Biro Hukum Prov. DKI Jakarta ;
- f. 1 (satu) lembar asli dokumen Berita Acara Penyerahan Pekerjaan, yang ditandatangani an. Ir. PURWANTO selaku Direktur PT. RAMA MITRA KONSULTAN dan an. JORNAL E. SIAHAAN, Sh, Msi selaku Kepala Biro Hukum Prov. DKI Jakarta;
- g. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Barang (BAPB) Nomor : 51/BAPB/BH/X/2007 tertanggal 25 Oktober 2007, ditanda tangani oleh Panitia Pemeriksa Barang nomor urut 1 (satu) Ketua sampai dengan 5 (lima)

Hal. 535 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota, an. Ir. PURWANTO selaku Direktur PT. RAMA MITRA KONSULTAN dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang ;

h. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 41/BAST/BH/X/2007 tanggal 25 Oktober 2007, yang ditanda tangani an. IRUSWANDI, SH selaku Pengurus Barang unit Biro Hukum, an. Ir. PURWANTO selaku Direktur PT. RAMA MITRA KONSULTAN dan mengetahui an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum ;

238. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 365/A/077.92 tentang Kegiatan Penyusunan Raperda dan Penyempurnaan Perda serta Produk Hukum lainnya dengan rincian kegiatan Penyusunan Naskah Akademis Raperda tentang Kedudukan Walikotamadya dalam format otonomi tunggal di Prov. DKI Jakarta, tertanggal 27 Juli 2007 antara Biro Hukum DKI Jakarta dengan PT. PANCA KARYA GUMILANG ;

239. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran atas Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 365/A/077.92 tentang Kegiatan Penyusunan Raperda dan Penyempurnaan Perda serta Produk Hukum lainnya dengan rincian kegiatan Penyusunan Naskah Akademis Raperda tentang Kedudukan Walikotamadya dalam format otonomi tunggal di Prov. DKI Jakarta, tertanggal 27 Juli 2007 antara Biro Hukum DKI Jakarta dengan PT. PANCA KARYA GUMILANG, yang berisi antara lain :

a. 1 (satu) lembar asli Dokumen SPM Giro No : 00172932007 Tahun 2007 tertanggal 13 Desember 2007, sebesar Rp. 85.902.250,- (delapan puluh lima juta sembilan ratus dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) kepada PT. PANCA KARYA GUMILANG sehubungan Kontrak Nomor. 365/A/077.92, tanggal 27 Juli 2007 ;

b. 1 (satu) lembar asli Kwitansi PT. PANCA KARYA GUMILANG tertanggal 10 Desember 2007 sebesar Rp. 98.945.000,- (sembilan puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah), yang ditandatangani di atas meterai 6.000 an. Ir. SUTOMO selaku Direktur Utama dan an. BAHIR

Hal. 536 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ROMSAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum DKI Jakarta, terdapat stempel dan tandatangan an. JORNAL E. SIAHAAN, Sh, Msi selaku Kepala Biro Hukum Prov. DKI Jakarta ;
- c. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 83/SPP/BT/BHK/2007 tertanggal 10 Desember 2007, yang ditanda tangani an. BAHIR ROMSAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum ;
- d. 1 (satu) lembar asli Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap No. 83/SPP/BT/BHK/2007 tertanggal 10 Desember 2007, yang ditanda tangani an. BAHIR ROMSAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum ;
- e. 1 (satu) lembar asli Dokumen Invoice dari PT. PANCA KARYA GUMILANG tertanggal 25 Oktober 2007, sebesar Rp. 98.945.000,- (sembilan puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah), ditujukan kepada Yth. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Jl. Medan Merdeka Selatan No. 8-9 Jakarta Pusat, ditandatangani an. Ir. SUTOMO selaku Direktur Utama PT. PANCA KARYA GUMILANG ;
- f. 2 (dua) lembar asli Dokumen Berita Acara Bobot Volume Pekerjaan Susunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Kedudukan Walikotamadya dalam Format Otonomi Tunggal Di Provinsi DKI Jakarta Nomor : 55/PKG/BA/DKI/X/2007 tanggal 24 Oktober 2007, yang ditandatangani an. Ir. SUTOMO selaku Direktur Utama PT. PANCA KARYA GUMILANG dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum Prov. DKI Jakarta ;
- g. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Penyerahan Pekerjaan, yang ditandatangani an. Ir. SUTOMO selaku Direktur Utama PT. PANCA KARYA GUMILANG dan an. JORNAL E. SIAHAAN, Sh, Msi selaku Kepala Biro Hukum Prov. DKI Jakarta. ;

Hal. 537 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Barang (BAPB) Nomor : 50/BAPB/BH/X/2007 tertanggal 25 Oktober 2007, ditanda tangani oleh Panitia Pemeriksa Barang nomor urut 1 (satu) Ketua sampai dengan 5 (lima) anggota, an. Ir. SUTOMO selaku Direktur Utama PT. PANCA KARYA GUMILANG dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang ;
- i. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 43/BASTB/BH/X/2007 tanggal 25 Oktober 2007, yang ditanda tangani an. IRUSWANDI, SH.M.Kn selaku Pengurus Barang unit Biro Hukum, an. Ir. SUTOMO selaku Direktur Utama PT. PANCA KARYA GUMILANG dan mengetahui an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Serah Terima Barang ;
- j. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Hadir Pekerjaan Penyusunan Naskah Akademis Raperda Tentang Kedudukan Walikotamadya dalam Format Otonomi Tunggal Di Provinsi DKI Jakarta, periode 27 Juli s/d 17 Agustus 2007, tertanggal 16 Agustus 2007, ditandatangani an. Ir. SUTOMO selaku Direktur Utama PT. PANCA KARYA GUMILANG ;
- k. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Hadir Pekerjaan Penyusunan Naskah Akademis Raperda Tentang Kedudukan Walikotamadya dalam Format Otonomi Tunggal Di Provinsi DKI Jakarta, periode 18 Agustus s/d 8 September 2007, tertanggal 9 September 2007, ditandatangani an. Ir. SUTOMO selaku Direktur Utama PT. PANCA KARYA GUMILANG ;
- l. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Hadir Pekerjaan Penyusunan Naskah Akademis Raperda Tentang Kedudukan Walikotamadya dalam Format Otonomi Tunggal Di Provinsi DKI Jakarta, periode 9 September s/d 1 Oktober 2007, tertanggal 2 Oktober 2007, ditandatangani an. Ir. SUTOMO selaku Direktur Utama PT. PANCA KARYA GUMILANG ;
- m. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Hadir Pekerjaan penyusunan Naskah Akademis Raperda Tentang Kedudukan

Hal. 538 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walikotamadya dalam Format Otonomi Tunggal Di Provinsi DKI Jakarta, periode 2 s/d 24 Oktober 2007, tertanggal 25 Oktober 2007, ditandatangani an. Ir. SUTOMO selaku Direktur Utama PT. PANCA KARYA GUMILANG ;

240. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 370/A/077.92 tentang Kegiatan Penyusunan Raperda dan Penyempurnaan Perda serta Produk Hukum lainnya dengan rincian kegiatan Penyusunan Naskah Akademis Raperda tentang Pendirian Rumah Ibadah, tertanggal 27 Juli 2007 antara Biro Hukum DKI Jakarta dengan PT. METRO BHAKTI DINAMIKA ;

241. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 354/A/077.92 tentang Kegiatan Penyusunan Raperda dan Penyempurnaan Perda serta Produk Hukum lainnya dengan rincian kegiatan Penyusunan Naskah Akademis Raperda tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, tertanggal 27 Juli 2007 antara Biro Hukum DKI Jakarta dengan PT. MITRAPLAN KONSULTAN ;

242. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran atas Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 354/A/077.92 tentang Kegiatan Penyusunan Raperda dan Penyempurnaan Perda serta Produk Hukum lainnya dengan rincian kegiatan Penyusunan Naskah Akademis Raperda tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, tertanggal 27 Juli 2007 antara Biro Hukum DKI Jakarta dengan PT. MITRAPLAN KONSULTAN, yang berisi antara lain :

a. 1 (satu) lembar asli Dokumen SPM Giro No : 00172902007 Tahun 2007 tertanggal 13 Desember 2007, sebesar Rp. 85.902.250,- (delapan puluh lima juta sembilan ratus dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) kepada PT. MITRAPLAN KONSULTAN sehubungan Kontrak Nomor. 354/A/077.92, tanggal 27 Juli 2007 ;

b. 1 (satu) lembar asli Kwitansi PT. MITRAPLAN KONS tertanggal 10 Desember 2007 sebesar Rp. 98.945.000,- (sembilan puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah), yang ditandatangani diatas meterai 6.000 an. TARNI ANDIYANTO, Amd selaku Direktur Utama PT. MITRAPLAN KONS dan an. BAHIR ROMSAH selaku

Hal. 539 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum DKI Jakarta, terdapat stempel dan tandatangan an. JORNAL E. SIAHAAN, Sh, Msi selaku Kepala Biro Hukum Prov. DKI Jakarta ;
- c. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 81/SPP/BHK/BT/2007 tertanggal 10 Desember 2007, yang ditanda tangani an. BAHIR ROMSAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum ;
- d. 1 (satu) lembar asli Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap No. 81/SPP/BT/BHK/2007 tertanggal 10 Desember 2007, yang ditanda tangani an. BAHIR ROMSAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum Setdaprov DKI Jakarta dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum ;
- e. 1 (satu) lembar asli Dokumen Invoice dari PT. MITRAPLAN KONSULTAN tertanggal 25 Oktober 2007, sebesar Rp. 98.945.000,- (sembilan puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah), ditujukan kepada Yth. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Jl. Medan Merdeka Selatan No. 8-9 Jakarta Pusat, ditandatangani an. TARNI ANDIYANTO, Amd selaku Direktur Utama PT. MITRAPLAN KONSULTAN ;
- f. 2 (dua) lembar asli Dokumen Berita Acara Bobot Volume Pekerjaan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Lembaga Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Nomor : 025/MPK-BA/DKI/X/2007 tanggal 24 Oktober 2007, yang ditandatangani an. TARNI ANDIYANTO, Amd selaku Direktur Utama PT. MITRAPLAN KONSULTAN dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum Prov. DKI Jakarta ;
- g. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Penyerahan Pekerjaan, yang ditandatangani an. TARNI ANDIYANTO, Amd selaku Direktur Utama PT. MITRAPLAN KONSULTAN dan an. JORNAL E. SIAHAAN, Sh, Msi selaku Kepala Biro Hukum Prov. DKI Jakarta ;

Hal. 540 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) lembar asli Dokumen daftar hadir Pekerjaan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Lembaga Pemberdayaan masyarakat Kelurahan, periode 27 Juli s/d 17 Agustus 2007, tertanggal 16 Agustus 2007, ditandatangani an. TARNI ANDIYANTO, Amd selaku Direktur Utama PT. MITRAPLAN KONSULTAN ;
- i. 1 (satu) lembar asli Dokumen daftar hadir Pekerjaan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Lembaga Pemberdayaan masyarakat Kelurahan, periode 18 Agustus s/d 8 September 2007, tertanggal 9 September 2007, ditandatangani an. TARNI ANDIYANTO, Amd selaku Direktur Utama PT. MITRAPLAN KONSULTAN ;
- j. 1 (satu) lembar asli Dokumen daftar hadir Pekerjaan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Lembaga Pemberdayaan masyarakat Kelurahan, periode 9 September s/d 1 Oktober 2007, tertanggal 2 Oktober 2007, ditandatangani an. TARNI ANDIYANTO, Amd selaku Direktur Utama PT. MITRAPLAN KONSULTAN ;
- k. 1 (satu) lembar asli Dokumen daftar hadir Pekerjaan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Lembaga Pemberdayaan masyarakat Kelurahan, periode 2 s/d 24 Oktober 2007, tertanggal 25 Oktober 2007, ditandatangani an. TARNI ANDIYANTO, Amd selaku Direktur Utama PT. MITRAPLAN KONSULTAN ;
- l. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Barang (BAPB) Nomor : 49/BAPB/BH/X/2007 tertanggal 25 Oktober 2007, ditanda tangani oleh Panitia Pemeriksa Barang nomor urut 1 (satu) Ketua sampai dengan 5 (lima) anggota, an. an. TARNI ANDIYANTO, Amd selaku Direktur Utama PT. MITRAPLAN KONSULTAN dan an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang ;
- m. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 45/BASTB/BH/X/2007 tanggal 25 Oktober

Hal. 541 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007, yang ditandatangani an. IRUSWANDI, SH.M.Kn selaku Pengurus Barang unit Biro Hukum, an.TARNI ANDIYANTO, Amd selaku Direktur Utama PT. MITRAPLAN KONSULTAN dan mengetahui an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Serah Terima Barang ;

243. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Kerja Nomor : 511/A/077.922 tentang Pengadaan Penggandaan foto copy dalam rangka kegiatan penyusunan Renstra SKPD 2007-2012 kebutuhan Biro Hukum Setda Prov. DKI Jakarta untuk CV. TEGUH PACKINDO MAKMUR ;

244. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Kerja Nomor : 490/A/077.922 tentang Penunjukan Langsung Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) penyusunan peraturan Gubernur tentang Pengaturan Tenaga Lepas di Kecamatan/Kelurahan di Prov. DKI Jakarta kebutuhan Biro Hukum Setda Prov. DKI Jakarta untuk PT. MARAX INDONESIA ;

245. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Kerja Nomor : 503/077.222 tentang Pengadaan Penggandaan fotocopy pembahasan revisi Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara kebutuhan Biro Hukum Setda Prov. DKI Jakarta untuk CV. DUA PUTERI ANUGERAH ;

246. 4 (empat) lembar asli Dokumen Kegiatan Pelaksanaan Penunjukan Langsung, Pemilihan Langsung dan Lelang Kebutuhan Biro Hukum Setdaprov. DKI Jakarta, tertanggal 23 Agustus 2006 yang ditanda tangani an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Biro Hukum Setdaprov. DKI Jakarta, berikut terdapat 1 (satu) lembar kertas disposisi tertulis (tulisan tangan dengan pulpen warna hitam) "P. MADE – BICARAKAN DENGAN SAYA" dan tertera nama JORNAL EFFENDI SIAHAAN, SH, Msi pada sudut kanan bawah ;

247. 1 (satu) buah Dokumen Buku Kas Pengeluaran MK.10 – Pemegang Kas : – Unit Organisasi : Biro Hukum – Tahun Anggaran : 2007, pada pojok kanan atas terdapat angka romawi I ;

Hal. 542 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

248. 1 (satu) buah Dokumen Buku Kas Pengeluaran MK.9 – Pemegang Kas : – Unit Organisasi : Biro Hukum – Tahun Anggaran : 2007, pada pojok kanan atas terdapat angka romawi II ;
249. 1 (satu) buah Dokumen Buku Kas Pengeluaran MK.9 – Pemegang Kas : – Unit Organisasi : Biro Hukum – Tahun Anggaran : 2007, pada pojok kanan atas terdapat angka romawi III ;
250. 1 (satu) buah Dokumen Buku Kas Pengeluaran MK.10, pada pojok kanan atas terdapat tulisan Buku IV ;
251. 2 (dua) lembar Laporan Keuangan Efisiensi bulan Februari s.d Mei 2007, terdapat tanda tangan an. BAHIR ROMSAH pada setiap lembarnya ;
252. 3 (tiga) lembar Laporan Keuangan Efisiensi bulan Juni s.d Desember 2007, terdapat tanda tangan an. BAHIR ROMSAH pada setiap lembarnya ;
253. 4 (empat) lembar Dokumen Realisasi Anggaran sampai dengan Triwulan IV (Januari s.d 28 Desember 2007) tertanggal 28 Desember 2007, yang terdapat tanda tangan BAHIR ROMSAH pada setiap halaman pada pojok kanan bawah ;
254. 1 (satu) bundel Dokumen kwitansi penggunaan uang pengumpulan pemotongan, sebagai berikut :
- a. 1 (satu) lembar asli Kwitansi – Sudah terima dari Kepala Biro Hukum sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 5 Januari 2007, yang ditanda tangani an. SUDONO ;
 - b. 1 (satu) lembar asli Kwitansi – Sudah terima dari Kepala Biro Hukum sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 5 Januari 2007, yang ditanda tangani an. SARIYAH ;
 - c. 1 (satu) lembar asli Kwitansi LILIN MAS – ART PRINTING – Sudah Terima dari Biro Hukum Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) tertanggal 29 Januari 2007, terdapat tanda tangan penerima (tanpa nama) dan stempel LILIN MAS – Jakarta ;
 - d. 1 (satu) lembar asli Kwitansi – Sudah terima dari Biro Hukum Prop DKI Jakarta sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh

Hal. 543 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) tertanggal 17 Januari 2007, yang ditanda tangani an. E. KOSASIH ;

- e. 1 (satu) lembar asli Kwitansi – Sudah terima dari Biro Hukum sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), tertanggal 30 Januari 2007, yang ditanda tangani an. Ny. SUPRIADI ;
- f. 1 (satu) lembar asli Kwitansi – Sudah terima dari Biro Hukum sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), tertanggal 30 Januari 2007, yang ditanda tangani an. Ny. SUPRIADI ;
- g. 1 (satu) lembar asli Kwitansi – Sudah terima dari Kepala Biro Hukum sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 6 Februari 2007, yang ditanda tangani an. SUDONO ;
- h. 1 (satu) lembar asli Kwitansi – Sudah terima dari Kepala Biro Hukum sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 6 Februari 2007, yang ditanda tangani an. SARIYAH ;
- i. 1 (satu) lembar asli Kwitansi – Sudah terima dari Kepala Biro Hukum sebesar Rp. 112.500,- (seratus dua belas ribu lima ratus rupiah) tertanggal 29 Januari 2007, yang ditanda tangani (tanpa nama) dan stempel A. MATSA'AN AGENCY ;
- j. 1 (satu) lembar Dokumen Nomor : 03/Tenis-BP/II/2007 tertanggal 6 Februari 2007 perihal penyelenggaraan permainan tenis, ditujukan kepada Ka Biro Hukum Provinsi DKI Jakarta, yang ditanda tangani an. H. RITOLA TASMAYA selaku Sekretaris Daerah Propinsi DKI Jakarta berikut 3 (tiga) lembar lampiran Jadwal Sponsor Tenis Tahun 2007, dan 1 (satu) lembar Daftar Perlengkapan Penyelenggaraan Tenis Pejabat Pemda Provinsi DKI Jakarta, 1 (satu) lembar disposisi tertanggal 6 Januari 2007 dan 1 (satu) lembar disposisi tertanggal 15 February 2007 ;
- k. 1 (satu) lembar asli Kwitansi – Sudah terima dari Kepala Biro Hukum sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) tertanggal 26 February 2007, yang ditanda tangani (tanpa nama) dan stempel A. MATSA'AN AGENCY ;
- l. 1 (satu) lembar asli Nota ROYAL STAR tertanggal 19 February 2007 sebesar Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Hal. 544 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- m. 1 (satu) lembar asli Kwitansi – Sudah terima dari Biro Hukum Prop DKI Jakarta sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 7 Maret 2007, yang ditanda tangani an. E. KOSASIH ;
- n. 1 (satu) lembar asli Kwitansi – Sudah terima dari Kepala Biro Hukum sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 2 Maret 2007, yang ditanda tangani an. SARIYAH ;
- o. 1 (satu) lembar asli Kwitansi – Sudah terima dari Kepala Biro Hukum sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 2 Maret 2007, yang ditanda tangani an. SUDONO ;
- p. 1 (satu) lembar asli Dokumen Laporan – ditujukan kepada Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta – Dari Kepala Sub Bagian Tata Usaha, yang ditanda tangani oleh TRI JOKO RAHARJO, SH selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta ;
- q. 1 (satu) lembar asli Kwitansi – Sudah terima dari Kepala Biro Hukum sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 3 April 2007, yang ditanda tangani an. SUDONO ;
- r. 1 (satu) lembar asli Kwitansi – Sudah terima dari Kepala Biro Hukum sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 3 Maret 2007, yang ditanda tangani an. SARIYAH ;
- s. 1 (satu) lembar asli Kwitansi – Sudah terima dari Kepala Biro Hukum sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) tertanggal 26 Maret 2007, yang ditanda tangani (tanpa nama) dan stempel A. MATSA'AN AGENCY ;
- t. 1 (satu) lembar asli Kwitansi LILIN MAS – ART PRINTING – Sudah Terima dari Biro Hukum Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 23 April 2007, terdapat tanda tangan penerima an. NUR dan stempel LILIN MAS – Jakarta ;
- u. 1 (satu) lembar asli Kwitansi – Sudah terima dari Biro Hukum Prop DKI Jakarta sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 18 April 2007, yang ditanda tangani an. E. KOSASIH. ;
- v. 1 (satu) lembar asli Kwitansi – Sudah terima dari Kepala Biro Hukum sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 1 Mei 2007, yang ditanda tangani an. SARIYAH ;

Hal. 545 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- w. 1 (satu) lembar asli Kwitansi – Sudah terima dari Kepala Biro Hukum sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 1 Mei 2007, yang ditanda tangani an. SUDONO ;
- x. 1 (satu) lembar asli Kwitansi – Sudah terima dari Kepala Biro Hukum sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tertanggal 30 April 2007, yang ditanda tangani (tanpa nama) dan stempel A. MATSA'AN AGENCY ;
- y. 1 (satu) lembar asli Kwitansi – Sudah terima dari Kepala Biro Hukum sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 4 Juni 2007, yang ditanda tangani an. SARIYAH ;
- x. 1 (satu) lembar asli Kwitansi – Sudah terima dari Biro Hukum Prop DKI Jakarta sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 20 Mei 2007, yang ditanda tangani an. E. KOSASIH ;
- z. 1 (satu) lembar asli Kwitansi – Sudah terima dari Kepala Biro Hukum sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) tertanggal 28 Mei 2007, yang ditanda tangani (tanpa nama) dan stempel A. MATSA'AN AGENCY ;
- aa. 1 (satu) lembar asli Kwitansi – Sudah terima dari Kepala Biro Hukum sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) tertanggal 25 Juni 2007, yang ditanda tangani (tanpa nama) dan stempel A. MATSA'AN AGENCY ;
- ab.1 (satu) lembar asli Kwitansi – Sudah terima dari Biro Hukum Prop DKI Jakarta sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 18 Juni 2007, yang ditanda tangani an. E. KOSASIH ;
- ac. 1 (satu) lembar asli Kwitansi – Sudah terima dari H. BAHIR ROMSAH (PKC Biro Hukum) sebesar Rp. 5.890.000,- (lima juta delapan ratus sembilan puluh juta rupiah) tertanggal 5 Juni 2007, yang ditanda tangani an. Hj. SRI RAHAYU ;
- ad.1 (satu) lembar asli dokumen tertanggal 12 Juni 2007 ditujukan kepada Bapak Kepala Biro Hukum Setda Prov. DKI Jakarta, perihal Permohonan Bantuan Dana, yang ditanda tangani oleh Ibu JORNAL E. SIAHAAN, berikut 1 (satu) lembar lampirannya ;

Hal. 546 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ae. 1 (satu) lembar asli Kwitansi – Sudah terima dari Biro Hukum sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), tertanggal 10 Juli 2007, yang ditanda tangani an. Ny. SUPRIADI ;
- af. 1 (satu) lembar asli Kwitansi – Sudah terima dari Kepala Biro Hukum sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 2 Juli 2007, yang ditanda tangani an. SUDONO ;
- ag. 1 (satu) lembar asli Kwitansi – Sudah terima dari Kepala Biro Hukum sebesar Rp. 205.000,- (dua ratus lima ribu rupiah) tertanggal 30 Juli 2007, yang ditanda tangani (tanpa nama) dan stempel A. MATSA'AN AGENCY ;
- ah. 1 (satu) lembar asli Kwitansi – Sudah terima dari Biro Hukum Prop DKI Jakarta sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 12 Juli 2007, yang ditanda tangani an. E. KOSASIH ;
- ai. 1 (satu) lembar asli Kwitansi – Sudah terima dari Kepala Biro Hukum sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 2 Juli 2007, yang ditanda tangani an. SARIYAH ;
- aj. 1 (satu) lembar asli Kwitansi – Sarasehan Tingkatkan Jiwa Nasionalisme Menghadapi Ancaman Narkoba tertanggal 1 Agustus 2007, sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang ditanda tangani an. TIANA DEWI ;
- ak. 1 (satu) lembar asli Kwitansi – Sudah terima dari Biro Hukum Prop DKI Jakarta sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 1 Agustus 2007, yang ditanda tangani an. E. KOSASIH ;
- al. 1 (satu) lembar asli Kwitansi – Sudah terima dari Kepala Biro Hukum sebesar Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) tertanggal 27 Agustus 2007, yang ditanda tangani (tanpa nama) dan stempel A. MATSA'AN AGENCY ;
- am. 1 (satu) lembar asli Kwitansi – Sudah terima dari Kepala Biro Hukum sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 3 Agustus 2007, yang ditanda tangani (tanpa nama) ;
- an. 1 (satu) lembar asli Kwitansi – Sudah terima dari Kepala Biro Hukum sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 3 Agustus 2007, yang ditanda tangani an. SUDONO ;

Hal. 547 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ao.1 (satu) lembar asli Kwitansi – Sudah terima dari Biro Hukum sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tertanggal 21 September 2007, yang ditanda tangani an. IBU ARSYAD ;
- ap.1 (satu) lembar asli Kwitansi – Sudah terima dari Kepala Biro Hukum sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 3 September 2007, yang ditanda tangani an. SARIYAH ;
- aq.1 (satu) lembar asli Kwitansi – Sudah terima dari Kepala Biro Hukum sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 3 September 2007, yang ditanda tangani an. SUDONO ;
- ar. 1 (satu) lembar asli Dokumen Perkiraan Biaya Pengeluaran Acara Silaturahmi Menjelang Bulan Suci Ramadhan 1427 H Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta, Rabu 12 September 2007, yang ditandatangani oleh TRI JOKO RAHARDJO, SH selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha ;
- as.1 (satu) lembar asli Kwitansi – Sudah terima dari Kepala Biro Hukum sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 1 Oktober 2007, yang ditanda tangani an. SARIYAH ;
- at. 1 (satu) lembar asli Kwitansi – Sudah terima dari Bendahara sebesar Rp. 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tertanggal (tanpa tanggal), yang ditanda tangani an. ZAENAL WAHAB ;
- au.1 (satu) lembar asli Kwitansi – Sudah terima dari Bendahara sebesar Rp. 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tertanggal (tanpa tanggal), yang ditanda tangani an. SIGIT PRIYONO ;
- av.1 (satu) lembar asli Kwitansi – Sudah terima dari Kepala Biro Hukum sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam ribu rupiah) tertanggal 24 September 2007, yang ditanda tangani (tanpa nama) dan stempel A. MATSA'AN AGENCY ;
- aw. 1 (satu) lembar asli Kwitansi – Sudah terima dari Biro Hukum Prop DKI Jakarta sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 10 September 2007, yang ditanda tangani an. E. KOSASIH

Hal. 548 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ax. 1 (satu) lembar asli Kwitansi – Sudah terima dari Kepala Biro Hukum sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 2 Oktober 2007, yang ditanda tangani an. SUDONO ;
- ay. 1 (satu) lembar asli Kwitansi – Sudah terima dari Kepala Biro Hukum sebesar Rp. 182.500,- (seratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) tertanggal 29 Oktober 2007, yang ditanda tangani (tanpa nama) dan stempel A. MATSA'AN AGENCY ;
- az. 1 (satu) lembar asli Kwitansi – Sudah terima dari Biro Hukum Prop DKI Jakarta sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 2 Oktober 2007, yang ditanda tangani an. E. KOSASIH ;
- ba. 1 (satu) lembar asli Kwitansi – Sudah terima dari Biro Hukum Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 1 Oktober 2007, yang ditanda tangani an. UNTUNG PRASETYO, S.Sos ;
- bb. 1 (satu) lembar asli Dokumen Laporan – ditujukan kepada Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta – Dari Kepala Sub Bagian Tata Usaha, yang ditanda tangani oleh TRI JOKO RAHARJO, SH selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta ;
- bc. 1 (satu) lembar asli Kwitansi – Sudah terima dari Biro Hukum Prop DKI Jakarta sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 1 Nopember 2007, yang ditanda tangani an. E. KOSASIH ;
- bd. 1 (satu) lembar asli Kwitansi – Sudah terima dari Kepala Biro Hukum sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 8 November 2007, yang ditanda tangani an. SUDONO ;
- be. 1 (satu) lembar asli Kwitansi – Sudah terima dari ... sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 2 November 2007, yang ditanda tangani (tanpa nama) ;
- bf. 2 (dua) lembar asli Dokumen Daftar Hadir Wartawan Media Elektronik tertanggal 15 November 2007 ;
- bg. 1 (satu) lembar asli Kwitansi – Sudah terima dari Kepala Biro Hukum sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Hal. 549 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 3 Desember 2007, yang ditanda tangani an. SUDONO ;

bh. 1 (satu) lembar asli Kwitansi – Sudah terima dari Kepala Biro Hukum sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 3 Desember 2007, yang ditanda tangani an. SARIYAH ;

bi. 1 (satu) lembar asli Kwitansi – Sudah terima dari Kepala Biro Hukum sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) tertanggal 26 November 2007, yang ditanda tangani (tanpa nama) dan stempel A. MATSA'AN AGENCY ;

bj. 1 (satu) lembar asli Kwitansi – Sudah terima dari Biro Hukum Prop DKI Jakarta sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 1 Desember 2007, yang ditanda tangani an. E. KOSASIH ;

bk. 1 (satu) lembar asli Kwitansi – Sudah terima dari Biro Hukum sebesar Rp. 1.110.000,- (satu juta seratus sepuluh ribu rupiah) tertanggal 18 Desember 2007, yang ditanda tangani (tanpa nama) dan stempel Ayam Tulang Lunak Hayam Wuruk ;

bl. 1 (satu) lembar asli Kwitansi – Sudah terima dari Kepala Biro Hukum sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tertanggal 28 Desember 2007, yang ditanda tangani (tanpa nama) dan stempel A. MATSA'AN AGENCY ;

256. 1 (satu) bundel Dokumen kwitansi penerimaan oleh ELLEN SIAGIAN dan JORNAL E. SIAHAAN, sebagai berikut :

a. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima tertanggal 3 Januari 2007, sudah terima dari BAHIR ROMSAH (Pemegang Kas Cabang Hukum) sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), untuk keperluan kegiatan Kepala Biro Hukum bulan Januari 2007, yang ditandatangani an. ELLEN SIAGIAN ;

b. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima tertanggal 7 Februari 2007, sudah terima dari BAHIR ROMSAH (Pemegang Kas Cabang Hukum) sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), untuk keperluan kegiatan Kepala Biro Hukum bulan Februari 2007, yang ditandatangani an. ELLEN SIAGIAN ;

c. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima tertanggal 5 Maret 2007, sudah terima dari BAHIR ROMSAH (Pemegang Kas

Hal. 550 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cabang Hukum) sebesar Rp 5.000.000,00, untuk keperluan kegiatan Kepala Biro Hukum, yang ditandatangani an. ELLEN SIAGIAN ;
- d. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima tertanggal 5 Maret 2007, sudah terima dari BAHIR ROMSAH (Pemegang Kas Cabang Biro Hukum) sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), untuk keperluan kegiatan Kepala Biro Hukum bulan Maret 2007, yang ditandatangani an. ELLEN SIAGIAN ;
- e. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima tertanggal 2 April 2007, sudah terima dari BAHIR ROMSAH (Pemegang Kas Cabang Biro Hukum) sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), untuk keperluan kegiatan Kepala Biro Hukum bulan April 2007, yang ditandatangani an. ELLEN SIAGIAN ;
- f. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima tertanggal 3 Mei 2007, sudah terima dari BAHIR ROMSAH (Pemegang Kas Cabang Biro Hukum) sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), untuk keperluan kegiatan Kepala Biro Hukum bulan Mei 2007, yang ditandatangani an. ELLEN SIAGIAN ;
- g. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima tertanggal 10 Mei 2007, sudah terima dari BAHIR ROMSAH (Pemegang Kas Cabang Biro Hukum) sebesar Rp 30.000.000,00, untuk keperluan Pinjaman Kepala Biro Hukum, yang ditandatangani an. JORNAL E. SIAHAAN ;
- h. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima tertanggal 4 Juni 2007, sudah terima dari BAHIR ROMSAH (Pemegang Kas Cabang Biro Hukum) sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), untuk keperluan kegiatan Kepala Biro Hukum bulan Juni 2007, yang ditandatangani an. ELLEN SIAGIAN ;
- i. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima tertanggal 5 Juli 2007, sudah terima dari Kepala Biro Hukum sebesar Rp 15.000.000,00, untuk keperluan Bantuan Umroh, yang ditandatangani an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi ;
- j. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima tertanggal 6 Juli 2007, sudah terima dari BAHIR ROMSAH (Pemegang Kas Cabang Biro Hukum) sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), untuk keperluan kegiatan Kepala Biro Hukum bulan Juli 2007, yang ditandatangani an. ELLEN SIAGIAN ;

Hal. 551 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima tertanggal 13 Juli 2007, sudah terima dari Kepala Biro Hukum sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), untuk keperluan Bon Pengeluaran, yang ditandatangani an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi ;
- l. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima tertanggal 6 Agustus 2007, sudah terima dari BAHIR ROMSAH (Pemegang Kas Cabang Biro Hukum) sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), untuk keperluan kegiatan Kepala Biro Hukum bulan Agustus 2007, yang ditandatangani an. ELLEN SIAGIAN ;
- m. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima tertanggal 20 Agustus 2007, sudah terima dari Bapak H. BAHIR ROMSAH (Pemegang Kas Cabang Biro Hukum) sebesar Rp 5.520.000,00, untuk Pembayaran Tiket Pesawat ke Bali PP tanggal 21 Agustus 2007, yang ditandatangani an. ELLEN SIAGIAN ;
- n. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima tertanggal 4 September 2007, sudah terima dari BAHIR ROMSAH (Pemegang Kas Cabang Biro Hukum) sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), untuk keperluan kegiatan Kepala Biro Hukum bulan September 2007, yang ditandatangani an. ELLEN SIAGIAN ;
- o. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima tertanggal 4 Oktober 2007, sudah terima dari BAHIR ROMSAH (Pemegang Kas Cabang Biro Hukum) sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), untuk keperluan kegiatan Kepala Biro Hukum bulan Oktober 2007, yang ditandatangani an. ELLEN SIAGIAN ;
- p. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima tertanggal 29 Oktober 2007, sudah terima dari BAHIR ROMSAH (Pemegang Kas Cabang Hukum) sebesar Rp 6.700.000,00, untuk keperluan kegiatan Kepala Biro Hukum, yang ditandatangani an. ELLEN SIAGIAN ;
- q. 1 (satu) lembar Tanda Terima (tulisan tangan) tertanggal 1 November 2007, telah terima dari H. BAHIR sebesar Rp 50.000.000,00, untuk keperluan Kepala Biro, yang ditandatangani an. ELLEN SIAGIAN ;

Hal. 552 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- r. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima tertanggal 2 November 2007, sudah terima dari BAHIR ROMSAH (Pemegang Kas Cabang Biro Hukum) sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), untuk keperluan kegiatan Kepala Biro Hukum bulan November 2007, yang ditandatangani an. ELLEN SIAGIAN ;
- s. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima tertanggal 6 Desember 2007, sudah terima dari BAHIR ROMSAH (Pemegang Kas Cabang Biro Hukum) sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), untuk keperluan kegiatan Kepala Biro Hukum bulan Desember 2007, yang ditandatangani an. ELLEN SIAGIAN ;
- t. 1 (satu) lembar Bon Pengeluaran tertanggal 7 Desember 2007, sudah terima dari BAHIR ROMSAH sebesar Rp 500.000.000,00, untuk pembayaran Efisiensi, yang ditandatangani an. JORNAL E. SIAHAAN, SH, Msi selaku Kepala Biro Hukum ;
256. 1 (satu) bundel Dokumen penggunaan pengumpulan pemotongan pada tahun 2007, sebagai berikut :
- a. 2 (dua) lembar Laporan Keuangan Efisiensi bulan Februari 2008, terdapat tanda tangan an. BAHIR ROMSAH pada setiap lembarnya ;
- b. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Sudah terima dari Kepala Biro Hukum sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 3 Januari 2008, yang ditanda tangani an. SUDONO ;
- c. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima tertanggal 8 Januari 2008, sudah terima dari BAHIR ROMSAH (Pemegang Kas Cabang Biro Hukum) sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), untuk keperluan kegiatan Kepala Biro Hukum bulan Januari 2008, yang ditandatangani an. ELLEN SIAGIAN ;
- d. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima tertanggal 4 Februari 2008, sudah terima dari Bapak H. BAHIR (Pemegang Kas Cabang Biro Hukum) sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), untuk keperluan biaya operasional Kepala Biro Hukum, yang ditandatangani an. ELLEN SIAGIAN ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) lembar copy dilegalisir Kwitansi sudah terima dari BAHIR ROMSAH sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tanggal 2 Nopember 2008 yang ditanda tangani an. PANITYONO ;
257. 1 (satu) buah dokumen BUKU EXPEDISI berisi rincian catatan penggunaan Kepala Biro Hukum. Terdapat logo "JAYA RAYA" dengan sampul warna kuning, pada sampul terdapat banyak tulisan tangan berupa angka dan nama ;
258. 1 (satu) bundel Dokumen terkait pengembalian atas penerimaan 10 % atas pengadaan Filler Hukum 2007, sebagai berikut :
- a. 1 (satu) lembar asli Kwitansi berwarna merah tertulis telah terima dari Panitia Pemeriksa Barang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), tertanggal 14 Juli 2008, terdapat tanda tangan an. PANITYONO ;
- b. 1 (satu) lembar asli Kwitansi berwarna hijau tertulis telah terima dari Panitia Pemeriksa Barang sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), tertanggal 19 September 2008, terdapat tanda tangan an. PANITYONO ;
- c. 1 (satu) lembar asli Kwitansi berwarna kuning tertulis telah terima dari Panitia Pemeriksa Barang sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), tertanggal 14 November 2008, terdapat tanda tangan an. PANITYONO ;
259. 2 (dua) lembar foto copy dengan Cap Stempel asli, Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor : 532/2001 tentang Pemberian Biaya Penanganan Perkara di Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, tanggal 15 Februari 2001, ditandatangani oleh SUTIYOSO selaku Gubernur Propinsi DKI Jakarta, berikut 1 (satu) lembar lampiran Pemberian Biaya Operasional Penanganan Perkara di Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara ;
260. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor : 564/2005 tentang Penunjukan/Penetapan Advokat sebagai Penasihat hukum dan Konsultasi Hukum Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, tanggal 4 Maret 2005, ditandatangani oleh SUTIYOSO selaku Gubernur Propinsi DKI Jakarta ;
261. 1 (satu) bundel Dokumen sebagai berikut :

Hal. 554 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



- a. 1 (satu) lembar asli SPM Giro Pemprop DKI Jakarta No. 00132932006 tanggal 25 Agustus 2006, untuk pembayaran biaya pengurusan perkara perdata, pidana & TUN (Perkara No. 2086K/PDT/2004 Jo No. 63/PDT.G/2002/PN.JAK SEL) sejumlah Rp 976.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh enam juta rupiah);
 - b. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pemprop DKI Jakarta tanggal 15 Agustus 2006, untuk pembayaran pengurusan perkara perdata, pidana dan TUN (Perkara No. 2086K/PDT/2004 Jo No. 63/Pdt.G/2002/PN.Jak Sel) sejumlah Rp 976.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh enam juta rupiah), ditandatangani oleh BAHIR ROMSAH selaku Pemegang Kas Cabang ;
 - c. 1 (satu) lembar asli Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No.1046/SPP/SWD/BB/VIII/2006 tanggal 15 Agustus 2006, ditandatangani oleh HARI SANDJOJO MJ selaku Assisten Keuangan Sekdaprov DKI Jakarta dan H. BUDIYONO selaku Pemegang Kas Cabang ;
 - d. 1 (satu) lembar asli Surat permintaan Pembayaran Beban Tetap No. 1046/SPP/SWD/BB/VIII/2006 tanggal 15 Agustus 2006, ditandatangani oleh HARI SANDJOJO MJ selaku Assisten Keuangan Sekdaprov DKI Jakarta dan H. BUDIYONO selaku Pemegang Kas Cabang ;
 - e. 1 (satu) lembar asli Lampiran SPP Beban Tetap SKO No. 18022/2006 tanggal 17 Juli 2006 berupa rincian permohonan biaya perkara nomor 2086 K/PDT/2004 jo No. 63/PDT.G/2002/PN.JAK SEL, seluas 9.164 M2 Keputusan Gubernur Nomor 532 tahun 2001, ditandatangani oleh JORNAL E. SIAHAAN, SH, M.Si selaku Kepala Biro Hukum dan BAHIR ROMSAH selaku Pemegang Kas Cabang ;
262. 1 (satu) bundel Dokumen sebagai berikut :
- a. 1 (satu) lembar foto copy SPM Giro Pemprop DKI Jakarta No. 00168412007 tanggal 12 Desember 2007, untuk pembayaran biaya pengurusan perkara perdata, pidana & TUN (Perkara No. 101/PDT.G/2007/PN. JA-PUS) TRW. IV sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pemprop DKI Jakarta tanggal 12 Desember 2007, untuk pembayaran pengurusan perkara perdata, pidana & TUN (Perkara No. 101/PGT.G/2007/PN. JA-PUS) Triwulan IV sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), ditandatangani oleh BAHIR ROMSAH selaku Pemegang Kas Cabang ;
 - c. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 95/SPP/BT/BHK/2007 tanggal 12 Desember 2007, ditandatangani oleh JORNAL E. SIAHAAN, SH, M.Si selaku Kepala Biro Hukum dan BAHIR ROMSAH selaku Pemegang Kas Cabang ;
 - d. 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap No. 95/SPP/BT/BHK/2007 tanggal 12 Desember 2007, ditandatangani oleh JORNAL E. SIAHAAN, SH, M.Si selaku Kepala Biro Hukum dan BAHIR ROMSAH selaku Pemegang Kas Cabang ;
 - e. 1 (satu) lembar foto copy Rincian permohonan Biaya Gugatan Banjir (Class Action) Perkara No. 101/PDT.G/2007/PN.JKT.PST, sesuai Keputusan Gubernur Nomor 532 tahun 2001, ditandatangani oleh JORNAL E. SIAHAAN, SH, M.Si selaku Kepala Biro Hukum dan BAHIR ROMSAH selaku Pemegang Kas Cabang ;
263. 1 (satu) bundel Dokumen sebagai berikut :
- a. 1 (satu) lembar foto copy SPM Giro Pemprop DKI Jakarta No. 00104712007 tanggal 21 September 2007, untuk pembayaran biaya pengurusan perkara perdata, pidana & TUN (Perkara No. 476/PDT.G/2005/PN. JKT.BRT) sejumlah Rp 1.120.654.429,00 (satu milyar seratus dua puluh juta enam ratus lima puluh empat ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah) ;
 - b. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pemprop DKI Jakarta tanggal 21 September 2007, untuk pembayaran biaya pengurusan perkara perdata, pidana & TUN (Perkara No. 476/PDT.G/2005/PN. JKT.BRT) sejumlah Rp 1.120.654.429,00 (satu milyar seratus dua puluh juta enam ratus lima puluh empat ribu empat ratus dua puluh sembilan

Hal. 556 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah), ditandatangani oleh BAHIR ROMSAH selaku Pemegang Kas Cabang ;
- c. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 66/SPP/BHK/BT/2007 tanggal 21 September 2007, ditandatangani oleh JORNAL E. SIAHAAN, SH, M.Si selaku Kepala Biro Hukum dan BAHIR ROMSAH selaku Pemegang Kas Cabang ;
 - d. 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap No. 66/SPP/BT/BHK/2007 tanggal 21 September 2007, ditandatangani oleh JORNAL E. SIAHAAN, SH, M.Si selaku Kepala Biro Hukum dan BAHIR ROMSAH selaku Pemegang Kas Cabang ;
 - e. 1 (satu) lembar foto copy lampiran SPP Beban Tetap berupa Rincian permohonan Biaya Perkara No. 476/PDT.G/2005/PN. JKT.BRT, sesuai Keputusan Gubernur Nomor 532 tahun 2001, ditandatangani oleh JORNAL E. SIAHAAN, SH, M.Si selaku Kepala Biro Hukum dan BAHIR ROMSAH selaku Pemegang Kas Cabang ;
264. 1 (satu) bundel Dokumen sebagai berikut :
- a. 1 (satu) lembar asli SPM Giro Pemprop DKI Jakarta No. 00030242007 tanggal 6 Juni 2007, untuk pembayaran biaya pengurusan perkara perdata, pidana & TUN (Perkara No. 182/PDT.G/2005/PN. JAKBAR) Triwulan II sejumlah Rp 1.029.345.571,00 (satu milyar dua puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah);
 - b. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pemprop DKI Jakarta tanggal 6 Juni 2007, untuk pembayaran biaya pengurusan perkara perdata, pidana & TUN (Perkara No. 182/PDT.G/2005/PN. JAKBAR) Triwulan II sejumlah Rp.1.029.345.571,00 (satu milyar dua puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah), ditandatangani oleh BAHIR ROMSAH selaku Pemegang Kas Cabang ;
 - c. 1 (satu) lembar asli Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 51/SPP/BHK/2007 tanggal 6 Juni 2007, ditandatangani oleh JORNAL E. SIAHAAN, SH, M.Si selaku

Hal. 557 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



- Kepala Biro Hukum dan BAHIR ROMSAH selaku Pemegang Kas Cabang ;
- d. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap No. 51/SPP/BHK/2007 tanggal 6 Juni 2007, ditandatangani oleh JORNAL E. SIAHAAN, SH, M.Si selaku Kepala Biro Hukum dan BAHIR ROMSAH selaku Pemegang Kas Cabang ;
- e. 1 (satu) lembar asli Rincian Permohonan Biaya Perkara No. 182/PDT.G/2005/PN. JKT.Barat tanggal 6 Juni 2001, ditandatangani oleh JORNAL E. SIAHAAN, SH, M.Si selaku Kepala Biro Hukum dan BAHIR ROMSAH selaku Pemegang Kas Cabang ;
265. 1 (satu) lembar asli tindisan Dokumen SPM Giro No. 00267222006 TA. 2006 tertanggal 12 Desember 2006 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima juta rupiah) untuk pembayaran Biaya Bantuan Hukum / Advokasi Perkara Pidana Penebangan Pohon Beringin di HCB Jl. Hayam Wuruk sesuai dengan SPK Nomor 05/DPS/TH 2006 berikut lampiran pendukungnya ;
266. 1 (satu) lembar asli tindisan Dokumen SPM Giro No. 00307612006 TA. 2006 tertanggal 23 Desember 2006 sebesar Rp. 49.500.000,- (empat puluh sembilan juta lima ratus rupiah) untuk pembayaran Biaya Pengurusan Perkara Perdata, Pidana dan TUN berikut lampiran pendukungnya ;
267. 1 (satu) lembar asli tindisan Dokumen SPM Giro No. 00276742006 TA. 2006 tertanggal 15 Desember 2006 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk pembayaran Biaya Pengurusan Perkara Perdata, Pidana dan TUN (Penggunaan Jasa Profesional dalam mewakili kepentingan Hukum Pemda DKI Jakarta dalam Perkara Nomor 275/, berikut lampiran pendukungnya ;
268. 1 (satu) lembar asli tindisan Dokumen SPM Giro No. 00060102007 TA. 2007 tertanggal 3 Juli 2007 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) untuk memberi Bantuan Hukum kepada semua unsur Pemda & masyarakat, Pengurus perkara Perdata, Pidana & TUN berkaitan dengan Perk Nomor : 130/G.TUN/2006/PTUN JKT, berikut lampiran pendukungnya



269. 1 (satu) lembar asli tindisan Dokumen SPM Giro No. 00060112007 TA. 2007 tertanggal 3 Juli 2007 sebesar Rp. 297.000.000,- (dua ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) untuk Biaya Lawyer Fee / Legal Fee untuk pengurusan perkara 406 PDT.8/2006/PN.JKT.PST.DITK. PN JAKPUS, PT. JKT & MA, SPK Nomor : 01/DPS/2007, berikut lampiran pendukungnya ;
270. 1 (satu) lembar asli tindisan Dokumen SPM Giro No. 00192732007 TA. 2007 tertanggal 21 Desember 2007 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) untuk Pengurusan perkara Perdata, Pidana & TUN dengan SPK Nomor : 019/PLH/LMPP/X/2007, berikut lampiran pendukungnya;
271. 1 (satu) buah Buku Agenda Surat Verbal terdapat tulisan “ Catatan Penerimaan dan Pengeluaran Untuk Operasional Perkara, ATK, Transport Rapat, Konsumsi Rapat, Materai, Segling, Fek Surat, dsb mulai Januari Tahun 2006 “ ;
272. 1 (satu) buah Buku Agenda Surat Verbal terdapat tulisan “ Catatan Penerimaan dan Pengeluaran Untuk Operasional Perkara, ATK, Transport Rapat, Konsumsi/Snek Rapat, Materai, Segling, Fek Surat, dsb mulai Januari Tahun 2007 “ ;
273. 3 (tiga) bundel Kwitansi atas biaya pengurusan perkara, sebagai berikut :
- a. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal ... Agustus 2006 sebesar Rp.82.400.000,- (delapan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) yang diterima oleh JORNAL E. SIAHAAN ;
 - b. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal ... Agustus 2006 sebesar Rp.29.450.000,- (dua puluh Sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh Dr. RITOLA TASMAYA,MPH ;
 - c. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal ... Agustus 2006 sebesar Rp.23.550.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh H. MOERDIMAN,RM,SH,Msi ;
 - d. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal ... Agustus 2006 sebesar Rp.72.140.000,- (tujuh puluh dua juta seratus empat puluh ribu rupiah) yang diterima oleh AGUSDIN SUSANTO ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal ... Agustus 2006 sebesar Rp.58.850.000,- (lima puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh AGUSDIN SUSANTO ;
- f. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal ... Agustus 2006 sebesar Rp.35.300.000,- (tiga puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) yang diterima oleh SRI ASTUTI.R,SH ;
- g. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal ... Agustus 2006 sebesar Rp.35.300.000,- (tiga puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) yang diterima oleh MADE SUARJAYA ;
- h. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal ... Agustus 2006 sebesar Rp.35.300.000,- (tiga puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) yang diterima oleh MANSYUR MAHMUD,SH ;
- i. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal ... Agustus 2006 sebesar Rp.23.550.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh rupiah) yang diterima oleh RAHMAT,SH ;
- j. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal ... Agustus 2006 sebesar Rp.23.550.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh rupiah) yang diterima oleh MANGATUR.P,SH ;
- k. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal ... Agustus 2006 sebesar Rp.23.550.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh rupiah) yang diterima oleh ENDANG SRI RAHAYU ;
- l. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal ... Agustus 2006 sebesar Rp.23.550.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh rupiah) yang diterima oleh ISMIYATUN,SH ;
- m. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal ... Agustus 2006 sebesar Rp.23.550.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh rupiah) yang diterima oleh OR.ZAKARIAS,SH ;
- n. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal ... Agustus 2006 sebesar Rp.23.550.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh rupiah) yang diterima oleh ENDANG SUMARDI,SH ;
- o. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal ... Agustus 2006 sebesar Rp.23.550.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh rupiah) yang diterima oleh BUDI HARTONO,SH ;
- p. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal ... Agustus 2006 sebesar Rp.23.550.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh rupiah) yang diterima oleh RADIAH,SH ;

Hal. 560 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- q. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal ... Agustus 2006 sebesar Rp.23.550.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh rupiah) yang diterima oleh KAROLIS SIMATUPANG,SH,MH ;
- r. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal ... Agustus 2006 sebesar Rp.23.550.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh rupiah) yang diterima oleh MUKHLIS,SH ;
- s. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal ... Agustus 2006 sebesar Rp.23.550.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh rupiah) yang diterima oleh ROMY PURNAMA,SH ;
- t. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal ... Agustus 2006 sebesar Rp.29.450.000,- (dua puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh BAHIR ROMSAH ;
- u. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal ... Agustus 2006 sebesar Rp.17.750.000,- (tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh H. RONY SASTRO ;
- v. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal ... Agustus 2006 sebesar Rp.11.800.000,- (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah) yang diterima oleh BERNADO YULIANTO ;
- w. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal ... Agustus 2006 sebesar Rp.11.800.000,- (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah) yang diterima oleh KIYO ;
- x. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal ... Agustus 2006 sebesar Rp.5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) yang diterima oleh NOERWENDA,SH ;
- y. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal ... Agustus 2006 sebesar Rp.5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) yang diterima oleh VIRGIN DWIGUNA ;
- z. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal ... Agustus 2006 sebesar Rp.5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) yang diterima oleh BENNY CAHYO ;
- aa.1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal ... Agustus 2006 sebesar Rp.5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) yang diterima oleh IWAN KURNIAWAN ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ab.1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal ... Agustus 2006 sebesar Rp.5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) yang diterima oleh ANTON SYAMSUDIN ;
- ac.1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal ... Agustus 2006 sebesar Rp.5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) yang diterima oleh HELEN SIAGIAN ;
- ad.1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal ... Agustus 2006 sebesar Rp.5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) yang diterima oleh SUCI RAHAYU ;
- ae.1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal ... Agustus 2006 sebesar Rp.5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) yang diterima oleh TRI JOKO RAHARDJO,SH ;
- af. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal ... Agustus 2006 sebesar Rp.5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) yang diterima oleh AGUS GUNAWAN,SH ;
- ag.1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal ... Agustus 2006 sebesar Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang diterima oleh MARDHANI ;
- ah.1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal ... Agustus 2006 sebesar Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang diterima oleh FEMMI ;
- ai. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal ... Agustus 2006 sebesar Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang diterima oleh DINA ROSALINA ;
- aj. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal ... Agustus 2006 sebesar Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang diterima oleh KADERIN ;
- ak.1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal ... Agustus 2006 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diterima oleh HERY SUPARDAN,SH ;
- al. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal ... Agustus 2006 sebesar Rp.750.000- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh H. BUDIONO ;
- am. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal ... Agustus 2006 sebesar Rp.590.000,- (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang diterima oleh MULYANTO ;

Hal. 562 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- an.1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal ... Agustus 2006 sebesar Rp.590.000,- (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang diterima oleh ABD KOHAR ;
- ao.1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal ... Agustus 2006 sebesar Rp.590.000,- (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang diterima oleh SUDONO ;
- ap.1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal ... Agustus 2006 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Hj. TITI KARTIKAWATI,SH ;
- aq.1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal ... Agustus 2006 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Drs. NACHROWI ;
- ar. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal ... Agustus 2006 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh MUCHLIS ;
- as.1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal ... Agustus 2006 sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang diterima oleh H. SUNARDI ;
- at. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal ... Agustus 2006 sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang diterima oleh GUNAWAN CAHYONO ;
- au.1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal ... Agustus 2006 sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh BASRI ;
- av.1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal ... Agustus 2006 sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang diterima oleh RAMLI ;
- aw. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 8 Juni 2007 sebesar Rp.70.040.000,- (tujuh puluh juta empat puluh ribu rupiah) yang diterima oleh JORNAL E. SIAHAAN ;
- ax.1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 8 Juni 2007 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diterima oleh Dr. RITOLA TASMAYA,MPH ;
- ay.1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 8 Juni 2007 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diterima oleh H. MOERDIMAN,RM,SH,Msi ;



- az. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 8 Juni 2007 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang diterima oleh AGUSDIN SUSANTO ;
- ba. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 8 Juni 2007 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang diterima oleh AGUSDIN SUSANTO ;
- bb. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 8 Juni 2007 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang diterima oleh AGUSDIN SUSANTO ;
- bc. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 8 Juni 2007 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang diterima oleh AGUSDIN SUSANTO ;
- be. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 8 Juni 2007 sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh SRI ASTUTI.R,SH ;
- bf. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 8 Juni 2007 sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh MANSYUR MAHMUD,SH ;
- bg. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 8 Juni 2007 sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh SAUT PURBA,SH ;
- bh. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 8 Juni 2007 sebesar Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh RAHMAT,SH ;
- bi. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 8 Juni 2007 sebesar Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh MANGATUR.P,SH ;
- bj. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 8 Juni 2007 sebesar Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh ENDANG SRI RAHAYU ;
- bk. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 8 Juni 2007 sebesar Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh ISMIYATUN,SH ;
- bl. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 8 Juni 2007 sebesar Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh OR.ZAKARIAS,SH ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bm. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 8 Juni 2007 sebesar Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh ENDANG SUMARDI,SH ;
- bn.1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 8 Juni 2007 sebesar Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh BUDI HARTONO,SH ;
- bo.1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 8 Juni 2007 sebesar Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh RADIAH,SH ;
- bp.1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 8 Juni 2007 sebesar Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh KAROLIS SIMATUPANG,SH,MH ;
- bq.1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 8 Juni 2007 sebesar Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh MUKHLIS,SH ;
- br. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 8 Juni 2007 sebesar Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh ROMY PURNAMA,SH ;
- bs.1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 8 Juni 2007 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang diterima oleh BAHIR ROMSAH ;
- bt. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 8 Juni 2007 sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh H. RONY SASTRO ;
- bu.1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 8 Juni 2007 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diterima oleh BERNADO YULIANTO ;
- bv.1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 8 Juni 2007 sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh KIYO ;
- bw. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 8 Juni 2007 sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang diterima oleh MELLISA,SH ;
- bx.1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 8 Juni 2007 sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang diterima oleh SOLAFIDE SIHITE,SH ;

Hal. 565 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- by.1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 8 Juni 2007 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima oleh NOERWENDA,SH;
- bz.1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 8 Juni 2007 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima oleh SRI RAHAYU,SH
- ca.1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 8 Juni 2007 sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) yang diterima oleh IWAN KURNIAWAN ;
- cb.1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 8 Juni 2007 sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) yang diterima oleh ANTON SYAMSUDIN ;
- cc.1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 8 Juni 2007 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima oleh HELEN SIAGIAN
- cd.1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 8 Juni 2007 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima oleh SUCI RAHAYU ;
- ce.1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 8 Juni 2007 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima oleh TRI JOKO RAHARDJO,SH ;
- cf.1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 8 Juni 2007 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima oleh AGUS GUNAWAN,SH ;
- cg.1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 8 Juni 2007 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diterima oleh DINA ROSALINA
- ch.1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 8 Juni 2007 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diterima oleh MULYANTO ;
- ci.1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 8 Juni 2007 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diterima oleh DONO ;
- cj.1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 8 Juni 2007 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diterima oleh SILAEN ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ck. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 8 Juni 2007 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diterima oleh MARDHANI
- cl. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 8 Juni 2007 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh AINI (staf Wagub) ;
- cm. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 8 Juni 2007 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh L. SETIAWAN (staf Wagub) ;
- cn. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 8 Juni 2007 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh H. CHOLIK (staf Wagub) ;
- co. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 8 Juni 2007 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diterima oleh SALIM (staf TU Wagub) ;
- cp. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 8 Juni 2007 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh ETTY HR (staf TU Wagub) ;
- cq. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 8 Juni 2007 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh SUSANTI (staf Aspraja) ;
- cr. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 8 Juni 2007 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh NURUL HIDAYAH (staf Aspraja) ;
- ct. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 8 Juni 2007 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh GATOT SUMARYONO (staf Aspraja) ;
- cu. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 8 Juni 2007 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh BUNAYAR (staf Aspraja) ;
- cv. 5 (lima) lembar asli Kwitansi tanggal 8 Juni 2007 untuk staf Biro Umum masing-masing sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- cw. 4 (empat) lembar asli Kwitansi tanggal 8 Juni 2007 untuk staf Sekda masing-masing sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Hal. 567 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- cx. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 25 September 2007 sebesar Rp.50.040.000,- (lima puluh juta empat puluh ribu rupiah) yang diterima oleh JORNAL E. SIAHAAN ;
- cy. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 25 September 2007 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diterima oleh Dr. RITOLA TASMAHA,MPH ;
- da. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 25 September 2007 sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang diterima oleh AGUSDIN SUSANTO ;

db. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 25 September 2007 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang diterima oleh AGUSDIN SUSANTO ;

dci. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 25 September 2007 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang diterima oleh AGUSDIN SUSANTO ;

dd. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 25 September 2007 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang diterima oleh AGUSDIN SUSANTO ;

de. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 25 September 2007 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang diterima oleh SRI ASTUTI.R,SH ;

df. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 25 September 2007 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang diterima oleh MADE SUARJAYA ;

dg. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 25 September 2007 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang diterima oleh MANSYUR MAHMUD,SH ;

dh. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 25 September 2007 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang diterima oleh SAUT PURBA,SH ;

di. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 25 September 2007 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diterima oleh RAHMAT,SH ;

Hal. 568 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dj. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 25 September 2007 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diterima oleh MANGATUR.P,SH ;
- dk. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 25 September 2007 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diterima oleh ENDANG SRI RAHAYU ;
- dl. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 25 September 2007 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diterima oleh ISMIYATUN,SH ;
- dm. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 25 September 2007 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diterima oleh OR.ZAKARIAS ;
- dn. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 25 September 2007 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diterima oleh ENDANG SUMARDI,SH ;
- do. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 25 September 2007 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diterima oleh BUDI HARTONO,SH ;
- dp. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 25 September 2007 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diterima oleh RADIAH,SH ;
- dq. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 25 September 2007 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diterima oleh KAROLIS SIMATUPANG,SH,MH ;
- dr. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 25 September 2007 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diterima oleh MUKHLIS,SH ;
- ds. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 25 September 2007 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diterima oleh ROMY PURNAMA,SH ;
- dt. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 25 September 2007 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh BAHIR ROMSAH ;
- du. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 25 September 2007 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diterima oleh H. RONY SASTRO ;

Hal. 569 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dv.1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 25 September 2007 sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh BERNADO YULIANTO ;
- dw. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 25 September 2007 sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh KIYO ;
- dx.1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 25 September 2007 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang diterima oleh MELLISA,SH ;
- dy.1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 25 September 2007 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang diterima oleh SOLAFIDE SIHITE,SH ;
- dz.1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 25 September 2007 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima oleh NOERWENDA,SH;
- ea.1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 25 September 2007 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima oleh VIRGIN DWIGUNA ;
- eb.1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 25 September 2007 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima oleh SRI RAHAYU,SH
- ec.1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 25 September 2007 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima oleh IWAN KURNIAWAN ;
- ed.1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 25 September 2007 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima oleh ANTON SYAMSUDIN ;
- ee.1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 25 September 2007 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima oleh HELENSIAGIAN
- ef. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 25 September 2007 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima oleh SUCI RAHAYU ;
- eg.1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 25 September 2007 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima oleh TRI JOKO RAHARDJO,SH ;

Hal. 570 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eh.1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 25 September 2007 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima oleh AGUS GUNAWAN,SH ;

ei. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 25 September 2007 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diterima oleh DINA ROSALINA ;

ej. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 25 September 2007 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sesuai yang diterima oleh MARDHANI ;

ek.1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 25 September 2007 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sesuai yang diterima oleh MULYANTO ;

el. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 25 September 2007 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sesuai yang diterima oleh DONO ;

em. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 25 September 2007 sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) sesuai yang diterima oleh SILAEN ;

281. 1 (satu) lembar asli tindisan Kwitansi Pemprov DKI Jakarta tanggal 25 Agustus 2006, sebesar Rp 976.000.000,00-, untuk pembayaran Biaya Pengurusan Perkara, Perdata, Pidana dan TUN (Perkara No. 2086 K/Pdt/2004 Jo No. 63/Pdt.G/2002/PN. Jakarta Selatan), diterima dari : Pemegang Kas Cabang Biro Hukum DKI Jakarta, dan yang menerima serta ditandatangani oleh JORNAL E. SIAHAAN ;

282. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pemprov DKI Jakarta tanggal 8 Juni 2007, sebesar Rp 1.029.345.571,00-, untuk pembayaran Biaya Pengurusan Perkara, Perdata, Pidana dan TUN (Perkara No. 182/PDT.G/2005/PN. JKT. Barat) triwulan II, diterima dari : Pemegang Kas Cabang Biro Hukum DKI Jakarta, dan yang menerima serta ditandatangani oleh JORNAL E. SIAHAAN ;

283. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pemprov DKI Jakarta tanggal 21 September 2007, sebesar Rp 1.120.654.429,00-, untuk pembayaran Biaya Pengurusan Perkara, Perdata, Pidana dan TUN (Perkara No. 476/Pdt.G/2005/PN. JKT. Barat), diterima dari : Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan yang menerima serta ditandatangani oleh JORNAL E. SIAHAAN ;

Hal. 571 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



284. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pemprov DKI Jakarta tanggal 17 Desember 2007, sebesar Rp 1.000.000.000,00-, untuk pembayaran Biaya Pengurusan Perkara, Perdata, Pidana dan TUN (Perkara No. 101/Pdt.G/2007/PN. Jakarta Pusat), diterima dari : Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum DKI Jakarta, dan yang menerima serta ditandatangani oleh JORNAL E. SIAHAAN ;
285. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen SPM Giro No. 00267222006 TA. 2006 tertanggal 12 Desember 2006 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima juta rupiah) untuk pembayaran Biaya Bantuan Hukum / Advokasi Perkara Pidana Penebangan Pohon Beringin di HCB Jl. Hayam Wuruk sesuai dengan SPK Nomor 05/DPS/TH 2006 berikut lampiran pendukungnya (antara lain kontrak kepada Kantor Hukum Adji, Nuryasin & Rekan) ;
286. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen SPM Giro No. 00307612006 TA. 2006 tertanggal 23 Desember 2006 sebesar Rp. 49.500.000,- (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Biaya Pengurusan Perkara Perdata, Pidana dan TUN berikut lampiran pendukungnya (antara lain kontrak kepada Kantor Otto Hasibuan) ;
287. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen SPM Giro No. 00276742006 TA. 2006 tertanggal 15 Desember 2006 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk pembayaran Biaya Pengurusan Perkara Perdata, Pidana dan TUN (Penggunaan Jasa Profesional dalam mewakili kepentingan Hukum Pemda DKI Jakarta Dalam Perkara No. 275) berikut lampiran pendukungnya (antara lain kontrak kepada Novian & Partners) ;
281. 1 (satu) lembar asli Dokumen SPM Giro No. 00083502006 TA. 2006 tertanggal 22 Juni 2006 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk pembayaran Biaya Lawyer Fee / Legal Fee atas perkara No. 149/G.T UN/2005/PTUN.JKT, sesuai Surat Kuasa Gub. DKI No. 245/-1.711.323 berikut lampiran pendukungnya (antara lain kontrak kepada Novian & Partners) ;
282. 1 (satu) lembar asli Dokumen SPM Giro No. 00083492006 TA. 2006 tertanggal 22 Juni 2006 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk pembayaran Biaya Lawyer Fee / Legal



- Fee atas perkara No. 049/G.T UN/2006/PN.JKT.PST, perjanjian kerjasama No. 0331/N P.072006 berikut lampiran pendukungnya (antara lain kontrak kepada Novian & Partners) ;
283. 1 (satu) lembar asli Dokumen SPM Giro No. 00164802006 TA. 2006 tertanggal 25 September 2006 sebesar Rp. 49.500.000,- (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Biaya Jasa Hukum tentang Pendapat Hukum Revitalisasi Ex Stadion Menteng Jakpus No. Kontrak 04/DPS/TAHUN 2006 berikut lampiran pendukungnya (antara lain kontrak kepada Kantor Hukum Yan Juanda Saputra & Partners) ;
284. 1 (satu) lembar asli Dokumen SPM Giro No. 00088232006 TA. 2006 tertanggal 28 Juni 2006 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran Biaya Penanganan Proses Kasasi Perkara Tanah Abang No. 123/PDT.G/2004PN.JKT.PST Jo. Nomor 121/SRT/PDT/BDC/2006, berikut lampiran pendukungnya (antara lain kontrak kepada Kantor Hukum ADJI, NURYASIN & Rekan) ;
285. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen SPM Giro No. 00329322006 TA. 2006 tertanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran Biaya Penanganan Perkara Pidana Metro Jaya sesuai No. 08/DPS TH. 2006 ;
286. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen SPM Giro No. 00311232006 TA. 2006 tertanggal 23 Desember 2006 sebesar Rp. 49.500.000,- (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Biaya Pengurusan Perkara Perdata, Pidana dan TUN (By Pendapat Hukum untuk permasalahan Penat. Tmn Eks STAD Menteng) ;
287. 1 (satu) bundel Dokumen dari Bank BNI perihal transaksi rekening an. JORNAL E. SIAHAAN, sebagai berikut :
- a. 1 (satu) lembar foto copy legalisir berupa KTP Nomor : 09.5304.011253.0007 an. JORNAL E. SIAHAAN, SH ;
 - b. 1 (satu) lembar asli RTGS tanggal 29 Maret 2006 dari Bank BCA dengan pengirim SRI ROHANI MEGAWATI sebesar Rp. 120.000.000 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar foto copy legalisir bukti penarikan tertanggal 7 Agustus 2006, sebesar Rp. 98.000.000,- ;
- d. 1 (satu) lembar asli RTGS tanggal 25 Oktober 2007, dari Bank BCA dengan pengirim ALBERT IBRAHIM sebesar Rp. 80.000.000,- ;
- e. 1 (satu) lembar foto copy legalisir bukti setoran tanggal 5 Nopember 2007, sebesar Rp. 90.000.000,- ;
- f. 1 (satu) lembar RTGS tanggal 15 Januari 2008 dari Bank BCA dengan pengirim ALBERT IBRAHIM sebesar Rp. 65.000.000,- sebagai pembayaran sewa ruko warnet 88 ;
- g. 1 (satu) lembar asli RTGS tanggal 3 Maret 2008 dari Bank BCA dengan pengirim ALBERT IBRAHIM sebesar Rp. 102.000.000,- sebagai uang mobil Panther ;
- h. 1 (satu) lembar asli RTGS tanggal 3 September 2008 dari Bank Permata dengan pengirim PT. Sarijaya Permana Sekuritas sebesar Rp. 136.120.000,- sebagai Withdraw Sarijaya ;
- i. 1 (satu) lembar asli RTGS tanggal 3 September 2008 dari Bank BCA dengan pengirim ALBERT IBRAHIM sebesar Rp. 125.000.000,- sebagai uang sewa ruko 88 B Kelapa Dua ;
- j. 1 (satu) lembar foto copy legalisir berupa bukti penarikan tanggal 5 Maret 2008 sebesar Rp. 65.000.000,- ;
- 288. 1 (satu) bundel Dokumen dari Bank BNI, perihal transaksi rekening JORNAL E. SIAHAAN sebagai berikut :
 - a. 8 (delapan) lembar asli Rekening Koran No. 0101153226 an. JORNAL E. SIAHAAN, SH periode tanggal 26 April s/d 28 Februari 2009 ;
 - b. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen formulir setor tunai tabungan tanggal 26 April 2006 sebesar Rp. 2.500.000.000,- oleh JORNAL E. SIAHAAN ;
 - c. 1 (satu) lembar foto copy legalisir berupa formulir setor rekening tanggal 24 Juli 2006 sebesar Rp. 200.000.000,- oleh ISAAC PANGIHUTAN ;
 - d. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen formulir setor rekening tanggal 3 Januari 2007 sebesar Rp. 800.000.000,- oleh JORNAL E. SIAHAAN ;

Hal. 574 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen formulir setor rekening tanggal 23 Januari 2007 sebesar Rp. 500.000.000,- oleh ELLEN SIAGIAN ;
- f. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen RTGS tanggal 9 April 2007 sebesar Rp. 65.000.000,- ;
- g. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen setor kliring tanggal 28 September 2007, Bank Mega sebesar Rp. 457.762.500,- oleh ELLEN ;
- h. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen RTGS tanggal 8 Oktober 2007 sebesar Rp. 100.000.000,- oleh PT. Sarijaya Permana Sekuritas Bank Permata ;
- i. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen RTGS tanggal 1 Nopember 2007 sebesar Rp. 105.000.000,- oleh PT. Sarijaya Permana Sekuritas ;
- j. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen RTGS tanggal 8 Nopember 2007 sebesar Rp. 105.000.000,- oleh PT. Sarijaya Permana Sekuritas ;
- k. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen RTGS tanggal 13 Nopember 2007 sebesar Rp. 406.300.000,- oleh FORMAN TAMBUNAN ;
- l. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen RTGS tanggal 30 Nopember 2007 sebesar Rp. 100.000.000,- oleh PT. Mahakarya Arta Sekuritas ;
- m. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen setoran tunai tabungan tanggal 1 Februari 2008 sebesar Rp. 1.150.000.000,- oleh JORNAL E. SIAHAAN ;
- n. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen formulir kirim uang tanggal 21 Juli 2008, pemindahbukuan masuk sebesar Rp. 150.000.000,- dari Rekening 19732864 oleh JORNAL E. SIAHAAN ;
- o. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen formulir setoran tunai tabungan tanggal 17 Desember 2008 sebesar Rp. 400.000.000,- oleh ELLEN ;
- p. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen formulir setoran tunai tabungan tanggal 8 Januari 2009 sebesar Rp. 410.000.000,- oleh ELLEN ;

Hal. 575 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- q. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen formulir setoran kliring tanggal 9 Februari 2009 sebesar Rp. 195.000.000,- oleh ELLEN ;
- r. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen Formulir Kiriman Uang pemindahbukuan tanggal 2 Juni 2006 sebesar Rp. 167.020.000,- kerekening 61143856 an. BINA HAR NAPITUPULU pada Bank BNI ;
- s. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen Formulir Kiriman Uang pemindahbukuan tanggal 2 Juni 2006, sebesar Rp. 220.500.000,- kerekening 103000492 an. MARINUS NAPITUPULU pada Bank BNI ;
- t. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen Formulir Kiriman Uang pemindahbukuan tanggal 2 Juni 2006, sebesar Rp. 69.700.000,- kerekening 14635651 an. VICTOR HAMONANGAN SIAHAAN pada Bank BNI ;
- u. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen Formulir Kiriman Uang pemindahbukuan tanggal 21 Juni 2006, sebesar Rp. 100.200.000,- kerekening 104069056 an. M. AZIS ERDIN pada Bank BNI ;
- v. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen Formulir penarikan tanggal 29 Agustus 2006, sebesar 197.451.000,- oleh JORNAL E. SIAHAAN ;
- w. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen formulir penarikan tanggal 20 September 2006, sebesar Rp. 60.001.000,- oleh JORNAL E. SIAHAAN ;
- x. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen Formulir Kiriman Uang RTGS keluar tanggal 31 Juli 2007 sebesar Rp. 500.000.000,- ke PT. Sarijaya Permana Sekuritas pada Bank BCA ;
- y. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen Formulir Kiriman Uang RTGS keluar tanggal 30 Agustus 2007, sebesar Rp. 600.000.000,- ke PT. Mahakarya Arta Sekuritas pada Bank BCA ;
- z. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen formulir penarikan tanggal 19 September 2007, sebesar Rp. 500.000.000,- oleh JORNAL E. SIAHAAN ;

Hal. 576 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



- aa.1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen formulir penarikan tanggal 18 Oktober 2007, sebesar Rp. 250.000.000,- oleh JORNAL E. SIAHAAN ;
- ab.1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen formulir penarikan tanggal 5 Nopember 2007, sebesar Rp. 190.000.000,- oleh JORNAL E. SIAHAAN ;
- ac.1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen formulir penarikan tanggal 6 Nopember 2007, sebesar Rp. 499.801.000,- oleh JORNAL E. SIAHAAN ;
- ad.1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen formulir penarikan tanggal 12 Nopember 2007, sebesar Rp. 94.501.000,- oleh JORNAL E. SIAHAAN ;
- ae.1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen RTGS keluar tanggal 12 Maret 2008, sebesar Rp. 650.000.000,- ke PT. Sarijaya Permana Sekuritas pada Bank BCA ;
- af. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen formulir penarikan tanggal 18 Juli 2008, sebesar Rp. 500.000.000,- oleh JORNAL E. SIAHAAN ;
- ag.1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen RTGS keluar tanggal 21 Juli 2008, sebesar Rp. 1.000.000.000,- ke PT. Sarijaya Permana Sekuritas pada Bank BCA ;
- ah.1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen formulir penarikan tanggal 21 Juli 2008, sebesar Rp. 150.000.000,- oleh JORNAL E. SIAHAAN ;
- ai. 1 (satu) lembar foto copy legalisir dokumen formulir penarikan tanggal 24 Juli 2008, sebesar Rp. 81.000.000,- oleh JORNAL E. SIAHAAN ;
- aj. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen transfer kliring keluar tanggal 5 September 2008, sebesar Rp. 45.400.000,- ke PT. Bangun Cipta Karya Perkasa pada Bank Mandiri ;
- ak.1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen RTGS keluar tanggal 16 Oktober 2008, sebesar Rp. 350.000.000,- ke PT. Sarijaya Permana Sekuritas pada Bank BCA ;
- al. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen pemindahbukuan tanggal 28 April 2009, sebesar Rp. 1.000.947.500,- ke PT. Berkah Sukses Sejahtera Bank BNI No. Rek. 2157142012 ;
290. 1 (satu) bundel Dokumen dari Bank Mandiri, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 2 (dua) lembar asli print out RTGS TERMINAL IFT607CP-002082 transaksi pada tanggal 2 Januari 2006 ;
- b. 2 (dua) lembar asli Print out RTGS TERMINAL IFT607CP-002083 transaksi pada tanggal 26 Desember 2006 ;
- c. 1 (satu) lembar foto copy legalisir CEK MANDIRI Nomor : DM 221233 tertanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), berikut 1 (satu) lembar foto copy legalisir KTP Nomor : 09.5003.171263.0229 an. MURDIYANTO ;
- d. 1 (satu) lembar foto copy legalisir CEK MANDIRI Nomor : DM 221234 tertanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), berikut 1 (satu) lembar foto copy legalisir KTP Nomor : 09.5103.120970.0862 an. AGUS SUMARYONO ;
- e. 1 (satu) bundel Dokumen yang terdiri dari :
 - 1) 1 (satu) lembar foto copy legalisir CEK MANDIRI Nomor : CM 084846 tertanggal 13 Juli 2006 sebesar Rp. 465.000.000,- (empat ratus enam puluh lima juta rupiah), berikut 1 (satu) lembar foto copy legalisir KTP Nomor : an. HERU SURONO ;
 - 2) 1 (satu) lembar foto copy legalisir CEK MANDIRI Nomor : DM 221236 tertanggal 22 Januari 2007 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), berikut 1 (satu) lembar foto copy legalisir KTP Nomor : 09.5005.020174.0343 an. SUGIADI ;
 - 3) 1 (satu) lembar foto copy legalisir SLIP SETORAN MANDIRI tertanggal 13 Januari 2006, kepada PT. MEGAVISION UTAMA Nomor rekening : 120.0004377888 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ;
- f. 1 (satu) bundel Dokumen yang terdiri dari :
 - 1) 1 (satu) lembar foto copy legalisir SLIP SETORAN MANDIRI tertanggal 3 Januari 2007, kepada PT. RADITYA PUTRA BAHTERA Nomor rekening : 120.0001232698 dari MEGAVISION UTAMA sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) ;

Hal. 578 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) lembar foto copy legalisir CEK MANDIRI Nomor :
DA 115658 tertanggal 3 Januari 2007 sebesar Rp.
900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) ;
- 3) 1 (satu) lembar foto copy legalisir KTP Nomor :
09.5103.120970.0862 an. AGUS SUMARYONO ;
- g. 1 (satu) bundel Dokumen yang terdiri dari :
 - 1) 1 (satu) lembar foto copy legalisir CEK MANDIRI Nomor :
DM 221237 tertanggal 3 Januari 2007 sebesar Rp.
559.500.000,-
(lima ratus lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah),
berikut 1 (satu) lembar foto copy legalisir KTP Nomor :
09.5103.120970.0862 an. AGUS SUMARYONO ;
 - 2) 1 (satu) lembar foto copy legalisir CEK MANDIRI Nomor :
DM 221240 tertanggal 28 Desember 2007 sebesar Rp.
50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), berikut 1 (satu)
lembar foto copy legalisir KTP Nomor :
09.5003.171263.0229 an. MURDIYANTO ;
 - 3) 1 (satu) lembar foto copy legalisir SLIP SETORAN
MANDIRI tertanggal 3 Januari 2007, kepada PT. GLOBAL
INFORMASI BERMUTU Nomor rekening :
123.0002098376 dari MEGAVISION sebesar Rp.
310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah) ;
 - 4) 1 (satu) lembar foto copy legalisir SLIP SETORAN
MANDIRI tertanggal 3 Januari 2007, kepada PT. LATIVI
MEDIA KARYA Nomor rekening : 125.0002128437 dari
MEGAVISION sebesar Rp. 113.000.000,- (seratus tiga
belas juta rupiah) ;
 - 5) 1 (satu) lembar foto copy legalisir SLIP SETORAN
MANDIRI tertanggal 3 Januari 2007, kepada PT. GLOBAL
INFORMASI BERMUTU Nomor rekening :
123.0002098376 dari MEGAVISION sebesar Rp.
36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) ;
 - 6) 1 (satu) lembar foto copy legalisir SLIP SETORAN
MANDIRI tertanggal 3 Januari 2007, kepada PT. GLOBAL
INFORMASI BERMUTU Nomor rekening :
123.0002098376 dari MEGAVISION sebesar Rp.
100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

Hal. 579 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) lembar foto copy legalisir SLIP SETORAN MANDIRI tertanggal 3 Januari 2006, kepada PT. RADITYA PUTRA BAHTERA Nomor rekening : 120.0001232698 dari MEGAVISION UTAMA sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
- i. 1 (satu) lembar foto copy legalisir CEK MANDIRI Nomor : DM 221235 tertanggal 3 Januari 2007 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), berikut 1 (satu) lembar foto copy legalisir SLIP SETORAN MANDIRI tertanggal 3 Januari 2006, kepada MUTHIA DATAU Nomor rekening : 101.0004336838 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ;
- j. 2 (dua) lembar asli Print out RTGS TERMINAL IFT607CP-002084 transaksi pada tanggal 19 Desember 2007. ;
- k. 1 (satu) lembar foto copy legalisir CEK MANDIRI Nomor : DM 221242 tertanggal 28 Desember 2007 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- l. 1 (satu) lembar foto copy legalisir CEK MANDIRI Nomor : DM 221239 tertanggal 28 Desember 2007 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), berikut 1 (satu) lembar foto copy legalisir KTP Nomor : 32.03.38.2002.261287.00790 an. ACHMAD DANI ;
- m. 1 (satu) lembar foto copy legalisir CEK MANDIRI Nomor : DM 221241 tertanggal 28 Desember 2007 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), berikut 1 (satu) lembar foto copy legalisir KTP an. NURHASAN ;
- n. 4 (empat) lembar foto copy legalisir dokumen APLIKASI PEMBUKAAN REKENING PERUSAHAAN PT. RADITYA PUTRA BAHTERA tertanggal 30 Oktober 2001 ;
- o. 1 (satu) lembar foto copy legalisir dokumen APLIKASI PEMBUKAAN REKENING PRODUK DANA PERORANGAN tertanggal 11 April 2008, berikut 1 (satu) lembar foto copy legalisir KTP Nomor : 09.5304.011253.0007 an. JORNAL E. SIAHAAN, SH ;

Barang bukti No.1 s/d No.289 Terlampir dalam berkas perkara ;

290. Uang sebesar 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;

291. Uang sebesar 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) ;

Hal. 580 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

292. Uang sebesar 18.668.000,- (delapan belas juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah) ;
293. Uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
294. Uang sebesar Rp. 22.330.000,- (dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) ;
295. Uang sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) ;
296. Uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
297. Uang sebesar Rp. 15.015.000,- (lima belas juta lima belas ribu rupiah);
298. a. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tertanggal 1 Juni 2010 yang ditanda tangani oleh MADE SUARJAYA ;
b. Uang sebesar Rp. 95.005.000,- (sembilan puluh lima juta lima ribu rupiah) ;
299. a. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tanpa tanggal yang ditanda tangani oleh MOERDIMAN, RM, SH, Msi ;
b. Uang sebesar Rp. 60.017.500,- (enam puluh juta tujuh belas ribu lima ratus rupiah) ;
300. Uang sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) ;
Barang bukti No.290 s/d No.300 berupa uang sebesar Rp.427.569.000,- (empat ratus dua puluh tujuh juta blima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), dinyatakan dirampas untuk Negara ;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No 03/Akta.Pid/TPK/2011/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 7 Maret 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 18 Maret 2011 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa (berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Maret 2011) sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 18 Maret 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Februari 2011 dan Terdakwa

Hal. 581 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Maret 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 18 Maret 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi Tipikor) tidak menerapkan Pasal 197 ayat (1) huruf f jo Pasal 197 ayat (2) KUHAP yang mengharuskan surat putusan memuat pasal-pasal yang menjadi dasar hukum dari putusan. Tidak dipenuhinya persyaratan tersebut mengakibatkan putusan Batal Demi Hukum ;

Bahwa berdasarkan Pasal 243 ayat (3) jo. Pasal 226 KUHAP menyatakan bahwa putusan pengadilan diberikan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya segera setelah putusan dijatuhkan. Pemohon Kasasi telah menerima salinan putusan Pengadilan Tinggi Tipikor tersebut pada tanggal 22 Februari 2011;

Bahwa dalam salinan putusan yang Pemohon Kasasi/Terdakwa terima, sebagaimana juga telah dikutip di atas, dalam amar putusan perkara a-quo, *judex facti* (Pengadilan Tinggi Tipikor) langsung menyatakan dalam amar putusan angka 1 bahwa: "Menyatakan Terdakwa JORNAL EFFENDI SIAHAAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan beberapa tindak pidana korupsi secara bersama-sama;" tanpa menyebutkan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal-pasal yang menjadi dasar hukum dari putusan;

Bahwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP diatur bahwa surat putusan harus memuat pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal-pasal yang menjadi dasar hukum dari putusan.

Bahwa terhitung sejak amar putusan a-quo yang telah kami terima pada tanggal 22 Februari 2011 sampai dengan memori kasasi ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sama sekali tidak ada perbaikan putusan dari *judex facti* (Pengadilan Tinggi Tipikor). Dengan demikian amar putusan perkara a-quo dibuat dengan tidak mencantumkan dasar hukum yang menjadi dasar untuk menjatuhkan putusan terhadap Pemohon Kasasi/Terdakwa.

Hal. 582 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Bahwa berdasarkan Pasal 197 ayat (2) KUHAP dinyatakan bahwa:

“Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum”.

Berdasarkan uraian di atas, maka jelas bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi (“Tipikor”) telah tidak menerapkan Pasal 197 ayat (1) huruf f dan Pasal 197 ayat (2) KUHAP. Oleh karenanya Pemohon Kasasi/Terdakwa mohon agar Majelis Hakim Agung di tingkat Kasasi selaku *judex juris* menyatakan bahwa putusan a-quo batal demi hukum.

2. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi Tipikor) tidak menerapkan sebagaimana mestinya Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP dengan menghukum Pemohon Kasasi/Terdakwa atas sesuatu yang tidak didakwakan (vide Pasal 18 UU Tipikor).

Bahwa dalam pertimbangan putusan halaman 454, *judex facti* (Pengadilan Tinggi Tipikor) memberikan pertimbangannya sebagai berikut :

“Ad.2 mengenai pidana uang pengganti terhadap Terdakwa : menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut di atas, maka Majelis Hakim Banding menolaknya, karena pembebanan uang pengganti kepada Terdakwa merupakan pidana tambahan yang dapat dijatuhkan oleh Majelis Hakim sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 31 Tahun 1999, dan bukan sebagai dakwaan yang harus dibuktikan unsur-unsurnya, seperti Dakwaan pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 31 Tahun 1999”;

Bahwa pertimbangan *judex facti* (Pengadilan Tinggi Tipikor) tersebut tidak menerapkan sebagai mana mestinya Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP yang menyatakan:

Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP:

“3. sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntut umum dan hadirin meninggalkan ruang sidang.

“4. Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang.”

Bahwa pasal 182 KUHAP telah menegaskan dengan jelas bahwa Majelis Hakim hanya dapat memutus berdasarkan surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang. *Judex facti* (Pengadilan Tinggi Tipikor) tidak perlu menginterpretasikan lagi suatu pasal yang sudah jelas menyatakan demikian. Pertimbangan *judex facti*



yang menyatakan: "karena pembebanan uang pengganti kepada Terdakwa merupakan pidana tambahan yang dapat dijatuhkan oleh Majelis Hakim sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 31 Tahun 1999, dan bukan sebagai dakwaan yang harus dibuktikan unsur-unsurnya, seperti Dakwaan pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 31 Tahun 1999;" jelas-jelas merupakan pertimbangan yang telah dengan sengaja tidak menerapkan ketentuan Pasal 182 ayat (2) dan (3) KUHAP sebagaimana mestinya, dengan memberikan interpretasi lain terhadap ketentuan yang sudah jelas dan tidak perlu diinterpretasikan dimana interpretasi tersebut bertentangan dengan maksud dari pasal/ketentuan tersebut.

Bahwa Pasal 18 Undang Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2001 ("Undang Undang Tipikor") tidaklah merupakan pasal yang selalu secara otomatis ada dalam suatu putusan pengadilan walaupun tidak didakwakan. Tanpa didakwakan, pasal tersebut tidaklah dapat dipertimbangkan, terlebih diputuskan. Dan tidak terdapat suatu ketentuan yang mengatur bahwa pasal tersebut dapat dikenakan oleh *judex facti* dalam putusannya. Ternyata juga *judex facti* tidak pernah memberikan dasar hukum dalam pertimbangan hukumnya bahwa Pasal 18 Undang Undang Tipikor tersebut dapat diterapkan walau tidak diajukan dalam dakwaan.

Menurut M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya berjudul "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP" dinyatakan bahwa:

"Fungsi utama surat dakwaan dalam pemeriksaan perkara di sidang pengadilan, "menjadi titik tolak landasan pemeriksaan perkara". Pemeriksaan perkara di sidang pengadilan, mesti didasarkan dari isi surat dakwaan. Atas landasan surat dakwaan inilah ketua sidang memimpin dan mengarahkan jalannya seluruh pemeriksaan baik yang menyangkut pemeriksaan alat bukti maupun yang berkenaan dengan barang bukti. Jika penuntut umum, terdakwa, atau penasihat hukum menyimpang dari surat dakwaan, ketua sidang berkewajiban dan berwenang untuk meluruskan kembali ke arah yang sesuai dengan surat dakwaan".

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan dinyatakan bahwa:

Hal. 584 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



"Fungsi Surat Dakwaan :

Surat Dakwaan menempati posisi sentral dan strategis dalam pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan, karena itu Surat Dakwaan sangat dominan bagi keberhasilan pelaksanaan tugas penuntutan.

Ditinjau dari berbagai kepentingan yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara pidana, maka fungsi Surat Dakwaan dapat dikategorikan:

- a) Bagi Pengadilan/Hakim, Surat Dakwaan merupakan dasar dan sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan, dasar pertimbangan dalam penjatuhan keputusan;
- b) Bagi Penuntut Umum, Surat Dakwaan merupakan dasar pembuktian/analisis yuridis, tuntutan pidana dan penggunaan upaya hukum;
- c) Bagi Terdakwa/Penasihat Hukum, Surat Dakwaan merupakan dasar untuk mempersiapkan pembelaan."

Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi Tipikor) dalam perkara a-quo telah menerapkan tidak sebagaimana mestinya ketika menghukum Terdakwa/Pemohon Kasasi atas sesuatu yang tidak didakwakan dalam surat dakwaan (*vide* Pasal 18 Undang Undang Tipikor) padahal secara tegas Pasal 182 ayat (4) KUHAP mencantumkan kata "harus" yaitu Musyawarah Hakim harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang." Harus dicermati bahwa terdapat kata "dan" antara kalimat "harus didasarkan atas surat dakwaan" dengan kalimat "segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang" yang berarti keduanya harus terpenuhi.

Bahwa sebagai tambahan, apabila benar interpretasi *judex facti* (Pengadilan Tinggi Tipikor) tersebut *quod-non* maka para Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada KPK seharusnya tidak perlu mencantumkan Pasal 18 Undang Undang Tipikor dalam surat dakwaannya. Namun faktanya dalam surat dakwaan JPU KPK terhadap Burhanuddin Abdullah, Oey Hoey Tiong, Rusli Simanjuntak, Rustam Effendy, dll ternyata Pasal 18 Undang Undang Tipikor tersebut di-juncto-kan pasal-pasal lainnya dalam Undang Undang Tipikor. Hanya dalam perkara Pemohon Kasasi/Terdakwa saja tidak dicantumkan Pasal 18 Undang Undang Tipikor tersebut. Dengan demikian tindakan *judex facti* (Pengadilan Tinggi Tipikor) yang memberikan interpretasi atas suatu ketentuan yang sudah jelas adalah merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP tidak sebagaimana mestinya, yaitu *judex facti* mengakui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tidak ada tuntutan Pasal 18 Undang Undang Tipikor dalam surat dakwaan, semestinya Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP diterapkan dalam perkara a-quo dengan membebaskan Pemohon Kasasi dari penghukuman yang sama sekali tidak didakwakan, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh judex facti (Pengadilan Tinggi Tipikor).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi Tipikor) tidak menerapkan sebagaimana mestinya ketentuan pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP. Oleh karena itu Pemohon Kasasi/Terdakwa memohon agar Mahkamah Agung RI di tingkat kasasi membatalkan penghukuman kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa sepanjang berdasarkan Pasal 18 Undang Undang Tipikor ini khususnya mengenai uang pengganti.

3. Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi Tipikor) tidak menerapkan Pasal 185 ayat (1) KUHAP dalam memutuskan terbuktinya dakwaan ke- 2 Pasal 12 huruf f Undang Undang Tipikor.

Bahwa dalam pertimbangan unsur Ad. 3 Meminta, menerima atau memotong pembayaran, judex facti (Pengadilan Tinggi Tipikor) memberikan pertimbangan dengan tidak menerapkan hukum. Pertimbangan tersebut (halaman 471 putusan a-quo) sebagai berikut:

“pada tahun 2006 pada waktu rapat dinas di ruang rapat Biro Hukum Setda DKI Jakarta yang dihadiri 3 (tiga) orang Kepala Bagian, yaitu Noerwendha, Agusdin Susanto, dan Joko Rahardjo, serta Bendahara/Pemegang Kas Cabang Bahir Romsah, bahwa disamping para Kepala Bagian menyampaikan seluruh kegiatan, di Biro Hukum, Terdakwa telah memerintahkan kepada para Kepala Bagian yang merupakan bawahannya, untuk melakukan pemotongan seluruh kegiatan di Biro Hukum, termasuk pemotongan honor pegawai pelaksana kegiatan pengadaan, DKI Jakarta kurang lebih 10 persen. Adapun pemotongan dimaksud merupakan kebijakan Terdakwa untuk pengeluaran biaya non-budgeter yang harus dikeluarkan yang tidak terprogram di Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta;

Kemudian dalam halaman 473 kembali judex facti (Pengadilan Tinggi Tipikor) kembali memberikan pertimbangan yang salah dalam menerapkan hukum, yaitu menyatakan:

“Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan di atas telah terungkap dan terbukti terdakwa telah memerintahkan kepada para kepala bagian di Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan

Hal. 586 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



pemotongan seluruh kegiatan antara lain pemotongan honorarium pegawai pelaksana kegiatan di Biro Hukum Setda DKI Jakarta tahun Anggaran 2006 dan tahun 2007 yang jumlahnya mencapai kurang lebih Rp 4.164.026,00 (empat milyar seratus enam puluh empat juta, delapan ratus lima puluh empat ribu dua puluh enam rupiah)".

Bahwa pertimbangan judex facti (Pengadilan Tinggi Tipikor) yang menyatakan bahwa dakwaan ke-2 terbukti sama sekali tidak berdasar, persidangan perkara a-quo di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berjalan selama + 3 bulan 21 hari (3 Agustus 2010 s/d 22 November 2010), selama persidangan judex facti (Pengadilan Tinggi Tipikor) yang mengadili di tingkat pertama telah menelaah saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebanyak 24 saksi, 3 ahli dan Terdakwa, serta menemukan fakta berdasarkan kesaksian di persidangan bahwa unsur-unsur dalam Pasal 12 huruf f tidak terbukti sama sekali. Sedangkan judex facti (Pengadilan Tinggi Tipikor) yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding hanya + 23 hari (18 Januari 2011 s/d 10 Februari 2011) telah menelaah kasus ini dan menyatakan bahwa dakwaan ke-2 terbukti. Pertimbangan judex facti (Pengadilan Tinggi Tipikor) tersebut bukan didasarkan pada keterangan di persidangan, namun didasarkan pada pemahaman akan perkara a-quo yang salah, keliru dan tidak cermat pula sehingga menghasilkan fakta yang salah. Fakta yang tidak benar tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tidak ada kepala bagian yang bernama Joko Rahardjo;
2. Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak pernah memerintahkan Bahir Romsah untuk melakukan pemotongan atas honor-honor karyawan pelaksana kegiatan;
3. Bahir Romsah dalam persidangan menyatakan bahwa kemungkinan dia secara tidak sengaja melakukan pemotongan/tanpa disadarinya. Jadi tidak ada perintah dari Pemohon Kasasi/Terdakwa.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHAP, dinyatakan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Dengan demikian keterangan di persidangan-lah yang seharusnya digunakan dalam mengadili Pemohon Kasasi/ Terdakwa. Penerapan hukum pembuktian, khususnya tentang keterangan saksi dan pemahaman judex facti (Pengadilan Tinggi Tipikor) akan duduk perkara a-quo yang salah sudah sepatutnya dikesampingkan karena fakta persidangan sebenarnya adalah sebagaimana telah kami sampaikan dalam hasil transkripsi dari rekaman persidangan pada tanggal 21 September 2010 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah kami lampirkan dalam pledoi penasihat hukum, dan akan kami lampirkan kembali dalam memori kasasi ini transkripsi keterangan saksi Bahir Romsah tanggal 21 September 2011 halaman 42-43 dimana saksi Bahir Romsah memberikan pernyataannya di persidangan sebagai berikut:

PH 4 : Iya. Saya tanyakan ke Pak Bahir. Pak Bahir

B : Iya Bu.

PH 4 : saya, saya hanya menegaskan lagi, BAP bapak yang nomor 80. Bapak katakan bahwa dikarenakan saya tidak hafal secara pasti mengenai pembayaran mana yang dikenakan efisiensi 10%, dikarenakan apabila kasir bagian mengajukan permintaan untuk pembayaran terhadap honorarium, baik pelaksana maupun tenaga ahli atau narasumber dijadikan satu, maka kemungkinan terkena pemotongan efisiensi 10%, betul Pak?

B : betul.

PH 4 : 10% Pak Bahir ga sadar untuk memotong efisiensi untuk honor Pak. Jadi di BAP-nya, tanpa disadari, dia memotong.

HK : ooh, jangan disimpulkan lah ya.

PH 4 : ini Pak...

HK : Iya. Iya. Iya. Iya. Nanti kita nilailah. Jadi Saudara ada pemotongan 10 % kan?

B : iya

PH 4 : tapi tanpa bapak sadari?

HK : sadar ga sadar sudah cerita lain itu.

PH 4 : Bukan Pak. Ini kaitannya dengan apakah itu permintaan Pak Jurnal untuk memotong?

HK : sudah disebutkan tadi, tidak ada perintah. Itu hasil rapat. Kenapa lagi disimpulkan? Kalian itu tidak mengerti. Aduh

PH 4 : karena itu masuk ke efisiensi 10%

HK : tidak seperti yang telah dikatakan oleh saksi bahwa itu hasil rapat.

(Lampiran 1-transkrip sidang saksi Bahir Romsah tanggal 21 September 2010 halaman 42-43)

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, dinyatakan bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak pernah memerintahkan Bahir Romsah untuk melakukan pemotongan atas honor pegawai pelaksana

Hal. 588 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kegiatan, sesuai dengan transkripsi sidang tanggal 26 Oktober 2010 halaman 6 dengan keterangan sbb;

- HK : iya setelah berjalan. Nah sekarang kita bicara ini tentang rapat nih. Ini berjalan nih sekarang kita. Kedepan kita sekarang bicara ya. Itu yang dikumpulkan, yang diambil 10% nya itu apa saja?
- T : hampir semua Yang Mulia. Kecuali honor. Honor karyawan saya tidak pernah memerintahkan melakukan pemotongan.
- HK : jadi tadi ada filler hukum, gema hukum, kemudian honor ya?
- T : honor tidak ada perintah dari saya.

Berdasarkan uraian di atas, yang dinyatakan sebagai fakta hukum oleh *judex facti* (Pengadilan Tinggi Tipikor) adalah tidak sama dengan fakta hukum yang muncul di persidangan. Bahkan berdasarkan putusan *judex facti* (Pengadilan Tinggi Tipikor) yang memeriksa saksi Bahir Romsah, catatan *judex facti* (Pengadilan Tinggi Tipikor) khusus mengenai fakta hukum menyangkut keterangan Bahir Romsah (halaman 105 s/d 109 Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi) tidak pernah ada kata-kata ; “Terdakwa telah memerintahkan kepada para Kepala Bagian ... termasuk pemotongan honor pegawai pelaksana kegiatan pengadaan, DKI Jakarta kurang lebih 10 persen”.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, tidak jelas darimana *judex facti* (Pengadilan Tinggi Tipikor) mendapatkan fakta sebagaimana pertimbangan di atas, yang kemudian fakta tersebut dipertimbangkan telah terbukti sehingga mengakibatkan Pemohon Kasasi/Terdakwa dinyatakan bersalah atas dakwaan ke-2. Seharusnya dengan memperhatikan keterangan saksi di persidangan dengan mudah diperoleh fakta bahwa dakwaan ke-2 sama sekali tidak terbukti sebagaimana telah disadari oleh *judex facti* (Pengadilan Tinggi Tipikor) yang mengadili di tingkat pertama. Tidak ada perintah dari Pemohon Kasasi untuk melakukan pemotongan atas honor. Dan hal tersebut juga diakui oleh saksi Bahir Romsah di hadapan persidangan bahwa dirinya tidak menyadari ikut juga melakukan pemotongan atas honor para pegawai pelaksana.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi Tipikor) tidak menerapkan Pasal 185 ayat (1) KUHP. Oleh karena itu Pemohon Kasasi/Terdakwa memohon agar *judex juris* di tingkat Kasasi, memperbaiki putusan *a-quo* dengan menyatakan bahwa penerapan hukum pembuktian salah dan keliru dimana seharusnya dakwaan



ke-2 tidak terbukti dikarenakan salah satu unsur yaitu unsur ke-3 yaitu meminta, menerima atau memotong pembayaran sama sekali tidak terbukti.

4. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi Tipikor) tidak menerapkan Pasal 185 ayat (2) KUHAP sebagaimana seharusnya dalam memutuskan terpenuhinya unsur menerima hadiah atau janji dalam Pasal 11 Undang Undang Tipikor pada dakwaan ke-3.

Bahwa dalam memutuskan terbuktinya dakwaan ke-3 yaitu Pasal 11 Tipikor, *judex facti* (Pengadilan Tinggi Tipikor) memberikan pertimbangan yang semata-mata didasarkan pada keterangan saksi Bahir Romsah saja. Adapun pertimbangan *judex facti* (Pengadilan Tinggi Tipikor) tersebut adalah sebagai berikut (halaman 477-478 putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Tipikor):

“unsur menerima hadiah atau janji;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan tersebut bersifat alternatif, yang terdiri dari “menerima hadiah” atau “menerima janji”, karena mana apabila salah satu dari keduanya sudah terbukti, maka unsur menerima hadiah atau janji dimaksud sudah dikatakan terbukti;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Saksi Bahir Romsah (staff Bagian Dokumentasi dan Publikasi Hukum/PKC tahun 2006-2007), karena perintah Terdakwa telah mengumpulkan dana dari pihak ketiga di luar kegiatan Pengadaan Filler Hukum 2006 dan Pengadaan Jasa Gema Hukum 2006, seluruhnya berjumlah Rp 2.451.480.647,- (dua milyar empat ratus lima puluh satu juta empat ratus delapan puluh ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah), terdiri dari:...
2. Saksi Bahir Romsah staff Bagian Dokumentasi dan Publikasi Hukum/PKC tahun 2006-2007), karena perintah Terdakwa telah mengumpulkan dana dari pihak ketiga di luar kegiatan Pengadaan Filler Hukum 2007 dan Pengadaan Jasa Gema Hukum 2007, seluruhnya berjumlah Rp 693.327.440,- (enam ratus Sembilan puluh tiga juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh rupiah), terdiri dari: ...

Menimbang, bahwa pengumpulan dana oleh saksi Bahir Romsah (staff Bagian Dokumentasi dan Publikasi Hukum/PKC tahun 2006-2007), merupakan realisasi dari perintah Terdakwa, kemudian setelah diterima diserahkan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, unsur menerima hadiah dari perbuatan terdakwa telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keberadaan Pasal 11 Undang Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2001 ("Undang Undang Tipikor"), adalah sebagai Pasangan dari Pasal 13 Undang Undang Tipikor. berdasarkan penafsiran secara historis (interpretasi historis), pembuat Undang-Undang merumuskan Pasal 13 dalam Undang Undang Tipikor dengan maksud sebagai pasangan dari Pasal 418 KUHP yang kemudian ditarik menjadi Pasal 11 Undang Undang Tipikor. Oleh karena itu, untuk menuntut seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara melakukan tindak pidana korupsi berupa penyuapan pasif (passieve omkoping) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang Undang Tipikor, terlebih dahulu harus terjadi penyuapan aktif (actieve omkoping) sebagaimana dimaksud Pasal 13 Undang Undang Tipikor. Apabila pemberi suap menurut Pasal 13 Undang Undang Tipikor tidak pernah dipersalahkan dan dipidana, maka pegawai negeri yang menerima suap tersebut juga sepatutnya tidak dipersalahkan dan tidak dipidana pula karena menerima suap menurut Pasal 11 Undang Undang Tipikor.

Bahwa dalam putusnya *judex facti* (Pengadilan Tinggi Tipikor) menyatakan Pemohon Kasasi terbukti memenuhi unsur-unsur dakwaan ke-3, yaitu melakukan tindak pidana korupsi penyuapan pasif (passieve omkoping), kongkritnya menerima hadiah berupa uang dari Bahir Romsah selaku PKC, dana-dana yang menurut Bahir Romsah dikumpulkan dari rekanan-rekanan yang melaksanakan kegiatan pengadaan di beberapa bagian di Biro Hukum sebagaimana diatur dan diancam Pasal 11 Undang Undang Tipikor.

Seharusnya dengan mengikuti pendapat ahli hukum, yurisprudensi Mahkamah Agung, serta dengan dilakukannya penafsiran secara historis, maka untuk terjadinya penyuapan pasif (passieve omkoping) yang didakwaan kepada Pemohon Kasasi/ Terdakwa, terlebih dahulu harus terjadi penyuapan aktif (actieve omkoping). Akan tetapi, apabila uraian dakwaan tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan perkara ini, baik dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, keterangan Pemohon Kasasi/Terdakwa atau alat bukti lainnya, tidak diperoleh adanya fakta persidangan bahwa telah terjadi terlebih dahulu tindak pidana penyuapan aktif maupun terjadinya tindak pidana yang dibuktikan dalam suatu putusan pemidanaan. Sehingga keharusan terjadinya tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud Pasal 13 Undang

Hal. 591 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UndangTipikor, untuk terjadinya tindak pidana Korupsi pada Pasal 11 Undang Undang Tipikor dalam perkara ini, menjadi tidak terpenuhi pula.

Bahwa seluruh rekanan yang dihadirkan dalam persidangan ini adalah yang berkaitan dengan Gema Hukum dan Filler Hukum. Tidak ada saksi yang dihadirkan di persidangan menyangkut rekanan di luar Gema Hukum dan Filler Hukum (vide transkripsi persidangan tertanggal 28 September 2010 dan 5 Oktober 2010 dalam lampiran Pledoi Penasehat Hukum). Dengan demikian ketiadaan bukti mengenai siapa pemberi, kapan diberikan, berapa jumlah pemberian tersebut, apa bentuknya, faktanya belum lagi ada, namun judex facti (Pengadilan Tinggi Tipikor) langsung menyatakan Pemohon Kasasi terbukti memenuhi seluruh unsur dakwaan ke-3: Pasal 11 UU Tipikor. Bahwa selain itu, apabila dicermati, judex facti dalam membuktikan unsur ini hanya didasarkan pada satu alat bukti yaitu keterangan saksi Bahir Romsah saja. Bahwa sesuai dengan Pasal 185 ayat 2 KUHAP dinyatakan bahwa keterangan satu saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Dengan demikian pertimbangan judex facti (Pengadilan Tinggi Tipikor) yang menyatakan dakwaan ke-3: Pasal 11 Undang Undang Tipikor telah terbukti, adalah salah dalam penerapan hukumnya karena telah melanggar Pasal 185 ayat (2) KUHAP.

Bahwa meskipun Bahir Romsah menerangkan mengenai catatan-catatan mengenai jumlah uang tersebut, maka hal tersebut tetaplah harus dinilai sebagai bagian/satu kesatuan dengan keterangan saksi Bahir Romsah. Karena faktanya selama persidangan, tidak pernah ada pembuktian menyangkut dakwaan ke-3 ini, bahkan tidak pernah ada dihadirkan pihak ketiga di luar Gema Hukum dan Filler Hukum yang mendasari terbuktinya dakwaan tersebut, juga tidak ada fakta persidangan menyangkut pemberian dana-dana tersebut, kapan diserahkan, siapa yang menyerahkan dll. hanya keterangan Bahir Romsah sendiri saja.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi Tipikor) dalam membuktikan unsur dakwaan ke-3: Pasal 11 Undang Undang Tipikor hanya berdasarkan keterangan satu saksi saja yaitu saksi Bahir Romsah. Dengan demikian pertimbangan judex facti (Pengadilan Tinggi Tipikor) telah melanggar Pasal 185 ayat (2) KUHAP dan haruslah diperbaiki oleh judex juris dengan menyatakan bahwa dakwaan ke-3 sama sekali tidak terbukti;

Hal. 592 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



5. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi Tipikor) tidak menerapkan Pasal 185 ayat (1) jo Pasal 185 ayat (2) KUHAP dalam memutuskan terpenuhinya “unsur padahal diketahui atau patut diduga hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau menurut pikiran orang memberikan hadiah tersebut ada hubungan dengan jabatannya” dalam Pasal 11 Undang Undang Tipkor pada dakwaan ke-3;

Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi Tipikor) dalam mempertimbangkan unsur “padahal diketahui atau patut diduga hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau menurut pikiran orang memberikan hadiah tersebut ada hubungan dengan jabatannya”, di tingkat banding telah salah menerapkan hukum dengan memberikan pertimbangan yang keliru (halaman 479) yaitu:

Menimbang, bahwa fakta hukum pengumpulan dana oleh saksi Bahir Romsah (staff Bagian Dokumentasi dan Publikasi Hukum/PKC tahun 2006-2007), sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan di atas, mengandung dugaan bahwa si pemberi menyerahkan uang kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa melalui saksi sebagai pengumpul untuk merealisasikan perintah Pemohon Kasasi/Terdakwa, karena dalam pikiran pihak yang memberi, bahwa pihak yang menerimanya adalah seorang memiliki kekuasaan atau kewenangan yang berkaitan dengan jabatannya, yaitu Pemohon Kasasi/Terdakwa sebagai Kepala Biro Hukum

Bahwa sebagaimana diuraikan di atas, pertimbangan ini didasarkan pada keterangan saksi Bahir Romsah semata, dengan demikian sebagaimana juga telah diuraikan di atas, pertimbangan ini telah tidak menerapkan ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHAP;

Bahwa saksi-saksi yang hubungannya dengan pihak rekanan/pihak ketiga, yang dihadirkan oleh Jaksa/Penuntut Umum di persidangan adalah (1) Rina Melania Priyatna, (2) Aris Boediharjo, (3) Drs. Raj Indra Singh, (4) Triyitno Unarto, (5) Yusyapria Utama, (6) Herman Felani, (7) Iradah Hasbullah; Bahwa saksi-saksi tersebut seluruhnya hanya berhubungan dengan Gema Hukum dan Filler Hukum. Tidak ada saksi lain di luar Filler Hukum dan Gema Hukum. Seluruh saksi rekanan pihak ketiga Biro Hukum ini tidak ada satupun yang memberikan uang/hadiah/janji kepada Pemohon Kasasi bahkan dalam persidangan tertanggal 28 September 2010 dan tanggal 5 Oktober 2010 ini, Ketua Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi (Bapak Tjokorda) menyatakan bahwa saksi-saksi tersebut sama sekali tidak terkait



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemohon Kasasi (vide Berita Acara Persidangan tanggal 28 September 2010 dan tanggal 5 Oktober 2010);

Bahwa sesuai dengan transkripsi persidangan tanggal 28 September 2010 dan 5 Oktober 2010 (transkrip keterangan saksi terlampir) seluruh saksi rekanan pihak ketiga tersebut-pun menyatakan bahwa tidak pernah memberikan sesuatu kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa. Sebaliknya saksi-saksi tersebut menyatakan di persidangan, sebagai fakta yang tidak dapat dibantah lagi, saksi Norman, saksi Agusdin, saksi Bahir Romsah dan saksi Made Suardjaya terbukti menerima uang dari pihak ke-tiga (tanpa sepengetahuan Pemohon Kasasi/Terdakwa) di luar dana efisiensi yang dikumpulkan di PKC Bahir Romsah, namun faktanya sampai saat ini perkaranya tidak pernah dilimpahkan ke persidangan oleh KPK.

Bahwa selain itu sebagaimana telah diuraikan Pemohon Kasasi/Terdakwa di atas, Pemohon Kasasi tidak pernah memberikan perintah kepada saksi Bahir Romsah, yang terjadi adalah keputusan rapat. Dengan demikian judex facti (Pengadilan Tinggi Tipikor) juga telah melanggar Pasal 185 ayat (1) KUHAP. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas. Dengan demikian maka unsur "menerima hadiah atau janji" dan unsur "unsur padahal diketahui atau patut diduga hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau menurut pikiran orang memberikan hadiah tersebut ada hubungan dengan jabatannya" dari Pasal 11 Undang Undang Tipikor adalah tidak terbukti, dan oleh karena itu sudah seharusnya dinyatakan bahwa dakwaan ke-3 juga tidak terbukti.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dakwaan ke-3: Pasal 11 Undang Undang Tipikor sama sekali tidak terbukti, karena judex facti (Pengadilan Tinggi Tipikor) telah salah menerapkan hukum dalam membuktikan unsur-unsur "menerima hadiah atau janji" dan unsur "unsur padahal diketahui atau patut diduga hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau menurut pikiran orang memberikan hadiah tersebut ada hubungan dengan jabatannya" tidak menerapkan Pasal 185 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP. Oleh karena itu Pemohon Kasasi/Terdakwa memohon agar judex juris memperbaiki putusan judex facti (Pengadilan Tinggi Tipikor) tersebut dan menyatakan bahwa dakwaan ke-3 tidak terbukti.

Hal. 594 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



6. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi Tipikor) salah dalam menerapkan hukum tentang dakwaan Kumulatif yaitu yang menyangkut dakwaan Kesatu, dakwaan Kedua dan dakwaan Ketiga.

Bahwa apa yang menjadi esensi rumusan Pasal 12 huruf f (Dakwaan Kedua) dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ("Undang Undang Tipikor"), khususnya yang terkait dengan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, secara implicit sudah tertuang dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Tipikor tersebut, sebagaimana juga ternyata dalam Dakwaan Kedua dan Dakwaan Ketiga didakwakan perbuatan-perbuatan yang sudah tercakup didalam perbuatan-perbuatan dalam Dakwaan Kesatu. Oleh karena itu, sekiranya (-quod-non-) Dakwaan Kesatu telah terbukti, maka tidak perlu lagi dipertimbangkan Dakwaan Kedua dan Ketiga, sebagaimana juga telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tipikor. Dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Tipikor sepanjang mengenai Dakwaan Kedua dan Dakwaan Ketiga harus dibatalkan/diperbaiki.

7. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi Tipikor) salah dalam menerapkan hukum acara terkait pembebanan uang pengganti kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa sebesar Rp 4.630.009.375,-.

Bahwa dalam pertimbangannya, *judex facti* (Pengadilan Tinggi Tipikor) mengambil alih seluruh pertimbangan *Judex Factie* Pengadilan Tipikor, khususnya terkait dengan dakwaan ke-1 Primair: Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor (vide halaman 468-469 putusan *judex facti* (Pengadilan Tinggi Tipikor));

Bahwa terkait uang pengganti, *judex facti* (Pengadilan Tinggi Tipikor) memberikan pertimbangan sebagai berikut:

"...Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dan harus dikesampingkan, karena terdakwa telah terbukti memperoleh uang hasil korupsi, dan merugikan keuangan negara, meskipun sebagian uang tersebut dinikmati orang lain, sehingga Terdakwa dibebani untuk membayar uang pengganti tersebut sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 31 tahun 1999 (halaman 455 putusan)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding menolak memori banding tersebut di atas, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah benar dalam mempertimbangkan jumlah uang pengganti kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan jumlah harta yang diperoleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dari tindak pidana korupsi,



sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 31 Tahun 1999 (halaman 456)

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga dijadikan dasar bagi Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini, oleh karenanya harus dikuatkan” (halaman 480)

Bahwa kedua pertimbangan pertama di atas sangat bertentangan satu sama lain, apabila dilihat dalam memberikan pertimbangan yang sama yaitu mengenai “Uang Pengganti” *judex facti* (Pengadilan Tinggi Tipikor) memberikan pertimbangan yang berbeda yaitu menyatakan: (1) terdakwa telah terbukti memperoleh uang hasil korupsi, dan merugikan keuangan negara, meskipun sebagian uang tersebut dinikmati orang lain, sehingga Pemohon Kasasi/Terdakwa dibebani untuk membayar uang pengganti tersebut dan (2) jumlah uang pengganti kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan jumlah harta yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi.

Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa Pasal 18 UU Tipikor, menyangkut uang pengganti ini sama sekali tidak didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, seharusnya Pemohon Kasasi tidak dihukum membayar uang pengganti karena tidak ada dalam dakwaan. Kesalahan penerapan hukum ini terus berlanjut, di mana *facti* (Pengadilan Tinggi Tipikor) memberikan pertimbangan yang berbeda-beda mengenai uang pengganti sebagaimana diuraikan dalam angka (3) di atas. Oleh karena itu Pemohon Kasasi akan berpijak pada hasil fakta di persidangan yang menyatakan bahwa uang tersebut tidak dinikmati seluruhnya oleh Pemohon Kasasi, Pemohon Kasasi/Terdakwa telah dapat membuktikan secara jelas, siapa-siapa saja penerima uang tersebut, jelas ada di mana penerima-penerima uang tersebut atau dengan kata lain uang tersebut dapat dimintakan kembali dan faktanya memang sudah ada yang mengembalikan namun tidak dikurangkan dari uang pengganti yang dibebankan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa (vide pengembalian oleh Herman Felani, pengembalian oleh Made Suardjaya, DR.Ritola Tasmaya, MPH, Moerdiman, RM,SH,Msi, Noerwenda SH, Mulyanto, H. Ronny Sastro, Kiyo, Radiah, SH, Budi Hartono, SH, Kadrin, Sri Rahayu, Bernardo Yulianto,SH, vide Barang Bukti Jaksa Penuntut Umum nomor 299 s/d 303) selain itu masih terdapat banyak pihak lagi yang dapat ditagih atau diminta untuk mengembalikan apa yang sudah pernah diterimanya;



Bahwa dalam halaman 465 pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor menyatakan bahwa:

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa telah menikmati uang dari Kerugian Keuangan Negara tersebut di atas, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 4.630.009.375,- (empat milyar enam ratus tiga puluh juta sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor menguraikan asal dari uang pengganti sebesar Rp 4.630.009.375,- dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari keseluruhan dana yang diterima oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa yakni: untuk pengadaan Filler Hukum Tahun 2006 dan Tahun 2007 sebesar Rp 471.161.875,- (empat ratus tujuh puluh satu juta seratus enam puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah), untuk Pengadaan Gema Hukum Tahun 2006 dan Tahun 2007 sebesar Rp 625.042.500 (dua ratus empat puluh dua juta sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan dari Anggaran, Honorarium, Transport, dan Makan Tenaga Ahli sebesar Rp 3.533.805.000,- (tiga milyar lima ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus lima ribu rupiah), maka jumlahnya sebesar Rp 4.630.009.375 (empat milyar enam ratus tiga puluh juta sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah).

Bahwa apabila dicermati, khusus untuk Filler Hukum dan Gema Hukum, fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah: Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak pernah menerima uang dari rekanan pihak ketiga baik untuk Kegiatan Filler Hukum 2006 dan tahun 2007 maupun untuk kegiatan Gema Hukum tahun 2006 dan 2007. Dalam persidangan terbukti bahwa yang mengatur mengenai seluruh kegiatan Filler Hukum adalah R. Norman, sedangkan untuk Gema Hukum adalah Agusdin Susanto. Hal ini sesuai dengan keterangan saksi-saksi: R. Norman, Triyitno Unarto, Aris Boediharjo, Rina Melania Priyatna, Herman Felani, Raj Indra Singh, Yusyapria Utama, Iradah Hasbollah dan berdasarkan keterangan Pemohon Kasasi/Terdakwa. Dengan demikian pertimbangan bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa menerima dan menikmati uang yang berasal dari Filler Hukum dan Gema Hukum adalah pertimbangan yang keliru dan harus diperbaiki oleh Majelis Hakim di tingkat Kasasi.

Kemudian, mengenai uang yang berasal dari mata Anggaran, Honorarium, Transportasi, dan Makan Tenaga Ahli. Majelis Hakim ternyata juga telah membuat kekeliruan ketika menyatakan bahwa Terdakwa telah menerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah uang yang berasal dari mata Anggaran, Honorarium, Transportasi, dan Makan Tenaga Ahli sebesar Rp 4.126.000.000,- dan hanya dikurangi dengan dana yang diberikan kepada saksi Agusdin Susanto sebesar Rp 512.162.000,- dan saksi Bahir Romsah sebesar Rp 80.032.000,- sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa sebagai sisanya yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp 3.533.805.000,-. Seharusnya berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum, judex facti (Pengadilan Tipikor dan Pengadilan Tinggi Tipikor) dapat dengan mudah mengetahui bahwa telah ada pengembalian yang dilakukan oleh Made Suardjaya, DR.Ritola Tasmaya, MPH, Moerdiman, RM,SH,Msi, Noerwenda SH, Mulyanto, H. Ronny Sastro, Kiyo, Radiah, SH, Budi Hartono, SH, Kadrin, Sri Rahayu, Bernardo Yulianto,SH, vide Daftar Barang Bukti Jaksa/Penuntut Umum Nomor 299 s/d 303);

Bahwa terkait dengan pencairan dana dari mata Anggaran, Honorarium, Transportasi, dan Makan Tenaga Ahli yang dimaksudkan di sini adalah merupakan pencairan dana untuk penanganan perkara sebagaimana yang dimaksud dalam SK Gubernur DKI Jakarta No. 532/2001 (yang selama ini dikenal sebagai “uang Map”). Setiap pencairan dana telah dibagikan kepada para staf pegawai/pejabat di lingkungan Biro Hukum, oleh karena itu adalah adil apabila pembayaran yang dilakukan secara faktual, maka dapat dilakukan penagihan kembali sebagaimana telah dilakukan oleh beberapa staf pegawai/pejabat Biro Hukum. Dengan demikian kerugian negara yang menjadi tanggung jawab Pemohon Kasasi/Terdakwa harus dikurangi dengan apa yang dibayarkan kepada staf pegawai/pejabat di Biro Hukum yaitu antara lain yang diterima oleh Agusdin, Bahir Romsah, Ritola Tasmaya (sudah mengembalikan vide barang bukti Jaksa/Penuntut Umum nomor 300), dan H. Moerdhiman (sudah mengembalikan vide barang bukti Jaksa Penuntut Umum nomor 300), dan para staf pegawai sesuai dengan daftar barang bukti nomor 273 huruf a s/d e m dan surat pernyataan dari pihak-pihak yang menyatakan menerima uang penanganan perkara tersebut (vide daftar barang bukti Jaksa/Penuntut Umum No. 303) (yang rinciannya telah menjadi lampiran pledoi dan kami lampirkan kembali sebagai lampiran memori kasasi ini-Lampiran 2);

Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam Pledoi Tim Advokat Jurnal Effendi Siahaan dalam halaman 124 s/d 125 dan dihubungkan dengan lampiran pledoi berupa Bukti Tambahan-2 (vide Lampiran 2) yang tidak lain merupakan kutipan dari Daftar Barang Bukti Jaksa/Penuntut Umum Nomor

Hal. 598 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

273 huruf a s/d e m dapat disebutkan satu per-satu siapa saja penerima dana yang berasal dari:

- (1) Pencairan tanggal 25 Agustus 2006 untuk insentif perkara No. 2086 K/Pdt/2004 jo. 63/Pdt.G/2002/PN.JKT.Sel sebesar Rp 766.310.000,- dikurangi dengan yang diterima Terdakwa/ Pemohon Banding sebesar Rp 82.400.000,- sehingga jumlahnya menjadi Rp 683.910.000,-;
- (2) Pencairan tanggal 6 Juni 2007 untuk insentif perkara No. 182/Pdt.G/2005/PN.Jkt.Barat sebesar Rp 843.500.000,- dikurangi dengan yang diterima Terdakwa/Pemohon Banding sebesar Rp 70.000.000,- sehingga jumlahnya menjadi Rp 773.500.000,-;
- (3) Pencairan tanggal 21 September 2007 untuk insentif perkara No. 476/Pdt.G/2005/PN.Jkt.Brt sebesar Rp 740.000.000,- dikurangi dengan yang diterima Terdakwa/Pemohon Banding sebesar Rp 50.000.000,- sehingga jumlahnya menjadi Rp 690.000.000,-.

("Lampiran 2" - kutipan dari Barang Bukti JPU Nomor 273 huruf a s/d e m)

Berdasarkan daftar barang bukti Jaksa/ Penuntut Umum No. 273 huruf a s/d e m, maka pertimbangan Judex Factie yang menyatakan Pemohon Kasasi menikmati dana sejumlah Rp 4.126.000.000,- (jumlah sebelum dikurangi untuk Agusdin dan Bahir Romsah) adalah tidak benar, paling tidak masih ada beberapa nilai/jumlah pengurang lagi, yaitu sebesar Rp 2.147.410.000,- (total jumlah dari Rp 683.910.000,- + Rp 773.500.000,- + Rp 690.000.000,- lihat lampiran 2);

Bahwa apabila judex facti tidak melakukan kekeliruan tersebut maka pengurang uang pengganti tersebut tidak hanya berasal dari Agusdin dan Bahir Romsah saja melainkan dari jumlah yang tertera dalam Daftar Barang Bukti No. 273 huruf a s/d e m, yaitu sebesar Rp 2.147.410.000,-. Apabila dikurangkan dari uang yang berasal dari mata Anggaran, Honorarium, Transportasi, dan Makan Tenaga Ahli maka seharusnya Judex Factie mempertimbangkannya: sebesar Rp 4.126.000.000,- dikurangi dengan Rp 2.147.410.000,- = Rp 1.978.590.000,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh satu juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Bahwa meskipun demikian nilai sebesar Rp 1.978.590.000,- tidaklah adil apabila seluruh pencairan mata Anggaran, Honorarium, Transportasi, dan Makan Tenaga Ahli dibebankan seluruhnya hanya kepada Pemohon Kasasi semestinya juga kepada Agusdin Susanto dan Bahir Romsah. Karena pencairan tersebut dilakukan terkait dengan adanya SK Gub DKI Jakarta No. 532/2001 dan sesuai dengan fakta persidangan seluruh pengadministrasian

Hal. 599 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari mulai usulan, pencairan dana dan pembagian uang pencairan mata Anggaran, Honorarium, Transportasi, dan Makan Tenaga Ahli (pencairan dana/insentif penanganan perkara berdasarkan SK Gub DKI Jakarta No. 532/2001) tersebut dilakukan oleh Agusdin Susanto dan Bahir Romsah saja. Hal ini disebabkan karena Agusdin Susanto dan Bahir Romsah-lah yang mengusulkan dan menyatakan bahwa pencairan dana untuk insentif perkara adalah sah sesuai dengan SK Gub No. 532/2001 dan sudah selalu dilakukan demikian sejak dahulu (vide keterangan Terdakwa dan Bahir Romsah). Terdakwa/Pemohon Kasasi hanya diminta untuk menandatangani permohonan pencairan uang insentif perkara atau yang lebih dikenal istilahnya di lingkungan Biro Hukum sebagai “uang map” yang selalu dibagi-bagikan setiap ada perkara yang menang dan setelah permohonan dicairkan oleh Kas Daerah, uang hasil pencairan tersebut seluruhnya diterima oleh Agusdin Susanto dan Bahir Romsah. Agusdin Susanto dan Bahir Romsah-lah yang mengadministrasikan uang tersebut sehingga seluruhnya diterima oleh pihak-pihak yang disebutkan dalam Daftar Barang Bukti No. 273 huruf a s/d e m.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terbukti bahwa judex facti telah tidak menerapkan hukum dengan menyatakan bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi telah menikmati uang sejumlah Rp 4.630.009.375,- karena: (1) berdasarkan fakta persidangan, Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak pernah menerima uang dari rekanan pihak ke-3 sehingga tidak pada tempatnya kerugian dari Gema Hukum dan Filler Hukum dibebankan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa dan (2). Selain itu Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak menikmati seluruh uang pencairan dari mata Anggaran, Honorarium, Transportasi, dan Makan Tenaga Ahli karena pengurang yang sebenarnya masih ada adalah sebesar Rp 2.147.410.000,-. Sehingga yang masih harus dimintakan pertanggungjawaban khususnya terkait pencairan mata Anggaran, Honorarium, Transportasi, dan Makan Tenaga Ahli adalah Rp 1.978.590.000,-. Oleh karena itu, Pemohon Kasasi/Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Agung di Mahkamah Agung RI sebagai judex juris untuk memperbaiki putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor, khusus mengenai uang pengganti yang adalah tidak benar dinikmatinya sendiri tersebut.

8. Penghukumkan tentang Uang Pengganti Yang Berat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di dalam dakwaan, Pemohon Kasasi/Terdakwa didakwa bersama-sama dengan Agusdin Susanto, R. Norman, Herman Felani, Raj Indra Singh, Aris Boediarjo, Rina Melania Priyatna, Yusyapria Utama, Ir. Ratnaningsih, Triyitno Unarto. Sedangkan dalam pertimbangan Judex Factie Pengadilan Tipikor, Pemohon Kasasi dinyatakan terbukti bersama-sama dengan R. Norman, Agusdin Susanto, Made Suardjaya, Bahir Romsah melakukan tindak pidana korupsi. Sehingga dengan demikian, apabila seluruh perhitungan kerugian negara dibebankan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa maka Pemohon Kasasi/Terdakwa nantinya yaitu Agusdin Susanto, R. Norman, Bahir Romsah, Made Suardjaya, Herman Felani, Raj Indra Singh, Aris Boediarjo, Rina Melania Priyatna, Yusyapria Utama, Ir. Ratnaningsih, Triyitno Unarto dll. tidak lagi akan dibebankan Uang Pengganti atas kerugian keuangan negara karena sudah dibebankan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa. Oleh karena itu adalah adil apabila Uang Pengganti dibebankan juga kepada mereka bersama, sejumlah Rp 4.630.009.375,-, atau setidaknya untuk Pemohon Kasasi/Terdakwa dibebankan sampai dengan jumlah Rp 1.389.085.353,- sebagaimana telah diakui oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam persidangan dan dalam lampiran Pembelaan Pribadinya (Lampiran 3).

9. Pidana Yang Dijatuhkan Terlalu Tinggi dan Terlalu Berat

Bahwa pidana yang dijatuhkan judex facti yaitu 9 (sembilan) tahun penjara dan menjatuhkan denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair selama 2 (dua) bulan kurungan serta uang pengganti sebesar Rp 4.630.009.375,- sangat berat dan terlalu tinggi bagi Pemohon Kasasi/Terdakwa. Pemohon Kasasi/Terdakwa sejak awal persidangan telah meminta maaf karena ketidak-mengertiannya tentang mekanisme anggaran di Biro Hukum dan telah mengakibatkan kerugian negara. Oleh karena itu melalui upaya kasasi ini, Pemohon Kasasi/Terdakwa meminta maaf atas perbuatan (terlampir) dan mohon keringanan penghukuman dan keringanan atas hukuman pembayaran uang pengganti dikarenakan terlalu berat bagi Pemohon Kasasi/Terdakwa.

Terlampir, sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Agung untuk menilai permasalahan ini dengan obyektif, di bawah ini kami sampaikan data putusan perkara KPK di tahun 2009 dan 2010 (Sumber: website KPK dan Laporan Tahunan KPK/www.kpk.go.id), sebagai berikut :

- Perkara Tipikor dengan Terdakwa Mantan Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah

Hal. 601 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa/Penuntut Umum (JPU) Tipikor mendakwa Bachtiar Chamsyah dengan Pasal 2 atau Pasal 3 Undang Undang Tipikor. Dalam Tuntutannya tanggal 8 Maret 2011 Jaksa/Penuntut Umum Tipikor menuntut hukuman penjara 3 tahun penjara. Bachtiar terbukti menyalahgunakan wewenang dengan melakukan penunjukan langsung tiga proyek yaitu kasus korupsi sarung, korupsi pengadaan mesin jahit dan sapi di Kementerian Sosial. Bachtiar selaku Mensos telah memerintahkan kuasa pengguna anggaran dan pimpinan bagian proyek di Kemensos untuk memenangkan pihak tertentu sebagai pelaksana proyek pengadaan. Hal tersebut bertentangan dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang dan Jasa Pemerintah. Penunjukan langsung itu telah menguntungkan berbagai pihak dan merugikan keuangan negara sekitar Rp 35,7 miliar;

- Perkara Tipikor dengan Terdakwa Bupati Boven Digoel, Yusak Yaluwo Terdakwa kasus korupsi penyelewengan dana APBD Kabupaten Boven Digoel, Papua, Yusak Yaluwo, divonis 4,5 tahun penjara pada tanggal 3 November 2010. Terdakwa telah bersalah dalam perkara korupsi yang mengakibatkan kerugian negara Rp 66,7 miliar. Yusak terbukti 46 kali mengambil dana anggaran dari pos anggaran bantuan sosial APBD Boven Digoel hingga Rp 64,2 miliar. Dana tersebut sebenarnya dialokasikan untuk membantu program pengentasan kemiskinan. Yusak dijerat Pasal 2 ayat 1 Undang Undang Tipikor. Yusak juga dikenakan hukuman membayar uang pengganti Rp 45,7 miliar.

- Perkara Tipikor dengan Terpidana JIMMY RIMBA ROGI

Perkara Tipikor atas nama terpidana Jimmy Rimba Rogi adalah sehubungan dengan Tipikor penyalahgunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Pemerintah Kota Manado TA 2006. Jimmy Rimba Rogi dihukum pidana penjara 7 tahun, Denda: Rp200.000.000 subsidair 3 bulan penjara dan uang pengganti sebesar Rp 64.137.075.000 subsidair 2 tahun penjara.

- Perkara Tipikor dengan Terpidana SURYADI SENTOSA

Perkara Tipikor atas nama Suryadi Sentosa adalah sehubungan dengan pembangunan renovasi Pasar Sentral Supiori, terminal induk, rumah dinas pejabat eselon, dan renovasi Pasar Sentral Supiori untuk Kantor Cabang Bank Papua yang menggunakan dana APBD Kab. Supiori Prov. Papua TA. 2006-2008 Kab. Supiori. Suryadi Sentosa dihukum pidana Penjara 9 tahun

Hal. 602 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Denda Rp 100.000.000 subsidair 5 bulan penjara dan uang pengganti Rp 27.889.541.095, subsidair 4 tahun penjara.

- Perkara Tipikor dengan Terpidana IZZAT HUSEIN

Perkara atas nama terpidana sehubungan dengan tindak pidana korupsi ruislag tanah dan bangunan eks kantor Bupati Lombok Barat tahun 2004.

Terpidana Izzat Husein dihukum Pidana penjara 4 tahun, Denda: Rp 200.000.000,00 subsidair 3 bulan penjara dan uang pengganti Rp 34.767.159.818,55 subsidair 2 tahun penjara.

apabila dibandingkan dengan kasus-kasus di atas, perkara Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak ada apa-apanya, namun apabila dilihat dari hukuman yang dijatuhkan judex facti dalam perkara a-quo terhadap Pemohon Kasasi/Terdakwa dibandingkan para Terpidana di atas, terlihat amat sangat berat yang ditanggungkan terhadap Pemohon Kasasi/Terdakwa.

Bahwa sekiranya Mahkamah Agung berpendapat (-quod-non-) bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa terbukti bersalah, adalah tidak berlebihan apabila Pemohon Kasasi/ Terdakwa dijatuhi hukuman yang lebih ringan dan tidak terlalu berat dengan memperbandingkan berat hukuman dengan putusan-putusan perkara tersebut di atas. Juga didasarkan kepada kemanusiaan, juga dimana Pemohon Kasasi/Terdakwa telah mengabdikan kepada Negara/Pemda DKI Jakarta selama 29 tahun, dan masih memiliki tanggung jawab keluarga.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan-alasan ke-1 sampai dengan ke-8 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum yaitu judex facti telah memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f dan ayat (2) KUHAP yakni keharusan memuat pasal-pasal yang menjadi dasar hukum dari putusan, demikian pula tentang Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak menyangkut unsur delik melainkan mengenai pidana tambahan, sedangkan dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif bukan dakwaan subsidairitas, oleh karena itu tidak ada salahnya untuk dibuktikan lagi satu persatu walaupun dinyatakan telah terbukti dalam dakwaan Primair, dengan demikian perbuatan Terdakwa mempunyai hubungan kausal dengan kerugian keuangan Negara, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

mengenai alasan-alasan ke-9 :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena mengenai be rat ringannya pidana merupakan wewenang judex facti yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18, Pasal 12 huruf f, Pasal 11 Undang Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JORNAL EFFENDI SIAHAAN** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 5 Juli 2011** oleh **Dr.Artidjo Alkostar, SH.LL.M** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Krisna Harahap, SH.MH.** dan **Syamsul Rakan Chaniago, SH.,MH.** Hakim-Hakim Tipikor Ad. Hoc pada Mahkamah Agung, masing-masing sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Hal. 604 dari hal. 605 Put. No 926 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis besarta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana Sondang Panjaitan, SH.,MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum.

Hakim Hakim Anggota :

Ttd.

Prof. Dr. Krisna Harahap,SH.MH.

Ketua,

Ttd.

Dr. Artidjo Alkostar, SH.LL.M

Ttd.

Syamsul Rakan Chaniago, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Ttd.

Mariana Sondang Panjaitan, SH.,MH

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

SUNARYO, SH. MH.

NIP. 040 044 338